



**BUPATI KUNINGAN**  
**PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR 277 TAHUN 2022

TENTANG

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan;
- b. bahwa Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dimaksud perlu menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua! berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua! pada Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akutansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.05/2017;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena jabatannya

mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.

5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
10. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
12. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
13. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
14. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.



15. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
16. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan asli daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
17. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD.
18. Bendahara Penerimaan PPKD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang bersumber dari transaksi PPKD.
19. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
20. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD.
21. Bendahara Pengeluaran PPKD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan transaksi PPKD.
22. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya
23. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

24. SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.
25. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan daerah.
26. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
27. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
28. Basis Kas Menuju Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan berbasis kas serta mengakui aset, utang dan ekuitas dana berbasis akrual.
29. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat sebagai KAPD merupakan dasar pengakuan, pengukuran, pencatatan dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta penyajian laporan keuangan.
30. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
31. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.

32. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
33. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
34. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
35. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
36. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
37. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
38. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
39. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
40. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

41. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
42. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
43. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
44. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
45. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
46. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.
47. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
48. Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang dan yang lain yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan.

49. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

## BAB II

### PRINSIP UMUM

#### Pasal 2

Prinsip umum pelaksanaan SAPD, adalah :

1. SAPD dilaksanakan secara tertib, konsisten, bertanggungjawab dan taat pada peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan suatu proses yang efisien, efektif dan transparan;
2. setiap SKPD, SKPKD dan atau pihak yang terkait dan atau bertugas dalam pelaksanaan SAPD wajib menerima, membuat, menyampaikan atau mendistribusikan, menyimpan dan atau memelihara setiap dokumen dan atau bukti-bukti transaksi yang menjadi tanggungjawabnya; dan
3. pelaksanaan SAPD dilakukan mengacu kepada KAPD.

#### Pasal 3

- (1) Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah penanggungjawab umum pelaksanaan SAPD.
- (2) Tanggungjawab pelaksanaan SAPD dilimpahkan kepada:
  - a. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah;
  - b. PPKD selaku Bendahara Umum Daerah atas transaksi keuangan, aset, utang, ekuitas, pendapatan-LO, dan beban termasuk transaksi pendapatan-LRA, belanja, transfer, pembiayaan yang berada dalam tanggungjawabnya; dan
  - c. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran atas transaksi keuangan, aset, utang, ekuitas, pendapatan-LO, dan beban termasuk transaksi pendapatan-LRA dan belanja, yang berada dalam tanggungjawabnya.

BAB III  
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) SAPD dilaksanakan untuk menyusun Laporan Keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan akuntabilitas keuangan.
- (2) Pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Kepala SKPD dan PPKD sebagai entitas akuntansi menyusun Laporan Keuangan SKPD dan PPKD yang disampaikan kepada Fungsi Akuntansi PPKD untuk digabung menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi :
  - a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
  - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
  - c. Neraca;
  - d. Laporan Operasional (LO);
  - e. Laporan Arus Kas (LAK);
  - f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
  - g. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) meliputi :
  - a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
  - b. Neraca;
  - c. Laporan Operasional (LO);
  - d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
  - e. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pasal 6

SAPD dikelompokkan ke dalam 5 (lima) kelompok prosedur yaitu :

- a. Prosedur Akuntansi secara Umum;
- b. Prosedur Akuntansi di SKPD;
- c. Prosedur Akuntansi di SKPKD yang mencatat transaksi Pemerintah Daerah dan Kas Daerah (SKPKD-PPKD);
- d. Prosedur Akuntansi di SKPKD yang mencatat transaksi Kuasa Bendahara Umum Daerah (SKPKD Kuasa BUD); dan

- e. Prosedur Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan.

#### Pasal 7

SAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan prosedur sistem akuntansi yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan secara umum, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 8

SAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diawali oleh Pengantar Sistem dan Prosedur Akuntansi di SKPD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini dan terdiri dari :

1. Sistem dan Prosedur Akuntansi Pencatatan Anggaran SKPD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-A Peraturan Bupati ini;
2. Sistem dan Prosedur Akuntansi Pendapatan SKPD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-B Peraturan Bupati ini;
3. Sistem dan Prosedur Akuntansi Pendapatan SKPD di Khusus di SKPKD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-C Peraturan Bupati ini;
4. Sistem dan Prosedur Akuntansi Beban dan Belanja SKPD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-D Peraturan Bupati ini;
5. Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset SKPD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-E Peraturan Bupati ini;
6. Sistem dan Prosedur Akuntansi Kewajiban SKPD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-F Peraturan Bupati ini; dan
7. Sistem dan Prosedur Akuntansi Koreksi dan Penyesuaian SKPD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-G Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 9

SAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diawali oleh Pengantar Sistem dan Prosedur Akuntansi di SKPKD yang mencatat transaksi Pemerintah Daerah dan Kas Daerah (SKPKD-PPKD), sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini dan terdiri dari :

1. Sistem dan Prosedur Akuntansi Pencatatan Anggaran PPKD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III-A Peraturan Bupati ini;

2. Sistem dan Prosedur Akuntansi Pendapatan PPKD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III-B Peraturan Bupati ini;
3. Sistem dan Prosedur Akuntansi Beban, Belanja dan Transfer PPKD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III-C Peraturan Bupati ini;
4. Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset PPKD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III-D Peraturan Bupati ini;
5. Sistem dan Prosedur Akuntansi Kewajiban PPKD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III-E Peraturan Bupati ini;
6. Sistem dan Prosedur Akuntansi Konsolidator PPKD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III-F Peraturan Bupati ini; dan
7. Sistem dan Prosedur Akuntansi Koreksi dan Penyesuaian PPKD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III-G Peraturan Bupati ini;

#### Pasal 10

SAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diawali oleh Pengantar Sistem dan Prosedur Akuntansi di SKPKD yang mencatat transaksi Kuasa Bendahara Umum Daerah (SKPKD Kuasa BUD), sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini dan terdiri dari :

1. Sistem dan Prosedur Akuntansi Pendapatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV-A Peraturan Bupati ini;
2. Sistem dan Prosedur Akuntansi Penerimaan Pembiayaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV-B Peraturan Bupati ini;
3. Sistem dan Prosedur Akuntansi Belanja dan Transfer, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV-C Peraturan Bupati ini;
4. Sistem dan Prosedur Akuntansi Pengeluaran Pembiayaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV-D Peraturan Bupati ini;
5. Sistem dan Prosedur Akuntansi Koreksi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV-E Peraturan Bupati ini; dan
6. Sistem dan Prosedur Akuntansi Lain-lain, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV-F Peraturan Bupati ini.



## Pasal 11

SAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e diawali oleh Pengantar Sistem dan Prosedur Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini dan terdiri dari :

1. Sistem dan Prosedur Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V-A Peraturan Bupati ini;
2. Sistem dan Prosedur Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan SKPKD yang mencatat transaksi Pemerintah Daerah dan Kas Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V-B Peraturan Bupati ini;
3. Sistem dan Prosedur Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan SKPKD yang mencatat transaksi Kuasa Bendahara Umum Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V-C Peraturan Bupati ini; dan
4. Sistem dan Prosedur Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V-D Peraturan Bupati ini.

## Pasal 12

- (1) Dalam upaya peningkatan kualitas pelaksanaan SAPD berdasarkan SAP berbasis akrual maka pemerintah daerah:
  - a. dalam hal kodifikasi akun dokumen anggaran belum sesuai BAS, pemerintah daerah melakukan konversi dalam penyajian LRA;
  - b. menyusun BAS khususnya untuk level 4 (empat) yang menunjukkan kode obyek dan level 5 (lima) yang menunjukkan kode rincian obyek; dan
  - c. menyajikan kembali LRA, Neraca, dan LAK tahun sebelumnya pada tahun pertama penerapan SAP berbasis akrual.
- (2) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dapat menyusun petunjuk teknis dan melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan SAPD berdasarkan SAP berbasis akrual sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya secara parsial ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan  
pada tanggal 20 Juli 2022

BUPATI KUNINGAN,

  
ACEP PURNAMA

Diundangkan di Kuningan  
pada tanggal 20 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUNINGAN,

  
DIAN RACHMAT YANUAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2022 NOMOR 277

## **SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI SECARA UMUM DI PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN**

Bagian ini menjelaskan Sistem dan Prosedur Akuntansi secara umum di Pemerintah Kabupaten Kuningan untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mencatat transaksi pemerintah daerah (PPKD) dan yang mencatat transaksi Kas Daerah, dan Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD).

### **KEBIJAKAN UMUM**

Sistem dan prosedur akuntansi Pemerintah Kabupaten Kuningan ini meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Sistem dan prosedur Pemerintah Kabupaten Kuningan merupakan salah satu sarana untuk menunjang proses pertanggungjawaban APBD. Sistem dan prosedur akuntansi ini disusun berdasarkan kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

Dalam struktur pengelolaan keuangan daerah, terdapat dua jenis satuan kerja yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Diluar kedua satuan kerja tersebut ada Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) yang sebetulnya secara struktur berada di dalam SKPKD, namun untuk meningkatkan kualitas pengendalian internal dibuat sebagai satuan kerja tersendiri dalam sistem akuntansi di Pemerintah Kabupaten Kuningan. Meskipun ketiga satuan kerja tersebut memiliki perbedaan dalam kewenangan, dalam arsitektur Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) memiliki sifat yang sama yaitu sebagai entitas akuntansi.

Akuntansi di SKPD merupakan pencatatan realisasi DPA-SKPD yang dilaksanakan untuk menghasilkan Laporan Keuangan berikut :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
5. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).

Akuntansi di SKPKD-PPKD merupakan pencatatan realisasi DPA-PPKD dan pencatatan Kas Daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan Laporan Keuangan berikut :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
3. Neraca;
4. Laporan Operasional (LO);
5. Laporan Arus Kas (LAK);
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
7. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).

Sebagaimana entitas akuntansi lain, akuntansi Kuasa BUD juga menyusun Laporan Keuangan yang terdiri atas:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
3. Neraca;
4. Laporan Operasional (LO);
5. Laporan Arus Kas (LAK);
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

## **PIHAK-PIHAK TERKAIT**

Berbagai pihak fungsi yang terkait dalam proses akuntansi baik di tingkat SKPD maupun SKPKD (PPKD dan Kuasa BUD) secara umum adalah sebagai berikut :

1. Wajib Pajak Daerah/Wajib Retribusi Daerah
2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
3. Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran di SKPD dan Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran PPKD;
4. Pengurus Barang di SKPD;
5. Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN);
6. Kantor Pelayanan Kas Negara (KPKN);
7. Pemerintah Lain selain Pemerintah Kabupaten Kuningan;
8. Pihak Lain seperti masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan pihak ketiga;
9. Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD/PPK-SKPKD/Kuasa BUD/Fungsi Akuntansi Pemerintah Daerah;
10. Pejabat Penatausahaan Keuangan-SKPD (PPK-SKPD)/Pejabat Penatausahaan Keuangan-SKPKD (PPK-SKPKD);
11. Kepala Fungsi Akuntansi Pemerintah Daerah;
12. Pengguna Anggaran;
13. Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD);
14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD/Bendahara Umum Daerah (BUD); dan
15. Kepala Daerah (KDH).

## **BUKU DAN ATAU FORMULIR YANG DIGUNAKAN**

Secara umum dokumen-dokumen yang digunakan dalam pelaksanaan prosedur akuntansi pada entitas akuntansi SKPD maupun SKPKD (PPKD dan Kuasa BUD) terdiri dari :

1. Buku Jurnal Umum (JU)

Merupakan buku jurnal yang digunakan untuk melakukan pencatatan akuntansi atas transaksi non kas pada basis kas (pencatatan anggaran) dan transaksi basis akrual terkait penyusunan LO dan Neraca.

2. Buku Jurnal Penerimaan Kas (JM)

Merupakan buku jurnal yang digunakan untuk melakukan pencatatan akuntansi atas transaksi penerimaan kas yang berasal dari transaksi penerimaan pendapatan dan penerimaan pembiayaan. Pada umumnya buku jurnal penerimaan kas digunakan untuk mencatat transaksi basis kas terkait penyusunan LRA dan LAK.

3. Buku Jurnal Pengeluaran Kas (JK)

Merupakan buku jurnal yang digunakan untuk melakukan pencatatan akuntansi atas transaksi pengeluaran kas untuk transaksi pengeluaran belanja dan transfer, serta pengeluaran pembiayaan. Pada umumnya buku jurnal pengeluaran kas digunakan untuk mencatat transaksi basis kas terkait penyusunan LRA dan LAK.

4. Buku Jurnal Koreksi (Jk)

Merupakan buku jurnal yang digunakan untuk melakukan pencatatan akuntansi penyesuaian khususnya atas transaksi-transaksi koreksi pendapatan, belanja, beban, transfer, pembiayaan, aset dan kewajiban.

5. Buku Jurnal Penyesuaian (Jp)

Merupakan buku jurnal yang digunakan untuk melakukan pencatatan akuntansi penyesuaian khususnya atas transaksi-transaksi pengakuan persediaan (metode periodik), penyusutan aset tetap, amortisasi aset tak berwujud, beban dibayar dimuka dan pendapatan diterima dimuka.

6. Buku Jurnal Penutup (JPn)

Merupakan buku jurnal yang digunakan untuk menutup akun temporer. Ada beberapa jurnal penutup yang dapat disusun yaitu:

- a. Buku Jurnal Penutup LRA, yang digunakan untuk menutup akun-akun estimasi pendapatan, apropirasi belanja dan transfer, estimasi perubahan SAL, pendapatan-LRA, belanja, dan transfer setelah selesai menyusun LRA;
- b. Buku Jurnal Penutup LO, yang digunakan untuk menutup akun-akun pendapatan-LO dan beban setelah selesai menyusun LO; dan
- c. Buku Jurnal Penutup Akhir, yang digunakan untuk menutup akun surplus/(defisit)-LO untuk menyusun Neraca.

7. Buku Besar (BB)

Merupakan buku yang digunakan untuk menampung pencatatan hasil posting transaksi dari buku jurnal. Buku besar ini merupakan pencatatan akuntansi atas seluruh transaksi untuk suatu rekening/akun per jenis atau obyek. Jadi setiap rekening/akun per jenis atau objek mempunyai buku besar tersendiri.

8. Buku Besar Pembantu (BP)

Buku besar dapat dilengkapi dengan buku besar pembantu sebagai alat uji silang dan kelengkapan informasi rekening/akun tertentu. Buku besar pembantu berisi rincian akun (rincian obyek) yang telah dicatat dalam buku besar. Jika dirasakan informasi dalam buku besar sudah mencukupi maka buku besar pembantu tidak perlu dibuat lagi.

9. Neraca Saldo (NS)

Merupakan formulir yang mencatat nilai saldo setiap rekening/akun per rincian objek sehingga diketahui jumlah total dari seluruh rekening/akun.

KERANGKA SISTEM

Secara umum proses akuntansi di SKPD dan SKPKD (PPKD dan Kuasa BUD) dimulai saat Tenaga Akuntansi PPK-SKPD/PPK-SKPKD/Kuasa BUD menerima bukti-bukti transaksi dari kepala daerah, pengguna anggaran, bendahara SKPD/PPKD melalui prosedur atau mekanisme penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban bendahara dan pengurus barang, pemerintah lain, dan pihak lain. Pada saat bukti transaksi keuangan tersebut telah diterima maka Tenaga Akuntansi PPK-SKPD/PPK-SKPKD/Kuasa BUD kemudian melakukan pencatatan akuntansi dalam buku jurnal terkait. Jadi pencatatan akuntansi untuk setiap transaksi dilakukan pada saat terjadinya transaksi dan/atau pada saat bukti transaksi tersebut diterima, namun pengakuan transaksi tetap pada tanggal bukti transaksi.

CONTOH  
JURNAL

debit ditulis lebih dulu

| Tanggal    | Kode Rekening | Uraian                       | debit     | Kredit    |
|------------|---------------|------------------------------|-----------|-----------|
| 5 Mei 2012 | 1.1.1.02.01   | Kas di Bendahara Penerimaan  | 8.000.000 |           |
|            | 8.1.1.07.01   | Pendapatan pajak hotel – LO  |           | 8.000.000 |
|            | 3.1.2.05.01   | Estimasi Perubahan SAL       | 8.000.000 |           |
|            | 4.1.1.07.01   | Pendapatan pajak hotel – LRA |           | 8.000.000 |

kredit ditulis menjorok ke dalam

debit dan kredit harus sama

Pencatatan akuntansi oleh Tenaga Akuntansi PPK-SKPD/PPK-SKPKD/Kuasa BUD dilakukan untuk mencatat transaksi keuangan yang terjadi di entitas akuntansi yang menjadi tanggungjawabnya. Transaksi akuntansi tersebut paling tidak meliputi pencatatan atas anggaran, pendapatan, beban dan belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, koreksi, penyesuaian dan penutup.

Kemudian secara berkala, Tenaga Akuntansi PPK-SKPD/PPK-SKPKD/Kuasa BUD melakukan posting dari buku jurnal ke buku besar. Posting ini merupakan pengelompokkan pencatatan transaksi ke dalam buku besar berdasarkan pada suatu kode rekening transaksi.







2. Sistem dan Prosedur Akuntansi Pendapatan PPKD;
3. Sistem dan Prosedur Akuntansi Beban, Belanja dan Transfer PPKD;
4. Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset PPKD;
5. Sistem dan Prosedur Akuntansi Kewajiban PPKD;
6. Sistem dan Prosedur Akuntansi Konsolidator PPKD; dan
7. Sistem dan Prosedur Akuntansi Koreksi dan Penyesuaian PPKD;

Sedangkan penjelasan lebih rinci tentang alur prosedur teknis dalam prosedur akuntansi pada Kuasa BUD meliputi:

1. Sistem dan Prosedur Akuntansi Pendapatan Kuasa BUD;
2. Sistem dan Prosedur Akuntansi Penerimaan Pembiayaan Kuasa BUD;
3. Sistem dan Prosedur Akuntansi Belanja Kuasa BUD;
4. Sistem dan Prosedur Akuntansi Pengeluaran Pembiayaan Kuasa BUD;
5. Sistem dan Prosedur Akuntansi Koreksi Kuasa BUD; dan
6. Sistem dan Prosedur Akuntansi Lain-lain Kuasa BUD.

Sedangkan penjelasan lebih rinci tentang alur prosedur teknis dalam prosedur akuntansi pada Kuasa BUD meliputi:

1. Sistem dan Prosedur Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD;
2. Sistem dan Prosedur Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan SKPKD-PPKD;
3. Sistem dan Prosedur Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUD; dan
4. Sistem dan Prosedur Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Semua sistem dan prosedur tersebut akan dituangkan dalam bagian tersendiri sebagai lampiran dari penjelasan sistem dan prosedur ini. Bagian ini bisa dianggap sebagai pengantar yang memberikan penjelasan secara umum dari penjelasan teknis pelaksanaan di setiap sistem dan prosedur akuntansi.

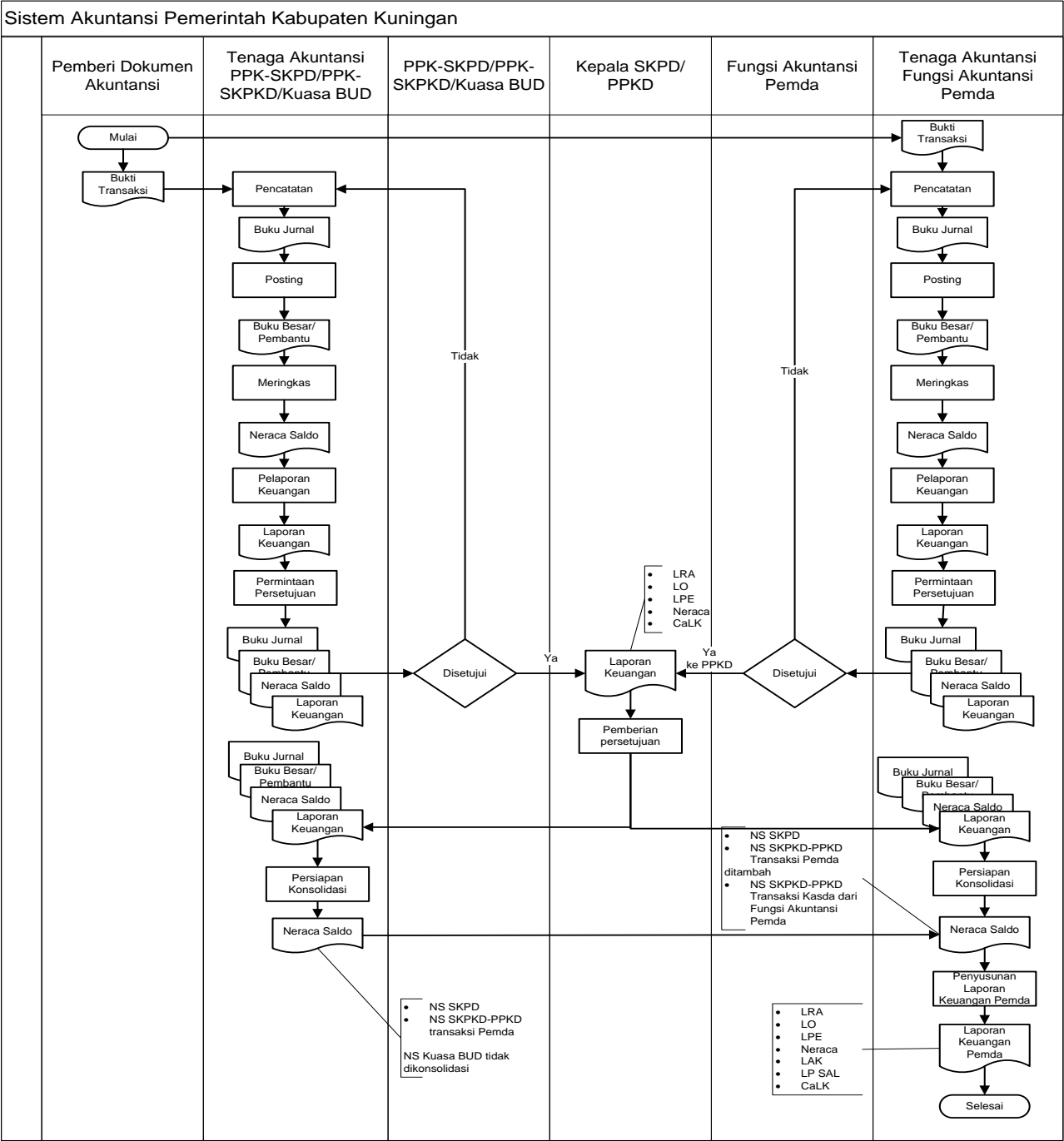
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sistem akuntansi pemerintahan daerah meliputi :

1. Identifikasi transaksi;
2. Pencatatan pada jurnal;
3. Posting ke dalam buku besar;
4. Penyusunan neraca saldo; dan
5. Penyajian laporan keuangan

Lima proses Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah tersebut, dalam Peraturan Bupati ini diuraikan menjadi beberapa lampiran yang terdiri dari:

1. Sistem Akuntansi SKPD yang meliputi Sistem Akuntansi Anggaran, Pendapatan, Beban-Belanja, Aset, Kewajiban, Koreksi dan Penyesuaian.
2. Sistem Akuntansi SKPKD yang meliputi Sistem Akuntansi Anggaran, Pendapatan, Beban-Belanja, Aset, Hutang, Konsolidator dan Penyesuaian.
3. Sistem Akuntansi BUD yang meliputi Sistem Akuntansi Pendapatan, Penerimaan Pembiayaan, Belanja, Pengeluaran Pembiayaan, Koreksi dan Lain-Lain.
4. Sistem Akuntansi Laporan Keuangan yang meliputi Sistem Akuntansi Laporan Keuangan SKPD, SKPKD, SKPKD BUD dan Konsolidasi.

Demikianlah uraian penjelasan mengenai sistem dan prosedur akuntansi di Pemerintah Kabupaten Kuningan. Seluruh uraian penjelasan diatas dapat digambarkan secara sederhana dalam suatu gambaran aliran proses sebagai berikut :



Keterangan Simbol Flowchart :

- : Simbol Terminator yaitu simbol untuk memulai dan mengakhiri sistem dan prosedur
- : Simbol Dokumen yaitu simbol untuk melambangkan dokumen, buku atau formulir
- : Simbol proses yaitu simbol untuk melambangkan proses pengelolaan data dari dokumen, buku atau formulir
- : Simbol keputusan yaitu simbol yang melambangkan pengambilan keputusan ya atau tidak
- : Simbol panah yaitu simbol yang melambangkan arah dokumen, buku atau formulir dan arah proses

**Konfigurasi Pihak-pihak Pelaksana Utama Sistem Akuntansi  
Pemerintah Kabupaten Kuningan dan Jurnal Akuntansi yang  
dibuatnya untuk Anggaran, Pendapatan, Beban dan Belanja SKPD**

| Anggaran  |   |  |
|---|---|--|
| SKPD  | SKPKD – PPKD  | SKPKD - KUASA BUD  |
| Dr. Estimasi Pendapatan<br>Estimasi Perubahan SAL<br>Cr. Apropriasi Belanja<br>atau<br>Dr. Estimasi Pendapatan<br>Cr. Apropriasi Belanja<br>Estimasi Perubahan SAL  | Tidak ada Jurnal  | Tidak ada Jurnal   |
| PENDAPATAN  |   |  |
| SKPD  | SKPKD – PPKD  | SKPKD - KUASA BUD  |
| <b>1. Pendapatan Melalui Bendahara</b><br><br>Dr. Kas di Bendahara<br>Penerimaan<br>Cr. Pendapatan___ - LO<br>Dr. Estimasi Perubahan SAL<br>Cr. Pendapatan___ - LRA | <b>1. Pendapatan Melalui Bendahara</b><br><br>Tidak ada Jurnal                            | <b>1. Pendapatan Melalui Bendahara</b><br><br>Tidak ada Jurnal   |
| <b>2. Penyetoran ke Kas Daerah</b><br><br>Dr. RK PPKD<br>Cr. Kas di Bendahara<br>Penerimaan   | <b>2. Penyetoran ke Kas Daerah</b><br><br>Dr. Kas di Kas Daerah<br>Cr. RK SKPD___         | <b>2. Penyetoran ke Kas Daerah</b><br><br>Dr. Kas di Kas Daerah<br>Cr. Pendapatan                      |
| <b>3. Pendapatan Langsung Disetor</b><br><br>Dr. RK PPKD<br>Cr. Pendapatan___ - LO<br>Dr. Estimasi Perubahan SAL<br>Cr. Pendapatan___ - LRA                         | <b>3. Pendapatan Langsung Disetor</b><br><br>Dr. Kas di Kas Daerah<br>Cr. RK SKPD___      | <b>3. Pendapatan Langsung Disetor</b><br><br>Dr. Kas di Kas Daerah<br>Cr. Pendapatan___                |
| BEBAN dan BELANJA   |   |  |
| SKPD  | SKPKD – PPKD  | SKPKD - KUASA BUD  |
| <b>1. Belanja saat Pengisian UP/GU/TU</b><br><br>Dr. Kas di Bendahara<br>Pengeluaran<br>Cr. RK PPKD   | <b>1. Belanja saat Pengisian UP/GU/TU</b><br><br>Dr. RK SKPD ___<br>Cr. Kas di Kas Daerah | <b>1. Belanja saat Pengisian UP/GU/TU</b><br><br>Dr. Belanja___<br>Cr. Kas di Kas Daerah               |
| <b>2. Belanja saat pengakuan penggunaan UP/TU</b><br><br>Dr. Beban___<br>Cr. Kas di Bendahara<br>Pengeluaran<br>Dr. Belanja___<br>Cr.Estimasi Perubahan SAL         | <b>2. Belanja UP saat pengakuan penggunaan UP/TU</b><br><br>Tidak ada Jurnal              | <b>2. Pengembalian Belanja UP/GU/TU menggunakan STS</b><br><br>Dr. Belanja___<br>Cr. Kas di Kas Daerah |
| <b>3. Belanja LS</b><br><br>Dr. Beban___<br>Cr. RK PPKD<br>Dr. Belanja___<br>Cr. Estimasi Perubahan SAL   | <b>3. Belanja LS</b><br><br>Dr. RK SKPD ___<br>Cr. Kas di Kas Daerah                      | <b>3. Belanja LS</b><br><br>Dr. Belanja___<br>Cr. Kas di Kas Daerah                                    |

Konfigurasi Pihak-pihak Pelaksana Utama Sistem Akuntansi  
Pemerintah Kabupaten Kuningan dan Jurnal Akuntansi yang  
dibuatnya untuk Anggaran, Pendapatan, Beban dan Belanja,  
Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan PPKD

| PENDAPATAN                                |  |   |
|---|--|---|
| SKPD                                      | SKPKD – PPKD   | SKPKD - KUASA BUD                                       |
| Tidak ada Jurnal                          | Dr. Estimasi Pendapatan<br>Estimasi Penerimaan Pembiayaan<br>Estimasi Perubahan SAL<br>Cr. Apropriasi Belanja<br>Apropriasi Transfer<br>Apropriasi Pengeluaran P’biayaan<br>atau<br>Dr. Estimasi Pendapatan<br>Estimasi Penerimaan Pembiayaan<br>Cr. Apropriasi Belanja<br>Apropriasi Transfer<br>Apropriasi Pengeluaran P’biayaan<br>Estimasi Perubahan SAL | Tidak ada Jurnal  |
| PENDAPATAN                                |  |   |
| SKPD                                      | SKPKD – PPKD   | SKPKD - KUASA BUD                                       |
| 1. Pendapatan Langsung Disetor            | 1. Pendapatan Langsung Disetor   | 1. Pendapatan Langsung Disetor                          |
| Tidak ada Jurnal                          | Dr. Kas di Kas Daerah<br>Cr. Pendapatan____ - LO<br>Dr. Estimasi Perubahan SAL<br>Cr. Pendapatan____ - LRA   | Dr. Kas di Kas Daerah<br>Cr. Pendapatan____             |
| BEBAN dan BELANJA                         |  |   |
| SKPD                                      | SKPKD – PPKD   | SKPKD - KUASA BUD                                       |
| 1. Belanja LS                             | 1. Belanja LS  | 1. Belanja LS   |
| Tidak ada Jurnal                          | Dr. Beban____<br>Cr. Kas di Kas Daerah<br>Dr. Belanja____<br>Cr. Estimasi Perubahan SAL  | Dr. Belanja____<br>Cr. Kas di Kas Daerah                |
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN                     |  |   |
| SKPD                                      | SKPKD – PPKD   | SKPKD - KUASA BUD                                       |
| 1. Penerimaan Pembiayaan langsung disetor | 1. Penerimaan Pembiayaan langsung disetor  | 1. 1. Penerimaan Pembiayaan langsung disetor            |
| Tidak ada Jurnal                          | Dr. Kas di Kas Daerah<br>Cr. Piutang/Investasi/Utang<br>Dr. Estimasi Perubahan SAL<br>Cr. Penerimaan Pembiayaan____  | Dr. Kas di Kas Daerah<br>Cr. Penerimaan Pembiayaan____  |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN                    |  |   |
| SKPD                                      | SKPKD – PPKD   | SKPKD - KUASA BUD                                       |
| 1. Pengeluaran Pembiayaan LS              | 1. 1. Pengeluaran Pembiayaan LS  | 1. Pengeluaran Pembiayaan LS                            |
| Tidak ada Jurnal                          | Dr. Piutang/Investasi/Utang<br>Cr. Kas di Kas Daerah<br>Dr. Pengeluaran Pembiayaan ____<br>Cr. Estimasi Perubahan SAL  | Dr. Pengeluaran Pembiayaan____<br>Cr. Kas di Kas Daerah |

## **SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI DI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)**

Bagian ini menjelaskan Sistem dan Prosedur Akuntansi secara umum di Pemerintah Kabupaten Kuningan untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

### **KEBIJAKAN UMUM**

Sistem dan prosedur akuntansi di SKPD meliputi serangkaian proses mulai dari diperolehnya bukti transaksi keuangan, dilakukannya pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual ataupun menggunakan aplikasi komputer.

SKPD melaksanakan akuntansi dikarenakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi realisasi RKA-SKPD yang terjadi di lingkungan satuan kerjanya. Pelaksanaan kegiatan akuntansi pada SKPD paling tidak meliputi pencatatan atas :

1. Akuntansi pencatatan anggaran;
2. Akuntansi pendapatan baik SKPD maupun SKPD khusus di SKPKD;
3. Akuntansi beban dan belanja;
4. Akuntansi aset;
5. Akuntansi Kewajiban; dan
6. Akuntansi Koreksi dan Penyesuaian.

Hasil akhir dari proses akuntansi di SKPD adalah untuk menyusun Laporan Keuangan SKPD, yang terdiri atas:



1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
5. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).

SKPD tidak diharuskan menghasilkan Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan SAL karena tidak semua kas pembentuk SAL yang terkait dengan SKPD, dilakukan melalui SKPD bersangkutan.

### **PIHAK-PIHAK TERKAIT**

Berbagai pihak/fungsi yang terkait dalam proses akuntansi SKPD beserta tugas-tugasnya adalah :

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Dalam pelaksanaan prosedur ini, PPK memiliki tugas menerbitkan Surat Ketetapan PPK tentang denda keterlambatan pekerjaan.

2. Tim Penyelesaian Kerugian Negara selanjutnya disebut TPKN

Dalam pelaksanaan prosedur ini, TPKN adalah tim yang menangani penyelesaian kerugian negara yang diangkat oleh pimpinan instansi yang bersangkutan dalam hal ini adalah Bupati Kuningan.

3. Bendahara Penerimaan SKPD

Dalam pelaksanaan prosedur ini, Bendahara Penerimaan SKPD memiliki tugas menerima dokumen-dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan akuntansi pendapatan SKPD dari Kuasa BUD dan menyiapkannya untuk kepentingan pencatatan oleh Tenaga Akuntansi PPK-SKPD.

4. Bendahara Pengeluaran SKPD

Dalam pelaksanaan prosedur ini, Bendahara SKPD memiliki tugas:

- a. menyiapkan dokumen-dokumen atas transaksi yang terkait untuk diserahkan kepada tenaga akuntansi di PPK-SKPD

atas :

- i. Proses pelaksanaan akuntansi belanja UP/GU/TU berupa SP2D UP/GU/TU dan bukti-bukti belanja yang sah; dan
  - ii. Proses pelaksanaan akuntansi belanja LS SKPD seperti SP2D LS.
- b. Menyiapkan dokumen STS untuk pengembalian belanja; dan
  - c. Menyiapkan dokumen-dokumen kepemilikan aset atas transaksi belanja UP/GU/TU untuk diserahkan kepada Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD.

5. Pengurus Barang di SKPD

Dalam pelaksanaan prosedur ini, Pengurus Barang SKPD memiliki tugas :

- a. menyiapkan dokumen-dokumen (misalkan BAST) atas transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan akuntansi pendapatan, beban dan belanja, serta aset dan kewajiban SKPD; dan
- b. Menyiapkan perhitungan penyusutan aset tetap dan amortisasi.

6. Tenaga Akuntansi di Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)

Dalam pelaksanaan prosedur ini, Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menerima dan menganalisa data dan informasi akuntansi dari bukti-bukti transaksi di SKPD;
- b. Menyiapkan tabel umur penyisihan piutang;
- c. Menyerahkan bukti kepemilikan aset dan/atau bukti-bukti belanja perolehan aset dari penggunaan UP/GU/TU kepada pengurus barang;
- d. Mencatat transaksi-transaksi SKPD berdasarkan bukti-bukti yang terkait yang berada dalam kewenangan SKPD-nya ke

buku jurnal;

- e. Memposting jurnal-jurnal SKPD ke dalam buku besarnya masing-masing;
  - f. Menyusun neraca saldo untuk persiapan penyusunan laporan keuangan, yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan; dan
  - g. Menyerahkan buku jurnal, buku besar dan neraca saldo kepada PPK-SKPD untuk diperiksa dan ditandatangani.
7. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) : Kepala Sub Bagian Keuangan (Sekretariat Daerah, Badan, Kantor, Dinas, Rumah Sakit Umum Daerah Linggarjati, Kecamatan, dan Kelurahan), Kepala Bagian Keuangan (Sekretariat DPRD dan Rumah Sakit Umum Daerah 45).

Dalam pelaksanaan prosedur ini, PPK-SKPD memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Bertanggungjawab atas sistem akuntansi SKPD yang dipimpinnya;
  - b. Memeriksa dan menandatangani hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Tenaga Akuntansi PPK-SKPD setiap bulannya seperti Buku Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo SKPD; dan
  - c. Menyerahkan Buku Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo SKPD setiap triwulan kepada Pengguna Anggaran untuk disetujui
8. Pengguna Anggaran/Kepala SKPD : Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, Kepala Satuan, Camat, Lurah, Asisten Administrasi, Sekretaris DPRD, Sekretaris Daerah dan Direktur.

Dalam pelaksanaan prosedur ini, Pengguna Anggaran memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menyerahkan dokumen anggaran SKPD seperti DPA-SKPD kepada PPK-SKPD;

- b. Menetapkan pendapatan SKPD dengan SKP Daerah, SKPDKB, SKPDKBT, SKR Daerah, SKRDKB, atau SKRDKBT;
- c. Membuat dan menyampaikan Surat Permohonan Kepala SKPD tentang Penghapusan Aset kepada Bupati;
- d. Menerima Surat Keputusan Bupati tentang Penghapusan Aset khususnya Aset Tetap, dan menyerahkannya kepada tenaga akuntansi PPK-SKPD melalui PPK-SKPD;
- e. Menerima dan melakukan verifikasi, evaluasi dan analisa pertanggungjawaban (SPJ) pendapatan dari bendahara penerimaan SKPD kemudian mengesahkannya;
- f. Menerima dan melakukan verifikasi, evaluasi dan analisa pertanggungjawaban (SPJ) periodik administratif atas belanja Langsung (LS) dan belanja UP/GU/TU dari Bendahara Pengeluaran SKPD kemudian mengesahkannya; dan
- g. Menyetujui Buku Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo yang diserahkan PPK-SKPD setiap triwulan.

**9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (tidak termasuk Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan).**

**Dalam pelaksanaan prosedur ini, PPKD memiliki tugas sebagai berikut :**

- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- b. mengesahkan DPA SKPD;
- c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah;
- e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- f. menetapkan SPD;
- g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
- h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan

Daerah;

- i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
- j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

10. Kepala Daerah : Bupati

Dalam pelaksanaan prosedur ini, Kepala Daerah memiliki tugas :

- a. Menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- b. Mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- c. Menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- d. Menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
- f. Menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;
- g. Menetapkan KPA;
- h. Menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
- i. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- j. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;
- k. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan

pembayaran;

1. Menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- m. Melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **DOKUMEN YANG DIGUNAKAN**

1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran
2. Surat Ketetapan Pajak Daerah selanjutnya disebut SKP Daerah adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak dan digunakan pula untuk membayar pajak daerah metode *official assessment*;
3. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar selanjutnya disebut SKPDKB adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar serta digunakan pula untuk membayar pajak daerah kurang bayar tersebut untuk metode *official assessment*;
4. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya disebut SKPDKBT adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan dan digunakan pula untuk membayar pajak daerah kurang bayar tambahan tersebut metode *official assessment*;
5. Surat Tagihan Pajak Daerah selanjutnya disebut STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda dan digunakan pula untuk membayar tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda tersebut;

6. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang selanjutnya disebut SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak dan digunakan pula untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang;
7. Surat Tanda Terima Setoran selanjutnya disebut STTS adalah bukti tanda terima pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;
8. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
9. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar selanjutnya disebut SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih kurang dibayar serta digunakan pula untuk membayar retribusi daerah kurang bayar tersebut metode *official assessment*;
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya disebut SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan SKRDKBT dan digunakan pula untuk membayar retribusi daerah kurang bayar tambahan tersebut metode *official assessment*;
12. Surat Setoran Pajak Daerah selanjutnya disebut SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak metode *self assessment* yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
13. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi

metode *self assessment* yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;

14. Tanda Bukti Pembayaran selanjutnya disebut TBP adalah bukti pembayaran pajak/retribusi daerah dari wajib bayar kepada bendahara penerimaan SKPD;
15. Surat Tanda Setoran selanjutnya disebut STS adalah bukti yang dibuat untuk melakukan penyetoran uang ke Kas Daerah;
16. Bukti Setoran Bank merupakan formulir bukti melakukan setoran ke Rekening Umum Kas Daerah;
17. Bukti Transfer merupakan formulir bukti melakukan transfer dari suatu rekening ke Rekening Umum Kas Daerah;
18. Nota Kredit merupakan bukti transaksi penerimaan uang di Rekening Umum Kas Daerah;
19. Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah yang selanjutnya disebut LHP Inspektorat Daerah adalah laporan hasil pemeriksaan inspektorat daerah yang menunjukkan nilai denda keterlambatan pekerjaan;
20. Surat Keputusan Bupati tentang Penghapusan Aset adalah surat keputusan yang dikeluarkan kepala daerah yang menyatakan adanya aset khususnya aset tetap yang dihapus dari catatan keuangan pemerintah daerah;
21. Surat Keputusan Bupati tentang angsuran penjualan rumah dinas/kendaraan dinas adalah surat keputusan yang dikeluarkan kepala daerah yang menyatakan nilai angsuran penjualan rumah dinas/kendaraan dinas;
22. Surat Keputusan Bupati tentang Tuntutan Ganti Rugi Pegawai Non Bendahara adalah surat keputusan yang dikeluarkan kepala daerah yang menyatakan nilai tuntutan ganti rugi kepada pegawai non bendahara;
23. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak selanjutnya disebut SKTJM adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan



dan/atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas kerugian negara yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian negara dimaksud;

24. Surat Keputusan Pembebanan Sementara adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh bupati tentang pembebanan penggantian sementara atas kerugian negara sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan;
25. Surat Keputusan Pembebanan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian kerugian negara terhadap bendahara;
26. Rekening Koran Kas Umum Daerah adalah mutasi catatan keuangan dari rekening kas umum daerah yang dikeluarkan setiap hari oleh Bank tempat menyimpan kas daerah;
27. Daftar Gaji adalah dokumen yang berisi data Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD);
28. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut (SP2D) adalah Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan Kuasa Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM;
29. Nota Debit merupakan bukti transaksi pengeluaran uang di rekening kas umum daerah;
30. Faktur Pajak yang selanjutnya disebut FP adalah daftar perincian barang dan/atau jasa yang dibeli/dijual beserta harga dan pungutan PPN yang dibuat oleh penyedia barang dan/atau jasa;
31. Bukti potong dan pungut PPN dan PPh, adalah bukti bendahara pengeluaran SKPD telah memotong dan memungut PPN dan PPh dari penyerahan barang dan/atau jasa dari penyedia kepada SKPD;
32. Bukti setor PPN dan PPh, adalah bukti bendahara SKPD telah menyetor PPN dan PPh yang telah dipotong dan dipungut kepada Kas Negara;
33. Bukti transaksi pengeluaran atau kwitansi adalah daftar

perincian barang dan/atau jasa yang dibeli / dijual beserta harga dan potongan/pajak yang dibuat oleh penjual;

34. Laporan Pertanggungjawaban UP/GU/TU selanjutnya disebut LPJ UP/GU/TU adalah dokumen yang disampaikan bendahara pengeluaran kepada pengguna anggaran melalui PPK-SKPD untuk mempertanggungjawabkan transaksi belanja UP/GU/TU dan dilampiri dengan bukti-bukti belanja yang sah pada saat meminta GU atau mempertanggungjawabkan TU
35. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Barang dan/atau Jasa yang selanjutnya disebut BAST adalah bukti penerimaan barang yang telah melalui proses pemeriksaan sebelumnya, sehingga bisa menjadi dasar penagihan pihak ketiga;
36. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan, adalah dokumen sumber untuk pengakuan aset tetap konstruksi dalam pekerjaan;
37. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disebut NPHD adalah dokumen yang mengakui adanya komitmen dari pemerintah daerah yang akan memberikan sejumlah APBD kepada penerima hibah;
38. Berita Acara Stock Opname Persediaan yang selanjutnya disebut BA Stock Opname adalah dokumen yang digunakan untuk mencatat dan mengakui nilai persediaan yang masih ada;
39. Berita Acara Penghapusan, adalah dokumen yang dibuat tim penilai aset yang akan dihapus untuk menyajikan nilai wajar aset yang akan dihapus;
40. Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Penghapusan Aset dan Piutang adalah dokumen penetapan yang menghapus aset dan piutang daerah;
41. Surat Keputusan Bupati tentang Penggunaan Aset, adalah dokumen yang diterbitkan Bupati menentukan pengguna aset/barang;
42. Surat Keputusan Bupati tentang Hibah, adalah dokumen yang diterbitkan Bupati untuk menentukan penerima hibah, alamat penerima hibah, jenis hibah dan nilai hibah;

43. Surat Permohonan Kepala SKPD tentang Penghapusan Aset Tetap, adalah dokumen sumber untuk pengakuan reklasifikasi aset tetap di SKPD menjadi aset lainnya di PPKD;
44. Tabel Umur Penyisihan Piutang, adalah daftar yang memuat data nilai perolehan piutang berdasarkan umurnya, nilai penyisihan piutang berdasarkan umurnya, dan nilai total penyisihan piutangnya;
45. Bukti memorial adalah bukti transaksi yang digunakan untuk mencatat transaksi non keuangan.

### **BUKU DAN ATAU FORMULIR YANG DIGUNAKAN**

Buku dan atau formulir yang digunakan dalam pelaksanaan prosedur akuntansi di satuan kerja perangkat daerah (akuntansi SKPD) ini paling tidak terdiri dari :

1. Buku Jurnal Umum (JU)  
  
Merupakan buku jurnal yang digunakan untuk melakukan pencatatan akuntansi atas transaksi non kas pada basis kas (pencatatan anggaran) dan transaksi basis akrual terkait penyusunan LO dan Neraca.
2. Buku Jurnal Penerimaan Kas (JM)  
  
Merupakan buku jurnal yang digunakan untuk melakukan pencatatan akuntansi atas transaksi penerimaan kas yang berasal dari transaksi penerimaan pendapatan. Pada umumnya buku jurnal penerimaan kas digunakan untuk mencatat transaksi basis kas terkait penyusunan LRA dan LAK.
3. Buku Jurnal Pengeluaran Kas (JK)  
  
Merupakan buku jurnal yang digunakan untuk melakukan pencatatan akuntansi atas transaksi pengeluaran kas untuk transaksi pengeluaran belanja. Pada umumnya buku jurnal pengeluaran kas digunakan untuk mencatat transaksi basis kas terkait penyusunan LRA dan LAK.
4. Buku Jurnal Koreksi (Jk)

Merupakan buku jurnal yang digunakan untuk melakukan pencatatan akuntansi penyesuaian khususnya atas transaksi-transaksi koreksi pendapatan, belanja, beban, transfer, pembiayaan, aset dan kewajiban.

5. Buku Jurnal Penyesuaian (Jp)

Merupakan buku jurnal yang digunakan untuk melakukan pencatatan akuntansi penyesuaian khususnya atas transaksi-transaksi pengakuan persediaan (metode periodik), penyusutan aset tetap, amortisasi aset tak berwujud, beban dibayar dimuka dan pendapatan diterima dimuka.

6. Buku Besar (BB)

Merupakan buku yang digunakan untuk menampung pencatatan hasil posting transaksi dari buku jurnal. Buku besar ini merupakan pencatatan akuntansi atas seluruh transaksi untuk suatu rekening/akun per jenis atau obyek. Jadi setiap rekening/akun per jenis atau objek mempunyai buku besar tersendiri.

7. Buku Besar Pembantu (BP)

Buku besar dapat dilengkapi dengan buku besar pembantu sebagai alat uji silang dan kelengkapan informasi rekening/akun tertentu. Buku besar pembantu berisi rincian akun (rincian obyek) yang telah dicatat dalam buku besar. Jika dirasakan informasi dalam buku besar sudah mencukupi maka buku besar pembantu tidak perlu dibuat lagi.

8. Neraca Saldo (NS)

Merupakan formulir yang mencatat nilai saldo setiap rekening/akun per rincian objek sehingga diketahui jumlah total dari seluruh rekening/akun.

## **KERANGKA SISTEM**

Secara umum proses akuntansi di SKPD dimulai saat Tenaga Akuntansi PPK-SKPD menerima bukti-bukti transaksi dari kepala

daerah, pengguna anggaran, bendahara penerimaan dan pengeluaran SKPD, pengurus barang, maupun pihak lainnya melalui prosedur atau mekanisme penatausahaan baik keuangan maupun non keuangan. Pada saat bukti transaksi keuangan tersebut telah diterima maka Tenaga Akuntansi PPK-SKPD kemudian melakukan pencatatan akuntansi dalam buku jurnal terkait. Jadi pencatatan akuntansi untuk setiap transaksi dilakukan pada saat terjadinya transaksi dan atau pada saat bukti transaksi tersebut diterima namun pengakuan transaksi tetap pada tanggal bukti transaksi.

Kemudian secara berkala, Tenaga Akuntansi PPK-SKPD melakukan posting dari buku jurnal ke buku besar (pembantu). Posting ini merupakan pengelompokkan pencatatan transaksi ke dalam buku besar (pembantu) berdasarkan pada suatu kode rekening/akun transaksi. Setelah posting dari buku jurnal ke buku besar selesai dilakukan maka kemudian Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD menyusun Neraca Saldo sebagai dasar pembuatan Laporan Keuangan untuk setiap triwulan yang diserahkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah triwulan berakhir kepada PPK-SKPD.

## **ALUR PROSEDUR TEKNIS**

Penjelasan alur prosedur teknis dalam prosedur akuntansi SKPD ini meliputi penjelasan atas sistem dan prosedur untuk :

1. Akuntansi Pencatatan Anggaran SKPD;
2. Akuntansi Pendapatan SKPD;
3. Akuntansi Pendapatan SKPD khusus di SKPKD;
4. Akuntansi Beban dan Belanja SKPD;
5. Akuntansi Aset SKPD;
6. Akuntansi Kewajiban SKPD; dan
7. Akuntansi Koreksi dan Penyesuaian SKPD.

Untuk lebih memperjelas masing-masing sistem dan prosedur tersebut maka diberikan penjelasan tersendiri dalam bagian tersendiri sebagai lampiran dari penjelasan sistem dan prosedur ini. Bagian ini

merupakan pengantar yang memberikan penjelasan secara umum dari penjelasan teknis pelaksanaan di setiap sistem dan prosedur akuntansi di SKPD.

### **Langkah I : Penerimaan Bukti Transaksi**

Tenaga Akuntansi PPK-SKPD menerima bukti transaksi keuangan untuk SKPD yang menjadi kewenangannya. Atas penerimaan bukti transaksi ini, Tenaga Akuntansi PPK-SKPD harus menganalisa hingga benar-benar meyakini informasi akuntansi dari bukti tersebut. Setelah digunakan sebagai dasar melakukan pencatatan akuntansi maka bukti transaksi tersebut harus disimpan dengan baik oleh Tenaga Akuntansi PPK – SKPD.

### **Langkah II : Melakukan Pencatatan di Buku Jurnal**

Berdasarkan bukti transaksi yang diterimanya maka Tenaga Akuntansi PPK-SKPD melakukan pencatatan akuntansi di buku jurnal terkait. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa buku jurnal yang ada pada sistem dan prosedur akuntansi SKPD ini adalah

1. Buku Jurnal Umum (JU)
2. Buku Jurnal Penerimaan Kas (JM)
3. Buku Jurnal Pengeluaran Kas (JK)
4. Buku Jurnal Koreksi (Jk)
5. Buku Jurnal Penyesuaian (JP)

Dibawah ini akan dijelaskan mengenai bentuk dari masing-masing buku jurnal serta tata cara pengisian buku jurnal tersebut.

#### **Bentuk dan Cara Pengisian Buku Jurnal Umum (JU)**

Merupakan buku jurnal yang digunakan untuk melakukan pencatatan akuntansi atas transaksi basis akrual terkait penyusunan LO dan Neraca. Format Buku Jurnal Umum ini juga dapat digunakan sebagai Buku Jurnal Koreksi dan Penyesuaian. Contoh Buku Jurnal

Umum (JU), yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

**KABUPATEN KUNINGAN**  
**BUKU JURNAL UMUM (JU)**

SKPD : .....1) Hal .....2)

| Tanggal    | Nomor<br>Bukti | Kode Rekening/Akun | Uraian | Ref. | Debit<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|------------|----------------|--------------------|--------|------|---------------|----------------|
| 1          | 2              | 3                  | 4      | 5    | 6             | 7              |
|            |                |                    |        |      |               |                |
|            |                |                    |        |      |               |                |
|            |                |                    |        |      |               |                |
|            |                |                    |        |      |               |                |
|            |                |                    |        |      |               |                |
| Jumlah 10) |                |                    |        |      |               |                |

PPK-SKPD Kepala SKPD

(tanda tangan) (tanda tangan)  
(nama lengkap) (nama lengkap)  
NIP..... NIP.....

Cara pengisian Buku Jurnal umum, yang contoh bentuknya seperti terlihat diatas, adalah sebagai berikut :

1. Diisikan Nama SKPD yang menggunakan buku jurnal umum ini.
2. Diisikan no dari halaman buku jurnal ini.
3. Kolom 1 diisi dengan tanggal transaksi berdasarkan tanggal bukti tansaksi.
4. Kolom 2 diisi nomor bukti seperti Nomor surat ketetapan pendapatan, BAST, TBP, STS, SP2D, NPHD, Nota Debit, Nota Kredit, kwitansi, faktur, bukti memorial atau bukti lainnya yang sah.
5. Kolom 3 diisi dengan kode rekening/akun yang terpengaruh oleh transaksi yang terjadi, sesuai dengan jurnal yang harus dilakukan.
6. Kolom 4 diisi dengan nama rekening/akun terpengaruh oleh transaksi yang terjadi, sesuai dengan jurnal yang dilakukan. Bisa juga ditambah uraian lain berupa keterangan dari transaksi tersebut.
7. Kolom 5 diisi dengan tanda checklist disesuaikan dengan nomor dokumen sumber dan saat posting ke buku besar.
8. Kolom 6 diisi dengan nilai jumlah Rp untuk sisi debit.

- 9. Kolom 7 diisi dengan nilai jumlah Rp untuk sisi kredit.
- 10. Diisikan jumlah total dari kolom 6 dan kolom 7.
- 11. Pada akhir suatu periode (setiap bulan), misalkan pada periode setelah dilakukan posting, buku jurnal ditandatangani oleh PPK-SKPD dan Kepala SKPD dengan mencantumkan nama dan NIP.

**Bentuk dan Cara Pengisian Buku Jurnal Penerimaan Kas (JM)**

Untuk mencatat penerimaan kas dari pendapatan digunakan buku jurnal penerimaan kas. Contoh Buku Jurnal Penerimaan Kas yang bersifat *double entry* adalah sebagai berikut :

KABUPATEN KUNINGAN

BUKU JURNAL PENERIMAAN KAS (JM)

SKPD : .....1)

Halaman .....2)

| Tanggal    | Nomor            |            | Kode Rekening/Akun |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Uraian | Ref. | Debit (Rp) | Kredit (Rp) |
|------------|------------------|------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|------|------------|-------------|
|            | Bukti Penerimaan | Bukti Lain |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |      |            |             |
| 1          | 2                |            | 3                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4      | 5    | 6          | 7           |
|            |                  |            |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |      |            |             |
|            |                  |            |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |      |            |             |
|            |                  |            |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |      |            |             |
|            |                  |            |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |      |            |             |
|            |                  |            |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |      |            |             |
|            |                  |            |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |      |            |             |
|            |                  |            |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |      |            |             |
| Jumlah 10) |                  |            |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |      |            |             |

PPK-SKPD

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP.....

Kepala SKPD

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP.....

Adapun cara Pengisian Buku Jurnal Penerimaan Kas, adalah sebagai berikut :

- 1. Diisikan Nama SKPD yang menggunakan buku jurnal penerimaan kas ini.
- 2. Diisikan no dari halaman buku jurnal ini.
- 3. Kolom 1 diisi dengan tanggal transaksi penerimaan kas.
- 4. Kolom 2 diisi dengan Nomor TBP, Nota Kredit, SP2D atau bukti penerimaan lainnya yang sah.
- 5. Kolom 3 diisi dengan kode rekening/akun pendapatan atau



kontra pos belanja dan kode rekening penerimaan kasnya, sesuai dengan jurnal yang dilakukan.

- 6. Kolom 4 diisi dengan nama rekening/akun pendapatan atau kontra pos pendapatan dan nama rekening/akun penerimaan kasnya, sesuai dengan jurnal yang dilakukan. Bisa juga ditambah uraian lain berupa keterangan dari penerimaan kas tersebut.
- 7. Kolom 5 diisi dengan tanda checklist disesuaikan dengan nomor dokumen sumber dan saat posting ke buku besar.
- 8. Kolom 6 diisi dengan nilai jumlah Rp untuk sisi debit.
- 9. Kolom 7 diisi dengan nilai jumlah Rp untuk sisi kredit.
- 10. Diisikan jumlah total dari kolom 6 dan kolom 7.
- 11. Pada akhir suatu periode (setiap bulan), misalkan pada periode setelah dilakukan posting, buku jurnal ditandatangani oleh PPK-SKPD dan Kepala SKPD dengan mencantumkan nama dan NIP.

**Bentuk dan Cara Pengisian Buku Jurnal Pengeluaran Kas (JK)**

Untuk mencatat pengeluaran kas untuk belanja atau koreksi pengembalian pendapatan digunakan buku jurnal pengeluaran kas. Contoh Buku Jurnal Pengeluaran Kas yang bersifat *double entry* adalah sebagai berikut :

**KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU JURNAL PENGELUARAN KAS (JK)**

SKPD : .....1)

Halaman ....2)

| Tanggal    | Nomor               |               | Kode Rekening/Akun | Uraian | Ref. | Debit<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|------------|---------------------|---------------|--------------------|--------|------|---------------|----------------|
|            | Bukti<br>Penerimaan | Bukti<br>Lain |                    |        |      |               |                |
| 1          | 2                   |               | 3                  | 4      | 5    | 6             | 7              |
|            |                     |               |                    |        |      |               |                |
|            |                     |               |                    |        |      |               |                |
|            |                     |               |                    |        |      |               |                |
|            |                     |               |                    |        |      |               |                |
|            |                     |               |                    |        |      |               |                |
| Jumlah 10) |                     |               |                    |        |      |               |                |

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)

(tanda tangan)  
(nama lengkap)

NIP.....

NIP.....

Adapun cara Pengisian Buku Jurnal Pengeluaran Kas, adalah sebagai berikut :

1. Diisikan Nama SKPD yang menggunakan buku jurnal pengeluaran kas ini.
2. Diisikan no dari halaman buku jurnal ini.
3. Kolom 1 diisi dengan tanggal transaksi belanja atau koreksi pengembalian pendapatan.
4. Kolom 2 diisi Nomor SP2D, kwitansi, faktur, STS atau bukti pengeluaran lainnya yang sah.
5. Kolom 3 diisi dengan kode rekening/akun belanja atau koreksi pengembalian pendapatan dan kode rekening/akun pengeluaran kasnya, sesuai dengan jurnal yang dilakukan.
6. Kolom 4 diisi dengan nama rekening/akun belanja atau koreksi pengembalian pendapatan dan nama rekening/akun pengeluaran kasnya, sesuai dengan jurnal yang dilakukan. Bisa juga ditambah uraian lain berupa keterangan dari pengeluaran kas tersebut.
7. Kolom 5 diisi dengan tanda checklist disesuaikan dengan nomor dokumen sumber dan saat posting ke buku besar.
8. Kolom 6 diisi dengan nilai jumlah Rp untuk sisi debit.
9. Kolom 7 diisi dengan nilai jumlah Rp untuk sisi kredit.
10. Diisikan jumlah total dari kolom 6 dan kolom 7.
11. Pada akhir suatu periode (setiap bulan), misalkan pada periode setelah dilakukan posting, buku jurnal ditandatangani oleh PPK-SKPD dan Kepala SKPD dengan mencantumkan nama dan NIP.

### **Langkah III : Melakukan Posting ke Buku Besar (Pembantu)**

Setiap periode secara berkala, seluruh pencatatan jurnal yang telah dilakukan diposting ke Buku Besar (Pembantu) SKPD sesuai

dengan kode rekeningnya masing-masing. Posting dilakukan paling lambat setelah selesainya pencatatan atas seluruh transaksi dari suatu bulan. Posting ini merupakan pengelompokkan pencatatan transaksi ke dalam buku besar (pembantu) berdasarkan pada suatu kode rekening transaksi. Contoh format Buku Besar (Pembantu) SKPD yang dapat digunakan adalah sebagai berikut :

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR (PEMBANTU)

SKPD : .....1)  
Kode Rekening/Akun : .....2)  
Nama Rekening/Akun : .....3)  
Pagu APBD : .....4)  
Pagu perubahan APBD : .....5) Halaman ..6)

| No | Bukti |         | Ref | Uraian     | Debet<br>Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|---------|-----|------------|--------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal |     |            |              |                |
| 1  | 2     | 3       | 4   | 5          | 6            | 7              |
|    |       |         |     |            |              |                |
|    |       |         |     |            |              |                |
|    |       |         |     |            |              |                |
|    |       |         |     | Jumlah 14) |              |                |
|    |       |         |     | Saldo 15)  |              |                |

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)

(tanda tangan)

(nama lengkap)

(nama lengkap)

NIP.....

NIP.....

Cara Pengisian Buku Besar, yang contoh bentuknya seperti terlihat diatas, adalah sebagai berikut :

1. Diisikan Nama SKPD yang menggunakan buku besar (pembantu) ini.
2. Diisikan nomor kode rekening/akun untuk buku besar diisikan kode rekening/akun sampai dengan jenis atau objek, untuk buku besar pembantu diisikan kode rekening/akun sampai dengan rincian objek.
3. Diisikan nama rekening/akun untuk buku besar (pembantu) ini sesuai dengan pengisian kode rekening/akun dibaris sebelumnya.
4. Diisikan nilai pagu anggaran dalam APBD atau nilai yang telah ditetapkan dalam anggaran untuk kode rekening/akun ini.
5. Diisikan nilai pagu perubahan anggaran dalam Perubahan APBD atau nilai yang telah ditetapkan dalam perubahan anggaran untuk kode rekening/akun ini.
6. Diisikan no halaman dari buku besar ini.
7. Kolom no 1 diisikan no urut transaksi

8. Kolom no 2 diisikan no bukti transaksi.
9. Kolom no 3 diisikan tanggal bukti transaksi.
10. Kolom no 4 diisikan kode buku jurnal (JU, JM, atau JK) untuk menandakan rekening/akun yang terpengaruh oleh transaksi yang terjadi, sesuai dengan buku jurnal yang sudah dibuat sebelumnya.
11. Kolom no 5 diisikan nama rekening/akun terpengaruh oleh transaksi yang terjadi, sesuai dengan jurnal yang dilakukan. Bisa juga ditambah uraian lain berupa keterangan dari transaksi tersebut.
12. Kolom no 6 diisikan nilai pencatatan di sebelah debit, sesuai dengan nilai Rp dalam buku jurnal.
13. Kolom no 7 diisikan nilai pencatatan di sebelah kredit, sesuai dengan nilai Rp dalam buku jurnal.
14. Diisikan jumlah total dari kolom 6 dan kolom 7.
15. Diisikan nilai saldo setelah memperhitungkan selisih debit dan kredit sesuai saldo normalnya.
16. Pada akhir suatu periode buku besar (pembantu) ditandatangani oleh PPK-SKPD dan Kepala SKPD dengan mencantumkan nama dan NIP.

Posting kedalam buku besar (pembantu) ini sesuai dengan kode rekening/akun dari transaksi. Sehingga untuk satu kode dan nama rekening/akun akan terdapat satu buku besar (pembantu). Untuk itu jumlah dari buku besar (pembantu) sangat tergantung dari banyaknya kode rekening/akun yang digunakan dalam transaksi yang terjadi.

**Langkah IV : Menyusun Neraca Saldo dan Laporan Keuangan**

Paling lambat sebelum periode penyampaian laporan keuangan maka Tenaga Akuntansi PPK-SKPD membuat neraca saldo sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Neraca saldo disusun dengan cara memindahkan nilai saldo yang ada di tiap buku besar ke dalam formulir Neraca Saldo. Contoh format Neraca Saldo yang dapat digunakan sebagai berikut :

**KABUPATEN KUNINGAN  
NERACA SALDO  
PER TANGGAL .....1)**

| SKPD : .....2)      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Halaman .....3) |        |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|--------|
| Kode Rekening /Akun |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jumlah          |        |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Debit           | Kredit |
| 1                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3               | 4      |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |        |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |        |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |        |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |        |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |        |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |        |
| Jumlah              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |        |

PPK-SKPD  
  
(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Kepala SKPD  
  
(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

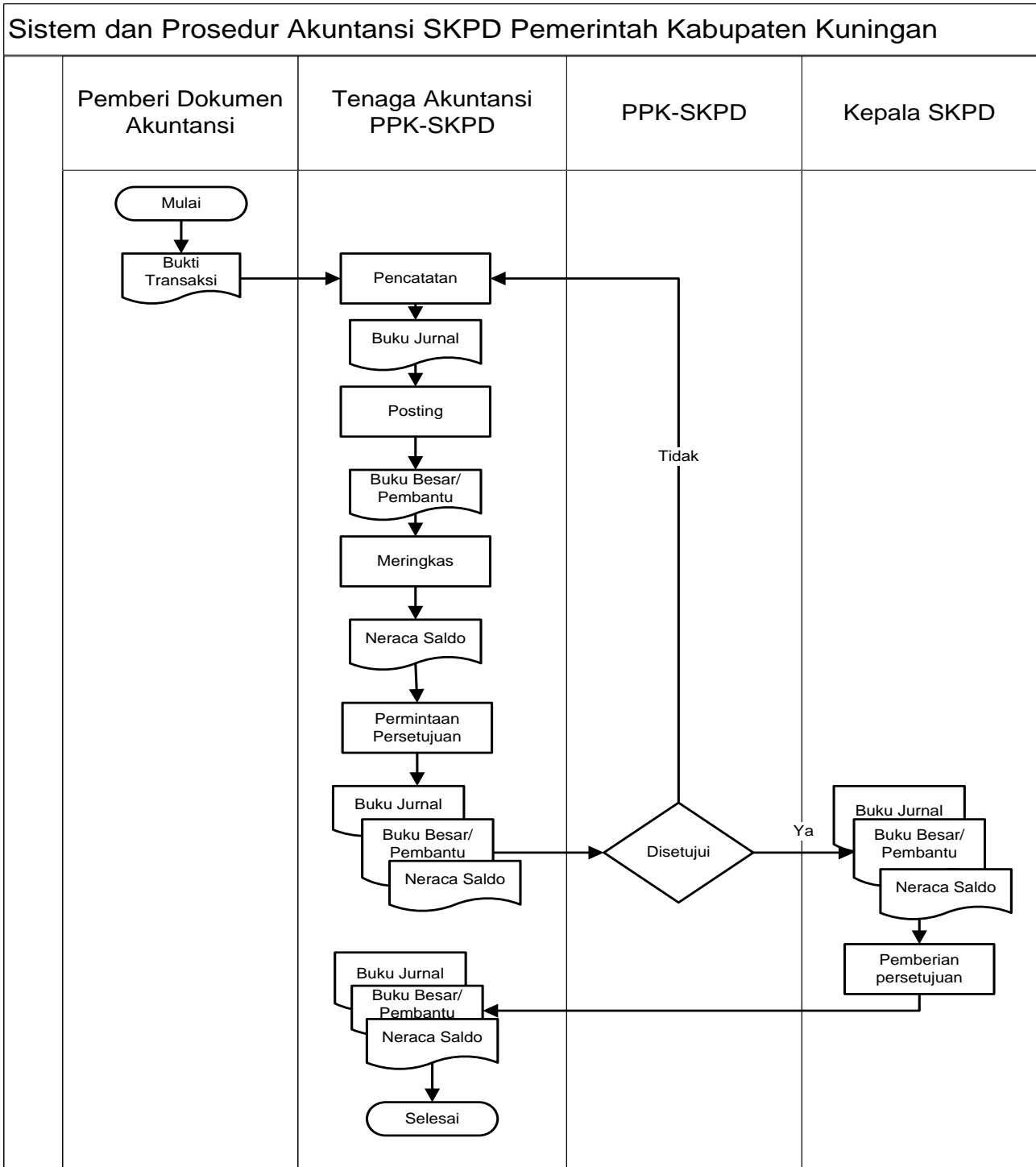
Cara pengisian formulir neraca saldo, yang contoh bentuknya seperti terlihat diatas, adalah sebagai berikut :

1. Diisikan tanggal dari periode penyusunan neraca saldo, misalkan jika neraca saldo disusun untuk periode 1 januari hingga 31 maret, maka dituliskan pertanggal 31 maret 20xx.
2. Diisikan nama dari SKPD yang menyusun neraca saldo ini.
3. Diisikan no halaman dari formulir neraca saldo ini.
4. Kolom 1 diisi kode rekening/akun yang mempunyai nilai saldo di buku besar.
5. Kolom 2 diisi nama rekening/akun yang mempunyai nilai saldo di buku besar sesuai dengan kode rekening/akunnya yang telah dicatat di kolom sebelumnya.

6. Kolom 3 diisi nilai saldo sebelah debit yaitu nilai saldo dari kode dan nama rekening/akun yang mempunyai nilai saldo di sebelah debit seperti tercatat dalam buku besar atau sesuai dengan kondisi saldo normal kode dan nama rekening/akun tersebut.
7. Kolom 4 diisi nilai saldo sebelah kredit yaitu nilai saldo dari kode dan nama rekening/akun yang mempunyai nilai saldo di sebelah kredit seperti tercatat dalam buku besar atau sesuai dengan kondisi saldo normal kode dan nama rekening/akun tersebut.
8. Diisikan nilai jumlah masing-masing dari total sisi debit dan total sisi kredit.
9. Formulir neraca saldo per-bulan yang disusun ditandatangani oleh PPK-SKPD dan Kepala SKPD dengan mencantumkan nama dan NIP-nya.

Setelah menyusun neraca saldo maka PPK-SKPD dapat menyusun laporan keuangan dengan cara memindahkan nama dan kode rekening/akun serta nilainya yang tertera dalam neraca saldo ke dalam bentuk format laporan keuangan. Untuk kode rekening/akun aset, kewajiban, ekuitas maka dimasukkan kedalam format laporan Neraca, untuk kode rekening/akun yang terkait dengan pendapatan-LRA dan belanja maka dimasukkan kedalam format Laporan Realisasi Anggaran dan untuk kode rekening/akun yang terkait dengan pendapatan-LO dan beban maka dimasukkan kedalam format Laporan Operasional.

Demikianlah uraian penjelasan mengenai sistem dan prosedur akuntansi di SKPD Pemerintah Kabupaten Kuningan. Seluruh uraian penjelasan diatas dapat digambarkan secara sederhana dalam suatu gambaran aliran proses sebagai berikut :



Keterangan Simbol Flowchart :

- : Simbol Terminator yaitu simbol untuk memulai dan mengakhiri sistem dan prosedur
- : Simbol Dokumen yaitu simbol untuk melambangkan dokumen, buku atau formulir
- : Simbol proses yaitu simbol untuk melambangkan proses pengelolaan data dari dokumen, buku atau formulir
- : Simbol keputusan yaitu simbol yang melambangkan pengambilan keputusan ya atau tidak
- : Simbol panah yaitu simbol yang melambangkan arah dokumen, buku atau formulir dan arah proses



## **SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI PENCATATAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)**

Bagian ini menjelaskan Sistem dan Prosedur Akuntansi Pendapatan di Pemerintah Kabupaten Kuningan untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mencatat anggaran SKPD berdasarkan DPA-SKPD.

### **KEBIJAKAN UMUM**

Pencatatan anggaran pada SKPD merupakan tahap persiapan sistem akuntansi pemerintah daerah. Pada tahap ini dilakukan pencatatan untuk merekam data anggaran yang akan membentuk estimasi perubahan SAL yang dilaksanakan pada saat terbitnya DPA-SKPD. Estimasi perubahan SAL ini merupakan akun perantara yang berguna dalam rangka pencatatan transaksi realisasi anggaran serta menghubungkannya dengan basis akuntansi akrual yang bermuara di ekuitas.

### **PIHAK-PIHAK TERKAIT**

Berbagai pihak/fungsi yang terkait dalam proses akuntansi pencatatan anggaran di SKPD beserta tugas-tugasnya adalah :

1. Tenaga Akuntansi di Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)

Dalam pelaksanaan prosedur ini, Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menerima dan menganalisa data dan informasi akuntansi dari dokumen anggaran DPA-SKPD;

- b. Mencatat transaksi-transaksi pencatatan anggaran (DPA-SKPD) yang berada dalam kewenangan SKPD-nya ke buku jurnal;
  - c. Memposting jurnal-jurnal anggaran ke dalam buku besarnya masing-masing; dan
  - d. Menyusun neraca saldo yang terkait akuntansi anggaran untuk persiapan penyusunan laporan keuangan, yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan; dan
  - e. Menyerahkan buku jurnal, buku besar dan neraca saldo kepada PPK-SKPD untuk diperiksa dan ditandatangani.
2. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) : **Sekretaris Badan/ Dinas/ Kepala Sub Bagian Keuangan atau Koordinator Sub Bagian Keuangan** (Sekretariat Daerah, Badan, Kantor, Dinas, Rumah Sakit Umum Daerah Linggarjati, Kecamatan, dan Kelurahan), Kepala Bagian Keuangan (Sekretariat DPRD dan Rumah Sakit Umum Daerah 45).

Dalam pelaksanaan prosedur ini, PPK-SKPD memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Bertanggungjawab atas sistem akuntansi pencatatan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
  - b. Memeriksa dan menandatangani hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Tenaga Akuntansi PPK-SKPD terkait akuntansi pencatatan anggaran SKPD secara triwulanan; dan
  - c. Menyerahkan Buku Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo SKPD yang mencatat pencatatan anggaran SKPD setiap triwulan kepada Pengguna Anggaran untuk disetujui
3. Pengguna Anggaran/Kepala SKPD : Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, Kepala Satuan, Camat, Lurah, Asisten Administrasi, Sekretaris DPRD, **Sekretaris Daerah** dan Direktur).

Dalam pelaksanaan prosedur ini, Pengguna Anggaran memiliki tugas menyerahkan dokumen anggaran DPA-SKPD kepada PPK-

SKPD.

### **DOKUMEN TERKAIT**

1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang menetapkan rincian anggaran SKPD.
2. Bukti memorial adalah bukti transaksi yang digunakan untuk mencatat transaksi non keuangan.

### **BUKU DAN ATAU FORMULIR YANG DIGUNAKAN**

Buku dan atau formulir yang digunakan dalam pelaksanaan sistem dan prosedur akuntansi pencatatan anggaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terdiri dari :

1. Buku Jurnal Umum (JU)  
Merupakan buku jurnal yang digunakan untuk melakukan pencatatan anggaran SKPD.
2. Buku Besar (BP)  
Merupakan buku yang digunakan untuk menampung pencatatan hasil posting transaksi dari buku jurnal. Buku besar ini merupakan pencatatan akuntansi atas seluruh transaksi untuk suatu rekening/akun per jenis atau obyek. Jadi setiap rekening/akun per jenis atau objek mempunyai buku besar tersendiri.
3. Buku Besar Pembantu (BP)  
Buku besar dapat dilengkapi dengan buku besar pembantu sebagai alat uji silang dan kelengkapan informasi rekening/akun tertentu. Buku besar pembantu berisi rincian akun (rincian obyek) yang telah dicatat dalam buku besar. Jika dirasakan informasi dalam buku besar sudah mencukupi maka buku besar pembantu tidak perlu dibuat lagi.
4. Neraca Saldo (NS)  
Merupakan formulir yang mencatat nilai saldo setiap rekening/akun per rincian objek sehingga diketahui jumlah total

dari seluruh rekening/akun.

## **KERANGKA SISTEM**

Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD menerima DPA-SKPD dari Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD. Setelah DPA-SKPD tersebut diterima maka Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD kemudian melakukan pencatatan akuntansi atas informasi anggaran SKPD dalam buku jurnal umum.

Setelah informasi anggaran pada DPA-SKPD dicatat dalam buku jurnal maka Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD kemudian melakukan posting ke buku besar. Setelah posting dari buku jurnal ke buku besar selesai dilakukan maka kemudian Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD menyusun Neraca Saldo sebagai dasar pembuatan Laporan Keuangan untuk setiap bulan yang diserahkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya kepada PPK-SKPD.

## **ALUR PROSEDUR TEKNIS**

Teknis pelaksanaan sistem dan prosedur akuntansi pencatatan anggaran di SKPD ini adalah sebagai berikut :

### **Langkah I : Penerimaan Bukti Transaksi**

Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD menerima DPA-SKPD dari Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD, kemudian menganalisa data dan informasi yang diperlukan. Dari DPA-SKPD, Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD akan mendapatkan informasi anggaran pendapatan dan belanja sebagai contoh :

1. Misalkan pada suatu DPA-SKPD untuk tahun anggaran 2022 yang disahkan pada tanggal 3 Januari 2022, diketahui memiliki jumlah anggaran pendapatan sebesar Rp 100.000.000,- dan anggaran belanja sebesar Rp 1.000.000.000- .

Berdasarkan data anggaran SKPD tersebut, maka Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD membuat Bukti Memorial. Bentuk formulir atau format dari Bukti memorial dapat dikembangkan

sesuai dengan kebutuhan atau oleh masing-masing SKPD sebagai contoh :

| PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN |                        |                          |               |
|-------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------|
| Bukti Memorial                |                        |                          |               |
| Satuan Kerja                  | :                      | SKPD Kabupaten Kuningan  |               |
| Keterangan Transaksi          | :                      | Pencatatan Anggaran SKPD |               |
| Tanggal bukti transaksi       | :                      | 3 Januari 2022           |               |
| Nomor Bukti Transaksi         | :                      | xx.xx.x.xx.xx            |               |
| Nama Bukti Transaksi          | :                      | DPA-SKPD                 |               |
| Kode Rekening/Akun            | Uraian                 | Debet                    | Kredit        |
| 3.1.2.02.01                   | Estimasi Pendapatan    | 100.000.000              | -             |
| 3.1.2.05.01                   | Estimasi Perubahan SAL | 900.000.000              | -             |
| 3.1.2.03.01                   | Apropriasi Belanja     | -                        | 1.000.000.000 |
|                               |                        |                          |               |
|                               |                        |                          |               |
| PPK-SKPD                      |                        | Kepala SKPD              |               |
| (tanda tangan)                |                        | (tanda tangan)           |               |
| (nama lengkap)                |                        | (nama lengkap)           |               |
| NIP .....                     |                        | NIP .....                |               |

2. Misalkan pada suatu DPPA-SKPD untuk tahun anggaran 2022 yang disahkan pada tanggal 3 September 2022, diketahui memiliki jumlah anggaran pendapatan sebesar Rp 120.000.000,- dan anggaran belanja sebesar Rp 1.300.000,000- .

Contoh sederhana tersebut diatas digunakan untuk mempermudah penjelasan sistem dan prosedur akuntansi pencatatan anggaran di SKPD ini. Tetapi contoh tersebut diatas tidak menunjukkan semua bentuk anggaran pendapatan yang secara nyata terjadi.

**Langkah II : Menjurnal Transaksi Pendapatan**

Berdasarkan Bukti Memorial yang dilampiri DPA-SKPD, maka kemudian Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD mencatat transaksi tersebut di buku jurnal. Pencatatan akuntansi dilakukan kedalam buku jurnal umum sebagai berikut apabila anggaran pendapatan lebih besar daripada anggaran belanja :

|                             | Debit | Kredit |
|-----------------------------|-------|--------|
| Estimasi Pendapatan____-LRA | xxxx  |        |
| Estimasi Perubahan SAL      |       | xxxx   |

**Apropriasi Belanja\_\_\_\_\_** **xxxx**

Pencatatan akuntansi dilakukan kedalam buku jurnal umum sebagai berikut apabila anggaran pendapatan lebih kecil daripada anggaran belanja :

|                                      | Debit        | Kredit       |
|--------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Estimasi Pendapatan_____ -LRA</b> | <b>xxxxx</b> |              |
| <b>Estimasi Perubahan SAL</b>        | <b>xxxxx</b> |              |
| <b>Apropriasi Belanja_____</b>       |              | <b>xxxxx</b> |

Pencatatan akuntansi dilakukan kedalam buku jurnal umum sebagai berikut apabila anggaran pendapatan sama besar dengan anggaran belanja :

|                                      | Debit        | Kredit       |
|--------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Estimasi Pendapatan_____ -LRA</b> | <b>xxxxx</b> |              |
| <b>Apropriasi Belanja_____</b>       |              | <b>xxxxx</b> |

Berdasarkan contoh transaksi 1 pada langkah 1 diatas maka pencatatan dalam buku jurnal umum dilakukan sebagai berikut :

|            |             |                        | Debit       | Kredit        |
|------------|-------------|------------------------|-------------|---------------|
| 3 Jan 2022 | 3.1.2.01.01 | Estimasi Pendapatan    | 100.000.000 |               |
|            | 3.1.2.05.01 | Estimasi Perubahan SAL | 900.000.000 |               |
|            | 3.1.2.03.01 | Apropirasi Belanja     |             | 1.000.000.000 |

Berdasarkan contoh transaksi 2 terkait adanya perubahan APBD pada langkah 1 diatas maka pencatatan dalam buku jurnal umum dilakukan sebagai berikut :

|             |             |                        | Debit       | Kredit      |
|-------------|-------------|------------------------|-------------|-------------|
| 3 Sept 2022 | 3.1.2.01.01 | Estimasi Pendapatan    | 20.000.000  |             |
|             | 3.1.2.05.01 | Estimasi Perubahan SAL | 280.000.000 |             |
|             | 3.1.2.03.01 | Apropirasi Belanja     |             | 300.000.000 |

Penjurnalan tersebut diatas dilakukan dalam buku jurnal yang telah dijelaskan bagaimana bentuk dan pengisiannya di bagian sebelumnya. Atas dua transaksi tersebut dilakukan penjurnalan di buku jurnal umum sebagai berikut :

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU JURNAL UMUM (JU)

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan

Halaman 01

| Tanggal  | Nomor Bukti | Kode Rekening |   |   |    |    |  | Uraian                 | Ref . | Debit (Rp)    | Kredit (Rp)   |
|----------|-------------|---------------|---|---|----|----|--|------------------------|-------|---------------|---------------|
| 1        | 2           | 3             |   |   |    |    |  | 4                      | 5     | 6             | 7             |
|          |             |               |   |   |    |    |  |                        |       |               |               |
| 3/1/2022 |             | 3             | 1 | 2 | 01 | 01 |  | Estimasi Pendapatan    | -     | 100.000.000   | -             |
|          |             | 3             | 1 | 2 | 05 | 01 |  | Estimasi Perubahan SAL | -     | 900.000.000   | -             |
|          |             | 3             | 1 | 2 | 03 | 01 |  | Apropriasi Belanja     | -     | -             | 1.000.000.000 |
|          |             |               |   |   |    |    |  |                        |       |               |               |
| 3/9/2022 |             | 3             | 1 | 2 | 01 | 01 |  | Estimasi Pendapatan    | -     | 20.000.000    | -             |
|          |             | 3             | 1 | 2 | 05 | 01 |  | Estimasi Perubahan SAL | -     | 280.000.000   | -             |
|          |             | 3             | 1 | 2 | 03 | 01 |  | Apropriasi Belanja     | -     | -             | 300.000.000   |
|          |             |               |   |   |    |    |  |                        |       |               |               |
|          |             |               |   |   |    |    |  |                        |       |               |               |
| Jumlah   |             |               |   |   |    |    |  |                        |       | 1.300.000.000 | 1.300.000.000 |

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)

(tanda tangan)  
(nama lengkap)

NIP.....

NIP.....

Langkah III : Melakukan Posting ke Buku Besar

Setelah melakukan penjurnalan anggaran pendapatan, maka Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD melakukan posting atas pencatatan jurnal tersebut ke buku besar. Posting ini berguna agar seluruh transaksi yang sama-sama mempengaruhi suatu akun atau kode rekening dapat dikelompokkan dalam satu buku besar untuk kode rekening yang bersangkutan.

Contoh buku besar untuk Estimasi Pendapatan sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal adalah :

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 3.1.2.01.01  
Nama Rekening : Estimasi Pendapatan  
Pagu APBD : Rp. ----  
Pagu perubahan APBD : Rp. ----

Halaman 01

| No | Bukti |           | Ref | Uraian                                   | Debet (Rp)  | Kredit (Rp) |
|----|-------|-----------|-----|--|-------------|-------------|
|    | Nomor | Tanggal   |     |  |             |             |
|    |       | 3/01/2022 | JU  | Pencatatan Anggaran Pendapatan           | 100.000.000 | -           |
|    |       | 3/09/2022 | JU  | Pencatatan Anggaran Perubahan Pendapatan | 20.000.000  | -           |
|    |       |           |     |  |             |             |
|    |       |           |     | Jumlah                                   | 120.000.000 | -           |

|  |  |  |  |       |             |   |
|--|--|--|--|-------|-------------|---|
|  |  |  |  | Saldo | 120.000.000 | - |
|--|--|--|--|-------|-------------|---|

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP.....

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP.....

Contoh buku besar untuk Apropriasi Belanja sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal adalah :

KABUPATEN KUNINGAN

BUKU BESAR

SKPD

Kode Rekening

Nama Rekening

Pagu APBD

Pagu perubahan APBD

: SKPD Kabupaten Kuningan

: 3.1.2.03.01

: Apropriasi Belanja

: Rp. ----

: Rp. ----

Halaman 01

| No | Bukti |           | Ref | Uraian                                | Debet (Rp) | Kredit (Rp)   |
|----|-------|-----------|-----|---------------------------------------|------------|---------------|
|    | Nomor | Tanggal   |     |                                       |            |               |
|    |       | 3/01/2022 | JU  | Pencatatan Anggaran Belanja           | -          | 1.000.000.000 |
|    |       | 3/09/2022 | JU  | Pencatatan Anggaran Perubahan Belanja | -          | 300.000.000   |
|    |       |           |     |                                       |            |               |
|    |       |           |     | Jumlah                                | -          | 1.300.000.000 |
|    |       |           |     | Saldo                                 | -          | 1.300.000.000 |

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP.....

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP.....

Contoh buku besar untuk Estimasi Perubahan SAL sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal adalah :

KABUPATEN KUNINGAN

BUKU BESAR

SKPD

Kode Rekening

Nama Rekening

Pagu APBD

Pagu perubahan APBD

: SKPD Kabupaten Kuningan

: 3.1.2.05.01

: Estimasi Perubahan SAL

: Rp. ----

: Rp. ----

Halaman 01

| No | Bukti |           | Ref | Uraian  | Debet (Rp)    | Kredit (Rp) |
|----|-------|-----------|-----|---|---------------|-------------|
|    | Nomor | Tanggal   |     |   |               |             |
|    |       | 3/01/2022 | JU  | Pencatatan Estimasi Perubahan SAL Dinas A           | 900.000.000   | -           |
|    |       | 3/09/2022 | JU  | Pencatatan Estimasi Perubahan SAL Perubahan Dinas A | 280.000000    | -           |
|    |       |           |     |   |               |             |
|    |       |           |     | Jumlah  | -             | -           |
|    |       |           |     | Saldo   | 1.180.000.000 | -           |

PPK-SKPD

Kepala SKPD



(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

**Langkah IV : Menyusun Neraca Saldo dan Laporan Keuangan**

Setelah melakukan posting seluruh pencatatan dalam buku besar maka kemudian Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD membuat neraca saldo sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Penyusunan neraca saldo oleh Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD dilakukan secara triwulanan. Neraca saldo disusun dengan cara memindahkan saldo-saldo yang ada di tiap buku besar ke dalam Neraca Saldo. Contoh Neraca Saldo dari hasil pencatatan dan posting contoh transaksi keuangan diatas adalah sebagai berikut :

**KABUPATEN KUNINGAN  
NERACA SALDO  
PER TANGGAL 30 Juni 2022**

**SKPD** : SKPD Kabupaten Kuningan

**Halaman 01**

| Kode Rekening |   |   |    |    |   |   |   |   | Uraian                 | Jumlah        |               |
|---------------|---|---|----|----|---|---|---|---|------------------------|---------------|---------------|
|               |   |   |    |    |   |   |   |   |                        | Debit         | Kredit        |
| 1             |   |   |    |    |   |   |   |   | 2                      | 3             | 4             |
| 3             | 1 | 2 | 02 | 01 | - | - | - | - | Estimasi Pendapatan    | 100.000.000   | -             |
| 3             | 1 | 2 | 03 | 01 | - | - | - | - | Estimasi Perubahan SAL | 900.000.000   | -             |
| 3             | 1 | 2 | 05 | 01 | - | - | - | - | Apropriasi Belanja     | -             | 1.000.000.000 |
| Jumlah        |   |   |    |    |   |   |   |   |                        | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 |

PPK-SKPD  
(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Kepala SKPD  
(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh Neraca Saldo dari hasil pencatatan dan posting contoh transaksi anggaran sebelum perubahan diatas adalah sebagai berikut :

**KABUPATEN KUNINGAN  
NERACA SALDO  
PER TANGGAL 31 Desember 2022**

**SKPD** : SKPD Kabupaten Kuningan

**Halaman 01**

| Kode Rekening |   |   |    |    |   |   |   |   | Uraian                 | Jumlah        |               |
|---------------|---|---|----|----|---|---|---|---|------------------------|---------------|---------------|
|               |   |   |    |    |   |   |   |   |                        | Debit         | Kredit        |
| 1             |   |   |    |    |   |   |   |   | 2                      | 3             | 4             |
| 3             | 1 | 2 | 02 | 01 | - | - | - | - | Estimasi Pendapatan    | 120.000.000   | -             |
| 3             | 1 | 2 | 03 | 01 | - | - | - | - | Estimasi Perubahan SAL | 1.180.000.000 | -             |
| 3             | 1 | 2 | 05 | 01 | - | - | - | - | Apropriasi Belanja     | -             | 1.300.000.000 |
|               |   |   |    |    |   |   |   |   |                        |               |               |

|  |   |                      |
|--|---|----------------------|
| <b>Jumlah</b>  | <b>1.300.000.000</b>  | <b>1.300.000.000</b> |
| PPK-SKPD<br>(tanda tangan)<br>(nama lengkap)<br>NIP..... | Kepala SKPD<br>(tanda tangan)<br>(nama lengkap)<br>NIP..... |                      |

## **SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI PENCATATAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)**

Bagian ini menjelaskan Sistem dan Prosedur Akuntansi Pendapatan di Pemerintah Kabupaten Kuningan untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mencatat transaksi pendapatan pemerintah daerah di SKPD.

### **KEBIJAKAN UMUM**

Prosedur akuntansi pendapatan pada SKPD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pendapatan khususnya pendapatan asli daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD khususnya yang tertuang dalam RKA-SKPD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Sistem dan prosedur akuntansi pendapatan di SKPD merupakan salah satu sarana untuk menunjang proses pertanggungjawaban anggaran SKPD. Sistem dan prosedur akuntansi ini disusun berdasarkan kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

### **PIHAK-PIHAK TERKAIT**

Berbagai pihak/fungsi yang terkait dalam proses akuntansi pendapatan di SKPD beserta tugas-tugasnya adalah :

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Dalam pelaksanaan prosedur ini, PPK memiliki tugas menerbitkan Surat Ketetapan PPK tentang denda keterlambatan pekerjaan.

2. Bendahara Penerimaan di SKPD

Dalam pelaksanaan prosedur ini, Bendahara Penerimaan SKPD memiliki tugas menyiapkan dokumen-dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan akuntansi pendapatan SKPD seperti SKP Daerah, SKPDKB, SKPDKBT, SKR Daerah, SKRDKB, SKRDKBT, STTS, TBP, SSPD, SSRD, STS, Bukti Setoran Bank, Bukti Transfer Bank, dan Nota Kredit.

3. Tenaga Akuntansi di Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)

Dalam pelaksanaan prosedur ini, Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menerima bukti-bukti transaksi dan menganalisa data dan informasi akuntansi dari bukti transaksi tersebut seperti SKP Daerah, SKPDKB, SKPDKBT, SKR Daerah, SKRDKB, SKRDKBT, sebagai penetapan pendapatan SKPD dari Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD.
- b. Menerima bukti-bukti transaksi dan menganalisa data dan informasi akuntansi dari bukti transaksi tersebut seperti SKP Daerah, SKPDKB, SKPDKBT, SKR Daerah, SKRDKB, SKRDKBT, STTS, TBP, SSPD, SSRD, STS, Bukti Setoran Bank, Bukti Transfer Bank, dan Nota Kredit, sebagai bukti pembayaran pendapatan SKPD dari Bendahara Penerimaan SKPD.
- c. Mencatat transaksi-transaksi pendapatan berdasarkan bukti-bukti yang terkait yang berada dalam kewenangan SKPD-nya;
- d. Memposting jurnal-jurnal pendapatan ke dalam buku besarnya masing-masing;
- e. Menyusun neraca saldo yang terkait akuntansi pendapatan untuk persiapan penyusunan laporan keuangan, yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan; dan

- f. Menyerahkan buku jurnal, buku besar dan neraca saldo kepada PPK-SKPD untuk diperiksa dan ditandatangani.
4. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) : Sekretaris Badan/ Dinas atau Kepala Sub Bagian Keuangan atau Koordinator Sub Bagian Keuangan (Sekretariat Daerah, Badan, Kantor, Dinas, Rumah Sakit Umum Daerah Linggarjati, Kecamatan, dan Kelurahan), Kepala Bagian Keuangan (Sekretariat DPRD dan Rumah Sakit Umum Daerah 45).

Dalam pelaksanaan prosedur ini, PPK-SKPD memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Bertanggungjawab atas sistem akuntansi pendapatan pada SKPD yang dipimpinnya;
  - b. Menerima bukti-bukti transaksi seperti SKP Daerah, SKPDKB, SKPDKBT, SKR Daerah, SKRDKB, SKRDKBT, sebagai penetapan pendapatan SKPD dari Pengguna Anggaran dan menyerahkan kepada tenaga akuntansi PPK-SKPD untuk dicatat;
  - c. Memeriksa dan menandatangani hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Tenaga Akuntansi PPK-SKPD terkait akuntansi pendapatan SKPD secara triwulanan; dan
  - d. Menyerahkan Buku Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo SKPD yang mencatat transaksi pendapatan SKPD setiap triwulan kepada Pengguna Anggaran untuk disetujui.
5. Pengguna Anggaran / Kepala SKPD : Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, Kepala Satuan, Camat, Lurah, Asisten Administrasi, Sekretaris DPRD, dan Direktur.

Dalam pelaksanaan prosedur ini, Pengguna Anggaran memiliki tugas :

- a. Menetapkan pendapatan SKPD dengan SKP Daerah, SKPDKB, SKPDKBT, SKR Daerah, SKRDKB, atau SKRDKBT; dan
- b. Menyetujui Buku Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo yang diserahkan PPK-SKPD setiap triwulan.

## **DOKUMEN TERKAIT**

1. Surat Ketetapan Pajak Daerah selanjutnya disebut SKP Daerah adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak dan digunakan pula untuk membayar pajak daerah metode *official assessment*;
2. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar selanjutnya disebut SKPDKB adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar serta digunakan pula untuk membayar pajak daerah kurang bayar tersebut untuk metode *official assessment*;
3. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya disebut SKPDKBT adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan dan digunakan pula untuk membayar pajak daerah kurang bayar tambahan tersebut metode *official assessment*;
4. Surat Tagihan Pajak Daerah selanjutnya disebut STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda dan digunakan pula untuk membayar tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda tersebut;
5. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang selanjutnya disebut SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak dan digunakan pula untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang;
6. Surat Tanda Terima Setoran selanjutnya disebut STTS adalah bukti tanda terima pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;
7. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya

jumlah pokok retribusi yang terutang;

8. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar selanjutnya disebut SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih kurang dibayar serta digunakan pula untuk membayar retribusi daerah kurang bayar tersebut metode *official assessment*;
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya disebut SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan SKRDKBT dan digunakan pula untuk membayar retribusi daerah kurang bayar tambahan tersebut metode *official assessment*;
11. Surat Ketetapan PPK tentang denda keterlambatan pekerjaan adalah surat keputusan yang dikeluarkan PPK yang menetapkan jumlah denda keterlambatan pekerjaan yang dikenakan kepada penyedia pekerjaan;
12. Tanda Bukti Pembayaran selanjutnya disebut TBP adalah bukti pembayaran pajak/retribusi daerah dari wajib bayar kepada bendahara penerimaan SKPD;
13. Surat Tanda Setoran selanjutnya disebut STS adalah bukti yang diperoleh setelah melakukan penyetoran uang ke Kas Daerah;
14. Surat Setoran Pajak Daerah selanjutnya disebut SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak metode *self assessment* yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
15. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi

metode *self assessment* yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;

16. Bukti Setoran Bank merupakan formulir bukti melakukan setoran ke Rekening Umum Kas Daerah;
17. Bukti Transfer merupakan formulir bukti melakukan transfer dari suatu rekening ke Rekening Umum Kas Daerah;
18. Nota Kredit merupakan bukti transaksi penerimaan uang di Rekening Umum Kas Daerah; dan
19. Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah yang selanjutnya disebut LHP Inspektorat Daerah adalah laporan hasil pemeriksaan inspektorat daerah yang menunjukkan nilai denda keterlambatan pekerjaan.

#### **BUKU DAN ATAU FORMULIR YANG DIGUNAKAN**

Buku dan atau formulir yang digunakan dalam pelaksanaan sistem dan prosedur akuntansi pendapatan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (akuntansi SKPD) terdiri dari :

1. Buku Jurnal Umum (JU)  
Merupakan buku jurnal yang digunakan untuk melakukan pencatatan akuntansi atas transaksi pendapatan SKPD yang berbasis akrual terkait penyusunan LO dan Neraca.
2. Buku Jurnal Penerimaan Kas (JM)  
Merupakan buku jurnal yang digunakan untuk melakukan pencatatan akuntansi atas transaksi penerimaan kas yang berasal dari transaksi penerimaan tunai pendapatan. Pada umumnya buku jurnal penerimaan kas digunakan untuk mencatat transaksi basis kas terkait penyusunan LRA dan LAK.
3. Buku Besar (BB)  
Merupakan buku yang digunakan untuk menampung pencatatan hasil posting transaksi dari buku jurnal. Buku besar ini



merupakan pencatatan akuntansi atas seluruh transaksi terkait pendapatan SKPD untuk suatu rekening/akun per jenis atau obyek. Jadi setiap rekening/akun per jenis atau objek mempunyai buku besar tersendiri.

4. Buku Besar Pembantu (BP)

Buku besar dapat dilengkapi dengan buku besar pembantu sebagai alat uji silang dan kelengkapan informasi rekening/akun tertentu terkait transaksi pendapatan SKPD. Buku besar pembantu berisi rincian akun (rincian obyek) yang telah dicatat dalam buku besar. Jika dirasakan informasi dalam buku besar sudah mencukupi maka buku besar pembantu tidak perlu dibuat lagi.

5. Neraca Saldo (NS)

Merupakan formulir yang mencatat nilai saldo setiap rekening/akun per rincian objek termasuk rekening/akun yang terkait transaksi pendapatan SKPD sehingga diketahui jumlah total dari seluruh rekening/akun.

## **KERANGKA SISTEM**

Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD menerima bukti-bukti transaksi pengakuan pendapatan dari Pengguna Anggaran dan bukti-bukti transaksi penerimaan pendapatan dari Bendahara Penerimaan SKPD yang diperoleh melalui prosedur atau mekanisme penatausahaan keuangan bendahara penerimaan. Bukti-bukti transaksi pendapatan SKPD dapat berupa SKP Daerah, SKPDKB, SKPDKBT, SKR Daerah, SKRDKB, SKRDKBT, SPPT, STTS, TBP, SSPD, SSRD, STS, Bukti Setoran Bank, Bukti Transfer Bank, dan Nota Kredit. Pada saat bukti transaksi pendapatan tersebut telah diterima maka Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD kemudian melakukan pencatatan akuntansi dalam :

1. Buku jurnal umum, untuk mencatat pengakuan pendapatan baik yang sudah diperoleh (*earned*) maupun yang sudah diterima (*realized*) terkait penyusunan LO dan Neraca.
2. Buku jurnal penerimaan kas, untuk mencatat penerimaan

kas dari realisasi anggaran pendapatan terkait penyusunan LRA dan LAK.

Pencatatan transaksi atas pendapatan dilakukan saat terjadinya transaksi dan atau diterimanya bukti transaksi tersebut namun pengakuan transaksi tetap pada tanggal bukti transaksi. Setelah seluruh transaksi dicatat dalam buku jurnal maka Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD kemudian melakukan posting ke buku besar. Setelah posting dari buku jurnal ke buku besar selesai dilakukan maka kemudian Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD menyusun Neraca Saldo sebagai dasar pembuatan Laporan Keuangan untuk setiap triwulan yang diserahkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah triwulan berakhir kepada PPK-SKPD.

## **ALUR PROSEDUR TEKNIS**

Teknis pelaksanaan sistem dan prosedur akuntansi pendapatan di SKPD ini adalah sebagai berikut :

### **Langkah I : Penerimaan Bukti Transaksi**

Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD menerima bukti-bukti transaksi pendapatan dari Pengguna Anggaran dan Bendahara Penerimaan SKPD kemudian melakukan analisa informasi akuntansi. Dari bukti-bukti transaksi pendapatan tersebut, Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD akan mendapatkan informasi transaksi pendapatan yang terjadi. Sebagai contoh : misalkan diketahui bahwa selama bulan Februari 2022, telah terjadi transaksi yang terkait dengan pendapatan sebagai berikut (asumsi tanggal bukti transaksi sama dengan tanggal penerimaan bukti transaksi) :

- 1 Februari 2022    Tenaga akuntansi di PPK-SKPD menerima TBP dari Bendahara Penerimaan SKPD atas uang jaminan dari pihak ketiga bersamaan dengan pembayaran perizinan untuk pemasangan iklan sebesar Rp5.000.000,- kemudian langsung disetor ke Rekening Umum Kas Daerah
- 2 Februari 2022    Tenaga akuntansi di PPK-SKPD menerima SKP Daerah

yang diterbitkan Pengguna Anggaran sebesar Rp 3.000.000,- (*official assessment*).

- 4 Februari 2022 Tenaga akuntansi di PPK-SKPD menerima bukti TBP dan SKP Daerah dari Bendahara Penerimaan SKPD atas pendapatan pajak daerah sebesar Rp 2.000.000,- yang merupakan pembayaran atas SKP Daerah tanggal 2 Februari 2022.
- 5 Februari 2022 Tenaga akuntansi di PPK-SKPD menerima bukti STS dan SKP Daerah yang telah divalidasi Bank Kas Daerah dari Bendahara Penerimaan SKPD sebagai informasi bahwa uang pajak daerah sebesar Rp 2.000.000,- tersebut telah disetor ke Kas Daerah.
- 8 Februari 2022 Tenaga akuntansi di PPK-SKPD menerima Bukti Setoran Bank/Bukti Transfer/STS dan SKP Daerah dari Bendahara Penerimaan SKPD atas pembayaran pajak daerah oleh wajib pajak daerah langsung melalui bank atau langsung ke Rekening Umum Kas Daerah sebesar Rp 1.000.000,- yang merupakan pembayaran atas SKP Daerah tanggal 2 Februari 2022.
- 10 Februari 2022 Tenaga akuntansi di PPK-SKPD menerima bukti TBP dari Bendahara Penerimaan SKPD atas pendapatan retribusi sebesar Rp 500.000,- yang bukan merupakan pembayaran atas SKRD.
- 11 Februari 2022 Tenaga akuntansi di PPK-SKPD menerima bukti STS dan SSRD yang telah divalidasi Bank Kas Daerah dari Bendahara Penerimaan SKPD sebagai informasi bahwa uang retribusi sebesar Rp 500.000,- tersebut telah disetor ke Kas Daerah.
- 15 Februari 2022 Tenaga akuntansi di PPK-SKPD menerima Bukti Setoran Bank/Bukti Transfer/STS dan SSRD dari Bendahara Penerimaan SKPD atas pembayaran retribusi oleh wajib retribusi langsung melalui bank atau langsung ke Kas Daerah sebesar Rp 1.000.000,-

yang bukan merupakan pembayaran atas SKRD.

- 17 Februari 2022 Tenaga akuntansi di PPK-SKPD menerima SKPDKB yang diterbitkan Pengguna Anggaran sebesar Rp 500.000,- (*official assessment*).
- 19 Februari 2022 Tenaga akuntansi di PPK-SKPD menerima STS dan SKPDKB dari Bendahara Penerimaan SKPD yang merupakan pembayaran langsung ke rekening umum kas Daerah oleh wajib bayar atas SKPDKB tanggal 17 Februari 2022.
- 20 Februari 2022 Tenaga akuntansi di PPK-SKPD menerima STPD atas denda bunga keterlambatan Pajak Daerah yang diterbitkan Pengguna Anggaran sebesar Rp 750.000,- (*official assessment*).
- 24 Februari 2022 Tenaga akuntansi di PPK-SKPD menerima STS dan STPD dari Bendahara Penerimaan SKPD yang merupakan pembayaran langsung ke rekening umum kas Daerah oleh wajib bayar atas STPD tanggal 20 Februari 2022.
- 25 Februari 2022 Tenaga akuntansi di PPK-SKPD menerima Surat Keputusan PPK tentang denda keterlambatan pekerjaan yang diterbitkan PPK serta LHP Inspektorat Daerah sebesar Rp 1.000.000,- (*official assessment*).
- 27 Februari 2022 Tenaga akuntansi di PPK-SKPD menerima STS dan Surat Keputusan PPK tentang denda keterlambatan pekerjaan dari Bendahara Penerimaan SKPD yang merupakan pembayaran pembayaran langsung ke rekening umum kas Daerah oleh wajib bayar atas Surat Keputusan PPK tanggal 25 Februari 2022.
- 28 Februari 2022 Pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya membongkar reklamenya setelah masa berlaku perizinannya selesai, SKPD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan. Tenaga

Akuntansi PPK-SKPD akan membuat bukti memorial terkait eksekusi jaminan.

Contoh sederhana tersebut diatas diberikan untuk mempermudah penjelasan sistem dan prosedur akuntansi pendapatan di SKPD ini. Tetapi contoh tersebut diatas tidak menunjukkan semua bentuk transaksi pendapatan yang secara nyata terjadi.

**Langkah II : Menjurnal Transaksi Pendapatan**

Berdasarkan bukti-bukti transaksi pendapatan yang pada umumnya diperoleh melalui penatausahaan pendapatan SKPD, maka kemudian Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD mencatat transaksi tersebut di buku jurnal. Pencatatan akuntansi dilakukan kedalam buku jurnal sesuai dengan jenis transaksi yang terjadi.

- 1. Untuk **pengakuan pendapatan atas surat ketetapan yang diterbitkan Pengguna Anggaran (Official Assessment)** maka dilakukan pencatatan dalam Buku Jurnal Umum dengan melakukan jurnal, “Piutang PAD sesuai jenisnya” di Debit dan “Akun Pendapatan PAD-LO sesuai jenisnya” di kredit, sebagai berikut:

|                         | Debit | Kredit |
|-------------------------|-------|--------|
| Piutang PAD_____        | xxxx  |        |
| Pendapatan PAD_____ -LO |       | xxxx   |

Catatan : Kode dan nama rekening/akun piutang dan pendapatan (dalam contoh ditulis piutang PAD\_\_\_\_\_ dan pendapatan PAD\_\_\_\_\_ -LO) disesuaikan dengan kode dan nama rekening/akun, sampai rincian obyek, sesuai dengan pengakuan pendapatannya.

- 2. Untuk **penerimaan kas dari pendapatan atas Surat Ketetapan PAD melalui bendahara penerimaan** maka dilakukan pencatatan basis akrual dalam Buku Jurnal Umum dengan melakukan jurnal, “Kas di Bendahara Penerimaan” di Debit dan “Akun Piutang PAD sesuai jenisnya” di kredit, sebagai berikut:

|                                    | Debit       | Kredit      |
|------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Kas di Bendahara Penerimaan</b> | <b>xxxx</b> |             |
| <b>Piutang PAD _____</b>           |             | <b>xxxx</b> |

Kemudian untuk mencatat realisasi anggaran berbasis kas dicatat dalam Buku Jurnal Penerimaan kas dengan melakukan jurnal, “Estimasi Perubahan SAL” di Debit dan “Akun Pendapatan PAD-LRA sesuai jenisnya” di kredit, sebagai berikut :

|                                  | Debit        | Kredit       |
|----------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Estimasi Perubahan SAL</b>    | <b>xxxxx</b> |              |
| <b>Pendapatan PAD _____ -LRA</b> |              | <b>xxxxx</b> |

Catatan : Kode dan nama rekening/akun piutang dan pendapatan (dalam contoh ditulis piutang PAD\_\_\_\_\_, pendapatan PAD\_\_\_\_\_-LO dan pendapatan PAD\_\_\_\_\_-LRA) disesuaikan dengan kode dan nama rekening/akun, sampai rincian obyek, sesuai dengan realisasi pendapatan yang diterima.

- Untuk **penerimaan kas dari pendapatan bukan atas Surat Ketetapan PAD melalui bendahara penerimaan (Self Assessment)** maka dilakukan pencatatan basis akrual dalam Buku Jurnal Umum dengan melakukan jurnal, “Kas di Bendahara Penerimaan” di Debit dan “Akun Pendapatan PAD-LO sesuai jenisnya” di kredit, sebagai berikut:

|                                    | Debit        | Kredit       |
|------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Kas di Bendahara Penerimaan</b> | <b>xxxxx</b> |              |
| <b>Pendapatan PAD _____ -LO</b>    |              | <b>xxxxx</b> |

Kemudian untuk mencatat realisasi anggaran berbasis kas dicatat dalam Buku Jurnal Penerimaan kas dengan melakukan jurnal, “Estimasi Perubahan SAL” di Debit dan “Akun Pendapatan PAD-LRA sesuai jenisnya” di kredit, sebagai berikut :

|                                  | Debit        | Kredit       |
|----------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Estimasi Perubahan SAL</b>    | <b>xxxxx</b> |              |
| <b>Pendapatan PAD _____ -LRA</b> |              | <b>xxxxx</b> |

Catatan : Kode dan nama rekening/akun piutang dan pendapatan (dalam contoh ditulis pendapatan

PAD\_\_\_\_-LO dan pendapatan PAD\_\_\_\_-LRA) disesuaikan dengan kode dan nama rekening/akun, sampai rincian obyek, sesuai dengan realisasi pendapatan yang diterima.

4. Untuk transaksi **penyetoran kas ke kas daerah** oleh bendahara penerimaan maka dilakukan pencatatan dalam Buku Jurnal Umum dengan melakukan jurnal, “RK PPKD” di Debit dan “Kas di Bendahara Penerimaan” di kredit, sebagai berikut :

|                                    | Debit       | Kredit      |
|------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>RK PPKD</b>                     | <b>xxxx</b> |             |
| <b>Kas di Bendahara Penerimaan</b> |             | <b>xxxx</b> |

5. Untuk transaksi **pendapatan atas Surat Ketetapan PAD yang disetor langsung ke Kas Daerah (Official Assessment)** atau melalui bank, oleh wajib bayar (misalkan wajib pajak daerah) atau kasnya tidak diterima secara langsung oleh bendahara penerimaan maka dilakukan pencatatan dalam Buku Jurnal Umum dengan melakukan jurnal, “RK PPKD” di Debit dan “Piutang PAD sesuai jenisnya” di kredit, sebagai berikut :

|                        | Debit       | Kredit      |
|------------------------|-------------|-------------|
| <b>RK PPKD</b>         | <b>xxxx</b> |             |
| <b>Piutang PAD____</b> |             | <b>xxxx</b> |

Kemudian untuk mencatat realisasi anggaran berbasis kas dicatat dalam Buku Jurnal Penerimaan kas dengan melakukan jurnal, “Estimasi Perubahan SAL” di Debit dan “Akun Pendapatan PAD-LRA sesuai jenisnya” di kredit, sebagai berikut :

|                                | Debit       | Kredit      |
|--------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Estimasi Perubahan SAL</b>  | <b>xxxx</b> |             |
| <b>Pendapatan PAD____ -LRA</b> |             | <b>xxxx</b> |

6. Untuk transaksi **pendapatan bukan atas Surat Ketetapan PAD yang disetor langsung ke Kas Daerah (Self Assessment)** atau melalui bank, oleh wajib bayar (misalkan wajib pajak daerah) atau kasnya tidak diterima secara langsung oleh bendahara penerimaan maka dilakukan pencatatan dalam Buku Jurnal Umum dengan melakukan jurnal, “RK PPKD” di Debit dan

“Pendapatan PAD-LO sesuai jenisnya” di kredit, sebagai berikut :

|                              | Debit       | Kredit      |
|------------------------------|-------------|-------------|
| <b>RK PPKD</b>               | <b>xxxx</b> |             |
| <b>Pendapatan PAD____-LO</b> |             | <b>xxxx</b> |

Kemudian untuk mencatat realisasi anggaran berbasis kas dicatat dalam Buku Jurnal Penerimaan kas dengan melakukan jurnal, “Estimasi Perubahan SAL” di Debit dan “Akun Pendapatan PAD-LRA sesuai jenisnya” di kredit, sebagai berikut :

|                               | Debit       | Kredit      |
|-------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Estimasi Perubahan SAL</b> | <b>xxxx</b> |             |
| <b>Pendapatan PAD____-LRA</b> |             | <b>xxxx</b> |

Catatan : Kode dan nama rekening/akun piutang dan pendapatan (dalam contoh ditulis piutang PAD\_\_\_\_, pendapatan PAD\_\_\_\_-LO dan pendapatan PAD\_\_\_\_-LRA) disesuaikan dengan kode dan nama rekening/akun, sampai rincian obyek, sesuai dengan realisasi pendapatan yang diterima.

Transaksi *self assessment (realized)* dapat diikuti dengan transaksi *official assessment (earned)* atau tidak sama sekali.

Berdasarkan uraian penjurnalan dan contoh transaksi tersebut diatas maka Tenaga Akuntansi di PPK–SKPD melakukan pencatatan dalam buku jurnal terkait sebagai berikut :

**Pertama** pencatatan dalam buku jurnal umum dilakukan atas penerimaan pendapatan diterima dimuka atas uang jaminan dari pihak ketiga bersamaan dengan pembayaran perizinan untuk pemasangan iklan sebesar Rp5.000.000,- pada tanggal 1 Februari 2022 yaitu:

|            |             |                                | Debit     | Kredit    |
|------------|-------------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 1 Feb 2022 | 1.1.1.02.00 | Kas di Bendahara Penerimaan    | 5.000.000 |           |
|            | 2.1.1.08.01 | Utang Jaminan Pemasangan Iklan |           | 5.000.000 |

Tenaga Akuntansi di PPK–SKPD juga mencatat transaksi realisasi anggaran pendapatan-LRA dengan melakukan pencatatan dalam buku jurnal penerimaan kas dengan jurnal sebagai berikut :

|            |             |                        | Debit     | Kredit |
|------------|-------------|------------------------|-----------|--------|
| 1 Feb 2022 | 3.1.2.05.01 | Estimasi Perubahan SAL | 5.000.000 |        |



|             |  |           |
|-------------|--|-----------|
| 4.1.4.09.02 | Hasil Eksekusi Jaminan<br>atas Pembongkaran<br>Reklame - LRA | 5.000.000 |
|-------------|--|-----------|

dan saat penyetorannya ke kas daerah di lakukan di jurnal Umum, yaitu :

|            |             |                        | Debit     | Kredit    |
|------------|-------------|------------------------|-----------|-----------|
| 1 Feb 2022 | 7.2.8.99.99 | Pengeluaran RK PPKD    | 5.000.000 |           |
|            | 1.1.1.02.01 | Kas di Bend Penerimaan |           | 5.000.000 |

**Kedua,** pencatatan dalam buku jurnal umum dilakukan atas pengakuan pendapatan atas diterbitkannya SKPD Daerah tanggal 2 Februari 2022 sebesar Rp 3.000.000,-, yaitu:

|            |             |                            | Debit     | Kredit    |
|------------|-------------|----------------------------|-----------|-----------|
| 2 Feb 2022 | 1.1.3.01.00 | Piutang Pajak Daerah       | 3.000.000 |           |
|            | 8.1.1.00.00 | Pendapatan Pajak Daerah-LO |           | 3.000.000 |

**Ketiga** pencatatan dalam buku jurnal umum dan buku jurnal penerimaan kas dilakukan atas transaksi penerimaan kas dari realisasi pendapatan pajak daerah yang bukti TBP dan SKP Daerah diterima dari bendahara penerimaan pada tanggal 4 Februari 2022, yaitu:

|            |             |                        | Debit     | Kredit    |
|------------|-------------|------------------------|-----------|-----------|
| 4 Feb 2022 | 1.1.1.02.01 | Kas di Bend Penerimaan | 2.000.000 |           |
|            | 1.1.3.01.00 | Piutang Pajak Daerah   |           | 2.000.000 |

Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD juga mencatat transaksi realisasi anggaran pendapatan-LRA dengan melakukan pencatatan dalam buku jurnal penerimaan kas dengan jurnal sebagai berikut :

|            |             |                         | Debit     | Kredit    |
|------------|-------------|-------------------------|-----------|-----------|
| 4 Feb 2022 | 3.1.2.05.01 | Estimasi Perubahan SAL  | 2.000.000 |           |
|            | 4.1.1.00.00 | Pendapatan Pajak Daerah |           | 2.000.000 |

dan saat penyetorannya ke rekening umum kas daerah berdasarkan STS dan SKP Daerah di lakukan di jurnal Umum, yaitu :

|            |             |                        | Debit     | Kredit    |
|------------|-------------|------------------------|-----------|-----------|
| 5 Feb 2022 | 7.2.8.99.99 | Pengeluaran RK PPKD    | 3.000.000 |           |
|            | 1.1.1.02.01 | Kas di Bend Penerimaan |           | 3.000.000 |

**Keempat,** pencatatan dalam buku jurnal umum dan jurnal penerimaan kas dilakukan atas transaksi yang terkait dengan pendapatan pajak daerah yang langsung melalui kas daerah pada tanggal 8 Februari 2022, yaitu :

|            |             |                      | Debit     | Kredit    |
|------------|-------------|----------------------|-----------|-----------|
| 8 Feb 2022 | 7.2.8.99.99 | Pengeluaran RK PPKD  | 1.000.000 |           |
|            | 1.1.3.01.00 | Piutang Pajak Daerah |           | 1.000.000 |

Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD juga mencatat transaksi realisasi anggaran pendapatan-LRA dengan melakukan pencatatan dalam buku jurnal penerimaan kas dengan jurnal sebagai berikut :

|            |             |                        | Debit     | Kredit    |
|------------|-------------|------------------------|-----------|-----------|
| 8 Feb 2022 | 3.1.2.05.01 | Estimasi Perubahan SAL | 1.000.000 |           |
|            | 4.1.1.00.00 | Pajak Daerah __LRA     |           | 1.000.000 |

**Kelima,** pencatatan dalam buku jurnal umum dan buku jurnal penerimaan kas dilakukan atas transaksi pendapatan retribusi sebesar Rp 500.000,- yang bukan merupakan pembayaran atas SKRD pada tanggal 10 Februari 2022, yaitu :

|             |             |                                | Debit   | Kredit  |
|-------------|-------------|--------------------------------|---------|---------|
| 10 Feb 2022 | 1.1.1.02.01 | Kas di Bend Penerimaan         | 500.000 |         |
|             | 8.1.2.00.00 | Pendapatan Retribusi Daerah-LO |         | 500.000 |

Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD juga mencatat transaksi realisasi anggaran pendapatan-LRA dengan melakukan pencatatan dalam buku jurnal penerimaan kas dengan jurnal sebagai berikut :

|             |             |                         | Debit   | Kredit  |
|-------------|-------------|-------------------------|---------|---------|
| 10 Feb 2022 | 3.1.2.05.01 | Estimasi Perubahan SAL  | 500.000 |         |
|             | 4.1.2.00.00 | Retribusi Daerah __-LRA |         | 500.000 |

dan di saat penyetorannya ke rekening umum kas daerah berdasarkan STS dan SKRD di lakukan di jurnal Umum, yaitu :

|             |             |                        | Debit   | Kredit  |
|-------------|-------------|------------------------|---------|---------|
| 11 Feb 2022 | 7.2.8.99.99 | Pengeluaran RK PPKD    | 500.000 |         |
|             | 1.1.1.02.01 | Kas di Bend Penerimaan |         | 500.000 |

**Keenam,** pencatatan dalam buku jurnal umum dan jurnal penerimaan kas dilakukan atas transaksi yang terkait dengan

pendapatan retribusi daerah yang langsung melalui kas daerah pada tanggal 15 Februari 2022, yaitu :

|             |             |                                | Debit     | Kredit    |
|-------------|-------------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 15 Feb 2022 | 7.2.8.99.99 | Pengeluaran RK PPKD            | 1.000.000 |           |
|             | 8.1.2.00.00 | Pendapatan Retribusi Daerah-LO |           | 1.000.000 |

Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD juga mencatat transaksi realisasi anggaran pendapatan-LRA dengan melakukan pencatatan dalam buku jurnal penerimaan kas dengan jurnal sebagai berikut :

|             |             |                         | Debit     | Kredit    |
|-------------|-------------|-------------------------|-----------|-----------|
| 15 Feb 2022 | 3.1.2.05.01 | Estimasi Perubahan SAL  | 1.000.000 |           |
|             | 4.1.2.00.00 | Retribusi Daerah __-LRA |           | 1.000.000 |

**Ketujuh,** pencatatan dalam buku jurnal umum dilakukan atas pengakuan pendapatan atas diterbitkannya SKPDKB oleh Pengguna Anggaran tanggal 17 Februari 2022 sebesar Rp 500.000,-, yaitu:

|             |             |                            | Debit   | Kredit  |
|-------------|-------------|----------------------------|---------|---------|
| 17 Feb 2022 | 1.1.3.01.00 | Piutang Pajak Daerah       | 500.000 |         |
|             | 8.1.1.00.00 | Pendapatan Pajak Daerah-LO |         | 500.000 |

**Kedelapan,** pencatatan dalam buku jurnal umum dan jurnal penerimaan kas dilakukan atas transaksi yang terkait dengan pendapatan atas diterbitkannya SKPDKB oleh Pengguna Anggaran tanggal 17 Februari 2022, yaitu :

|             |             |                      | Debit   | Kredit  |
|-------------|-------------|----------------------|---------|---------|
| 19 Feb 2022 | 7.2.8.99.99 | Pengeluaran RK PPKD  | 500.000 |         |
|             | 1.1.3.01.00 | Piutang Pajak Daerah |         | 500.000 |

Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD juga mencatat transaksi realisasi anggaran pendapatan-LRA dengan melakukan pencatatan dalam buku jurnal penerimaan kas dengan jurnal sebagai berikut :

|             |             |                        | Debit   | Kredit  |
|-------------|-------------|------------------------|---------|---------|
| 19 Feb 2022 | 3.1.2.05.01 | Estimasi Perubahan SAL | 500.000 |         |
|             | 4.1.1.00.00 | Pajak Daerah __LRA     |         | 500.000 |

**Kesembilan,** pencatatan dalam buku jurnal umum dilakukan atas pengakuan pendapatan atas diterbitkannya STPD atas denda bunga keterlambatan Pajak Daerah oleh Pengguna Anggaran tanggal 20

Februari 2022 sebesar Rp 750.000,-, yaitu:

|             |             |                                  | Debit   | Kredit  |
|-------------|-------------|----------------------------------|---------|---------|
| 20 Feb 2022 | 1.1.3.04.06 | Piutang Denda Pajak Daerah       | 750.000 |         |
|             | 8.1.4.08.00 | Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO |         | 750.000 |

**Kesepuluh,** pencatatan dalam buku jurnal umum dan jurnal penerimaan kas dilakukan atas transaksi yang terkait dengan pendapatan atas diterbitkannya SKPKDB oleh Pengguna Anggaran tanggal 17 Februari 2022, yaitu :

|             |             |                            | Debit   | Kredit  |
|-------------|-------------|----------------------------|---------|---------|
| 24 Feb 2022 | 7.2.8.99.99 | Pengeluaran RK PPKD        | 750.000 |         |
|             | 1.1.3.04.06 | Piutang Denda Pajak Daerah |         | 750.000 |

Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD juga mencatat transaksi realisasi anggaran pendapatan-LRA dengan melakukan pencatatan dalam buku jurnal penerimaan kas dengan jurnal sebagai berikut :

|             |             |                                     | Debit   | Kredit  |
|-------------|-------------|-------------------------------------|---------|---------|
| 24 Feb 2022 | 3.1.2.05.01 | Estimasi Perubahan SAL              | 750.000 |         |
|             | 4.1.4.07.00 | Pendapatan Denda Pajak Daerah __LRA |         | 750.000 |

**Kesebelas,** pencatatan dalam buku jurnal umum dilakukan atas pengakuan pendapatan atas diterbitkannya Surat Keputusan PPK tentang denda keterlambatan pekerjaan yang diterbitkan PPK serta LHP Inspektorat Daerah tanggal 25 Februari 2022 sebesar Rp 1.000.000,-, yaitu:

|             |             |  | Debit     | Kredit    |
|-------------|-------------|--|-----------|-----------|
| 25 Feb 2022 | 1.1.3.04.05 | Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan         | 1.000.000 |           |
|             | 8.1.4.07.01 | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO |           | 1.000.000 |

**Keduabelas,** pencatatan dalam buku jurnal umum dan jurnal penerimaan kas dilakukan atas transaksi yang terkait dengan pendapatan atas diterbitkannya SKPKDB oleh Pengguna Anggaran

tanggal 17 Februari 2022, yaitu :

|             |             |  | Debit     | Kredit    |
|-------------|-------------|--|-----------|-----------|
| 27 Feb 2022 | 7.2.8.99.99 | Pengeluaran RK PPKD  | 1.000.000 |           |
|             | 1.1.3.04.05 | Piutang Denda atas<br>Keterlambatan<br>Pelaksanaan Pekerjaan |           | 1.000.000 |

Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD juga mencatat transaksi realisasi anggaran pendapatan-LRA dengan melakukan pencatatan dalam buku jurnal penerimaan kas dengan jurnal sebagai berikut :

|             |             |  | Debit     | Kredit    |
|-------------|-------------|--|-----------|-----------|
| 27 Feb 2022 | 3.1.2.05.01 | Estimasi Perubahan SAL   | 1.000.000 |           |
|             | 4.1.4.06.00 | Pendapatan Denda atas<br>Keterlambatan<br>Pelaksanaan<br>Pekerjaan_LRA |           | 1.000.000 |

**Ketigabelas**, pencatatan dalam buku jurnal umum dilakukan atas eksekusi uang jaminan yang sebelumnya disetorkan oleh pihak ketiga pada waktu bersamaan dengan pembayaran perizinan untuk pemasangan iklan sebesar Rp5.000.000,- pada tanggal 1 Februari 2022 yaitu:

|             |             |   | Debit     | Kredit    |
|-------------|-------------|---|-----------|-----------|
| 28 Feb 2022 | 2.1.1.08.01 | Utang Jaminan   | 5.000.000 |           |
|             |             | Pemasangan Iklan  |           |           |
|             | 8.1.4.12.02 | Pendapatan Hasil<br>Eksekusi atas Jaminan<br>Pembongkaran Reklame<br>- LO |           | 5.000.000 |

**Bentuk dan Cara Pengisian Buku Jurnal**

Berdasarkan contoh jurnal tersebut diatas maka dilakukan pencatatan dalam buku jurnal umum untuk transaksi berbasis akrual yang nantinya digunakan untuk menyusun LO dan Neraca sebagai berikut :

**KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU JURNAL UMUM (JU)**

**SKPD** : .....( SKPD Kabupaten Kuningan)

| Halaman 01 |                  |            |               |        |      |            |             |
|------------|------------------|------------|---------------|--------|------|------------|-------------|
| Tanggal    | Nomor            |            | Kode Rekening | Uraian | Ref. | Debit (Rp) | Kredit (Rp) |
|            | Bukti Penerimaan | Bukti Lain |               |        |      |            |             |
| 1          | 2                |            | 3             | 4      | 5    | 6          | 7           |

|         |   |   |   |   |   |    |    |   |   |           |           |
|---------|---|---|---|---|---|----|----|---|---|-----------|-----------|
| 1/2/15  | - | - | 1 | 1 | 1 | 01 | 00 | Kas di Bendahara<br>Penerimaan                                  | - | 5.000.000 | -         |
|         |   |   | 2 | 1 | 1 | 08 | 01 | Utang Jaminan<br>Pemasangan Iklan                               | - | -         | 5.000.000 |
| 1/2/15  | - | - | 3 | 1 | 2 | 05 | 01 | Estimasi Perubahan<br>SAL                                       | - | 5.000.000 | -         |
|         |   |   | 4 | 1 | 4 | 09 | 02 | Hasil Eksekusi<br>Jaminan atas<br>Pembongkaran<br>Reklame - LRA | - | -         | 5.000.000 |
| 1/2/15  |   |   | 7 | 2 | 8 | 99 | 99 | Pengeluaran RK<br>PPKD  |   | 5.000.000 | -         |
|         |   |   | 1 | 1 | 1 | 02 | 01 | Kas di Bendahara<br>Penerimaan                                  |   | -         | 5.000.000 |
| 2/2/15  |   |   | 1 | 1 | 3 | 01 | 00 | Piutang Pajak<br>Daerah   |   | 3.000.000 | -         |
|         |   |   | 8 | 1 | 1 | 00 | 00 | Pendapatan Pajak<br>Daerah-LO                                   |   | -         | 3.000.000 |
| 4/2/15  |   |   | 1 | 1 | 1 | 02 | 01 | Kas di Bendahara<br>Penerimaan                                  |   | 2.000.000 | -         |
|         |   |   | 1 | 1 | 3 | 01 | 00 | Piutang Pajak<br>Daerah   |   | -         | 2.000.000 |
| 5/2/15  |   |   | 7 | 2 | 8 | 99 | 99 | Pengeluaran RK<br>PPKD  |   | 3.000.000 | -         |
|         |   |   | 1 | 1 | 1 | 02 | 01 | Kas di Bendahara<br>Penerimaan                                  |   | -         | 3.000.000 |
| 8/2/15  |   |   | 7 | 2 | 8 | 99 | 99 | Pengeluaran RK<br>PPKD  |   | 1.000.000 | -         |
|         |   |   | 1 | 1 | 3 | 01 | 00 | Piutang Pajak<br>Daerah   |   | -         | 1.000.000 |
| 10/2/15 |   |   | 1 | 1 | 1 | 02 | 01 | Kas di Bendahara<br>Penerimaan                                  |   | 500.000   | -         |
|         |   |   | 8 | 1 | 2 | 00 | 00 | Pendapatan<br>Retribusi Daerah-<br>LO                           |   | -         | 500.000   |
| 11/2/15 |   |   | 7 | 2 | 8 | 99 | 99 | Pengeluaran RK<br>PPKD  |   | 500.000   | -         |
|         |   |   | 1 | 1 | 1 | 02 | 01 | Kas di Bendahara<br>Penerimaan                                  |   | -         | 500.000   |
| 15/2/15 |   |   | 7 | 2 | 8 | 99 | 99 | Pengeluaran RK<br>PPKD  |   | 1.000.000 | -         |
|         |   |   | 8 | 1 | 2 | 00 | 00 | Pendapatan<br>Retribusi Daerah-<br>LO                           |   | -         | 1.000.000 |
| 17/2/15 |   |   | 1 | 1 | 3 | 01 | 00 | Piutang Pajak<br>Daerah   |   | 500.000   | -         |
|         |   |   | 8 | 1 | 1 | 00 | 00 | Pendapatan Pajak<br>Daerah-LO                                   |   | -         | 500.000   |
| 19/2/15 |   |   | 7 | 2 | 8 | 99 | 99 | Pengeluaran RK<br>PPKD  |   | 500.000   | -         |
|         |   |   | 1 | 1 | 3 | 01 | 00 | Piutang Pajak<br>Daerah   |   | -         | 500.000   |
| 20/2/15 |   |   | 1 | 1 | 3 | 04 | 06 | Piutang Denda<br>Pajak Daerah                                   |   | 750.000   | -         |
|         |   |   | 8 | 1 | 4 | 08 | 00 | Pendapatan Denda<br>Pajak Daerah-LO                             |   | -         | 750.000   |
| 24/2/15 |   |   | 7 | 2 | 8 | 99 | 99 | Pengeluaran RK<br>PPKD  |   | 750.000   | -         |
|         |   |   | 1 | 1 | 3 | 04 | 06 | Piutang Denda<br>Pajak Daerah                                   |   | -         | 750.000   |
| 25/2/15 |   |   | 1 | 1 | 3 | 04 | 05 | Piutang Denda atas<br>Keterlambatan<br>Pelaksanaan              |   | 1.000.000 | -         |

|         |  |  |   |   |   |    |    |  |  |            |            |
|---------|--|--|---|---|---|----|----|--|--|------------|------------|
|         |  |  |   |   |   |    |    | Pekerjaan  |  |            |            |
|         |  |  | 8 | 1 | 4 | 07 | 01 | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO   |  | -          | 1.000.000  |
| 27/2/15 |  |  | 7 | 2 | 8 | 99 | 99 | Pengeluaran RK PPKD  |  | 1.000.000  | -          |
|         |  |  | 1 | 1 | 3 | 04 | 05 | Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan         |  | -          | 1.000.000  |
|         |  |  |   |   |   |    |    |  |  |            |            |
| 28/2/15 |  |  | 2 | 1 | 1 | 08 | 01 | Utang Jaminan Pemasangan Iklan                                 |  | 5.000.000  | -          |
|         |  |  | 8 | 1 | 4 | 12 | 02 | Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan Pembongkaran Reklame-LO |  | -          | 5.000.000  |
|         |  |  |   |   |   |    |    |  |  |            |            |
| Jumlah  |  |  |   |   |   |    |    |  |  | 35.500.000 | 35.500.000 |

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Selain mencatat di buku jurnal umum dilakukan juga pencatatan dalam buku jurnal penerimaan kas untuk transaksi berbasis kas yang nantinya digunakan untuk menyusun LRA dan LAK sebagai berikut :

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU JURNAL PENERIMAAN KAS (JM)

SKPD : .....( SKPD Kabupaten Kuningan)

| Halaman 01 |                  |            |               |   |   |    |    |                         |      |            |             |
|------------|------------------|------------|---------------|---|---|----|----|-------------------------|------|------------|-------------|
| Tanggal    | Nomor            |            | Kode Rekening |   |   |    |    | Uraian                  | Ref. | Debit (Rp) | Kredit (Rp) |
|            | Bukti Penerimaan | Bukti Lain |               |   |   |    |    |                         |      |            |             |
| 1          | 2                |            | 3             |   |   |    |    | 4                       | 5    | 6          | 7           |
| 4/2/15     | -                | -          | 3             | 1 | 2 | 05 | 01 | Estimasi Perubahan SAL  | -    | 2.000.000  | -           |
|            |                  |            | 4             | 1 | 1 | 00 | 00 | Pendapatan Pajak Daerah | -    | -          | 2.000.000   |
| 8/2/15     |                  |            | 3             | 1 | 2 | 05 | 01 | Estimasi Perubahan SAL  |      | 1.000.000  | -           |
|            |                  |            | 4             | 1 | 1 | 00 | 00 | Pajak Daerah            |      | -          | 1.000.000   |
| 10/2/15    |                  |            | 3             | 1 | 2 | 05 | 01 | Estimasi Perubahan SAL  |      | 500.000    | -           |
|            |                  |            | 4             | 1 | 2 | 00 | 00 | Retribusi Daerah-LRA    |      | -          | 500.000     |
| 15/2/15    |                  |            | 3             | 1 | 2 | 05 | 01 | Estimasi Perubahan SAL  |      | 1.000.000  | -           |
|            |                  |            | 4             | 1 | 2 | 00 | 00 | Retribusi Daerah-LRA    |      | -          | 1.000.000   |

|         |  |  |   |   |   |    |    |   |  |            |            |
|---------|--|--|---|---|---|----|----|---|--|------------|------------|
| 19/2/15 |  |  | 3 | 1 | 2 | 05 | 01 | Estimasi Perubahan SAL  |  | 500.000    | -          |
|         |  |  | 4 | 1 | 1 | 00 | 00 | Pajak Daerah-LRA  |  | -          | 500.0000   |
| 24/2/15 |  |  | 3 | 1 | 2 | 05 | 01 | Estimasi Perubahan SAL  |  | 750.000    | -          |
|         |  |  | 4 | 1 | 4 | 07 | 00 | Pendapatan Denda Pajak Daerah-LRA                             |  | -          | 750.000    |
| 27/2/15 |  |  | 3 | 1 | 2 | 05 | 01 | Estimasi Perubahan SAL  |  | 1.000.000  | -          |
|         |  |  | 4 | 1 | 4 | 06 | 00 | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LRA |  | -          | 1.000.000  |
| Jumlah  |  |  |   |   |   |    |    |   |  | 12.650.000 | 12.650.000 |

PPK-SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Kepala SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Langkah III : Melakukan Posting ke Buku Besar

Setelah melakukan penjurnalan seluruh transaksi, maka PPK-SKPD melakukan posting atas pencatatan jurnal tersebut ke buku besar. Posting ini berguna agar seluruh transaksi yang sama-sama mempengaruhi suatu kode rekening/akun dapat dikelompokkan dalam satu buku besar untuk kode rekening/akun yang bersangkutan. Periode posting harus semakin diusahakan dapat dilakukan dalam waktu yang semakin singkat misalkan untuk periode mingguan atau bahkan harian.

Contoh buku besar SKPD : Kas di Bendahara Penerimaan sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 1.1.1.01.00  
Nama Rekening : Kas di Bendahara Penerimaan  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian                         | Debet (Rp) | Kredit (Rp) |
|----|-------|------------|-----|--------------------------------|------------|-------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |                                |            |             |
| 1  |       | 1/02/2022  | JU  | Utang Jaminan Pemasangan Iklan | 5.000.000  | -           |
| 2  |       | 1/02/2022  | JU  | RK PPKD                        | -          | 5.000.000   |
| 3  |       | 4/02/2022  | JU  | Piutang Pajak Daerah           | 2.000.000  | -           |
| 4  |       | 5/02/2022  | JU  | RK PPKD                        | -          | 3.000.000   |
| 5  |       | 10/02/2022 | JU  | Pendapatan Retribusi Daerah-LO | 500.000    | -           |
| 6  |       | 11/02/2022 | JU  | RK PPKD                        | -          | 500.000     |



|  |  |  |  |        |           |           |
|--|--|--|--|--------|-----------|-----------|
|  |  |  |  |        |           |           |
|  |  |  |  | Jumlah | 7.500.000 | 8.500.000 |
|  |  |  |  | Saldo  | -         | 1.000.000 |

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Piutang Pajak Daerah sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 1.1.3.01.01  
Nama Rekening : Piutang Pajak Daerah  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian                      | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|-----------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |                             |               |                |
| 1  |       | 2/02/2022  | JU  | Pendapatan Pajak Daerah     | 3.000.000     | -              |
| 2  |       | 4/02/2022  | JU  | Kas di Bendahara Penerimaan | -             | 2.000.000      |
| 3  |       | 8/02/2022  | JU  | RK PPKD                     | -             | 1.000.000      |
| 4  |       | 17/02/2022 | JU  | Pendapatan Pajak Daerah-LO  | 500.000       | -              |
| 5  |       | 19/02/2022 | JU  | RK PPKD                     | -             | 500.000        |
|    |       |            |     | Jumlah                      | 3.500.000     | 3.500.000      |
|    |       |            |     | Saldo                       | -             | -              |

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 1.1.3.04.05  
Nama Rekening : Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian  | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|---|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |   |               |                |
| 1  |       | 25/02/2022 | JU  | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | 1.000.000     | -              |
| 2  |       | 27/02/2022 | JU  | RK PPKD   | -             | 1.000.000      |

|  |  |  |  |        |           |           |
|--|--|--|--|--------|-----------|-----------|
|  |  |  |  |        |           |           |
|  |  |  |  | Jumlah | 1.000.000 | 1.000.000 |
|  |  |  |  | Saldo  | -         | -         |

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)

(tanda tangan)

(nama lengkap)

(nama lengkap)

NIP.....

NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Piutang Denda Pajak Daerah sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan

Kode Rekening : 1.1.3.04.06

Nama Rekening : Piutang Denda Pajak Daerah

Pagu APBD :

Pagu perubahan APBD :

Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian                           | Debet (Rp) | Kredit (Rp) |
|----|-------|------------|-----|----------------------------------|------------|-------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |                                  |            |             |
| 1  |       | 20/02/2022 | JU  | Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO | 750.000    | -           |
| 2  |       | 24/02/2022 | JU  | RK PPKD                          | -          | 750.000     |
|    |       |            |     |                                  |            |             |
|    |       |            |     | Jumlah                           | 750.000    | 750.000     |
|    |       |            |     | Saldo                            | -          | -           |

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)

(tanda tangan)

(nama lengkap)

(nama lengkap)

NIP.....

NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Utang Jaminan Pemasangan Iklan sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan

Kode Rekening : 2.1.1.08.01

Nama Rekening : Utang Jaminan Pemasangan Iklan

Pagu APBD :

Pagu perubahan APBD :

Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian   | Debet (Rp) | Kredit (Rp) |
|----|-------|------------|-----|--|------------|-------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |  |            |             |
| 1  |       | 1/02/2022  | JU  | Kas di Bendahara Penerimaan                                    | -          | 5.000.000   |
| 2  |       | 28/02/2022 | JU  | Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan Pembongkaran Reklame-LO | 5.000.000  | -           |
|    |       |            |     |  |            |             |
|    |       |            |     | Jumlah   | 5.000.000  | 5.000.000   |
|    |       |            |     | Saldo  | -          | -           |

PPK-SKPD  
  
(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Kepala-SKPD  
  
(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Estimasi Perubahan SAL sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 3.1.2.05.01  
Nama Rekening : Estimasi Perubahan SAL  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian  | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|---|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |   |               |                |
| 1  |       | 1/02/2022  | JU  | Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan Pembongkaran Reklame-LRA | 5.000.000     | -              |
| 2  |       | 4/02/2022  | JM  | Pendapatan Pajak Daerah   | 2.000.000     | -              |
| 3  |       | 8/02/2022  | JM  | Pendapatan Pajak Daerah   | 1.000.000     | -              |
| 4  |       | 10/02/2022 | JU  | Retribusi Daerah-LRA  | 500.000       | -              |
| 5  |       | 15/02/2022 | JM  | Retribusi Daerah-LRA  | 1.000.000     | -              |
| 6  |       | 19/02/2022 | JM  | Pajak Daerah-LRA  | 500.000       | -              |
| 7  |       | 24/02/2022 | JM  | Pendapatan Denda Pajak Daerah-LRA                               | 750.000       | -              |
| 8  |       | 27/02/2022 | JM  | Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LRA        | 1.000.000     | -              |
|    |       |            |     |   |               |                |
|    |       |            |     | Jumlah  | 11.750.000    | -              |
|    |       |            |     | Saldo   | 11.750.000    | -              |

PPK-SKPD  
  
(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Kepala SKPD  
  
(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Pendapatan Pajak Daerah sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 4.1.1.00.00  
Nama Rekening : Pendapatan Pajak Daerah  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian                 | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |                        |               |                |
| 1  |       | 4/02/2022  | JM  | Estimasi Perubahan SAL | -             | 2.000.000      |
| 2  |       | 8/02/2022  | JM  | Estimasi Perubahan SAL | -             | 1.000.000      |
| 3  |       | 19/02/2022 | JM  | Estimasi Perubahan SAL | -             | 500.000        |
|    |       |            |     |                        |               |                |

|  |  |  |  |        |   |           |
|--|--|--|--|--------|---|-----------|
|  |  |  |  | Jumlah | - | 3.500.000 |
|  |  |  |  | Saldo  | - | 3.500.000 |

PPK-SKPD

Kepala-SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Retribusi Daerah-LRA sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 4.1.2.00.00  
Nama Rekening : Retribusi Daerah-LRA  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian                 | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |                        |               |                |
| 1  |       | 10/02/2022 | JM  | Estimasi Perubahan SAL | -             | 500.000        |
| 2  |       | 15/02/2022 | JM  | Estimasi Perubahan SAL | -             | 1.000.000      |
|    |       |            |     |                        |               |                |
|    |       |            |     | Jumlah                 | -             | 1.500.000      |
|    |       |            |     | Saldo                  | -             | 1.500.000      |

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LRA sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 4.1.4.06.00  
Nama Rekening : Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pekerjaan-LRA  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian                 | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |                        |               |                |
| 1  |       | 27/02/2022 | JM  | Estimasi Perubahan SAL | -             | 1.000.000      |
|    |       |            |     |                        |               |                |
|    |       |            |     | Jumlah                 | -             | 1.000.000      |

|  |  |  |  |       |   |           |
|--|--|--|--|-------|---|-----------|
|  |  |  |  | Saldo | - | 1.000.000 |
|--|--|--|--|-------|---|-----------|

PPK-SKPD  
  
(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Kepala-SKPD  
  
(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Pendapatan Denda Pajak Daerah-LRA sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 4.1.4.07.00  
Nama Rekening : Pendapatan Denda Pajak Daerah-LRA  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD :

Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian                 | Debet (Rp) | Kredit (Rp) |
|----|-------|------------|-----|------------------------|------------|-------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |                        |            |             |
| 1  |       | 24/02/2022 | JM  | Estimasi Perubahan SAL | -          | 750.000     |
|    |       |            |     |                        |            |             |
|    |       |            |     | Jumlah                 | -          | 750.000     |
|    |       |            |     | Saldo                  | -          | 750.000     |

PPK-SKPD  
  
(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Kepala SKPD  
  
(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan Pembongkaran Reklame-LRA sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 4.1.4.09.02  
Nama Rekening : Hasil Eksekusi Jaminan atas Pembongkaran Reklame - LRA  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD :

Halaman 01

| No | Bukti |           | Ref | Uraian                 | Debet (Rp) | Kredit (Rp) |
|----|-------|-----------|-----|------------------------|------------|-------------|
|    | Nomor | Tanggal   |     |                        |            |             |
| 1  |       | 1/02/2022 | JU  | Estimasi Perubahan SAL | -          | 5.000.000   |
|    |       |           |     |                        |            |             |
|    |       |           |     | Jumlah                 | -          | 5.000.000   |
|    |       |           |     | Saldo                  | -          | 5.000.000   |

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Pengeluaran RK PPKD sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 7.2.8.99.99  
Nama Rekening : Pengeluaran RK PPKD  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD :

Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian   | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|--|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |  |               |                |
| 1  |       | 1/02/2022  | JU  | Kas di Bendahara Penerimaan                            | 5.000.000     | -              |
| 2  |       | 5/02/2022  | JU  | Kas di Bendahara Penerimaan                            | 3.000.000     | -              |
| 3  |       | 8/02/2022  | JU  | Piutang Pajak Daerah                                   | 1.000.000     | -              |
| 4  |       | 11/02/2022 | JU  | Kas di Bendahara Penerimaan                            | 500.000       | -              |
| 5  |       | 15/02/2022 | JU  | Pendapatan Retribusi Daerah-LO                         | 1.000.000     | -              |
| 6  |       | 19/02/2022 | JU  | Piutang Pajak Daerah                                   | 500.000       | -              |
| 7  |       | 24/02/2022 | JU  | Piutang Denda Pajak Daerah                             | 750.000       | -              |
| 8  |       | 27/02/2022 | JU  | Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | 1.000.000     | -              |
|    |       |            |     |  |               |                |
|    |       |            |     | Jumlah   | 12.750.000    | -              |
|    |       |            |     | Saldo  | 12.750.000    | -              |

PPK-SKPD  
(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Kepala SKPD  
(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Pendapatan Pajak Daerah-LO sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 8.1.1.00.00  
Nama Rekening : Pendapatan Pajak Daerah-LO  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD :

Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian               | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|----------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |                      |               |                |
| 1  |       | 2/02/2022  | JU  | Piutang Pajak Daerah | -             | 3.000.000      |
| 2  |       | 17/02/2022 | JU  | Piutang Pajak Daerah |               | 500.000        |
|    |       |            |     |                      |               |                |
|    |       |            |     | Jumlah               | -             | 3.500.000      |
|    |       |            |     | Saldo                | -             | 3.500.000      |

PPK-SKPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Kepala SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Pendapatan Retribusi Daerah-LO sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 8.1.2.00.00  
Nama Rekening : Pendapatan Retribusi Daerah-LO  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian                      | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|-----------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |                             |               |                |
| 1  |       | 10/02/2022 | JU  | Kas di Bendahara Penerimaan | -             | 500.000        |
| 2  |       | 15/02/2022 | JU  | RK PPKD                     | -             | 1.000.000      |
|    |       |            |     |                             |               |                |
|    |       |            |     | Jumlah                      | -             | 1.500.000      |
|    |       |            |     | Saldo                       | -             | 1.500.000      |

PPK-SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Kepala SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 8.1.4.00.00  
Nama Rekening : Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian                     | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|----------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |                            |               |                |
| 1  |       | 20/02/2022 | JU  | Piutang Denda Pajak Daerah |               | 750.000        |
|    |       |            |     |                            |               |                |
|    |       |            |     | Jumlah                     | -             | 750.000        |

|  |  |  |  |       |   |         |
|--|--|--|--|-------|---|---------|
|  |  |  |  | Saldo | - | 750.000 |
|--|--|--|--|-------|---|---------|

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)  
 (nama lengkap)  
 NIP.....

(tanda tangan)  
 (nama lengkap)  
 NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN

BUKU BESAR

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan  
 Kode Rekening : 8.1.4.07.01  
 Nama Rekening : Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan  
 Pagu APBD :  
 Pagu perubahan APBD :

Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian   | Debet (Rp) | Kredit (Rp) |
|----|-------|------------|-----|--|------------|-------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |  |            |             |
| 1  |       | 25/02/2022 | JU  | Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | -          | 1.000.000   |
|    |       |            |     |  |            |             |
|    |       |            |     | Jumlah   | -          | 1.000.000   |
|    |       |            |     | Saldo  | -          | 1.000.000   |

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)  
 (nama lengkap)  
 NIP.....

(tanda tangan)  
 (nama lengkap)  
 NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan Pembongkaran Reklame-LO sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN

BUKU BESAR

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan  
 Kode Rekening : 8.1.4.12.02  
 Nama Rekening : Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan Pembongkaran Reklame-LO  
 Pagu APBD :  
 Pagu perubahan APBD :

Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian                         | Debet (Rp) | Kredit (Rp) |
|----|-------|------------|-----|--------------------------------|------------|-------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |                                |            |             |
| 1  |       | 28/02/2022 | JU  | Utang Jaminan Pemasangan Iklan | -          | 5.000.000   |
|    |       |            |     |                                |            |             |



|  |  |  |  |        |   |           |
|--|--|--|--|--------|---|-----------|
|  |  |  |  | Jumlah | - | 5.000.000 |
|  |  |  |  | Saldo  | - | 5.000.000 |

PPK-SKPD

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP.....

Kepala SKPD

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP.....

**Langkah IV : Menyusun Neraca Saldo dan Laporan Keuangan**

Setelah melakukan posting seluruh pencatatan dalam buku besar maka kemudian Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD membuat neraca saldo sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Penyusunan neraca saldo oleh Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD dilakukan secara triwulanan. Neraca saldo disusun dengan cara memindahkan saldo-saldo yang ada di tiap buku besar ke dalam Neraca Saldo. Contoh Neraca Saldo dari hasil pencatatan dan posting contoh transaksi keuangan diatas adalah sebagai berikut :

**KABUPATEN KUNINGAN**  
**NERACA SALDO**  
**PER TANGGAL 31 Desember 2022**

**SKPD** : SKPD Kabupaten Kuningan

| Kode Rekening |   |   |    |    |  | Uraian  | Jumlah     |            |
|---------------|---|---|----|----|--|---|------------|------------|
|               |   |   |    |    |  |   | Debit      | Kredit     |
| 1             |   |   |    |    |  | 2   | 3          | 4          |
| 1             | 1 | 1 | 01 | 00 |  | Kas di Bendahara Penerimaan                                     | -          | 1.000.000  |
| 3             | 1 | 2 | 05 | 01 |  | Estimasi Perubahan SAL  | 11.750.000 | -          |
| 4             | 1 | 1 | 00 | 00 |  | Pendapatan Pajak Daerah   | -          | 3.500.000  |
| 4             | 1 | 2 | 00 | 00 |  | Retribusi Daerah-LRA  | -          | 1.500.000  |
| 4             | 1 | 4 | 07 | 01 |  | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pekerjaan-LRA               | -          | 1.000.000  |
| 4             | 1 | 4 | 08 | 00 |  | Pendapatan Denda Pajak Daerah-LRA                               | -          | 750.000    |
| 4             | 1 | 4 | 12 | 02 |  | Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan Pembongkaran Reklame-LRA | -          | 5.000.000  |
| 7             | 2 | 8 | 99 | 99 |  | Pengeluaran RK PPKD   | 12.750.000 | -          |
| 8             | 1 | 1 | 00 | 00 |  | Pendapatan Pajak Daerah-LO                                      | -          | 3.500.000  |
| 8             | 1 | 2 | 00 | 00 |  | Pendapatan Retribusi Daerah-LO                                  | -          | 1.500.000  |
| 8             | 1 | 4 | 00 | 00 |  | Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO                                | -          | 750.000    |
| 8             | 1 | 4 | 07 | 01 |  | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan       | -          | 1.000.000  |
| 8             | 1 | 4 | 12 | 02 |  | Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan Pembongkaran Reklame-LO  | -          | 5.000.000  |
|               |   |   |    |    |  | Jumlah  | 24.500.000 | 24.500.000 |

PPK-SKPD

(tanda tangan)

Kepala SKPD

(tanda tangan)

(nama lengkap)  
NIP.....

(nama lengkap)  
NIP.....

## **SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI PENCATATAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KHUSUS DI SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH**

Bagian ini menjelaskan Sistem dan Prosedur Akuntansi Pendapatan di Pemerintah Kabupaten Kuningan untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) khususnya pendapatan yang hanya ada di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

### **KEBIJAKAN UMUM**

Sistem dan prosedur akuntansi pendapatan di SKPD khusus di SKPKD merupakan salah satu sarana untuk menunjang proses pertanggungjawaban anggaran SKPD khususnya terkait pendapatan SKPD yang hanya bisa dilaksanakan oleh SKPKD misalnya pendapatan hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penjualan aset lainnya, penerimaan jasa giro, pendapatan bunga, tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti rugi. Sistem dan prosedur akuntansi ini disusun berdasarkan kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

### **PIHAK-PIHAK TERKAIT**

Berbagai pihak/fungsi yang terkait dalam proses akuntansi pendapatan di SKPD khusus di SKPKD beserta tugas-tugasnya adalah :

1. Bendahara Penerimaan di SKPD

Dalam pelaksanaan prosedur ini, Bendahara Penerimaan SKPD memiliki tugas menyiapkan dokumen-dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan akuntansi pendapatan SKPD khusus di SKPKD seperti STS, Bukti Setoran Bank, Bukti Transfer Bank, dan Nota Kredit misalnya yang terkait dengan

penerimaan angsuran penjualan dinas/kendaraan dinas dan penerimaan tuntutan ganti rugi.

2. Tenaga Akuntansi di Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)

Dalam pelaksanaan prosedur ini, Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menerima bukti-bukti transaksi dan menganalisa data dan informasi akuntansi dari bukti transaksi tersebut seperti Surat Keputusan Bupati tentang Penghapusan Aset khususnya aset tetap dari Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD.
- b. Menerima bukti-bukti transaksi dan menganalisa data dan informasi akuntansi dari bukti transaksi tersebut seperti Nota Kredit dan kopi rekening koran Kas Umum Daerah dari Kuasa BUD melalui PPK-SKPD, sebagai bukti pembayaran pendapatan jasa giro daerah, bunga investasi jangka pendek seperti deposito, penerimaan angsuran penjualan dinas/kendaraan dinas dan penerimaan tuntutan ganti rugi.
- c. Mencatat transaksi-transaksi pendapatan SKPD khusus di SKPKD berdasarkan bukti-bukti yang terkait yang berada dalam kewenangan SKPD-nya;
- d. Memposting jurnal-jurnal pendapatan SKPD khusus di SKPKD ke dalam buku besarnya masing-masing;
- e. Menyusun neraca saldo yang termasuk yang terkait akuntansi pendapatan SKPD khusus di SKPKD untuk persiapan penyusunan laporan keuangan, yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan; dan
- f. Menyerahkan buku jurnal, buku besar dan neraca saldo kepada PPK-SKPD untuk diperiksa dan ditandatangani.

3. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) : **Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/ Koordinator/ Kepala Sub Bagian Keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.**

Dalam pelaksanaan prosedur ini, PPK-SKPD memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Bertanggungjawab atas sistem akuntansi pendapatan pada SKPD khusus di SKPKD yang dipimpinnya;
  - b. Menerima bukti-bukti transaksi seperti Nota Kredit yang didukung Kopi Rekening Koran Kas Umum Daerah dari Pengguna Anggaran serta Bukti Setoran Bank/Bukti Transfer/STS yang didukung Surat Keputusan Bupati tentang angsuran penjualan rumah dinas/kendaraan dinas atau Surat Keputusan Bupati tentang tuntutan ganti rugi sebagai pendapatan SKPD dari Bendahara Penerimaan SKPD dan menyerahkan kepada tenaga akuntansi PPK-SKPD untuk dicatat;
  - c. Memeriksa dan menandatangani hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Tenaga Akuntansi PPK-SKPD terkait akuntansi pendapatan SKPD secara triwulanan; dan
  - d. Menyerahkan Buku Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo SKPD yang mencatat transaksi pendapatan SKPD setiap triwulan kepada Pengguna Anggaran untuk disetujui.
4. Pengguna Anggaran : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Dalam pelaksanaan prosedur ini, Pengguna Anggaran memiliki tugas :

- a. Menerima Surat Keputusan Bupati tentang Penghapusan Aset khususnya Aset Tetap, dan menyerahkannya kepada tenaga akuntansi PPK-SKPD melalui PPK-SKPD; dan
  - b. Menyetujui Buku Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo yang diserahkan PPK-SKPD setiap triwulan.
5. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah selanjutnya disebut TPKD

Dalam pelaksanaan prosedur ini, TPKD adalah tim yang menangani penyelesaian kerugian Daerah yang diangkat oleh pimpinan instansi yang bersangkutan dalam hal ini adalah Bupati Kuningan.

6. Kepala Daerah : Bupati

Dalam pelaksanaan prosedur ini, Kepala Daerah memiliki tugas menetapkan Surat Keputusan Bupati tentang Penghapusan Aset khususnya Aset Tetap, Surat Keputusan Bupati tentang Tuntutan Ganti Rugi Pegawai Non Bendahara dan menyerahkannya kepada Pengguna Anggaran khususnya di SKPKD.

**DOKUMEN TERKAIT**

1. Surat Keputusan Bupati tentang Penghapusan Aset adalah surat keputusan yang dikeluarkan kepala daerah yang menyatakan adanya aset khususnya aset tetap yang dihapus dari catatan keuangan pemerintah daerah;
2. Surat Keputusan Bupati tentang angsuran penjualan rumah dinas/kendaraan dinas adalah surat keputusan yang dikeluarkan kepala daerah yang menyatakan nilai angsuran penjualan rumah dinas/kendaraan dinas;
3. Surat Keputusan Bupati tentang Tuntutan Ganti Rugi Pegawai Non Bendahara adalah surat keputusan yang dikeluarkan kepala daerah yang menyatakan nilai tuntutan ganti rugi kepada pegawai non bendahara;
4. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak selanjutnya disebut SKTJM adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas kerugian negara yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian negara dimaksud;
5. Surat Keputusan Pembebanan Sementara adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh bupati tentang pembebanan penggantian sementara atas kerugian negara sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan;
6. Surat Keputusan Pembebanan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian kerugian negara terhadap bendahara;

7. Surat Tanda Setoran selanjutnya disebut STS adalah bukti yang diperoleh setelah melakukan penyetoran uang ke Kas Daerah;
8. Bukti Setoran Bank merupakan formulir bukti melakukan setoran ke Rekening Umum Kas Daerah;
9. Bukti Transfer merupakan formulir bukti melakukan transfer dari suatu rekening ke Rekening Umum Kas Daerah;
10. Nota Kredit merupakan bukti transaksi penerimaan uang di Rekening Umum Kas Daerah; dan
11. Rekening Koran Kas Umum Daerah adalah mutasi catatan keuangan dari rekening kas umum daerah yang dikeluarkan setiap hari oleh Bank tempat menyimpan kas daerah;

#### **BUKU DAN ATAU FORMULIR YANG DIGUNAKAN**

Buku dan atau formulir yang digunakan dalam pelaksanaan sistem dan prosedur akuntansi pendapatan di SKPD khususnya di SKPKD terdiri dari :

1. Buku Jurnal Umum (JU)

Merupakan buku jurnal yang digunakan untuk melakukan pencatatan akuntansi atas transaksi pendapatan SKPD khususnya di SKPKD yang berbasis akrual terkait penyusunan LO dan Neraca.

2. Buku Jurnal Penerimaan Kas (JM)

Merupakan buku jurnal yang digunakan untuk melakukan pencatatan akuntansi atas transaksi penerimaan kas yang berasal dari transaksi SKPD khususnya di SKPKD. Pada umumnya buku jurnal penerimaan kas digunakan untuk mencatat transaksi basis kas terkait penyusunan LRA dan LAK.

3. Buku Besar (BB)

Merupakan buku yang digunakan untuk menampung pencatatan hasil posting transaksi dari buku jurnal. Buku besar ini merupakan pencatatan akuntansi atas seluruh transaksi terkait pendapatan SKPD khususnya di SKPKD untuk suatu

rekening/akun per jenis atau obyek. Jadi setiap rekening/akun per jenis atau objek mempunyai buku besar tersendiri.

4. Buku Besar Pembantu (BP)

Buku besar dapat dilengkapi dengan buku besar pembantu sebagai alat uji silang dan kelengkapan informasi rekening/akun tertentu terkait transaksi pendapatan SKPD khususnya di SKPKD. Buku besar pembantu berisi rincian akun (rincian obyek) yang telah dicatat dalam buku besar. Jika dirasakan informasi dalam buku besar sudah mencukupi maka buku besar pembantu tidak perlu dibuat lagi.

5. Neraca Saldo (NS)

Merupakan formulir yang mencatat nilai saldo setiap rekening/akun per rincian objek termasuk rekening/akun yang terkait transaksi pendapatan SKPD khususnya di SKPKD sehingga diketahui jumlah total dari seluruh rekening/akun.

## **KERANGKA SISTEM**

Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD menerima bukti-bukti transaksi Nota Kredit yang didukung Kopi Rekening Koran Kas Umum Daerah dari Pengguna Anggaran serta Bukti Setoran Bank/Bukti Transfer/STS yang didukung Surat Keputusan Bupati Tentang Angsuran Penjualan Rumah Dinas/Kendaraan Dinas atau Surat Keputusan Bupati Tentang Tuntutan Ganti Rugi Pegawai Non Bendahara atau SKTJM atau Surat Keputusan Pembebanan Sementara atau Surat Keputusan Pembebanan sebagai pendapatan SKPD melalui PPK-SKPD. Pada saat bukti transaksi pendapatan tersebut telah diterima maka Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD kemudian melakukan pencatatan akuntansi dalam :

1. Buku jurnal umum, untuk mencatat pengakuan pendapatan baik yang sudah diperoleh (*earned*) maupun yang sudah diterima (*realized*) terkait penyusunan LO dan Neraca.
2. Buku jurnal penerimaan kas, untuk mencatat penerimaan kas dari realisasi anggaran pendapatan terkait penyusunan LRA dan LAK.



Pencatatan transaksi atas pendapatan dilakukan saat terjadinya transaksi dan atau diterimanya bukti transaksi tersebut namun pengakuan transaksi tetap pada tanggal bukti transaksi. Setelah seluruh transaksi dicatat dalam buku jurnal maka Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD kemudian melakukan posting ke buku besar. Setelah posting dari buku jurnal ke buku besar selesai dilakukan maka kemudian Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD menyusun Neraca Saldo sebagai dasar pembuatan Laporan Keuangan untuk setiap triwulan yang diserahkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah triwulan berakhir kepada PPK-SKPD.

**ALUR PROSEDUR TEKNIS**

Teknis pelaksanaan sistem dan prosedur akuntansi pendapatan di SKPD khususnya di SKPKD ini adalah sebagai berikut :

**Langkah I : Penerimaan Bukti Transaksi**

Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD menerima bukti-bukti transaksi pendapatan dari Pengguna Anggaran dan Bendahara Penerimaan SKPD kemudian melakukan analisa informasi akuntansi. Dari bukti-bukti transaksi pendapatan tersebut, Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD akan mendapatkan informasi transaksi pendapatan yang terjadi. Sebagai contoh : misalkan diketahui bahwa selama bulan Maret 2022, telah terjadi transaksi yang terkait dengan pendapatan sebagai berikut (asumsi tanggal bukti transaksi sama dengan tanggal penerimaan bukti transaksi) :

- |              |   |
|--------------|---|
| 1 Maret 2022 | Tenaga akuntansi di PPK-SKPD menerima SKTJM yang ditandatangani bendahara yang membuat kerugian negara dari TPKN melalui PPK-SKPD atas terjadinya kerugian negara senilai Rp 10.000.000,- yang harus dibayar selambatnya 40 hari sejak ditandatanganinya SKTJM. |
| 2 Maret 2022 | Tenaga akuntansi di PPK-SKPD menerima Surat Keputusan Bupati tentang Tuntutan Ganti Rugi Pegawai Non Bendahara dari Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD atas terjadinya kerugian daerah  |

senilai Rp 5.000.000,-.

- 5 Maret 2022      Tenaga akuntansi di PPK-SKPD menerima Surat Keputusan Bupati tentang Penghapusan Aset dari Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD atas penghapusan 2 unit sepeda motor dengan nilai perolehan Rp 12.000.000,- dan nilai buku sudah nol. Setelah dihapus, dilakukan penjualan atas 2 unit sepeda motor tersebut senilai Rp 1.000.000,- (asumsi pembayaran langsung ke rekening kas umum daerah)
- 10 Maret 2022    Tenaga akuntansi di PPK-SKPD menerima Nota Kredit yang didukung kopi rekening koran Kas Umum Daerah dari Kuasa BUD melalui PPK SKPD atas pendapatan jasa giro kas daerah sebesar Rp 12.000.000,- dan jasa giro bendahara di seluruh SKPD sebesar Rp 5.000.000,-.
- 15 Maret 2022    Tenaga akuntansi di PPK-SKPD menerima Nota Kredit yang didukung kopi rekening koran Kas Umum Daerah dari Kuasa BUD melalui PPK SKPD atas pendapatan bunga dari penempatan investasi jangka pendek misalnya deposito sebesar Rp 15.000.000,-.
- 20 Maret 2022    Tenaga akuntansi di PPK-SKPD menerima Bukti Setoran Bank/Bukti Transfer/STS didukung dengan Surat Keputusan Bupati tentang angsuran penjualan rumah dinas dari Bendahara Penerimaan SKPD sebesar Rp 1.000.000,-.
- 25 Maret 2022    Tenaga akuntansi di PPK-SKPD menerima Bukti Setoran Bank/Bukti Transfer/STS didukung dengan SKTJM sebesar Rp 10.000.000,-
- 30 Maret 2022    Tenaga akuntansi di PPK-SKPD menerima Bukti Setoran Bank/Bukti Transfer/STS didukung dengan Surat Keputusan Bupati tentang Tuntutan Ganti Rugi Pegawai Non Bendahara sebesar Rp 5.000.000,-

Contoh sederhana tersebut diatas diberikan untuk mempermudah penjelasan sistem dan prosedur akuntansi pendapatan di SKPD khusus

di SKPKD ini. Tetapi contoh tersebut diatas tidak menunjukkan semua bentuk transaksi pendapatan yang secara nyata terjadi.

**Langkah II : Menjurnal Transaksi Pendapatan**

Berdasarkan bukti-bukti transaksi pendapatan yang pada umumnya diperoleh melalui penatausahaan pendapatan SKPD khususnya di SKPKD, maka kemudian Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD mencatat transaksi tersebut di buku jurnal. Pencatatan akuntansi dilakukan kedalam buku jurnal sesuai dengan jenis transaksi yang terjadi.

- 1. Untuk **pengakuan pendapatan karena adanya penetapan seperti Surat Keputusan atau SKTM (Official Assessment)** maka dilakukan pencatatan dalam Buku Jurnal Umum dengan melakukan jurnal, “Piutang PAD sesuai jenisnya” di Debit dan “Akun Pendapatan PAD-LO sesuai jenisnya” di kredit, sebagai berikut:

|                         | Debit | Kredit |
|-------------------------|-------|--------|
| Piutang PAD_____        | xxxxx |        |
| Pendapatan PAD_____ -LO |       | xxxxx  |

Catatan : Kode dan nama rekening/akun piutang dan pendapatan (dalam contoh ditulis piutang PAD\_\_\_\_\_ dan pendapatan PAD\_\_\_\_\_ -LO) disesuaikan dengan kode dan nama rekening/akun, sampai rincian obyek, sesuai dengan pengakuan pendapatannya.

- 2. Untuk **penerimaan kas dari realisasi pengakuan pendapatan atas Surat Ketetapan atau SKTJM melalui bendahara penerimaan** maka dilakukan pencatatan basis akrual dalam Buku Jurnal Umum dengan melakukan jurnal, “Kas di Bendahara Penerimaan” di Debit dan “Akun Piutang PAD sesuai jenisnya” di kredit, sebagai berikut:

|                             | Debit | Kredit |
|-----------------------------|-------|--------|
| Kas di Bendahara Penerimaan | xxxxx |        |
| Piutang PAD _____           |       | xxxxx  |

Kemudian untuk mencatat realisasi anggaran berbasis kas dicatat dalam Buku Jurnal Penerimaan kas dengan melakukan jurnal, “Estimasi Perubahan SAL” di Debit dan “Akun Pendapatan PAD-LRA sesuai jenisnya” di kredit, sebagai berikut :

|                           | Debit | Kredit |
|---------------------------|-------|--------|
| Estimasi Perubahan SAL    | xxxx  |        |
| Pendapatan PAD _____ -LRA |       | xxxx   |

Catatan : Kode dan nama rekening/akun piutang dan pendapatan (dalam contoh ditulis piutang PAD\_\_\_\_\_, pendapatan PAD\_\_\_\_\_-LO dan pendapatan PAD\_\_\_\_\_-LRA) disesuaikan dengan kode dan nama rekening/akun, sampai rincian obyek, sesuai dengan realisasi pendapatan yang diterima.

3. Untuk transaksi **penerimaan realisasi pengakuan pendapatan atas Surat Ketetapan atau SKTJM yang disetor langsung ke Kas Daerah** atau melalui bank, oleh wajib bayar (misalkan wajib pajak daerah) atau kasnya tidak diterima secara langsung oleh bendahara penerimaan maka dilakukan pencatatan dalam Buku Jurnal Umum dengan melakukan jurnal, “RK PPKD” di Debit dan “Piutang PAD sesuai jenisnya” di kredit, sebagai berikut :

|                  | Debit | Kredit |
|------------------|-------|--------|
| RK PPKD          | xxxx  |        |
| Piutang PAD_____ |       | xxxx   |

Kemudian untuk mencatat realisasi anggaran berbasis kas dicatat dalam Buku Jurnal Penerimaan kas dengan melakukan jurnal, “Estimasi Perubahan SAL” di Debit dan “Akun Pendapatan PAD-LRA sesuai jenisnya” di kredit, sebagai berikut :

|                           | Debit | Kredit |
|---------------------------|-------|--------|
| Estimasi Perubahan SAL    | xxxx  |        |
| Pendapatan PAD _____ -LRA |       | xxxx   |

4. Untuk transaksi **penerimaan atas realisasi pengakuan pendapatan bukan** atas Surat Ketetapan atau SKTJM yang **disetor langsung ke Kas Daerah (Self Assessment)** atau melalui

bank, oleh wajib bayar (misalkan bendahara atau pegawai non bendahara yang membuat kerugian daerah) atau kasnya tidak diterima secara langsung oleh bendahara penerimaan maka dilakukan pencatatan dalam Buku Jurnal Umum dengan melakukan jurnal, “RK PPKD” di Debit dan “Pendapatan PAD-LO sesuai jenisnya” di kredit, sebagai berikut :

|                              | Debit       | Kredit      |
|------------------------------|-------------|-------------|
| <b>RK PPKD</b>               | <b>xxxx</b> |             |
| <b>Pendapatan PAD____-LO</b> |             | <b>xxxx</b> |

Kemudian untuk mencatat realisasi anggaran berbasis kas dicatat dalam Buku Jurnal Penerimaan kas dengan melakukan jurnal, “Estimasi Perubahan SAL” di Debit dan “Akun Pendapatan PAD-LRA sesuai jenisnya” di kredit, sebagai berikut :

|                               | Debit       | Kredit      |
|-------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Estimasi Perubahan SAL</b> | <b>xxxx</b> |             |
| <b>Pendapatan PAD____-LRA</b> |             | <b>xxxx</b> |

Catatan : Kode dan nama rekening/akun piutang dan pendapatan (dalam contoh ditulis piutang PAD\_\_\_\_, pendapatan PAD\_\_\_\_-LO dan pendapatan PAD\_\_\_\_-LRA) disesuaikan dengan kode dan nama rekening/akun, sampai rincian obyek, sesuai dengan realisasi pendapatan yang diterima.

Berdasarkan uraian penjurnalan dan contoh transaksi tersebut diatas maka Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD melakukan pencatatan dalam buku jurnal terkait sebagai berikut :

**Pertama** pencatatan dalam buku jurnal umum dilakukan atas SKTJM yang ditandatangani bendahara yang membuat kerugian negara pada tanggal 1 Maret 2022 senilai Rp 10.000.000,- yaitu:

|              |             |   | Debit      | Kredit     |
|--------------|-------------|---|------------|------------|
| 1 Maret 2022 | 1.5.2.02.01 | Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara | 10.000.000 |            |
|              | 8.1.4.05.01 | Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara - LO    |            | 10.000.000 |

**Kedua,** pencatatan dalam buku jurnal umum dilakukan atas Surat Keputusan Bupati tentang Tuntutan Ganti Rugi Pegawai Non Bendahara dari Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD atas terjadinya kerugian daerah senilai Rp 5.000.000,-, yaitu:

|              |             |  | Debit     | Kredit    |
|--------------|-------------|--|-----------|-----------|
| 2 Maret 2022 | 1.5.2.02.02 | Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara | 5.000.000 |           |
|              | 8.1.4.05.02 | Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara - LO    |           | 5.000.000 |

**Ketiga,** pencatatan dalam buku jurnal umum berdasarkan Surat Keputusan Bupati tentang Penghapusan Aset dari Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD atas penghapusan 2 unit sepeda motor dengan nilai perolehan Rp 12.000.000,- dan nilai buku sudah nol.

Pencatatan di SKPD pengguna barang pada saat pengajuan penghapusan:

|       |             |                             | Debit      | Kredit     |
|-------|-------------|-----------------------------|------------|------------|
| xxxxx | 1.1.1.02.01 | Akumulasi Penyusutan        | 12.000.000 |            |
|       | 1.1.3.01.00 | Kendaraan Bermotor Roda Dua |            | 12.000.000 |

Pencatatan di SKPD khusus di SKPKD pada saat penghapusan:

|              |                  |  | Debit | Kredit |
|--------------|------------------|--|-------|--------|
| 5 Maret 2022 | Tidak ada Jurnal |  |       |        |

Kemudian dilakukan juga pencatatan di buku jurnal umum dan buku jurnal penerimaan kas atas transaksi realisasi penjualan atas 2 unit sepeda motor tersebut senilai Rp 1.000.000,- pada tanggal 5 Maret 2022, yaitu:

|              |             |   | Debit     | Kredit    |
|--------------|-------------|---|-----------|-----------|
| 5 Maret 2022 | 7.2.8.99.99 | Pengeluaran RK PPKD                           | 1.000.000 |           |
|              | 8.4.1.01.02 | Surplus Penjualan Aset Peralatan dan Mesin-LO |           | 1.000.000 |

Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD juga mencatat transaksi realisasi anggaran pendapatan-LRA dengan melakukan pencatatan dalam buku jurnal penerimaan kas dengan jurnal sebagai berikut :

|              |             |                                       |           |           |
|--------------|-------------|---------------------------------------|-----------|-----------|
|              |             |                                       | Debit     | Kredit    |
| 5 Maret 2022 | 3.1.2.05.01 | Estimasi Perubahan SAL                | 1.000.000 |           |
|              | 4.1.4.01.05 | Penjualan Kendaraan<br>Dinas Roda Dua |           | 1.000.000 |

Misalkan terbit Surat Keputusan Bupati tentang Penghapusan Aset dari Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD atas penghapusan 2 unit sepeda motor dengan nilai perolehan Rp 12.000.000,- dan nilai buku masih ada senilai Rp 2.000.000,-, maka akan dicatat di jurnal umum sebagai berikut :

Pencatatan di SKPD pengguna barang pada saat pengajuan penghapusan:

|      |             |   |            |            |
|------|-------------|---|------------|------------|
|      |             |   | Debit      | Kredit     |
| xxxx | 1.3.7.01.04 | Akumulasi Penyusutan<br>Alat Angkutan Darat<br>Bermotor | 10.000.000 |            |
|      | 3.1.3.01.00 | RK SKPD khusus SKPKD                                    | 2.000.000  |            |
|      | 1.3.2.04.05 | Kendaraan Bermotor<br>Roda Dua                          |            | 12.000.000 |

Pencatatan di SKPD khusus SKPKD pada saat pengajuan penghapusan:

|      |             |   |            |            |
|------|-------------|---|------------|------------|
|      |             |   | Debit      | Kredit     |
| xxxx | 1.5.4.01.01 | Aset Lain-lain  | 12.000.000 |            |
|      | 1.3.7.01.04 | Akumulasi Penyusutan<br>Alat Angkutan Darat<br>Bermotor |            | 10.000.000 |
|      | 3.1.3.01.00 | RK SKPD   |            | 2.000.000  |

Pencatatan di SKPD khusus di SKPKD pada saat penghapusan:

|              |             |   |            |            |
|--------------|-------------|---|------------|------------|
|              |             |   | Debit      | Kredit     |
| 5 Maret 2022 | 1.3.7.01.04 | Akumulasi Penyusutan<br>Alat Angkutan Darat<br>Bermotor | 10.000.000 |            |
|              | 9.1.3.01.02 | Defisit Penjualan Aset<br>Peralatan dan Mesin           | 2.000.000  |            |
|              | 1.5.4.01.01 | Aset Lain-lain  |            | 12.000.000 |

Misalkan 2 unit sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp 3.000.000- maka akan dicatat di jurnal umum dan jurnal penerimaan kas sebagai berikut (asumsi kas diterima langsung di rekening kas umum daerah) :

|              |             |  | Debit     | Kredit    |
|--------------|-------------|--|-----------|-----------|
| 5 Maret 2022 | 7.2.8.99.99 | Pengeluaran RK PPKD                              | 3.000.000 |           |
|              | 9.1.3.01.02 | Defisit Penjualan Aset<br>Peralatan dan Mesin    |           | 2.000.000 |
|              | 8.4.1.01.02 | Surplus Penjualan Aset<br>Peralatan dan Mesin-LO |           | 1.000.000 |

Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD juga mencatat transaksi realisasi anggaran pendapatan-LRA dengan melakukan pencatatan dalam buku jurnal penerimaan kas dengan jurnal sebagai berikut :

|              |             |                                       | Debit     | Kredit    |
|--------------|-------------|---------------------------------------|-----------|-----------|
| 5 Maret 2022 | 3.1.2.05.01 | Estimasi Perubahan SAL                | 3.000.000 |           |
|              | 4.1.4.01.05 | Penjualan Kendaraan<br>Dinas Roda Dua |           | 3.000.000 |

Misalkan 2 unit sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp 1.500.000- maka akan dicatat di jurnal umum dan jurnal penerimaan kas sebagai berikut (asumsi kas diterima langsung di rekening kas umum daerah) :

|              |             |   | Debit     | Kredit    |
|--------------|-------------|---|-----------|-----------|
| 5 Maret 2022 | 7.2.8.99.99 | Pengeluaran RK PPKD                           | 1.500.000 |           |
|              | 9.1.3.01.02 | Defisit Penjualan Aset<br>Peralatan dan Mesin | 500.000   |           |
|              | 9.1.3.01.02 | Defisit Penjualan Aset<br>Peralatan dan Mesin |           | 2.000.000 |

Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD juga mencatat transaksi realisasi anggaran pendapatan-LRA dengan melakukan pencatatan dalam buku jurnal penerimaan kas dengan jurnal sebagai berikut :

|              |             |                                       | Debit     | Kredit    |
|--------------|-------------|---------------------------------------|-----------|-----------|
| 5 Maret 2022 | 3.1.2.05.01 | Estimasi Perubahan SAL                | 1.500.000 |           |
|              | 4.1.4.01.05 | Penjualan Kendaraan<br>Dinas Roda Dua |           | 1.500.000 |

**Keempat,** pencatatan dalam buku jurnal umum dan jurnal penerimaan kas dilakukan atas pendapatan jasa giro kas daerah sebesar Rp 12.000.000,- dan jasa giro bendahara di seluruh SKPD sebesar Rp 5.000.000,- yaitu:

|               |             |                             | Debit      | Kredit     |
|---------------|-------------|-----------------------------|------------|------------|
| 10 Maret 2022 | 7.2.8.99.99 | Pengeluaran RK PPKD         | 17.000.000 |            |
|               | 8.1.4.03.01 | Jasa Giro Kas Daerah-<br>LO |            | 12.000.000 |
|               | 8.1.4.03.02 | Jasa Giro Bendahara-<br>LRA |            | 5.000.000  |



Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD juga mencatat transaksi realisasi anggaran pendapatan-LRA dengan melakukan pencatatan dalam buku jurnal penerimaan kas dengan jurnal sebagai berikut :

|               |             |                            | Debit      | Kredit     |
|---------------|-------------|----------------------------|------------|------------|
| 10 Maret 2022 | 3.1.2.05.01 | Estimasi Perubahan SAL     | 17.000.000 |            |
|               | 4.1.4.02.01 | Jasa Giro Kas Daerah-LRA   |            | 12.000.000 |
|               | 4.1.4.02.02 | Jasa Giro Pemegang Kas-LRA |            | 5.000.000  |

**Kelima,** pencatatan dalam buku jurnal umum dan buku jurnal penerimaan kas dilakukan atas transaksi pendapatan bunga dari penempatan investasi jangka pendek misalnya deposito sebesar Rp 15.000.000,-, yaitu :

|               |             |                              | Debit      | Kredit     |
|---------------|-------------|------------------------------|------------|------------|
| 15 Maret 2022 | 7.2.8.99.99 | Pengeluaran RK PPKD          | 15.000.000 |            |
|               | 8.1.4.04.01 | Pendapatan Bunga Deposito-LO |            | 15.000.000 |

Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD juga mencatat transaksi realisasi anggaran pendapatan-LRA dengan melakukan pencatatan dalam buku jurnal penerimaan kas dengan jurnal sebagai berikut :

|               |             |                                | Debit      | Kredit     |
|---------------|-------------|--------------------------------|------------|------------|
| 15 Maret 2022 | 3.1.2.05.01 | Estimasi Perubahan SAL         | 15.000.000 |            |
|               | 4.1.4.03.00 | Pendapatan Bunga Deposito -LRA |            | 15.000.000 |

**Keenam,** pencatatan dalam buku jurnal umum dan jurnal penerimaan kas dilakukan atas transaksi yang terkait Setoran Bank/Bukti Transfer/STS didukung dengan Surat Keputusan Bupati tentang angsuran penjualan rumah dinas dari Bendahara Penerimaan SKPD sebesar Rp 1.000.000,- yaitu :

|               |             |   | Debit     | Kredit    |
|---------------|-------------|---|-----------|-----------|
| 20 Maret 2022 | 7.2.8.99.99 | Pengeluaran RK PPKD   | 1.000.000 |           |
|               | 8.1.4.15.01 | Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III-LO |           | 1.000.000 |

Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD juga mencatat transaksi realisasi anggaran pendapatan-LRA dengan melakukan pencatatan dalam buku jurnal penerimaan kas dengan jurnal sebagai berikut :

|               |                            |   | Debit     | Kredit    |
|---------------|----------------------------|---|-----------|-----------|
| 20 Maret 2022 | 3.1.2.05.01<br>4.1.4.13.01 | Estimasi Perubahan SAL<br>Pendapatan dari<br>Angsuran/Cicilan<br>Penjualan Rumah Dinas<br>Daerah Golongan III-<br>LRA | 1.000.000 | 1.000.000 |

**Ketujuh,** pencatatan dalam buku jurnal umum dan jurnal penerimaan kas dilakukan atas transaksi yang terkait Bukti Setoran Bank/Bukti Transfer/STS didukung dengan SKTJM sebesar Rp 10.000.000,-, yaitu:

|               |                            |  | Debit      | Kredit     |
|---------------|----------------------------|--|------------|------------|
| 25 Maret 2022 | 7.2.8.99.99<br>1.5.2.02.01 | Pengeluaran RK PPKD<br>Piutang Tuntutan Ganti<br>Kerugian Daerah<br>terhadap Bendahara | 10.000.000 | 10.000.000 |

Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD juga mencatat transaksi realisasi anggaran pendapatan-LRA dengan melakukan pencatatan dalam buku jurnal penerimaan kas dengan jurnal sebagai berikut :

|               |                            |  | Debit      | Kredit     |
|---------------|----------------------------|--|------------|------------|
| 25 Maret 2022 | 3.1.2.05.01<br>4.1.4.04.01 | Estimasi Perubahan SAL<br>Tuntutan Ganti<br>Kerugian Uang -LRA | 10.000.000 | 10.000.000 |

**Kedelapan,** pencatatan dalam buku jurnal umum dan jurnal penerimaan kas dilakukan atas transaksi yang terkait dengan Bukti Setoran Bank/Bukti Transfer/STS didukung dengan Surat Keputusan Bupati tentang Tuntutan Ganti Rugi Pegawai Non Bendahara sebesar Rp 5.000.000,-, yaitu :

|               |                            |  | Debit     | Kredit    |
|---------------|----------------------------|--|-----------|-----------|
| 30 Maret 2022 | 7.2.8.99.99<br>1.5.2.02.02 | Pengeluaran RK PPKD<br>Piutang Tuntutan Ganti<br>Kerugian Daerah<br>terhadap Pegawai Negeri<br>Bukan Bendahara | 5.000.000 | 5.000.000 |

Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD juga mencatat transaksi realisasi anggaran pendapatan-LRA dengan melakukan pencatatan dalam buku jurnal penerimaan kas dengan jurnal sebagai berikut :

|               |                            |  | Debit     | Kredit    |
|---------------|----------------------------|--|-----------|-----------|
| 30 Maret 2022 | 3.1.2.05.01<br>4.1.4.04.01 | Estimasi Perubahan SAL<br>Tuntutan Ganti<br>Kerugian Uang -LRA | 5.000.000 | 5.000.000 |

Bentuk dan Cara Pengisian Buku Jurnal

Berdasarkan contoh jurnal tersebut diatas maka dilakukan pencatatan dalam buku jurnal umum untuk transaksi berbasis akrual yang nantinya digunakan untuk menyusun LO dan Neraca sebagai berikut :

KABUPATEN KUNINGAN
BUKU JURNAL UMUM (JU)

SKPD : .....( SKPD Kabupaten Kuningan)

| Halaman 01 |                  |            |               |   |   |    |    |   |      |            |             |
|------------|------------------|------------|---------------|---|---|----|----|---|------|------------|-------------|
| Tanggal    | Nomor            |            | Kode Rekening |   |   |    |    | Uraian  | Ref. | Debit (Rp) | Kredit (Rp) |
|            | Bukti Penerimaan | Bukti Lain |               |   |   |    |    |   |      |            |             |
| 1          | 2                |            | 3             |   |   |    |    | 4   | 5    | 6          | 7           |
|            |                  |            |               |   |   |    |    |   |      |            |             |
| 1/3/15     | -                | -          | 1             | 5 | 2 | 02 | 01 | Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara                 | -    | 10.000.000 | -           |
|            |                  |            | 8             | 1 | 4 | 05 | 01 | Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara-LO                      | -    | -          | 10.000.000  |
|            |                  |            |               |   |   |    |    |   |      |            |             |
| 2/3/15     | -                | -          | 1             | 5 | 2 | 02 | 02 | Piutang Tuntutan Ganti Kerugian terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara   | -    | 5.000.000  | -           |
|            |                  |            | 8             | 1 | 4 | 05 | 02 | Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara-LO | -    | -          | 5.000.000   |
|            |                  |            |               |   |   |    |    |   |      |            |             |
| 5/3/15     |                  |            | 7             | 2 | 8 | 99 | 99 | Pengeluaran RK PPKD   |      | 1.000.000  | -           |
|            |                  |            | 8             | 4 | 1 | 01 | 02 | Surplus Penjualan Aset Peralatan dan Mesin-LO                             |      | -          | 1.000.000   |
|            |                  |            |               |   |   |    |    |   |      |            |             |
| 5/3/15     |                  |            | 1             | 3 | 7 | 01 | 04 | Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor                         |      | 10.000.000 | -           |
|            |                  |            | 9             | 1 | 3 | 01 | 02 | Defisit Penjualan Aset Peralatan dan Mesin                                |      | 2.000.000  | -           |
|            |                  |            | 1             | 5 | 4 | 01 | 01 | Aset Lain-lain  |      | -          | 12.000.000  |
|            |                  |            |               |   |   |    |    |   |      |            |             |
| 5/3/15     |                  |            | 7             | 2 | 8 | 99 | 99 | Pengeluaran RK PPKD   |      | 3.000.000  | -           |
|            |                  |            | 9             | 1 | 3 | 01 | 02 | Defisit Penjualan Aset Peralatan dan Mesin                                |      | -          | 2.000.000   |
|            |                  |            | 8             | 4 | 1 | 01 | 02 | Surplus Penjualan Aset Peralatan dan Mesin-LO                             |      | -          | 1.000.000   |
|            |                  |            |               |   |   |    |    |   |      |            |             |
| 5/3/15     |                  |            | 7             | 2 | 8 | 99 | 99 | Pengeluaran RK PPKD   |      | 1.500.000  | -           |
|            |                  |            | 9             | 1 | 3 | 01 | 02 | Defisit Penjualan Aset Peralatan dan Mesin                                |      | 500.000    | -           |
|            |                  |            | 9             | 1 | 3 | 01 | 02 | Defisit Penjualan Aset Peralatan dan Mesin                                |      | -          | 2.000.000   |
|            |                  |            |               |   |   |    |    |   |      |            |             |

|         |  |  |   |   |   |    |    |   |  |            |            |
|---------|--|--|---|---|---|----|----|---|--|------------|------------|
| 10/3/15 |  |  | 7 | 2 | 8 | 99 | 99 | Pengeluaran RK PPKD   |  | 17.000.000 | -          |
|         |  |  | 8 | 1 | 4 | 03 | 01 | Jasa Giro Kas Daerah-LO   |  | -          | 12.000.000 |
|         |  |  | 8 | 1 | 4 | 03 | 02 | Jasa Giro Bendahara-LRA   |  | -          | 5.000.000  |
|         |  |  |   |   |   |    |    |   |  |            |            |
| 15/3/15 |  |  | 7 | 2 | 8 | 99 | 99 | Pengeluaran RK PPKD   |  | 15.000.000 | -          |
|         |  |  | 8 | 1 | 4 | 04 | 01 | Pendapatan Bunga Deposito-LO  |  | -          | 15.000.000 |
|         |  |  |   |   |   |    |    |   |  |            |            |
| 20/3/15 |  |  | 7 | 2 | 8 | 99 | 99 | Pengeluaran RK PPKD   |  | 1.000.000  | -          |
|         |  |  | 8 | 1 | 4 | 15 | 01 | Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III-LO                       |  | -          | 1.000.000  |
|         |  |  |   |   |   |    |    |   |  |            |            |
| 25/3/15 |  |  | 7 | 2 | 8 | 99 | 99 | Pengeluaran RK PPKD   |  | 10.000.000 | -          |
|         |  |  | 1 | 5 | 2 | 02 | 01 | Piutang Tuntutan Ganti Kerugian daerah terhadap Bendahara                           |  | -          | 10.000.000 |
|         |  |  |   |   |   |    |    |   |  |            |            |
| 30/3/15 |  |  | 7 | 2 | 8 | 99 | 99 | Pengeluaran RK PPKD   |  | 5.000.000  | -          |
|         |  |  | 1 | 5 | 2 | 02 | 02 | Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara - LO |  | -          | 5.000.000  |
|         |  |  |   |   |   |    |    |   |  |            |            |
| Jumlah  |  |  |   |   |   |    |    |   |  | 81.000.000 | 81.000.000 |

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Selain mencatat di buku jurnal umum dilakukan juga pencatatan dalam buku jurnal penerimaan kas untuk transaksi berbasis kas yang nantinya digunakan untuk menyusun LRA dan LAK sebagai berikut :

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU JURNAL PENERIMAAN KAS (JM)

SKPD : .....( SKPD Kabupaten Kuningan)

| Halaman 01 |                  |            |               |   |   |    |    |                                    |      |            |             |
|------------|------------------|------------|---------------|---|---|----|----|------------------------------------|------|------------|-------------|
| Tanggal    | Nomor            |            | Kode Rekening |   |   |    |    | Uraian                             | Ref. | Debit (Rp) | Kredit (Rp) |
|            | Bukti Penerimaan | Bukti Lain |               |   |   |    |    |                                    |      |            |             |
| 1          | 2                |            | 3             |   |   |    |    | 4                                  | 5    | 6          | 7           |
| 5/3/15     | -                | -          | 3             | 1 | 2 | 05 | 01 | Estimasi Perubahan SAL             | -    | 1.000.000  | -           |
|            |                  |            | 4             | 1 | 4 | 01 | 05 | Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua | -    | -          | 1.000.000   |
|            |                  |            |               |   |   |    |    |                                    |      |            |             |

|         |  |  |   |   |   |    |    |  |  |            |             |
|---------|--|--|---|---|---|----|----|--|--|------------|-------------|
| 5/3/15  |  |  | 3 | 1 | 2 | 05 | 01 | Estimasi Perubahan SAL   |  | 3.000.000  | -           |
|         |  |  | 4 | 1 | 4 | 01 | 05 | Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua   |  | -          | 3.000.000   |
| 5/3/15  |  |  | 3 | 1 | 2 | 05 | 01 | Estimasi Perubahan SAL   |  | 1.500.000  | -           |
|         |  |  | 4 | 1 | 4 | 01 | 05 | Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua   |  | -          | 1.500.000   |
| 10/3/15 |  |  | 3 | 1 | 2 | 05 | 01 | Estimasi Perubahan SAL   |  | 17.000.000 | -           |
|         |  |  | 4 | 1 | 4 | 02 | 01 | Jasa Giro Kas Daerah-LRA   |  | -          | 12.000.000  |
|         |  |  | 4 | 1 | 4 | 02 | 02 | Jasa Giro Pemegang Kas-LRA   |  | -          | 5.000.000   |
| 15/3/15 |  |  | 3 | 1 | 2 | 05 | 01 | Estimasi Perubahan SAL   |  | 15.000.000 | -           |
|         |  |  | 4 | 1 | 4 | 03 | 00 | Pendapatan Bunga Deposito-LRA  |  | -          | 15.000.0000 |
| 20/3/15 |  |  | 3 | 1 | 2 | 05 | 01 | Estimasi Perubahan SAL   |  | 1.000.000  | -           |
|         |  |  | 4 | 1 | 4 | 13 | 01 | Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III-LRA |  | -          | 1.000.000   |
| 25/3/15 |  |  | 3 | 1 | 2 | 05 | 01 | Estimasi Perubahan SAL   |  | 10.000.000 | -           |
|         |  |  | 4 | 1 | 4 | 04 | 01 | Tuntutan Ganti Kerugian Uang-LRA   |  | -          | 10.000.000  |
| 30/3/15 |  |  | 3 | 1 | 2 | 05 | 01 | Estimasi Perubahan SAL   |  | 5.000.000  | -           |
|         |  |  | 4 | 1 | 4 | 04 | 01 | Tuntutan Ganti Kerugian Uang-LRA   |  | -          | 5.000.000   |
|         |  |  |   |   |   |    |    |  |  |            |             |
|         |  |  |   |   |   |    |    |  |  |            |             |
| Jumlah  |  |  |   |   |   |    |    |  |  | 53.500.000 | 53.500.000  |

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

**Langkah III : Melakukan Posting ke Buku Besar**

Setelah melakukan penjurnalan seluruh transaksi, maka PPK-SKPD melakukan posting atas pencatatan jurnal tersebut ke buku besar. Posting ini berguna agar seluruh transaksi yang sama-sama mempengaruhi suatu kode rekening/akun dapat dikelompokkan dalam satu buku besar untuk kode rekening/akun yang bersangkutan. Periode posting harus semakin diusahakan dapat dilakukan dalam waktu yang semakin singkat misalkan untuk periode mingguan atau bahkan harian.

Contoh buku besar SKPD : Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 1.3.7.01.04  
Nama Rekening : Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor

Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |           | Ref | Uraian         | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|-----------|-----|----------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal   |     |                |               |                |
| 1  |       | 5/03/2022 | JU  | Aset lain-lain | 10.000.000    | -              |
|    |       |           |     |                |               |                |
|    |       |           |     | Jumlah         | 10.000.000    | -              |
|    |       |           |     | Saldo          | 10.000.000    | -              |

PPK-SKPD Kepala SKPD

(tanda tangan) (tanda tangan)  
(nama lengkap) (nama lengkap)  
NIP..... NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 1.5.2.02.01  
Nama Rekening : Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara

Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian   | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|--|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |  |               |                |
| 1  |       | 1/03/2022  | JU  | Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara-LO | 10.000.000    | -              |
| 2  |       | 25/03/2022 | JU  | RK PPKD  | -             | 10.000.000     |
|    |       |            |     |  |               |                |
|    |       |            |     | Jumlah   | 10.000.000    | 10.000.000     |
|    |       |            |     | Saldo  | -             | -              |

PPK-SKPD Kepala SKPD

(tanda tangan) (tanda tangan)  
(nama lengkap) (nama lengkap)  
NIP..... NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Piutang Tuntutan Ganti Kerugian terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 1.5.2.02.02  
Nama Rekening : Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah  
terhadap Pegawai Negar Bukan Bendahara  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD :

Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian  | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|---|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |   |               |                |
| 1  |       | 2/03/2022  | JU  | Tuntutan Ganti Kerugian Daerah<br>terhadap Pegawai Negari Bukan<br>Bendahara-LO | 5.000.000     | -              |
| 2  |       | 30/03/2022 | JU  | RK PPKD   | -             | 5.000.000      |
|    |       |            |     |   |               |                |
|    |       |            |     | Jumlah  | 5.000.000     | 5.000.000      |
|    |       |            |     | Saldo   | -             | -              |

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Aset Lain-lain sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 1.5.4.01.01  
Nama Rekening : Aset Lain-lain  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD :

Halaman 01

| No | Bukti |           | Ref | Uraian  | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|-----------|-----|---|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal   |     |   |               |                |
| 1  |       | 5/03/2022 | JU  | Ak Penyusutan Alat Angkutan<br>Darat Bermotor | -             | 12.000.000     |
|    |       |           |     |   |               |                |
|    |       |           |     | Jumlah  | -             | 12.000.000     |
|    |       |           |     | Saldo   | -             | 12.000.000     |

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Estimasi Perubahan SAL sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

| KABUPATEN KUNINGAN |       |                           |                |  |               |                |
|--------------------|-------|---------------------------|----------------|--|---------------|----------------|
| BUKU BESAR         |       |                           |                |  |               |                |
| SKPD               |       | : SKPD Kabupaten Kuningan |                |  |               |                |
| Kode Rekening      |       | : 3.1.2.05.01             |                |  |               |                |
| Nama Rekening      |       | : Estimasi Perubahan SAL  |                |  |               |                |
| No                 | Bukti |                           | Ref            | Uraian   | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|                    | Nomor | Tanggal                   |                |  |               |                |
| 1                  |       | 5/03/2022                 | JM             | Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin  | 1.000.000     | -              |
| 2                  |       | 5/03/2022                 | JM             | Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin  | 3.000.000     | -              |
| 3                  |       | 5/03/2022                 | JM             | Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin  | 1.500.000     | -              |
| 4                  |       | 10/03/2022                | JM             | Jasa Giro Kas Daerah-LRA   | 17.000.000    | -              |
| 5                  |       | 15/03/2022                | JM             | Pendapatan Bunga Depoaito-LRA  | 15.000.000    | -              |
| 6                  |       | 20/03/2022                | JM             | Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah Dinas Daerah Gol III-LRA                  | 1.000.000     | -              |
| 7                  |       | 25/03/2022                | JM             | Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara-LRA                      | 10.000.000    | -              |
| 8                  |       | 30/03/2022                | JM             | Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara-LRA | 5.000.000     | -              |
|                    |       |                           |                | Jumlah   | 53.500.000    | -              |
|                    |       |                           |                | Saldo  | 53.500.000    | -              |
| PPK-SKPD           |       |                           | Kepala SKPD    |  |               |                |
| (tanda tangan)     |       |                           | (tanda tangan) |  |               |                |
| (nama lengkap)     |       |                           | (nama lengkap) |  |               |                |
| NIP.....           |       |                           | NIP.....       |  |               |                |

Contoh buku besar SKPD : Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

| KABUPATEN KUNINGAN  |       |                                      |                |                        |               |                |
|---------------------|-------|--------------------------------------|----------------|------------------------|---------------|----------------|
| BUKU BESAR          |       |                                      |                |                        |               |                |
| SKPD                |       | : SKPD Kabupaten Kuningan            |                |                        |               |                |
| Kode Rekening       |       | : 4.1.4.01.05                        |                |                        |               |                |
| Nama Rekening       |       | : Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua |                |                        |               |                |
| Pagu APBD           |       | :                                    |                |                        |               |                |
| Pagu perubahan APBD |       | :                                    |                |                        |               |                |
| No                  | Bukti |                                      | Ref            | Uraian                 | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|                     | Nomor | Tanggal                              |                |                        |               |                |
| 1                   |       | 5/03/2022                            | JM             | Estimasi Perubahan SAL | -             | 1.000.000      |
| 2                   |       | 5/03/2022                            | JM             | Estimasi Perubahan SAL | -             | 3.000.000      |
| 3                   |       | 5/03/2022                            | JM             | Estimasi Perubahan SAL | -             | 1.500.000      |
|                     |       |                                      |                |                        |               |                |
|                     |       |                                      |                | Jumlah                 | -             | 5.500.000      |
|                     |       |                                      |                | Saldo                  | -             | 5.500.000      |
| PPK-SKPD            |       |                                      | Kepala SKPD    |                        |               |                |
| (tanda tangan)      |       |                                      | (tanda tangan) |                        |               |                |
| (nama lengkap)      |       |                                      | (nama lengkap) |                        |               |                |
| NIP.....            |       |                                      | NIP.....       |                        |               |                |



Contoh buku besar SKPD : Jasa Giro Kas Daerah-LRA sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

**KABUPATEN KUNINGAN**  
**BUKU BESAR**

**SKPD** : SKPD Kabupaten Kuningan  
**Kode Rekening** : 4.1.4.02.01  
**Nama Rekening** : Jasa Giro Kas Daerah-LRA  
**Pagu APBD** :  
**Pagu perubahan APBD** : **Halaman 01**

| No | Bukti |            | Ref | Uraian                 | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |                        |               |                |
| 1  |       | 10/03/2022 | JM  | Estimasi Perubahan SAL | -             | 12.000.000     |
|    |       |            |     |                        |               |                |
|    |       |            |     | Jumlah                 | -             | 12.000.000     |
|    |       |            |     | Saldo                  | -             | 12.000.000     |

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Jasa Giro Pemegang Kas-LRA sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

**KABUPATEN KUNINGAN**  
**BUKU BESAR**

**SKPD** : SKPD Kabupaten Kuningan  
**Kode Rekening** : 4.1.4.02.02  
**Nama Rekening** : Jasa Giro Pemegang Kas -LRA  
**Pagu APBD** :  
**Pagu perubahan APBD** : **Halaman 01**

| No | Bukti |            | Ref | Uraian                 | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |                        |               |                |
| 1  |       | 10/03/2022 | JM  | Estimasi Perubahan SAL | -             | 5.000.000      |
|    |       |            |     |                        |               |                |
|    |       |            |     | Jumlah                 | -             | 5.000.000      |
|    |       |            |     | Saldo                  | -             | 5.000.000      |

PPK-SKPD

Kepaal SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Pendapatan Bunga Deposito-LRA sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 4.1.4.03.00  
Nama Rekening : Pendapatan Bunga Deposito-LRA  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian                 | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |                        |               |                |
| 1  |       | 15/03/2022 | JM  | Estimasi Perubahan SAL | -             | 15.000.000     |
|    |       |            |     |                        |               |                |
|    |       |            |     | Jumlah                 | -             | 15.000.000     |
|    |       |            |     | Saldo                  | -             | 15.000.000     |

PPK-SKPD Kepala SKPD

(tanda tangan) (tanda tangan)  
(nama lengkap) (nama lengkap)  
NIP..... NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Tuntutan Ganti kerugian Daerah terhadap Bendahara-LRA sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 4.1.4.04.01  
Nama Rekening : Tuntutan Ganti Kerugian Uang-LRA  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian                 | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |                        |               |                |
| 1  |       | 25/03/2022 | JM  | Estimasi Perubahan SAL | -             | 10.000.000     |
| 2  |       | 30/03/2022 | JM  | Estimasi Perubahan SAL | -             | 5.000.000      |
|    |       |            |     |                        |               |                |
|    |       |            |     | Jumlah                 | -             | 15.000.000     |
|    |       |            |     | Saldo                  | -             | 15.000.000     |

PPK-SKPD Kepala SKPD

(tanda tangan) (tanda tangan)  
(nama lengkap) (nama lengkap)  
NIP..... NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III-LRA sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 4.1.4.13.01  
Nama Rekening : Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III-LRA  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian                 | Debet (Rp) | Kredit (Rp) |
|----|-------|------------|-----|------------------------|------------|-------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |                        |            |             |
| 1  |       | 20/03/2022 | JM  | Estimasi Perubahan SAL | -          | 1.000.000   |
|    |       |            |     |                        |            |             |
|    |       |            |     | Jumlah                 | -          | 1.000.000   |
|    |       |            |     | Saldo                  | -          | 1.000.000   |

PPK-SKPD  
  
(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Kepala SKPD  
  
(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Pengeluaran RK PPKD sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 7.2.8.99.99  
Nama Rekening : Pengeluaran RK PPKD

| No | Bukti |            | Ref | Uraian  | Debet (Rp) | Kredit (Rp) |
|----|-------|------------|-----|---|------------|-------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |   |            |             |
| 1  |       | 5/03/2022  | JU  | Surplus Penjualan Aset Peralatan dan Mesin-LO                                     | 1.000.000  | -           |
| 2  |       | 5/03/2022  | JU  | Defisit dan Surplus Penjualan Aset Peralatan dan Mesin                            | 3.000.000  | -           |
| 3  |       | 5/03/2022  | JU  | Defisit Penjualan Aset Peralatan dan Mesin  | 1.500.000  | -           |
| 4  |       | 10/03/2022 | JU  | Jasa Giro   | 17.000.000 | -           |
| 5  |       | 15/03/2022 | JU  | Pendapatan Bunga Deposito-LO  | 15.000.000 | -           |
| 6  |       | 20/03/2022 | JU  | Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah Dinas Daerah Gol III-LO                          | 1.000.000  | -           |
| 7  |       | 25/03/2022 | JU  | Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara                         | 10.000.000 | -           |
| 8  |       | 30/03/2022 | JU  | Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara-LO | 5.000.000  | -           |
|    |       |            |     | Jumlah  | 53.500.000 | -           |
|    |       |            |     | Saldo   | 53.500.000 | -           |

PPK-SKPKD  
  
(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Kepala SKPD  
  
(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Jasa Giro Kas Daerah-LO sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

**KABUPATEN KUNINGAN**  
**BUKU BESAR**

**SKPD** : SKPD Kabupaten Kuningan  
**Kode Rekening** : 8.1.4.03.01  
**Nama Rekening** : Jasa Giro Kas Daerah-LO  
**Pagu APBD** :  
**Pagu perubahan APBD** :

Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian  | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|---------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |         |               |                |
| 1  |       | 10/03/2022 | JU  | RK PPKD | -             | 12.000.000     |
|    |       |            |     |         |               |                |
|    |       |            |     | Jumlah  | -             | 12.000.000     |
|    |       |            |     | Saldo   | -             | 12.000.000     |

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Jasa Giro Bendahara-LRA sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

**KABUPATEN KUNINGAN**  
**BUKU BESAR**

**SKPD** : SKPD Kabupaten Kuningan  
**Kode Rekening** : 8.1.4.03.02  
**Nama Rekening** : Jasa Giro Bendahara-LRA  
**Pagu APBD** :  
**Pagu perubahan APBD** :

Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian  | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|---------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |         |               |                |
| 1  |       | 10/03/2022 | JU  | RK PPKD | -             | 5.000.000      |
|    |       |            |     |         |               |                |
|    |       |            |     | Jumlah  | -             | 5.000.000      |
|    |       |            |     | Saldo   | -             | 5.000.000      |

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Pendapatan Bunga Deposito-LO sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 8.1.4.04.01  
Nama Rekening : Pendapatan Bunga Deposito-LO  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD :

Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian  | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|---------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |         |               |                |
| 1  |       | 15/03/2022 | JU  | RK PPKD | -             | 15.000.000     |
|    |       |            |     |         |               |                |
|    |       |            |     | Jumlah  | -             | 15.000.000     |
|    |       |            |     | Saldo   | -             | 15.000.000     |

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara-LO sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 8.1.4.05.01  
Nama Rekening : Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara-LO  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD :

Halaman 01

| No | Bukti |           | Ref | Uraian   | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|-----------|-----|--|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal   |     |  |               |                |
| 1  |       | 1/03/2022 | JU  | Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara-LO | -             | 10.000.000     |
|    |       |           |     |  |               |                |
|    |       |           |     | Jumlah   | -             | 10.000.000     |
|    |       |           |     | Saldo  | -             | 10.000.000     |

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara-LO sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 8.1.4.05.02  
Nama Rekening : Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara-LO  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD :

Halaman 01

| No | Bukti |           | Ref | Uraian   | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|-----------|-----|--|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal   |     |  |               |                |
| 1  |       | 1/03/2022 | JU  | Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara | -             | 5.000.000      |
|    |       |           |     |  |               |                |
|    |       |           |     | Jumlah   | -             | 5.000.000      |
|    |       |           |     | Saldo  | -             | 5.000.000      |

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III-LO sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 8.1.4.15.01  
Nama Rekening : Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III-LO  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD :

Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian  | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|---------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |         |               |                |
| 1  |       | 20/03/2022 | JU  | RK PPKD | -             | 1.000.000      |
|    |       |            |     |         |               |                |
|    |       |            |     | Jumlah  | -             | 1.000.000      |
|    |       |            |     | Saldo   | -             | 1.000.000      |

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Surplus Penjualan Aset Peralatan dan Mesin- LO sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 8.4.1.01.02  
Nama Rekening : Surplus Penjualan Aset Peralatan dan Mesin-LO  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |           | Ref | Uraian  | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|-----------|-----|---------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal   |     |         |               |                |
| 1  |       | 5/03/2022 | JU  | RK PPKD | -             | 1.000.000      |
| 2  |       | 5/03/2022 | JU  | RK PPKD | -             | 1.000.000      |
|    |       |           |     |         |               |                |
|    |       |           |     | Jumlah  | -             | 2.000.000      |
|    |       |           |     | Saldo   | -             | 2.000.000      |

PPK-SKPD

Kuasa SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Defisit Penjualan Aset Peralatan dan Mesin sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 9.1.3.01.02  
Nama Rekening : Defisit Penjualan Aset Peralatan dan Mesin  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |           | Ref | Uraian         | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|-----------|-----|----------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal   |     |                |               |                |
| 1  |       | 5/03/2022 | JU  | Aset Lain-lain | 2.000.000     | -              |
| 2  |       | 5/03/2022 | JU  | RK PPKD        | -             | 2.000.000      |
| 3  |       | 5/03/2022 | JU  | RK PPKD        | 500.000       | -              |
| 4  |       | 5/03/2022 | JU  | RK PPKD        | -             | 2.000.000      |
|    |       |           |     |                |               |                |
|    |       |           |     | Jumlah         | 2.500.000     | 4.000.000      |
|    |       |           |     | Saldo          | -             | 1.500.000      |

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

**Langkah IV : Menyusun Neraca Saldo dan Laporan Keuangan**

Setelah melakukan posting seluruh pencatatan dalam buku besar maka kemudian Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD membuat neraca saldo sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Penyusunan neraca saldo oleh Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD dilakukan secara triwulanan. Neraca saldo disusun dengan cara memindahkan saldo-saldo yang ada di tiap buku besar ke dalam Neraca Saldo. Contoh Neraca Saldo dari hasil pencatatan dan posting contoh transaksi keuangan diatas adalah sebagai berikut :

**KABUPATEN KUNINGAN  
NERACA SALDO  
PER TANGGAL 31 Desember 2022**

**SKPD** : SKPD Kabupaten Kuningan

| Kode Rekening |   |   |    |    | Uraian   | Jumlah      |             |
|---------------|---|---|----|----|--|-------------|-------------|
|               |   |   |    |    |  | Debit       | Kredit      |
| 1             |   |   |    |    | 2  | 3           | 4           |
| 1             | 3 | 7 | 01 | 04 | Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor                              | 10.000.000  | -           |
| 1             | 5 | 4 | 01 | 01 | Aset Lain-lain   | -           | 12.000.000  |
| 3             | 1 | 2 | 05 | 01 | Estimasi Perubahan SAL   | 53.500.000  | -           |
| 4             | 1 | 4 | 01 | 05 | Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua   | -           | 5.500.000   |
| 4             | 1 | 4 | 02 | 01 | Jasa Giro Kas Daerah-LRA   | -           | 12.000.000  |
| 4             | 1 | 4 | 02 | 02 | Jasa Giro Pemegang Kas-LRA   | -           | 5.000.000   |
| 4             | 1 | 4 | 03 | 03 | Pendapatan Bunga Deposito-LRA  | -           | 15.000.000  |
| 4             | 1 | 4 | 04 | 01 | Tuntutan Ganti Kerugian Uang-LRA   | -           | 15.000.000  |
| 4             | 1 | 4 | 13 | 01 | Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III-LRA | -           | 1.000.000   |
| 7             | 2 | 8 | 99 | 99 | Pengeluaran RK PPKD  | 53.500.000  | -           |
| 8             | 1 | 4 | 03 | 01 | Jasa Giro Kas Daerah-LO  | -           | 12.000.000  |
| 8             | 1 | 4 | 03 | 02 | Jasa Giro Bendahara-LO   | -           | 5.000.000   |
| 8             | 1 | 4 | 04 | 01 | Pendapatan Bunga Deposito-LO   | -           | 15.000.000  |
| 8             | 1 | 4 | 05 | 01 | Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara-LO                           | -           | 10.000.000  |
| 8             | 1 | 4 | 05 | 02 | Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara-LO      | -           | 5.000.000   |
| 8             | 1 | 4 | 15 | 01 | Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III-LO                  | -           | 1.000.000   |
| 8             | 4 | 1 | 01 | 02 | Surplus Penjualan Aset Peralatan dan Mesin-LO                                  | -           | 2.000.000   |
| 9             | 1 | 3 | 01 | 02 | Defisit Penjualan Aset Peralatan dan Mesin                                     | -           | 1.500.000   |
|               |   |   |    |    |  |             |             |
| Jumlah        |   |   |    |    |  | 117.000.000 | 117.000.000 |

PPK-SKPD  
(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Kepala SKPD  
(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....



## **SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)**

Bagian ini menjelaskan Sistem dan Prosedur Akuntansi Beban dan Belanja baik UP/GU/TU maupun LS di Pemerintah Kabupaten Kuningan untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mencatat transaksi belanja SKPD.

### **KEBIJAKAN UMUM**

Akuntansi beban dan belanja merupakan salah satu inti dari sistem dan prosedur akuntansi yang harus dijalankan dengan benar di SKPD sebagai entitas akuntansi. Sistem dan prosedur akuntansi ini dilakukan hanya untuk mencatat beban dan belanja yang berada dalam kewenangan SKPD bersangkutan.

Terdapat 2 (dua) jenis prosedur akuntansi ini yaitu mekanisme beban dan belanja melalui uang persediaan (Belanja UP/GU/TU) serta prosedur beban dan belanja yang terkait dengan mekanisme belanja langsung (Belanja LS). Sistem dan prosedur akuntansi ini disusun berdasarkan kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

Belanja uang persediaan (UP) pada SKPD digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan dan operasionalisasi organisasinya. Uang persediaan ini bersifat pengisian kembali (*revolving*), sehingga apabila uang persediaan ini berkurang atau habis maka uang tersebut dapat ditambah lagi hingga kembali seperti semula dengan menggunakan GU (Ganti Uang). Sedangkan untuk belanja Tambah Uang (TU) pada SKPD digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan dan operasionalisasi organisasinya yang bersifat mendesak dan dalam kondisi uang persediaan tidak mencukupi untuk melaksanakannya.

Uang persediaan yang ada di SKPD, tepatnya dipegang atau disimpan oleh bendahara pengeluaran, digunakan untuk membiayai beban dan belanja UP/GU/TU yaitu belanja yang pembayarannya dilakukan oleh atau melalui bendahara pengeluaran SKPD. Sedangkan untuk beban dan belanja LS merupakan belanja yang pembayarannya atau serah terima uangnya dilakukan langsung dari Kas Daerah kepada yang berhak tanpa melalui SKPD yang dalam hal ini diwakili oleh bendahara pengeluaran SKPD.

Untuk belanja LS maka SKPD tidak menerima uang untuk melakukan pembayaran atas belanja yang telah dilakukan. Pembayaran yang terjadi langsung dilakukan melalui transfer dari Kas Daerah kepada pihak yang berhak menerima pembayaran tersebut tanpa melalui SKPD yang dalam hal ini diwakili oleh bendahara pengeluaran.

Belanja langsung (LS) yang dimaksud adalah Belanja LS Gaji & Tunjangan dan Belanja LS Barang & Jasa. Dalam konteks belanja langsung ini akuntansi mempunyai asumsi bahwa dana SP2D dari BUD langsung diterima oleh pihak ketiga/pihak lain yang telah ditetapkan sebagai yang berhak atas dana tersebut.

Walaupun aliran kas untuk pembayaran belanja langsung ini tidak melalui bendahara pengeluaran SKPD tetapi atas realisasi belanjanya harus tetap dilakukan pencatatan melalui penjurnalan dalam sistem dan prosedur akuntansi beban dan belanja. Jika tidak melakukan pencatatan atas realisasi beban dan belanjanya maka SKPD akan melaporkan realisasi beban dan belanja lebih kecil dari yang sebenarnya terjadi.

Berdasarkan kondisi tersebut maka penatausahaan atas beban dan belanja ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar pertanggungjawabannya dapat dilakukan dengan baik. Sistem dan prosedur akuntansi beban dan belanja di SKPD merupakan salah satu sarana untuk menunjang proses pertanggungjawaban anggaran SKPD.

## **PIHAK-PIHAK TERKAIT**

Berbagai pihak/fungsi yang terkait dalam proses akuntansi belanja SKPD beserta tugas-tugasnya adalah :

1. Bendahara Pengeluaran di SKPD

Dalam pelaksanaan prosedur ini, Bendahara SKPD memiliki tugas:

- a. menyiapkan dokumen-dokumen atas transaksi yang terkait untuk diserahkan kepada tenaga akuntansi di PPK-SKPD atas :
  - i. Proses pelaksanaan akuntansi belanja UP/GU/TU berupa SP2D UP/GU/TU dan bukti-bukti belanja yang sah; dan
  - ii. Proses pelaksanaan akuntansi belanja LS SKPD seperti SP2D LS.
- b. Menyiapkan dokumen STS untuk pengembalian belanja; dan
- c. Menyiapkan dokumen-dokumen kepemilikan aset atas transaksi belanja UP/GU/TU untuk diserahkan kepada Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD.

2. Pengurus Barang di SKPD

Dalam pelaksanaan prosedur ini, Pengurus Barang SKPD memiliki tugas menyiapkan dokumen-dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan akuntansi beban dan belanja SKPD seperti Berita Acara Serah Terima untuk diserahkan kepada tenaga akuntansi di PPK-SKPD.

3. Tenaga Akuntansi di Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)

Dalam pelaksanaan prosedur ini, Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menerima dan menganalisa bukti-bukti transaksi dan mengambil informasi akuntansi dari bukti transaksi tersebut seperti SP2D UP/GU/TU dan bukti-bukti pengeluaran serta SP2D LS dari Bendahara Pengeluaran SKPD;
- b. Menyerahkan bukti kepemilikan aset dan/atau bukti-bukti belanja perolehan aset dari penggunaan belanja UP/GU/TU

kepada pengurus barang;

- c. Mencatat transaksi-transaksi beban dan belanja berdasarkan bukti-bukti yang terkait yang berada dalam kewenangan SKPD-nya;
- d. Memposting jurnal-jurnal beban dan belanja ke dalam buku besarnya masing-masing;
- e. Membuat laporan keuangan, yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan; dan
- f. Menyerahkan buku jurnal, buku besar dan neraca saldo kepada PPK-SKPKD untuk diperiksa dan ditandatangani.

4. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) : **Sekretaris Badan/Dinas atau Koordinator/Kepala Sub Bagian Keuangan** (Sekretariat Daerah, Badan, Kantor, Dinas, Rumah Sakit Umum Daerah Linggarjati, Kecamatan, dan Kelurahan), Kepala Bagian Keuangan (Sekretariat DPRD dan Rumah Sakit Umum Daerah 45). Dalam pelaksanaan prosedur ini, PPK-SKPD memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Bertanggungjawab atas sistem akuntansi beban dan belanja SKPD yang dipimpinnya;
- b. Memeriksa dan menandatangani hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Tenaga Akuntansi PPK-SKPD terkait akuntansi beban dan belanja SKPD secara triwulanan; dan
- c. Menyerahkan Buku Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo SKPKD-PPKD yang mencatat transaksi pemerintah daerah setiap triwulan kepada PPKD selaku pengguna anggaran untuk disetujui.

5. Pengguna Anggaran/Kepala SKPD : Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, Kepala Satuan, Camat, Lurah, Asisten Administrasi, Sekretaris DPRD, dan Direktur.

Dalam pelaksanaan prosedur ini, Pengguna Anggaran memiliki tugas :

- a. Mengesahkan pertanggungjawaban transaksi-transaksi pengeluaran kas dari realisasi belanja UP/GU/TU sesuai kewenangannya; dan
- b. Menyetujui Buku Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo yang diserahkan PPK-SKPD setiap triwulan.

## **DOKUMEN YANG DIGUNAKAN**

1. Daftar Gaji adalah dokumen yang berisi data Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD);
2. Berita Acara Serah Terima (BAST) adalah dokumen yang mengakui terjadinya penyerahan pekerjaan baik berupa barang maupun jasa dari penyedia jasa kepada pemberi pekerjaan;
3. Surat Perintah Pencairan Dana Uang Persediaan yang selanjutnya disebut (SP2D-UP) adalah dokumen yang digunakan sebagai pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkan SPM –UP;
4. Surat Perintah Pencairan Dana Ganti Uang yang selanjutnya disebut (SP2D-GU) adalah dokumen yang digunakan sebagai pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkan SPM –GU;
5. Surat Perintah Pencairan Dana Tambahan Uang yang selanjutnya disebut (SP2D-TU) adalah dokumen yang digunakan sebagai pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkan SPM –TU;
6. Surat Perintah Pencairan Dana Langsung yang selanjutnya disebut (SP2D-LS) adalah dokumen yang digunakan sebagai pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM -LS;
7. Surat Tanda Setoran selanjutnya disebut STS adalah bukti yang dibuat untuk melakukan penyetoran uang ke Kas Daerah ;
8. Laporan Pertanggungjawaban UP/GU/TU selanjutnya disebut LPJ UP/GU/TU adalah dokumen yang disampaikan bendahara

pengeluaran kepada pengguna anggaran melalui PPK-SKPD untuk mempertanggungjawabkan transaksi belanja UP/GU/TU dan dilampiri dengan bukti-bukti belanja yang sah pada saat meminta GU atau mempertanggungjawabkan TU;

9. Faktur Pajak yang selanjutnya disebut FP adalah daftar perincian barang dan/atau jasa yang dibeli/dijual beserta harga dan pungutan PPN yang dibuat oleh penyedia barang dan/atau jasa;
10. Bukti potong dan pungut PPN dan PPh, adalah bukti bendahara pengeluaran SKPD telah memotong dan memungut PPN dan PPh dari penyerahan barang dan/atau jasa dari penyedia kepada SKPD; dan
11. Bukti setor PPN dan PPh, adalah bukti bendahara SKPD telah menyetor PPN dan PPh yang telah dipotong dan dipungut kepada Kas Negara;

#### **BUKU DAN ATAU FORMULIR YANG DIGUNAKAN**

Buku dan atau formulir yang digunakan dalam pelaksanaan prosedur akuntansi beban dan belanja UP/GU/TU dan LS di Satuan Kerja Perangkat Daerah paling tidak terdiri dari :

1. Buku Jurnal Umum (JU)

Merupakan buku jurnal yang digunakan untuk melakukan pencatatan akuntansi atas transaksi beban yang berbasis akrual terkait penyusunan LO dan Neraca.

2. Buku Jurnal Pengeluaran Kas (JK)

Merupakan buku jurnal yang digunakan untuk melakukan pencatatan akuntansi atas transaksi pengeluaran kas untuk belanja baik dengan mekanisme uang persediaan (belanja UP/GU/TU) maupun langsung (LS). Pada umumnya buku jurnal penerimaan kas digunakan untuk mencatat transaksi basis kas terkait penyusunan LRA dan LAK.

3. Buku Besar (BB)

Merupakan buku yang digunakan untuk menampung pencatatan

hasil posting transaksi dari buku jurnal. Buku besar ini merupakan pencatatan akuntansi atas seluruh transaksi khususnya dalam hal ini transaksi terkait beban dan belanja di SKPD pada suatu rekening/akun per jenis atau obyek. Jadi setiap rekening/akun per jenis atau objek mempunyai buku besar tersendiri.

4. Buku Besar Pembantu (BP)

Buku besar dapat dilengkapi dengan buku besar pembantu sebagai alat uji silang dan kelengkapan informasi rekening/akun tertentu. Buku besar pembantu berisi rincian akun (rincian obyek) yang telah dicatat dalam buku besar. Jika dirasakan informasi dalam buku besar sudah mencukupi maka buku besar pembantu tidak perlu dibuat lagi.

5. Neraca Saldo (NS)

Merupakan formulir yang mencatat nilai saldo setiap rekening/akun per rincian objek termasuk rekening/akun beban dan belanja sehingga diketahui jumlah total dari seluruh rekening/akun.

## **KERANGKA SISTEM**

Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD menerima bukti-bukti transaksi belanja dari Bendahara Pengeluaran SKPD melalui prosedur atau mekanisme penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban bendahara. Pada saat bukti transaksi keuangan tersebut telah diterima maka Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD kemudian melakukan pencatatan akuntansi dalam buku jurnal terkait. Bukti-bukti pengeluaran yang digunakan mekanisme UP/GU/TU berupa SP2D UP/GU/TU, LPJ UP/GU/TU, kwitansi, faktur dan bukti pengeluaran lainnya yang sah.

Pada saat bukti transaksi beban dan belanja tersebut telah diterima maka Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD kemudian melakukan pencatatan akuntansi dalam Buku Jurnal. Pencatatan transaksi atas beban dan belanja UP/GU/TU dilakukan berdasarkan SP2D UP/GU/TU pada saat pengisian kas di bendahara pengeluaran dan berdasarkan

bukti-bukti belanja yang sah pada saat akan meminta GU atau mempertanggungjawabkan TU. Sedangkan untuk pencatatan transaksi atas beban dan belanja LS dilakukan berdasarkan SP2D LS. Setelah seluruh transaksi dicatat dalam buku jurnal maka Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD kemudian melakukan posting ke buku besar. Setelah posting dari buku jurnal ke buku besar selesai dilakukan maka kemudian Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD menyusun Neraca Saldo sebagai dasar pembuatan Laporan Keuangan untuk setiap triwulan yang diserahkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah triwulan berakhir kepada PPK-SKPD.

## **ALUR PROSEDUR TEKNIS**

Teknis pelaksanaan sistem dan prosedur akuntansi beban dan belanja UP/GU/TU dan LS di SKPD ini adalah sebagai berikut :

### **Langkah I : Penerimaan Bukti Transaksi**

Transaksi dalam mekanisme belanja UP/GU/TU diawali dengan diterimanya uang oleh bendahara pengeluaran sebagai Uang Persediaan (UP), atau Uang Pengganti Persediaan (GU) atau Tambahan Uang Persediaan (TU). Setelah bendahara pengeluaran mempunyai uang persediaan maka transaksi pengeluaran dapat dilakukan.

Transaksi-transaksi pembebanan belanja ini sebenarnya sudah dapat terlihat dalam dokumen SP2D UP/GU/TU yang diterima Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD. Namun demikian pencatatan beban dan belanja dilakukan berdasarkan bukti-bukti belanja yang sah pada saat akan meminta GU atau mempertanggungjawabkan TU. Jadi pencatatan berdasarkan tanggal bukti-bukti belanja seperti kwitansi, faktur dan bukti pengeluaran lainnya yang sah.

Sebagai contoh : misalkan diketahui bahwa selama bulan Februari 2022, telah terjadi transaksi yang terkait dengan beban dan belanja di SKPD melalui mekanisme UP/GU/TU sebagai berikut (asumsi tanggal bukti transaksi sama dengan tanggal penerimaan bukti transaksi) :

5 Februari 2022 Tenaga akuntansi di PPK-SKPD menerima SP2D UP dari bendahara pengeluaran SKPD atas penerimaan



uang sebesar Rp10.000.000,- di SKPD.

8 Februari 2022 Tenaga akuntansi di PPK-SKPD menerima bukti-bukti pembelian sejumlah alat tulis kantor dari bendahara pengeluaran SKPD senilai Rp 5.000.000,-.

Dari jumlah tersebut, Bendahara pengeluaran memungut PPN Rp. 454.545,- dan PPh 22 sebesar Rp 68.182,-

12 Februari 2022 Tenaga akuntansi di PPK-SKPD menerima bukti-bukti pembayaran uang lembur pegawai dari bendahara pengeluaran SKPD senilai Rp1.000.000,-

20 Februari 2022 Tenaga akuntansi di PPK-SKPD menerima LPJ UP/GU/TU dari bendahara pengeluaran SKPD yang menyatakan bahwa pembayaran uang lembur pegawai seharusnya senilai Rp1.100.000,- yang didukung bukti transaksinya.

Sedangkan untuk mekanisme belanja langsung, sistem dan prosedurnya diawali pada saat tenaga Akuntansi di PPK-SKPD menerima BAST dari pengurus barang yang diikuti dengan SP2D LS dari bendahara pengeluaran SKPD. SP2D pada belanja langsung (LS) ini merupakan bukti utama telah dilakukannya pengeluaran untuk belanja karena pada belanja langsung dana dari Kas Daerah tidak diterima terlebih dahulu oleh bendahara pengeluaran tetapi langsung ditransfer/diterima oleh pihak lain yang berhak atas dana tersebut, seperti pihak ketiga dalam hal adanya kontrak kerja pengadaan barang dan atau jasa atau belanja pegawai.

Sebagai contoh : misalkan diketahui bahwa selama bulan Februari 2022, telah terjadi transaksi yang terkait dengan beban dan belanja di SKPD melalui mekanisme LS sebagai berikut (asumsi tanggal bukti transaksi sama dengan tanggal penerimaan bukti transaksi) :

4 Februari 2022 Tenaga akuntansi di PPK-SKPD menerima SP2D LS dan daftar gaji dari bendahara pengeluaran SKPD atas pembayaran gaji bulan Februari dengan rincian sebagai berikut :

- Gaji Pokok Rp. 100.000.000,-
- Tunjangan Keluarga Rp. 20.000.000,-
- Tunjangan Fungsional Rp. 30.000.000,-
- Tunjangan Fungsional Umum Rp. 10.000.000,-
- Potongan PPH 21 Rp 5.000.000,-
- Potongan IWP Rp 2.500.000,-
- Potongan Taperum Rp 1.500.000,-

24 Februari 2022 Tenaga akuntansi di PPK-SKPD menerima Berita Acara Serah Terima (BAST) dari pengurus barang atas penyerahan pekerjaan pendampingan sistem keuangan daerah senilai Rp 110.000.000,-

28 Februari 2022 Tenaga akuntansi di PPK-SKPD menerima SP2D LS dari bendahara pengeluaran SKPD atas pembayaran pekerjaan pendampingan sistem keuangan daerah senilai Rp 110.000.000,- dengan potongan PPN sebesar Rp 10.000.000,- dan Potongan PPh Pasal 23 sebesar Rp 2.000.000.-.

Belanja pekerjaan pendampingan sistem keuangan daerah merupakan kegiatan yang melibatkan pihak ketiga. Dana langsung dicairkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) kepada pihak ketiga setelah adanya pengakuan utang belanja dan beban terlebih dahulu, sehingga SKPD tidak mencatat penerimaan kas terlebih dahulu karena pembayarannya menggunakan mekanisme LS. Demikian juga dengan belanja langsung gaji dimana dana dari BUD atau Kas Daerah langsung dibayarkan kepada para pegawai tidak melalui bendahara pengeluaran SKPD. Dalam kondisi dimana tidak dapat dilakukan transfer secara langsung kepada pegawai maka pembayaran gaji dapat dilakukan melalui bendahara pengeluaran SKPD, sehingga SKPD mencatat penerimaan kas terlebih dahulu seperti halnya mekanisme UP/GU/TU.

Contoh sederhana tersebut diatas diberikan untuk mempermudah penjelasan sistem dan prosedur akuntansi beban dan belanja di SKPD ini. Tetapi contoh tersebut diatas tidak menunjukkan semua bentuk transaksi beban dan belanja yang secara nyata terjadi.

**Langkah II : Penjurnalan Transaksi Beban dan Belanja**

Jurnal transaksi Beban dan Belanja UP/GU/TU

Berdasarkan bukti-bukti transaksi Belanja UP/GU/TU yang pada umumnya diperoleh melalui penatausahaan belanja dan pertanggungjawaban belanja, maka kemudian Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD mencatat transaksi tersebut di buku jurnal. Pencatatan akuntansi dilakukan kedalam buku jurnal sesuai dengan jenis transaksi yang terjadi.

1. Transaksi dalam mekanisme belanja UP/GU/TU diawali dengan diterimanya uang oleh bendahara pengeluaran sebagai Uang Persediaan (UP), atau Uang Pengganti Persediaan (GU) atau Tambahan Uang Persediaan (TU). Proses ini terjadi ketika Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD menerima SP2D UP/GU/TU dari bendahara pengeluaran SKPD. Berdasarkan dokumen SP2D tersebut, Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD mencatat transaksi penerimaan uang persediaan (UP)/ganti uang (GU)/tambahan uang (TU) tersebut di Buku Jurnal Umum dengan menjurnal “Kas di Bendahara Pengeluaran” di Debit dan “RK PPKD” di kredit, sebagai berikut :

|                                     | Debit      | Kredit     |
|-------------------------------------|------------|------------|
| <b>Kas di bendahara pengeluaran</b> | <b>xxx</b> |            |
| <b>RK PPKD</b>                      |            | <b>xxx</b> |

2. Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD baru akan menjurnal realisasi belanja jika sudah menerima bukti transaksi belanja yang sah (SPJ) dengan menjurnal berdasarkan tanggal bukti transaksi belanja yang sah (SPJ) tersebut di Buku Jurnal Umum, ”Beban sesuai jenis sampai rincian objeknya” di debit dan “Kas di Bendahara Pengeluaran” di kredit, sebagai berikut :

|                                     | Debit       | Kredit      |
|-------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Beban .....</b>                  | <b>xxxx</b> |             |
| <b>Kas di bendahara pengeluaran</b> |             | <b>xxxx</b> |

Bukti kepemilikan aset dan/atau bukti transaksi belanja yang sah (SPJ) dari transaksi UP/GU/TU juga harus diserahkan bendahara pengeluaran SKPD kepada pengurus barang agar dicatat dalam buku inventaris barang SKPD.

Kemudian untuk mencatat realisasi anggaran berbasis kas dicatat juga dalam Buku Jurnal Pengeluaran kas dengan melakukan jurnal, “Akun Belanja sesuai jenisnya” di Debit dan “Estimasi Perubahan SAL” di kredit, sebagai berikut :

|                        | Debit | Kredit |
|------------------------|-------|--------|
| Belanja .....          | xxxxx |        |
| Estimasi Perubahan SAL |       | xxxxx  |

3. Apabila ada kesalahan pembebanan belanja yang diketahui setelah dilakukan verifikasi oleh pengguna anggaran melalui PPK-SKPD, maka berdasarkan LPJ UP/GU/TU, Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD baru akan menjurnal realisasi belanja yang sebenarnya tersebut di Buku Jurnal Umum, ”Beban sesuai jenis sampai rincian objeknya” di debit dan “Kas di Bendahara Pengeluaran” di kredit, apabila pembetulan mengakibatkan penambahan beban sebagai berikut :

|                              | Debit | Kredit |
|------------------------------|-------|--------|
| Beban .....                  | xxxxx |        |
| Kas di bendahara pengeluaran |       | xxxxx  |

Kemudian untuk mencatat realisasi anggaran berbasis kas dicatat juga dalam Buku Jurnal Pengeluaran kas dengan melakukan jurnal, “Akun Belanja sesuai jenisnya” di Debit dan “Estimasi Perubahan SAL” di kredit, sebagai berikut :

|                        | Debit | Kredit |
|------------------------|-------|--------|
| Belanja .....          | xxxxx |        |
| Estimasi Perubahan SAL |       | xxxxx  |

Apabila pembetulan mengakibatkan pengurangan beban maka dijurnal pada Buku Jurnal Umum ”Kas di Bendahara Pengeluaran” di debit dan “Beban sesuai jenis sampai rincian objeknya” di kredit, sebagai berikut :

|                                     | Debit       | Kredit      |
|-------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Kas di bendahara pengeluaran</b> | <b>xxxx</b> |             |
| <b>Beban .....</b>                  |             | <b>xxxx</b> |

Kemudian untuk mencatat realisasi anggaran berbasis kas dicatat juga dalam Buku Jurnal Pengeluaran kas dengan melakukan jurnal, “Estimasi Perubahan SAL” di Debit dan “Akun Belanja sesuai jenisnya” di kredit, sebagai berikut :

|                               | Debit       | Kredit      |
|-------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Belanja .....</b>          | <b>xxxx</b> |             |
| <b>Estimasi Perubahan SAL</b> |             | <b>xxxx</b> |

Catatan : Kode dan nama rekening/akun beban dan belanja (dalam contoh ditulis beban\_\_\_\_\_ dan belanja\_\_\_\_\_) disesuaikan dengan kode dan nama rekening/akun, sampai rincian obyek, sesuai dengan pengakuan beban dan belanjanya.

Pada belanja barang dan/atau jasa yang dibayar bendahara pengeluaran melalui mekanisme UP/GU/TU, seringkali terdapat *potongan pajak* sehingga dana yang diterima oleh pihak ketiga adalah jumlah netto yaitu dana setelah dikurangi potongan pajak, namun Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD tetap mencatat belanja tersebut dalam jumlah bruto, kemudian pencatatan atas hutang dari potongannya dicatat sebagai berikut :

1. Jika terjadi kewajiban pemotongan atas pembayaran belanja, **pertama** Tenaga Akuntansi di PPK–SKPD akan menjurnal pencatatan atas pengakuan adanya hutang pajak yang harus disetorkan dilakukan di Buku Jurnal Umum sebagai berikut :

|   | Debit       | Kredit      |
|---|-------------|-------------|
| <b>Kas di Bendahara Pengeluaran</b>     | <b>xxxx</b> |             |
| <b>Penerimaan Pungutan/Potongan PFK</b> |             | <b>xxxx</b> |

**Kedua** adalah pencatatan atas realisasi pembayaran atas hutang pajak dilakukan Buku Jurnal Umum sebagai berikut :

|  | Debit       | Kredit      |
|--|-------------|-------------|
| <b>Pengeluaran Pungutan/Potongan PFK</b> | <b>xxxx</b> |             |
| <b>Kas di Bendahara Pengeluaran</b>      |             | <b>xxxx</b> |

Berdasarkan uraian penjurnalan dan contoh transaksi tersebut diatas maka Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD melakukan pencatatan dalam buku jurnal.

**Pertama** penjurnalan untuk penerimaan uang UP/GU/TU yang dalam contoh tersebut terjadi pada tanggal 5 Februari 2022, dicatat di jurnal umum sebagai berikut :

|            |             |                              | Debit      | Kredit     |
|------------|-------------|------------------------------|------------|------------|
| 5 Feb 2022 | 1.1.1.03.01 | Kas di Bendahara Pengeluaran | 10.000.000 |            |
|            | 7.1.0.00.00 | RK PPKD                      |            | 10.000.000 |

**Kedua** penjurnalan dilakukan atas transaksi yang terkait dengan realisasi beban dari UP/GU/TU berdasarkan bukti transaksi, yang di catat di jurnal umum, yaitu sebagai berikut :

|             |             |                              | Debit     | Kredit    |
|-------------|-------------|------------------------------|-----------|-----------|
| 8 Feb 2022  | 9.1.2.01.01 | Beban ATK                    | 5.000.000 |           |
|             | 1.1.1.03.01 | Kas di Bendahara Pengeluaran |           | 5.000.000 |
| 12 Feb 2022 | 9.1.1.07.01 | Beban Uang Lembur PNS        | 1.000.000 |           |
|             | 1.1.1.03.01 | Kas di Bendahara Pengeluaran |           | 1.000.000 |

Kemudian atas transaksi yang sama, di catat juga realisasi anggaran belanja di jurnal pengeluaran kas, yaitu sebagai berikut :

|             |             |                         | Debit     | Kredit    |
|-------------|-------------|-------------------------|-----------|-----------|
| 8 Feb 2022  | 5.2.2.01.01 | Belanja ATK             | 5.000.000 |           |
|             | 3.1.2.05.01 | Estimasi Perubahan SAL  |           | 5.000.000 |
| 12 Feb 2022 | 5.2.1.03.01 | Belanja Uang Lembur PNS | 1.000.000 |           |
|             | 3.1.2.05.01 | Estimasi Perubahan SAL  |           | 1.000.000 |

Penjurnalan untuk pungutan atau potongan dari perhitungan fihak ketiga (PFK) dilakukan atas transaksi yang terkait dengan realisasi pengeluaran beban dan belanja UP/GU/TU, yang dicatat di buku jurnal umum berdasarkan faktur pajak dan bukti potong pajak yang dibuat, yaitu sebagai berikut :

|            |             |                              | Debit   | Kredit  |
|------------|-------------|------------------------------|---------|---------|
| 8 Feb 2022 | 1.1.1.03.01 | Kas di Bendahara Pengeluaran | 522.727 |         |
|            | 7.1.0.00.00 | Penerimaan Pungutan PPN      |         | 454.545 |
|            | 7.1.0.00.00 | Penerimaan Potongan PPh      |         | 68.182  |
|            |             | Pasal 22                     |         |         |

Dalam contoh tersebut pungutan PPN dan potongan PPh Pasal 22 belum diterima bukti setornya jadi saldo kas masih ada di bendahara

pengeluaran. Jika selanjutnya diketahui bahwa pungutan PPN dan potongan PPh Pasal 22 tersebut telah dibayar sesuai dengan bukti yang ada (SSP dan/atau Nota Debit) maka dilakukan penjurnalan sebagai berikut pada buku jurnal umum :

|            |             |                              | Debit   | Kredit  |
|------------|-------------|------------------------------|---------|---------|
| 8 Feb 2022 | 7.2.0.00.00 | Pengeluaran Pungutan PPN     | 454.545 |         |
|            | 7.2.0.00.00 | Pengeluaran Potongan PPh 22  | 68.182  |         |
|            | 1.1.1.03.01 | Kas di Bendahara Pengeluaran |         | 522.727 |

Penjurnalan tersebut diatas dilakukan dalam buku jurnal yang telah dijelaskan bagaimana bentuk dan pengisiannya di bagian sebelumnya.

Pada akhir periode akuntansi untuk akun-akun yang berhubungan dengan perhitungan fihak ketiga (PFK) harus dilakukan eliminasi di Buku Jurnal Umum. Jurnal eliminasinya adalah :

|             |             |                                   | Debit   | Kredit  |
|-------------|-------------|-----------------------------------|---------|---------|
| 31 Des 2022 | 7.1.0.00.00 | Penerimaan Pungutan PPN           | 454.545 |         |
|             | 7.1.0.00.00 | Penerimaan Potongan PPh 22        | 68.182  |         |
|             | 7.2.0.00.00 | Pengeluaran Pungutan PPN          |         | 454.545 |
|             | 7.2.0.00.00 | Pengeluaran Potongan PPh Pasal 22 |         | 68.182  |

Apabila penyeteran PPN lebih kecil daripada saat memungutnya, misalnya sebesar Rp 400.000 maka pada akhir periode akuntansi untuk akun - akun yang berhubungan dengan perhitungan fihak ketiga (PFK) ini harus dilakukan eliminasi yang kemudian memunculkan akun utang PFK :

|             |             |                          | Debit   | Kredit  |
|-------------|-------------|--------------------------|---------|---------|
| 31 Des 2022 | 7.1.0.00.00 | Penerimaan Pungutan PPN  | 454.545 |         |
|             | 7.2.0.00.00 | Pengeluaran Pungutan PPN |         | 400.000 |
|             | 2.1.1.04.01 | Utang PPN                |         | 54.545  |

Sisa Pengeluaran Pungutan PPN akan ditutup ke Ekuitas melalui jurnal penutup neraca akhir :

|             |             |                          | Debit  | Kredit |
|-------------|-------------|--------------------------|--------|--------|
| 31 Des 2022 | 3.1.1.00.00 | Ekuitas                  | 54.545 |        |
|             | 7.2.0.00.00 | Pengeluaran Pungutan PPN |        | 54.545 |

Tahun berikutnya apabila sisa utang pungutan PPN tersebut dibayar maka dijurnal sebagai berikut :

|            |             |                  |                 |        |
|------------|-------------|------------------|-----------------|--------|
| Tahun      | 2.1.1.04.01 | Utang PPN        | Debit<br>54.545 | Kredit |
| Anggaran   | 1.1.1.03.01 | Kas di Bendahara |                 | 54.545 |
| Berikutnya |             | Pengeluaran      |                 |        |

Apabila penyetoran PPh 22 lebih besar daripada saat memungutnya, misalnya sebesar Rp 100.000 maka pada akhir periode akuntansi untuk akun - akun yang berhubungan dengan perhitungan fihak ketiga (PFK) ini harus dilakukan eliminasi yang kemudian memunculkan akun piutang PFK :

|             |             |                             |        |         |
|-------------|-------------|-----------------------------|--------|---------|
|             |             |                             | Debit  | Kredit  |
| 31 Des 2022 | 7.1.0.00.00 | Penerimaan Potongan PPh 22  | 68.182 |         |
|             | 1.1.4.06.00 | Piutang PPh 22              | 31.818 |         |
|             | 7.2.0.00.00 | Pengeluaran Potongan PPh 22 |        | 100.000 |

Sisa Penerimaan Potongan PPh Pasal 22 akan ditutup ke Ekuitas melalui jurnal penutup neraca akhir:

|             |             |                             |        |        |
|-------------|-------------|-----------------------------|--------|--------|
|             |             |                             | Debit  | Kredit |
| 31 Des 2022 | 7.2.0.00.00 | Pengeluaran Potongan PPh 22 | 54.545 |        |
|             | 3.1.1.00.00 | Ekuitas                     |        | 54.545 |

Tahun berikutnya apabila sisa piutang Potongan PPh Pasal 22 tersebut dibayar maka di jurnal sebagai berikut :

|          |             |                              |        |        |
|----------|-------------|------------------------------|--------|--------|
| Tahun    | 1.1.1.03.01 | Kas di Bendahara Pengeluaran | 54.545 |        |
| Anggaran | 1.1.4.06.00 | Piutang PPh 22               |        | 54.545 |
| Berikut  |             |                              |        |        |

**Ketiga,** penjurnalan dilakukan atas transaksi yang terkait dengan pembetulan beban berdasarkan LPJ UP/GU/TU, yang di catat di jurnal umum, yaitu sebagai berikut :

|             |             |                              |         |         |
|-------------|-------------|------------------------------|---------|---------|
|             |             |                              | Debit   | Kredit  |
| 20 Feb 2022 | 9.1.1.07.01 | Beban Uang Lembur PNS        | 100.000 |         |
|             | 1.1.1.03.01 | Kas di Bendahara Pengeluaran |         | 100.000 |

Kemudian atas transaksi yang sama, di catat juga pembetulan realisasi anggaran belanja di jurnal pengeluaran kas, yaitu sebagai berikut :

|             |             |                         |         |         |
|-------------|-------------|-------------------------|---------|---------|
|             |             |                         | Debit   | Kredit  |
| 20 Feb 2022 | 5.2.1.03.01 | Belanja Uang Lembur PNS | 100.000 |         |
|             | 3.1.2.05.01 | Estimasi Perubahan SAL  |         | 100.000 |



Jurnal transaksi Beban dan Belanja LS

Berdasarkan SP2D-LS, Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD mencatat transaksi terjadinya realisasi belanja langsung pada 2 (dua) buku jurnal yaitu di Buku Jurnal Umum untuk mencatat transaksi akrual dengan menjurnal "Beban atau Aset sesuai jenisnya sampai dengan rincian objek belanjanya" di debit dan "RK PPKD" di kredit. Selain itu untuk mencatat transaksi realisasi anggaran yang berbasis kas maka digunakan Buku Jurnal Pengeluaran Kas dengan menjurnal "Belanja sesuai jenisnya sampai dengan rincian objek belanjanya" di debit dan "Estimasi Perubahan SAL" di kredit

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dalam mekanisme belanja langsung dilakukan penjurnalan di Buku Jurnal umum sebagai berikut:

|                          | Debit       | Kredit      |
|--------------------------|-------------|-------------|
| <b>Beban ...</b>         | <b>xxxx</b> |             |
| <b>    RK Kas Daerah</b> |             | <b>xxxx</b> |

Atau :

|                                    | Debit       | Kredit      |
|------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Aset(Persediaan/Aset Tetap)</b> | <b>xxxx</b> |             |
| <b>    RK Kas Daerah</b>           |             | <b>xxxx</b> |

Kemudian untuk mencatat realisasi anggaran berbasis kas dicatat juga dalam Buku Jurnal Pengeluaran kas dengan melakukan jurnal, "Akun Belanja sesuai jenisnya" di Debit dan "Estimasi Perubahan SAL" di kredit, sebagai berikut :

|                                   | Debit       | Kredit      |
|-----------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Belanja .....</b>              | <b>xxxx</b> |             |
| <b>    Estimasi Perubahan SAL</b> |             | <b>xxxx</b> |

Catatan : Kode dan nama rekening/akun beban dan belanja (dalam contoh ditulis beban\_\_\_\_\_ dan belanja\_\_\_\_\_) disesuaikan dengan kode dan nama rekening/akun, sampai rincian obyek, sesuai dengan pengakuan beban dan belanjanya.

Dalam kasus *Belanja LS untuk Gaji dan Tunjangan*, meskipun dana yang diterima oleh pegawai adalah jumlah netto yaitu setelah dikurangi pungutan dan atau potongan, namun Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD tetap mencatat belanja gaji dan tunjangan dalam jumlah

bruto. Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD tidak perlu mencatat pungutan dan atau potongan tersebut karena pencatatannya sudah dilakukan oleh BUD dalam sub sistem dan prosedur akuntansi SKPKD-PPKD. Namun bila diperlukan SKPD bisa saja mencatat pungutan dan atau potongan tersebut tetapi harus selalu dieliminasi pada saat menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk menghindari pengakuan ganda (*double accounting*).

Hampir sama dengan Belanja LS untuk Gaji dan tunjangan tersebut diatas. Dalam pengadaan Barang dan Jasa, seringkali terdapat *potongan pajak* sehingga dana yang diterima oleh pihak ketiga adalah jumlah netto yaitu dana setelah dikurangi potongan pajak, namun Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD tetap mencatat belanja tersebut dalam jumlah bruto, kemudian pencatatan atas hutang dari potongannya dilakukan oleh BUD dalam sistem dan prosedur akuntansi SKPKD-PPKD.

Serupa dengan Belanja LS untuk Gaji dan tunjangan, bila diperlukan, SKPD bisa saja mencatat pungutan dan atau potongan tersebut tetapi harus selalu dieliminasi pada saat menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk menghindari pengakuan ganda (*double accounting*). Ketika sudah diyakini bahwa penyetoran pajak telah dilakukan, berdasarkan bukti Surat Setoran Pajak (SSP) tersebut, maka dilakukan pencatatan atas pembayaran pajak tersebut dengan jurnal sebagai berikut :

Berdasarkan hal tersebut Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD, jika terjadi kewajiban pemotongan atas pembayaran belanja, **pertama** akan menjurnal pencatatan atas pengakuan adanya hutang pajak yang harus disetorkan dilakukan di Buku Jurnal Umum sebagai berikut :

|   | Debit        | Kredit       |
|---|--------------|--------------|
| <b>RK PPKD</b>                          | <b>xxxxx</b> |              |
| <b>Penerimaan Pungutan/Potongan PFK</b> |              | <b>xxxxx</b> |

**Kedua** adalah pencatatan atas realisasi pembayaran atas hutang pajak dilakukan Buku Jurnal Umum sebagai berikut :

|                                 | Debit | Kredit |
|---------------------------------|-------|--------|
| Pengeluaran Pungutan/Potong PPK | xxxx  |        |
| RK PPKD                         |       | xxxx   |

Secara ringkas dapat dijelaskan pencatatan atas transaksi belanja langsung dilakukan di :

1. Buku Jurnal Umum, untuk mencatat transaksi beban yang berbasis akrual dan PFK; dan
2. Buku Jurnal Pengeluaran Kas, untuk mencatat realisasi anggaran belanja langsung.

Berdasarkan uraian penjurnalan dan contoh transaksi tersebut diatas maka Tenaga akuntansi di PPK-SKPD melakukan pencatatan dalam buku jurnal terkait.

**Pertama** penjurnalan di buku jurnal umum untuk mencatat realisasi beban pegawai berdasarkan SP2D LS tanggal 4 Februari 2022 dalam basis akrual sebagai berikut :

|            |             |                            | Debit       | Kredit      |
|------------|-------------|----------------------------|-------------|-------------|
| 4 Feb 2022 | 9.1.1.01.01 | Beban Gaji dan Tunjangan   | 100.000.000 | -           |
|            | 9.1.1.01.02 | Beban Tunjangan Keluarga   | 20.000.000  | -           |
|            | 9.1.1.01.04 | Beban Tunjangan Fungsional | 30.000.000  | -           |
|            | 9.1.1.01.05 | Beban Tunjangan Daerah     | 10.000.000  | -           |
|            | 7.2.0.00.00 | RK PPKD                    | -           | 160.000.000 |

Kemudian atas transaksi yang sama, di catat juga realisasi anggaran belanja di jurnal pengeluaran kas, yaitu sebagai berikut :

|            |             |                              | Debit       | Kredit      |
|------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|
| 4 Feb 2022 | 5.1.1.01.01 | Belanja Gaji dan Tunjangan   | 100.000.000 | -           |
|            | 5.1.1.01.02 | Belanja Tunjangan Keluarga   | 20.000.000  | -           |
|            | 5.1.1.01.04 | Belanja Tunjangan Fungsional | 30.000.000  | -           |
|            | 5.1.1.01.05 | Belanja Tunjangan Daerah     | 10.000.000  | -           |
|            | 3.1.2.05.01 | Estimasi Perubahan SAL       | -           | 160.000.000 |

**Kedua** mencatat di Buku Jurnal Umum atas potongan pajak dari transaksi belanja gaji, yaitu sebagai berikut :

|            |             |                             | Debit     | Kredit    |
|------------|-------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| 4 Feb 2022 | 7.2.0.00.00 | RK PPKD                     | 9.000.000 |           |
|            | 7.1.0.00.00 | Penerimaan Potongan PPh 21  |           | 5.000.000 |
|            | 7.1.0.00.00 | Penerimaan Potongan IWP     |           | 2.500.000 |
|            | 7.1.0.00.00 | Penerimaan Potongan Taperum |           | 1.500.000 |

Dalam contoh tersebut pungutan dan potongan perhitungan fihak ketiga atas belanja gaji tersebut belum diterima bukti setornya, jadi saldo kas masih ada di bendahara pengeluaran. Jika selanjutnya diketahui bahwa pungutan dan potongan perhitungan fihak ketiga tersebut telah dibayar sesuai dengan bukti yang ada (SSP, Surat Perintah BUD dan Nota Debit) maka dilakukan penjurnalan pada buku jurnal umum yaitu :

|            |             |                              | Debit     | Kredit    |
|------------|-------------|------------------------------|-----------|-----------|
| 4 Feb 2022 | 7.2.0.00.00 | Pengeluaran Potongan PPh 21  | 5.000.000 |           |
|            | 7.2.0.00.00 | Pengeluaran Potongan IWP     | 2.500.000 |           |
|            | 7.2.0.00.00 | Pengeluaran Potongan Taperum | 1.500.000 |           |
|            | 7.1.0.00.00 | RK PPKD                      |           | 9.000.000 |

**Ketiga,** dilakukan penjurnalan di buku jurnal umum untuk mencatat pengakuan beban dalam basis akrual atas penyerahan pekerjaan pendampingan sistem keuangan daerah senilai Rp 110.000.000, berdasarkan BAST tanggal 24 Februari 2022 sebagai berikut :

|             |             |                                | Debit       | Kredit      |
|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|
| 24 Feb 2022 | 9.1.2.19.04 | Beban Jasa Konsultan Manajemen | 110.000.000 | -           |
|             | 2.1.5.02.01 | Utang Belanja Jasa             | -           | 110.000.000 |

**Keempat,** dilakukan penjurnalan di buku jurnal umum untuk mencatat realisasi beban dalam basis akrual atas penyerahan pekerjaan pendampingan sistem keuangan senilai Rp 110.000.000, berdasarkan SP2D LS tanggal 28 Februari 2022 sebagai berikut :

|             |             |                    | Debit       | Kredit      |
|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| 28 Feb 2022 | 2.1.5.02.01 | Utang Belanja Jasa | 110.000.000 | -           |
|             | 7.1.0.00.00 | RK PPKD            | -           | 110.000.000 |

Kemudian atas transaksi yang sama, di catat juga realisasi anggaran belanja di jurnal pengeluaran kas, yaitu sebagai berikut :

|             |             |                                     | Debit       | Kredit      |
|-------------|-------------|-------------------------------------|-------------|-------------|
| 28 Feb 2022 | 5.2.2.21.06 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur | 110.000.000 | -           |
|             | 3.1.2.05.01 | Estimasi Perubahan SAL              | -           | 110.000.000 |

**Kelima**, mencatat di buku jurnal umum atas potongan pajak dari transaksi belanja, yaitu sebagai berikut :

|             |             |                            | Debit      | Kredit     |
|-------------|-------------|----------------------------|------------|------------|
| 28 Feb 2022 | 7.2.0.00.00 | RK PPKD                    | 12.000.000 |            |
|             | 7.1.0.00.00 | Penerimaan Pungutan PPN    |            | 10.000.000 |
|             | 7.1.0.00.00 | Penerimaan Potongan PPh 23 |            | 2.000.000  |

Dalam contoh tersebut pungutan dan potongan perhitungan fihak ketiga atas belanja jasa konsultan manajemen tersebut belum diterima bukti setornya, jadi saldo kas masih ada di bendahara pengeluaran. Jika selanjutnya diketahui bahwa pungutan dan potongan perhitungan fihak ketiga tersebut telah dibayar sesuai dengan bukti yang ada (SSP, Surat Perintah BUD dan Nota Debit) maka dilakukan penjurnalan pada buku jurnal umum yaitu :

|             |             |                             | Debit      | Kredit     |
|-------------|-------------|-----------------------------|------------|------------|
| 28 Feb 2022 | 7.2.0.00.00 | Pengeluaran Pungutan PPN    | 10.000.000 |            |
|             | 7.2.0.00.00 | Pengeluaran Potongan PPh 23 | 2.000.000  |            |
|             | 7.1.0.00.00 | RK PPKD                     |            | 12.000.000 |

Pada akhir periode akuntansi untuk akun - akun yang berhubungan dengan perhitungan fihak ketiga (PFK) harus dilakukan eliminasi di buku jurnal umum. Jurnal eliminasinya adalah :

|             |             |                              | Debit      | Kredit     |
|-------------|-------------|------------------------------|------------|------------|
| 31 Des 2022 | 7.1.0.00.00 | Penerimaan Potongan PPh 21   | 5.000.000  |            |
|             | 7.1.0.00.00 | Penerimaan Potongan IWP      | 2.500.000  |            |
|             | 7.1.0.00.00 | Penerimaan Potongan Taperum  | 1.500.000  |            |
|             | 7.1.0.00.00 | Penerimaan Pungutan PPN      | 10.000.000 |            |
|             | 7.1.0.00.00 | Penerimaan Potongan PPh 23   | 2.000.000  |            |
|             | 7.2.0.00.00 | Pengeluaran Potongan PPh 21  |            | 5.000.000  |
|             | 7.2.0.00.00 | Pengeluaran Potongan IWP     |            | 2.500.000  |
|             | 7.2.0.00.00 | Pengeluaran Potongan Taperum |            | 1.500.000  |
|             | 7.2.0.00.00 | Pengeluaran Pungutan PPN     |            | 10.000.000 |
|             | 7.2.0.00.00 | Pengeluaran Potongan PPh 23  |            | 2.000.000  |

Apabila penyeteran PPN lebih kecil daripada saat memungutnya, misalnya sebesar Rp 9.000.000 maka pada akhir periode akuntansi untuk akun-akun yang berhubungan dengan perhitungan fihak ketiga (PFK) ini harus dilakukan eliminasi yang kemudian memunculkan akun utang PFK :

|             |             |                          | Debit      | Kredit    |
|-------------|-------------|--------------------------|------------|-----------|
| 31 Des 2022 | 7.1.0.00.00 | Penerimaan Pungutan PPN  | 10.000.000 |           |
|             | 7.2.0.00.00 | Pengeluaran Pungutan PPN |            | 9.000.000 |
|             | 2.1.1.04.01 | Utang PPN                |            | 1.000.000 |

Tahun berikutnya apabila sisa utang pungutan PPN tersebut dibayar maka di jurnal sebagai berikut :

|          |             |           |           |           |
|----------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Tahun    | 2.1.1.04.01 | Utang PPN | 1.000.000 |           |
| Anggaran | 7.1.0.00.00 | RK PPKD   |           | 1.000.000 |
| Berikut  |             |           |           |           |

Apabila penyetoran PPh 23 lebih besar daripada saat memungutnya, misalnya sebesar Rp 3.500.000 maka pada akhir periode akuntansi untuk akun-akun yang berhubungan dengan perhitungan fihak ketiga (PFK) ini harus dilakukan eliminasi yang kemudian memunculkan akun piutang PFK :

|             |             |                             | Debit     | Kredit    |
|-------------|-------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| 31 Des 2022 | 7.1.0.00.00 | Penerimaan potongan PPh 23  | 2.000.000 |           |
|             | 1.1.4.06.00 | Piutang PPh 23              | 1.500.000 |           |
|             | 7.2.0.00.00 | Pengeluaran Potongan PPh 23 |           | 3.500.000 |

Tahun berikutnya apabila sisa piutang Potongan PPh Pasal 23 tersebut dibayar maka di jurnal sebagai berikut :

|          |             |                |           |           |
|----------|-------------|----------------|-----------|-----------|
| Tahun    | 7.1.0.00.00 | RK PPKD        | 1.500.000 |           |
| Anggaran | 1.1.4.06.00 | Piutang PPh 23 |           | 1.500.000 |
| Berikut  |             |                |           |           |

## Bentuk dan Cara Pengisian Buku Jurnal

Berdasarkan contoh jurnal tersebut diatas maka dilakukan pencatatan dalam buku jurnal umum untuk transaksi berbasis akrual yang nantinya digunakan untuk menyusun LO dan Neraca sebagai berikut :

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU JURNAL UMUM (JU)

SKPD : .....( SKPD Kabupaten Kuningan)

Halaman 01

| Tanggal   | Nomor                   |               | Kode Rekening |   |   |    |    | Uraian                       | Ref. | Debit<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|-----------|-------------------------|---------------|---------------|---|---|----|----|------------------------------|------|---------------|----------------|
|           | Bukti<br>Peneri<br>maan | Bukti<br>Lain |               |   |   |    |    |                              |      |               |                |
| 1         | 2                       |               | 3             |   |   |    |    | 4                            | 5    | 6             | 7              |
|           |                         |               |               |   |   |    |    |                              |      |               |                |
| 4/2/15    | -                       | -             | 9             | 1 | 1 | 01 | 01 | Beban Gaji dan Tunjangan     | -    | 100.000.000   | -              |
|           | -                       | -             | 9             | 1 | 1 | 01 | 02 | Beban Tunjangan Keluarga     | -    | 20.000.000    | -              |
|           | -                       | -             | 9             | 1 | 1 | 01 | 04 | Beban Tunjangan Fungsional   | -    | 30.000.000    | -              |
|           | -                       | -             | 9             | 1 | 1 | 01 | 05 | Beban Tunjangan Daerah       | -    | 10.000.000    | -              |
|           |                         |               | 7             | 1 | 8 | 99 | 99 | Penerimaan RK PPKD           | -    | -             | 160.000.000    |
|           |                         |               |               |   |   |    |    |                              |      |               |                |
| 4/2/15    | -                       | -             | 7             | 2 | 8 | 99 | 99 | Pengeluaran RK PPKD          | -    | 9.000.000     | -              |
|           |                         |               | 7             | 1 | 2 | 01 | 01 | Penerimaan Potongan PPh 21   | -    | -             | 5.000.000      |
|           |                         |               | 7             | 1 | 2 | 01 | 07 | Penerimaan Potongan IWP      | -    | -             | 2.500.000      |
|           |                         |               | 7             | 1 | 2 | 01 | 08 | Penerimaan Potongan Taperum  | -    | -             | 1.500.000      |
|           |                         |               |               |   |   |    |    |                              |      |               |                |
| 4/2/15    |                         |               | 7             | 2 | 2 | 01 | 01 | Pengeluaran Potongan PPh 21  | -    | 5.000.000     | -              |
|           |                         |               | 7             | 2 | 2 | 01 | 07 | Pengeluaran Potongan IWP     | -    | 2.500.000     | -              |
|           |                         |               | 7             | 2 | 2 | 01 | 08 | Pengeluaran Potongan Taperum | -    | 1.500.000     | -              |
|           |                         |               | 7             | 1 | 8 | 99 | 99 | Penerimaan RK PPKD           |      | -             | 9.000.000      |
|           |                         |               |               |   |   |    |    |                              |      |               |                |
| 5/2/2022  | -                       | -             | 1             | 1 | 1 | 03 | 01 | Kas di Bendahara Pengeluaran | -    | 10.000.000    | -              |
|           |                         |               | 7             | 1 | 8 | 99 | 99 | Penerimaan RK PPKD           | -    | -             | 10.000.000     |
|           |                         |               |               |   |   |    |    |                              |      |               |                |
| 8/2/2022  | -                       | -             | 9             | 1 | 2 | 01 | 01 | Beban ATK                    | -    | 5.000.000     | -              |
|           |                         |               | 1             | 1 | 1 | 03 | 01 | Kas di Bendahara Pengeluaran | -    | -             | 5.000.000      |
|           |                         |               |               |   |   |    |    |                              |      |               |                |
| 8/2/2022  | -                       | -             | 1             | 1 | 1 | 03 | 01 | Kas di Bendahara Pengeluaran | -    | 522.727       | -              |
|           |                         |               | 7             | 1 | 2 | 01 | 02 | Penerimaan Potongan PPh 22   | -    | -             | 68.182         |
|           |                         |               | 7             | 1 | 2 | 01 | 04 | Penerimaan Pungutan PPN      | -    | -             | 454.545        |
|           |                         |               |               |   |   |    |    |                              |      |               |                |
| 8/2/2022  |                         |               | 7             | 2 | 2 | 01 | 02 | Pengeluaran Potongan PPh 22  | -    | 68.182        | -              |
|           | -                       | -             | 7             | 2 | 2 | 01 | 04 | Pengeluaran Pungutan PPN     | -    | 454.545       | -              |
|           |                         |               | 1             | 1 | 1 | 03 | 01 | Kas di Bendahara Pengeluaran | -    | -             | 522.727        |
|           |                         |               |               |   |   |    |    |                              |      |               |                |
| 12/2/2022 | -                       | -             | 9             | 1 | 1 | 07 | 01 | Beban Uang Lembur PNS        | -    | 1.000.000     | -              |
|           |                         |               | 1             | 1 | 1 | 03 | 01 | Kas di Bendahara Pengeluaran | -    | -             | 1.000.000      |
|           |                         |               |               |   |   |    |    |                              |      |               |                |
| 20/2/2022 | -                       | -             | 9             | 1 | 1 | 07 | 01 | Beban Uang Lembur PNS        | -    | 100.000       | -              |
|           |                         |               | 1             | 1 | 1 | 03 | 01 | Kas di Bendahara Pengeluaran | -    | -             | 100.000        |
|           |                         |               |               |   |   |    |    |                              |      |               |                |

|          |   |   |   |   |   |    |    |                                |   |             |             |
|----------|---|---|---|---|---|----|----|--------------------------------|---|-------------|-------------|
| 24/2/15  | - | - | 9 | 1 | 2 | 19 | 04 | Beban Jasa Konsultan Manajemen | - | 110.000.000 | -           |
|          | - | - | 2 | 1 | 5 | 02 | 01 | Utang Belanja Jasa             | - | -           | 110.000.000 |
| 28/2/15  | - | - | 2 | 1 | 5 | 02 | 01 | Utang Belanja Jasa             | - | 110.000.000 | -           |
|          | - | - | 7 | 1 | 8 | 99 | 99 | Penerimaan RK PPKD             | - | -           | 110.000.000 |
| 28/2/15  |   |   | 7 | 2 | 8 | 99 | 99 | Pengeluaran RK PPKD            |   | 12.000.000  | -           |
|          |   |   | 7 | 1 | 2 | 01 | 03 | Penerimaan Potongan PPh 23     | - | -           | 2.000.000   |
|          |   |   | 7 | 1 | 2 | 01 | 04 | Penerimaan Pungutan PPN        | - | -           | 10.000.000  |
| 28/2/15  |   |   | 7 | 2 | 2 | 01 | 03 | Pengeluaran Potongan PPh 23    |   | 2.000.000   | -           |
|          |   |   | 7 | 2 | 2 | 01 | 04 | Pengeluaran Pungutan PPN       |   | 10.000.000  | -           |
|          |   |   | 7 | 1 | 8 | 99 | 99 | Penerimaan RK PPKD             |   | -           | 12.000.000  |
| 31/12/15 |   |   | 7 | 1 | 2 | 01 | 02 | Penerimaan Potongan PPh 22     | - | 68.182      | -           |
|          | - | - | 7 | 1 | 2 | 01 | 04 | Penerimaan Pungutan PPN        | - | 454.545     | -           |
|          |   |   | 7 | 2 | 2 | 01 | 02 | Pengeluaran Potongan PPh 22    | - | -           | 68.182      |
|          |   |   | 7 | 2 | 2 | 01 | 04 | Pengeluaran Pungutan PPN       | - | -           | 454.545     |
| 31/12/15 | - | - | 7 | 1 | 2 | 01 | 01 | Penerimaan Potongan PPh 21     | - | 5.000.000   | -           |
|          |   |   | 7 | 1 | 2 | 01 | 03 | Penerimaan Potongan PPh 23     | - | 2.000.000   | -           |
|          |   |   | 7 | 1 | 2 | 01 | 04 | Penerimaan Potongan PPN        | - | 10.000.000  | -           |
|          |   |   | 7 | 1 | 2 | 01 | 07 | Penerimaan Potongan IWP        | - | 2.500.000   | -           |
|          |   |   | 7 | 1 | 2 | 01 | 08 | Penerimaan Potongan Taperum    | - | 1.500.000   | -           |
|          |   |   | 7 | 2 | 2 | 01 | 01 | Pengeluaran Potongan PPh 21    | - | -           | 5.000.000   |
|          |   |   | 7 | 2 | 2 | 01 | 03 | Pengeluaran Potongan PPh 23    | - | -           | 2.000.000   |
|          |   |   | 7 | 2 | 2 | 01 | 04 | Pengeluaran Pungutan PPN       | - | -           | 10.000.000  |
|          |   |   | 7 | 2 | 2 | 01 | 07 | Pengeluaran Potongan IWP       | - | -           | 2.500.000   |
|          |   |   | 7 | 2 | 2 | 01 | 08 | Pengeluaran Potongan Taperum   | - | -           | 1.500.000   |
| Jumlah   |   |   |   |   |   |    |    |                                |   | 380.000.000 | 380.000.000 |

PPK-SKPD

Kepala-SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Selain mencatat di buku jurnal umum dilakukan juga pencatatan dalam buku jurnal pengeluaran kas untuk transaksi berbasis kas yang nantinya digunakan untuk menyusun LRA dan LAK sebagai berikut :



KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU JURNAL PENGELUARAN KAS (JK)

SKPD : .....( SKPD Kabupaten Kuningan)

Halaman 01

| Tanggal | Nomor               |               | Kode Rekening |   |   |    |    | Uraian                              | Ref. | Debit<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|---------|---------------------|---------------|---------------|---|---|----|----|-------------------------------------|------|---------------|----------------|
|         | Bukti<br>Penerimaan | Bukti<br>Lain |               |   |   |    |    |                                     |      |               |                |
| 1       | 2                   |               | 3             |   |   |    |    | 4                                   | 5    | 6             | 7              |
|         |                     |               |               |   |   |    |    |                                     |      |               |                |
| 4/2/15  | -                   | -             | 5             | 1 | 1 | 01 | 01 | Belanja Gaji Pokok                  | -    | 100.000.000   | -              |
|         |                     |               | 5             | 1 | 1 | 01 | 02 | Belanja Tunjangan Keluarga          | -    | 20.000.000    | -              |
|         |                     |               | 5             | 1 | 1 | 01 | 04 | Belanja Tunjangan Fungsional        | -    | 30.000.000    | -              |
|         |                     |               | 5             | 1 | 1 | 01 | 05 | Belanja Tunjangan Daerah            | -    | 10.000.000    | -              |
|         |                     |               | 3             | 1 | 2 | 05 | 01 | Estimasi Perubahan SAL              |      | -             | 160.000.000    |
|         |                     |               |               |   |   |    |    |                                     |      |               |                |
| 8/2/15  | -                   | -             | 5             | 2 | 2 | 01 | 01 | Belanja ATK                         | -    | 5.000.000     | -              |
|         |                     |               | 3             | 1 | 2 | 05 | 01 | Estimasi Perubahan SAL              | -    | -             | 5.000.000      |
|         |                     |               |               |   |   |    |    |                                     |      |               |                |
| 12/2/15 | -                   | -             | 5             | 2 | 1 | 03 | 01 | Belanja Uang Lembur PNS             | -    | 1.000.000     | -              |
|         |                     |               | 3             | 1 | 2 | 05 | 01 | Estimasi Perubahan SAL              | -    | -             | 1.000.000      |
|         |                     |               |               |   |   |    |    |                                     |      |               |                |
| 20/2/15 | -                   | -             | 5             | 2 | 1 | 03 | 01 | Belanja Uang Lembur PNS             | -    | 100.000       | -              |
|         |                     |               | 3             | 1 | 2 | 05 | 01 | Estimasi Perubahan SAL              | -    | -             | 100.000        |
|         |                     |               |               |   |   |    |    |                                     |      |               |                |
| 28/2/15 |                     |               | 5             | 2 | 2 | 21 | 06 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur |      | 110.000.000   | -              |
|         |                     |               | 3             | 1 | 2 | 05 | 01 | Estimasi Perubahan SAL              |      | -             | 110.000.000    |
|         |                     |               |               |   |   |    |    |                                     |      |               |                |
| Jumlah  |                     |               |               |   |   |    |    |                                     |      | 270.000.000   | 270.000.000    |

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Langkah III : Melakukan Posting ke Buku Besar

Setelah melakukan penjurnalan seluruh transaksi, maka PPK-SKPD melakukan posting atas pencatatan jurnal tersebut ke buku besar. Posting ini berguna agar seluruh transaksi yang sama-sama mempengaruhi suatu kode rekening/akun dapat dikelompokkan dalam satu buku besar untuk kode rekening/akun yang bersangkutan. Periode posting harus semakin diusahakan dapat dilakukan dalam waktu yang semakin singkat misalkan untuk periode mingguan atau bahkan harian.

Contoh buku besar SKPD : Kas di Bendahara Pengeluaran sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 1.1.1.03.01  
Nama Rekening : Kas di Bendahara Pengeluaran  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD :

Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian                           | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|----------------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |                                  |               |                |
| 1  |       | 5/02/2022  | JU  | Penerimaan RK PPKD               | 10.000.000    | -              |
| 2  |       | 8/02/2022  | JU  | Beban ATK                        | -             | 5.000.000      |
| 2  |       | 8/02/2022  | JU  | Potongan PPh 22 dan Pungutan PPN | 522.727       | -              |
| 3  |       | 8/02/2022  | JU  | Potongan PPh 22 dan Pungutan PPN | -             | 522.727        |
| 4  |       | 12/02/2022 | JU  | Beban Uang Lembur PNS            | -             | 1.000.000      |
| 5  |       | 20/02/2022 | JU  | Beban Uang Lembur PNS            | -             | 100.000        |
|    |       |            |     |                                  |               |                |
|    |       |            |     | Jumlah                           | 10.522.727    | 6.622.727      |
|    |       |            |     | Saldo                            | 3.900.000     | -              |

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)

(tanda tangan)  
(nama lengkap)

NIP.....

NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Utang Belanja Jasa sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 2.1.5.02.01  
Nama Rekening : Utang Belanja Jasa  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD :

Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian                                 | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|--|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |  |               |                |
| 1  |       | 24/02/2022 | JU  | Beban Jasa Konsultan                   | -             | 110.000.000    |
| 2  |       | 28/02/2022 | JU  | Pelunasan Utang Belanja Jasa Konsultan | 110.000.000   | -              |
|    |       |            |     |  |               |                |
|    |       |            |     | Jumlah                                 | 110.000.000   | 110.000.000    |
|    |       |            |     | Saldo                                  | -             | -              |

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)

(tanda tangan)  
(nama lengkap)

NIP.....

NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Estimasi Perubahan SAL sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 3.1.2.05.01  
Nama Rekening : Estimasi Perubahan SAL  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian                              | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|-------------------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |                                     |               |                |
| 1  |       | 4/02/2022  | JK  | Belanja Gaji dan Tunjangan          | -             | 160.000.000    |
| 2  |       | 8/02/2022  | JK  | Belanja ATK                         | -             | 5.000.000      |
| 3  |       | 12/02/2022 | JK  | Belanja Uang Lembur PNS             | -             | 1.000.000      |
| 4  |       | 20/02/2022 | JK  | Belanja Uang Lembur PNS             | -             | 100.000        |
| 5  |       | 28/02/2022 | JK  | Belanja Jasa Konsultan<br>Manajemen | -             | 110.000.000    |
|    |       |            |     |                                     |               |                |
|    |       |            |     | Jumlah                              | -             | 276.100.000    |
|    |       |            |     | Saldo                               | -             | 276.100.000    |

PPK-SKPD

PPK-SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Belanja Gaji Pokok sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 5.1.1.01.01  
Nama Rekening : Belanja Gaji Pokok  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |           | Ref | Uraian                 | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|-----------|-----|------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal   |     |                        |               |                |
| 1  |       | 4/02/2022 | JK  | Estimasi Perubahan SAL | 100.000.000   | -              |
|    |       |           |     |                        |               |                |
|    |       |           |     | Jumlah                 | 100.000.000   | -              |
|    |       |           |     | Saldo                  | 100.000.000   | -              |

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Belanja Tunjangan Keluarga sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 5.1.1.01.02  
Nama Rekening : Belanja Tunjangan Keluarga  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |           | Ref | Uraian                 | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|-----------|-----|------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal   |     |                        |               |                |
| 1  |       | 4/02/2022 | JK  | Estimasi Perubahan SAL | 20.000.000    | -              |
|    |       |           |     |                        |               |                |
|    |       |           |     | Jumlah                 | 20.000.000    | -              |
|    |       |           |     | Saldo                  | 20.000.000    | -              |

PPK SKPD Kepala SKPD

(tanda tangan) (tanda tangan)  
(nama lengkap) (nama lengkap)

NIP..... NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Belanja Tunjangan Fungsional sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 5.1.1.01.04  
Nama Rekening : Belanja Tunjangan Fungsional  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |           | Ref | Uraian                 | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|-----------|-----|------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal   |     |                        |               |                |
| 1  |       | 4/02/2022 | JK  | Estimasi Perubahan SAL | 30.000.000    | -              |
|    |       |           |     |                        |               |                |
|    |       |           |     | Jumlah                 | 30.000.000    | -              |
|    |       |           |     | Saldo                  | 30.000.000    | -              |

PPK-SKPD PPK-SKPKD

(tanda tangan) (tanda tangan)  
(nama lengkap) (nama lengkap)

NIP..... NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Belanja Tunjangan Daerah sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 5.1.1.01.05  
Nama Rekening : Belanja Tunjangan Daerah  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |           | Ref | Uraian                 | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|-----------|-----|------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal   |     |                        |               |                |
| 1  |       | 4/02/2022 | JK  | Estimasi Perubahan SAL | 10.000.000    | -              |
|    |       |           |     |                        |               |                |
|    |       |           |     | Jumlah                 | 10.000.000    | -              |
|    |       |           |     | Saldo                  | 10.000.000    | -              |

PPK-SKPD Kepala SKPD

(tanda tangan) (tanda tangan)  
(nama lengkap) (nama lengkap)  
NIP..... NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Belanja Uang Lembur PNS sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 5.2.1.03.01  
Nama Rekening : Belanja Uang Lembur PNS  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian                 | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |                        |               |                |
| 1  |       | 12/02/2022 | JK  | Estimasi Perubahan SAL | 1.000.000     | -              |
| 2  |       | 20/02/2022 | JK  | Estimasi Perubahan SAL | 100.000       | -              |
|    |       |            |     |                        |               |                |
|    |       |            |     | Jumlah                 | 1.100.000     | -              |
|    |       |            |     | Saldo                  | 1.100.000     | -              |

PPK-SKPD Kepala SKPD

(tanda tangan) (tanda tangan)  
(nama lengkap) (nama lengkap)  
NIP..... NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Belanja ATK sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 5.2.2.01.01  
Nama Rekening : Belanja ATK  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |           | Ref | Uraian                 | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|-----------|-----|------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal   |     |                        |               |                |
| 1  |       | 8/02/2022 | JK  | Estimasi Perubahan SAL | 5.000.000     | -              |
|    |       |           |     |                        |               |                |
|    |       |           |     | Jumlah                 | 5.000.000     | -              |
|    |       |           |     | Saldo                  | 5.000.000     | -              |

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 5.2.2.21.06  
Nama Rekening : Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian                 | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |                        |               |                |
| 1  |       | 28/02/2022 | JK  | Estimasi Perubahan SAL | 110.000.000   | -              |
|    |       |            |     |                        |               |                |
|    |       |            |     | Jumlah                 | 110.000.000   | -              |
|    |       |            |     | Saldo                  | 110.000.000   | -              |

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Penerimaan Potongan PPh 21 sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 7.1.2.01.01  
Nama Rekening : Penerimaan Potongan PPh 21  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD :

Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian                    | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|---------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |                           |               |                |
| 1  |       | 4/02/2022  | JU  | Pengeluaran RK PPKD       | -             | 5.000.000      |
| 2  |       | 31/12/2022 | JU  | Eliminasi Potongan PPh 21 | 5.000.000     |                |
|    |       |            |     |                           |               |                |
|    |       |            |     | Jumlah                    | 5.000.000     | 5.000.000      |
|    |       |            |     | Saldo                     | -             | -              |

PPK-SKPD

Kuasa SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Penerimaan Potongan PPh 22 sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 7.1.2.01.02  
Nama Rekening : Penerimaan Potongan PPh 22  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD :

Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian                       | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|------------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |                              |               |                |
| 1  |       | 8/2/2022   | JU  | Kas di Bendahara Pengeluaran | -             | 68.182         |
| 2  |       | 31/12/2022 | JU  | Eliminasi Potongan PPh 22    | 68.182        | -              |
|    |       |            |     |                              |               |                |
|    |       |            |     | Jumlah                       | 68.182        | 68.182         |
|    |       |            |     | Saldo                        | -             | -              |

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Penerimaan Potongan PPh 23 sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

**KABUPATEN KUNINGAN**  
**BUKU BESAR**

**SKPD** : SKPD Kabupaten Kuningan  
**Kode Rekening** : 7.1.2.01.03  
**Nama Rekening** : Penerimaan Potongan PPh 23  
**Pagu APBD** :  
**Pagu perubahan APBD** : **Halaman 01**

| No | Bukti |            | Ref | Uraian                    | Debet<br>(Rp)    | Kredit<br>(Rp)   |
|----|-------|------------|-----|---------------------------|------------------|------------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |                           |                  |                  |
| 1  |       | 28/02/2022 | JU  | Pengeluaran RK PPKD       | -                | 2.000.000        |
| 2  |       | 31/02/2022 | JU  | Eliminasi Potongan PPh 23 | 2.000.000        |                  |
|    |       |            |     |                           |                  |                  |
|    |       |            |     | <b>Jumlah</b>             | <b>2.000.000</b> | <b>2.000.000</b> |
|    |       |            |     | <b>Saldo</b>              | -                | -                |

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)

(tanda tangan)  
(nama lengkap)

NIP.....

NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Penerimaan Potongan PPN sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

**KABUPATEN KUNINGAN**  
**BUKU BESAR**

**SKPD** : SKPD Kabupaten Kuningan  
**Kode Rekening** : 7.1.2.01.04  
**Nama Rekening** : Penerimaan Potongan PPN  
**Pagu APBD** :  
**Pagu perubahan APBD** : **Halaman 01**

| No | Bukti |            | Ref | Uraian                            | Debet<br>(Rp)     | Kredit<br>(Rp)    |
|----|-------|------------|-----|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |                                   |                   |                   |
| 1  |       | 8/02/2022  | JU  | Kas di Bendahara Pengeluaran      | -                 | 454.545           |
| 2  |       | 28/02/2022 | JU  | Pengeluaran RK PPKD               |                   | 10.000.000        |
| 3  |       | 31/02/2022 | JU  | Eliminasi Penerimaan Pungutan PPN | 454.545           |                   |
| 4  |       | 31/02/2022 | JU  | Eliminasi Penerimaan Pungutan PPN | 10.000.000        |                   |
|    |       |            |     |                                   |                   |                   |
|    |       |            |     | <b>Jumlah</b>                     | <b>10.454.545</b> | <b>10.454.545</b> |
|    |       |            |     | <b>Saldo</b>                      | -                 | -                 |

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)

(tanda tangan)  
(nama lengkap)

NIP.....

NIP.....



Contoh buku besar SKPD : Penerimaan Potongan IWP sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 7.1.2.01.07  
Nama Rekening : Penerimaan Potongan IWP  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian                 | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |                        |               |                |
| 1  |       | 4/02/2022  | JU  | Pengeluaran RK PPKD    | -             | 2.500.000      |
| 2  |       | 31/12/2022 | JU  | Eliminasi Potongan IWP | 2.500.000     | -              |
|    |       |            |     |                        |               |                |
|    |       |            |     | Jumlah                 | 2.500.000     | 2.500.000      |
|    |       |            |     | Saldo                  | -             | -              |

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)

(tanda tangan)  
(nama lengkap)

NIP.....

NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Penerimaan Potongan Taperum sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 7.1.2.01.08  
Nama Rekening : Penerimaan Potongan Taperum  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian                     | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|----------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |                            |               |                |
| 1  |       | 4/02/2022  | JU  | Pengeluaran RK PPKD        | -             | 1.500.000      |
| 2  |       | 31/12/2022 | JU  | Eliminasi Potongan Taperum | 1.500.000     | -              |
|    |       |            |     |                            |               |                |
|    |       |            |     | Jumlah                     | 1.500.000     | 1.500.000      |
|    |       |            |     | Saldo                      | -             | -              |

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)

(tanda tangan)  
(nama lengkap)

NIP.....

NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Penerimaan RK PPKD sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 7.1.8.99.99  
Nama Rekening : Penerimaan RK PPKD  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD :

Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian  | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|---|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |   |               |                |
| 1  |       | 4/02/2022  | JU  | Beban Gaji dan Tunjangan                        | -             | 160.000.000    |
| 2  |       | 4/02/2022  | JU  | Penerimaan Potongan-potongan gaji dan tunjangan |               | 9.000.000      |
| 3  |       | 5/02/2022  | JU  | Kas di Bendahara Pengeluaran                    | -             | 10.000.000     |
| 4  |       | 28/02/2022 | JU  | Utang Belanja Jasa                              | -             | 110.000.000    |
| 5  |       | 28/02/2022 | JU  | Pengeluaran Pungutan dan Potongan Pajak         | -             | 12.000.000     |
|    |       |            |     |   |               |                |
|    |       |            |     | Jumlah  | -             | 301.000.000    |
|    |       |            |     | Saldo   | -             | 301.000.000    |

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Pengeluaran Potongan PPh 21 sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 7.2.2.01.01  
Nama Rekening : Pengeluaran Potongan PPh 21  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD :

Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian                    | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|---------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |                           |               |                |
| 1  |       | 4/02/2022  | JU  | Penerimaan RK PPKD        | 5.000.000     | -              |
| 2  |       | 31/12/2022 | JU  | Eliminasi Potongan PPh 21 | -             | 5.000.000      |
|    |       |            |     |                           |               |                |
|    |       |            |     | Jumlah                    | 5.000.000     | 5.000.000      |
|    |       |            |     | Saldo                     | -             | -              |

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Pengeluaran Potongan PPh 22 sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

**KABUPATEN KUNINGAN**  
**BUKU BESAR**

**SKPD** : SKPD Kabupaten Kuningan  
**Kode Rekening** : 7.2.2.01.02  
**Nama Rekening** : Pengeluaran Potongan PPh 22  
**Pagu APBD** :  
**Pagu perubahan APBD** :

Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian                       | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|------------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |                              |               |                |
| 1  |       | 8/02/2022  | JU  | Kas di Bendahara Pengeluaran | 68.182        | -              |
| 2  |       | 31/12/2022 | JU  | Eliminasi Potongan PPh 22    | -             | 68.182         |
|    |       |            |     |                              |               |                |
|    |       |            |     | Jumlah                       | 68.182        | 68.182         |
|    |       |            |     | Saldo                        | -             | -              |

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Pengeluaran Potongan PPh 23 sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

**KABUPATEN KUNINGAN**  
**BUKU BESAR**

**SKPD** : SKPD Kabupaten Kuningan  
**Kode Rekening** : 7.2.2.01.03  
**Nama Rekening** : Pengeluaran Potongan PPh 23  
**Pagu APBD** :  
**Pagu perubahan APBD** :

Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian                    | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|---------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |                           |               |                |
| 1  |       | 28/02/2022 | JU  | Penerimaan RK PPKD        | 2.000.000     | -              |
| 2  |       | 31/12/2022 | JU  | Eliminasi Potongan PPh 23 | -             | 2.000.000      |
|    |       |            |     |                           |               |                |
|    |       |            |     | Jumlah                    | 2.000.000     | 2.000.000      |
|    |       |            |     | Saldo                     | -             | -              |

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Pengeluaran Pungutan PPN sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 7.2.2.01.04  
Nama Rekening : Pengeluaran Pungutan PPN  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian                       | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|------------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |                              |               |                |
| 1  |       | 8/02/2022  | JU  | Kas di Bendahara Pengeluaran | 454.545       | -              |
| 2  |       | 28/02/2022 | JU  | Penerimaan RK PPKD           | 10.000.000    | -              |
| 3  |       | 31/12/2022 | JU  | Eliminasi Pungutan PPN       | -             | 454.545        |
| 4  |       | 31/12/2022 | JU  | Eliminasi Pungutan PPN       | -             | 10.000.000     |
|    |       |            |     |                              |               |                |
|    |       |            |     | Jumlah                       | 10.454.545    | 10.454.545     |
|    |       |            |     | Saldo                        | -             | -              |

PPK-SKPD Kepala SKPD

(tanda tangan) (tanda tangan)  
(nama lengkap) (nama lengkap)  
NIP..... NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Pengeluaran Potongan IWP sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 7.2.2.01.07  
Nama Rekening : Pengeluaran Potongan IWP  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian                 | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |                        |               |                |
| 1  |       | 4/02/2022  | JU  | Penerimaan RK PPKD     | 2.500.000     | -              |
| 2  |       | 31/12/2022 | JU  | Eliminasi Potongan IWP | -             | 2.500.000      |
|    |       |            |     |                        |               |                |
|    |       |            |     | Jumlah                 | 2.500.000     | 2.500.000      |
|    |       |            |     | Saldo                  | -             | -              |

PK-SKPD Kepala SKPD

(tanda tangan) (tanda tangan)  
(nama lengkap) (nama lengkap)  
NIP..... NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Pengeluaran Potongan Taperum sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 7.2.2.01.08  
Nama Rekening : Pengeluaran Potongan Taperum  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian                     | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|----------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |                            |               |                |
| 1  |       | 4/02/2022  | JU  | Penerimaan RK PPKD         | 1.500.000     | -              |
| 2  |       | 31/12/2022 | JU  | Eliminasi Potongan Taperum | -             | 1.500.000      |
|    |       |            |     |                            |               |                |
|    |       |            |     | Jumlah                     | 1.500.000     | 1.500.000      |
|    |       |            |     | Saldo                      | -             | -              |

PPK-SKPD Kepala SKPD

(tanda tangan) (tanda tangan)  
(nama lengkap) (nama lengkap)  
NIP..... NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Pengeluaran RK PPKD sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 7.2.8.99.99  
Nama Rekening : Pengeluaran RK PPKD  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian  | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|---|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |   |               |                |
| 1  |       | 4/02/2022  | JU  | Penerimaan Potongan-potongan Gaji dan Tunjangan | 9.000.000     | -              |
| 2  |       | 28/02/2022 | JU  | Penerimaan Pungutan dan Potongan Pajak          | 12.000.000    | -              |
|    |       |            |     |   |               |                |
|    |       |            |     | Jumlah  | 21.000.000    | -              |
|    |       |            |     | Saldo   | 21.000.000    | -              |

PPK-SKPD Kepala SKPD

(tanda tangan) (tanda tangan)  
(nama lengkap) (nama lengkap)  
NIP..... NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Beban Gaji dan Tunjangan sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

**KABUPATEN KUNINGAN**  
**BUKU BESAR**

**SKPD** : SKPD Kabupaten Kuningan  
**Kode Rekening** : 9.1.1.01.01  
**Nama Rekening** : Beban Gaji dan Tunjangan  
**Pagu APBD** :  
**Pagu perubahan APBD** : **Halaman 01**

| No | Bukti |           | Ref | Uraian  | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|-----------|-----|---------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal   |     |         |               |                |
| 1  |       | 4/02/2022 | JU  | RK PPKD | 100.000.000   | -              |
|    |       |           |     |         |               |                |
|    |       |           |     | Jumlah  | 100.000.000   | -              |
|    |       |           |     | Saldo   | 100.000.000   | -              |

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Beban Tunjangan Keluarga sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

**KABUPATEN KUNINGAN**  
**BUKU BESAR**

**SKPD** : SKPD Kabupaten Kuningan  
**Kode Rekening** : 9.1.1.01.02  
**Nama Rekening** : Beban Tunjangan Keluarga  
**Pagu APBD** :  
**Pagu perubahan APBD** : **Halaman 01**

| No | Bukti |           | Ref | Uraian  | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|-----------|-----|---------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal   |     |         |               |                |
| 1  |       | 4/02/2022 | JU  | RK PPKD | 20.000.000    | -              |
|    |       |           |     |         |               |                |
|    |       |           |     | Jumlah  | 20.000.000    | -              |
|    |       |           |     | Saldo   | 20.000.000    | -              |

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Beban Tunjangan Fungsional sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 9.1.1.01.04  
Nama Rekening : Beban Tunjangan Fungsional  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

(dalam ribuan rupiah)

| No | Bukti |           | Ref | Uraian  | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|-----------|-----|---------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal   |     |         |               |                |
| 1  |       | 4/02/2022 | JU  | RK PPKD | 30.000.000    | -              |
|    |       |           |     |         |               |                |
|    |       |           |     | Jumlah  | 30.000.000    | -              |
|    |       |           |     | Saldo   | 30.000.000    | -              |

PPK-SKPD PPK-SKPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Beban Tunjangan Daerah sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 9.1.1.01.05  
Nama Rekening : Beban Tunjangan Daerah  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |           | Ref | Uraian  | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|-----------|-----|---------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal   |     |         |               |                |
| 1  |       | 4/02/2022 | JU  | RK PPKD | 10.000.000    | -              |
|    |       |           |     |         |               |                |
|    |       |           |     | Jumlah  | 10.000.000    | -              |
|    |       |           |     | Saldo   | 10.000.000    | -              |

PPK-SKPD Kepala SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Beban Uang Lembur PNS sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 9.1.1.07.01  
Nama Rekening : Beban Uang Lembur PNS  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian  | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|---|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |   |               |                |
| 1  |       | 12/02/2022 | JU  | Uang Lembur PNS dengan Kas di Bendahara Pengeluaran | 1.000.000     | -              |
| 2  |       | 20/02/2022 | JU  | Uang Lembur PNS dengan Kas di Bendahara Pengeluaran | 100.000       | -              |
|    |       |            |     |   |               |                |
|    |       |            |     | Jumlah  | 1.100.000     | -              |
|    |       |            |     | Saldo   | 1.100.000     | -              |

PPK-SKPD Kepala SKPD

(tanda tangan) (tanda tangan)  
(nama lengkap) (nama lengkap)  
NIP..... NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Beban Alat Tulis Kantor sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 9.1.2.01.01  
Nama Rekening : Beban Alat Tulis Kantor  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |           | Ref | Uraian                                      | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|-----------|-----|---|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal   |     |   |               |                |
| 1  |       | 8/02/2022 | JU  | Beban ATK dari Kas di Bendahara Pengeluaran | 5.000.000     | -              |
|    |       |           |     |   |               |                |
|    |       |           |     | Jumlah                                      | 5.000.000     | -              |
|    |       |           |     | Saldo                                       | 5.000.000     | -              |

PPK-SKPD Kepala SKPD

(tanda tangan) (tanda tangan)  
(nama lengkap) (nama lengkap)  
NIP..... NIP.....



Contoh buku besar SKPD : Beban Jasa Konsultan sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

**KABUPATEN KUNINGAN**  
**BUKU BESAR**

**SKPD** : SKPD Kabupaten Kuningan  
**Kode Rekening** : 9.1.2.19.04  
**Nama Rekening** : Beban Jasa Konsultan Tenaga Ahli/Instruktur  
**Pagu APBD** :  
**Pagu perubahan APBD** : **Halaman 01**

| No | Bukti |            | Ref | Uraian                               | Debet<br>(Rp)      | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|--------------------------------------|--------------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |                                      |                    |                |
| 1  |       | 24/02/2022 | JU  | Pengakuan Utang Beban Jasa Konsultan | 110.000.000        | -              |
|    |       |            |     |                                      |                    |                |
|    |       |            |     |                                      |                    |                |
|    |       |            |     | <b>Jumlah</b>                        | <b>110.000.000</b> | -              |
|    |       |            |     | <b>Saldo</b>                         | <b>110.000.000</b> | -              |

PPK-SKPDKepala SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

**Langkah IV : Menyusun Neraca Saldo dan Laporan Keuangan**

Setelah melakukan posting seluruh pencatatan dalam buku besar maka kemudian Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD membuat neraca saldo sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Penyusunan neraca saldo oleh Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD dilakukan secara triwulanan. Neraca saldo disusun dengan cara memindahkan saldo-saldo yang ada di tiap buku besar ke dalam Neraca Saldo. Contoh Neraca Saldo dari hasil pencatatan dan posting contoh transaksi keuangan diatas adalah sebagai berikut :

KABUPATEN KUNINGAN  
NERACA SALDO  
PER TANGGAL 31 Desember 2022

SKPKD : BPKAD

| Kode Rekening |   |   |    |    | Uraian                                      | Jumlah      |             |
|---------------|---|---|----|----|---|-------------|-------------|
|               |   |   |    |    |   | Debit       | Kredit      |
| 1             |   |   |    |    | 2   | 3           | 4           |
| 1             | 1 | 1 | 03 | 01 | Kas di Bendahara Pengeluaran                | 3.900.000   | -           |
| 3             | 1 | 2 | 05 | 01 | Estimasi Perubahan SAL                      | -           | 276.100.000 |
| 5             | 1 | 1 | 01 | 01 | Belanja Gaji Pokok                          | 100.000.000 | -           |
| 5             | 1 | 1 | 01 | 02 | Belanja Tunjangan Keluarga                  | 20.000.000  | -           |
| 5             | 1 | 1 | 01 | 04 | Belanja Tunjangan Fungsional                | 30.000.000  | -           |
| 5             | 1 | 1 | 01 | 05 | Belanja Tunjangan Daerah                    | 10.000.000  | -           |
| 5             | 2 | 1 | 03 | 01 | Belanja Uang Lembur PNS                     | 1.100.000   | -           |
| 5             | 2 | 2 | 01 | 01 | Belanja ATK                                 | 5.000.000   | -           |
| 5             | 2 | 2 | 21 | 06 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur         | 110.000.000 | -           |
| 7             | 1 | 8 | 99 | 99 | Penerimaan RK PPKD                          | -           | 301.000.000 |
| 7             | 2 | 8 | 99 | 99 | Pengeluaran RK PPKD                         | 21.000.000  | -           |
| 9             | 1 | 1 | 01 | 01 | Beban Gaji dan Tunjangan                    | 100.000.000 | -           |
| 9             | 1 | 1 | 01 | 02 | Beban Tunjangan Keluarga                    | 20.000.000  | -           |
| 9             | 1 | 1 | 01 | 04 | Beban Tunjangan Fungsional                  | 30.000.000  | -           |
| 9             | 1 | 1 | 01 | 05 | Beban Tunjangan Daerah                      | 10.000.000  | -           |
| 9             | 1 | 1 | 07 | 01 | Beban Uang Lembur PNS                       | 1.100.000   | -           |
| 9             | 1 | 2 | 01 | 01 | Beban Alat Tulis Kantor                     | 5.000.000   | -           |
| 9             | 1 | 2 | 19 | 04 | Beban Jasa Konsultan Tenaga Ahli/Instruktur | 110.000.000 | -           |
|               |   |   |    |    |   |             |             |
| Jumlah        |   |   |    |    |   | 577.100.000 | 577.100.000 |

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

## **SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI ASET DI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)**

Bagian ini menjelaskan Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset di Pemerintah Kabupaten Kuningan untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mencatat transaksi aset SKPD.

### **KEBIJAKAN UMUM**

Prosedur akuntansi aset di SKPD meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, perubahan klasifikasi, pelepasan, dan penyusutan atau penyesuaian nilai terhadap aset yang dikuasai dan atau digunakan SKPD. Oleh karena itu jenis transaksi atas aset tersebut secara garis besar dapat digolongkan dalam 3 (tiga) kelompok besar transaksi, yaitu :

1. Transaksi yang menambah nilai aset

Transaksi yang menambah nilai aset ini adalah transaksi yang mengakibatkan terjadinya penambahan nilai aset dalam satuan moneter (nilai rupiah) baik yang diakibatkan karena penambahan kuantitas maupun karena adanya penambahan kualitas dari aset yang telah ada. Beberapa bentuk transaksi yang menambah nilai aset adalah : terjadinya piutang, transaksi belanja atau pembelian aset seperti belanja barang persediaan, belanja modal, dan belanja terkait aset lainnya; menerima mutasi aset tetap dari SKPD lain melalui SKPD khusus di SKPKD; dan penyitaan aset oleh pemerintah.

2. Transaksi yang mengurangi nilai aset

Transaksi yang mengurangi nilai aset ini adalah transaksi yang mengakibatkan terjadinya pengurangan nilai aset dalam satuan moneter (nilai rupiah) baik yang diakibatkan karena pengurangan jumlah (kuantitas barang) maupun karena adanya pengurangan

kualitas dari aset yang telah ada. Beberapa bentuk transaksi yang mengurangi aset adalah : penutupan dan penghapusan piutang, penggunaan atau pelepasan persediaan karena dijual atau diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, pelepasan aset karena dihapus, dijual, atau dimanfaatkan.

3. Transaksi yang Menyesuaikan nilai aset

Transaksi yang menyesuaikan nilai aset ini adalah transaksi yang menyajikan nilai aset pada nilai yang paling wajar. Beberapa bentuk transaksi yang menyesuaikan nilai aset adalah : penyajian nilai piutang yang dapat direalisasikan, penyusutan aset tetap dan amortisasi aset lainnya.

Sistem dan prosedur akuntansi ini disusun berdasarkan kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

## **PIHAK-PIHAK TERKAIT**

Berbagai pihak/fungsi yang terkait dalam proses akuntansi aset SKPD beserta tugas-tugasnya adalah :

1. Bendahara Penerimaan di SKPD

Dalam pelaksanaan prosedur ini, Bendahara Penerimaan SKPD memiliki tugas menyiapkan dokumen-dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan akuntansi pendapatan SKPD seperti SKP Daerah, SKPDKB, SKPDKBT, SKR Daerah, SKRDKB, SKRDKBT, STTS, TBP, SSPD, SSRD, STS, Bukti Setoran Bank, Bukti Transfer Bank, dan Nota Kredit untuk dicatat Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD.

2. Bendahara Pengeluaran di SKPD

Dalam pelaksanaan prosedur ini, Bendahara SKPD memiliki tugas:

- a. menyiapkan dokumen-dokumen atas transaksi yang terkait untuk diserahkan kepada tenaga akuntansi di PPK-SKPD atas :

- i. Proses pelaksanaan akuntansi belanja UP/GU/TU berupa SP2D UP/GU/TU dan bukti-bukti belanja yang sah; dan
    - ii. Proses pelaksanaan akuntansi belanja LS SKPD seperti SP2D LS.
  - b. Menyiapkan dokumen-dokumen kepemilikan aset atas transaksi belanja UP/GU/TU untuk diserahkan kepada Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD.
3. **Pengurus Barang di SKPD**

Dalam pelaksanaan prosedur ini, Pengurus Barang SKPD memiliki tugas :

  - a. Menyiapkan dokumen-dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan akuntansi aset SKPD seperti Berita Acara Serah Terima untuk dicatat Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD; dan
  - b. Menyiapkan perhitungan penyusutan aset tetap dan amortisasi.
4. **Tenaga Akuntansi di Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)**

Dalam pelaksanaan prosedur ini, Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD memiliki tugas sebagai berikut :

  - a. Menyiapkan tabel umur penyisihan piutang;
  - b. Menyerahkan bukti kepemilikan aset dan/atau bukti-bukti belanja perolehan aset dari penggunaan UP/GU/TU kepada pengurus barang;
  - c. Menerima bukti-bukti transaksi dan memeriksa kebenaran dari bukti transaksi tersebut seperti : ketetapan pendapatan (SKP Daerah dan SKR Daerah); dokumen realisasi pendapatan (TBP, STS, Bukti Setoran Bank, Bukti Transfer Bank); Berita Acara Serah Terima; Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan; SP2D LS; bukti-bukti belanja perolehan aset yang sah; Surat Permohonan Kepala SKPD tentang Penghapusan Aset; Surat

Keputusan Bupati tentang Penggunaan Aset Tetap atau Surat Keputusan Bupati tentang Hibah; Tabel Umur Penyisihan Piutang; dan Tabel Penyusutan Aset Tetap;

- d. Mencatat transaksi-transaksi aset di SKPD berdasarkan bukti-bukti yang terkait yang berada dalam kewenangan SKPD-nya;
- e. Memposting jurnal-jurnal aset di SKD ke dalam buku besarnya masing-masing;
- f. Menyusun neraca saldo untuk persiapan penyusunan laporan keuangan, yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan; dan
- g. Menyerahkan buku jurnal, buku besar dan neraca saldo kepada PPK-SKPKD untuk diperiksa dan ditandatangani.

5. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) : **Sekretaris Badan/Dinas atau Koordinator/Kepala Sub Bagian Keuangan** (Sekretariat Daerah, Badan, Kantor, Dinas, Rumah Sakit Umum Daerah Linggarjati, Kecamatan, dan Kelurahan), Kepala Bagian Keuangan (Sekretariat DPRD dan Rumah Sakit Umum Daerah 45). Dalam pelaksanaan prosedur ini, PPK – SKPD memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Bertanggungjawab atas sistem akuntansi aset SKPD yang dipimpinnya;
- b. Memeriksa dan menandatangani hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Tenaga Akuntansi PPK-SKPD terkait akuntansi aset di SKPD secara triwulanan; dan
- c. Menyerahkan Buku Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo SKPKD-PPKD yang mencatat transaksi pemerintah daerah setiap triwulan kepada PPKD selaku pengguna anggaran untuk disetujui.

6. Pengguna Anggaran/Barang/Kepala SKPD : Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, Kepala Satuan, Camat, Lurah, Asisten Administrasi, Sekretaris DPRD, dan Direktur.

Dalam pelaksanaan prosedur ini, Pengguna Anggaran memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menandatangani/mengesahkan dokumen surat ketetapan pajak/retribusi daerah (SKP Daerah, SKPDKB, SKPDKBT, SKR Daerah, SKRDKB, SKRDKBT, SPPT) dan menyerahkannya kepada tenaga akuntansi PPK-SKPD melalui PPK-SKPD;
  - b. Membuat dan menyampaikan Surat Permohonan Kepala SKPD tentang Penghapusan Aset kepada Bupati;
  - c. Menyetujui Buku Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo yang diserahkan PPK-SKPD setiap triwulan.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (Tidak termasuk Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan).

Dalam pelaksanaan prosedur ini, PPKD memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menerima Disposisi Surat Permohonan Kepala SKPD tentang Penghapusan Aset Tetap dari Bupati; dan
  - b. Membentuk Tim Penilai dan menerbitkan Berita Acara Penghapusan.
8. Kepala Daerah : Bupati.

Dalam pelaksanaan prosedur ini, Bupati memiliki peran sebagai berikut :

- a. Menerima Surat Permohonan Kepala SKPD tentang Penghapusan Aset Tetap;
- b. Memerintahkan Tim Penilai melakukan cek fisik dan penilaian aset yang akan dihapus; dan
- c. Menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan Aset setelah menerima Berita Acara Penghapusan.

## **DOKUMEN TERKAIT**

1. Surat Ketetapan Pajak Daerah selanjutnya disebut SKP Daerah adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak dan digunakan pula untuk membayar pajak daerah metode *official assessment*;
2. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar selanjutnya disebut SKPDKB adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar serta digunakan pula untuk membayar pajak daerah kurang bayar tersebut untuk metode *official assessment*;
3. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya disebut SKPDKBT adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan dan digunakan pula untuk membayar pajak daerah kurang bayar tambahan tersebut metode *official assessment*;
4. Surat Tagihan Pajak Daerah selanjutnya disebut STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda dan digunakan pula untuk membayar tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda tersebut;
5. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang selanjutnya disebut SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak dan digunakan pula untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang;
6. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
7. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;



8. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar selanjutnya disebut SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih kurang dibayar serta digunakan pula untuk membayar retribusi daerah kurang bayar tersebut metode *official assessment*;
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya disebut SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan SKRDKBT dan digunakan pula untuk membayar retribusi daerah kurang bayar tambahan tersebut metode *official assessment*;
10. Surat Ketetapan PPK tentang denda keterlambatan pekerjaan adalah surat keputusan yang dikeluarkan PPK yang menetapkan jumlah denda keterlambatan pekerjaan yang dikenakan kepada penyedia pekerjaan;
11. Tanda Bukti Pembayaran selanjutnya disebut TBP adalah bukti pembayaran pajak/retribusi daerah dari wajib bayar kepada bendahara penerimaan SKPD;
12. Surat Tanda Setoran selanjutnya disebut STS adalah bukti yang diperoleh setelah melakukan penyetoran uang ke Kas Daerah;
13. Surat Setoran Pajak Daerah selanjutnya disebut SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak metode *self assessment* yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
14. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi metode *self assessment* yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
15. Bukti Setoran Bank merupakan formulir bukti melakukan

setoran ke Rekening Umum Kas Daerah;

16. Bukti Transfer merupakan formulir bukti melakukan transfer dari suatu rekening ke Rekening Umum Kas Daerah;
17. Nota Kredit merupakan bukti transaksi penerimaan uang di Rekening Umum Kas Daerah
18. Berita Acara Serah Terima (BAST), adalah dokumen yang mengakui terjadinya penyerahan pekerjaan baik berupa barang maupun jasa dari penyedia jasa kepada pemberi pekerjaan;
19. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan, adalah dokumen sumber untuk pengakuan aset tetap konstruksi dalam pekerjaan;
20. Surat Perintah Pencairan Dana Langsung yang selanjutnya disebut (SP2D-LS) adalah dokumen yang digunakan sebagai pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM -LS;
21. Bukti-bukti belanja yang sah, adalah bukti transaksi yang pada umumnya berupa kuitansi dan faktur pajak atas belanja yang menggunakan UP/GU/TU.
22. Berita Acara Penghapusan, adalah dokumen yang dibuat tim penilai aset yang akan dihapus untuk menyajikan nilai wajar aset yang akan dihapus;
23. Surat Keputusan Bupati tentang Penggunaan Aset, adalah dokumen yang diterbitkan Bupati menentukan pengguna aset/barang;
24. Surat Keputusan Bupati tentang Hibah, adalah dokumen yang diterbitkan Bupati untuk menentukan penerima hibah, alamat penerima hibah, jenis hibah dan nilai hibah;
25. Surat Keputusan Bupati tentang Penghapusan Aset, adalah dokumen yang diterbitkan Bupati setelah menerima Berita Acara Penghapusan;
26. Surat Permohonan Kepala SKPD tentang Penghapusan Aset Tetap, adalah dokumen sumber untuk pengakuan reklasifikasi aset tetap di SKPD menjadi aset lainnya di PPKD; dan

27. Tabel Umur Penyisihan Piutang, adalah daftar yang memuat data nilai perolehan piutang berdasarkan umurnya, nilai penyisihan piutang berdasarkan umurnya, dan nilai total penyisihan piutangnya;

## **BUKU DAN ATAU FORMULIR YANG DIGUNAKAN**

Buku dan atau formulir yang digunakan dalam pelaksanaan prosedur akuntansi aset di Satuan Kerja Perangkat Daerah terdiri dari :

1. Buku Jurnal Umum (JU)

Merupakan buku jurnal yang digunakan untuk melakukan pencatatan akuntansi atas transaksi basis akrual pada aset terkait penyusunan LO dan Neraca.

2. Buku Jurnal Penerimaan Kas (JM)

Merupakan buku jurnal yang digunakan untuk melakukan pencatatan akuntansi atas transaksi penerimaan kas yang berasal dari transaksi penerimaan tunai pendapatan untuk menutup aset piutang karena sudah direalisasi atau dari penjualan aset. Pada umumnya buku jurnal penerimaan kas digunakan untuk mencatat transaksi basis kas terkait penyusunan LRA dan LAK.

3. Buku Jurnal Pengeluaran Kas (JK)

Merupakan buku jurnal yang digunakan untuk melakukan pencatatan akuntansi atas transaksi pengeluaran kas untuk belanja perolehan aset baik dengan mekanisme uang persediaan (belanja UP/GU/TU) maupun langsung (LS). Pada umumnya buku jurnal pengeluaran kas digunakan untuk mencatat transaksi basis kas terkait penyusunan LRA dan LAK.

4. Buku Besar (BB)

Merupakan buku yang digunakan untuk menampung pencatatan hasil posting transaksi aset di SKPD dari buku jurnal. Buku besar ini merupakan pencatatan akuntansi atas seluruh transaksi untuk suatu rekening/akun per jenis atau obyek. Jadi setiap rekening/akun per jenis atau objek mempunyai buku besar

tersendiri.

5. Buku Besar Pembantu (BP)

Buku besar dapat dilengkapi dengan buku besar pembantu sebagai alat uji silang dan kelengkapan informasi rekening/akun tertentu. Buku besar pembantu berisi rincian akun (rincian obyek) yang telah dicatat dalam buku besar. Jika dirasakan informasi dalam buku besar sudah mencukupi maka buku besar pembantu tidak perlu dibuat lagi.

6. Neraca Saldo (NS)

Merupakan formulir yang mencatat nilai saldo setiap rekening/akun per rincian objek sehingga diketahui jumlah total dari seluruh rekening/akun.

## **KERANGKA SISTEM**

Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD menerima atau menyerahkan bukti-bukti yang terkait dengan aset dari atau ke Pengurus Barang SKPD. Bukti tersebut bisa menunjukkan adanya perolehan aset baru, atau penambahan atas aset yang telah ada maupun berupa pengurangan atas aset yang telah ada karena penghapusan atau karena sebab lainnya, atau penyesuaian nilai aset agar tersaji lebih wajar. Bukti-bukti yang menunjukkan adanya penambahan aset dapat berupa bukti transaksi seperti :

1. Berita Acara Serah Terima (BAST);
2. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan; dan
3. Surat Keputusan Bupati tentang Penggunaan Aset.

Bukti-bukti yang menunjukkan adanya pengurangan aset dapat berupa bukti transaksi seperti :

1. Surat Permohonan Kepala SKPD tentang Penghapusan Aset Tetap;
2. Surat Keputusan Bupati tentang Hibah;
3. Berita Acara Penghapusan; dan

4. Surat Keputusan Bupati tentang Penghapusan Aset

Bukti-bukti yang menunjukkan adanya penyesuaian nilai aset dapat berupa bukti transaksi seperti :

- 1. Perhitungan penyusutan;
- 2. Perhitungan amortisasi;
- 3. Tabel penyisihan piutang berdasarkan umur piutang; dan

Berdasarkan perolehan bukti-bukti transaksi tersebut maka Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD membuat bukti memorial. Bentuk formulir atau format dari Bukti memorial dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan atau oleh masing-masing SKPD sebagai contoh :

| PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN |  |  |               |
|-------------------------------|--|--|---------------|
| Bukti Memorial                |  |  |               |
| Satuan Kerja                  | :  | SKPD Kabupaten Kuningan                              |               |
| Keterangan Transaksi          | :  | Pencatatan pengadaan/penerimaan hibah gedung di SKPD |               |
| Tanggal bukti transaksi       | :  | 7 Maret 2022   |               |
| Nomor Bukti Transaksi         | :  | xx.xx.x.xx.xx  |               |
| Nama Bukti Transaksi          | :  | BAST (untuk hibah dilengkapi SK KDH tentang Hibah)   |               |
| Kode Rekening/Akun            | Uraian   |  | Kredit        |
| 1.3.3.01.01                   | Bangunan Gedung Kantor   |  | -             |
| 2.1.5.03.03/<br>8.3.1.01.01   | Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan/Pendapatan Hibah dari Pemerintah |  | 1.000.000.000 |
|                               |  |  |               |
|                               |  |  |               |
|                               |  |  |               |
| PPK-SKPD                      |  | Kepala SKPD  |               |
| (tanda tangan)                |  | (tanda tangan)                                       |               |
| (nama lengkap)                |  | (nama lengkap)                                       |               |
| NIP .....                     |  | NIP .....  |               |

Pada saat bukti transaksi tersebut telah diterima oleh Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD untuk kemudian dibuatkan bukti memorialnya maka Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD selanjutnya melakukan pencatatan akuntansi dalam buku jurnal umum. Setelah seluruh transaksi dicatat dalam buku jurnal maka Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD kemudian melakukan posting ke buku besar. Setelah posting dari buku jurnal ke buku besar selesai dilakukan maka kemudian Tenaga

Akuntansi di PPK-SKPD menyusun Neraca Saldo sebagai dasar pembuatan Laporan Keuangan untuk setiap triwulan yang diserahkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah triwulan berakhir kepada PPK-SKPD.

## **ALUR PROSEDUR TEKNIS**

Teknis pelaksanaan prosedur akuntansi aset di SKPD adalah sebagai berikut :

### **Langkah I : Penerimaan Bukti Transaksi**

Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD menerima atau menyerahkan bukti-bukti yang terkait dengan aset di SKPD-nya dari atau ke Pengurus Barang. Bukti tersebut bisa menunjukkan adanya perolehan aset baru, atau penambahan aset tetap yang telah ada maupun berupa pengurangan atas aset tetap yang telah ada karena penghapusan atau karena sebab lainnya serta penyesuaian nilai aset. Berdasarkan perolehan bukti-bukti transaksi tersebut kemudian Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD membuat bukti memorial sebagai dasar dilakukannya penjurnalan di Buku Jurnal Umum.

Pada bagian ini akan diberikan beberapa contoh jurnal terkait dengan aset di SKPD, sebagai berikut :

- |              |   |
|--------------|---|
| 1 April 2022 | Tenaga akuntansi di PPK-SKPD menerima SKR Daerah yang diterbitkan Pengguna Anggaran sebesar Rp 1.000.000,- ( <i>official assessment</i> ).  |
| 3 April 2022 | Tenaga akuntansi di PPK-SKPD menerima bukti TBP dan SKR Daerah dari Bendahara Penerimaan SKPD atas pendapatan retribusi daerah sebesar Rp 1.000.000,- yang merupakan pembayaran atas SKR Daerah tanggal 1 April 2022. |
| 5 April 2022 | Tenaga akuntansi di PPK-SKPD menerima BAST dari Pengurus Barang terkait pengadaan obat-obatan senilai Rp 11.000.000,-, yang dibeli dengan mekanisme LS.   |

|               |  |
|---------------|--|
| 7 April 2022  | Tenaga akuntansi di PPK-SKPD menerima SP2D LS dari bendahara pengeluaran SKPD atas pembayaran pengadaan ATK dari BAST tanggal 5 April 2022 senilai Rp 11.000.000,- dengan potongan PPN sebesar Rp 1.000.000,- dan Potongan PPh Pasal 22 sebesar Rp 150.000.-   |
| 10 April 2022 | Tenaga akuntansi di PPK-SKPD menerima bukti-bukti pembelian ATK dari bendahara pengeluaran SKPD senilai Rp 500.000,-.  |
| 12 April 2022 | Tenaga akuntansi di PPK-SKPD menerima BAST dari Pengurus Barang terkait pengadaan kursi pasien dokter gigi ( <i>dental chair</i> ) dengan harga perunitnya sebesar Rp 53.000.000,- yang dibeli dengan mekanisme LS. Agar papan tulis elektronik ini siap digunakan, ada biaya-biaya tambahan yang harus dibayar meliputi biaya pengangkutan sebesar Rp 1.000.000,- dan biaya instalasi sebesar Rp 1.000.000,-. Oleh karena nilai kursi pasien dokter gigi ( <i>dental chair</i> ) tersebut akan dicatat sebesar Rp 55.000.000,- sesuai dengan konsep nilai perolehannya. |
| 15 April 2022 | Tenaga akuntansi di PPK-SKPD menerima SP2D LS dari bendahara pengeluaran SKPD atas pembayaran pengadaan kursi pasien dokter gigi ( <i>dental chair</i> ) dari BAST tanggal 12 April 2022 senilai Rp 55.000.000,- dengan potongan PPN sebesar Rp 5.000.000,- dan Potongan PPh Pasal 22 sebesar Rp 750.000.-   |
| 17 April 2022 | Tenaga akuntansi di PPK-SKPD menerima bukti-bukti pembelian printer laser jet dari bendahara pengeluaran SKPD senilai Rp 900.000,-.  |
| 20 April 2022 | Tenaga akuntansi di PPK-SKPD menerima BAST dari Pengurus Barang terkait pengadaan aplikasi keuangan daerah modul pendapatan sebesar Rp 44.000.000,- yang dibeli dengan mekanisme LS.   |
| 23 April 2022 | Tenaga akuntansi di PPK-SKPD menerima SP2D LS  |

|               |   |
|---------------|---|
|               | dari bendahara pengeluaran SKPD atas pengadaan aplikasi keuangan daerah modul pendapatan dari BAST tanggal 20 April 2022 senilai Rp 44.000.000,- dengan potongan PPN sebesar Rp 4.000.000,- dan Potongan PPh Pasal 23 sebesar Rp 800.000.-.   |
| 25 April 2022 | Tenaga akuntansi di PPK-SKPD menerima bukti-bukti pembelian lisensi Microsoft Office Home and Bussiness 2013 untuk 1 unit PC dari bendahara pengeluaran SKPD senilai Rp 3.399.999,-.  |
| 26 April 2022 | Tenaga akuntansi di PPK-SKPD menerima BAST aset tetap mobil dinas Kijang Innova dengan nilai perolehan Rp 200.000.000,- dan akumulasi penyusutan Rp 160.000.000,- dari SKPD lain melalui SKPD khusus di SKPKD yang disertai Surat Keputusan Bupati tentang Penggunaan Aset Tetap di SKPD yang menerima mutasi aset tetap. |
| 27 April 2022 | Tenaga akuntansi di PPK-SKPD menerima BAST disertai Surat Keputusan Bupati tentang Hibah dari Pengurus Barang terkait pengadaan obat-obatan sebesar Rp 10.000.000,- dan pakaian senilai Rp 20.000.000 untuk dihibahkan yang dibeli dengan mekanisme LS.   |
| 28 April 2022 | Tenaga akuntansi di PPK-SKPD menerima SP2D LS dari bendahara pengeluaran SKPD atas pengadaan obat-obatan sebesar Rp 10.000.000,- dan pakaian senilai Rp 20.000.000 untuk dihibahkan.  |
| 29 April 2022 | Tenaga akuntansi di PPK-SKPD menerima BAST disertai Surat Keputusan Bupati tentang Hibah dari pengurus barang terkait penyerahan hibah obat-obatan senilai Rp 10.000.000,- dan bahan pakaian senilai Rp 20.000.000,- kepada klinik di desa terpencil.   |
| 30 April 2022 | Tenaga akuntansi di PPK-SKPD menerima Surat Permohonan Kepala SKPD tentang Penghapusan Aset   |



dari pengguna anggaran melalui PPK-SKPD. Aset tetap yang dihapus adalah 5 (lima) buah komputer lama yang telah rusak dan tidak terpakai. Harga perolehan komputer tersebut Rp 25.000.000,-, dan nilai buku pada tahun berjalan adalah Rp 5.000.000,-.

31 April 2022      Tenaga akuntansi di PPK-SKPD menerima Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Termin 1 pembangunan gedung perkantoran senilai Rp. 500 juta dari pengurus barang.

Catatan        :      Sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 ternyata pembangunan gedung perkantoran belum selesai dibangun dan belum dapat digunakan. Pembangunan gedung perkantoran tersebut baru selesai ditahun berikutnya, misalkan baru selesai pada tanggal 31 Maret 2016 sehingga dilakukan pembayaran termin terakhir sebesar Rp 100.000.000,-

31 Des 2022      Berdasarkan tabel penyisihan umur piutang berikut di bawah ini, diketahui beban penyisihan piutang pajak daerah adalah Rp 650.000,-.

| No | Uraian                            | Umur Piutang  |               |                    | Jumlah    |
|----|-----------------------------------|---------------|---------------|--------------------|-----------|
|    |                                   | 1 s/d 2 tahun | 2 s/d 3 tahun | Lebih dari 3 tahun |           |
| 1  | Piutang                           | 5.000.000     | 2.000.000     | 1.000.000          | 8.000.000 |
|    | % Penyisihan                      | 5 %           | 10 %          | 20 %               |           |
|    | Penyisihan Piutang Tidak Tertagih | 250.000       | 200.000       | 200.000            | 650.000   |

31 Des 2022      Berdasarkan Surat Keputusan Bupati, dikabulkan permohonan penghapusan 5 (lima) buah komputer lama yang telah rusak dan tidak terpakai dengan harga perolehan komputer tersebut Rp 25.000.000,-, dan nilai buku pada tahun berjalan adalah Rp 5.000.000,- .

31 Des 2022      Berdasarkan perhitungan penyusutan diketahui beban penyusutan komputer adalah Rp 10.000.000,-

dan beban penyusutan gedung kantor adalah Rp 250.000.000.-.

31 Des 2022 Berdasarkan perhitungan amortisasi diketahui beban amortisasi aplikasi keuangan daerah modul pendapatan adalah Rp 6.600.000,- dan beban amortisasi lisensi Microsoft Office Home and Bussiness 2013 adalah Rp 509.999,-.

**Langkah II : Penjurnalan Transaksi Aset**

Setelah bukti memorial disiapkan maka Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD kemudian melakukan pencatatan jurnal di Buku Jurnal Umum. Bentuk pencatatan jurnal yang dilakukan sangat tergantung kepada jenis transaksi yang terkait dengan aset tetap tersebut.

**1. Transaksi yang Menambah Nilai Aset Tetap**

a. Perolehan Aset berupa piutang

Prosedur perolehan aset berupa piutang ini terkait erat dengan prosedur pendapatan dalam lingkup pelaksanaan APBD. Setelah pengakuan perolehan aset berupa piutang, jika dilakukan pembayaran atas aset tersebut maka dilakukan penjurnalan penerimaan kas dan realisasi pendapatan. Pada saat perolehan aset berupa piutang, berdasarkan ketetapan pendapatan dari Pengguna Anggaran, maka Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD melakukan pencatatan pengakuan penambahan aset piutang dengan melaksanakan penjurnalan di Buku Jurnal Umum sebagai berikut :

|                   | Debit | Kredit |
|-------------------|-------|--------|
| Piutang_____      | xxxx  |        |
| Pendapatan____-LO |       | xxxx   |

b. Perolehan Aset berupa barang berwujud dan tidak berwujud

Prosedur perolehan aset berupa barang berwujud dan tidak berwujud ini terkait erat dengan prosedur belanja dalam

lingkup pelaksanaan APBD. Setelah pengakuan perolehan aset ini, jika dilakukan pembayaran atas aset tersebut maka dilakukan penjurnalan pengeluaran kas dan realisasi belanja. Pada saat perolehan aset ini, berdasarkan Berita Acara Serah Terima dari Pengurus Barang, maka Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD melakukan pencatatan pengakuan penambahan aset berupa barang berwujud dan tidak berwujud dengan melaksanakan penjurnalan di Buku Jurnal Umum sebagai berikut :

|   | Debit | Kredit |
|---|-------|--------|
| Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya_____ | xxxx  |        |
| Utang Belanja_____                      |       | xxxx   |

Namun ada kalanya SKPD menerima mutasi aset dari SKPD lain. Jika terjadi hal demikian maka Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD di SKPD yang memperoleh aset akan mencatat :

|                                      | Debit | Kredit |
|--------------------------------------|-------|--------|
| Aset_____                            | xxxx  |        |
| Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset |       | xxxx   |
| RK PPKD                              |       | xxxx   |

c. Konstruksi dalam Pengerjaan

Apabila dari aktivitas perolehan aset tersebut, seperti dari aktivitas pembelian atau belanja yang pembayarannya dilakukan secara bertahap (termin) maka dilakukan pencatatan adanya aset yang masih dalam pengerjaan sejumlah termin yang akan dibayar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan dari Pengurus Barang. Penjurnalannya di Buku Jurnal Umum dilakukan sebagai berikut :

|                             | Debit | Kredit |
|-----------------------------|-------|--------|
| Konstruksi dalam Pengerjaan | xxxx  |        |
| Utang Belanja_____          |       | xxxx   |

- d. Penyitaan aset tetap oleh pemerintah

Demikian juga jika pemerintah daerah melakukan penyitaan aset dimana aset tersebut kemudian menjadi milik pemerintah. Atas transaksi ini, berdasarkan Berita Acara Serah Terima dari Pengurus Barang dilakukan pencatatan jurnal atas pengakuan penambahan aset di Buku Jurnal Umum sebagai berikut :

|                         | Debit | Kredit |
|-------------------------|-------|--------|
| Aset _____              | xxxx  |        |
| Piutang PAD/PAD ....-LO |       | xxxx   |

2. Transaksi yang Mengurangi Nilai Aset

- a. Penutupan aset berupa piutang

Transaksi ini merupakan kelanjutan dari transaksi pembentukan piutang. Bersamaan dengan terbentuknya piutang maka diakuiilah pendapatan-LO, apabila pendapatan tersebut direalisasikan maka piutang akan ditutup. Pada saat realisasi berdasarkan dokumen penerimaan kas seperti STS/Bukti Setoran Bank/Bukti Transfer Bank/SSPD/SSRD dan bukti penerimaan lain yang sah maka Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD mencatat jurnalnya dalam buku jurnal umum sebagai berikut :

|                                     | Debit | Kredit |
|-------------------------------------|-------|--------|
| Kas di Bendahara Penerimaan/RK PPKD | xxxx  |        |
| Piutang PAD_____                    |       | xxxx   |

- b. Pengeluaran aset berupa barang berwujud dan tidak berwujud

Transaksi utama yang akan mengurangi nilai aset berupa barang berwujud maupun tidak berwujud di SKPD adalah karena adanya tindakan non aktif aset tersebut karena tidak digunakan lagi misalkan karena rusak, hilang, kadaluarsa, dimutasi ke SPKD lain, akan dihapus atau akan dipindahtangankan. Untuk menindaklanjuti tindakan non aktif aset di SKPD maka dilakukan pencatatan pengeluaran

aset tersebut dari pencatatan di SKPD. Jika transaksi ini terjadi maka berdasarkan surat permohonan Kepala SKPD tentang Penghapusan Aset maka Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD mencatat jurnalnya dalam buku jurnal umum sebagai berikut :

|   | Debit       | Kredit      |
|---|-------------|-------------|
| <b>RK PPKD</b>                              | <b>xxxx</b> |             |
| <b>Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset</b> | <b>xxxx</b> |             |
| <b>Aset_____</b>                            |             | <b>xxxx</b> |

**3. Transaksi yang menyesuaikan Nilai Aset**

a. Penyusutan dan Amortisasi

Kualitas aset mengalami penurunan dikarenakan pemakaian atau batas akhir umur penggunaannya (Kadaluarsa). Untuk itu maka dapat dilakukan perhitungan sistematis penyusutan atas nilai aset tetap atau amortisasi atas nilai aset lainnya/ tak berwujud tersebut agar nilai buku aset tersebut mendekati nilai wajarnya. Proses ini dinamakan sebagai melakukan perhitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dan amortisasi aset lainnya/tak berwujud. Apabila hal ini dilakukan, berdasarkan perhitungan penyusutan/amortisasi yang disiapkan oleh pengurus barang maka Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD kemudian melakukan pencatatan sebagai berikut :

|   | Debit       | Kredit      |
|---|-------------|-------------|
| <b>Beban Penyusutan/Amortisasi Aset</b>     | <b>xxxx</b> |             |
| <b>Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset</b> |             | <b>xxxx</b> |

Berdasarkan uraian penjurnalan dan contoh transaksi tersebut diatas maka Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD melakukan pencatatan dalam Buku Jurnal sebagai berikut :

**Pertama,** penjurnalan untuk SKR Daerah yang diterbitkan Pengguna Anggaran sebesar Rp 1.000.000,- (*official assessment*) pada tanggal 1 April 2022, dicatat di jurnal umum sebagai berikut :

|              |             |                                | Debit     | Kredit    |
|--------------|-------------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 1 April 2022 | 1.1.3.02.00 | Piutang Retribusi Daerah       | 1.000.000 |           |
|              | 8.1.2.00.00 | Pendapatan Retribusi Daerah-LO |           | 1.000.000 |

**Kedua,** pencatatan dalam buku jurnal umum dan buku jurnal penerimaan kas dilakukan atas transaksi penerimaan kas dari realisasi pendapatan retribusi daerah yang bukti TBP dan SKR Daerah diterima dari bendahara penerimaan pada tanggal 3 April 2022, yaitu:

|              |             |                          | Debit     | Kredit    |
|--------------|-------------|--------------------------|-----------|-----------|
| 3 April 2022 | 1.1.1.02.01 | Kas di Bend Penerimaan   | 1.000.000 |           |
|              | 1.1.3.02.00 | Piutang Retribusi Daerah |           | 1.000.000 |

Tenaga Akuntansi di PPK–SKPD juga mencatat transaksi realisasi anggaran pendapatan-LRA dengan melakukan pencatatan dalam buku jurnal penerimaan kas dengan jurnal sebagai berikut :

|              |             |                             | Debit     | Kredit    |
|--------------|-------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| 3 April 2022 | 3.1.2.05.01 | Estimasi Perubahan SAL      | 1.000.000 |           |
|              | 4.1.2.00.00 | Pendapatan Retribusi Daerah |           | 1.000.000 |

**Ketiga,** pencatatan dalam buku jurnal umum oleh Tenaga akuntansi di PPK-SKPD dilakukan berdasarkan BAST dari Pengurus Barang terkait pengadaan obat-obatan senilai Rp 11.000.000,-, yang dibeli dengan mekanisme LS pada tanggal 5 April 2022, yaitu:

|              |             |                        | Debit      | Kredit     |
|--------------|-------------|------------------------|------------|------------|
| 5 April 2022 | 1.1.7.02.04 | Persediaan Obat-obatan | 11.000.000 |            |
|              | 2.1.5.02.01 | Utang Belanja Jasa     |            | 11.000.000 |

**Keempat,** dilakukan penjurnalan di buku jurnal umum untuk mencatat realisasi beban dalam basis akrual atas pembayaran pengadaan ATK dari BAST tanggal 5 April 2022 senilai Rp 11.000.000, berdasarkan SP2D LS tanggal 7 April 2022 sebagai berikut :

|              |             |                    | Debit      | Kredit     |
|--------------|-------------|--------------------|------------|------------|
| 7 April 2022 | 2.1.5.02.01 | Utang Belanja Jasa | 11.000.000 | -          |
|              | 7.1.8.99.99 | Penerimaan RK PPKD | -          | 11.000.000 |

Kemudian atas transaksi yang sama, di catat juga realisasi anggaran belanja di jurnal pengeluaran kas, yaitu sebagai berikut :

|              |             |                                |                     |             |
|--------------|-------------|--------------------------------|---------------------|-------------|
| 7 April 2022 | 5.2.2.02.04 | Belanja Persediaan Obat-obatan | Debit<br>11.000.000 | Kredit<br>- |
|              | 3.1.2.05.01 | Estimasi Perubahan SAL         | -                   | 11.000.000  |

**Kelima,** penjurnalan dilakukan atas transaksi yang terkait dengan realisasi beban pembelian bahan obat-obatan dari UP/GU/TU berdasarkan bukti transaksi, yang di catat di jurnal umum, yaitu sebagai berikut :

|               |             |                              |                  |         |
|---------------|-------------|------------------------------|------------------|---------|
| 10 April 2022 | 1.1.7.02.04 | Persediaan Obat-obatan       | Debit<br>500.000 | Kredit  |
|               | 1.1.1.03.01 | Kas di Bendahara Pengeluaran |                  | 500.000 |

Kemudian atas transaksi yang sama, di catat juga realisasi anggaran belanja di jurnal pengeluaran kas, yaitu sebagai berikut :

|               |             |                           |                  |         |
|---------------|-------------|---------------------------|------------------|---------|
| 10 April 2022 | 5.2.2.02.04 | Belanja Bahan Obat-obatan | Debit<br>500.000 | Kredit  |
|               | 3.1.2.05.01 | Estimasi Perubahan SAL    |                  | 500.000 |

**Keenam,** penjurnalan dilakukan atas bukti transaksi BAST dari Pengurus Barang terkait pengadaan kursi pasien dokter gigi (*dental chair*) dengan harga perunitnya sebesar Rp 55.000.000,- berikut biaya transport dan instalasinya yang dibeli dengan mekanisme LS, di catat di jurnal umum, yaitu sebagai berikut :

|               |             |   |                     |             |
|---------------|-------------|---|---------------------|-------------|
| 12 April 2022 | 1.3.2.21.02 | Alat Kedokteran Gigi                    | Debit<br>55.000.000 | Kredit<br>- |
|               | 2.1.5.03.02 | Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin | -                   | 55.000.000  |

**Ketujuh,** dilakukan penjurnalan di buku jurnal umum untuk mencatat realisasi beban dalam basis akrual atas pembayaran pengadaan kursi pasien dokter gigi (*dental chair*) dari BAST tanggal 12 April 2022 senilai Rp 55.000.000,- dengan potongan PPN sebesar Rp 5.000.000,- dan Potongan PPh Pasal 22 sebesar Rp 750.000.-, berdasarkan SP2D LS tanggal 15 April 2022 sebagai berikut :

|               |             |   |                     |             |
|---------------|-------------|---|---------------------|-------------|
| 15 April 2022 | 2.1.5.03.02 | Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin | Debit<br>55.000.000 | Kredit<br>- |
|               | 7.1.8.99.99 | Penerimaan RK PPKD                      | -                   | 55.000.000  |

Kemudian mencatat di Buku Penyesuaian atas potongan pajak dari transaksi perolehan aset, yaitu sebagai berikut :

|               |             |                            | Debit     | Kredit    |
|---------------|-------------|----------------------------|-----------|-----------|
| 15 April 2022 | 7.2.8.99.99 | Pengeluaran RK PPKD        | 5.750.000 |           |
|               | 7.1.2.01.02 | Penerimaan Potongan PPh 22 |           | 750.000   |
|               | 7.1.2.01.04 | Penerimaan Pungutan PPN    |           | 5.000.000 |

Kemudian atas transaksi yang sama, di catat juga realisasi anggaran belanja di jurnal pengeluaran kas, yaitu sebagai berikut :

|              |             |                               | Debit      | Kredit     |
|--------------|-------------|-------------------------------|------------|------------|
| 7 April 2022 | 5.2.2.21.02 | Belanja Modal Alat Kedokteran | 55.000.000 | -          |
|              | 3.1.2.05.01 | Estimasi Perubahan SAL        | -          | 55.000.000 |

**Kedelapan,** penjurnalan dilakukan atas transaksi yang terkait dengan realisasi beban pembelian printer laser jet dari UP/GU/TU berdasarkan bukti transaksi, yang di catat di jurnal umum, yaitu sebagai berikut :

|               |             |                              | Debit   | Kredit  |
|---------------|-------------|------------------------------|---------|---------|
| 17 April 2022 | 1.3.2.16.05 | Peralatan Personal Komputer  | 900.000 |         |
|               | 1.1.1.03.01 | Kas di Bendahara Pengeluaran |         | 900.000 |

Kemudian atas transaksi yang sama, di catat juga realisasi anggaran belanja di jurnal pengeluaran kas, yaitu sebagai berikut :

|               |             |   | Debit   | Kredit  |
|---------------|-------------|---|---------|---------|
| 17 April 2022 | 5.2.2.16.04 | Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer | 900.000 |         |
|               | 3.1.2.05.01 | Estimasi Perubahan SAL                              |         | 900.000 |

**Kesembilan,** penjurnalan dilakukan atas bukti transaksi BAST dari Pengurus Barang terkait pengadaan aplikasi keuangan daerah modul pendapatan sebesar Rp 44.000.00,- yang dibeli dengan mekanisme LS, di catat di jurnal umum, yaitu sebagai berikut :

|               |             |                                  | Debit      | Kredit     |
|---------------|-------------|----------------------------------|------------|------------|
| 20 April 2022 | 1.5.3.05.01 | Software                         | 44.000.000 | -          |
|               | 2.1.5.03.06 | Utang Belanja Modal Aset Lainnya | -          | 44.000.000 |



**Kesepuluh,** dilakukan penjurnalan di buku jurnal umum untuk mencatat realisasi beban dalam basis akrual atas pembayaran pengadaan aplikasi keuangan daerah modul pendapatan dari BAST tanggal 20 April 2022 senilai Rp 44.000.000,- dengan potongan PPN sebesar Rp 4.000.000,- dan Potongan PPh Pasal 23 sebesar Rp 800.000, berdasarkan SP2D LS tanggal 20 April 2022 sebagai berikut :

|               |             |                                  | Debit      | Kredit     |
|---------------|-------------|----------------------------------|------------|------------|
| 23 April 2022 | 2.1.5.03.06 | Utang Belanja Modal Aset Lainnya | 44.000.000 | -          |
|               | 7.1.8.99.99 | Penerimaan RK PPKD               | -          | 44.000.000 |

Kemudian mencatat di Buku Penyesuaian atas potongan pajak dari transaksi perolehan aset, yaitu sebagai berikut :

|               |             |                            | Debit     | Kredit    |
|---------------|-------------|----------------------------|-----------|-----------|
| 23 April 2022 | 7.2.8.99.99 | Pengeluaran RK PPKD        | 4.800.000 |           |
|               | 7.1.0.00.00 | Penerimaan Pungutan PPN    |           | 4.000.000 |
|               | 7.1.0.00.00 | Penerimaan Potongan PPh 23 |           | 800.000   |

Kemudian atas transaksi yang sama, di catat juga realisasi anggaran belanja di jurnal pengeluaran kas, yaitu sebagai berikut :

|               |             |                            | Debit      | Kredit     |
|---------------|-------------|----------------------------|------------|------------|
| 23 April 2022 | 5.2.5.07.06 | Belanja Modal Aset Lainnya | 44.000.000 | -          |
|               | 3.1.2.05.01 | Estimasi Perubahan SAL     | -          | 44.000.000 |

**Kesebelas,** penjurnalan dilakukan atas transaksi yang terkait dengan realisasi beban pembelian lisensi Microsoft Office Home and Bussiness 2013 untuk 1 unit PC dari UP/GU/TU berdasarkan bukti transaksi, yang di catat di jurnal umum, yaitu sebagai berikut :

|               |             |                              | Debit     | Kredit    |
|---------------|-------------|------------------------------|-----------|-----------|
| 25 April 2022 | 1.5.3.02.01 | Lisensi dan Franchise        | 3.399.999 |           |
|               | 1.1.1.03.01 | Kas di Bendahara Pengeluaran |           | 3.399.999 |

Kemudian atas transaksi yang sama, di catat juga realisasi anggaran belanja di jurnal pengeluaran kas, yaitu sebagai berikut :

|               |             |                            | Debit     | Kredit    |
|---------------|-------------|----------------------------|-----------|-----------|
| 25 April 2022 | 5.2.5.07.06 | Belanja Modal Aset Lainnya | 3.399.999 |           |
|               | 3.1.2.05.01 | Estimasi Perubahan SAL     |           | 3.399.999 |

**Keduabelas,** penjurnalan dilakukan atas BAST aset tetap mobil dinas Kijang Innova dengan nilai perolehan Rp 200.000.000,- dan

akumulasi penyusutan Rp 160.000.000,- dari SKPD lain melalui SKPD khusus di SKPKD yang disertai Surat Keputusan Bupati tentang Penggunaan Aset Tetap di SKPD yang menerima mutasi aset tetap, yang di catat di jurnal umum, yaitu sebagai berikut :

|               |             |   | Debit       | Kredit      |
|---------------|-------------|---|-------------|-------------|
| 26 April 2022 | 7.2.8.99.98 | Pengeluaran RK SKPD Khusus di SKPKD               | 40.000.000  | -           |
|               | 1.3.7.01.04 | Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor | 160.000.000 | -           |
|               | 1.3.2.04.02 | Kendaraan Bermotor Penumpang                      | -           | 200.000.000 |

**Ketigabelas,** penjurnalan dilakukan atas bukti transaksi BAST disertai Surat Keputusan Bupati tentang Hibah dari Pengurus Barang terkait pengadaan obat-obatan sebesar Rp 10.000.000,- dan pakaian senilai Rp 20.000.000 untuk dihibahkan yang dibeli dengan mekanisme LS, di catat di jurnal umum, yaitu sebagai berikut :

|               |             |   | Debit      | Kredit     |
|---------------|-------------|---|------------|------------|
| 27 April 2022 | 1.1.7.03.01 | Persediaan Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga | 30.000.000 | -          |
|               | 2.1.5.02.01 | Utang Belanja Jasa  | -          | 30.000.000 |

**Keempatbelas,** dilakukan penjurnalan di buku jurnal umum untuk mencatat realisasi beban dalam basis akrual atas pembayaran pengadaan obat-obatan sebesar Rp 10.000.000,- dan pakaian senilai Rp 20.000.000 untuk dihibahkan, berdasarkan SP2D LS tanggal 27 April 2022 sebagai berikut :

|               |             |                    | Debit      | Kredit     |
|---------------|-------------|--------------------|------------|------------|
| 28 April 2022 | 2.1.5.02.01 | Utang Belanja Jasa | 30.000.000 | -          |
|               | 7.1.8.99.99 | Penerimaan RK PPKD | -          | 30.000.000 |

Kemudian atas transaksi yang sama, di catat juga realisasi anggaran belanja di jurnal pengeluaran kas, yaitu sebagai berikut :

|               |             |   | Debit      | Kredit     |
|---------------|-------------|---|------------|------------|
| 28 April 2022 | 5.1.2.20.01 | Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat | 30.000.000 | -          |
|               | 3.1.2.05.01 | Estimasi Perubahan SAL                                | -          | 30.000.000 |

**Kelimabelas,** penjurnalan dilakukan atas BAST disertai Surat Keputusan Bupati tentang Hibah dari pengurus barang terkait penyerahan hibah obat-obatan senilai Rp 10.000.000,- dan bahan pakaian senilai Rp 20.000.000,- kepada klinik di desa terpencil, yang di catat di jurnal umum, yaitu sebagai berikut :

|               |             |   | Debit      | Kredit     |
|---------------|-------------|---|------------|------------|
| 29 April 2022 | 9.1.5.05.01 | Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan                          | 30.000.000 | -          |
|               | 1.1.7.03.01 | Persediaan Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga | -          | 30.000.000 |

**Keenambelas,** penjurnalan dilakukan atas Surat Permohonan Kepala SKPD tentang Penghapusan Aset dari pengguna anggaran melalui PPK-SKPD. Aset tetap yang dihapus adalah 5 (lima) buah komputer lama yang telah rusak dan tidak terpakai. Harga perolehan komputer tersebut Rp 25.000.000,-, dan nilai buku pada tahun berjalan adalah Rp 5.000.000,-, yang di catat di jurnal umum, yaitu sebagai berikut :

|               |             |                   | Debit      | Kredit     |
|---------------|-------------|-------------------|------------|------------|
| 30 April 2022 | 1.5.4.01.01 | Aset Lainnya      | 25.000.000 | -          |
|               | 1.3.2.16.02 | Personal Komputer | -          | 25.000.000 |

**Ketujuhbelas,** penjurnalan dilakukan atas Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Termin 1 pembangunan gedung perkantoran senilai Rp. 500 juta dari pengurus barang, yang di catat di jurnal umum, yaitu sebagai berikut :

|               |             |   | Debit       | Kredit      |
|---------------|-------------|---|-------------|-------------|
| 31 April 2022 | 1.3.6.00.00 | Konstruksi Dlm Pengerjaan               | 500.000.000 | -           |
|               | 2.1.5.03.03 | Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan | -           | 500.000.000 |

**Kedelapanbelas,** penjurnalan dilakukan atas tabel penyisihan umur piutang diketahui beban penyisihan piutang adalah Rp 650.000,-, yang di catat di jurnal umum, yaitu sebagai berikut :

|             |             |                                       | Debit   | Kredit  |
|-------------|-------------|---------------------------------------|---------|---------|
| 31 Des 2022 | 9.1.8.01.01 | Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah | 650.000 | -       |
|             | 1.1.5.01.01 | Penyisihan Piutang Pajak Daerah       | -       | 650.000 |

Apabila di masa datang ternyata pajak daerah tersebut dibayar maka dilakukan jurnal umum sebagai berikut :

|       |              |                                       | Debit   | Kredit  |
|-------|--------------|---------------------------------------|---------|---------|
| Xxxxx | 1.1.1.02.01/ | Kas di Bendahara/                     | 650.000 | -       |
|       | 7.2.8.99.99  | Pengeluaran RK PPKD                   |         |         |
|       | 1.1.5.01.01  | Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah | 650.000 | -       |
|       | 9.1.8.01.01  | Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah | -       | 650.000 |
|       | 1.1.3.02.00  | Piutang Retribusi Daerah              | -       | 650.000 |

**Kesembilanbelas,** penjurnalan dilakukan atas Surat Keputusan Bupati, dikabulkan permohonan penghapusan 5 (lima) buah komputer lama yang telah rusak dan tidak terpakai dengan harga perolehan komputer tersebut Rp 25.000.000,-, dan nilai buku pada tahun berjalan adalah Rp 5.000.000,-, yang di catat di jurnal umum, yaitu sebagai berikut :

|             |             |   | Debit      | Kredit     |
|-------------|-------------|---|------------|------------|
| 31 Des 2022 | 7.2.8.99.98 | RK SKPD khusus di SKPKD                 | 5.000.000  | -          |
|             | 1.3.7.01.16 | Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer | 20.000.000 | -          |
|             | 1.5.4.01.01 | Aset Lainnya                            | -          | 25.000.000 |

**Keduapuluh,** penjurnalan dilakukan atas perhitungan penyusutan diketahui beban penyusutan komputer adalah Rp 10.000.000,- dan beban penyusutan gedung kantor adalah Rp 250.000.000.-, yang di catat di jurnal umum, yaitu sebagai berikut :

|             |             |   | Debit       | Kredit      |
|-------------|-------------|---|-------------|-------------|
| 31 Des 2022 | 9.1.7.01.14 | Beban Penyusutan Alat Kantor                      | 10.000.000  | -           |
|             | 9.1.7.02.01 | Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja     | 250.000.000 | -           |
|             | 1.3.7.01.14 | Akumulasi Penyusutan Alat Kantor                  | -           | 10.000.000  |
|             | 1.3.7.02.01 | Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja | -           | 250.000.000 |

**Keduapuluhsatu,** penjurnalan dilakukan atas perhitungan amortisasi diketahui beban amortisasi aplikasi keuangan daerah modul pendapatan adalah Rp 6.600.000,- dan beban amortisasi lisensi Microsoft Office Home and Bussiness 2013 adalah Rp 509.999,-, yang di catat di jurnal umum, yaitu sebagai berikut :

|             |             |  |                  |             |
|-------------|-------------|--|------------------|-------------|
| 31 Des 2022 | 9.1.7.04.02 | Beban Amortisasi Lisensi dan Franchise           | Debit<br>509.999 | Kredit<br>- |
|             | 9.1.7.04.05 | Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya     | 6.600.000        | -           |
|             | 1.5.3.06.02 | Akumulasi Amortisasi Lisensi dan Franchise       | -                | 509.999     |
|             | 1.5.3.06.05 | Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya | -                | 6.600.000   |

Untuk kegiatan pembangunan gedung perkantoran senilai Rp. 500.000.000,- yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 belum selesai dibangun dan belum dapat digunakan. Misalkan pada tanggal 31 Maret 2016 ternyata gedung perkantoran tersebut telah selesai dibangun dan siap digunakan, maka berdasarkan Berita Acara Serah Terima dari Bendahara/Pengurus Barang, Tenaga Akuntansi di PPK–SKPD melaksanakan penjurnalan di Buku Jurnal Umum sebagai berikut:

|               |             |   |                      |             |
|---------------|-------------|---|----------------------|-------------|
| 31 Maret 2016 | 1.3.3.01.01 | Gedung Kantor                           | Debit<br>600.000.000 | Kredit<br>- |
|               | 2.1.5.03.03 | Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan | -                    | 100.000.000 |
|               | 1.3.6.00.00 | Konstruksi Dlm Pengerjaan               | -                    | 500.000.000 |

**Bentuk dan Cara Pengisian Buku Jurnal**

Berdasarkan contoh jurnal tersebut diatas maka dilakukan pencatatan dalam buku jurnal umum untuk transaksi berbasis akrual yang nantinya digunakan untuk menyusun LO dan Neraca sebagai berikut :

**KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU JURNAL UMUM (JU)**

**SKPD** : .....( SKPD Kabupaten Kuningan)

| Halaman 01 |                  |            |               |   |   |    |    |                                  |      |            |             |  |
|------------|------------------|------------|---------------|---|---|----|----|----------------------------------|------|------------|-------------|--|
| Tanggal    | Nomor            |            | Kode Rekening |   |   |    |    | Uraian                           | Ref. | Debit (Rp) | Kredit (Rp) |  |
|            | Bukti Penerimaan | Bukti Lain |               |   |   |    |    |                                  |      |            |             |  |
| 1          | 2                |            | 3             |   |   |    |    | 4                                | 5    | 6          | 7           |  |
|            |                  |            |               |   |   |    |    |                                  |      |            |             |  |
| 1/4/2022   |                  |            | 1             | 1 | 3 | 02 | 00 | Piutang Retribusi Daerah         |      | 1.000.000  | -           |  |
|            |                  |            | 8             | 1 | 2 | 00 | 00 | Pendapatan Retribusi Daerah - LO |      | -          | 1.000.000   |  |
|            |                  |            |               |   |   |    |    |                                  |      |            |             |  |
| 3/4/2022   |                  |            | 1             | 1 | 1 | 02 | 01 | Kas di Bendahara Penerimaan      |      | 1.000.000  | -           |  |
|            |                  |            | 1             | 1 | 3 | 02 | 00 | Piutang Retribusi Daerah         |      | -          | 1.000.000   |  |

|           |  |  |   |   |   |    |    |  |  |             |             |  |
|-----------|--|--|---|---|---|----|----|--|--|-------------|-------------|--|
|           |  |  |   |   |   |    |    |  |  |             |             |  |
| 5/4/2022  |  |  | 1 | 1 | 7 | 02 | 04 | Persediaan Obat-obatan   |  | 11.000.000  | -           |  |
|           |  |  | 2 | 1 | 5 | 02 | 01 | Utang Belanja Jasa   |  | -           | 11.000.000  |  |
|           |  |  |   |   |   |    |    |  |  |             |             |  |
| 7/4/2022  |  |  | 2 | 1 | 5 | 02 | 01 | Utang Belanja Jasa   |  | 11.000.000  | -           |  |
|           |  |  | 7 | 1 | 8 | 99 | 99 | Penerimaan RK PPKD   |  | -           | 11.000.000  |  |
|           |  |  |   |   |   |    |    |  |  |             |             |  |
| 10/4/2022 |  |  | 1 | 1 | 7 | 02 | 04 | Persediaan Obat-obatan   |  | 500.000     | -           |  |
|           |  |  | 1 | 1 | 1 | 03 | 01 | Kas di Bendahara Pengeluaran   |  | -           | 500.000     |  |
|           |  |  |   |   |   |    |    |  |  |             |             |  |
| 12/4/2022 |  |  | 1 | 3 | 2 | 21 | 02 | Alat Kedokteran Gigi   |  | 55.000.000  | -           |  |
|           |  |  | 2 | 1 | 5 | 03 | 02 | Utang Belanja Modal Peralatan Dan mesin                                |  | -           | 55.000.000  |  |
|           |  |  |   |   |   |    |    |  |  |             |             |  |
| 15/4/2022 |  |  | 2 | 1 | 5 | 03 | 02 | Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                |  | 55.000.000  | -           |  |
|           |  |  | 7 | 1 | 8 | 99 | 99 | Penerimaan RK PPKD   |  | -           | 55.000.000  |  |
|           |  |  |   |   |   |    |    |  |  |             |             |  |
| 17/4/2022 |  |  | 1 | 3 | 2 | 16 | 05 | Peralatan Personal Komputer  |  | 900.000     | -           |  |
|           |  |  | 1 | 1 | 1 | 03 | 01 | Kas di Bendahara Pengeluaran   |  | -           | 900.000     |  |
|           |  |  |   |   |   |    |    |  |  |             |             |  |
| 20/4/2022 |  |  | 1 | 5 | 3 | 05 | 01 | Software   |  | 44.000.000  | -           |  |
|           |  |  | 2 | 1 | 5 | 03 | 06 | Utang Belanja Modal Aset Lainnya                                       |  | -           | 44.000.000  |  |
|           |  |  |   |   |   |    |    |  |  |             |             |  |
| 23/4/2022 |  |  | 2 | 1 | 5 | 03 | 06 | Utang Belanja Modal Aset Lainnya                                       |  | 44.000.000  | -           |  |
|           |  |  | 7 | 1 | 8 | 99 | 99 | Penerimaan RK PPKD   |  | -           | 44.000.000  |  |
|           |  |  |   |   |   |    |    |  |  |             |             |  |
| 25/4/2022 |  |  | 1 | 5 | 3 | 02 | 01 | Lisensi dan Franchise  |  | 3.399.999   | -           |  |
|           |  |  | 1 | 1 | 1 | 03 | 01 | Kas di Bendahara Pengeluaran   |  | -           | 3.399.999   |  |
|           |  |  |   |   |   |    |    |  |  |             |             |  |
| 26/4/2022 |  |  | 7 | 2 | 8 | 99 | 98 | Pengeluaran RK SKPD Khusus di SKPKD                                    |  | 40.000.000  | -           |  |
|           |  |  | 1 | 3 | 7 | 01 | 04 | Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor                      |  | 160.000.000 | -           |  |
|           |  |  | 1 | 3 | 2 | 04 | 02 | Kendaraan Bermotor Penumpang   |  | -           | 200.000.000 |  |
|           |  |  |   |   |   |    |    |  |  |             |             |  |
| 27/4/2022 |  |  | 1 | 1 | 7 | 03 | 01 | Persediaan Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga |  | 30.000.000  | -           |  |
|           |  |  | 2 | 1 | 5 | 02 | 01 | Utang Belanja Jasa   |  | -           | 30.000.000  |  |
|           |  |  |   |   |   |    |    |  |  |             |             |  |
| 28/4/2022 |  |  | 2 | 1 | 5 | 02 | 01 | Utang Belanja Jasa   |  | 30.000.000  | -           |  |
|           |  |  | 7 | 1 | 2 | 99 | 99 | Penerimaan RK PPKD   |  | -           | 30.000.000  |  |
|           |  |  |   |   |   |    |    |  |  |             |             |  |
| 29/4/2022 |  |  | 9 | 1 | 5 | 05 | 01 | Beban Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan                           |  | 30.000.000  | -           |  |
|           |  |  | 1 | 1 | 7 | 03 | 01 | Persediaan Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga      |  | -           | 30.000.000  |  |
|           |  |  |   |   |   |    |    |  |  |             |             |  |
| 30/4/2022 |  |  | 1 | 5 | 4 | 01 | 01 | Aset Lainnya   |  | 25.000.000  | -           |  |
|           |  |  | 1 | 3 | 2 | 16 | 02 | Personal Komputer  |  | -           | 25.000.000  |  |

|               |  |  |   |   |   |    |    |   |  |                      |                      |
|---------------|--|--|---|---|---|----|----|---|--|----------------------|----------------------|
| 31/4/2022     |  |  | 1 | 3 | 6 | 00 | 00 | Konstruksi dalam Pengerjaan                       |  | 500.000.000          | -                    |
|               |  |  | 2 | 1 | 5 | 03 | 03 | Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan           |  | -                    | 500.000.000          |
| 31/12/2022    |  |  | 9 | 1 | 8 | 01 | 01 | Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah             |  | 650.000              | -                    |
|               |  |  | 1 | 1 | 5 | 01 | 01 | Penyisihan Piutang Pajak Daerah                   |  | -                    | 650.000              |
| 31/12/2022    |  |  | 7 | 2 | 8 | 99 | 98 | Pengeluaran RK SKPD Khusus di SKPD                |  | 5.000.000            | -                    |
|               |  |  | 1 | 3 | 7 | 01 | 16 | Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer           |  | 20.000.000           | -                    |
|               |  |  | 1 | 5 | 4 | 01 | 01 | Aset Lainnya                                      |  | -                    | 25.000.000           |
| 31/12/2022    |  |  | 9 | 1 | 7 | 01 | 14 | Beban Penyusutan Alat Kantor                      |  | 10.000.000           |                      |
|               |  |  | 9 | 1 | 7 | 02 | 01 | Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja     |  | 250.000.000          |                      |
|               |  |  | 1 | 3 | 7 | 01 | 14 | Akumulasi Penyusutan Alat Kantor                  |  |                      | 10.000.000           |
|               |  |  | 1 | 3 | 7 | 02 | 01 | Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja |  |                      | 250.000.000          |
| 31/12/2022    |  |  | 9 | 1 | 7 | 04 | 02 | Beban Amortisasi Lisensi dan Franchise            |  | 509.999              | -                    |
|               |  |  | 9 | 1 | 7 | 04 | 05 | Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud                |  | 6.600.000            | -                    |
|               |  |  | 1 | 5 | 3 | 06 | 02 | Akumulasi Amortisasi Lisensi dan Franchise        |  | -                    | 509.999              |
|               |  |  | 1 | 5 | 3 | 06 | 05 | Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud            |  | -                    | 6.600.000            |
| <b>Jumlah</b> |  |  |   |   |   |    |    |   |  | <b>1.074.559.998</b> | <b>1.074.559.998</b> |

PPK-SKPD

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP.....

Kepala SKPD

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP.....

Selain mencatat di buku jurnal umum dilakukan juga pencatatan dalam buku jurnal penerimaan kas untuk transaksi berbasis kas yang nantinya digunakan untuk menyusun LRA dan LAK sebagai berikut :

KABUPATEN KUNINGAN
BUKU JURNAL PENERIMAAN KAS (JM)

SKPD : .....( SKPD Kabupaten Kuningan)

Halaman 01

| Tanggal  | Nomor            |            | Kode Rekening |   |   |    |    | Uraian                      | Ref. | Debit (Rp) | Kredit (Rp) |
|----------|------------------|------------|---------------|---|---|----|----|-----------------------------|------|------------|-------------|
|          | Bukti Penerimaan | Bukti Lain |               |   |   |    |    |                             |      |            |             |
| 1        | 2                |            | 3             |   |   |    |    | 4                           | 5    | 6          | 7           |
|          |                  |            |               |   |   |    |    |                             |      |            |             |
| 03/04/15 | -                | -          | 3             | 1 | 2 | 05 | 01 | Estimasi Perubahan SAL      |      | 1.000.000  | -           |
|          |                  |            | 4             | 1 | 2 | 00 | 00 | Pendapatan Retribusi Daerah |      | -          | 1.000.000   |
|          |                  |            |               |   |   |    |    |                             |      |            |             |
| Jumlah   |                  |            |               |   |   |    |    |                             |      | 1.000.000  | 1.000.000   |

PPK-SKPD Kepala SKPD

(tanda tangan) (tanda tangan)
(nama lengkap) (nama lengkap)
NIP..... NIP.....

Selain mencatat di buku jurnal umum dilakukan juga pencatatan dalam buku jurnal pengeluaran kas untuk transaksi berbasis kas yang nantinya digunakan untuk menyusun LRA dan LAK sebagai berikut :

KABUPATEN KUNINGAN
BUKU JURNAL PENGELUARAN KAS (JK)

SKPD : .....( SKPD Kabupaten Kuningan)

Halaman 01

| Tanggal | Nomor            |            | Kode Rekening |   |   |    |    | Uraian  | Ref. | Debit (Rp) | Kredit (Rp) |
|---------|------------------|------------|---------------|---|---|----|----|---|------|------------|-------------|
|         | Bukti Penerimaan | Bukti Lain |               |   |   |    |    |   |      |            |             |
| 1       | 2                |            | 3             |   |   |    |    | 4   | 5    | 6          | 7           |
|         |                  |            |               |   |   |    |    |   |      |            |             |
| 7/4/15  |                  |            | 5             | 2 | 2 | 02 | 04 | Belanja Bahan Obat-obatan                           |      | 11.000.000 | -           |
|         |                  |            | 3             | 1 | 2 | 05 | 01 | Estimasi Perubahan SAL                              |      | -          | 11.000.000  |
|         |                  |            |               |   |   |    |    |   |      |            |             |
| 10/4/15 |                  |            | 5             | 2 | 2 | 02 | 04 | Belanja Bahan Obat-obatan                           |      | 500.000    | -           |
|         |                  |            | 3             | 1 | 2 | 05 | 01 | Estimasi Perubahan SAL                              |      | -          | 500.000     |
|         |                  |            |               |   |   |    |    |   |      |            |             |
| 17/4/15 |                  |            | 5             | 2 | 2 | 16 | 04 | Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer |      | 900.000    | -           |
|         |                  |            | 3             | 1 | 2 | 05 | 01 | Estimasi Perubahan SAL                              |      | -          | 900.000     |
|         |                  |            |               |   |   |    |    |   |      |            |             |
| 23/4/15 |                  |            | 5             | 2 | 5 | 07 | 06 | Belanja Modal Aset Lainnya                          |      | 44.000.000 | -           |
|         |                  |            | 3             | 1 | 2 | 05 | 01 | Estimasi Perubahan SAL                              |      | -          | 44.000.000  |
|         |                  |            |               |   |   |    |    |   |      |            |             |



|         |  |  |   |   |   |    |    |   |  |            |            |
|---------|--|--|---|---|---|----|----|---|--|------------|------------|
| 25/4/15 |  |  | 5 | 2 | 5 | 07 | 06 | Belanja Modal Aset Lainnya                            |  | 3.399.999  | -          |
|         |  |  | 3 | 1 | 2 | 05 | 01 | Estimasi Perubahan SAL                                |  | -          | 3.399.999  |
|         |  |  |   |   |   |    |    |   |  |            |            |
| 28/4/15 |  |  | 5 | 1 | 2 | 20 | 01 | Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat |  | 30.000.000 | -          |
|         |  |  | 3 | 1 | 2 | 05 | 01 | Estimasi Perubahan SAL                                |  | -          | 30.000.000 |
|         |  |  |   |   |   |    |    |   |  |            |            |
| JUMLAH  |  |  |   |   |   |    |    |   |  | 89.799.999 | 89.799.999 |

PPKSKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Langkah III : Melakukan Posting ke Buku Besar

Contoh buku besar SKPD : Kas Di Bendahara Penerimaan sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 1.1.1.02.01  
Nama Rekening : Kas di Bendahara Penerimaan  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD :

Halaman 01

| No | Bukti |         | Ref | Uraian                   | Debet (Rp) | Kredit (Rp) |
|----|-------|---------|-----|--------------------------|------------|-------------|
|    | Nomor | Tanggal |     |                          |            |             |
| 1  |       | 3/4/15  | JU  | Piutang Retribusi Daerah | 1.000.000  | -           |
|    |       |         |     |                          |            |             |
|    |       |         |     |                          |            |             |
|    |       |         |     | Jumlah                   | 1.000.000  | -           |
|    |       |         |     | Saldo                    | 1.000.000  | -           |

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Kas Di Bendahara Pengeluaran sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 1.1.1.03.01  
Nama Rekening : Kas di Bendahara Pengeluaran  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD :

Halaman 01

| No | Bukti |         | Ref | Uraian                      | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|---------|-----|-----------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal |     |                             |               |                |
| 1  |       | 10/4/15 | JU  | Persediaan Obat-obatan      | -             | 500.000        |
| 2  |       | 17/4/15 | JU  | Peralatan Personal Komputer | -             | 900.000        |
| 3  |       | 25/4/15 | JU  | Lisensi dan Franchise       | -             | 3.399.999      |
|    |       |         |     | Jumlah                      | -             | 4.799.999      |
|    |       |         |     | Saldo                       | -             | 4.799.999      |

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Piutang Retribusi Daerah sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 1.1.3.02.00  
Nama Rekening : Piutang Retribusi Daerah  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD :

Halaman 01

| No | Bukti |         | Ref | Uraian                           | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|---------|-----|----------------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal |     |                                  |               |                |
| 1  |       | 1/4/15  |     | Pendapatan Retribusi Daerah - LO | 1.000.000     | -              |
| 2  |       | 3/4/15  |     | Kas di Bendahara Pengeluaran     | -             | 1.000.000      |
|    |       |         |     | Jumlah                           | 1.000.000     | 1.000.000      |
|    |       |         |     | Saldo                            | -             | -              |

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Penyisihan Piutang Pajak Daerah  
sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 1.1.5.01.01  
Nama Rekening : Penyisihan Piutang Pajak Daerah  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |          | Ref | Uraian                                | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|----------|-----|---------------------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal  |     |                                       |               |                |
| 1  |       | 31/12/15 | JU  | Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah | -             | 650.000        |
|    |       |          |     |                                       |               |                |
|    |       |          |     |                                       |               |                |
|    |       |          |     | Jumlah                                | -             | 650.000        |
|    |       |          |     | Saldo                                 | -             | 650.000        |

PPK-SKPD Kepala SKPD

(tanda tangan) (tanda tangan)  
(nama lengkap) (nama lengkap)  
NIP..... NIP.....

Contoh buku besar SKPD: Persediaan Alat Tulis Kantor sebagai  
hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 1.1.7.02.04  
Nama Rekening : Persediaan Obat-obatan  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |           | Ref | Uraian                       | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|-----------|-----|------------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal   |     |                              |               |                |
| 1  |       | 5/4/2022  | JU  | Utang Belanja Jasa           | 11.000.000    | -              |
| 2  |       | 10/4/2022 | JU  | Kas di Bendahara Pengeluaran | 500.000       | -              |
|    |       |           |     |                              |               |                |
|    |       |           |     | Jumlah                       | 11.500.000    | -              |
|    |       |           |     | Saldo                        | 11.500.000    | -              |

PA-SKPD Kapaal SKPD

(tanda tangan) (tanda tangan)  
(nama lengkap) (nama lengkap)  
NIP..... NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Persediaan Barang Yang Akan Diserahkan Kepada masyarakat/Pihak Ketiga sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 1.1.7.03.01  
Nama Rekening : Persediaan Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD :

Halaman 01

| No | Bukti |           | Ref | Uraian                                       | Debet (Rp) | Kredit (Rp) |
|----|-------|-----------|-----|--|------------|-------------|
|    | Nomor | Tanggal   |     |  |            |             |
| 1  |       | 27/4/2022 | JU  | Utang Belanja Jasa                           | 30.000.000 | -           |
| 2  |       | 29/4/2022 | JU  | Beban Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan | -          | 30.000.000  |
|    |       |           |     |  |            |             |
|    |       |           |     | Jumlah                                       | 30.000.000 | 30.000.000  |
|    |       |           |     | Saldo  | -          | -           |

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Kendaraan Bermotor Penumpang sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 1.3.2.04.02  
Nama Rekening : Kendaraan Bermotor Penumpang  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD :

Halaman 01

| No | Bukti |          | Ref | Uraian          | Debet (Rp) | Kredit (Rp) |
|----|-------|----------|-----|-----------------|------------|-------------|
|    | Nomor | Tanggal  |     |                 |            |             |
| 1  |       | 26/04/15 | JU  | Mutasi ke BPKAD | -          | 200.000.000 |
|    |       |          |     |                 |            |             |
|    |       |          |     |                 |            |             |
|    |       |          |     | Jumlah          | -          | 200.000.000 |
|    |       |          |     | Saldo           | -          | 200.000.000 |

PPK-SKPKD

Kepala SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPD: Personal Komputer sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 1.3.2.16.02  
Nama Rekening : Personal Komputer  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |          | Ref | Uraian                | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|----------|-----|-----------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal  |     |                       |               |                |
| 1  |       | 31/04/15 | JU  | Pengajuan penghapusan | -             | 25.000.000     |
|    |       |          |     |                       |               |                |
|    |       |          |     |                       |               |                |
|    |       |          |     | Jumlah                | -             | 25.000.000     |
|    |       |          |     | Saldo                 | -             | 25.000.000     |

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Peralatan Personal Komputer sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 1.3.2.16.05  
Nama Rekening : Peralatan Personal Komputer  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |          | Ref | Uraian                       | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|----------|-----|------------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal  |     |                              |               |                |
| 1  |       | 17/04/15 | JU  | Kas di Bendahara Pengeluaran | 900.000       | -              |
|    |       |          |     |                              |               |                |
|    |       |          |     |                              |               |                |
|    |       |          |     | Jumlah                       | 900.000       | -              |
|    |       |          |     | Saldo                        | 900.000       | -              |

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Alat Kedokteran Gigi sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 1.3.2.21.02  
Nama Rekening : Alat Kedokteran Gigi  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |          | Ref | Uraian                          | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|----------|-----|---------------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal  |     |                                 |               |                |
| 1  |       | 12/04/15 | JU  | Utang Modal Peralatan dan Mesin | 55.000.000    | -              |
|    |       |          |     |                                 |               |                |
|    |       |          |     |                                 |               |                |
|    |       |          |     | Jumlah                          | 55.000.000    | -              |
|    |       |          |     | Saldo                           | 55.000.000    | -              |

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Konstruksi dalam Pengerjaan sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 1.3.6.00.00  
Nama Rekening : Konstruksi dalam Pengerjaan  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |          | Ref | Uraian                                  | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|----------|-----|---|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal  |     |   |               |                |
| 1  |       | 31/04/15 | JU  | Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 500.000.000   | -              |
|    |       |          |     |   |               |                |
|    |       |          |     |   |               |                |
|    |       |          |     | Jumlah                                  | 500.000.000   | -              |
|    |       |          |     | Saldo                                   | 500.000.000   | -              |

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 1.3.7.01.04  
Nama Rekening : Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD :

Halaman 01

| No | Bukti |         | Ref | Uraian                                       | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|---------|-----|--|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal |     |  |               |                |
| 1  |       | 26/4/15 | JU  | Mutasi Kendaraan Bermotor Penumpang ke BPKAD | 160.000.000   | -              |
|    |       |         |     |  |               |                |
|    |       |         |     | Jumlah                                       | 160.000.000   | -              |
|    |       |         |     | Saldo  | 160.000.000   | -              |

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Akumulasi Penyusutan Alat Kantor sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 1.3.7.01.14  
Nama Rekening : Akumulasi Penyusutan Alat Kantor  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD :

Halaman 01

| No | Bukti |          | Ref | Uraian                             | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|----------|-----|------------------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal  |     |                                    |               |                |
| 1  |       | 31/12/15 | JU  | Penyesuaian penyusutan alat kantor | -             | 10.000.000     |
|    |       |          |     |                                    |               |                |
|    |       |          |     | Jumlah                             | -             | 10.000.000     |
|    |       |          |     | Saldo                              | -             | 10.000.000     |

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 1.3.7.01.16  
Nama Rekening : Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |          | Ref | Uraian  | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|----------|-----|---|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal  |     |   |               |                |
| 1  |       | 31/12/15 | JU  | Penghapusan Personal Komputer berdasarkan SK Bupati | 20.000.000    | -              |
|    |       |          |     |   |               |                |
|    |       |          |     | Jumlah  | 20.000.000    | -              |
|    |       |          |     | Saldo   | 20.000.000    | -              |

PPK-SKPD Kepala SKPD

(tanda tangan) (tanda tangan)  
(nama lengkap) (nama lengkap)  
NIP..... NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 1.3.7.02.01  
Nama Rekening : Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |          | Ref | Uraian  | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|----------|-----|---|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal  |     |   |               |                |
| 1  |       | 31/12/15 | JU  | Penyesuaian Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja |               | 250.000.000    |
|    |       |          |     |   |               |                |
|    |       |          |     | Jumlah  |               | 250.000.000    |
|    |       |          |     | Saldo   |               | 250.000.000    |

PPK-SKPD Kepala SKPD

(tanda tangan) (tanda tangan)  
(nama lengkap) (nama lengkap)  
NIP..... NIP.....



Contoh buku besar SKPD : Lisensi dan Franchise sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 1.5.3.02.02  
Nama Rekening : Lisensi dan Franchise  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |         | Ref | Uraian                       | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|---------|-----|------------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal |     |                              |               |                |
| 1  |       | 25/4/15 | JU  | Kas di Bendahara Pengeluaran | 3.399.999     | -              |
|    |       |         |     |                              |               |                |
|    |       |         |     |                              |               |                |
|    |       |         |     | Jumlah                       | 3.399.999     | -              |
|    |       |         |     | Saldo                        | 3.399.999     | -              |

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Aset Tak Berwujud Lainnya sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 1.5.3.05.01  
Nama Rekening : Software  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |         | Ref | Uraian                           | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|---------|-----|----------------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal |     |                                  |               |                |
| 1  |       | 20/4/15 | JU  | Utang Belanja Modal Aset Lainnya | 44.000.000    | -              |
|    |       |         |     |                                  |               |                |
|    |       |         |     |                                  |               |                |
|    |       |         |     | Jumlah                           | 44.000.000    | -              |
|    |       |         |     | Saldo                            | 44.000.000    | -              |

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPD: Akumulasi Amortisasi Lisensi dan Franchise sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 1.5.3.06.02  
Nama Rekening : Akumulasi Amortisasi Lisensi dan Franchise  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD :

Halaman 01

| No | Bukti |          | Ref | Uraian                 | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|----------|-----|------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal  |     |                        |               |                |
| 1  |       | 31/12/15 | JU  | Penyesuaian amortisasi | -             | 509.999        |
|    |       |          |     |                        |               |                |
|    |       |          |     |                        |               |                |
|    |       |          |     | Jumlah                 | -             | 509.999        |
|    |       |          |     | Saldo                  | -             | 509.999        |

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 1.5.3.06.05  
Nama Rekening : Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD :

Halaman 01

| No | Bukti |          | Ref | Uraian                 | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|----------|-----|------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal  |     |                        |               |                |
| 1  |       | 31/12/15 | JU  | Penyesuaian Amortisasi | -             | 6.600.000      |
|    |       |          |     |                        |               |                |
|    |       |          |     |                        |               |                |
|    |       |          |     | Jumlah                 | -             | 6.600.000      |
|    |       |          |     | Saldo                  | -             | 6.600.000      |

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Aset Lainnya sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 1.5.4.01.01  
Nama Rekening : Aset Lainnya  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |          | Ref | Uraian  | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|----------|-----|---|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal  |     |   |               |                |
| 1  |       | 30/4/15  | JU  | Personal Komputer                                   | 25.000.000    | -              |
| 2  |       | 31/12/15 | JU  | Penghapusan Personal Komputer berdasarkan SK Bupati | -             | 25.000.000     |
|    |       |          |     |   |               |                |
|    |       |          |     | Jumlah  | 25.000.000    | 25.000.000     |
|    |       |          |     | Saldo   | -             | -              |

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Utang Belanja Jasa sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 2.1.5.02.01  
Nama Rekening : Utang Belanja Jasa  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |         | Ref | Uraian   | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|---------|-----|--|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal |     |  |               |                |
| 1  |       | 5/4/15  | JU  | Persediaan Obat-obatan   | -             | 11.000.000     |
| 2  |       | 7/4/15  | JU  | Penerimaan RK PPKD   | 11.000.000    | -              |
| 3  |       | 27/4/15 | JU  | Persediaan Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga | -             | 30.000.000     |
|    |       | 28/4/15 | JU  | Penerimaan RK PPKD   | 30.000.000    | -              |
|    |       |         |     |  |               |                |
|    |       |         |     | Jumlah   | 41.000.000    | 41.000.000     |
|    |       |         |     | Saldo  | -             | -              |

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 2.1.5.03.03  
Nama Rekening : Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |         | Ref | Uraian                      | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|---------|-----|-----------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal |     |                             |               |                |
| 1  |       | 31/4/15 | JU  | Konstruksi dalam Pengerjaan | -             | 500.000.000    |
| 2  |       |         |     |                             |               |                |
|    |       |         |     |                             |               |                |
|    |       |         |     | Jumlah                      | -             | 500.000.000    |
|    |       |         |     | Saldo                       | -             | 500.000.000    |

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Utang Belanja Modal Peralatan dan mesin sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 2.1.5.03.02  
Nama Rekening : Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |         | Ref | Uraian               | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|---------|-----|----------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal |     |                      |               |                |
| 1  |       | 12/4/15 | JU  | Alat Kedokteran Gigi | -             | 55.000.000     |
| 2  |       | 15/4/15 | JU  | Penerimaan RK PPKD   | 55.000.000    | -              |
|    |       |         |     |                      |               |                |
|    |       |         |     | Jumlah               | 55.000.000    | 55.000.000     |
|    |       |         |     | Saldo                | -             | -              |

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Utang Belanja Modal Aset Lainnya  
sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 2.1.5.03.06  
Nama Rekening : Utang Belanja Modal Aset Lainnya  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD :

Halaman 01

| No | Bukti |         | Ref | Uraian             | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|---------|-----|--------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal |     |                    |               |                |
| 1  |       | 20/4/15 | JU  | Software           | -             | 44.000.000     |
| 2  |       | 23/4/15 | JU  | Penerimaan RK PPKD | 44.000.000    | -              |
|    |       |         |     |                    |               |                |
|    |       |         |     | Jumlah             | 44.000.000    | 44.000.000     |
|    |       |         |     | Saldo              | -             | -              |

PPD-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Estimasi Perubahan SAL sebagai hasil  
posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 3.1.2.05.01  
Nama Rekening : Estimasi Perubahan SAL  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD :

Halaman 01

| No | Bukti |          | Ref | Uraian  | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|----------|-----|---|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal  |     |   |               |                |
| 1  |       | 03/04/15 | JM  | Pendapatan Retribusi Daerah                           | 1.000.000     | -              |
| 2  |       | 07/4/15  | JK  | Belanja bahan obat-obatan                             | -             | 11.000.000     |
| 3  |       | 10/4/15  | JK  | Belanja bahan obat-obatan                             | -             | 500.000        |
| 4  |       | 17/4/15  | JK  | Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer   | -             | 900.000        |
| 5  |       | 23/4/15  | JK  | Belanja Modal Aset Lainnya                            | -             | 44.000.000     |
| 6  |       | 25/4/15  | JK  | Belanja Modal Aset Lainnya                            | -             | 3.399.999      |
| 7  |       | 28/4/15  | JK  | Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat | -             | 30.000.000     |
|    |       |          |     |   |               |                |
|    |       |          |     | Jumlah  | 1.000.000     | 89.799.999     |
|    |       |          |     | Saldo   | -             | 88.799.999     |

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Pendapatan Retribusi Daerah sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya:

**KABUPATEN KUNINGAN**  
**BUKU BESAR**

**SKPD** : SKPD Kabupaten Kuningan  
**Kode Rekening** : 4.2.1.00.00  
**Nama Rekening** : Pendapatan Retribusi Daerah-LRA  
**Pagu APBD** :  
**Pagu perubahan APBD** : **Halaman 01**

| No | Bukti |           | Ref | Uraian                 | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp)   |
|----|-------|-----------|-----|------------------------|---------------|------------------|
|    | Nomor | Tanggal   |     |                        |               |                  |
| 1  |       | 3/04/2022 | JM  | Estimasi Perubahan SAL | -             | 1.000.000        |
|    |       |           |     |                        |               |                  |
|    |       |           |     | <b>Jumlah</b>          | -             | <b>1.000.000</b> |
|    |       |           |     | <b>Saldo</b>           | -             | <b>1.000.000</b> |

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Alat Tulis Kantor sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya:

**KABUPATEN KUNINGAN**  
**BUKU BESAR**

**SKPD** : SKPD Kabupaten Kuningan  
**Kode Rekening** : 5.2.2.02.04  
**Nama Rekening** : Belanja Bahan Obat-obatan  
**Pagu APBD** :  
**Pagu perubahan APBD** : **Halaman 01**

| No | Bukti |            | Ref | Uraian                 | Debet<br>(Rp)     | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|------------------------|-------------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |                        |                   |                |
| 1  |       | 7/04/2022  | JK  | Estimasi Perubahan SAL | 11.000.000        | -              |
| 2  |       | 10/04/2022 | JK  | Estimasi Perubahan SAL | 500.000           | -              |
|    |       |            |     |                        |                   |                |
|    |       |            |     | <b>Jumlah</b>          | <b>11.500.000</b> | -              |
|    |       |            |     | <b>Saldo</b>           | <b>11.500.000</b> | -              |

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 5.2.2.23.01  
Nama Rekening : Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD :

Halaman 01

| No | Bukti |          | Ref | Uraian                 | Debet (Rp) | Kredit (Rp) |
|----|-------|----------|-----|------------------------|------------|-------------|
|    | Nomor | Tanggal  |     |                        |            |             |
| 1  |       | 28/04/15 | JK  | Estimasi Perubahan SAL | 30.000.000 | -           |
|    |       |          |     |                        |            |             |
|    |       |          |     | Jumlah                 | 30.000.000 | -           |
|    |       |          |     | Saldo                  | 30.000.000 | -           |

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPKD : BPKD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 5.2.2.16.04  
Nama Rekening : Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD :

Halaman 01

| No | Bukti |          | Ref | Uraian                 | Debet (Rp) | Kredit (Rp) |
|----|-------|----------|-----|------------------------|------------|-------------|
|    | Nomor | Tanggal  |     |                        |            |             |
| 1  |       | 17/04/15 | JK  | Estimasi Perubahan SAL | 900.000    | -           |
|    |       |          |     |                        |            |             |
|    |       |          |     | Jumlah                 | 900.000    | -           |
|    |       |          |     | Saldo                  | 900.000    | -           |

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKP D: Belanja Modal Aset Lainnya sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 5.2.5.07.06  
Nama Rekening : Belanja Modal Aset Lainnya  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |          | Ref | Uraian                 | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|----------|-----|------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal  |     |                        |               |                |
| 1  |       | 23/04/15 | JK  | Estimasi Perubahan SAL | 44.000.000    | -              |
| 2  |       | 25/04/15 | JK  | Estimasi Perubahan SAL | 3.399.999     |                |
|    |       |          |     |                        |               |                |
|    |       |          |     | Jumlah                 | 47.399.999    | -              |
|    |       |          |     | Saldo                  | 47.399.999    | -              |

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Penerimaan RK PPKD sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 7.1.8.99.99  
Nama Rekening : Penerimaan RK PPKD  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |          | Ref | Uraian                                  | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|----------|-----|---|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal  |     |   |               |                |
| 1  |       | 07/04/15 | JU  | Utang Belanja Jasa                      | -             | 11.000.000     |
| 2  |       | 15/04/15 | JU  | Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin | -             | 55.000.000     |
| 2  |       | 23/4/15  | JU  | Utang Belanja Modal Aset Lainnya        | -             | 44.000.000     |
| 3  |       | 28/4/15  | JU  | Utang Belanja Jasa                      | -             | 30.000.000     |
|    |       |          |     |   |               |                |
|    |       |          |     | Jumlah                                  | -             | 140.000.000    |
|    |       |          |     | Saldo                                   | -             | 140.000.000    |

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....



Contoh buku besar SKPD : Pengeluaran RK SKPD khusus di SKPKD sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 7.2.8.99.98  
Nama Rekening : Pengeluaran RK SKPD khusus di SKPKD  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |          | Ref | Uraian  | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|----------|-----|---|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal  |     |   |               |                |
| 1  |       | 26/04/15 | JU  | Mutasi Kendaraan Bermotor Penumpang ke SKPD berdasarkan SK Bupati ttg Penggunaan Aset | 40.000.000    | -              |
| 2  |       | 31/12/15 | JU  | Penghapusan Personal Komputer berdasarkan SK Bupati                                   | 5.000.000     | -              |
|    |       |          |     |   |               |                |
|    |       |          |     | Jumlah  | 45.000.000    | -              |
|    |       |          |     | Saldo   | 45.000.000    | -              |

|                |                |
|----------------|----------------|
| PPK-SKPD       | Kepala SKPD    |
| (tanda tangan) | (tanda tangan) |
| (nama lengkap) | (nama lengkap) |
| NIP.....       | NIP.....       |

Contoh buku besar SKPD : Pendapatan Retribusi Daerah - LO sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 8.1.2.00.00  
Nama Rekening : Pendapatan Retribusi Daerah - LO  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |         | Ref | Uraian                   | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|---------|-----|--------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal |     |                          |               |                |
| 1  |       | 1/04/15 | JU  | Piutang Retribusi Daerah | -             | 1.000.000      |
|    |       |         |     |                          |               |                |
|    |       |         |     | Jumlah                   | -             | 1.000.000      |
|    |       |         |     | Saldo                    | -             | 1.000.000      |

|                |                |
|----------------|----------------|
| PPK-SKPD       | Kepala SKPD    |
| (tanda tangan) | (tanda tangan) |
| (nama lengkap) | (nama lengkap) |
| NIP.....       | NIP.....       |

Contoh buku besar SKPD : Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 9.1.5.05.01  
Nama Rekening : Beban Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |          | Ref | Uraian  | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|----------|-----|---|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal  |     |   |               |                |
| 1  |       | 29/04/15 | JU  | Persediaan Barang Yang<br>Diserahkan Kepada Masyarakat/<br>Pihak Ketiga | 30.000.000    | -              |
|    |       |          |     |   |               |                |
|    |       |          |     | Jumlah  | 30.000.000    | -              |
|    |       |          |     | Saldo   | 30.000.000    | -              |

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Beban Penyusutan Alat Kantor sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 9.1.7.01.14  
Nama Rekening : Beban Penyusutan Alat Kantor  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |          | Ref | Uraian                                | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|----------|-----|---------------------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal  |     |                                       |               |                |
| 1  |       | 31/12/15 | JU  | Penyesuaian Penyusutan Alat<br>Kantor | 10.000.000    | -              |
|    |       |          |     |                                       |               |                |
|    |       |          |     | Jumlah                                | 1.000.000     | -              |
|    |       |          |     | Saldo                                 | 1.000.000     | -              |

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 9.1.7.02.01  
Nama Rekening : Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |          | Ref | Uraian   | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|----------|-----|--|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal  |     |  |               |                |
| 1  |       | 31/12/15 | JU  | Penyesuaian Penyusutan<br>Bangunan Gedung Tempat Kerja | 250.000.000   | -              |
|    |       |          |     |  |               |                |
|    |       |          |     | Jumlah   | 250.000.000   | -              |
|    |       |          |     | Saldo  | 250.000.000   | -              |

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Beban Amortisasi Lisensi dan Franchise sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 9.1.7.04.02  
Nama Rekening : Beban Amortisasi Lisensi dan Franchise  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |          | Ref | Uraian                 | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|----------|-----|------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal  |     |                        |               |                |
| 1  |       | 31/12/15 | JU  | Penyesuaian Amortisasi | 509.999       | -              |
|    |       |          |     |                        |               |                |
|    |       |          |     | Jumlah                 | 509.999       | -              |
|    |       |          |     | Saldo                  | 509.999       | -              |

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 9.1.7.04.05  
Nama Rekening : Beban Amortisasi Lisensi dan Franchise  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |          | Ref | Uraian                 | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|----------|-----|------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal  |     |                        |               |                |
| 1  |       | 31/12/15 | JU  | Penyesuaian Amortisasi | 6.600.000     | -              |
|    |       |          |     |                        |               |                |
|    |       |          |     | Jumlah                 | 6.600.000     | -              |
|    |       |          |     | Saldo                  | 6.600.000     | -              |

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah kepada Organisasi Kemasyarakatan sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 9.1.8.01.01  
Nama Rekening : Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |          | Ref | Uraian                          | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|----------|-----|---------------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal  |     |                                 |               |                |
| 1  |       | 31/12/15 | JU  | Penyisihan Piutang Pajak Daerah | 650.000       | -              |
|    |       |          |     |                                 |               |                |
|    |       |          |     | Jumlah                          | 650.000       | -              |
|    |       |          |     | Saldo                           | 650.000       | -              |

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

**Langkah IV : Menyusun Neraca Saldo dan Laporan Keuangan**

Setelah melakukan posting seluruh pencatatan dalam buku besar maka kemudian Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD membuat neraca saldo sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Penyusunan neraca saldo oleh Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD dilakukan secara triwulanan. Neraca saldo disusun dengan cara memindahkan saldo-saldo yang ada di tiap buku besar ke dalam Neraca Saldo. Contoh Neraca Saldo dari hasil pencatatan dan posting contoh transaksi keuangan diatas adalah sebagai berikut :

**KABUPATEN KUNINGAN**  
**NERACA SALDO**  
**PER TANGGAL 31 Desember 2022**

**SKPD** : SKPD Kabupaten Kuningan

| Kode Rekening |   |   |    |    | Uraian  | Jumlah      |             |
|---------------|---|---|----|----|---|-------------|-------------|
|               |   |   |    |    |   | Debit       | Kredit      |
| 1             |   |   |    |    | 2   | 3           | 4           |
| 1             | 1 | 1 | 02 | 01 | Kas di Bendahara Penerimaan   | 1.000.000   | -           |
| 1             | 1 | 1 | 03 | 01 | Kas di Bendahara Pengeluaran  | -           | 4.799.999   |
| 1             | 1 | 5 | 01 | 01 | Penyisihan Piutang Pajak Daerah                                     | -           | 650.000     |
| 1             | 1 | 7 | 02 | 04 | Persediaan Obat-obatan  | 11.500.000  | -           |
| 1             | 3 | 2 | 04 | 02 | Kendaraan Bermotor Penumpang  |             | 200.000.000 |
| 1             | 3 | 2 | 16 | 02 | Personal Komputer   |             | 25.000.000  |
| 1             | 3 | 2 | 16 | 02 | Peralatan Personal Komputer   | 900.000     |             |
| 1             | 3 | 2 | 21 | 02 | Alat Kedokteran Gigi  | 55.000.000  |             |
| 1             | 3 | 6 | 00 | 00 | Konstruksi dalam Pengerjaan   | 500.000.000 |             |
| 1             | 3 | 7 | 01 | 04 | Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor                   | 160.000.000 |             |
| 1             | 3 | 7 | 01 | 14 | Akumulasi Penyusutan Alat Kantor                                    |             | 10.000.000  |
| 1             | 3 | 7 | 01 | 16 | Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer                             | 20.000.000  |             |
| 1             | 3 | 7 | 02 | 01 | Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja                   |             | 250.000.000 |
| 1             | 5 | 3 | 02 | 02 | Lisensi dan Franchise   | 3.399.999   |             |
| 1             | 5 | 3 | 05 | 01 | Software  | 44.000.000  |             |
| 1             | 5 | 3 | 06 | 02 | Akumulasi Amortisasi Lisensi dan Franchise                          |             | 509.999     |
| 1             | 5 | 3 | 06 | 05 | Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya                      |             | 6.600.000   |
| 2             | 1 | 5 | 03 | 03 | Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan                             |             | 500.000.000 |
| 3             | 1 | 2 | 05 | 01 | Estimasi Perubahan SAL  |             | 88.799.999  |
| 4             | 2 | 1 | 00 | 00 | Pendapatan Retribusi Daerah-LRA                                     |             | 1.000.000   |
| 5             | 2 | 2 | 02 | 04 | Belanja Bahan Obat-obatan   | 11.500.000  |             |
| 5             | 2 | 2 | 23 | 01 | Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga | 30.000.000  |             |
| 5             | 2 | 2 | 16 | 04 | Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer                 | 900.000     |             |

|        |   |   |    |    |   |               |               |
|--------|---|---|----|----|---|---------------|---------------|
| 5      | 2 | 5 | 07 | 06 | Belanja Modal Aset Lainnya                    | 47.399.999    |               |
| 7      | 1 | 8 | 99 | 99 | Penerimaan RK PPKD                            |               | 140.000.000   |
| 7      | 2 | 8 | 99 | 98 | Pengeluaran RK SKPD khusus di SKPKD           | 45.000.000    |               |
| 8      | 1 | 2 | 00 | 00 | Pendapatan Retribusi Daerah - LO              |               | 1.000.000     |
| 9      | 1 | 5 | 05 | 01 | Beban Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan  | 30.000.000    |               |
| 9      | 1 | 7 | 01 | 14 | Beban Penyusutan Alat Kantor                  | 10.000.000    |               |
| 9      | 1 | 7 | 02 | 01 | Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja | 250.000.000   |               |
| 9      | 1 | 7 | 04 | 02 | Beban Amortisasi Lisensi dan Franchise        | 509.999       |               |
| 9      | 1 | 7 | 04 | 05 | Beban Amortisasi Lisensi dan Franchise        | 6.600.000     |               |
| 9      | 1 | 8 | 01 | 01 | Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah         | 650.000       |               |
|        |   |   |    |    |   |               |               |
| Jumlah |   |   |    |    |   | 1.228.359.997 | 1.228.359.997 |

PPK-SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

## **SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI KEWAJIBAN DI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)**

Bagian ini menjelaskan Sistem dan Prosedur Akuntansi Kewajiban di Pemerintah Kabupaten Kuningan untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mencatat transaksi kewajiban SKPD.

### **KEBIJAKAN UMUM**

Prosedur akuntansi kewajiban di SKPD di Pemerintah Kabupaten Kuningan meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas kewajiban kepada penyedia barang dan/atau jasa dengan mekanisme LS serta perhitungan fihak ketiga dengan mekanisme UP/GU/TU. Kewajiban SKPD ini bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan. Jenis transaksi atas kewajiban tersebut secara garis besar dapat digolongkan dalam 2 (dua) kelompok besar transaksi, yaitu :

1. Transaksi yang Menambah Nilai Kewajiban

Transaksi yang menambah nilai kewajiban ini adalah transaksi yang mengakibatkan terjadinya penambahan nilai kewajiban dalam satuan moneter (nilai rupiah) baik yang diakibatkan karena pengakuan kewajiban atas :

- a. Penyelesaian pekerjaan penyedia barang dan/atau jasa yang sudah diserahterimakan kepada pejabat pembuat komitmen atau pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan mekanisme LS;
- b. Perhitungan fihak ketiga (PFK) pada pembayaran belanja mekanisme UP/GU/TU; dan
- c. Pendapatan SKPD yang bersifat dibayar dimuka (*defferal*) seperti pendapatan dari sewa aset SKPD.

## 2. Transaksi yang Mengurangi Nilai Kewajiban

Transaksi yang mengurangi nilai kewajiban ini adalah transaksi yang mengakibatkan terjadinya pengurangan nilai kewajiban dalam satuan moneter (nilai rupiah) baik yang diakibatkan karena:

- a. Pelunasan kewajiban atas penyelesaian pekerjaan penyedia barang dan/atau jasa yang sudah diserahterimakan kepada pejabat pembuat komitmen atau pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan mekanisme LS;
- b. Pelunasan kewajiban atas perhitungan pihak ketiga (PFK) pada pembayaran belanja mekanisme UP/GU/TU; dan
- c. Pengakuan bagian pendapatan atas Pendapatan SKPD yang bersifat dibayar dimuka (*defferal*) seperti pendapatan dari sewa aset SKPD yang disesuaikan pada akhir periode tahun pelaporan.

Jadi sebenarnya pencatatan penambahan kewajiban merupakan proses awal dari sistem dan prosedur akuntansi beban dan belanja daerah di SKPD. Sistem dan prosedur akuntansi ini disusun berdasarkan kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

### **PIHAK-PIHAK TERKAIT**

Berbagai pihak/fungsi yang terkait dalam proses akuntansi kewajiban SKPD beserta tugas-tugasnya adalah :

#### 1. Bendahara Penerimaan di SKPD

Dalam pelaksanaan prosedur ini, Bendahara Penerimaan SKPD memiliki tugas menyiapkan dokumen-dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan akuntansi pendapatan SKPD yang terkait pendapatan diterima dimuka (*deferral*) seperti STS, Bukti Setoran Bank, Bukti Transfer Bank, dan Nota Kredit untuk dicatat Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD.



2. Bendahara Pengeluaran di SKPD

Dalam pelaksanaan prosedur ini, Bendahara SKPD memiliki tugas menyiapkan dokumen-dokumen atas transaksi yang terkait kewajiban di SKPD untuk diserahkan kepada tenaga akuntansi di PPK-SKPD atas :

- a. Proses pelaksanaan akuntansi belanja UP/GU/TU berupa bukti potong, bukti pungut, dan bukti setor PFK dari bukti belanja yang sah di SKPD; dan
- b. Proses pelaksanaan akuntansi belanja LS SKPD seperti SP2D LS untuk perolehan aset di SKPD.

2. Pengurus Barang di SKPD

Dalam pelaksanaan prosedur ini, Pengurus Barang SKPD memiliki tugas menyiapkan dokumen-dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan akuntansi kewajiban SKPD seperti Berita Acara Serah Terima dan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan untuk dicatat Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD; dan

3. Tenaga Akuntansi di Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)

Dalam pelaksanaan prosedur ini, Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menerima bukti-bukti transaksi dan memeriksa kebenaran dari bukti transaksi terkait kewajiban di SKPD seperti Berita Acara Serah Terima, Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan, bukti potong dan bukti pungut, serta bukti setor PFK dan SP2D LS;
- b. Mencatat transaksi-transaksi kewajiban berdasarkan bukti-bukti yang terkait yang berada dalam kewenangan SKPD-nya;
- c. Memposting jurnal-jurnal kewajiban ke dalam buku besarnya masing-masing;
- d. Menyusun neraca saldo yang terkait akuntansi beban dan belanja untuk persiapan penyusunan laporan keuangan,

yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan; dan

- e. Menyerahkan buku jurnal, buku besar dan neraca saldo kepada PPK-SKPD untuk diperiksa dan ditandatangani.

- 4. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) : Sekretaris Badan/ Dinas atau Koordinator/ Kepala Sub Bagian Keuangan (Sekretariat Daerah, Badan, Kantor, Dinas, Rumah Sakit Umum Daerah Linggarjati, Kecamatan, dan Kelurahan), Kepala Bagian Keuangan (Sekretariat DPRD dan Rumah Sakit Umum Daerah 45).

Dalam pelaksanaan prosedur ini, PPK – SKPD memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Bertanggungjawab atas sistem akuntansi kewajiban SKPD yang dipimpinnya;
- b. Memeriksa dan menandatangani hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Tenaga Akuntansi PPK-SKPD terkait akuntansi beban dan belanja SKPD secara triwulanan; dan
- c. Menyerahkan Buku Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo SKPD yang mencatat transaksi pendapatan SKPD setiap triwulan kepada Pengguna Anggaran untuk disetujui.

- 5. Pengguna Anggaran / Kepala SKPD : Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, Kepala Satuan, Camat, Lurah, Asisten Administrasi, Sekretaris DPRD, dan Direktur.

Dalam pelaksanaan prosedur ini, Pengguna Anggaran memiliki tugas menyetujui Buku Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo yang diserahkan PPK-SKPD setiap triwulan.

## **DOKUMEN TERKAIT**

- 1. Berita Acara Serah Terima (BAST) adalah dokumen yang mengakui terjadinya penyerahan pekerjaan baik berupa barang maupun jasa dari penyedia jasa kepada pemberi pekerjaan;

2. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan, adalah dokumen sumber untuk pengakuan aset tetap konstruksi dalam pekerjaan.
3. Bukti potong dan pungut PPN dan PPh, adalah bukti bendahara pengeluaran SKPD telah memotong dan memungut PPN dan PPh dari penyerahan barang dan/atau jasa dari penyedia kepada SKPD;
4. Bukti setor PPN dan PPh, adalah bukti bendahara SKPD telah menyetor PPN dan PPh yang telah dipotong dan dipungut kepada Kas Negara;
5. Surat Perintah Pencairan Dana Langsung yang selanjutnya disebut (SP2D-LS) adalah dokumen yang digunakan sebagai pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM –LS;
6. Surat Tanda Setoran selanjutnya disebut STS adalah bukti yang diperoleh setelah melakukan penyetoran uang ke Kas Daerah;
7. Bukti Setoran Bank merupakan formulir bukti melakukan setoran ke Rekening Umum Kas Daerah;
8. Bukti Transfer merupakan formulir bukti melakukan transfer dari suatu rekening ke Rekening Umum Kas Daerah;
9. Nota Kredit merupakan bukti transaksi penerimaan uang di Rekening Umum Kas Daerah; dan
10. Surat Keputusan Bupati tentang Hibah, adalah dokumen yang diterbitkan Bupati untuk menentukan penerima hibah, alamat penerima hibah, jenis hibah dan nilai hibah.

#### **BUKU DAN ATAU FORMULIR YANG DIGUNAKAN**

Buku dan atau formulir yang digunakan dalam pelaksanaan prosedur akuntansi kewajiban di Satuan Kerja Perangkat Daerah terdiri dari :

1. Buku Jurnal Umum (JU)

Merupakan buku jurnal yang digunakan untuk melakukan pencatatan akuntansi SKPD atas transaksi basis akrual pada

kewajiban terkait penyusunan LO dan Neraca seperti utang PFK dan utang belanja.

2. Buku Jurnal Penerimaan Kas (JM)

Merupakan buku jurnal yang digunakan untuk melakukan pencatatan akuntansi atas transaksi penerimaan kas yang berasal dari transaksi pendapatan diterima dimuka (*deferral*). Pada umumnya buku jurnal penerimaan kas digunakan untuk mencatat transaksi basis kas terkait penyusunan LRA dan LAK.

3. Buku Jurnal Pengeluaran Kas (JK)

Merupakan buku jurnal yang digunakan untuk melakukan pencatatan akuntansi atas transaksi pengeluaran kas untuk belanja sebagai pelunasan kewajiban baik dengan mekanisme uang persediaan (belanja UP/GU/TU) maupun langsung (LS). Pada umumnya buku jurnal penerimaan kas digunakan untuk mencatat transaksi basis kas terkait penyusunan LRA dan LAK.

4. Buku Besar (BB)

Merupakan buku yang digunakan untuk menampung pencatatan hasil posting transaksi dari buku jurnal. Buku besar ini merupakan pencatatan akuntansi atas seluruh transaksi untuk suatu rekening/akun per jenis atau obyek. Jadi setiap rekening/akun per jenis atau objek mempunyai buku besar tersendiri.

5. Buku Besar Pembantu (BP)

Buku besar dapat dilengkapi dengan buku besar pembantu sebagai alat uji silang dan kelengkapan informasi rekening/akun tertentu. Buku besar pembantu berisi rincian akun (rincian obyek) yang telah dicatat dalam buku besar. Jika dirasakan informasi dalam buku besar sudah mencukupi maka buku besar pembantu tidak perlu dibuat lagi.

6. Neraca Saldo (NS)

Merupakan formulir yang mencatat nilai saldo setiap rekening/akun per rincian objek sehingga diketahui jumlah total dari seluruh rekening/akun.

## **KERANGKA SISTEM**

Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD menerima bukti-bukti yang terkait dengan kewajiban dari pengurus barang/bendahara penerimaan SKPD/bendahara pengeluaran SKPD. Bukti tersebut bisa menunjukkan adanya penambahan kewajiban maupun pengurangannya. Bukti-bukti yang menunjukkan adanya penambahan kewajiban dapat berupa bukti transaksi seperti :

1. Berita Acara Serah Terima (BAST);
2. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan;
3. Bukti Potong dan Bukti Pungut PPN dan PPh; dan
4. STS, Bukti Setoran Bank, Bukti Transfer Bank, dan Nota Kredit

Bukti-bukti yang menunjukkan adanya pengurangan kewajiban dapat berupa bukti transaksi seperti :

1. SP2D LS; dan
2. Bukti setor PFK.

Berdasarkan perolehan bukti-bukti transaksi tersebut maka Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD membuat bukti memorial. Bentuk formulir atau format dari Bukti memorial dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan atau oleh masing-masing SKPD sebagai contoh :

| <b>PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN</b><br><b>Bukti Memorial</b> |   |  |               |
|---|---|--|---------------|
| Satuan Kerja  | : | SKPD Kabupaten Kuningan                                      |               |
| Keterangan Transaksi  | : | Pencatatan pengakuan penerimaan gedung di SKPD               |               |
| Tanggal bukti transaksi                                       | : | 7 Maret 2022   |               |
| Nomor Bukti Transaksi   | : | xx.xx.x.xx.xx  |               |
| Nama Bukti Transaksi  | : | BAST   |               |
| Kode Rekening/Akun  |   | Uraian   |               |
| 1.3.3.01.01   |   | Bangunan Gedung Kantor                                       | 1.000.000.000 |
| 2.1.5.03.03   |   | Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan                      | -             |
|   |   |  | 1.000.000.000 |
|   |   |  |               |
|   |   |  |               |
|   |   |  |               |
| PPK-SKPD<br>(tanda tangan)<br>(nama lengkap)<br>NIP .....     |   | Kepala SKPD<br>(tanda tangan)<br>(nama lengkap)<br>NIP ..... |               |

Pada saat bukti transaksi tersebut telah diterima oleh Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD untuk kemudian dibuatkan bukti memorialnya maka Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD selanjutnya melakukan pencatatan akuntansi dalam buku jurnal umum. Setelah seluruh transaksi dicatat dalam buku jurnal maka Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD kemudian melakukan posting ke buku besar paling lambat setiap triwulan atau setelah seluruh transaksi pendapatan per triwulan dicatat dalam buku jurnal.

Setelah posting dari buku jurnal ke buku besar selesai dilakukan maka kemudian Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD menyusun Neraca Saldo sebagai dasar pembuatan Laporan Keuangan untuk setiap triwulan

### ALUR PROSEDUR TEKNIS

Adapun teknis pelaksanaan prosedur akuntansi kewajiban di SKPD adalah sebagai berikut :

### **Langkah I : Penerimaan Bukti Penambahan atau Pengurangan Kewajiban.**

Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD menerima bukti-bukti yang terkait dengan kewajiban di SKPD-nya dari pengurus barang/bendahara penerimaan SKPD/bendahara pengeluaran SKPD. Bukti tersebut bisa menunjukkan adanya penambahan kewajiban maupun pengurangan kewajiban karena pelunasan kewajiban atau pengakuan pendapatan. Berdasarkan perolehan bukti-bukti transaksi tersebut kemudian Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD pada umumnya akan membuat bukti memorial sebagai dasar dilakukannya penjurnalan di Buku Jurnal Umum.

Pada bagian ini akan diberikan beberapa contoh jurnal terkait dengan kewajiban, sebagai berikut :

- |            |  |
|------------|--|
| 1 Mei 2022 | Tenaga akuntansi di PPK-SKPD menerima bukti-bukti pembelian sejumlah alat tulis kantor dari bendahara pengeluaran SKPD senilai Rp 5.000.000,-.   |
|            | Dari jumlah tersebut, Bendahara pengeluaran memungut PPN Rp. 454.545,- dan PPh 22 sebesar Rp 68.182,- kemudian disetor ke Kas Negara pada tanggal 2 Mei 2022.  |
| 3 Mei 2022 | Tenaga akuntansi di PPK-SKPD menerima Berita Acara Serah Terima (BAST) dari pengurus barang atas penyerahan pekerjaan pendampingan sistem keuangan daerah senilai Rp 110.000.000,-   |
| 4 Mei 2022 | Tenaga akuntansi di PPK-SKPD menerima SP2D LS dari bendahara pengeluaran SKPD atas pembayaran pekerjaan pendampingan sistem keuangan daerah senilai Rp 110.000.000,- dengan potongan PPN sebesar Rp 10.000.000,- dan Potongan PPh Pasal 23 sebesar Rp 2.000.000,-. |
| 5 Mei 2022 | Tenaga akuntansi di PPK-SKPD menerima BAST dari Pengurus Barang terkait pengadaan ATK senilai Rp 11.000.000,-, yang dibeli dengan mekanisme LS.  |

|             |  |
|-------------|--|
| 7 Mei 2022  | Tenaga akuntansi di PPK-SKPD menerima SP2D LS dari bendahara pengeluaran SKPD atas pembayaran pengadaan bahan obat-obatan dari BAST tanggal 5 April 2022 senilai Rp 11.000.000,- dengan potongan PPN sebesar Rp 1.000.000,- dan Potongan PPh Pasal 22 sebesar Rp 150.000.-   |
| 10 Mei 2022 | Tenaga akuntansi di PPK-SKPD menerima Bukti Setoran Bank/Bukti Transfer/STS dan/atau Nota Kredit dari Bendahara Penerimaan SKPD atas pendapatan sewa kios pasar selama 1 tahun senilai Rp 3.600.000,-.   |
| 12 Mei 2022 | Tenaga akuntansi di PPK-SKPD menerima BAST dari Pengurus Barang terkait pengadaan kursi pasien dokter gigi ( <i>dental chair</i> ) dengan harga perunitnya sebesar Rp 53.000.000,- yang dibeli dengan mekanisme LS. Agar papan tulis elektronik ini siap digunakan, ada biaya-biaya tambahan yang harus dibayar meliputi biaya pengangkutan sebesar Rp 1.000.000,- dan biaya instalasi sebesar Rp 1.000.000,-. Oleh karena nilai kursi pasien dokter gigi ( <i>dental chair</i> ) tersebut akan dicatat sebesar Rp 55.000.000,- sesuai dengan konsep nilai perolehannya. |
| 15 Mei 2022 | Tenaga akuntansi di PPK-SKPD menerima SP2D LS dari bendahara pengeluaran SKPD atas pembayaran pengadaan kursi pasien dokter gigi ( <i>dental chair</i> ) dari BAST tanggal 12 April 2022 senilai Rp 55.000.000,- dengan potongan PPN sebesar Rp 5.000.000,- dan Potongan PPh Pasal 22 sebesar Rp 750.000.-   |
| 20 Mei 2022 | Tenaga akuntansi di PPK-SKPD menerima BAST dari Pengurus Barang terkait pengadaan aplikasi keuangan daerah modul pendapatan sebesar Rp 44.000.000,- yang dibeli dengan mekanisme LS.   |



|             |   |
|-------------|---|
| 23 Mei 2022 | Tenaga akuntansi di PPK-SKPD menerima SP2D LS dari bendahara pengeluaran SKPD atas pengadaan aplikasi keuangan daerah modul pendapatan dari BAST tanggal 20 April 2022 senilai Rp 44.000.000,- dengan potongan PPN sebesar Rp 4.000.000,- dan Potongan PPh Pasal 23 sebesar Rp 800.000.-. |
| 27 Mei 2022 | Tenaga akuntansi di PPK-SKPD menerima BAST disertai Surat Keputusan Bupati tentang Hibah dari Pengurus Barang terkait pengadaan obat-obatan sebesar Rp 10.000.000,- dan pakaian senilai Rp 20.000.000 untuk dihibahkan yang dibeli dengan mekanisme LS.                                   |
| 28 Mei 2022 | Tenaga akuntansi di PPK-SKPD menerima SP2D LS dari bendahara pengeluaran SKPD atas pengadaan obat-obatan sebesar Rp 10.000.000,- dan pakaian senilai Rp 20.000.000 untuk dihibahkan.  |
| 30 Mei 2022 | Tenaga akuntansi di PPK-SKPD menerima Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Termin 1 pembangunan gedung perkantoran senilai Rp. 500 juta dari pengurus barang.   |
| 31 Mei 2022 | Tenaga akuntansi di PPK-SKPD menerima SP2D LS dari bendahara pengeluaran SKPD atas Pekerjaan Termin 1 pembangunan gedung perkantoran senilai Rp. 500 juta.  |
| 31 Des 2022 | Tenaga akuntansi di PPK-SKPD melakukan penyesuaian atas pendapatan sewa kios yang diterima pada tanggal 10 Mei 2022.  |

## **Langkah II : Penjurnalan Transaksi Kewajiban**

Setelah bukti memorial disiapkan maka Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD kemudian melakukan pencatatan jurnal di Buku Jurnal Umum. Bentuk pencatatan jurnal yang dilakukan sangat tergantung kepada jenis transaksi yang terkait dengan kewajiban tersebut.

**1. Transaksi yang Menambah Nilai Kewajiban**

a. Pengadaan barang dan/atau jasa

Prosedur pengadaan barang dan/atau jasa ini terkait erat dengan prosedur belanja dalam lingkup pelaksanaan APBD. Setelah menerima barang dan/atau jasa, jika dilakukan pembayaran atas penerimaan barang dan/atau jasa tersebut maka dilakukan penjurnalan pengeluaran kas sebagai pelunasan kewajiban SKPD dan juga mengakui realisasi belanja. Pada saat perolehan barang dan/atau jasa, berdasarkan Berita Acara Serah Terima (mekanisme LS) dari pengurus barang, maka Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD melakukan pencatatan pengakuan kewajiban dengan melaksanakan penjurnalan di Buku Jurnal Umum sebagai berikut :

|                           | Debit        | Kredit       |
|---------------------------|--------------|--------------|
| <b>Beban/Aset.....</b>    | <b>xxxxx</b> |              |
| <b>Utang Belanja ....</b> |              | <b>xxxxx</b> |

Catatan : Kode dan nama rekening/akun beban/aset dan belanja (dalam contoh ditulis beban/aset\_\_\_\_\_ dan belanja\_\_\_\_\_) disesuaikan dengan kode dan nama rekening/akun, sampai rincian obyek, sesuai dengan pengakuan beban/aset dan belanjanya.

b. Konstruksi dalam Pengerjaan

Apabila dari aktivitas perolehan aset tetap, seperti dari aktivitas pembelian atau belanja barang yang pembayarannya dilakukan secara bertahap (termin) maka dilakukan pencatatan adanya aset tetap yang masih dalam pengerjaan sejumlah termin yang akan dibayar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan dari Bendahara/Pengurus Barang sekaligus mengakui kewajiban. Penjurnalannya di Buku Jurnal Umum dilakukan sebagai berikut :

|                                    | Debit       | Kredit      |
|------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Konstruksi dalam Pengerjaan</b> | <b>xxxx</b> |             |
| <b>Utang Belanja Modal ....</b>    |             | <b>xxxx</b> |

Catatan : Kode dan nama rekening/akun utang belanja modal (dalam contoh ditulis utang belanja modal\_\_\_\_\_) disesuaikan dengan kode dan nama rekening/akun, sampai rincian obyek, sesuai dengan pengakuan utang belanja modal.

c. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK timbul dari transaksi beban dan belanja di SKPD yang menggunakan mekanisme UP/GU/TU. Pada saat terjadi penyerahan barang dan/atau jasa dari penyedia kepada SKPD maka saat itu sudah terhutang PPN dan PPh sehingga Bendahara Pengeluaran SKPD wajib memotong dan memungut PPN dan PPh dengan meminta faktur pajak penyedia dan menerbitkan Bukti Potong PPh. Penjurnalan potongan dan pungutan PFK di Buku Jurnal Umum dilakukan sebagai berikut :

|   | Debit       | Kredit      |
|---|-------------|-------------|
| <b>Kas di Bendahara Pengeluaran</b>     | <b>xxxx</b> |             |
| <b>Penerimaan Pungutan/Potongan PFK</b> |             | <b>xxxx</b> |

d. Pendapatan diterima dimuka

Pendapatan diterima dimuka terjadi saat SKPD menerima penerimaan kas atas transaksi yang bersifat penangguhan pendapatan (*defferal*) karena SKPD belum memberikan seluruh barang dan/atau jasanya kepada pembayar pada saat terjadi penerimaan kas. Penjurnalannya di Buku Jurnal Umum dilakukan sebagai berikut :

|                                    | Debit       | Kredit      |
|------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Kas di Bendahara Penerimaan</b> | <b>xxxx</b> |             |
| <b>Pendapatan diterima dimuka</b>  |             | <b>xxxx</b> |

Kemudian untuk mencatat realisasi anggaran berbasis kas dicatat juga dalam Buku Jurnal Penerimaan kas dengan melakukan jurnal, “Estimasi Perubahan SAL” di Debit dan “Akun Pendapatan-LRA sesuai jenisnya” di kredit, sebagai berikut :

|                               | Debit       | Kredit      |
|-------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Estimasi Perubahan SAL</b> | <b>xxxx</b> |             |
| <b>Pendapatan____-LRA</b>     |             | <b>xxxx</b> |

Catatan : Kode dan nama rekening/akun pendapatan (dalam contoh ditulis pendapatan\_\_\_\_-LRA) disesuaikan dengan kode dan nama rekening/akun, sampai rincian obyek, sesuai dengan pengakuan pendapatan\_\_\_\_-LRA.

**2. Transaksi yang Mengurangi Kewajiban**

- a. Pelunasan tagihan pengadaan barang dan/atau jasa

Transaksi utama yang akan mengurangi nilai kewajiban di SKPD adalah karena pelunasan atas tagihan barang dan/atau jasa termasuk barang yang pembayarannya dilakukan secara bertahap (termin) pada mekanisme LS yang diakui berdasarkan SP2D LS. Jika transaksi ini terjadi maka berdasarkan SP2D LS tersebut, maka Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD mencatat jurnalnya dalam buku jurnal umum sebagai berikut :

|                            | Debit       | Kredit      |
|----------------------------|-------------|-------------|
| <b>Utang Belanja .....</b> | <b>xxxx</b> |             |
| <b>RK PPKD</b>             |             | <b>xxxx</b> |

Kemudian untuk mencatat realisasi anggaran berbasis kas dicatat juga dalam Buku Jurnal Pengeluaran kas dengan melakukan jurnal, “Akun Belanja sesuai jenisnya” di Debit dan “Estimasi Perubahan SAL” di kredit, sebagai berikut :

|                               | Debit       | Kredit      |
|-------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Belanja .....</b>          | <b>xxxx</b> |             |
| <b>Estimasi Perubahan SAL</b> |             | <b>xxxx</b> |

Catatan : Kode dan nama rekening/akun utang belanja dan belanja (dalam contoh ditulis utang belanja \_\_\_\_\_ dan belanja\_\_\_\_\_) disesuaikan dengan kode dan nama rekening/akun, sampai rincian obyek, sesuai dengan pengakuan utang belanja dan belanjanya.

b. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Pelunasan utang PFK yang berasal dari transaksi beban dan belanja di SKPD yang menggunakan mekanisme UP/GU/TU dilakukan dengan menggunakan bukti setor seperti SSP. Berdasarkan bukti setor tersebut maka tenaga akuntansi di PPK SKPD akan mencatat di Buku Jurnal Umum sebagai berikut :

|  | Debit       | Kredit      |
|--|-------------|-------------|
| <b>Pengeluaran Pungutan/Potongan PFK</b> | <b>xxxx</b> |             |
| <b>Kas di Bendahara Pengeluaran</b>      |             | <b>xxxx</b> |

c. Pendapatan diterima dimuka

Pengakuan pendapatan di akhir periode merupakan transaksi penyesuaian terhadap pendapatan diterima dimuka yang terjadi saat SKPD menerima penerimaan kas sebelumnya. Penjurnalannya pengakuan pendapatan dilakukan di Buku Jurnal Umum dilakukan sebagai berikut:

|                                   | Debit       | Kredit      |
|-----------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Pendapatan diterima dimuka</b> | <b>xxxx</b> |             |
| <b>Pendapatan____-LO</b>          |             | <b>xxxx</b> |

Catatan : Kode dan nama rekening/akun pendapatan (dalam contoh ditulis pendapatan\_\_\_\_-LO) disesuaikan dengan kode dan nama rekening, sampai rincian obyek, sesuai dengan pengakuan pendapatan-LO.

Berdasarkan uraian penjurnalan dan contoh transaksi tersebut diatas maka Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD melakukan pencatatan dalam Buku Jurnal Umum.

**Pertama,** penjurnalan dilakukan atas transaksi yang terkait dengan realisasi beban dari UP/GU/TU berdasarkan bukti transaksi, yang di catat di jurnal umum, yaitu sebagai berikut :

|            |             |                              | Debit     | Kredit    |
|------------|-------------|------------------------------|-----------|-----------|
| 1 Mei 2022 | 9.1.2.01.01 | Beban ATK                    | 5.000.000 |           |
|            | 1.1.1.03.01 | Kas di Bendahara Pengeluaran |           | 5.000.000 |

Kemudian atas transaksi yang sama, di catat juga realisasi anggaran belanja di jurnal pengeluaran kas, yaitu sebagai berikut :

|            |             |                        | Debit     | Kredit    |
|------------|-------------|------------------------|-----------|-----------|
| 1 Mei 2022 | 5.2.2.01.01 | Belanja ATK            | 5.000.000 |           |
|            | 3.1.2.05.01 | Estimasi Perubahan SAL |           | 5.000.000 |

Penjurnalan untuk pungutan atau potongan dari perhitungan fihak ketiga (PFK) dilakukan atas transaksi yang terkait dengan realisasi pengeluaran beban dan belanja UP/GU/TU, yang dicatat di buku jurnal umum berdasarkan faktur pajak dan bukti potong pajak yang dibuat, yaitu sebagai berikut :

|            |             |                                  | Debit   | Kredit  |
|------------|-------------|----------------------------------|---------|---------|
| 1 Mei 2022 | 1.1.1.03.01 | Kas di Bendahara Pengeluaran     | 522.727 |         |
|            | 7.1.2.01.02 | Penerimaan Potongan PPh Pasal 22 |         | 68.182  |
|            | 7.1.2.01.04 | Penerimaan Potongan PPN          |         | 454.545 |

**Kedua,** dilakukan penjurnalan di buku jurnal umum untuk mencatat pengakuan beban dalam basis akrual atas penyerahan pekerjaan pendampingan sistem keuangan daerah senilai Rp 110.000.000, berdasarkan BAST tanggal 3 Mei 2022 sebagai berikut :

|            |             |                                | Debit       | Kredit      |
|------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|
| 3 Mei 2022 | 9.1.2.19.04 | Beban Jasa Konsultan Manajemen | 110.000.000 | -           |
|            | 2.1.5.02.01 | Utang Belanja Jasa             | -           | 110.000.000 |

**Ketiga,** dilakukan penjurnalan di buku jurnal umum untuk mencatat realisasi beban dalam basis akrual atas penyerahan pekerjaan pendampingan sistem keuangan senilai Rp 110.000.000, berdasarkan SP2D LS tanggal 4 Mei 2022 sebagai berikut :

|            |             |                    |                      |             |
|------------|-------------|--------------------|----------------------|-------------|
| 4 Mei 2022 | 2.1.5.02.01 | Utang Belanja Jasa | Debit<br>110.000.000 | Kredit<br>- |
|            | 7.1.8.99.99 | Penerimaan RK PPKD | -                    | 110.000.000 |

Kemudian atas transaksi yang sama, di catat juga realisasi anggaran belanja di jurnal pengeluaran kas, yaitu sebagai berikut :

|            |             |                                     |                      |             |
|------------|-------------|-------------------------------------|----------------------|-------------|
| 4 Mei 2022 | 5.2.2.21.06 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur | Debit<br>110.000.000 | Kredit<br>- |
|            | 3.1.2.05.01 | Estimasi Perubahan SAL              | -                    | 110.000.000 |

Selanjutnya jika diperlukan (karena ini tidak wajib dicatat di SKPD) mencatat PFK di Buku Penyesuaian atas potongan pajak dari transaksi belanja, yaitu sebagai berikut :

|            |             |                            |                     |            |
|------------|-------------|----------------------------|---------------------|------------|
| 4 Mei 2022 | 7.2.8.99.99 | Pengeluaran RK PPKD        | Debit<br>12.000.000 | Kredit     |
|            | 7.1.2.01.03 | Penerimaan Potongan PPh 23 |                     | 2.000.000  |
|            | 7.1.2.01.04 | Penerimaan Pungutan PPN    |                     | 10.000.000 |

Dalam contoh tersebut pungutan dan potongan perhitungan fihak ketiga atas belanja jasa konsultan manajemen tersebut belum diterima bukti setornya, jadi saldo kas masih ada di Kas Daerah. Jika selanjutnya diketahui bahwa pungutan dan potongan perhitungan fihak ketiga tersebut telah dibayar sesuai dengan bukti yang ada (SSP, Surat Perintah BUD dan Nota Debit) maka dilakukan penjurnalan pada buku jurnal penyesuaian yaitu :

|            |             |                             |                    |            |
|------------|-------------|-----------------------------|--------------------|------------|
| 4 Mei 2022 | 7.2.2.01.03 | Pengeluaran Potongan PPh 23 | Debit<br>2.000.000 | Kredit     |
|            | 7.2.2.01.04 | Pengeluaran Pungutan PPN    | 10.000.000         |            |
|            | 7.1.8.99.99 | RK PPKD                     |                    | 12.000.000 |

**Keempat**, pencatatan dalam buku jurnal umum oleh Tenaga akuntansi di PPK-SKPD dilakukan berdasarkan BAST dari Pengurus Barang terkait pengadaan ATK senilai Rp 11.000.000,-, yang dibeli dengan mekanisme LS pada tanggal 5 Mei 2022, yaitu:

|            |             |                        |                     |            |
|------------|-------------|------------------------|---------------------|------------|
| 5 Mei 2022 | 1.1.7.02.04 | Persediaan Obat-obatan | Debit<br>11.000.000 | Kredit     |
|            | 2.1.5.02.01 | Utang Belanja Jasa     |                     | 11.000.000 |

**Kelima,** dilakukan penjurnalan di buku jurnal umum untuk mencatat realisasi beban dalam basis akrual atas pembayaran pengadaan ATK dari BAST tanggal 5 Mei 2022 senilai Rp 11.000.000, berdasarkan SP2D LS tanggal 7 Mei 2022 sebagai berikut :

|            |             |                    | Debit      | Kredit     |
|------------|-------------|--------------------|------------|------------|
| 7 Mei 2022 | 2.1.5.02.01 | Utang Belanja Jasa | 11.000.000 | -          |
|            | 7.1.8.99.99 | RK PPKD            | -          | 11.000.000 |

Kemudian atas transaksi yang sama, di catat juga realisasi anggaran belanja di jurnal pengeluaran kas, yaitu sebagai berikut :

|            |             |                        | Debit      | Kredit     |
|------------|-------------|------------------------|------------|------------|
| 7 Mei 2022 | 5.2.2.02.04 | Belanja Obat-obatan    | 11.000.000 | -          |
|            | 3.1.2.05.01 | Estimasi Perubahan SAL | -          | 11.000.000 |

Selanjutnya jika diperlukan (karena ini tidak wajib dicatat di SKPD) mencatat PFK di Buku Penyesuaian atas potongan pajak dari transaksi belanja, yaitu sebagai berikut :

|            |             |                            | Debit     | Kredit    |
|------------|-------------|----------------------------|-----------|-----------|
| 7 Mei 2022 | 7.2.8.99.99 | RK PPKD                    | 1.150.000 |           |
|            | 7.1.2.01.02 | Penerimaan Potongan PPh 22 |           | 150.000   |
|            | 7.1.2.01.04 | Penerimaan Pungutan PPN    |           | 1.000.000 |

Dalam contoh tersebut pungutan dan potongan perhitungan fihak ketiga atas belanja ATK tersebut belum diterima bukti setornya, jadi saldo kas masih ada di Kas Daerah. Jika selanjutnya diketahui bahwa pungutan dan potongan perhitungan fihak ketiga tersebut telah dibayar sesuai dengan bukti yang ada (SSP, Surat Perintah BUD dan Nota Debit) maka dilakukan penjurnalan pada buku jurnal penyesuaian yaitu :

|            |             |                             | Debit     | Kredit    |
|------------|-------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| 7 Mei 2022 | 7.2.2.01.02 | Pengeluaran Potongan PPh 22 | 150.000   |           |
|            | 7.2.2.01.04 | Pengeluaran Pungutan PPN    | 1.000.000 |           |
|            | 7.1.8.99.99 | RK PPKD                     |           | 1.150.000 |

**Keenam,** dilakukan penjurnalan di buku jurnal umum untuk mencatat pendapatan sewa kios pasar selama 1 tahun yang merupakan pendapatan diterima dimuka berdasarkan menerima Bukti Setoran Bank/Bukti Transfer/STS dan/atau Nota Kredit tanggal 10 Mei 2022 sebagai berikut :



|             |             |                            |                    |             |
|-------------|-------------|----------------------------|--------------------|-------------|
| 10 Mei 2022 | 7.2.8.99.99 | Pengeluaran RK PPKD        | Debit<br>3.600.000 | Kredit<br>- |
|             | 2.1.5.00.00 | Pendapatan Diterima Dimuka | -                  | 3.600.000   |

Kemudian atas transaksi yang sama, di catat juga realisasi anggaran belanja di jurnal pengeluaran kas, yaitu sebagai berikut :

|             |             |   |                    |             |
|-------------|-------------|---|--------------------|-------------|
| 10 Mei 2022 | 3.1.2.05.01 | Estimasi Perubahan SAL                          | Debit<br>3.600.000 | Kredit<br>- |
|             | 4.1.2.16.02 | Retribusi Fasilitas Pasar yang Dikontrakkan-LRA | -                  | 3.600.000   |

**Ketujuh,** penjurnalan dilakukan atas bukti transaksi BAST dari Pengurus Barang terkait pengadaan kursi pasien dokter gigi (*dental chair*) dengan harga perunitnya sebesar Rp 55.000.000,- berikut biaya transport dan instalasinya yang dibeli dengan mekanisme LS, di catat di jurnal umum, yaitu sebagai berikut :

|             |             |   |                     |             |
|-------------|-------------|---|---------------------|-------------|
| 12 Mei 2022 | 1.3.2.21.02 | Alat Kedokteran Gigi                    | Debit<br>55.000.000 | Kredit<br>- |
|             | 2.1.5.03.02 | Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin | -                   | 55.000.000  |

**Kedelapan,** dilakukan penjurnalan di buku jurnal umum untuk mencatat realisasi beban dalam basis akrual atas pembayaran pengadaan kursi pasien dokter gigi (*dental chair*) dari BAST tanggal 12 Mei 2022 senilai Rp 55.000.000,- dengan potongan PPN sebesar Rp 5.000.000,- dan Potongan PPh Pasal 22 sebesar Rp 750.000.-, berdasarkan SP2D LS tanggal 15 Mei 2022 sebagai berikut :

|             |             |   |                     |             |
|-------------|-------------|---|---------------------|-------------|
| 15 Mei 2022 | 2.1.5.03.02 | Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin | Debit<br>55.000.000 | Kredit<br>- |
|             | 7.1.8.99.99 | Penerimaan RK PPKD                      | -                   | 55.000.000  |

Selanjutnya jika diperlukan (karena ini tidak wajib dicatat di SKPD) mencatat PFK di Buku Penyesuaian atas potongan pajak dari transaksi belanja, yaitu sebagai berikut :

|             |             |                            |                    |           |
|-------------|-------------|----------------------------|--------------------|-----------|
| 15 Mei 2022 | 7.2.8.99.99 | Pengeluaran RK PPKD        | Debit<br>5.750.000 | Kredit    |
|             | 7.1.2.01.02 | Penerimaan Potongan PPh 22 |                    | 750.000   |
|             | 7.1.2.01.04 | Penerimaan Pungutan PPN    |                    | 5.000.000 |

Dalam contoh tersebut pungutan dan potongan perhitungan fihak ketiga atas belanja modal pengadaan kursi pasien dokter gigi (*dental chair*) tersebut belum diterima bukti setornya, jadi saldo kas masih ada di Kas Daerah. Jika selanjutnya diketahui bahwa pungutan dan potongan perhitungan fihak ketiga tersebut telah dibayar sesuai dengan bukti yang ada (SSP, Surat Perintah BUD dan Nota Debit) maka dilakukan penjurnalan pada buku jurnal penyesuaian yaitu :

|             |             |                             | Debit     | Kredit    |
|-------------|-------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| 15 Mei 2022 | 7.2.1.01.02 | Pengeluaran Potongan PPh 22 | 750.000   |           |
|             | 7.2.1.01.04 | Pengeluaran Pungutan PPN    | 5.000.000 |           |
|             | 7.1.8.99.99 | RK PPKD                     |           | 5.750.000 |

**Kesembilan,** penjurnalan dilakukan atas bukti transaksi BAST dari Pengurus Barang terkait pengadaan aplikasi keuangan daerah modul pendapatan sebesar Rp 44.000.00,- yang dibeli dengan mekanisme LS, di catat di jurnal umum, yaitu sebagai berikut :

|             |             |                                  | Debit      | Kredit     |
|-------------|-------------|----------------------------------|------------|------------|
| 20 Mei 2022 | 1.5.3.05.01 | Software                         | 44.000.000 | -          |
|             | 2.1.5.03.06 | Utang Belanja Modal Aset Lainnya | -          | 44.000.000 |

**Kesepuluh,** dilakukan penjurnalan di buku jurnal umum untuk mencatat realisasi beban dalam basis akrual atas pembayaran pengadaan aplikasi keuangan daerah modul pendapatan dari BAST tanggal 20 Mei 2022 senilai Rp 44.000.000,- dengan potongan PPN sebesar Rp 4.000.000,- dan Potongan PPh Pasal 23 sebesar Rp 800.000, berdasarkan SP2D LS tanggal 20 Mei 2022 sebagai berikut :

|             |             |                                  | Debit      | Kredit     |
|-------------|-------------|----------------------------------|------------|------------|
| 23 Mei 2022 | 2.1.5.03.06 | Utang Belanja Modal Aset Lainnya | 44.000.000 | -          |
|             | 7.1.8.99.99 | Penerimaan RK PPKD               | -          | 44.000.000 |

Kemudian mencatat di Buku Jurnal Umum atas potongan pajak dari transaksi perolehan aset, yaitu sebagai berikut :

|             |             |                            | Debit     | Kredit    |
|-------------|-------------|----------------------------|-----------|-----------|
| 23 Mei 2022 | 7.2.8.99.99 | Pengeluaran RK PPKD        | 4.800.000 |           |
|             | 7.1.2.01.03 | Penerimaan Potongan PPh 23 |           | 800.000   |
|             | 7.1.2.01.04 | Penerimaan Pungutan PPN    |           | 4.000.000 |

Kemudian atas transaksi yang sama, di catat juga realisasi anggaran belanja di jurnal pengeluaran kas, yaitu sebagai berikut :

|             |             |                                      | Debit      | Kredit     |
|-------------|-------------|--------------------------------------|------------|------------|
| 23 Mei 2022 | 5.2.3.34.01 | Belanja Modal Pengadaan Aset Lainnya | 44.000.000 | -          |
|             | 3.1.2.05.01 | Estimasi Perubahan SAL               | -          | 44.000.000 |

**Kesebelas,** penjurnalan dilakukan atas bukti transaksi BAST disertai Surat Keputusan Bupati tentang Hibah dari Pengurus Barang terkait pengadaan obat-obatan sebesar Rp 10.000.000,- dan pakaian senilai Rp 20.000.000 untuk dihibahkan yang dibeli dengan mekanisme LS, di catat di jurnal umum, yaitu sebagai berikut :

|             |             |   | Debit      | Kredit     |
|-------------|-------------|---|------------|------------|
| 27 Mei 2022 | 1.1.7.03.01 | Persediaan Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga | 30.000.000 | -          |
|             | 2.1.5.02.01 | Utang Belanja Jasa  | -          | 30.000.000 |

**Keduabelas,** dilakukan penjurnalan di buku jurnal umum untuk mencatat realisasi beban dalam basis akrual atas pembayaran pengadaan obat-obatan sebesar Rp 10.000.000,- dan pakaian senilai Rp 20.000.000 untuk dihibahkan, berdasarkan SP2D LS tanggal 27 Mei 2022 sebagai berikut :

|             |             |                    | Debit      | Kredit     |
|-------------|-------------|--------------------|------------|------------|
| 28 Mei 2022 | 2.1.5.02.01 | Utang Belanja Jasa | 30.000.000 | -          |
|             | 7.1.8.99.99 | Penerimaan RK PPKD | -          | 30.000.000 |

Kemudian atas transaksi yang sama, di catat juga realisasi anggaran belanja di jurnal pengeluaran kas, yaitu sebagai berikut :

|             |             |   | Debit      | Kredit     |
|-------------|-------------|---|------------|------------|
| 28 Mei 2022 | 5.1.2.23.01 | Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat | 30.000.000 | -          |
|             | 3.1.2.05.01 | Estimasi Perubahan SAL                                | -          | 30.000.000 |

**Ketigabelas,** penjurnalan dilakukan di Buku Jurnal Umum atas transaksi yang terkait dengan pengakuan atas kemajuan pekerjaan termin 1 pembangunan gedung perkantoran pada tanggal 30 Mei 2022, yaitu sebagai berikut :

|             |             |  | Debit       | Kredit      |
|-------------|-------------|--|-------------|-------------|
| 30 Mei 2022 | 1.3.6.00.00 | Konstruksi Dlm Pengerjaan                  | 500.000.000 | -           |
|             | 2.1.5.03.03 | Utang Belanja Modal<br>Gedung dan Bangunan | -           | 500.000.000 |

**Keempatbelas,** penjurnalan dilakukan atas transaksi yang terkait dengan pelunasan termin 1 pembangunan gedung kantor berdasarkan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan bertanggal 30 November 2022 dengan mekanisme LS, yaitu sebagai berikut :

|             |             |  | Debit       | Kredit      |
|-------------|-------------|--|-------------|-------------|
| 31 Mei 2022 | 2.1.5.03.03 | Utang Belanja Modal Gedung<br>dan Bangunan | 500.000.000 | -           |
|             | 7.2.8.99.99 | Penerimaan RK PPKD                         | -           | 500.000.000 |

Kemudian atas transaksi yang sama, di catat juga realisasi anggaran belanja di jurnal pengeluaran kas, yaitu sebagai berikut :

|             |             |   | Debit       | Kredit      |
|-------------|-------------|---|-------------|-------------|
| 31 Mei 2022 | 5.2.3.26.01 | Belanja Modal Pengadaan<br>Kontruksi Bangunan | 500.000.000 | -           |
|             | 3.1.2.05.01 | Estimasi Perubahan SAL                        | -           | 500.000.000 |

**Kelimabelas,** penjurnalan pada akhir periode dilakukan atas transaksi yang terkait penyesuaian atas pendapatan sewa kios yang diterima pada tanggal 10 Mei 2022 di buku jurnal penyesuaian, yaitu sebagai berikut :

|             |             |   | Debit     | Kredit    |
|-------------|-------------|---|-----------|-----------|
| 31 Des 2022 | 2.1.4.04.01 | Pendapatan Diterima<br>Dimuka_____                | 2.700.000 | -         |
|             | 8.1.2.16.02 | Retribusi Fasilitas Pasar<br>yang Dikontrakkan-LO | -         | 2.700.000 |

### **Bentuk dan Cara Pengisian Buku Jurnal**

Berdasarkan contoh jurnal tersebut diatas maka dilakukan pencatatan dalam buku jurnal umum untuk transaksi berbasis akrual yang nantinya digunakan untuk menyusun LO dan Neraca sebagai berikut :

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU JURNAL UMUM (JU)

SKPKD : .....( SKPD Kabupaten Kuningan)

Halaman 01

| Tanggal | Nomor               |               | Kode Rekening |   |   |    |    | Uraian  | Ref. | Debit<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|---------|---------------------|---------------|---------------|---|---|----|----|---|------|---------------|----------------|
|         | Bukti<br>Penerimaan | Bukti<br>Lain |               |   |   |    |    |   |      |               |                |
| 1       | 2                   |               | 3             |   |   |    |    | 4   | 5    | 6             | 7              |
|         |                     |               |               |   |   |    |    |   |      |               |                |
| 1/5/15  | -                   | -             | 9             | 1 | 2 | 01 | 01 | Beban ATK                                     | -    | 5.000.000     | -              |
|         |                     |               | 1             | 1 | 1 | 03 | 01 | Kas di Bendahara<br>Pengeluaran               | -    | -             | 5.000.000      |
|         |                     |               |               |   |   |    |    |   |      |               |                |
| 1/5/15  | -                   | -             | 1             | 1 | 1 | 03 | 01 | Kas di Bendahara<br>Pengeluaran               | -    | 522.727       | -              |
|         |                     |               | 7             | 1 | 2 | 01 | 02 | Penerimaan<br>Potongan PPh Ps 22              | -    | -             | 68.182         |
|         |                     |               | 7             | 1 | 2 | 01 | 04 | Penerimaan<br>Potongan PPN                    | -    | -             | 454.545        |
|         |                     |               |               |   |   |    |    |   |      |               |                |
| 3/5/15  |                     |               | 9             | 1 | 2 | 19 | 04 | Beban Jasa<br>Konsultan<br>Manajemen          | -    | 110.000.000   | -              |
|         |                     |               | 2             | 1 | 5 | 02 | 01 | Utang Belanja Jasa                            | -    | -             | 110.000.000    |
|         |                     |               |               |   |   |    |    |   |      |               |                |
| 4/5/15  |                     |               | 2             | 1 | 5 | 02 | 01 | Utang Belanja Jasa                            | -    | 110.000.000   | -              |
|         |                     |               | 7             | 1 | 8 | 99 | 99 | Penerimaan RK<br>PPKD                         | -    | -             | 110.000.000    |
|         |                     |               |               |   |   |    |    |   |      |               |                |
| 5/5/15  |                     |               | 1             | 1 | 7 | 02 | 04 | Persediaan Bahan<br>Obat-obatan               | -    | 11.000.000    | -              |
|         |                     |               | 2             | 1 | 5 | 02 | 01 | Utang Belanja Jasa                            | -    | -             | 11.000.000     |
|         |                     |               |               |   |   |    |    |   |      |               |                |
| 7/5/15  |                     |               | 2             | 1 | 5 | 02 | 01 | Utang Belanja Jasa                            | -    | 11.000.000    | -              |
|         |                     |               | 7             | 1 | 8 | 99 | 99 | Penerimaan RK<br>PPKD                         | -    | -             | 11.000.000     |
|         |                     |               |               |   |   |    |    |   |      |               |                |
| 10/5/15 |                     |               | 7             | 2 | 8 | 99 | 99 | Pengeluaran RK<br>PPKD                        | -    | 3.600.000     | -              |
|         |                     |               | 2             | 1 | 5 | 00 | 00 | Pendapatan<br>Diterima Dimuka                 | -    | -             | 3.600.000      |
|         |                     |               |               |   |   |    |    |   |      |               |                |
| 12/5/15 |                     |               | 1             | 3 | 2 | 21 | 02 | Alat Kedokteran Gigi                          | -    | 55.000.000    | -              |
|         |                     |               | 2             | 1 | 5 | 03 | 02 | Utang Belanja<br>Modal Peralatan dan<br>Mesin | -    | -             | 55.000.000     |
|         |                     |               |               |   |   |    |    |   |      |               |                |
| 15/5/15 |                     |               | 2             | 1 | 5 | 03 | 02 | Utang Belanja<br>Modal Peralatan dan<br>Mesin | -    | 55.000.000    | -              |
|         |                     |               | 7             | 1 | 8 | 99 | 99 | Penerimaan RK<br>PPKD                         | -    | -             | 55.000.000     |
|         |                     |               |               |   |   |    |    |   |      |               |                |
| 20/5/15 |                     |               | 1             | 5 | 3 | 05 | 01 | Software                                      | -    | 44.000.000    | -              |
|         |                     |               | 2             | 1 | 5 | 03 | 06 | Utang Belanja<br>Modal Aset Lainnya           | -    | -             | 44.000.000     |
|         |                     |               |               |   |   |    |    |   |      |               |                |
| 23/5/15 |                     |               | 2             | 1 | 5 | 03 | 06 | Utang Belanja<br>Modal Aset Lainnya           | -    | 44.000.000    | -              |
|         |                     |               | 7             | 1 | 8 | 99 | 99 | Penerimaan RK<br>PPKD                         | -    | -             | 44.000.000     |
|         |                     |               |               |   |   |    |    |   |      |               |                |
| 23/5/15 |                     |               | 7             | 2 | 8 | 99 | 99 | Pengeluaran RK<br>PPKD                        | -    | 4.800.000     | -              |
|         |                     |               | 7             | 1 | 2 | 01 | 03 | Penerimaan<br>Potongan PPh 23                 | -    | -             | 800.000        |
|         |                     |               | 7             | 1 | 2 | 01 | 04 | Penerimaan<br>Pungutan PPN                    | -    | -             | 4.000.000      |
|         |                     |               |               |   |   |    |    |   |      |               |                |

|         |  |  |   |   |   |    |    |   |   |               |               |
|---------|--|--|---|---|---|----|----|---|---|---------------|---------------|
| 27/5/15 |  |  | 1 | 1 | 7 | 03 | 01 | Persediaan Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga | - | 30.000.000    | -             |
|         |  |  | 2 | 1 | 5 | 02 | 01 | Utang Belanja Jasa  | - | -             | 30.000.000    |
| 28/5/15 |  |  | 2 | 1 | 5 | 02 | 01 | Utang Belanja Jasa  | - | 30.000.000    | -             |
|         |  |  | 7 | 1 | 8 | 99 | 99 | Penerimaan RK PPKD  | - | -             | 30.000.000    |
| 30/5/15 |  |  | 1 | 3 | 6 | 00 | 00 | Konstruksi Dalam Pengerjaan   | - | 500.000.000   | -             |
|         |  |  | 2 | 1 | 5 | 03 | 03 | Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan                               | - | -             | 500.000.000   |
| 31/5/15 |  |  | 2 | 1 | 5 | 03 | 03 | Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan                               | - | 500.000.000   | -             |
|         |  |  | 7 | 1 | 8 | 99 | 99 | Penerimaan RK PPKD  | - | -             | 500.000.000   |
| Jumlah  |  |  |   |   |   |    |    |   |   | 1.513.922.727 | 1.513.922.727 |

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Selain mencatat di buku jurnal umum dilakukan juga pencatatan dalam buku jurnal penerimaan kas untuk transaksi berbasis kas yang nantinya digunakan untuk menyusun LRA dan LAK sebagai berikut :

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU JURNAL PENERIMAAN KAS (JM)

SKPKD : .....( SKPD Kabupaten Kuningan)

Halaman 01

| Tanggal | Nomor            |            | Kode Rekening |   |   |    |    | Uraian  | Ref. | Debit (Rp) | Kredit (Rp) |
|---------|------------------|------------|---------------|---|---|----|----|---|------|------------|-------------|
|         | Bukti Penerimaan | Bukti Lain |               |   |   |    |    |   |      |            |             |
| 1       | 2                |            | 3             |   |   |    |    | 4   | 5    | 6          | 7           |
|         |                  |            |               |   |   |    |    |   |      |            |             |
| 10/5/15 |                  |            | 3             | 1 | 2 | 05 | 01 | Estimasi Perubahan SAL                          |      | 3.600.000  | -           |
|         |                  |            | 4             | 1 | 2 | 16 | 02 | Retribusi Fasilitas Pasar yang Dikontrakkan-LRA |      | -          | 3.600.000   |
|         |                  |            |               |   |   |    |    |   |      |            |             |
| Jumlah  |                  |            |               |   |   |    |    |   |      | 3.600.000  | 3.600.000   |

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Selain mencatat di buku jurnal umum dilakukan juga pencatatan dalam buku jurnal pengeluaran kas untuk transaksi berbasis kas yang nantinya digunakan untuk menyusun LRA dan LAK sebagai berikut :

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU JURNAL PENGELUARAN KAS (JK)

SKPKD : .....( SKPD Kabupaten Kuningan)

Halaman 01

| Tanggal | Nomor            |            | Kode Rekening |   |   |    |    | Uraian  | Ref. | Debit<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|---------|------------------|------------|---------------|---|---|----|----|---|------|---------------|----------------|
|         | Bukti Penerimaan | Bukti Lain |               |   |   |    |    |   |      |               |                |
| 1       | 2                |            | 3             |   |   |    |    | 4   | 5    | 6             | 7              |
|         |                  |            |               |   |   |    |    |   |      |               |                |
| 1/5/15  | -                | -          | 5             | 2 | 2 | 01 | 01 | Belanja ATK   | -    | 5.000.000     | -              |
|         |                  |            | 3             | 1 | 2 | 05 | 01 | Estimasi Perubahan SAL                                | -    | -             | 5.000.000      |
|         |                  |            |               |   |   |    |    |   |      |               |                |
| 4/5/15  | -                | -          | 5             | 2 | 2 | 21 | 06 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur                   | -    | 110.000.000   | -              |
|         |                  |            | 3             | 1 | 2 | 05 | 01 | Estimasi Perubahan SAL                                | -    | -             | 110.000.000    |
|         |                  |            |               |   |   |    |    |   |      |               |                |
| 7/5/15  |                  |            | 5             | 2 | 2 | 02 | 04 | Belanja Bahan Obat-obatan                             |      | 11.000.000    | -              |
|         |                  |            | 3             | 1 | 2 | 05 | 01 | Estimasi Perubahan SAL                                |      | -             | 11.000.000     |
|         |                  |            |               |   |   |    |    |   |      |               |                |
| 23/5/15 |                  |            | 5             | 2 | 3 | 34 | 01 | Belanja Modal Pengadaan Aset Lainnya                  |      | 44.000.000    | -              |
|         |                  |            | 3             | 1 | 2 | 05 | 01 | Estimasi Perubahan SAL                                |      | -             | 44.000.000     |
|         |                  |            |               |   |   |    |    |   |      |               |                |
| 28/5/15 |                  |            | 5             | 2 | 2 | 23 | 01 | Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat |      | 30.000.000    | -              |
|         |                  |            | 3             | 1 | 2 | 05 | 01 | Estimasi Perubahan SAL                                |      | -             | 30.000.000     |
|         |                  |            |               |   |   |    |    |   |      |               |                |
| 31/5/15 |                  |            | 5             | 2 | 3 | 26 | 01 | Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan            |      | 500.000.000   | -              |
|         |                  |            | 3             | 1 | 2 | 05 | 01 | Estimasi Perubahan SAL                                |      | -             | 500.000.000    |
|         |                  |            |               |   |   |    |    |   |      |               |                |
| Jumlah  |                  |            |               |   |   |    |    |   |      | 703.600.000   | 703.600.000    |

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Selain itu dilakukan juga pencatatan dalam buku jurnal penyesuaian untuk mengakui pendapatan yang sebelumnya ditangguhkan untuk menyusun LO dan Neraca sebagai berikut :

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU JURNAL PENYESUAIAN (JP)

SKPKD : .....( SKPD Kabupaten Kuningan)

Halaman 01

| Tanggal | Nomor               |               | Kode Rekening |   |   |    |    | Uraian   | Ref. | Debit<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|---------|---------------------|---------------|---------------|---|---|----|----|--|------|---------------|----------------|
|         | Bukti<br>Penerimaan | Bukti<br>Lain |               |   |   |    |    |  |      |               |                |
| 1       | 2                   |               | 3             |   |   |    |    | 4  | 5    | 6             | 7              |
|         |                     |               |               |   |   |    |    |  |      |               |                |
| 31/5/15 | -                   | -             | 2             | 1 | 4 | 04 | 01 | Pendapatan<br>Diterima Dimuka                        | -    | 2.700.000     | -              |
|         |                     |               | 8             | 1 | 2 | 16 | 02 | Retribusi Fasilitas<br>Pasar yang<br>Dikontrakkan-LO | -    | -             | 2.700.000      |
| Jumlah  |                     |               |               |   |   |    |    |  |      | 2.700.000     | 2.700.000      |

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Langkah III : Melakukan Posting ke Buku Besar

Setelah melakukan penjurnalan seluruh transaksi, maka PPK-SKPD melakukan posting atas pencatatan jurnal tersebut ke buku besar. Posting ini berguna agar seluruh transaksi yang sama-sama mempengaruhi suatu kode rekening/akun dapat dikelompokkan dalam satu buku besar untuk kode rekening/akun yang bersangkutan. Periode posting harus semakin diusahakan dapat dilakukan dalam waktu yang semakin singkat misalkan untuk periode mingguan atau bahkan harian.

Contoh buku besar SKPD : Kas di Bendahara Pengeluaran sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:



KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 1.1.1.03.01  
Nama Rekening : Kas di Bendahara Pengeluaran  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |          | Ref | Uraian                    | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|----------|-----|---------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal  |     |                           |               |                |
| 1  |       | 1/5/2022 | JU  | Beban ATK                 | -             | 5.000.000      |
| 2  |       | 1/5/2022 | JU  | Penerimaan Pungutan Pajak | 522.727       | -              |
|    |       |          |     |                           |               |                |
|    |       |          |     | Jumlah                    | 522.727       | 5.000.000      |
|    |       |          |     | Saldo                     | -             | 4.477.273      |

PPK-SKPD Kepala SKPD

(tanda tangan) (tanda tangan)  
(nama lengkap) (nama lengkap)  
NIP..... NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Persediaan Bahan Obat-obatan sebagai  
hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 1.1.7.02.04  
Nama Rekening : Persediaan Bahan Obat-obatan  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |          | Ref | Uraian             | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|----------|-----|--------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal  |     |                    |               |                |
| 1  |       | 5/5/2022 | JU  | Utang Belanja Jasa | 11.000.000    | -              |
|    |       |          |     |                    |               |                |
|    |       |          |     | Jumlah             | 11.000.000    | -              |
|    |       |          |     | Saldo              | 11.000.000    | -              |

PPK-SKPD Kepala SKPD

(tanda tangan) (tanda tangan)  
(nama lengkap) (nama lengkap)  
NIP..... NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Persediaan Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 1.1.7.03.01  
Nama Rekening : Persediaan Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |           | Ref | Uraian             | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|-----------|-----|--------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal   |     |                    |               |                |
| 1  |       | 27/5/2022 | JU  | Utang Belanja Jasa | 30.000.000    | -              |
|    |       |           |     |                    |               |                |
|    |       |           |     | Jumlah             | 30.000.000    | -              |
|    |       |           |     | Saldo              | 30.000.000    | -              |

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Alat Kedokteran Gigi sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 1.3.2.21.02  
Nama Rekening : Alat Kedokteran Gigi  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |           | Ref | Uraian                                  | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|-----------|-----|---|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal   |     |   |               |                |
| 1  |       | 12/5/2022 | JU  | Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 55.000.000    | -              |
|    |       |           |     |   |               |                |
|    |       |           |     | Jumlah                                  | 55.000.000    | -              |
|    |       |           |     | Saldo                                   | 55.000.000    | -              |

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Konstruksi Dalam Pengerjaan sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 1.3.6.00.00  
Nama Rekening : Konstruksi Dalam Pengerjaan  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |           | Ref | Uraian                                  | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|-----------|-----|---|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal   |     |   |               |                |
| 1  |       | 30/5/2022 | JU  | Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 500.000.000   | -              |
|    |       |           |     |   |               |                |
|    |       |           |     | Jumlah                                  | 500.000.000   | -              |
|    |       |           |     | Saldo                                   | 500.000.000   | -              |

PPK-SKPD Kepala SKPD

(tanda tangan) (tanda tangan)  
(nama lengkap) (nama lengkap)  
NIP..... NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Software sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 1.5.3.05.01  
Nama Rekening : Software  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |           | Ref | Uraian                           | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|-----------|-----|----------------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal   |     |                                  |               |                |
| 1  |       | 20/5/2022 | JU  | Utang Belanja Modal Aset Lainnya | 44.000.000    | -              |
|    |       |           |     |                                  |               |                |
|    |       |           |     | Jumlah                           | 44.000.000    | -              |
|    |       |           |     | Saldo                            | 44.000.000    | -              |

PPK-SKPD Kepala SKPD

(tanda tangan) (tanda tangan)  
(nama lengkap) (nama lengkap)  
NIP..... NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Pendapatan Diterima Dimuka sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 2.1.4.04.01  
Nama Rekening : Pendapatan Diterima Dimuka  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |           | Ref | Uraian  | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|-----------|-----|---|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal   |     |   |               |                |
| 1  |       | 10/5/2022 | JU  | Pengeluaran RK PPKD                               | -             | 3.600.000      |
| 2  |       | 31/5/2022 | JP  | Retribusi Fasilitas Pasar yang<br>Dikontrakkan-LO | 2.700.000     | -              |
|    |       |           |     |   |               |                |
|    |       |           |     | Jumlah  | 2.700.000     | 3.600.000      |
|    |       |           |     | Saldo   | -             | 900.000        |

PPK-SKPD Kepala SKPD

(tanda tangan) (tanda tangan)  
(nama lengkap) (nama lengkap)  
NIP..... NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Utang Belanja Jasa sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 2.1.5.02.01  
Nama Rekening : Utang Belanja Jasa  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |           | Ref | Uraian  | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|-----------|-----|---|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal   |     |   |               |                |
| 1  |       | 3/5/2022  | JU  | Beban Jasa Konsultan Manajemen                                      | -             | 110.000.000    |
| 2  |       | 4/5/2022  | JU  | Penerimaan RK PPKD  | 110.000.000   | -              |
| 3  |       | 5/5/2022  | JU  | Persediaan Bahan Obat-obatan  | -             | 11.000.000     |
| 4  |       | 7/5/2022  | JU  | Penerimaan RK PPKD  | 11.000.000    | -              |
|    |       |           |     | Persediaan Barang yg akan<br>diserahkan kepada Masy/Pihak<br>Ketiga | -             | 30.000.000     |
| 5  |       | 27/5/2022 | JU  |   |               |                |
| 6  |       | 28/5/2022 | JU  | Penerimaan RK PPKD  | 30.000.000    | -              |
|    |       |           |     |   |               |                |
|    |       |           |     | Jumlah  | 150.000.000   | 150.000.000    |
|    |       |           |     | Saldo   | -             | -              |

PPK-SKPD Kepala SKPD

(tanda tangan) (tanda tangan)  
(nama lengkap) (nama lengkap)  
NIP..... NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 2.1.5.03.02  
Nama Rekening : Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD :

Halaman 01

| No | Bukti |           | Ref | Uraian               | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|-----------|-----|----------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal   |     |                      |               |                |
| 1  |       | 12/5/2022 | JU  | Alat Kedokteran Gigi | -             | 55.000.000     |
| 2  |       | 15/5/2022 | JU  | Penerimaan RK PPKD   | 55.000.000    | -              |
|    |       |           |     |                      |               |                |
|    |       |           |     | Jumlah               | 55.000.000    | 55.000.000     |
|    |       |           |     | Saldo                | -             | -              |

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 2.1.5.03.03  
Nama Rekening : Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD :

Halaman 01

| No | Bukti |           | Ref | Uraian                      | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|-----------|-----|-----------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal   |     |                             |               |                |
| 1  |       | 30/5/2022 | JU  | Konstruksi Dalam Pengerjaan | -             | 500.000.000    |
| 3  |       | 31/5/2022 | JU  | Penerimaan RK PPKD          | 500.000.000   | -              |
|    |       |           |     |                             |               |                |
|    |       |           |     | Jumlah                      | 500.000.000   | 500.000.000    |
|    |       |           |     | Saldo                       | -             | -              |

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Utang Belanja Modal Aset Lainnya sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 2.1.5.03.06  
Nama Rekening : Utang Belanja Modal Aset Lainnya  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD :

Halaman 01

| No | Bukti |           | Ref | Uraian             | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|-----------|-----|--------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal   |     |                    |               |                |
| 1  |       | 20/5/2022 | JU  | Software           | -             | 44.000.000     |
| 2  |       | 23/5/2022 | JU  | Penerimaan RK PPKD | 44.000.000    | -              |
|    |       |           |     |                    |               |                |
|    |       |           |     | Jumlah             | 44.000.000    | 44.000.000     |
|    |       |           |     | Saldo              | -             | -              |

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Estimasi Perubahan SAL sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 3.1.2.05.01  
Nama Rekening : Estimasi Perubahan SAL  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD :

Halaman 01

| No | Bukti |           | Ref | Uraian   | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|-----------|-----|--|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal   |     |  |               |                |
| 1  |       | 1/5/2022  | JK  | Belanja ATK  | -             | 5.000.000      |
| 2  |       | 4/5/2022  | JK  | Belanja Jasa Konsultan<br>Manajemen                      | -             | 110.000.000    |
| 3  |       | 7/5/2022  | JK  | Belanja Bahan Obat-obatan                                | -             | 11.000.000     |
| 4  |       | 10/5/2022 | JM  | Retribusi Fasilitas Pasar yang<br>Dikontrakkan-LRA       | 3.600.000     | -              |
| 5  |       | 23/5/2022 | JK  | Belanja Modal Pengadaan Aset<br>Lainnya                  | -             | 44.000.000     |
| 6  |       | 28/5/2022 | JK  | Belanja Barang yang akan<br>diserahkan kepada Masyarakat | -             | 30.000.000     |
| 7  |       | 31/5/2022 | JK  | Belanja Modal Pengadaan<br>Bangunan Gedung Kantor        | -             | 500.000.000    |
|    |       |           |     |  |               |                |
|    |       |           |     | Jumlah   | 3.600.000     | 700.000.000    |
|    |       |           |     | Saldo  | -             | 696.400.000    |

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Retribusi Fasilitas Pasar yang Dikontrakkan-LRA sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 4.1.2.02.02  
Nama Rekening : Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan-LRA  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |           | Ref | Uraian                 | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|-----------|-----|------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal   |     |                        |               |                |
| 1  |       | 10/5/2022 | JM  | Estimasi Perubahan SAL | -             | 3.600.000      |
|    |       |           |     |                        |               |                |
|    |       |           |     | Jumlah                 | -             | 3.600.000      |
|    |       |           |     | Saldo                  | -             | 3.600.000      |

PPK-SKPD Kepala SKPD

(tanda tangan) (tanda tangan)  
(nama lengkap) (nama lengkap)  
NIP..... NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Belanja ATK sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 5.2.2.01.01  
Nama Rekening : Belanja ATK  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |          | Ref | Uraian                 | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|----------|-----|------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal  |     |                        |               |                |
| 1  |       | 1/5/2022 | JK  | Estimasi Perubahan SAL | 5.000.000     | -              |
|    |       |          |     |                        |               |                |
|    |       |          |     | Jumlah                 | 5.000.000     | -              |
|    |       |          |     | Saldo                  | 5.000.000     | -              |

PPK-SKPD Kepala SKPD

(tanda tangan) (tanda tangan)  
(nama lengkap) (nama lengkap)  
NIP..... NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Belanja Bahan Obat-obatan sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 5.2.2.02.04  
Nama Rekening : Belanja Bahan Obat-obatan  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |          | Ref | Uraian                 | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|----------|-----|------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal  |     |                        |               |                |
| 1  |       | 7/5/2022 | JK  | Estimasi Perubahan SAL | 11.000.000    | -              |
|    |       |          |     |                        |               |                |
|    |       |          |     | Jumlah                 | 11.000.000    | -              |
|    |       |          |     | Saldo                  | 11.000.000    | -              |

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instrukutr sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 5.2.2.21.06  
Nama Rekening : Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |          | Ref | Uraian                 | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|----------|-----|------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal  |     |                        |               |                |
| 1  |       | 4/5/2022 | JK  | Estimasi Perubahan SAL | 110.000.000   | -              |
|    |       |          |     |                        |               |                |
|    |       |          |     | Jumlah                 | 110.000.000   | -              |
|    |       |          |     | Saldo                  | 110.000.000   | -              |

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....



Contoh buku besar SKPD : Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 5.2.2.23.01  
Nama Rekening : Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |           | Ref | Uraian                 | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|-----------|-----|------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal   |     |                        |               |                |
| 1  |       | 28/5/2022 | JK  | Estimasi Perubahan SAL | 30.000.000    | -              |
|    |       |           |     |                        |               |                |
|    |       |           |     | Jumlah                 | 30.000.000    | -              |
|    |       |           |     | Saldo                  | 30.000.000    | -              |

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 5.2.3.26.01  
Nama Rekening : Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |           | Ref | Uraian                 | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|-----------|-----|------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal   |     |                        |               |                |
| 1  |       | 31/5/2022 | JK  | Estimasi Perubahan SAL | 500.000.000   | -              |
|    |       |           |     |                        |               |                |
|    |       |           |     | Jumlah                 | 500.000.000   | -              |
|    |       |           |     | Saldo                  | 500.000.000   | -              |

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Belanja Modal Aset Lainnya sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

| SKPD                |       | :         | SKPD Kabupaten Kuningan              |                        |               |                |
|---------------------|-------|-----------|--------------------------------------|------------------------|---------------|----------------|
| Kode Rekening       |       | :         | 5.2.3.34.01                          |                        |               |                |
| Nama Rekening       |       | :         | Belanja Modal Pengadaan Aset Lainnya |                        |               |                |
| Pagu APBD           |       | :         |                                      |                        |               |                |
| Pagu perubahan APBD |       | :         |                                      |                        |               |                |
|                     |       |           |                                      |                        |               | Halaman 01     |
| No                  | Bukti |           | Ref                                  | Uraian                 | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|                     | Nomor | Tanggal   |                                      |                        |               |                |
| 1                   |       | 23/5/2022 | JK                                   | Estimasi Perubahan SAL | 44.000.000    | -              |
|                     |       |           |                                      |                        |               |                |
|                     |       |           |                                      | Jumlah                 | 44.000.000    | -              |
|                     |       |           |                                      | Saldo                  | 44.000.000    | -              |

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Penerimaan Potongan PPh Pasal 22 sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

| SKPD                |       | :        | SKPD Kabupaten Kuningan          |                              |               |                |
|---------------------|-------|----------|----------------------------------|------------------------------|---------------|----------------|
| Kode Rekening       |       | :        | 7.1.2.01.02                      |                              |               |                |
| Nama Rekening       |       | :        | Penerimaan Potongan PPh Pasal 22 |                              |               |                |
| Pagu APBD           |       | :        |                                  |                              |               |                |
| Pagu perubahan APBD |       | :        |                                  |                              |               |                |
|                     |       |          |                                  |                              |               | Halaman 01     |
| No                  | Bukti |          | Ref                              | Uraian                       | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|                     | Nomor | Tanggal  |                                  |                              |               |                |
| 1                   |       | 1/5/2022 | JU                               | Kas di Bendahara Pengeluaran | -             | 68.182         |
|                     |       |          |                                  |                              |               |                |
|                     |       |          |                                  | Jumlah                       | -             | 68.182         |
|                     |       |          |                                  | Saldo                        | -             | 68.182         |

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Penerimaan Potongan PPh Pasal 23 sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD

Kode Rekening

Nama Rekening

Pagu APBD

Pagu perubahan APBD

:

:

:

:

:

SKPD Kabupaten Kuningan

7.1.2.01.03

Penerimaan Potongan PPh Pasal 23

Halaman 01

| No | Bukti |           | Ref | Uraian              | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|-----------|-----|---------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal   |     |                     |               |                |
| 1  |       | 23/5/2022 | JU  | Pengeluaran RK PPKD | -             | 800.000        |
|    |       |           |     |                     |               |                |
|    |       |           |     | Jumlah              | -             | 800.000        |
|    |       |           |     | Saldo               | -             | 800.000.       |

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)

(tanda tangan)

(nama lengkap)

(nama lengkap)

NIP.....

NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Penerimaan Potongan PPN sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD

Kode Rekening

Nama Rekening

Pagu APBD

Pagu perubahan APBD

:

:

:

:

:

SKPD Kabupaten Kuningan

7.1.2.01.04

Penerimaan Potongan PPN

Halaman 01

| No | Bukti |           | Ref | Uraian                       | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|-----------|-----|------------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal   |     |                              |               |                |
| 1  |       | 1/5/2022  | JU  | Kas di Bendahara Pengeluaran | -             | 454.545        |
| 2  |       | 23/5/2022 | JU  | Penerimaan RK PPKD           | -             | 4.000.000      |
|    |       |           |     |                              |               |                |
|    |       |           |     | Jumlah                       | -             | 4.454.545      |
|    |       |           |     | Saldo                        | -             | 4.454.545      |

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)

(tanda tangan)

(nama lengkap)

(nama lengkap)

NIP.....

NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Penerimaan RK PPKD sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 7.1.8.99.99  
Nama Rekening : Penerimaan RK PPKD  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD :

Halaman 01

| No | Bukti |           | Ref | Uraian                                  | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|-----------|-----|---|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal   |     |   |               |                |
| 1  |       | 4/5/2022  | JU  | Utang Belanja Jasa                      | -             | 110.000.000    |
| 2  |       | 7/5/2022  | JU  | Utang Belanja Jasa                      | -             | 11.000.000     |
| 3  |       | 15/5/2022 | JU  | Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin | -             | 55.000.000     |
| 4  |       | 23/5/2022 | JU  | Utang Belanja Modal Aset lainnya        | -             | 44.000.000     |
| 5  |       | 28/5/2022 | JU  | Utang Belanja Jasa                      | -             | 30.000.000     |
| 6  |       | 31/5/2022 | JU  | Utang Belanja Modal Peraltan dan Mesin  | -             | 500.000.000    |
|    |       |           |     |   |               |                |
|    |       |           |     | Jumlah                                  | -             | 750.000.000    |
|    |       |           |     | Saldo                                   | -             | 750.000.000    |

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Pengeluaran RK PPKD sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 7.2.8.99.99  
Nama Rekening : Pengeluaran RK PPKD  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD :

Halaman 01

| No | Bukti |           | Ref | Uraian                     | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|-----------|-----|----------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal   |     |                            |               |                |
| 1  |       | 10/5/2022 | JU  | Pendapatan Diterima Dimuka | 3.600.000     | -              |
| 2  |       | 23/5/2022 | JU  | Penerimaan Potongan Pajak  | 4.800.000     | -              |
|    |       |           |     |                            |               |                |
|    |       |           |     | Jumlah                     | 8.400.000     | -              |
|    |       |           |     | Saldo                      | 8.400.000     | -              |

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

**KABUPATEN KUNINGAN**  
**BUKU BESAR**

**Halaman 01**

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

**KABUPATEN KUNINGAN**  
**BUKU BESAR**

**Halaman 01**

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Beban Jasa Konsultan Manajemen sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

**KABUPATEN KUNINGAN**  
**BUKU BESAR**

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan

Kode Rekening : 9.1.2.19.04

Nama Rekening : Beban Jasa Konsultan Manajemen

Pagu APBD :

Pagu perubahan APBD :

Halaman 01

| No | Bukti |          | Ref | Uraian             | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|----------|-----|--------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal  |     |                    |               |                |
| 1  |       | 3/5/2022 | JU  | Utang Belanja Jasa | 110.000.000   | -              |
|    |       |          |     |                    |               |                |
|    |       |          |     | Jumlah             | 110.000.000   | -              |
|    |       |          |     | Saldo              | 110.000.000   | -              |

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

**Langkah IV : Menyusun Neraca Saldo**

Setelah melakukan posting seluruh pencatatan dalam buku besar maka kemudian Tenaga Akuntansi di SKPD membuat neraca saldo sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Penyusunan neraca saldo oleh Tenaga Akuntansi di SKPD dilakukan secara triwulanan. Neraca saldo disusun dengan cara memindahkan saldo-saldo yang ada di tiap buku besar ke dalam Neraca Saldo. Contoh Neraca Saldo dari hasil pencatatan dan posting contoh transaksi keuangan diatas adalah sebagai berikut :

KABUPATEN KUNINGAN  
NERACA SALDO  
PER TANGGAL 31 Desember 2022

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan

| Kode Rekening |   |   |    |    | Uraian  | Jumlah        |               |
|---------------|---|---|----|----|---|---------------|---------------|
|               |   |   |    |    |   | Debit         | Kredit        |
| 1             |   |   |    |    | 2   | 3             | 4             |
| 1             | 1 | 1 | 03 | 01 | Kas di Bendahara Pengeluaran  | -             | 4.477.273     |
| 1             | 1 | 7 | 02 | 04 | Persediaan Bahan Obat-obatan  | 11.000.000    | -             |
| 1             | 1 | 7 | 03 | 01 | Persediaan Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga | 30.000.000    | -             |
| 1             | 3 | 2 | 21 | 02 | Alat Kedokteran Gigi  | 55.000.000    | -             |
| 1             | 3 | 6 | 00 | 00 | Konstruksi Dalam Pengerjaan   | 500.000.000   | -             |
| 1             | 5 | 3 | 05 | 01 | Software  | 44.000.000    | -             |
| 2             | 1 | 4 | 04 | 01 | Pendapatan Diterima Dimuka  | -             | 900.000       |
| 3             | 1 | 2 | 05 | 01 | Estimasi Perubahan SAL  | -             | 696.400.000   |
| 4             | 1 | 2 | 02 | 02 | Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan-LRA                                  | -             | 3.600.000     |
| 5             | 2 | 2 | 01 | 01 | Belanja ATK   | 5.000.000     | -             |
| 5             | 2 | 2 | 02 | 04 | Belanja Bahan Obat-obatan   | 11.000.000    | -             |
| 5             | 2 | 2 | 21 | 06 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur                                   | 110.000.000   | -             |
| 5             | 2 | 2 | 23 | 01 | Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat                 | 30.000.000    | -             |
| 5             | 2 | 3 | 01 | 01 | Belanja Modal Pengadaan Gedung Kantor                                 | 500.000.000   | -             |
| 5             | 2 | 5 | 07 | 06 | Belanja Modal Aset Lainnya  | 44.000.000    | -             |
| 7             | 1 | 2 | 99 | 99 | Penerimaan RK PPKD  | -             | 750.000.000   |
| 7             | 1 | 2 | 01 | 02 | Penerimaan Potongan PPh Ps 22   | -             | 68.182        |
| 7             | 1 | 2 | 01 | 03 | Penerimaan Potongan PPh Ps 23   | -             | 800.000       |
| 7             | 1 | 2 | 01 | 04 | Penerimaan Potongan PPN   | -             | 4.454.545     |
| 7             | 2 | 2 | 99 | 99 | Pengeluaran RK PPKD   | 8.400.000     | -             |
| 8             | 1 | 2 | 16 | 02 | Retribusi Fasilitas Pasar yang Dikontrakkan-LO                        | -             | 2.700.000     |
| 9             | 1 | 2 | 01 | 01 | Beban ATK   | 5.000.000     | -             |
| 9             | 1 | 2 | 19 | 04 | Beban Jasa Konsultan Manajemen  | 110.000.000   | -             |
|               |   |   |    |    |   |               |               |
| Jumlah        |   |   |    |    |   | 1.466.100.000 | 1.466.100.000 |

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

## **SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI KOREKSI DAN PENYESUAIAN DI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)**

Bagian ini menjelaskan Sistem dan Prosedur Akuntansi Koreksi dan Penyesuaian di Pemerintah Kabupaten Kuningan untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mencatat transaksi Koreksi dan Penyesuaian SKPD.

### **KEBIJAKAN UMUM**

Prosedur akuntansi koreksi dan penyesuaian pada SKPD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian koreksi dan penyesuaian yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Transaksi-transaksi atau pencatatan akuntansi ini meliputi :

1. Koreksi atas kesalahan pencatatan

Koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar rekening/akun yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan merupakan penyajian rekening/akun yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Sehingga koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan penyajian dalam suatu rekening/akun. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Penyesuaian

Merupakan pengakuan di akhir tahun periode pelaporan keuangan yang bertujuan untuk mencatat akun terhutang/*accrual*, ditangguhkan/*defferal*, koreksi, dan ayat



jurnal lain yang diperlukan untuk memutakhirkan rekening/akun neraca dan akun-akun pendapatan LO dan Beban. Dengan demikian sebetulnya koreksi termasuk dalam penyesuaian, namun karena ada koreksi di tahun berjalan maka, diatur secara terpisah.

Prosedur akuntansi atas transaksi koreksi dan penyesuaian ini harus dapat dijalankan dengan baik dan benar agar laporan keuangan dapat disajikan dengan benar. Kesalahan dalam melaksanakan prosedur akuntansi koreksi dan penyesuaian ini akan mengakibatkan laporan keuangan yang disajikan tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

#### **PIHAK-PIHAK TERKAIT**

Berbagai pihak/fungsi yang terkait dalam proses akuntansi SKPD beserta tugas-tugasnya adalah :

1. Bendahara di SKPD

Dalam pelaksanaan prosedur ini, Bendahara SKPD baik bendahara penerimaan maupun pengeluaran memiliki tugas menyiapkan dokumen-dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan akuntansi koreksi dan penyesuaian di SKPD.

2. Tenaga Akuntansi di Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)

Dalam pelaksanaan prosedur ini, Tenaga Akuntansi di PPK – SKPD memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menerima bukti-bukti transaksi koreksi dan penyesuaian seperti STS, Nota Kredit, SP2D, Kuitansi, dan dokumen lainnya serta memeriksa kebenaran dari bukti transaksi tersebut;
- b. Mencatat transaksi-transaksi koreksi dan penyesuaian berdasarkan bukti-bukti yang terkait yang berada dalam kewenangan SKPD-nya;
- c. Memposting jurnal-jurnal koreksi dan penyesuaian ke dalam

buku besarnya masing-masing;

- d. Menyusun neraca saldo yang terkait akuntansi koreksi dan penyesuaian untuk persiapan penyusunan laporan keuangan, yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan; dan
  - e. Menyerahkan buku jurnal, buku besar dan neraca saldo kepada PPK-SKPKD untuk diperiksa dan ditandatangani.
3. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) : Sekretaris Badan/ Dinas atau Koordinator/ Kepala Sub Bagian Keuangan (Sekretariat Daerah, Badan, Kantor, Dinas, Rumah Sakit Umum Daerah Linggarjati, Kecamatan, dan Kelurahan), Kepala Bagian Keuangan (Sekretariat DPRD dan Rumah Sakit Umum Daerah 45).
- Dalam pelaksanaan prosedur ini, PPK-SKPD memiliki tugas sebagai berikut :
- a. Bertanggungjawab atas sistem akuntansi koreksi dan penyesuaian SKPD yang dipimpinnya; dan
  - b. Memeriksa dan menandatangani hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Tenaga Akuntansi PPK-SKPD terkait akuntansi pendapatan SKPD secara triwulanan; dan
  - c. Menyerahkan Buku Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo SKPKD-PPKD yang mencatat transaksi pemerintah daerah setiap triwulan kepada PPKD selaku pengguna anggaran untuk disetujui.
4. Pengguna Anggaran/Kepala SKPD : Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, Kepala Satuan, Camat, Lurah, Asisten Administrasi, Sekretaris DPRD, dan Direktur.

Dalam pelaksanaan prosedur ini, Pengguna Anggaran memiliki tugas menyetujui Buku Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo yang diserahkan PPK-SKPD setiap triwulan.

## **DOKUMEN YANG DIGUNAKAN**

1. Tanda Bukti Pembayaran selanjutnya disebut TBP adalah bukti pembayaran pajak/retribusi daerah dari wajib bayar kepada bendahara penerimaan SKPD;
2. Surat Tanda Setoran selanjutnya disebut STS adalah bukti yang diperoleh setelah melakukan penyetoran uang ke Kas Daerah;
3. Surat Setoran Pajak Daerah selanjutnya disebut SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak metode *self assessment* yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
4. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi metode *self assessment* yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
5. Bukti Setoran Bank merupakan formulir bukti melakukan setoran ke Rekening Umum Kas Daerah;
6. Bukti Transfer merupakan formulir bukti melakukan transfer dari suatu rekening ke Rekening Umum Kas Daerah;
7. Nota Kredit merupakan bukti transaksi penerimaan uang di Rekening Umum Kas Daerah;
8. Kuitansi Pembayaran, adalah dokumen yang menunjukkan pembayaran barang dan/atau jasa dari mekanisme UP/GU/TU;
9. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut (SP2D) adalah dokumen yang digunakan sebagai pencairan dana yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM;
10. Nota Debit merupakan bukti transaksi pengeluaran uang di rekening kas umum daerah.
11. Bukti memorial, adalah bukti transaksi yang digunakan untuk mencatat transaksi koreksi dan penyesuaian.

## **BUKU DAN ATAU FORMULIR YANG DIGUNAKAN**

Buku atau formulir yang digunakan dalam pelaksanaan prosedur akuntansi koreksi dan penyesuaian di Satuan Kerja Perangkat Daerah terdiri dari :

1. Buku Jurnal Koreksi (Jk)

Merupakan buku jurnal yang digunakan untuk melakukan pencatatan akuntansi penyesuaian khususnya atas transaksi-transaksi koreksi pendapatan, belanja, beban, aset dan kewajiban di SKPD.

2. Buku Jurnal Penyesuaian (Jp)

Merupakan buku jurnal yang digunakan untuk melakukan pencatatan akuntansi penyesuaian khususnya atas transaksi-transaksi pengakuan persediaan (metode periodik), penyusutan aset tetap, amortisasi aset tak berwujud, beban dibayar dimuka dan pendapatan diterima dimuka.

3. Buku Besar (BB)

Merupakan buku yang digunakan untuk menampung pencatatan hasil posting transaksi dari buku jurnal. Buku besar ini merupakan pencatatan akuntansi atas seluruh transaksi untuk suatu rekening/akun per jenis atau obyek. Jadi setiap rekening/akun per jenis atau objek mempunyai buku besar tersendiri.

4. Buku Besar Pembantu (BP)

Buku besar dapat dilengkapi dengan buku besar pembantu sebagai alat uji silang dan kelengkapan informasi rekening/akun tertentu. Buku besar pembantu berisi rincian akun (rincian obyek) yang telah dicatat dalam buku besar. Jika dirasakan informasi dalam buku besar sudah mencukupi maka buku besar pembantu tidak perlu dibuat lagi.

5. Neraca Saldo (NS)

Merupakan formulir yang mencatat nilai saldo setiap rekening/akun per rincian objek sehingga diketahui jumlah total

dari seluruh rekening/akun.

## **KERANGKA SISTEM**

Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD diharuskan melakukan pengecekan atas penjurnalan dan posting yang telah dilakukan. Selain dari pengecekan tersebut, bisa juga diperoleh informasi kesalahan dari hasil rekonsiliasi data keuangan daerah yang dituangkan dalam bukti memorial. Jika dari hasil pengecekan dan hasil rekonsiliasi keuangan daerah tersebut :

1. Terdapat transaksi Kesalahan tidak berulang (kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi lagi) yang mana :
  - a. Kesalahan yang terjadi pada periode berjalan

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun Belanja, maupun pendapatan-LO atau akun Beban
  - b. Kesalahan yang terjadi pada periode sebelumnya yang meliputi :
    - i. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, untuk koreksi pendapatan-LO dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas, untuk koreksi pendapatan-LRA dilakukan dengan pembetulan pada akun belanja tak terduga, untuk koreksi beban dilakukan dengan pembetulan pada akun koreksi ekuitas, untuk koreksi belanja dilakukan dengan pembetulan pada pendapatan lain-lain;
    - ii. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang

tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun belanja tak terduga;

- iii. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset yang bersangkutan
- iv. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun koreksi ekuitas;
- v. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun pendapatan lain-lain-LRA jika menambah kas dan pembetulan pada akun belanja tak terduga jika mengurangi kas;
- vi. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan

pada akun kas dan akun koreksi ekuitas;

- vii. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan; dan
  - viii. Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan;
- 2. Terdapat kesalahan berulang dan sistemik (kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang) maka Kesalahan ini dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengakui belanja tak terduga untuk LRA dan mencatat pada akun koreksi ekuitas untuk LO dan dicatat pada saat terjadi penerimaan kas untuk mengembalikan kelebihan belanja dengan mengakui pendapatan lain-lain untuk LRA dan mencatat pada akun koreksi ekuitas untuk LO;
  - 3. Terdapat transaksi yang mengandung akun terhutang/*accrual* untuk mengakui kewajiban yang belum dibayar atau hak pemda yang belum diterima sampai dengan akhir tahun anggaran; dan
  - 4. Terdapat transaksi yang mengandung akun Tangguhan/*defferal* adalah kas yang sudah diterima atau dibayarkan tetapi sampai akhir tahun anggaran belum menjadi hak/ kewajiban Pemda.

Pada saat hal tersebut diatas diketahui maka dibuatkan bukti memorialnya oleh Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD untuk dilakukan penjurnalan dalam Buku Jurnal Koreksi Dan Penyesuaian. Setelah seluruh transaksi dicatat dalam buku jurnal maka Tenaga Akuntansi di

PPK-SKPD kemudian melakukan posting ke buku besar. Setelah posting dari buku jurnal ke buku besar selesai dilakukan maka kemudian Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD menyusun Neraca Saldo sebagai dasar pembuatan Laporan Keuangan untuk setiap triwulan yang diserahkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah triwulan berakhir kepada PPK-SKPD.

### **ALUR PROSEDUR TEKNIS**

Teknis pelaksanaan sistem dan prosedur akuntansi koreksi dan penyesuaian di SKPD ini adalah sebagai berikut :

#### **Langkah I : Menyiapkan Bukti Transaksi Koreksi dan Penyesuaian.**

Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi koreksi dan penyesuaian membuat bukti memorial. Bukti transaksi koreksi dan penyesuaian yang dapat digunakan sebagai pendukung penyusunan bukti memorial adalah :

1. Dokumen pada transaksi kesalahan tidak berulang (kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi lagi) yang mana :
  - a. Kesalahan yang terjadi pada periode berjalan

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun Belanja, maupun pendapatan-LO atau akun Beban. Dokumen pengakuan koreksi yang dapat digunakan adalah TBP, STS, Bukti Setoran Bank, Bukti Transfer Bank, Nota Kredit, SP2D, Nota Debet, Kuitansi atau bukti pendukung koreksi non kas lainnya.
  - b. Kesalahan yang terjadi pada periode sebelumnya yang meliputi :
    - i. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi



posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan. Dokumen pengakuan koreksi yang dapat digunakan adalah STS, Bukti Setoran Bank, Bukti Transfer Bank, Nota Kredit, SP2D, Nota Debet, atau bukti pendukung koreksi non kas lainnya;

- ii. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan. Dokumen pengakuan koreksi yang dapat digunakan adalah STS, Bukti Setoran Bank, Bukti Transfer Bank, Nota Kredit, SP2D, Nota Debet, atau bukti pendukung koreksi non kas lainnya;
- iii. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan. Dokumen pengakuan koreksi yang dapat digunakan adalah STS, Bukti Setoran Bank, Bukti Transfer Bank, Nota Kredit, SP2D, Nota Debet, atau bukti pendukung koreksi non kas lainnya;
- iv. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan. Dokumen pengakuan koreksi yang dapat digunakan adalah STS, Bukti Setoran Bank, Bukti Transfer Bank, Nota Kredit, SP2D, Nota Debet, atau bukti pendukung koreksi non kas lainnya;
- v. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode

sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan. Dokumen pengakuan koreksi yang dapat digunakan adalah STS, Bukti Setoran Bank, Bukti Transfer Bank, Nota Kredit, SP2D, Nota Debet;

vi. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan. Dokumen pengakuan koreksi yang dapat digunakan adalah STS, Bukti Setoran Bank, Bukti Transfer Bank, Nota Kredit, SP2D, Nota Debet;

vii. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan. Dokumen pengakuan koreksi yang dapat digunakan adalah STS, Bukti Setoran Bank, Bukti Transfer Bank, Nota Kredit, SP2D, Nota Debet; dan

viii. Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan. Dokumen pengakuan koreksi yang dapat digunakan adalah bukti pendukung koreksi non kas lainnya seperti hasil rekon data aset;

2. Dokumen pada kesalahan berulang dan sistemik (kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang). Dokumen pengakuan koreksi yang dapat digunakan adalah STS, Bukti Setoran Bank, Bukti Transfer Bank, Nota Kredit, SP2D, Nota Debet atau bukti pendukung koreksi lainnya seperti surat ketetapan pendapatan;

- Berdasarkan perolehan bukti-bukti transaksi tersebut maka Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD membuat bukti memorial. Bentuk formulir atau format dari Bukti memorial dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan atau oleh masing-masing SKPD sebagai contoh :

Lampiran II-G - 12

Pada bagian ini akan diberikan beberapa contoh jurnal terkait dengan transaksi koreksi dan penyesuaian di SKPD Kabupaten Kuningan, yaitu sebagai berikut :

- |             |   |
|-------------|---|
| 1 Des 2022  | Ditemukan kesalahan penyetoran retribusi penyewaan ruangan ke SKPD Pemda A yang seharusnya ke SKPD Pemda B senilai Rp 1.000.000,- yang terjadi pada tanggal 5 November 2022 dan senilai Rp 500.000,- pada tanggal 10 November 2014. Atas kesalahan ini harus dikembalikan nilai tersebut kepada penyettor atau ke SKPD Pemda B melalui PPKD dengan menggunakan SP2D LS. |
| 5 Des 2022  | Ditemukan kesalahan kelebihan pembayaran gaji bulan Desember 2014 senilai Rp 20.000.000,-. Atas kesalahan ini dilakukan koreksi dengan menyetor kelebihan gaji tersebut ke Kas Daerah dengan menggunakan STS yang dibuat SKPD bersangkutan.   |
| 10 Des 2022 | Berdasarkan pemeriksaan BPK ditemukan mark up pada pengadaan aset tetap kendaraan bermotor penumpang senilai Rp 50.000.000,- yang dilakukan pada tahun 2014. Atas kesalahan ini dilakukan koreksi pengembalian nilai mark up tersebut ke kas daerah dengan STS yang dibuat SKPD bersangkutan.   |
| 15 Des 2022 | Ditemukan kesalahan pengakuan beban dan utang belanja karena kesalahan dokumen penagihan dan/atau BAST yang seharusnya senilai Rp 74.000.000,- tetapi dibayar senilai Rp 70.000.000 yang terjadi pada bulan desember 2014. Atas kesalahan ini dilakukan koreksi dengan membayar selisihnya ke penyedia menggunakan SP2D LS.   |
| 20 Des 2022 | Ditemukan kesalahan pencatatan pembelian peralatan dan mesin salah dicatat pada akun jalan, irigasi dan jaringan senilai Rp 500.000.000,-. Atas kesalahan ini dilakukan koreksi dengan membalik jurnal yang salah dan memunculkan jurnal yang benar atau  |

|             |  |
|-------------|--|
|             | mengurangi akun jalan, irigasi dan jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin berdasarkan hasil rekon data aset.   |
| 24 Des 2022 | Dilakukan restitusi atas retribusi penyewaan tanah dan bangunan karena kelebihan pembayaran senilai Rp 2.500.000,- dengan cara menerbitkan SP2D LS.  |
| 27 Des 2022 | Ditemukan kesalahan pencatatan belanja cetak sebesar Rp 5.400.000,00 yang seharusnya belanja ATK sebesar Rp 4.500.000,00 dengan menggunakan UP/GU. Atas kesalahan ini dilakukan koreksi dengan bukti memorial yang dilampiri dengan kuintansi dan voucher jurnal transaksi 2014. |
| 31 Des 2022 | Diketahui terdapat kekurangan belanja hibah berupa barang kepada masyarakat senilai Rp 1.000.000,- dan terdapat kekurangan pembayaran retribusi penyewaan kendaraan senilai Rp 500.000,-.  |
| 31 Des 2022 | Diketahui pada akhir Juni 2022 dibayar asuransi kendaraan dinas senilai Rp 12.000.000 untuk pertanggungan selama 1 tahun dan pada akhir September 2022 diterima retribusi penyewaan ruangan selama 1 tahun dengan nilai Rp 6.000.000,-.  |
| 31 Des 2022 | Dilakukan stock opname persediaan ATK dan diketahui nilai ATK yang masih ada sebesar Rp 3.000.000,-  |

## **Langkah II : Penjurnalan Transaksi Koreksi dan Penyesuaian**

Setelah ditemukan adanya transaksi koreksi dan penyesuaian yang terjadi maka Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD membuat bukti memorial sebagai dasar dilakukannya penjurnalan. Berdasarkan contoh yang diberikan diatas maka dapat dijelaskan jurnal yang telah dilakukan sebelumnya dan jurnal koreksi dan penyesuaian yang seharusnya dilakukan, seperti diuraikan dibawah ini.

Untuk contoh **pertama**, dimana diketahui pada 1 Desember 2022 ada kesalahan penyetoran retribusi penyewaan ruangan ke SKPD Pemda A yang seharusnya ke SKPD Pemda B senilai Rp 1.000.000,- yang terjadi pada tanggal 5 November 2022 dan senilai Rp 500.000,- pada tanggal 10 November 2014. Jurnal koreksi atas transaksi 5 November 2022 yang dilakukan SKPD Pemda A adalah :

|            |             |  | Debit     | Kredit    |
|------------|-------------|--|-----------|-----------|
| 1 Des 2022 | 8.1.2.15.03 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Ruangan-LO | 1.000.000 | -         |
|            | 7.1.8.99.99 | Penerimaan RK PPKD                             | -         | 1.000.000 |
| 1 Des 2022 | 4.1.2.02.01 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah- LRA       | 1.000.000 | -         |
|            | 3.1.2.05.01 | Estimasi Perubahan SAL                         | -         | 1.000.000 |

Sedangkan jurnal koreksi atas transaksi 10 November 2014 yang dilakukan SKPD adalah tidak ada, karena yang melakukan jurnal koreksi adalah PPKD sebagai berikut :

|            |             |                           | Debit   | Kredit  |
|------------|-------------|---------------------------|---------|---------|
| 1 Des 2022 | 3.1.1.03.01 | Koreksi Ekuitas           | 500.000 | -       |
|            | 1.1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah         | -       | 500.000 |
| 1 Des 2022 | 5.1.8.01.01 | Belanja Tidak Terduga-LRA | 500.000 | -       |
|            | 3.1.2.05.01 | Estimasi Perubahan SAL    | -       | 500.000 |

Transaksi contoh **kedua**, dimana diketahui pada 5 Desember 2022 kesalahan kelebihan pembayaran gaji bulan Desember 2014 senilai Rp 20.000.000,-. Jurnal koreksi yang dilakukan berdasarkan STS adalah :

Pencatatan di SKPD

|            |             |                              | Debit      | Kredit     |
|------------|-------------|------------------------------|------------|------------|
| 5 Des 2022 | 1.1.1.03.01 | Kas di Bendahara Pengeluaran | 20.000.000 | -          |
|            | 3.1.1.03.01 | Koreksi Ekuitas              | -          | 20.000.000 |
|            | 7.2.8.99.99 | Pengeluaran RK PPKD          | 20.000.000 | -          |
|            | 1.1.1.03.01 | Kas di Bendahara Pengeluaran | -          | 20.000.000 |

Atau jika Pegawai langsung menyetor ke Kas Daerah

|            |             |                 |            |            |
|------------|-------------|-----------------|------------|------------|
| 5 Des 2022 | 7.2.8.99.99 | RK PPKD         | 20.000.000 | -          |
|            | 3.1.1.03.01 | Koreksi Ekuitas | -          | 20.000.000 |

Pencatatan di PPKD

|            |             |                         | Debit      | Kredit     |
|------------|-------------|-------------------------|------------|------------|
| 5 Des 2022 | 1.1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah       | 20.000.000 | -          |
|            | 7.1.8.99.00 | Penerimaan RK SKPD___   | -          | 20.000.000 |
| 5 Des 2022 | 3.1.2.05.01 | Estimasi Perubahan SAL  | 20.000.000 | -          |
|            | 4.4.1.01.01 | Pendapatan Lainnya- LRA | -          | 20.000.000 |

Transaksi contoh **ketiga**, dimana diketahui pada 10 Desember 2022, berdasarkan pemeriksaan BPK ditemukan mark up pada pengadaan aset tetap kendaraan bermotor penumpang senilai Rp 50.000.000,- yang dilakukan pada tahun 2014. Jurnal koreksi yang dilakukan berdasarkan STS adalah :

Jika melalui SKPD

|             |             |                     | Debit      | Kredit     |
|-------------|-------------|---------------------|------------|------------|
| 10 Des 2022 | 1.1.1.03.01 | Kas di Bendahara    | 50.000.000 | -          |
|             |             | Pengeluaran         |            |            |
|             | 1.3.2.04.02 | Kendaraan Bermotor  | -          | 50.000.000 |
|             |             | Penumpang           |            |            |
|             | 7.2.8.99.99 | Pengeluaran RK PPKD | 50.000.000 | -          |
|             | 1.1.1.03.01 | Kas di Bendahara    | -          | 50.000.000 |
|             |             | Pengeluaran         |            |            |

Atau jika Pihak Ketiga langsung menyeter ke Kas Daerah

|             |             |                     |            |            |
|-------------|-------------|---------------------|------------|------------|
| 10 Des 2022 | 7.2.8.99.99 | Pengeluaran RK PPKD | 50.000.000 | -          |
|             | 1.3.2.04.02 | Kendaraan Bermotor  | -          | 50.000.000 |
|             |             | Penumpang           |            |            |

Catatan : PPK SKPD harus menyerahkan Kপি STS dan LHP Auditor kepada Pengurus Barang

Pencatatan di PPKD

|             |             |                         | Debit      | Kredit     |
|-------------|-------------|-------------------------|------------|------------|
| 10 Des 2022 | 1.1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah       | 50.000.000 | -          |
|             | 7.1.8.99.00 | Penerimaan RK SKPD___   | -          | 50.000.000 |
| 10 Des 2022 | 3.1.2.05.01 | Estimasi Perubahan SAL  | 50.000.000 | -          |
|             | 4.4.4.01.01 | Pendapatan Lainnya- LRA | -          | 50.00.000  |

Transaksi contoh **keempat**, dimana diketahui pada 15 Desember 2022, ditemukan kesalahan pengakuan beban dan utang belanja karena kesalahan dokumen penagihan dan/atau BAST yang seharusnya senilai Rp 74.000.000,- tetapi dibayar senilai Rp 70.000.000 yang terjadi pada bulan desember 2014. Jurnal koreksi yang dilakukan berdasarkan SP2D LS adalah :

### SKPD

|             |             |                    | Debit     | Kredit    |
|-------------|-------------|--------------------|-----------|-----------|
| 15 Des 2022 | 3.1.1.03.01 | Koreksi Ekuitas    | 4.000.000 | -         |
|             | 2.1.5.00.00 | Utang Belanja      | -         | 4.000.000 |
|             | 2.1.5.00.00 | Utang Belanja      | 4.000.000 | -         |
|             | 7.2.8.99.99 | Penerimaan RK PPKD | -         | 4.000.000 |

### PPKD

|             |             |                         | Debit     | Kredit    |
|-------------|-------------|-------------------------|-----------|-----------|
| 15 Des 2022 | 7.2.8.99.00 | Pengeluaran RK SKPD__   | 4.000.000 | -         |
|             | 1.1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah       | -         | 4.000.000 |
| 15 Des 2022 | 5.1.8.01.01 | Belanja Tak Terduga-LRA | 4.000.000 | -         |
|             | 3.1.2.05.01 | Estimasi Perubahan SAL  | -         | 4.000.000 |

Transaksi contoh **kelima**, dimana diketahui pada 20 Desember 2022, ditemukan kesalahan pencatatan pembelian peralatan dan mesin salah dicatat pada akun jalan, irigasi dan jaringan. Jurnal koreksi yang dilakukan SKPD berdasarkan Berita Acara Koreksi Pencatatan Aset adalah :

|             |             |                          | Debit       | Kredit      |
|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
| 20 Des 2022 | 1.3.2.00.00 | Peralatan dan Mesin      | 500.000.000 | -           |
|             | 1.3.4.00.00 | Jalan, Irigasi, Jaringan | -           | 500.000.000 |

Transaksi contoh **keenam**, dimana diketahui pada 24 Desember 2022 dilakukan restitusi atas retribusi penyewaan tanah dan bangunan karena kelebihan pembayaran senilai Rp 2.500.000,-. Sedangkan jurnal koreksi yang dilakukan SKPD adalah tidak ada, karena yang melakukan jurnal koreksi adalah PPKD berdasarkan SP2D LS sebagai berikut :

|             |             |                         | Debit     | Kredit    |
|-------------|-------------|-------------------------|-----------|-----------|
| 24 Des 2022 | 3.1.1.03.01 | Koreksi Ekuitas         | 2.500.000 | -         |
|             | 7.1.8.99.99 | Penerimaan RK PPKD      | -         | 2.500.000 |
| 24 Des 2022 | 5.1.8.01.01 | Belanja Tak Terduga-LRA | 2.500.000 | -         |
|             | 3.1.2.05.01 | Estimasi Perubahan SAL  | -         | 2.500.000 |

Transaksi contoh **ketujuh**, dimana diketahui pada 27 Desember 2022 ditemukan kesalahan pencatatan belanja cetak sebesar Rp 5.400.000,00 yang seharusnya belanja ATK sebesar Rp 4.500.000,00 dengan menggunakan UP/GU. Jurnal koreksi yang dilakukan SKPD adalah tidak ada, karena yang melakukan jurnal koreksi adalah PPKD berdasarkan STS yang disetor oleh Bendahara Pengeluaran SKPD sebagai berikut :



|             |             |                        | Debit   | Kredit  |
|-------------|-------------|------------------------|---------|---------|
| 27 Des 2022 | 7.2.8.99.99 | Pengeluaran RK PPKD    | 900.000 | -       |
|             | 3.1.1.03.01 | Koreksi Ekuitas        | -       | 900.000 |
| 27 Des 2022 | 3.1.2.05.01 | Estimasi Perubahan SAL | 900.000 | -       |
|             | 4.4.4.01.01 | Pendapatan Lainnya-LRA | -       | 900.000 |

Transaksi contoh **kedelapan**, dimana diketahui pada 31 Desember 2022, diketahui terdapat kekurangan belanja hibah berupa barang kepada masyarakat senilai Rp 1.000.000,- dan terdapat kekurangan pembayaran retribusi penyewaan kendaraan senilai Rp 500.000,-. Jurnal penyesuaian sebelum direalisasikan (*realized*) yang dilakukan SKPD berdasarkan SK Bupati dan NPHD (Untuk koreksi belanja hibah) dan SKRKB (untuk koreksi retribusi) adalah :

|             |             |   | Debit     | Kredit    |
|-------------|-------------|---|-----------|-----------|
| 31 Des 2022 | 9.1.2.20.01 | Beban Barang untuk diserahkan kepada masyarakat | 1.000.000 | -         |
|             | 2.1.5.02.01 | Utang Belanja Barang dan Jasa                   | -         | 1.000.000 |
|             | 1.1.3.02.15 | Piutang Retribusi Penyewaan Kendaraan Bermotor  | 500.000   | -         |
|             | 8.1.2.15.04 | Retribusi Penyewaan Kendaraan Bermotor-LO       | -         | 500.000   |

Transaksi contoh **kesembilan**, diketahui pada akhir Juni 2022 dibayar asuransi kendaraan dinas senilai Rp 12.000.000 untuk pertanggungan selama 1 tahun dan pada akhir September 2022 diterima retribusi penyewaan ruangan selama 1 tahun dengan nilai Rp 6.000.000,-. Transaksi ini dicatat sebagai berikut :

|              |             |                                    | Debit      | Kredit     |
|--------------|-------------|------------------------------------|------------|------------|
| 30 Juni 2022 | 1.1.6.03.01 | Beban Jasa dibayar dimuka          | 12.000.000 | -          |
|              | 7.2.8.99.99 | Penerimaan RK PPKD                 | -          | 12.000.000 |
|              | 7.1.8.99.99 | Pengeluaran RK PPKD                | 6.000.000  | -          |
|              | 2.1.4.04.01 | Pendapatan diterima dimuka lainnya | -          | 6.000.000  |

Untuk realisasi anggaran, transaksi tersebut diatas dicatat dalam jurnal penerimaan dan jurnal pengeluaran sebagai berikut :

|              |             |   | Debit      | Kredit     |
|--------------|-------------|---|------------|------------|
| 30 Juni 2022 | 5.2.2.04.02 | Belanja premi asuransi barang milik daerah      | 12.000.000 | -          |
|              | 3.1.2.05.01 | Estimasi Perubahan SAL                          | -          | 12.000.000 |
|              | 3.1.2.05.01 | Estimasi Perubahan SAL                          | 6.000.000  | -          |
|              | 4.1.2.15.03 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Ruangan-LRA | -          | 6.000.000  |

Jurnal penyesuaian yang dilakukan SKPD pada 31 Desember 2022 berdasarkan polis asuransi (untuk pengakuan beban dibayar dimuka) dan berdasarkan STS (untuk pengakuan pendapatan diterima dimuka) adalah :

|             |             |   | Debit     | Kredit    |
|-------------|-------------|---|-----------|-----------|
| 31 Des 2022 | 9.1.2.04.02 | Beban Jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah | 6.000.000 | -         |
|             | 1.1.6.03.01 | Beban Jasa dibayar dimuka                     | -         | 6.000.000 |
|             | 2.1.4.04.01 | Pendapatan diterima dimuka lainnya            | 4.500.000 | -         |
|             | 8.1.2.15.04 | Retribusi Penyewaan Kendaraan Bermotor-LO     | -         | 4.500.000 |

Transaksi contoh **kesepuluh**, dimana diketahui pada 31 Desember 2022, dilakukan stock opname persediaan ATK dan diketahui nilai ATK yang masih ada sebesar Rp 3.000.000,-. Jurnal penyesuaian yang dilakukan SKPD berdasarkan Berita Acara Stock Opname Persediaan adalah :

|             |             |                      | Debit     | Kredit    |
|-------------|-------------|----------------------|-----------|-----------|
| 31 Des 2022 | 1.1.7.01.01 | Persediaan ATK       | 3.000.000 | -         |
|             | 9.1.2.01.01 | Beban Persediaan ATK | -         | 3.000.000 |

**Bentuk dan Cara Pengisian Buku Jurnal Umum (JU)**

Berdasarkan contoh jurnal tersebut diatas maka dilakukan pencatatan dalam buku jurnal umum untuk transaksi berbasis akrual yang nantinya digunakan untuk menyusun LO dan Neraca sebagai berikut :

KABUPATEN KUNINGAN
BUKU JURNAL UMUM (JU)

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan

Halaman 01

| Tanggal | Nomor            |            | Kode Rekening |   |   |    |    | Uraian                     | Ref. | Debit (Rp) | Kredit (Rp) |
|---------|------------------|------------|---------------|---|---|----|----|----------------------------|------|------------|-------------|
|         | Bukti Penerimaan | Bukti Lain |               |   |   |    |    |                            |      |            |             |
| 1       | 2                |            | 3             |   |   |    |    | 4                          | 5    | 6          | 7           |
| 30/6/15 | -                | -          | 1             | 1 | 6 | 03 | 01 | Beban Jasa Dibayar Dimuka  | -    | 12.000.000 | -           |
|         |                  |            | 7             | 1 | 8 | 99 | 99 | Penerimaan RK PPKD         | -    | -          | 12.000.000  |
|         |                  |            | 7             | 2 | 8 | 99 | 99 | Pengeluaran RK PPKD        | -    | 6.000.000  | -           |
|         |                  |            | 2             | 1 | 4 | 04 | 01 | Pendapatan Diterima Dimuka | -    | -          | 6.000.000   |
| Jumlah  |                  |            |               |   |   |    |    |                            |      | 18.000.000 | 18.000.000  |

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)
(nama lengkap)
NIP.....

(tanda tangan)
(nama lengkap)
NIP.....

Bentuk dan Cara Pengisian Buku Jurnal Penerimaan Kas (JM)

Selain mencatat di buku jurnal umum dilakukan juga pencatatan dalam buku jurnal penerimaan kas untuk transaksi berbasis kas yang nantinya digunakan untuk menyusun LRA dan LAK sebagai berikut :

KABUPATEN KUNINGAN
BUKU JURNAL PENERIMAAN KAS (JM)

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan

Halaman 01

| Tanggal | Nomor            |            | Kode Rekening |   |   |    |    | Uraian                                  | Ref. | Debit (Rp) | Kredit (Rp) |
|---------|------------------|------------|---------------|---|---|----|----|---|------|------------|-------------|
|         | Bukti Penerimaan | Bukti Lain |               |   |   |    |    |   |      |            |             |
| 1       | 2                |            | 3             |   |   |    |    | 4                                       | 5    | 6          | 7           |
| 30/6/15 | -                | -          | 3             | 1 | 2 | 05 | 01 | Estimasi Perubahan SAL                  | -    | 6.000.000  | -           |
|         |                  |            | 4             | 1 | 2 | 02 | 01 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LRA | -    | -          | 6.000.000   |
| Jumlah  |                  |            |               |   |   |    |    |   |      | 6.000.000  | 6.000.000   |

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)
(nama lengkap)
NIP.....

(tanda tangan)
(nama lengkap)
NIP.....

**Bentuk dan Cara Pengisian Buku Jurnal Pengeluaran Kas (JK)**

Selain mencatat di buku jurnal umum dan buku jurnal penerimaan kas dilakukan juga pencatatan dalam buku jurnal pengeluaran kas untuk transaksi berbasis kas yang nantinya digunakan untuk menyusun LRA dan LAK sebagai berikut :

**KABUPATEN KUNINGAN**  
**BUKU JURNAL PENGELUARAN KAS (JK)**

**SKPD** : SKPD Kabupaten Kuningan

Halaman 01

| Tanggal | Nomor               |               | Kode Rekening |   |   |    |    | Uraian                                     | Ref. | Debit<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|---------|---------------------|---------------|---------------|---|---|----|----|--|------|---------------|----------------|
|         | Bukti<br>Penerimaan | Bukti<br>Lain |               |   |   |    |    |  |      |               |                |
| 1       | 2                   |               | 3             |   |   |    |    | 4  | 5    | 6             | 7              |
|         |                     |               |               |   |   |    |    |  |      |               |                |
| 30/6/15 | -                   | -             | 5             | 2 | 2 | 04 | 02 | Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah | -    | 12.000.000    | -              |
|         |                     |               | 3             | 1 | 2 | 05 | 01 | Estimasi Perubahan SAL                     | -    | -             | 12.000.000     |
|         |                     |               |               |   |   |    |    |  |      |               |                |
| Jumlah  |                     |               |               |   |   |    |    |  |      | 12.000.000    | 12.000.000     |

PPK-SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Kepala SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

**Bentuk dan Cara Pengisian Buku Jurnal Koreksi (Jk)**

Koreksi atas transaksi sebelumnya dicatat dalam buku jurnal koreksi baik untuk transaksi berbasis akrual yang digunakan untuk menyusun LO dan Neraca dan transaksi berbasis kas yang digunakan untuk menyusun LRA dan LAK sebagai berikut :

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU JURNAL KOREKSI (Jk)

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan

Halaman 01

| Tanggal  | Nomor               |               | Kode Rekening |   |   |    |    | Uraian   | Ref. | Debit<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----------|---------------------|---------------|---------------|---|---|----|----|--|------|---------------|----------------|
|          | Bukti<br>Penerimaan | Bukti<br>Lain |               |   |   |    |    |  |      |               |                |
| 1        | 2                   |               | 3             |   |   |    |    | 4  | 5    | 6             | 7              |
|          |                     |               |               |   |   |    |    |  |      |               |                |
| 1/12/15  | -                   | -             | 8             | 1 | 2 | 15 | 03 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Ruangan-LO | -    | 1.000.000     | -              |
|          |                     |               | 7             | 1 | 8 | 99 | 99 | Penerimaan RK PPKD                             | -    | -             | 1.000.000      |
|          |                     |               |               |   |   |    |    |  |      |               |                |
| 1/12/15  | -                   | -             | 4             | 1 | 2 | 02 | 01 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LRA        | -    | 1.000.000     | -              |
|          |                     |               | 3             | 1 | 2 | 05 | 01 | Estimasi Perubahan SAL                         | -    | -             | 1.000.000      |
|          |                     |               |               |   |   |    |    |  |      |               |                |
| 5/12/15  | -                   | -             | 1             | 1 | 1 | 03 | 01 | Kas di Bendahara Pengeluaran                   | -    | 20.000.000    | -              |
|          |                     |               | 3             | 1 | 1 | 03 | 01 | Koreksi Ekuitas                                | -    | -             | 20.000.000     |
|          |                     |               |               |   |   |    |    |  |      |               |                |
| 5/12/15  | -                   | -             | 7             | 2 | 8 | 99 | 99 | Pengeluaran RK PPKD                            | -    | 20.000.000    | -              |
|          |                     |               | 1             | 1 | 1 | 03 | 01 | Kas di Bendahara Pengeluaran                   | -    | -             | 20.000.000     |
|          |                     |               |               |   |   |    |    |  |      |               |                |
| 10/12/15 | -                   | -             | 1             | 1 | 1 | 03 | 01 | Kas di Bendahara Pengeluaran                   | -    | 50.000.000    | -              |
|          |                     |               | 1             | 3 | 2 | 04 | 02 | Kendaraan Bermotor Penumpang                   | -    | -             | 50.000.000     |
|          |                     |               |               |   |   |    |    |  |      |               |                |
| 10/12/15 | -                   | -             | 7             | 2 | 8 | 99 | 99 | Pengeluaran RK PPKD                            | -    | 50.000.000    | -              |
|          |                     |               | 1             | 1 | 1 | 03 | 01 | Kas di Bendahara Pengeluaran                   | -    | -             | 50.000.000     |
|          |                     |               |               |   |   |    |    |  |      |               |                |
| 15/12/15 | -                   | -             | 3             | 1 | 1 | 03 | 01 | Koreksi Ekuitas                                | -    | 4.000.000     | -              |
|          |                     |               | 2             | 1 | 5 | 00 | 00 | Utang Belanja                                  | -    | -             | 4.000.000      |
|          |                     |               |               |   |   |    |    |  |      |               |                |
| 15/12/15 | -                   | -             | 2             | 1 | 5 | 00 | 00 | Utang Belanja                                  | -    | 4.000.000     | -              |
|          |                     |               | 7             | 1 | 8 | 99 | 99 | Penerimaan RK PPKD                             | -    | -             | 4.000.000      |
|          |                     |               |               |   |   |    |    |  |      |               |                |
| 20/12/15 | -                   | -             | 1             | 3 | 2 | 00 | 00 | Peralatan dan Mesin                            | -    | 500.000.000   | -              |
|          |                     |               | 1             | 3 | 4 | 00 | 00 | Jalan, Irigasi, Jaringan                       | -    | -             | 500.000.000    |
|          |                     |               |               |   |   |    |    |  |      |               |                |
| Jumlah   |                     |               |               |   |   |    |    |  |      | 650.000.000   | 650.000.000    |

PPK-SKPD  
  
(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Kepala SKPD  
  
(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Bentuk dan Cara Pengisian Buku Jurnal Penyesuaian (JP)

Penyesuaian atas transaksi sebelumnya dicatat dalam buku jurnal penyesuaian untuk transaksi berbasis akrual yang digunakan untuk menyusun LO dan Neraca sebagai berikut :

KABUPATEN KUNINGAN
BUKU JURNAL PENYESUAIAN (JP)

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan

Halaman 01

| Tanggal  | Nomor            |            | Kode Rekening |   |   |    |    | Uraian  | Ref. | Debit (Rp) | Kredit (Rp) |
|----------|------------------|------------|---------------|---|---|----|----|---|------|------------|-------------|
|          | Bukti Penerimaan | Bukti Lain |               |   |   |    |    |   |      |            |             |
| 1        | 2                |            | 3             |   |   |    |    | 4   | 5    | 6          | 7           |
|          |                  |            |               |   |   |    |    |   |      |            |             |
| 31/12/15 | -                | -          | 9             | 1 | 2 | 20 | 01 | Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat | -    | 1.000.000  | -           |
|          |                  |            | 2             | 1 | 5 | 02 | 01 | Utang Belanja Barang dan Jasa                   | -    | -          | 1.000.000   |
|          |                  |            |               |   |   |    |    |   |      |            |             |
| 31/12/15 |                  |            | 1             | 1 | 3 | 02 | 15 | Piutang Retribusi Penyewaan Kendaraan Bermotor  | -    | 500.000    | -           |
|          |                  |            | 8             | 1 | 2 | 15 | 04 | Retribusi Penyewaan Kendaraan Bermotor-LO       | -    | -          | 500.000     |
|          |                  |            |               |   |   |    |    |   |      |            |             |
| 31/12/15 | -                | -          | 9             | 1 | 2 | 04 | 02 | Beban Jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah   | -    | 6.000.000  | -           |
|          |                  |            | 1             | 1 | 6 | 03 | 01 | Beban Jasa Dibayar Dimuka                       | -    | -          | 6.000.000   |
|          |                  |            |               |   |   |    |    |   |      |            |             |
| 31/12/15 | -                | -          | 2             | 1 | 4 | 04 | 01 | Pendapatan Diterima Dimuka Lainnya              | -    | 4.500.000  | -           |
|          |                  |            | 8             | 1 | 2 | 15 | 04 | Retribusi Penyewaan Kendaraan Bermotor-LO       | -    | -          | 4.500.000   |
|          |                  |            |               |   |   |    |    |   |      |            |             |
| 31/12/15 | -                | -          | 1             | 1 | 7 | 01 | 01 | Persediaan ATK                                  | -    | 3.000.000  | -           |
|          |                  |            | 9             | 1 | 2 | 01 | 01 | Beban Persediaan ATK                            | -    | -          | 3.000.000   |
|          |                  |            |               |   |   |    |    |   |      |            |             |
| Jumlah   |                  |            |               |   |   |    |    |   |      | 15.000.000 | 15.000.000  |

PPK-SKPD
(tanda tangan)
(nama lengkap)
NIP.....

Kepala SKPD
(tanda tangan)
(nama lengkap)
NIP.....

**Langkah III : Melakukan Posting ke Buku Besar**

Setelah melakukan penjurnalan seluruh transaksi, maka PPK-SKPD melakukan posting atas pencatatan jurnal tersebut ke buku besar. Posting ini berguna agar seluruh transaksi yang sama-sama mempengaruhi suatu kode rekening/akun dapat dikelompokkan dalam satu buku besar untuk kode rekening/akun yang bersangkutan. Periode posting harus semakin diusahakan dapat dilakukan dalam waktu yang semakin singkat misalkan untuk periode mingguan atau bahkan harian.

Contoh buku besar SKPD : Kas di Bendahara Pengeluaran sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

**KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR**

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 1.1.1.03.01  
Nama Rekening : Kas di Bendahara Pengeluaran  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD :

Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian                       | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|------------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |                              |               |                |
| 1  |       | 5/12/2022  | Jk  | Koreksi Ekuitas              | 20.000.000    | -              |
| 2  |       | 5/12/2022  | Jk  | Pengeluaran RK PPKD          | -             | 20.000.000     |
| 3  |       | 10/12/2022 | Jk  | Kendaraan Bermotor Penumpang | 50.000.000    | -              |
| 4  |       | 10/12/2022 | Jk  | Pengeluaran RK PPKD          | -             | 50.000.000     |
|    |       |            |     |                              |               |                |
|    |       |            |     | Jumlah                       | 70.000.000    | 50.000.000     |
|    |       |            |     | Saldo                        | -             | -              |

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Piutang Retribusi Penyewaan Kendaraan Bermotor sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 1.1.3.02.15  
Nama Rekening : Piutang Retribusi Penyewaan Kendaraan Bermotor  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian                                    | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|---|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |   |               |                |
| 1  |       | 31/12/2022 | JP  | Retribusi Penyewaan Kendaraan Bermotor-LO | 500.000       | -              |
|    |       |            |     |   |               |                |
|    |       |            |     | Jumlah                                    | 500.000       | -              |
|    |       |            |     | Saldo                                     | 500.000       | -              |

PPK-SKPD Kepala SKPD

(tanda tangan) (tanda tangan)  
(nama lengkap) (nama lengkap)  
NIP..... NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Beban Jasa Dibayar Dimuka sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 1.1.6.03.01  
Nama Rekening : Beban Jasa Dibayar Dimuka  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian                                   | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|--|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |  |               |                |
| 1  |       | 30/6/2022  | JU  | Penerimaan RK PPKD                       | 12.000.000    | -              |
| 2  |       | 31/12/2022 | JP  | Beban Jasa Premi Asuransi Dibayar Dimuka | -             | 6.000.000      |
|    |       |            |     |  |               |                |
|    |       |            |     | Jumlah                                   | 12.000.000    | 6.000.000      |
|    |       |            |     | Saldo                                    | 6.000.000     | -              |

PPK-SKPD Kepala SKPD

(tanda tangan) (tanda tangan)  
(nama lengkap) (nama lengkap)  
NIP..... NIP.....



Contoh buku besar SKPD : Persediaan ATK sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 1.1.7.01.01  
Nama Rekening : Persediaan ATK  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian               | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|----------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |                      |               |                |
| 1  |       | 31/12/2022 | JP  | Beban Persediaan ATK | 3.000.000     | -              |
|    |       |            |     |                      |               |                |
|    |       |            |     | Jumlah               | 3.000.000     | -              |
|    |       |            |     | Saldo                | 3.000.000     | -              |

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Peralatan dan Mesin sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 1.3.2.00.00  
Nama Rekening : Peralatan dan Mesin  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian                   | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|--------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |                          |               |                |
| 1  |       | 20/12/2022 | Jk  | Jalan, Irigasi, Jaringan | 500.000.000   | -              |
|    |       |            |     |                          |               |                |
|    |       |            |     | Jumlah                   | 500.000.000   | -              |
|    |       |            |     | Saldo                    | 500.000.000   | -              |

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Kendaraan Bermotor Penumpang sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 1.3.2.04.02  
Nama Rekening : Kendaraan Bermotor Penumpang  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD :

Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian                       | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|------------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |                              |               |                |
| 1  |       | 10/12/2022 | Jk  | Kas di Bendahara Pengeluaran | -             | 50.000.000     |
|    |       |            |     |                              |               |                |
|    |       |            |     | Jumlah                       | -             | 50.000.000     |
|    |       |            |     | Saldo                        | -             | 50.000.000     |

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Jalan, Irigasi, Jaringan sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 1.3.4.00.00  
Nama Rekening : Jalan, Irigasi, Jaringan  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD :

Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian              | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|---------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |                     |               |                |
| 1  |       | 20/12/2022 | Jk  | Peralatan dan Mesin | -             | 500.000.000    |
|    |       |            |     |                     |               |                |
|    |       |            |     | Jumlah              | -             | 500.000.000    |
|    |       |            |     | Saldo               | -             | 500.000.000    |

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Pendapatan Diterima Dimuka sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD

Kode Rekening

Nama Rekening

Pagu APBD

Pagu perubahan APBD

:

:

:

:

:

SKPD Kabupaten Kuningan

2.1.4.04.01

Pendapatan Diterima Dimuka

Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian                                    | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|---|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |   |               |                |
| 1  |       | 30/6/2022  | JU  | Pengeluaran RK PPKD                       | -             | 6.000.000      |
| 2  |       | 31/12/2022 | JP  | Retribusi Penyewaan Kendaraan Bermotor-LO | 4.500.000     | -              |
|    |       |            |     |   |               |                |
|    |       |            |     | Jumlah                                    | 4.500.000     | 6.000.000      |
|    |       |            |     | Saldo                                     | -             | 1.500.000      |

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP.....

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Utang Belanja sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD

Kode Rekening

Nama Rekening

Pagu APBD

Pagu perubahan APBD

:

:

:

:

:

SKPD Kabupaten Kuningan

2.1.5.00.00

Utang Belanja

Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian             | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|--------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |                    |               |                |
| 1  |       | 15/12/2022 | Jk  | Koreksi Ekuitas    | -             | 4.000.000      |
| 2  |       | 15/12/2022 | Jk  | Penerimaan RK PPKD | 4.000.000     | -              |
|    |       |            |     |                    |               |                |
|    |       |            |     | Jumlah             | 4.000.000     | 4.000.000      |
|    |       |            |     | Saldo              | -             | -              |

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP.....

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Utang Belanja Barang dan Jasa sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 2.1.5.02.01  
Nama Rekening : Utang Belanja Barang dan Jasa  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD :

Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian  | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|---|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |   |               |                |
| 1  |       | 31/12/2022 | JP  | Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat | -             | 1.000.000      |
|    |       |            |     |   |               |                |
|    |       |            |     | Jumlah  | -             | 1.000.000      |
|    |       |            |     | Saldo   | -             | 1.000.000      |

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Koreksi Ekuitas sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 3.1.1.03.01  
Nama Rekening : Koreksi Ekuitas  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD :

Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian                       | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|------------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |                              |               |                |
| 1  |       | 5/12/2022  | Jk  | Kas di Bendahara Pengeluaran | -             | 20.000.000     |
| 2  |       | 15/12/2022 | Jk  | Utang Belanja                | 4.000.000     | -              |
|    |       |            |     |                              |               |                |
|    |       |            |     | Jumlah                       | 4.000.000     | 20.000.000     |
|    |       |            |     | Saldo                        | -             | 16.000.000     |

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Estimasi Perubahan SAL sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 3.1.2.05.01  
Nama Rekening : Estimasi Perubahan SAL  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD :

Halaman 01

| No | Bukti |           | Ref | Uraian  | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|-----------|-----|---|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal   |     |   |               |                |
| 1  |       | 30/6/2022 | JM  | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Ruangan-LRA | 6.000.000     | -              |
| 1  |       | 30/6/2022 | JK  | Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah      | -             | 12.000.000     |
| 3  |       | 1/12/2022 | Jk  | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Ruangan-LRA | -             | 1.000.000      |
|    |       |           |     |   |               |                |
|    |       |           |     | Jumlah  | 6.000.000     | 13.000.000     |
|    |       |           |     | Saldo   | -             | 7.000.000      |

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Retribusi Ruangan-LRA sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 4.1.2.02.01  
Nama Rekening : Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Ruangan-LRA  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD :

Halaman 01

| No | Bukti |           | Ref | Uraian                 | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|-----------|-----|------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal   |     |                        |               |                |
| 1  |       | 30/6/2022 | JM  | Estimasi Perubahan SAL | -             | 6.000.000      |
| 2  |       | 1/12/2022 | Jk  | Estimasi Perubahan SAL | 1.000.000     | -              |
|    |       |           |     |                        |               |                |
|    |       |           |     | Jumlah                 | 1.000.000     | 6.000.000      |
|    |       |           |     | Saldo                  | -             | 5.000.000      |

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 5.2.2.04.02  
Nama Rekening : Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD :

Halaman 01

| No | Bukti |           | Ref | Uraian                 | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|-----------|-----|------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal   |     |                        |               |                |
| 1  |       | 30/6/2022 | JK  | Estimasi Perubahan SAL | 12.000.000    | -              |
|    |       |           |     |                        |               |                |
|    |       |           |     | Jumlah                 | 12.000.000    | -              |
|    |       |           |     | Saldo                  | 12.000.000    | -              |

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Penerimaan RK PPKD sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 7.1.8.99.99  
Nama Rekening : Penerimaan RK PPKD  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD :

Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian   | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|--|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |  |               |                |
| 1  |       | 30/6/2022  | JU  | Beban Jasa Dibayar Dimuka                      | -             | 12.000.000     |
| 2  |       | 1/12/2022  | Jk  | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Ruangan-LO | -             | 1.000.000      |
| 3  |       | 15/12/2022 | Jk  | Utang Belanja                                  | -             | 4.000.000      |
|    |       |            |     |  |               |                |
|    |       |            |     | Jumlah   | -             | 17.000.000     |
|    |       |            |     | Saldo  | -             | 17.000.000     |

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Pengeluaran RK PPKD sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 7.2.8.99.99  
Nama Rekening : Pengeluaran RK PPKD  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian                       | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|------------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |                              |               |                |
| 1  |       | 30/6/2022  | JU  | Pendapatan Diterima Dimuka   | 6.000.000     | -              |
| 2  |       | 5/12/2022  | Jk  | Kas di Bendahara Pengeluaran | 20.000.000    | -              |
| 3  |       | 10/12/2022 | Jk  | Kas di Bendahara Pengeluaran | 50.000.000    | -              |
|    |       |            |     |                              |               |                |
|    |       |            |     | Jumlah                       | 76.000.000    | -              |
|    |       |            |     | Saldo                        | 76.000.000    | -              |

PPK-SKPD Kepala SKPD

(tanda tangan) (tanda tangan)  
(nama lengkap) (nama lengkap)  
NIP..... NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Ruangan-LO sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 8.1.2.15.03  
Nama Rekening : Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Ruangan-LO  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |           | Ref | Uraian             | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|-----------|-----|--------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal   |     |                    |               |                |
| 1  |       | 1/12/2022 | Jk  | Penerimaan RK PPKD | 1.000.000     | -              |
|    |       |           |     |                    |               |                |
|    |       |           |     | Jumlah             | 1.000.000     | -              |
|    |       |           |     | Saldo              | 1.000.000     | -              |

PPK-SKPD Kepala SKPD

(tanda tangan) (tanda tangan)  
(nama lengkap) (nama lengkap)  
NIP..... NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Retribusi Penyewaan Kendaraan Bermotor-LO sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

**KABUPATEN KUNINGAN**  
**BUKU BESAR**

**SKPD** : SKPD Kabupaten Kuningan  
**Kode Rekening** : 8.1.2.15.04  
**Nama Rekening** : Retribusi Penyewaan Kendaraan Bermotor-LO  
**Pagu APBD** :  
**Pagu perubahan APBD** : **Halaman 01**

| No | Bukti |            | Ref | Uraian   | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp)   |
|----|-------|------------|-----|--|---------------|------------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |  |               |                  |
| 1  |       | 31/12/2022 | JP  | Piutang Retribusi Penyewaan Kendaraan Bermotor | -             | 500.000          |
| 2  |       | 31/12/2022 | JP  | Pendapatan Diterima Dimuka                     | -             | 4.500.000        |
|    |       |            |     |  |               |                  |
|    |       |            |     | <b>Jumlah</b>                                  | -             | <b>5.000.000</b> |
|    |       |            |     | <b>Saldo</b>                                   | -             | <b>5.000.000</b> |

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Beban Persediaan ATK sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

**KABUPATEN KUNINGAN**  
**BUKU BESAR**

**SKPD** : SKPD Kabupaten Kuningan  
**Kode Rekening** : 9.1.2.01.01  
**Nama Rekening** : Beban Persediaan ATK  
**Pagu APBD** :  
**Pagu perubahan APBD** : **Halaman 01**

| No | Bukti |            | Ref | Uraian         | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp)   |
|----|-------|------------|-----|----------------|---------------|------------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |                |               |                  |
| 1  |       | 31/12/2022 | JP  | Persediaan ATK | -             | 3.000.000        |
|    |       |            |     |                |               |                  |
|    |       |            |     | <b>Jumlah</b>  | -             | <b>3.000.000</b> |
|    |       |            |     | <b>Saldo</b>   | -             | <b>3.000.000</b> |

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....



Contoh buku besar SKPD : Beban Jasa Premi Asuransi Barang Milik Barang sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

| SKPD                | :     | SKPD Kabupaten Kuningan                       |     |                           |               |                |
|---------------------|-------|---|-----|---------------------------|---------------|----------------|
| Kode Rekening       | :     | 9.1.2.04.02                                   |     |                           |               |                |
| Nama Rekening       | :     | Beban Jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah |     |                           |               |                |
| Pagu APBD           | :     |   |     |                           |               |                |
| Pagu perubahan APBD | :     |   |     |                           |               | Halaman 01     |
| No                  | Bukti |   | Ref | Uraian                    | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|                     | Nomor | Tanggal                                       |     |                           |               |                |
| 1                   |       | 31/12/2022                                    | JP  | Beban Jasa Dibayar Dimuka | 6.000.000     | -              |
|                     |       |   |     |                           |               |                |
|                     |       |   |     | Jumlah                    | 6.000.000     | -              |
|                     |       |   |     | Saldo                     | 6.000.000     | -              |

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPD : Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

| SKPD                | :     | SKPD Kabupaten Kuningan                         |     |                               |               |                |
|---------------------|-------|---|-----|-------------------------------|---------------|----------------|
| Kode Rekening       | :     | 9.1.2.20.01                                     |     |                               |               |                |
| Nama Rekening       | :     | Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat |     |                               |               |                |
| Pagu APBD           | :     |   |     |                               |               |                |
| Pagu perubahan APBD | :     |   |     |                               |               | Halaman 01     |
| No                  | Bukti |   | Ref | Uraian                        | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|                     | Nomor | Tanggal   |     |                               |               |                |
| 1                   |       | 31/12/2022                                      | JP  | Utang Belanja Barang dan Jasa | 1.000.000     | -              |
|                     |       |   |     |                               |               |                |
|                     |       |   |     | Jumlah                        | 1.000.000     | -              |
|                     |       |   |     | Saldo                         | 1.000.000     | -              |

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Langkah IV : Menyusun Neraca Saldo

Setelah melakukan posting seluruh pencatatan dalam buku besar maka kemudian Tenaga Akuntansi di SKPD membuat neraca saldo sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Penyusunan neraca saldo oleh Tenaga Akuntansi di SKPD dilakukan secara triwulanan. Neraca saldo disusun dengan cara memindahkan saldo-saldo yang ada di tiap buku besar ke dalam Neraca Saldo. Contoh Neraca Saldo dari hasil pencatatan dan posting contoh transaksi keuangan diatas adalah sebagai berikut :

KABUPATEN KUNINGAN  
NERACA SALDO  
PER TANGGAL 31 Desember 2022  
SKPD : SKPD Kabupaten Kuningan

| Kode Rekening |   |   |    |    | Uraian  | Jumlah      |             |
|---------------|---|---|----|----|---|-------------|-------------|
|               |   |   |    |    |   | Debit       | Kredit      |
| 1             |   |   |    |    | 2   | 3           | 4           |
| 1             | 1 | 3 | 02 | 15 | Piutang Retribusi Penyewaan Kendaraan Bermotor  | 500.000     | -           |
| 1             | 1 | 6 | 03 | 01 | Beban Jasa Dibayar Dimuka                       | 6.000.000   | -           |
| 1             | 1 | 7 | 01 | 01 | Persediaan ATK                                  | 3.000.000   | -           |
| 1             | 3 | 2 | 00 | 00 | Peralatan dan Mesin                             | 500.000.000 | -           |
| 1             | 3 | 2 | 04 | 02 | Kendaraan Bermotor Penumpang                    | -           | 50.000.000  |
| 1             | 3 | 4 | 00 | 00 | Jalan, Irigasi, Jaringan                        | -           | 500.000.000 |
| 2             | 1 | 4 | 04 | 01 | Pendapatan Diterima Dimuka                      | -           | 1.500.000   |
| 2             | 1 | 5 | 02 | 01 | Utang Belanja Barang dan Jasa                   | -           | 1.000.000   |
| 3             | 1 | 1 | 03 | 01 | Koreksi Ekuitas                                 | -           | 16.000.000  |
| 3             | 1 | 2 | 05 | 01 | Estimasi Perubahan SAL                          | -           | 7.000.000   |
| 4             | 1 | 2 | 15 | 03 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Ruang-LRA   | -           | 5.000.000   |
| 5             | 2 | 2 | 04 | 02 | Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah      | 12.000.000  | -           |
| 7             | 1 | 8 | 99 | 99 | Penerimaan RK PPKD                              | -           | 17.000.000  |
| 7             | 2 | 8 | 99 | 99 | Pengeluaran RK PPKD                             | 76.000.000  | -           |
| 8             | 1 | 2 | 15 | 03 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Ruang-LO    | 1.000.000   | -           |
| 8             | 1 | 2 | 15 | 04 | Retribusi Penyewaan Kendaraan Bermotor-LO       | -           | 5.000.000   |
| 9             | 1 | 2 | 01 | 01 | Beban Persediaan ATK                            | -           | 3.000.000   |
| 9             | 1 | 2 | 04 | 02 | Beban Jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah   | 6.000.000   | -           |
| 9             | 1 | 2 | 20 | 01 | Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat | 1.000.000   | -           |
|               |   |   |    |    |   |             |             |
| Jumlah        |   |   |    |    |   | 605.500.000 | 605.500.000 |

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

## **SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI DI SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH YANG MENCATAT TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH DAN KAS DAERAH (SKPKD- PPKD)**

Bagian ini menjelaskan Sistem dan Prosedur Akuntansi secara umum di Pemerintah Kabupaten Kuningan untuk Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mencatat transaksi pemerintah daerah dan kas daerah yang selanjutnya disebut sistem dan prosedur akuntansi SKPKD-PPKD.

### **KEBIJAKAN UMUM**

Sistem dan prosedur akuntansi di SKPKD-PPKD meliputi serangkaian proses mulai dari diperolehnya bukti transaksi keuangan, dilakukannya pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual ataupun menggunakan aplikasi komputer.

SKPKD-PPKD melaksanakan akuntansi dikarenakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPKD) merupakan entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi realisasi RKA-PPKD dan Kas Daerah yang terjadi di lingkungan satuan kerjanya selain mencatat transaksi realisasi RKA-SKPD. Pihak utama yang menjalankan Akuntansi di SKPKD-PPKD ini adalah :

1. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (PPK-SKPKD) yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). PPK-SKPKD mencatat transaksi-transaksi realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah daerah yang tercantum dalam DPA-PPKD.

2. Fungsi Akuntansi Pemerintah Daerah yaitu **Sub Bidang Akuntansi** Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Fungsi Akuntansi Pemerintah Daerah ini mencatat transaksi-transaksi Kas Daerah sebagai akuntansi konsolidator.

Dalam pelaksanaan sistem dan prosedur akuntansi SKPKD-PPKD ini, PPK-SKPKD mempunyai 2 (dua) peran penting yang berkaitan dengan :

1. Entitas Akuntansi

Terkait dengan fungsinya sebagai entitas akuntansi maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam hal ini menjalankan 2 (dua) tugas yaitu :

- a. Melakukan akuntansi atas pelaksanaan DPA-SKPD

yaitu melaksanakan sistem dan prosedur akuntansi seperti Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada umumnya.

- b. Melaksanakan akuntansi atas pelaksanaan DPA-PPKD

yaitu melaksanakan sistem dan prosedur akuntansi transaksi-transaksi keuangan yang dikhususkan penugasannya kepada SKPD yang melaksanakan DPA-PPKD. Transaksi keuangan yang dilaksanakan ini tidak dilaksanakan oleh SKPD lainnya, yaitu transaksi pendapatan dari dana perimbangan, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Termasuk didalamnya adalah transaksi-transaksi pembiayaan, pencatatan investasi dan hutang.

2. Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan adalah entitas yang harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD dengan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Entitas pelaporan dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan dimana pelaksanaan sistem dan prosedur akuntansinya dilaksanakan oleh Kepala BPKAD selaku PPKD yang secara teknis dilaksanakan oleh **Sub Bidang Akuntansi**.

Terkait dengan peranan tersebut diatas maka sistem dan prosedur akuntansi yang dijalankan di SKPKD-PPKD adalah meliputi :

1. Akuntansi pencatatan anggaran;
2. Akuntansi pendapatan;
3. Akuntansi beban, belanja dan transfer PPKD;
4. Akuntansi aset PPKD;
5. Akuntansi kewajiban PPKD;
6. Akuntansi konsolidator PPKD; dan
7. Akuntansi koreksi dan penyesuaian PPKD.

Berdasarkan peran SKPKD-PPKD sebagai entitas akuntansi tersebut diatas maka sistem akuntansi di SKPKD dilaksanakan untuk menghasilkan Laporan Keuangan yang terdiri atas:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
5. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).

Kemudian berdasarkan peran SKPKD-PPKD sebagai entitas pelaporan tersebut diatas maka sistem akuntansi di SKPKD dilaksanakan untuk menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang terdiri atas:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
3. Neraca;
4. Laporan Operasional (LO);
5. Laporan Arus Kas (LAK);
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
7. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan keuangan entitas pelaporan ini merupakan hasil konsolidasi seluruh laporan keuangan entitas akuntansi di Pemerintah Kabupaten Kuningan, termasuk didalamnya BPKAD sebagai SKPD.

### **PIHAK-PIHAK TERKAIT**

Berbagai pihak/fungsi yang terkait dalam proses akuntansi SKPKD-PPKD beserta tugas-tugasnya adalah :

1. Pemerintah Lain
  - a. Pemerintah Lain adalah entitas pemerintah yang lebih tinggi kedudukannya daripada Pemerintah Kabupaten Kuningan yang memberikan dana bantuan seperti Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
  - b. Pemerintah Lainnya adalah entitas pemerintah selain Pemerintah Kabupaten Kuningan yang menjadi obyek pembiayaan Pemerintah Kabupaten Kuningan seperti pemberian pinjaman kepada pemerintah lain tersebut termasuk pengembaliannya. Semua obyek pembiayaan tersebut merupakan aset Pemerintah Kabupaten Kuningan.
  - c. Pemerintah Lainnya adalah entitas pemerintah yang menerima transfer dari Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Kuningan seperti dana bantuan keuangan kepada Pemerintah lainnya.
  - d. Pemerintah Lainnya adalah entitas pemerintah selain Pemerintah Kabupaten Kuningan yang memberikan pembiayaan kepada Pemerintah Kabupaten Kuningan seperti pemberian utang/pinjaman dan pengembalian utang/pinjaman tersebut. Semua obyek pembiayaan tersebut merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Kuningan.

Pihak-pihak ini adalah pemberi dokumen kepada Kuasa BUD.

## 2. Pihak Lain

Pihak Lainnya adalah pihak yang memberikan dokumen sumber kepada Kuasa BUD yaitu :

- a. Pihak diluar Bendahara Penerimaan PPKD, Wajib Pajak/ Retribusi Daerah dan Pemerintah Lainnya seperti Masyarakat atau Pihak Ketiga yang memberikan pendapatan kepada Pemerintah Kabupaten Kuningan misalnya sumbangan/ donasi.
- b. Pihak yang menjadi obyek pembiayaan Pemerintah Kabupaten Kuningan misalnya Bank tempat menyimpan Dana Cadangan, Perusahaan Daerah yang diberi modalnya oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan, Pihak ketiga yang diberikan pinjaman atau diberikan modal investasi non permanen lainnya. Semua obyek pembiayaan tersebut merupakan aset Pemerintah Kabupaten Kuningan.
- c. Pihak diluar Bendahara Pengeluaran PPKD dan Pemerintah Lainnya yang menerima transfer bantuan keuangan dari Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Kuningan seperti BUMN, BUMD, Masyarakat.
- d. Pihak yang memberikan pembiayaan kepada Pemerintah Kabupaten Kuningan misalnya Bank/Lembaga Keuangan/Obligator yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah Kabupaten Kuningan. Semua obyek pembiayaan tersebut merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Kuningan.

## 3. Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD)

- a. Dalam pelaksanaan prosedur akuntansi SKPKD yang mencatat transaksi pemerintah daerah, Kuasa BUD memiliki tugas menyiapkan dokumen-dokumen atas transaksi dengan pemerintah lain dan atau pihak lain yang terkait dengan proses pelaksanaan akuntansi SKPKD. Nota Kredit beserta Dokumen Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan akan diserahkan kepada Bendahara Penerimaan PPKD dan Nota Debet beserta Dokumen Belanja, Transfer dan Pengeluaran Pembiayaan akan

diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran PPKD.

- b. Dalam pelaksanaan prosedur akuntansi SKPKD yang mencatat transaksi kas daerah, Kuasa BUD memiliki tugas menyiapkan Laporan Posisi Kas Harian (LPKH) yang dilampiri semua bukti-bukti transaksi pendapatan, beban, belanja, transfer, dan pembiayaan yang terkait aset dan kewajiban serta PFK di pemerintah Kabupaten Kuningan pada hari tertentu yang diserahkan kepada Tenaga Akuntansi di Fungsi Akuntansi Pemerintah Daerah untuk dicatat

4. Bendahara Penerimaan PPKD

Dalam pelaksanaan prosedur ini, Bendahara Penerimaan PPKD memiliki tugas menerima dokumen-dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan akuntansi pendapatan dan penerimaan pembiayaan/pelepasan aset/penerimaan utang SKPKD dari Kuasa BUD dan menyiapkannya untuk kepentingan pencatatan oleh PPK-SKPKD.

5. Bendahara Pengeluaran PPKD

Dalam pelaksanaan prosedur ini, Bendahara Pengeluaran PPKD memiliki tugas menerima dokumen-dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan akuntansi belanja dan pengeluaran pembiayaan/perolehan aset/pelunasan utang SKPKD dari Kuasa BUD dan menyiapkannya untuk kepentingan pencatatan oleh PPK-SKPKD.

6. Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD

Dalam pelaksanaan prosedur ini, Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD bekerja mencatat transaksi Pemerintah Daerah memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Menerima dan menganalisa data dan informasi akuntansi dari dokumen anggaran DPA-PPKD yang diperoleh dari PPKD melalui PPK-SKPKD;
- b. Menerima kopi atau rangkap bukti-bukti transaksi dari Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran PPKD dan menganalisa data dan informasi akuntansi dari bukti transaksi



tersebut;

- c. Mencatat transaksi-transaksi pemerintah daerah berdasarkan bukti-bukti yang terkait yang merupakan anggaran DPA-PPKD dan transaksi DPA-PPKD ke buku jurnal;
  - d. Memposting jurnal-jurnal terkait transaksi-transaksi pemerintah daerah ke dalam buku besarnya masing-masing;
  - a. Menyusun neraca saldo untuk persiapan penyusunan laporan keuangan, yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan; dan
  - e. Menyerahkan buku jurnal, buku besar dan neraca saldo kepada PPK-SKPKD untuk diperiksa dan ditandatangani.
7. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPKD) : Sekretaris Badan atau Koordinator/Kepala Sub Bagian Keuangan BPKAD.

Dalam pelaksanaan prosedur ini, PPK-SKPKD memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Bertanggungjawab atas sistem akuntansi SKPKD-PPKD terkait transaksi pemerintah daerah yang dipimpinnya;
  - b. Memeriksa dan menandatangani hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Tenaga Akuntansi PPK-SKPKD setiap bulannya seperti Buku Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo SKPKD-PPKD yang mencatat transaksi pemerintah daerah; dan
  - c. Menyerahkan Buku Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo SKPKD-PPKD yang mencatat transaksi pemerintah daerah setiap triwulan kepada PPKD selaku pengguna anggaran untuk disetujui.
8. Tenaga Akuntansi di Fungsi Akuntansi Pemerintah Daerah

Dalam pelaksanaan prosedur ini, Tenaga Akuntansi di Fungsi Akuntansi Pemerintah Daerah bekerja mencatat transaksi kas daerah yang memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Menerima Laporan Posisi Kas Harian (LPKH) dan semua kopi

atau rangkap bukti-bukti transaksi pendapatan, beban, belanja, transfer, dan pembiayaan yang terkait aset dan kewajiban serta PFK di pemerintah Kabupaten Kuningan pada hari tertentu dari Kuasa BUD dan menganalisa data dan informasi akuntansi dari bukti transaksi tersebut;

- b. Mencatat transaksi-transaksi berdasarkan informasi akuntansi dari Laporan Posisi Kas Harian (LPKH) dan semua kopi atau rangkap bukti-bukti transaksi pendapatan, beban, belanja, transfer, dan pembiayaan yang terkait aset dan kewajiban serta PFK di pemerintah Kabupaten Kuningan pada hari tertentu dari Kuasa BUD ke buku jurnal;
  - c. Memposting jurnal-jurnal terkait informasi akuntansi dari Laporan Posisi Kas Harian (LPKH) dan semua kopi atau rangkap bukti-bukti transaksi pendapatan, beban, belanja, transfer, dan pembiayaan yang terkait aset dan kewajiban serta PFK di pemerintah Kabupaten Kuningan pada hari tertentu dari Kuasa BUD ke dalam buku besarnya masing-masing;
  - d. Menyusun neraca saldo untuk persiapan penyusunan laporan keuangan Neraca; dan
  - e. Menyerahkan buku jurnal, buku besar dan neraca saldo kepada Kepala Fungsi Akuntansi Pemerintah Daerah untuk diperiksa dan ditandatangani.
9. Kepala Fungsi Akuntansi Pemerintah Daerah : Kepala Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan BPKAD.

Dalam pelaksanaan prosedur ini, Kepala Fungsi Akuntansi Pemerintah Daerah memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Bertanggungjawab atas sistem akuntansi SKPKD-PPKD terkait transaksi kas daerah yang dipimpinnya;
- b. Memeriksa dan menandatangani hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Tenaga Akuntansi Fungsi Akuntansi Pemerintah Daerah setiap bulannya seperti Buku Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo SKPKD-PPKD yang mencatat transaksi kas daerah; dan

- c. Menyetujui Buku Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo yang diserahkan SKPKD-PPKD setiap triwulan; dan
  - d. Menyerahkan Buku Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo SKPKD-PPKD yang mencatat transaksi kas daerah setiap triwulan kepada PPKD selaku pengguna anggaran untuk disetujui
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (tidak termasuk Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan).

dalam pelaksanaan prosedur ini, PPKD memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Sebagai Pengguna Anggaran, menyerahkan dokumen anggaran PPKD seperti DPA-PPKD kepada Tenaga Akuntansi PPK-SKPKD melalui PPK-SKPKD.
  - b. Sebagai Pengguna Anggaran, menyetujui Buku Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo yang diserahkan PPK-SKPKD dan Kepala Fungsi Akuntansi Pemda setiap triwulan
  - c. Sebagai BUD, menerima dan melakukan evaluasi dan analisa pertanggungjawaban (SPJ) pendapatan dan penerimaan pembiayaan dari Bendahara Penerimaan PPKD kemudian mengesahkannya dalam rangka rekonsiliasi penerimaan kas;
  - d. Sebagai BUD, menerima dan melakukan evaluasi dan analisa pertanggungjawaban (SPJ) periodik fungsional atas Belanja Langsung (LS) dan pengeluaran pembiayaan dari Bendahara Pengeluaran PPKD kemudian mengesahkannya dalam rangka rekonsiliasi pengeluaran kas; dan
  - e. Sebagai BUD, menandatangani Laporan Posisi Kas Harian (LPKH) yang disiapkan oleh Kuasa BUD yang menjadi dasar pencatatan akuntansi oleh Tenaga Akuntansi di Fungsi Akuntansi Pemerintah Daerah.
11. Kepala Daerah : Bupati untuk selanjutnya disebut KDH

Dalam pelaksanaan prosedur ini, KDH memiliki tugas menerbitkan :

- a. Surat Keputusan Pemberian Subsidi
- b. Surat Keputusan Pemberian Hibah
- c. Surat Keputusan Pemberian Bantuan Sosial
- d. Surat Keputusan Pemberian Transfer Bagi Hasil dan/atau Bantuan Keuangan
- e. Disposisi tentang Tanggap Darurat Bencana

### **DOKUMEN YANG DIGUNAKAN**

1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut DPA-PPKD adalah dokumen yang menetapkan rincian anggaran PPKD;
2. Bukti Setoran Bank merupakan formulir bukti melakukan setoran ke Rekening Umum Kas Daerah;
3. Bukti transfer merupakan slip bukti melakukan transfer dari suatu rekening ke rekening lainnya;
4. Nota Kredit merupakan bukti transaksi penerimaan uang di rekening kas umum daerah;
5. Surat Tanda Setoran selanjutnya disebut STS adalah bukti yang dibuat untuk melakukan penyetoran uang ke Kas Daerah.
6. Bukti pengakuan pendapatan PPKD seperti :
  - a. Peraturan Presiden tentang Dana Alokasi Umum;
  - b. Peraturan Menteri Keuangan tentang Bagi Hasil Pajak; Bagi Hasil Bukan Pajak; Dana Alokasi Khusus; dan Dana Darurat; dan
  - c. Keputusan Kepala Daerah (Gubernur) tentang Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah; Bantuan Keuangan; Hibah; Dana Darurat dari Pemerintah Provinsi.
7. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang selanjutnya disebut (SP2D) adalah Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan Kuasa Bendahara Umum Daerah

berdasarkan SPM;

8. Nota Debit merupakan bukti transaksi pengeluaran uang di rekening kas umum daerah;
9. Bukti pengakuan Belanja PPKD seperti :
  - a. Keputusan Kepala Daerah tentang Belanja Subsidi; Belanja Bantuan Sosial; dan Belanja Tak Terduga; dan
  - b. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NHPD) dan Keputusan Kepala Daerah tentang Belanja Hibah.
10. Bukti pengakuan Transfer PPKD seperti Keputusan Kepala Daerah tentang Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.
11. Bukti pengakuan Investasi PPKD seperti :
  - a. Sertifikat Saham untuk pengakuan investasi saham;
  - b. Sertifikat Deposito untuk pengakuan investasi dalam Deposito;
  - c. Sertifikat Obligasi/SUN untuk pengakuan investasi dalam Sertifikat Obligasi/SUN;
  - d. Sertifikat SBI untuk pengakuan investasi dalam Sertifikat SBI;
  - e. Peraturan Daerah dan Surat Keputusan Kepala Daerah dan BAST (jika berupa aset) untuk pengakuan : Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara/Daerah/Swasta; Investasi dalam Obligasi/Proyek Pembangunan; Dana Bergulir; dan Investasi Non Permanen Lainnya.
12. Bukti pengakuan Aset Lainnya PPKD seperti :
  - a. Kontrak/Perjanjian Penjualan secara Angsuran/Berita Acara Penjualan untuk pengakuan Tagihan Penjualan Angsuran: Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Kepada Kepala Daerah **dan Penjualan Rumah Golongan III**;
  - b. Keputusan Kepala Daerah tentang Pembebanan untuk Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
  - c. Kontrak/Perjanjian – Sewa untuk pengakuan Sewa;

- d. Kontrak/Perjanjian Kerjasama – Pemanfaatan untuk pengakuan Kerjasama Pemanfaatan;
  - e. Kontrak/Perjanjian Kerjasama – BOT/BTO untuk pengakuan Bangun Guna Serah (BOT)/ Bangun Serah Guna (BTO); dan
13. Bukti pengakuan Kewajiban PPKD seperti :
- a. Surat Perjanjian Hutang/Surat Tagihan Hutang untuk pengakuan Utang Bunga;
  - b. Surat Perjanjian Sewa Aset Pemda dan Bukti Memorial untuk Pendapatan Diterima Dimuka;
  - c. Keputusan Kepala Daerah tentang Belanja Subsidi; Belanja Bantuan Sosial; dan Belanja Tak Terduga; dan
  - d. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NHPD) dan Keputusan Kepala Daerah tentang Belanja Hibah.
14. Surat Perintah BUD adalah surat yang diterbitkan BUD untuk mengeluarkan kas untuk Investasi Jangka Pendek dan PFK.
15. Laporan Posisi Kas Harian merupakan atas kas umum daerah yang berada dalam pengelolaannya yang dibuat setiap hari dan diserahkan kepada Kepala Daerah setiap hari kerja pertama setiap minggunya.
16. Bukti Memorial adalah bukti transaksi yang digunakan untuk mencatat transaksi non keuangan.

### **BUKU DAN ATAU FORMULIR YANG DIGUNAKAN**

Buku dan atau formulir yang digunakan dalam pelaksanaan prosedur akuntansi di SKPKD-PPKD ini paling tidak terdiri dari :

1. Buku Jurnal Umum (JU)

Merupakan buku jurnal yang digunakan untuk melakukan pencatatan akuntansi atas transaksi non kas pada basis kas (pencatatan anggaran) dan transaksi basis akrual terkait penyusunan LO dan Neraca.

2. Buku Jurnal Penerimaan Kas (JM)

Merupakan buku jurnal yang digunakan untuk melakukan pencatatan akuntansi atas transaksi penerimaan kas yang berasal dari transaksi penerimaan pendapatan. Pada umumnya buku jurnal penerimaan kas digunakan untuk mencatat transaksi basis kas terkait penyusunan LRA dan LAK.

3. Buku Jurnal Pengeluaran Kas (JK)

Merupakan buku jurnal yang digunakan untuk melakukan pencatatan akuntansi atas transaksi pengeluaran kas untuk transaksi pengeluaran belanja. Pada umumnya buku jurnal pengeluaran kas digunakan untuk mencatat transaksi basis kas terkait penyusunan LRA dan LAK.

4. Buku Jurnal Koreksi (Jk)

Merupakan buku jurnal yang digunakan untuk melakukan pencatatan akuntansi penyesuaian khususnya atas transaksi-transaksi koreksi pendapatan, belanja, beban, transfer, pembiayaan, aset dan kewajiban.

5. Buku Jurnal Penyesuaian (Jp)

Merupakan buku jurnal yang digunakan untuk melakukan pencatatan akuntansi penyesuaian khususnya atas transaksi-transaksi koreksi pendapatan, beban, belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, beban dibayar dimuka dan pendapatan diterima dimuka di SKPKD-PPKD.

6. Buku Besar (BB)

Merupakan buku yang digunakan untuk menampung pencatatan hasil posting transaksi dari buku jurnal. Buku besar ini merupakan pencatatan akuntansi atas seluruh transaksi untuk suatu rekening/akun per jenis atau obyek. Jadi setiap rekening/akun per jenis atau objek mempunyai buku besar tersendiri.

7. Buku Besar Pembantu (BP)

Buku besar dapat dilengkapi dengan buku besar pembantu sebagai alat uji silang dan kelengkapan informasi rekening/akun tertentu. Buku besar pembantu berisi rincian akun (rincian obyek) yang telah dicatat dalam buku besar. Jika dirasakan informasi dalam buku besar sudah mencukupi maka buku besar pembantu tidak perlu dibuat lagi.

8. Neraca Saldo (NS)

Merupakan formulir yang mencatat nilai saldo setiap rekening/akun per rincian objek sehingga diketahui jumlah total dari seluruh rekening/akun.

## **KERANGKA SISTEM**

Secara umum proses akuntansi di SKPKD dimulai saat PPK-SKPKD menerima bukti-bukti transaksi dari Kuasa BUD. Untuk Fungsi Akuntansi Pemerintah Daerah, dimulai dari menerima Laporan Posisi Kas Harian (LPKH) dan bukti-bukti transaksi dari Kuasa BUD. Pada saat bukti transaksi keuangan tersebut telah diterima maka Tenaga Akuntansi PPK-SKPKD atau Fungsi Akuntansi Pemda, kemudian melakukan pencatatan akuntansi dalam buku jurnal terkait. Jadi pencatatan akuntansi untuk setiap transaksi dilakukan pada saat terjadinya transaksi dan atau pada saat bukti transaksi tersebut diterima namun pengakuan transaksi tetap pada tanggal bukti transaksi.

Kemudian secara berkala, Tenaga Akuntansi PPK-SKPD/Fungsi Akuntansi Pemda melakukan posting dari buku jurnal ke buku besar (pembantu). Posting ini merupakan pengelompokkan pencatatan transaksi ke dalam buku besar (pembantu) berdasarkan pada suatu kode rekening/akun transaksi. Setelah posting dari buku jurnal ke buku besar selesai dilakukan maka kemudian Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD/Fungsi Akuntansi Pemda menyusun Neraca Saldo sebagai dasar pembuatan Laporan Keuangan untuk setiap triwulan yang diserahkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah triwulan berakhir kepada PPK-SKPD/Kepala Fungsi Akuntansi Pemda.



## **ALUR PROSEDUR TEKNIS**

Penjelasan alur prosedur teknis dalam prosedur akuntansi di SKPKD-PPKD ini meliputi penjelasan atas sub prosedur teknis untuk :

1. Akuntansi pencatatan anggaran;
2. Akuntansi pendapatan;
3. Akuntansi beban, belanja dan transfer PPKD;
4. Akuntansi aset PPKD;
5. Akuntansi Kewajiban PPKD;
6. Akuntansi Konsolidator PPKD; dan
7. Akuntansi Koreksi dan Penyesuaian PPKD.

Untuk lebih memperjelas masing-masing sub sistem dan prosedur tersebut maka diberikan penjelasan tersendiri dalam bagian tersendiri sebagai lampiran dari penjelasan sistem dan prosedur ini. Bagian ini bisa dianggap sebagai pengantar yang memberikan penjelasan secara umum dari penjelasan teknis pelaksanaan di setiap sub sistem dan prosedur akuntansi di SKPKD-PPKD.

### **Langkah I : Penerimaan Bukti Transaksi**

Tenaga Akuntansi PPK-SKPKD yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menerima dokumen transaksi keuangan dari Kuasa BUD. Atas penerimaan bukti transaksi ini, Tenaga Akuntansi PPK-SKPKD harus menganalisa hingga benar-benar menyakini informasi akuntansi dari bukti tersebut. Setelah digunakan sebagai dasar melakukan pencatatan akuntansi maka bukti transaksi tersebut harus disimpan dengan baik.

Tenaga Akuntansi Fungsi Akuntansi Pemda di Bidang Akuntansi BPKAD menerima dokumen transaksi keuangan dari Kuasa BUD. Atas penerimaan bukti transaksi ini, Tenaga Akuntansi Fungsi Akuntansi Pemda harus menganalisa hingga benar-benar meyakini informasi akuntansi dari bukti tersebut. Setelah digunakan sebagai dasar melakukan pencatatan akuntansi maka bukti transaksi tersebut harus disimpan dengan baik.

## **Langkah II : Melakukan Pencatatan di Buku Jurnal**

Berdasarkan bukti transaksi yang diterimanya maka Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD/Fungsi Akuntansi Pemda melakukan pencatatan akuntansi di buku jurnal terkait. Pencatatan di buku jurnal disesuaikan dengan jenis transaksi yang terjadi, yaitu :

1. Buku Jurnal Umum (JU)
2. Buku Jurnal Penerimaan Kas (JM)
3. Buku Jurnal Pengeluaran Kas (JK)
4. Buku Jurnal Koreksi (Jk)
5. Buku Jurnal Penyesuaian (JP)

Dibawah ini akan dijelaskan mengenai bentuk dari masing-masing buku jurnal serta tata cara pengisian buku jurnal tersebut.

### **Bentuk dan Cara Pengisian Buku Jurnal Umum (JU)**

Merupakan buku jurnal yang digunakan untuk melakukan pencatatan akuntansi atas transaksi basis akrual terkait penyusunan LO dan Neraca. Format Buku Jurnal Umum ini juga dapat digunakan sebagai Buku Jurnal Koreksi dan Penyesuaian. Contoh Buku Jurnal Umum (JU), yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU JURNAL UMUM (JU)

SKPD : .....1)

Hal .....2)

| Tanggal    | Nomor<br>Bukti | Kode Rekening/Akun | Uraian | Ref. | Debit<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|------------|----------------|--------------------|--------|------|---------------|----------------|
| 1          | 2              | 3                  | 4      | 5    | 6             | 7              |
|            |                |                    |        |      |               |                |
|            |                |                    |        |      |               |                |
|            |                |                    |        |      |               |                |
|            |                |                    |        |      |               |                |
|            |                |                    |        |      |               |                |
|            |                |                    |        |      |               |                |
| Jumlah 10) |                |                    |        |      |               |                |

PPK-SKPKD/  
Kepala Fungsi  
Akuntansi Pemda

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)

NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)

NIP.....

Cara pengisian Buku Jurnal Umum, adalah sebagai berikut :

1. Diisikan Nama SKPKD yang menggunakan buku jurnal umum ini, misalkan BPKAD.
2. Diisikan no dari halaman buku jurnal ini.
3. Kolom 1 diisi dengan tanggal transaksi berdasarkan tanggal bukti tansaksi.
4. Kolom 2 diisi nomor bukti seperti Nomor BAST, STS, SP2D, NPHD, Nota Debit, Nota Kredit, Perpres, PMK, SK Kepala Daerah, bukti memorial atau bukti lainnya yang sah.
5. Kolom 3 diisi dengan kode rekening/akun yang terpengaruh oleh transaksi yang terjadi, sesuai dengan jurnal yang harus dilakukan.
6. Kolom 4 diisi dengan nama rekening/akun terpengaruh oleh transaksi yang terjadi, sesuai dengan jurnal yang dilakukan. Bisa juga ditambah uraian lain berupa keterangan dari transaksi tersebut.
7. Kolom 5 diisi dengan tanda checklist disesuaikan dengan nomor dokumen sumber dan saat posting ke buku besar.
8. Kolom 6 diisi dengan nilai jumlah Rp untuk sisi debit.
9. Kolom 7 diisi dengan nilai jumlah Rp untuk sisi kredit.
10. Diisikan jumlah total dari kolom 6 dan kolom 7.
11. Pada akhir suatu periode, misalkan pada periode setelah

dilakukan posting, buku jurnal ditandatangani oleh PPK-SKPKD atau Kepala Fungsi Akuntansi Pemda dan PPKD dengan mencantumkan nama dan NIP.

**Bentuk dan Cara Pengisian Buku Jurnal Penerimaan Kas (JM)**

Untuk mencatat penerimaan kas dari pendapatan digunakan buku jurnal penerimaan kas. Contoh Buku Jurnal Penerimaan Kas yang bersifat *double entry* adalah sebagai berikut :

KABUPATEN KUNINGAN

BUKU JURNAL PENERIMAAN KAS (JM)

SKPD : .....1)

Halaman .....2)

| Tanggal    | Nomor               |               | Kode Rekening/Akun | Uraian | Ref. | Debit<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|------------|---------------------|---------------|--------------------|--------|------|---------------|----------------|
|            | Bukti<br>Penerimaan | Bukti<br>Lain |                    |        |      |               |                |
| 1          | 2                   |               | 3                  |        | 5    | 6             | 7              |
|            |                     |               |                    |        |      |               |                |
|            |                     |               |                    |        |      |               |                |
|            |                     |               |                    |        |      |               |                |
|            |                     |               |                    |        |      |               |                |
|            |                     |               |                    |        |      |               |                |
|            |                     |               |                    |        |      |               |                |
| Jumlah 10) |                     |               |                    |        |      |               |                |

PPK-SKPKD/  
Kepala Fungsi  
Akuntansi  
Pemda

PPKD

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP.....

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP.....

Adapun cara Pengisian Buku Jurnal Penerimaan Kas, adalah sebagai berikut :

1. Diisikan Nama SKPKD yang menggunakan buku jurnal penerimaan kas ini.
2. Diisikan no dari halaman buku jurnal ini.
3. Kolom 1 diisi dengan tanggal transaksi penerimaan kas.
4. Kolom 2 diisi dengan Nomor STS, Nota Kredit, bukti memorial atau bukti penerimaan lainnya yang sah.
5. Kolom 3 diisi dengan kode rekening/akun pendapatan atau kontra pos belanja dan kode rekening penerimaan kasnya, sesuai dengan jurnal yang dilakukan.

- 6. Kolom 4 diisi dengan nama rekening/akun pendapatan atau kontra pos pendapatan dan nama rekening/akun penerimaan kasnya, sesuai dengan jurnal yang dilakukan. Bisa juga ditambah uraian lain berupa keterangan dari penerimaan kas tersebut.
- 7. Kolom 5 diisi dengan tanda checklist disesuaikan dengan nomor dokumen sumber dan saat posting ke buku besar.
- 8. Kolom 6 diisi dengan nilai jumlah Rp untuk sisi debit.
- 9. Kolom 7 diisi dengan nilai jumlah Rp untuk sisi kredit.
- 10. Diisikan jumlah total dari kolom 6 dan kolom 7.
- 11. Pada akhir suatu periode, misalkan pada periode setelah dilakukan posting, buku jurnal ditandatangani oleh PPK-SKPKD atau Kepala Fungsi Akuntansi Pemda dan PPKD dengan mencantumkan nama dan NIP.

**Bentuk dan Cara Pengisian Buku Jurnal Pengeluaran Kas (JK)**

Untuk mencatat pengeluaran kas untuk belanja atau koreksi pengembalian pendapatan digunakan buku jurnal pengeluaran kas. Contoh Buku Jurnal Pengeluaran Kas yang bersifat *double entry* adalah sebagai berikut :

**KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU JURNAL PENGELUARAN KAS (JK)**

SKPD : .....1)

Halaman ....2)

| Tanggal    | Nomor               |               | Kode Rekening/Akun | Uraian | Ref. | Debit<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|------------|---------------------|---------------|--------------------|--------|------|---------------|----------------|
|            | Bukti<br>Penerimaan | Bukti<br>Lain |                    |        |      |               |                |
| 1          | 2                   |               | 3                  | 4      | 5    | 6             | 7              |
|            |                     |               |                    |        |      |               |                |
|            |                     |               |                    |        |      |               |                |
|            |                     |               |                    |        |      |               |                |
|            |                     |               |                    |        |      |               |                |
| Jumlah 10) |                     |               |                    |        |      |               |                |

PPK-SKPKD/  
Kepala Fungsi  
Akuntansi  
Pemda  
  
(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

PPKD  
  
(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Adapun cara Pengisian Buku Jurnal Pengeluaran Kas, yang bersifat *double entry*, adalah sebagai berikut :

1. Diisikan Nama SKPKD yang menggunakan buku jurnal pengeluaran kas ini.
2. Diisikan no dari halaman buku jurnal ini.
3. Kolom 1 diisi dengan tanggal transaksi belanja atau koreksi pengembalian pendapatan.
4. Kolom 2 diisi Nomor SP2D, Nota Debit, bukti memorial atau bukti pengeluaran lainnya yang sah.
5. Kolom 3 diisi dengan kode rekening/akun belanja atau koreksi pengembalian pendapatan dan kode rekening/akun pengeluaran kasnya, sesuai dengan jurnal yang dilakukan.
6. Kolom 4 diisi dengan nama rekening/akun belanja atau koreksi pengembalian pendapatan dan nama rekening/akun pengeluaran kasnya, sesuai dengan jurnal yang dilakukan. Bisa juga ditambah uraian lain berupa keterangan dari pengeluaran kas tersebut.
7. Kolom 5 diisi dengan tanda checklist disesuaikan dengan nomor dokumen sumber dan saat posting ke buku besar.
8. Kolom 6 diisi dengan nilai jumlah Rp untuk sisi debit.
9. Kolom 7 diisi dengan nilai jumlah Rp untuk sisi kredit.
10. Diisikan jumlah total dari kolom 6 dan kolom 7.
11. Pada akhir suatu periode, misalkan pada periode setelah dilakukan posting, buku jurnal ditandatangani oleh PPK-SKPKD atau Kepala Fungsi Akuntansi Pemda dan PPKD dengan mencantumkan nama dan NIP.

### **Langkah III : Melakukan Posting ke Buku Besar**

Setiap periode secara berkala, seluruh pencatatan jurnal yang telah dilakukan diposting ke Buku Besar SKPKD sesuai dengan kode rekeningnya masing-masing. Posting dilakukan paling lambat setelah selesainya pencatatan atas seluruh transaksi pada suatu bulan. Posting ini merupakan pengelompokkan pencatatan transaksi ke dalam buku besar berdasarkan pada suatu kode rekening transaksi.

Contoh format Buku Besar SKPKD yang dapat digunakan adalah sebagai berikut :

**KABUPATEN KUNINGAN**  
**BUKU BESAR (PEMBANTU)**

SKPKD : .....1)  
Kode Rekening/Akun : .....2)  
Nama Rekening/Akun : .....3)  
Pagu APBD : .....4)  
Pagu perubahan APBD : .....5) Halaman ..6)

| No | Bukti |         | Ref | Uraian     | Debet<br>Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|---------|-----|------------|--------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal |     |            |              |                |
| 1  | 2     | 3       | 4   | 5          | 6            | 7              |
|    |       |         |     |            |              |                |
|    |       |         |     |            |              |                |
|    |       |         |     |            |              |                |
|    |       |         |     | Jumlah 14) |              |                |
|    |       |         |     | Saldo 15)  |              |                |

PPK-SKPKD/  
Kepala Fungsi  
Akuntansi  
Pemda

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)

(tanda tangan)  
(nama lengkap)

NIP.....

NIP.....

Cara Pengisian Buku Besar, yang contoh bentuknya seperti terlihat diatas, adalah sebagai berikut :

1. Diisikan Nama SKPKD yang menggunakan buku besar ini.
2. Diisikan nomor kode rekening untuk buku besar ini, diisikan kode rekening sampai dengan rincian objek.
3. Diisikan nama rekening untuk buku besar ini sesuai dengan pengisian kode rekening dibaris sebelumnya.
4. Diisikan nilai pagu anggaran dalam APBD atau nilai yang telah ditetapkan dalam anggaran untuk kode rekening ini.
5. Diisikan nilai pagu perubahan anggaran dalam Perubahan APBD atau nilai yang telah ditetapkan dalam perubahan anggaran untuk kode rekening ini.
6. Diisikan no halaman dari buku besar ini.
7. Kolom no 1 diisikan no urut transaksi
8. Kolom no 2 diisikan no bukti transaksi.
9. Kolom no 3 diisikan tanggal bukti transaksi.

10. Kolom no 4 diisikan referensi asal buku jurnal transaksi.
11. Kolom no 5 diisikan nama rekening terpengaruh oleh transaksi yang terjadi, sesuai dengan jurnal yang dilakukan. Bisa juga ditambah uraian lain berupa keterangan dari transaksi tersebut.
12. Kolom no 6 diisikan nilai pencatatan di sebelah debit, sesuai dengan nilai dalam buku jurnal.
13. Kolom no 7 diisikan nilai pencatatan di sebelah kredit, sesuai dengan nilai dalam buku jurnal.
14. Kolom no 8 diisikan nilai saldo setelah memperhitungkan debit dan kredit sesuai saldo normalnya.
15. Pada akhir suatu periode buku besar ditandatangani oleh PPK-SKPKD atau Kepala Fungsi Akuntansi Pemda dan PPKD dengan mencantumkan nama dan NIP.

Posting kedalam buku besar ini sesuai dengan kode rekening dari transaksi. Sehingga untuk satu kode dan nama rekening akan terdapat satu buku besar. Untuk itu jumlah dari buku besar sangat tergantung dari banyaknya kode rekening yang digunakan dalam transaksi yang terjadi.

#### **Langkah IV : Menyusun Neraca Saldo dan Laporan Keuangan**

Paling lambat sebelum periode penyampaian laporan keuangan maka PPK-SKPKD atau Fungsi Akuntansi Pemda membuat neraca saldo sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Neraca saldo disusun dengan cara memindahkan nilai saldo yang ada di tiap buku besar ke dalam formulir Neraca Saldo.

Contoh format Neraca Saldo yang dapat digunakan adalah sebagai berikut :



KABUPATEN KUNINGAN  
NERACA SALDO  
PER TANGGAL .....

SKPKD : ..... Halaman .....

| Kode rekening | Uraian | Jumlah |        |
|---------------|--------|--------|--------|
|               |        | Debit  | Kredit |
| 1             | 2      | 3      | 4      |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               | Jumlah |        |        |

PPK-SKPKD/  
Kepala Fungsi  
Akuntansi  
Pemda

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)

(tanda tangan)  
(nama lengkap)

NIP.....

NIP.....

Cara pengisian formulir neraca saldo, adalah sebagai berikut :

1. Diisikan tanggal dari periode penyusunan neraca saldo, misalkan jika neraca saldo disusun untuk periode 1 januari hingga 31 maret, maka dituliskan pertanggal 31 maret 20xx.
2. Diisikan nama dari SKPKD yang menyusun neraca saldo ini.
3. Diisikan no halaman dari formulir neraca saldo ini.
4. Kolom 1 diisi kode rekening – kode rekening yang mempunyai nilai saldo di buku besar.
5. Kolom 2 diisi nama rekening – nama rekening yang mempunyai nilai saldo di buku besar sesuai dengan kode rekeningnya yang telah dicatat di kolom sebelumnya.
6. Kolom 3 diisi nilai saldo sebelah debit yaitu nilai saldo dari kode / nama rekening yang mempunyai nilai saldo di sebelah debit seperti tercatat dalam buku besar atau sesuai dengan kondisi saldo normal kode / nama rekening tersebut.
7. Kolom 4 diisi nilai saldo sebelah kredit yaitu nilai saldo dari kode / nama rekening yang mempunyai nilai saldo di sebelah kredit seperti tercatat dalam buku besar atau sesuai dengan kondisi saldo normal kode / nama rekening tersebut.

8. Diisikan nilai jumlah masing-masing dari total sisi debit dan total sisi kredit.
9. Formulir neraca saldo yang disusun ditandatangani oleh PPKD dan PPK-SKPKD atau Fungsi Akuntansi Pemda dengan mencantumkan nama dan NIP-nya.

Setelah menyusun neraca saldo maka PPK-SKPKD atau Fungsi Akuntansi Pemda dapat menyusun laporan keuangan dengan cara memindahkan nama dan kode rekening serta nilainya yang tertera dalam neraca saldo ke dalam bentuk format laporan keuangan. Untuk kode rekening yang terkait dengan anggaran maka dimasukkan kedalam format laporan realisasi anggaran dan untuk kode rekening yang terkait dengan neraca maka dimasukkan kedalam format laporan neraca.

Demikianlah uraian penjelasan mengenai sistem dan prosedur akuntansi di SKPKD-PPKD Pemerintah Kabupaten Kuningan. Seluruh uraian penjelasan diatas dapat digambarkan secara sederhana dalam suatu gambaran aliran proses sebagai berikut :



## **SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI PENCATATAN ANGGARAN DI SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (SKPKD-PPKD)**

Bagian ini menjelaskan Sistem dan Prosedur Akuntansi Pencatatan Anggaran di Pemerintah Kabupaten Kuningan untuk Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mencatat transaksi pemerintah daerah.

### **KEBIJAKAN UMUM**

Pencatatan anggaran pada SKPKD-PPKD merupakan tahap persiapan sistem akuntansi pemerintah daerah. Pada tahap ini dilakukan pencatatan untuk merekam data anggaran yang akan membentuk estimasi perubahan SAL yang dilaksanakan pada saat terbitnya DPA-PPKD. Estimasi perubahan SAL ini merupakan akun perantara yang berguna dalam rangka pencatatan transaksi realisasi anggaran serta menghubungkannya dengan basis akuntansi akrual yang bermuara di ekuitas.

### **PIHAK-PIHAK TERKAIT**

Berbagai pihak/fungsi yang terkait dalam proses akuntansi pencatatan anggaran di SKPKD-PPKD beserta tugas-tugasnya adalah :

1. Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD

Dalam pelaksanaan prosedur ini, Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD bekerja mencatat transaksi anggaran SKPKD-PPKD memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Menerima dan menganalisa data dan informasi akuntansi dari dokumen anggaran DPA-PPKD yang diperoleh dari PPKD melalui PPK-SKPKD;

- b. Mencatat transaksi-transaksi pencatatan anggaran (DPA-PPKD) yang berada dalam kewenangan SKPKD-nya ke buku jurnal;
  - c. Memposting jurnal-jurnal anggaran ke dalam buku besarnya masing-masing; dan
  - d. Menyusun neraca saldo yang terkait akuntansi anggaran untuk persiapan penyusunan laporan keuangan, yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan; dan
  - a. Menyerahkan buku jurnal, buku besar dan neraca saldo kepada PPK-SKPKD untuk diperiksa dan ditandatangani..
2. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPKD) : Sekretaris Badan atau Koordinator/ Kepala Sub Bagian Keuangan BPKAD.
- Dalam pelaksanaan prosedur ini, PPK-SKPKD memiliki tugas sebagai berikut :
- a. Bertanggungjawab atas sistem akuntansi pencatatan anggaran di SKPKD-PPKD terkait transaksi pemerintah daerah yang dipimpinnya;
  - b. Memeriksa dan menandatangani hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Tenaga Akuntansi PPK-SKPKD setiap bulannya seperti Buku Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo SKPKD-PPKD yang mencatat transaksi pemerintah daerah setiap triwulan; dan
  - c. Menyerahkan Buku Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo SKPKD-PPKD yang mencatat transaksi pemerintah daerah setiap triwulan kepada PPKD selaku pengguna anggaran untuk disetujui.
3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (tidak termasuk Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan).

Dalam pelaksanaan prosedur ini, PPKD memiliki tugas sebagai Pengguna Anggaran, menyerahkan dokumen anggaran PPKD

seperti DPA-PPKD kepada Tenaga Akuntansi PPK-SKPKD melalui PPK-SKPKD.

### **DOKUMEN YANG DIGUNAKAN**

1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut DPA-PPKD adalah dokumen yang menetapkan rincian anggaran PPKD.
2. Bukti memorial adalah bukti transaksi yang digunakan untuk mencatat transaksi non keuangan.

### **BUKU DAN ATAU FORMULIR YANG DIGUNAKAN**

Buku dan atau formulir yang digunakan dalam pelaksanaan sistem dan prosedur akuntansi pencatatan anggaran di SKPKD-PPKD terdiri dari :

1. Buku Jurnal Umum (JU)  
Merupakan buku jurnal yang digunakan untuk melakukan pencatatan akuntansi atas pencatatan anggaran.
2. Buku Besar (BB)  
Merupakan buku yang digunakan untuk menampung pencatatan hasil posting transaksi dari buku jurnal. Buku besar ini merupakan pencatatan akuntansi atas seluruh transaksi untuk suatu rekening/akun per jenis atau obyek. Jadi setiap rekening/akun per jenis atau objek mempunyai buku besar tersendiri.
3. Buku Besar Pembantu (BP)  
Buku besar dapat dilengkapi dengan buku besar pembantu sebagai alat uji silang dan kelengkapan informasi rekening/akun tertentu. Buku besar pembantu berisi rincian akun (rincian obyek) yang telah dicatat dalam buku besar. Jika dirasakan informasi dalam buku besar sudah mencukupi maka buku besar pembantu tidak perlu dibuat lagi.

#### 4. Neraca Saldo (NS)

Merupakan formulir yang mencatat nilai saldo setiap rekening/akun per rincian objek sehingga diketahui jumlah total dari seluruh rekening/akun.

### **KERANGKA SISTEM**

Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD menerima DPA-PPKD dari PPKD selaku Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPKD. Setelah DPA-PPKD tersebut diterima maka Tenaga Akuntansi di PPK-PPKD kemudian melakukan pencatatan akuntansi atas informasi anggaran SKPKD-PPKD tersebut dalam buku jurnal umum.

Setelah informasi anggaran pada DPA-PPKD dicatat dalam buku jurnal maka Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD kemudian melakukan posting ke buku besar. Setelah posting dari buku jurnal ke buku besar selesai dilakukan maka kemudian Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD menyusun Neraca Saldo sebagai dasar pembuatan Laporan Keuangan untuk setiap triwulan yang diserahkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah triwulan berakhir kepada PPK-SKPKD.

### **ALUR PROSEDUR TEKNIS**

Teknis pelaksanaan sistem dan prosedur akuntansi pencatatan anggaran di SKPD ini adalah sebagai berikut :

#### **Langkah I : Penerimaan Bukti Transaksi**

Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD menerima DPA-PPKD dari PPKD selaku Pengguna Anggaran Pemda, kemudian menganalisa data dan informasi yang diperlukan. Dari DPA-PPKD tersebut, Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD akan mendapatkan informasi anggaran pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan sebagai contoh :

1. Misalkan pada DPA-PPKD di BPKAD Pemerintah Kabupaten Kuningan untuk tahun anggaran 2022 yang disahkan pada tanggal 3 Januari 2022, diketahui memiliki jumlah anggaran

pendapatan sebesar Rp 1.000.000.000,-, anggaran belanja sebesar Rp 500.000.000,-, anggaran transfer sebesar Rp200.000.000,- anggaran penerimaan pembiayaan sebesar Rp 100.000.000,- dan anggaran pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 400.000.000.

Berdasarkan data anggaran BPKAD Pemerintah Kabupaten Kuningan tersebut, maka Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD membuat Bukti Memorial. Bentuk formulir atau format dari Bukti memorial dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan SKPKD sebagai contoh :

| PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN |                                   |  |             |
|-------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|
| Bukti Memorial                |                                   |  |             |
| Satuan Kerja                  | :                                 | BPKAD Kabupaten Kuningan               |             |
| Keterangan Transaksi          | :                                 | Pencatatan Anggaran BPKAD sebagai PPKD |             |
| Tanggal bukti transaksi       | :                                 | 3 Januari 2022                         |             |
| Nomor Bukti Transaksi         | :                                 | xx.xx.x.xx.xx                          |             |
| Nama Bukti Transaksi          | :                                 | DPA-PPKD                               |             |
| Kode Rekening/Akun            | Uraian                            | Debet                                  | Kredit      |
| 3.1.2.01.01                   | Estimasi Pendapatan               | 1.000.000.000                          | -           |
| 3.1.2.02.01                   | Estimasi Penerimaan Pembiayaan    | 100.000.000                            | -           |
| 3.1.2.03.01                   | Apropriasi Belanja                | -                                      | 600.000.000 |
| 3.1.2.03.02                   | Apropriasi Transfer               | -                                      | 100.000.000 |
| 3.1.2.04.01                   | Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan | -                                      | 400.000.000 |
|                               |                                   |  |             |
|                               |                                   |  |             |
| PPK-SKPKD                     |                                   | PPKD                                   |             |
| (tanda tangan)                |                                   | (tanda tangan)                         |             |
| (nama lengkap)                |                                   | (nama lengkap)                         |             |
| NIP .....                     |                                   | NIP .....                              |             |

2. Misalkan pada suatu DPPA-SKPD Dinas A untuk tahun anggaran 2022 yang disahkan pada tanggal 3 September 2022, diketahui memiliki jumlah anggaran pendapatan sebesar Rp 1.100.000.000,- dan anggaran belanja sebesar Rp 750.000.000- .

Contoh sederhana tersebut diatas digunakan untuk mempermudah penjelasan sistem dan prosedur akuntansi pencatatan anggaran di SKPKD ini. Tetapi contoh tersebut diatas tidak menunjukkan semua bentuk anggaran di SKPKD yang secara nyata terjadi.



**Langkah II : Menjurnal Transaksi Pendapatan**

Berdasarkan Bukti Memorial yang dilampiri DPA-PPKD di BPKAD Pemerintah Kabupaten Kuningan, maka kemudian Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD mencatat transaksi tersebut di buku jurnal. Pencatatan akuntansi dilakukan kedalam buku jurnal umum sebagai berikut apabila anggaran pendapatan dan penerimaan pembiayaan lebih besar daripada anggaran belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan:

|                                   | Debit | Kredit |
|-----------------------------------|-------|--------|
| Estimasi Pendapatan_____ -LRA     | xxxx  |        |
| Estimasi Penerimaan Pembiayaan    | xxxx  |        |
| Estimasi Perubahan SAL            |       | xxxx   |
| Apropriasi Belanja_____           |       | xxxx   |
| Apropriasi Transfer               |       | xxxx   |
| Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan |       | xxxx   |

Pencatatan akuntansi dilakukan kedalam buku jurnal umum sebagai berikut apabila anggaran pendapatan dan penerimaan pembiayaan lebih kecil daripada anggaran belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan :

|                                   | Debit | Kredit |
|-----------------------------------|-------|--------|
| Estimasi Pendapatan_____ -LRA     | xxxx  |        |
| Estimasi Penerimaan Pembiayaan    | xxxx  |        |
| Estimasi Perubahan SAL            | xxxx  |        |
| Apropriasi Belanja_____           |       | xxxx   |
| Apropriasi Transfer               |       | xxxx   |
| Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan |       | xxxx   |

Pencatatan akuntansi dilakukan kedalam buku jurnal umum sebagai berikut apabila anggaran pendapatan dan penerimaan pembiayaan sama besar dengan anggaran belanja transfer, dan pengeluaran pembiayaan :

|                                   | Debit | Kredit |
|-----------------------------------|-------|--------|
| Estimasi Pendapatan_____ -LRA     | xxxx  |        |
| Estimasi Penerimaan Pembiayaan    | xxxx  |        |
| Apropriasi Belanja_____           |       | xxxx   |
| Apropriasi Transfer               |       | xxxx   |
| Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan |       | xxxx   |

Berdasarkan contoh transaksi 1 pada langkah 1 diatas maka pencatatan dalam buku jurnal umum dilakukan sebagai berikut :

|            |             |                                   | Debit         | Kredit      |
|------------|-------------|-----------------------------------|---------------|-------------|
| 3 Jan 2022 | 3.1.2.01.01 | Estimasi Pendapatan               | 1.000.000.000 |             |
|            | 3.1.2.02.01 | Estimasi Penerimaan Pembiayaan    | 100.000.000   |             |
|            | 3.1.2.03.01 | Apropirasi Belanja                |               | 500.000.000 |
|            | 3.1.2.03.02 | Apropirasi Transfer               |               | 200.000.000 |
|            | 3.1.2.04.01 | Apropirasi Pengeluaran Pembiayaan |               | 400.000.000 |

Berdasarkan contoh transaksi 2 terkait adanya perubahan APBD pada langkah 1 diatas maka pencatatan dalam buku jurnal umum dilakukan sebagai berikut :

|             |             |                        | Debit       | Kredit      |
|-------------|-------------|------------------------|-------------|-------------|
| 3 Sept 2022 | 3.1.2.01.01 | Estimasi Pendapatan    | 100.000.000 |             |
|             | 3.1.2.05.01 | Estimasi Perubahan SAL | 150.000.000 |             |
|             | 3.1.2.03.01 | Apropirasi Belanja     |             | 250.000.000 |

Penjurnalan tersebut diatas dilakukan dalam buku jurnal yang telah dijelaskan bagaimana bentuk dan pengisiannya di bagian sebelumnya. Atas dua transaksi tersebut dilakukan penjurnalan di buku jurnal umum sebagai berikut :

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU JURNAL UMUM (JU)

SKPKD : BPKAD

Halaman 01

| Tangga<br>1 | Nomor<br>Bukti | Kode Rekening |   |   |    |    | Uraian                               | Ref<br>. | Debit<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|-------------|----------------|---------------|---|---|----|----|--------------------------------------|----------|---------------|----------------|
| 1           | 2              | 3             |   |   |    |    | 4                                    | 5        | 6             | 7              |
|             |                |               |   |   |    |    |                                      |          |               |                |
| 3/1/15      |                | 3             | 1 | 2 | 01 | 01 | Estimasi Pendapatan                  | -        | 1.000.000.000 | -              |
|             |                | 3             | 1 | 2 | 02 | 01 | Estimasi Penerimaan<br>Pembiayaan    | -        | 100.000.000   | -              |
|             |                | 3             | 1 | 2 | 03 | 01 | Apropriasi Belanja                   | -        | -             | 500.000.000    |
|             |                | 3             | 1 | 2 | 03 | 02 | Apropriasi Transfer                  | -        | -             | 200.000.000    |
|             |                | 3             | 1 | 2 | 04 | 01 | Apropriasi Pengeluaran<br>Pembiayaan | -        | -             | 400.000.000    |
|             |                |               |   |   |    |    |                                      |          |               |                |
| 3/9/15      |                | 3             | 1 | 2 | 01 | 01 | Estimasi Pendapatan                  | -        | 100.000.000   | -              |
|             |                | 3             | 1 | 2 | 05 | 01 | Estimasi Perubahan SAL               | -        | 150.000.000   | -              |
|             |                | 3             | 1 | 2 | 03 | 01 | Apropriasi Belanja                   | -        | -             | 250.000.000    |
|             |                |               |   |   |    |    |                                      |          |               |                |
|             |                |               |   |   |    |    |                                      |          |               |                |
| Jumlah      |                |               |   |   |    |    |                                      |          | 1.350.000.000 | 1.350.000.000  |

PPK-SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)

(tanda tangan)  
(nama lengkap)

NIP.....

NIP.....

**Langkah III : Melakukan Posting ke Buku Besar**

Setelah melakukan penjurnalan anggaran pendapatan, maka Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD melakukan posting atas pencatatan jurnal tersebut ke buku besar. Posting ini berguna agar seluruh transaksi yang sama-sama mempengaruhi suatu akun atau kode rekening/akun dapat dikelompokkan dalam satu buku besar untuk kode rekening/akun yang bersangkutan.

Contoh buku besar untuk Estimasi Pendapatan sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal adalah :

KABUPATEN KUNINGAN

BUKU BESAR

SKPKD : BPKAD

Kode Rekening : 3.1.2.01.01

Nama Rekening : Estimasi Pendapatan

Pagu APBD : Rp. ----

Pagu perubahan APBD : Rp. ----

Halaman 01

| No | Bukti |           | Ref | Uraian                                   | Debet (Rp)    | Kredit (Rp) |
|----|-------|-----------|-----|--|---------------|-------------|
|    | Nomor | Tanggal   |     |  |               |             |
|    |       | 3/01/2022 | JU  | Pencatatan Anggaran Pendapatan           | 1.000.000.000 | -           |
|    |       | 3/09/2022 | JU  | Pencatatan Anggaran Perubahan Pendapatan | 100.000.000   | -           |
|    |       |           |     |  |               |             |
|    |       |           |     | Jumlah                                   | 1.100.000.000 | -           |
|    |       |           |     | Saldo                                    | 1.100.000.000 | -           |

PPK-SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar untuk Estimasi Penerimaan Pembiayaan sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal adalah :

KABUPATEN KUNINGAN

BUKU BESAR

SKPKD : BPKAD

Kode Rekening : 3.1.2.02.01

Nama Rekening : Estimasi Penerimaan Pembiayaan

Pagu APBD : Rp. ----

Pagu perubahan APBD : Rp. ----

Halaman 01

| No | Bukti |           | Ref | Uraian                                    | Debet (Rp)  | Kredit (Rp) |
|----|-------|-----------|-----|---|-------------|-------------|
|    | Nomor | Tanggal   |     |   |             |             |
|    |       | 3/01/2022 | JU  | Pencatatan Anggaran Penerimaan Pembiayaan | 100.000.000 | -           |
|    |       |           |     |   |             |             |
|    |       |           |     | Jumlah                                    | 100.000.000 | -           |
|    |       |           |     | Saldo                                     | 100.000.000 | -           |

PPK-SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)

NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)

NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar untuk Apropriasi Belanja sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal adalah :

**KABUPATEN KUNINGAN**  
**BUKU BESAR**

**SKPKD** : BPKAD  
**Kode Rekening** : 3.1.2.03.01  
**Nama Rekening** : Apropriasi Belanja  
**Pagu APBD** : Rp. ----  
**Pagu perubahan APBD** : Rp. ----

Halaman 01

| No | Bukti |           | Ref | Uraian                                | Debet (Rp) | Kredit (Rp) |
|----|-------|-----------|-----|---------------------------------------|------------|-------------|
|    | Nomor | Tanggal   |     |                                       |            |             |
|    |       | 3/01/2022 | JU  | Pencatatan Anggaran Belanja           | -          | 500.000.000 |
|    |       | 3/09/2022 | JU  | Pencatatan Anggaran Perubahan Belanja | -          | 250.000.000 |
|    |       |           |     |                                       |            |             |
|    |       |           |     | Jumlah                                | -          | 750.000.000 |
|    |       |           |     | Saldo                                 | -          | 750.000.000 |

PPK-SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar untuk Apropriasi Transfer sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal adalah :

**KABUPATEN KUNINGAN**  
**BUKU BESAR**

**SKPKD** : BPKAD  
**Kode Rekening** : 3.1.2.03.02  
**Nama Rekening** : Apropriasi Transfer  
**Pagu APBD** : Rp. ----  
**Pagu perubahan APBD** : Rp. ----

Halaman 01

| No | Bukti |           | Ref | Uraian                       | Debet (Rp) | Kredit (Rp) |
|----|-------|-----------|-----|------------------------------|------------|-------------|
|    | Nomor | Tanggal   |     |                              |            |             |
|    |       | 3/01/2022 | JU  | Pencatatan Anggaran Transfer | -          | 200.000.000 |
|    |       |           |     |                              |            |             |
|    |       |           |     | Jumlah                       | -          | 200.000.000 |
|    |       |           |     | Saldo                        | -          | 200.000.000 |

PPK-SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar untuk Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal adalah :

**KABUPATEN KUNINGAN**  
**BUKU BESAR**

**SKPKD** : BPKAD  
**Kode Rekening** : 3.1.2.04.02  
**Nama Rekening** : Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan  
**Pagu APBD** : Rp. ----  
**Pagu perubahan APBD** : Rp. ----

Halaman 01

| No | Bukti |           | Ref | Uraian  | Debet<br>(Rp) | Kredit (Rp)        |
|----|-------|-----------|-----|---|---------------|--------------------|
|    | Nomor | Tanggal   |     |   |               |                    |
|    |       | 3/01/2022 | JU  | Pencatatan Anggaran<br>Pengeluaran Pembiayaan | -             | 400.000.000        |
|    |       |           |     |   |               |                    |
|    |       |           |     | <b>Jumlah</b>                                 | -             | <b>400.000.000</b> |
|    |       |           |     | <b>Saldo</b>                                  | -             | <b>400.000.000</b> |

PPK-SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar untuk Estimasi Perubahan SAL sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal adalah :

**KABUPATEN KUNINGAN**  
**BUKU BESAR**

**SKPKD** : BPKAD  
**Kode Rekening** : 3.1.2.05.01  
**Nama Rekening** : Estimasi Perubahan SAL  
**Pagu APBD** : Rp. ----  
**Pagu perubahan APBD** : Rp. ----

Halaman 01

| No | Bukti |           | Ref | Uraian                                     | Debet<br>(Rp)      | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|-----------|-----|--|--------------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal   |     |  |                    |                |
|    |       | 3/01/2022 | JU  | Pencatatan Estimasi Perubahan<br>SAL BPKAD | 150.000.000        | -              |
|    |       |           |     |  |                    |                |
|    |       |           |     | <b>Jumlah</b>                              | -                  | -              |
|    |       |           |     | <b>Saldo</b>                               | <b>150.000.000</b> | -              |

PPK-SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

**Langkah IV : Menyusun Neraca Saldo dan Laporan Keuangan**

Setelah melakukan posting seluruh pencatatan dalam buku besar maka kemudian Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD membuat neraca saldo sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Penyusunan neraca saldo oleh Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD dilakukan secara triwulanan. Neraca saldo disusun dengan cara memindahkan saldo-saldo yang ada di tiap buku besar ke dalam Neraca Saldo. Contoh Neraca Saldo dari hasil pencatatan dan posting contoh transaksi keuangan diatas adalah sebagai berikut :

**KABUPATEN KUNINGAN  
NERACA SALDO  
PER TANGGAL 30 Juni 2022**

| SKPKD         |   |   |    |    | : BPKAD                           |               |               |
|---------------|---|---|----|----|-----------------------------------|---------------|---------------|
| Kode Rekening |   |   |    |    | Uraian                            | Jumlah        |               |
|               |   |   |    |    |                                   | Debit         | Kredit        |
| 1             |   |   |    |    | 2                                 | 3             | 4             |
| 3             | 1 | 2 | 01 | 01 | Estimasi Pendapatan               | 1.000.000.000 | -             |
| 3             | 1 | 2 | 02 | 01 | Estimasi Penerimaan Pembiayaan    | 100.000.000   | -             |
| 3             | 1 | 2 | 03 | 01 | Apropriasi Belanja                | -             | 500.000.000   |
| 3             | 1 | 2 | 03 | 02 | Apropriasi Transfer               | -             | 200.000.000   |
| 3             | 1 | 2 | 04 | 01 | Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan | -             | 400.000.000   |
|               |   |   |    |    |                                   |               |               |
| Jumlah        |   |   |    |    |                                   | 1.100.000.000 | 1.100.000.000 |

PPK-SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh Neraca Saldo dari hasil pencatatan dan posting contoh transaksi anggaran sebelum perubahan diatas adalah sebagai berikut :

**KABUPATEN KUNINGAN**  
**NERACA SALDO**  
**PER TANGGAL 31 Desember 2022**

| SKPKD         |   |   |    |    | :                                 | BPKAD |               |               |
|---------------|---|---|----|----|-----------------------------------|-------|---------------|---------------|
| Kode Rekening |   |   |    |    | Uraian                            |       | Jumlah        |               |
|               |   |   |    |    |                                   |       | Debit         | Kredit        |
| 1             |   |   |    |    | 2                                 |       | 3             | 4             |
| 3             | 1 | 2 | 01 | 01 | Estimasi Pendapatan               |       | 1.100.000.000 | -             |
| 3             | 1 | 2 | 02 | 01 | Estimasi Penerimaan Pembiayaan    |       | 100.000.000   | -             |
| 3             | 1 | 2 | 03 | 01 | Apropriasi Belanja                |       | -             | 750.000.000   |
| 3             | 1 | 2 | 03 | 02 | Apropriasi Transfer               |       | -             | 200.000.000   |
| 3             | 1 | 2 | 04 | 01 | Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan |       | -             | 400.000.000   |
| 3             | 1 | 2 | 05 | 01 | Estimasi Perubahan SAL            |       | 150.000.000   | -             |
|               |   |   |    |    |                                   |       |               |               |
|               |   |   |    |    | Jumlah                            |       | 1.350.000.000 | 1.350.000.000 |

PPK-SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Dari neraca saldo inilah kemudian disusun laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan dilakukan dengan cara dengan cara memindahkan nama dan kode rekening/akun serta nilainya yang tertera dalam neraca saldo ke dalam bentuk format laporan keuangan. Semua kode rekening/akun anggaran dimasukkan kedalam format laporan Neraca khususnya di akun ekuitas SAL.

## **SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI PENDAPATAN DI SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (SKPKD-PPKD) YANG MENCATAT TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH**

Bagian ini menjelaskan Sistem dan Prosedur Akuntansi Pendapatan di Pemerintah Kabupaten Kuningan untuk Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mencatat transaksi pendapatan pemerintah daerah.

### **KEBIJAKAN UMUM**

Prosedur akuntansi pendapatan pada SKPKD-PPKD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pendapatan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD khususnya yang tertuang dalam DPA-PPKD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Jadi selain mengelola pendapatan yang merupakan tanggungjawabnya seperti SKPD lainnya, SKPKD-PPKD juga mengelola berbagai pendapatan yang terkait dengan tanggungjawab PPKD sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) yaitu Pendapatan Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang sah.

Sistem dan prosedur akuntansi pendapatan oleh SKPKD-PPKD merupakan salah satu sarana untuk menunjang pertanggungjawaban APBD. Sistem dan prosedur akuntansi ini disusun berdasarkan kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

### **PIHAK-PIHAK TERKAIT**

Berbagai pihak/fungsi yang terkait dalam proses akuntansi pendapatan pada SKPKD-PPKD beserta tugas-tugasnya adalah :



1. Pemerintah Lain

Pemerintah Lain adalah entitas pemerintah selain Pemerintah Kabupaten Kuningan yang memberikan dana bantuan seperti Pendapatan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pihak ini adalah pemberi dokumen pendapatan kepada Kuasa BUD.

2. Pihak Lainnya

Pihak Lainnya adalah pihak diluar Bendahara Penerimaan SKPD, Wajib Pajak/Retribusi dan Pemerintah Lainnya yang memberikan pendapatan kepada Pemerintah Kabupaten Kuningan misalnya hasil perusahaan daerah dan sumbangan/donasi. Pihak ini adalah pemberi dokumen pendapatan kepada Kuasa BUD.

3. Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD)

Dalam pelaksanaan prosedur ini, Kuasa BUD memiliki tugas menyiapkan dokumen-dokumen atas transaksi dengan pemerintah lain dan atau pihak lain yang terkait dengan proses pelaksanaan akuntansi pendapatan SKPKD. Kuasa BUD juga menyerahkan dokumen pengakuan dan realisasi pendapatan SKPKD-PPKD kepada PPK-SKPKD.

4. Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD

Dalam pelaksanaan prosedur ini, Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD bekerja mencatat transaksi pendapatan SKPKD-PPKD, memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Menerima Nota Kredit beserta bukti-bukti transaksi pendapatan SKPKD-PPKD dari Bendahara Penerimaan PPKD dan menganalisa data dan informasi akuntansi dari bukti transaksi tersebut;
- b. Mencatat transaksi-transaksi pemerintah daerah berdasarkan bukti-bukti yang terkait pendapatan SKPKD-PPKD yang merupakan transaksi pendapatan dari DPA-PPKD ke buku jurnal;

- c. Memposting jurnal-jurnal terkait transaksi-transaksi pendapatan pemerintah daerah ke dalam buku besarnya masing-masing;
  - d. Menyusun neraca saldo untuk persiapan penyusunan laporan keuangan, yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan; dan
  - e. Menyerahkan buku jurnal, buku besar dan neraca saldo kepada PPK-SKPKD untuk diperiksa dan ditandatangani.
5. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPKD) : Sekretaris Badan atau Koordinator/ Kepala Sub Bagian Keuangan BPKAD.

Dalam pelaksanaan prosedur ini, PPK-SKPKD memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Bertanggungjawab atas sistem akuntansi SKPKD-PPKD terkait transaksi pendapatan SKPKD-PPKD yang dipimpinnya;
  - b. Memeriksa dan menandatangani hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Tenaga Akuntansi PPK-SKPKD setiap bulannya seperti Buku Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo SKPKD-PPKD yang mencatat transaksi pemerintah daerah setiap triwulan.
  - c. Menyerahkan Buku Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo SKPKD-PPKD yang mencatat transaksi pemerintah daerah setiap triwulan kepada PPKD selaku pengguna anggaran untuk disetujui.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (tidak termasuk Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan).

Dalam pelaksanaan prosedur ini, PPKD memiliki tugas sebagai pengguna anggaran yang menyetujui Buku Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo yang diserahkan PPK-SKPKD setiap triwulan.

## **DOKUMEN YANG DIGUNAKAN**

1. Bukti Setoran Bank merupakan formulir bukti melakukan setoran ke Rekening Umum Kas Daerah;
2. Bukti transfer merupakan bukti melakukan transfer dari suatu rekening ke rekening lainnya;
3. Nota Kredit merupakan bukti transaksi penerimaan uang di rekening kas umum daerah;
4. Surat Tanda Setoran selanjutnya disebut STS adalah bukti yang dibuat untuk melakukan penyetoran uang ke Kas Daerah.
5. Bukti pengakuan pendapatan PPKD seperti :
  - a. Peraturan Presiden (Perpres) tentang Dana Alokasi Umum;
  - b. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Bagi Hasil Pajak; Bagi Hasil Bukan Pajak; Dana Alokasi Khusus; dan Dana Darurat; dan
  - c. Surat Keputusan Kepala Daerah (SK KDH) dari pemerintah lain tentang Pendapatan Bagi Hasil Pajak; Bantuan Keuangan; Hibah; Dana Darurat dari Pemerintah Provinsi
6. Bukti Penerimaan Kas lainnya; dan
7. Bukti Memorial adalah bukti transaksi yang digunakan untuk mencatat transaksi non keuangan.

## **BUKU DAN ATAU FORMULIR YANG DIGUNAKAN**

Buku dan atau formulir yang digunakan dalam pelaksanaan prosedur akuntansi pendapatan di SKPKD-PPKD ini paling tidak terdiri dari :

1. Buku Jurnal Umum (JU)

Merupakan buku jurnal yang digunakan untuk melakukan pencatatan akuntansi atas transaksi pendapatan di SKPKD-PPKD yang berbasis akrual terkait penyusunan LO dan Neraca.

2. Buku Jurnal Penerimaan Kas (JM)

Merupakan buku jurnal yang digunakan untuk melakukan pencatatan akuntansi atas transaksi penerimaan kas yang berasal dari transaksi penerimaan pendapatan di SKPKD-PPKD. Pada umumnya buku jurnal penerimaan kas digunakan untuk mencatat transaksi basis kas terkait penyusunan LRA dan LAK.

3. Buku Besar (BB)

Merupakan buku yang digunakan untuk menampung pencatatan hasil posting transaksi pendapatan di SKPKD-PPKD dari buku jurnal. Buku besar ini merupakan pencatatan akuntansi atas seluruh transaksi untuk suatu rekening/akun per jenis atau obyek. Jadi setiap rekening/akun per jenis atau objek mempunyai buku besar tersendiri.

4. Buku Besar Pembantu (BP)

Buku besar dapat dilengkapi dengan buku besar pembantu sebagai alat uji silang dan kelengkapan informasi rekening/akun tertentu. Buku besar pembantu berisi rincian akun (rincian obyek) yang telah dicatat dalam buku besar. Jika dirasakan informasi dalam buku besar sudah mencukupi maka buku besar pembantu tidak perlu dibuat lagi.

5. Neraca Saldo (NS)

Merupakan formulir yang mencatat nilai saldo setiap rekening/akun per rincian objek sehingga diketahui jumlah total dari seluruh rekening/akun.

## **KERANGKA SISTEM**

Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD menerima bukti-bukti transaksi penerimaan pendapatan SKPKD-PPKD dari Kuasa BUD melalui PPK-SKPKD. Bukti-bukti transaksi pendapatan SKPKD-PPKD dapat berupa Bukti Setoran Bank, Bukti Transfer Bank, Nota Kredit, STS, Perpres, PMK, SK KDH, Bukti Penerimaan Kas Lainnya dan Bukti Memorial. Pada saat bukti transaksi pendapatan tersebut telah diterima maka Tenaga

Akuntansi di PPK-SKPKD kemudian melakukan pencatatan akuntansi dalam :

1. Buku jurnal umum, untuk mencatat pengakuan pendapatan baik yang sudah diperoleh (*earned*) maupun yang sudah diterima (*realized*) terkait penyusunan LO dan Neraca.
2. Buku jurnal penerimaan kas, untuk mencatat penerimaan kas dari realisasi anggaran pendapatan terkait penyusunan LRA dan LAK.

Pencatatan transaksi atas pendapatan SKPKD-PPKD dilakukan saat terjadinya transaksi dan atau diterimanya bukti transaksi tersebut namun pengakuan transaksi tetap pada tanggal bukti transaksi. Setelah seluruh transaksi dicatat dalam buku jurnal maka Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD kemudian melakukan posting ke buku besar. Setelah posting dari buku jurnal ke buku besar selesai dilakukan maka kemudian Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD menyusun Neraca Saldo sebagai dasar pembuatan Laporan Keuangan untuk setiap triwulan yang diserahkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah triwulan berakhir kepada PPK-SKPKD.

## **ALUR PROSEDUR TEKNIS**

Teknis pelaksanaan sistem dan prosedur akuntansi pendapatan di SKPKD-PPKD ini adalah sebagai berikut :

### **Langkah I : Penerimaan Bukti Transaksi**

Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD menerima bukti-bukti transaksi pendapatan dari Kuasa BUD kemudian melakukan analisa informasi akuntansi. Dari bukti-bukti transaksi pendapatan, Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD akan mendapatkan informasi transaksi pendapatan yang terjadi di SKPKD-PPKD. Sebagai contoh : misalkan diketahui bahwa selama tahun 2022, telah terjadi transaksi yang terkait dengan pendapatan di SKPKD-PPKD sebagai berikut (asumsi tanggal bukti transaksi sama dengan tanggal penerimaan bukti transaksi) :

- 5 Januari 2022 Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD menerima PMK dari Kuasa BUD melalui PPK-SKPKD yang menyatakan adanya Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp 2.000.000.000,-.
- 7 Januari 2022 Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD menerima Nota Kredit dari Kuasa BUD melalui PPK-SKPKD sebagai realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak atas penetapan PMK tanggal 5 Januari 2022.
- 10 Februari 2022 Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD menerima PMK dari Kuasa BUD melalui PPK-SKPKD yang menyatakan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp 1.000.000.000,-.
- 12 Februari 2022 Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD menerima Nota Kredit dari Kuasa BUD melalui PPK-SKPKD sebagai realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak atas penetapan PMK tanggal 10 Februari 2022.
- 15 Maret 2022 Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD menerima Perpres dari Kuasa BUD melalui PPK-SKPKD yang menyatakan Dana Alokasi Umum sebesar Rp 5.000.000.000,-.
- 17 Maret 2022 Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD menerima Nota Kredit dari Kuasa BUD melalui PPK-SKPKD sebagai realisasi penerimaan Dana Alokasi Umum atas penetapan Perpres tanggal 15 Maret 2022.
- 20 April 2022 Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD menerima PMK dari Kuasa BUD melalui PPK-SKPKD yang menyatakan Dana Alokasi Khusus sebesar Rp 3.000.000.000,-.
- 23 April 2022 Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD menerima Nota Kredit dari Kuasa BUD melalui PPK-SKPKD sebagai realisasi penerimaan Dana Alokasi Khusus atas penetapan PMK tanggal 20 April 2022.
- 25 Juni 2022 Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD menerima PMK dari Kuasa BUD melalui PPK-SKPKD yang menyatakan

|              |  |
|--------------|--|
|              | Pendapatan Dana Penyesuaian BOS sebesar Rp 700.000.000,-.  |
| 27 Juni 2022 | Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD menerima Nota Kredit dari Kuasa BUD melalui PPK-SKPKD sebagai realisasi penerimaan Dana Penyesuaian BOS atas penetapan PMK tanggal 25 Juni 2022.                                     |
| 30 Juli 2022 | Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD menerima Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat dari Kuasa BUD melalui PPK-SKPKD yang menyatakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi sebesar Rp 500.000.000,-.                         |
| 1 Agt 2022   | Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD menerima Nota Kredit dari Kuasa BUD melalui PPK-SKPKD sebagai realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak Provinsi atas penetapan Keputusan Gubernur Jawa Barat tanggal 30 Juli 2022.      |
| 5 Agt 2022   | Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD menerima Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat dari Kuasa BUD melalui PPK-SKPKD yang menyatakan Pendapatan Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp 250.000.000,-                          |
| 7 Agt 2022   | Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD menerima Nota Kredit dari Kuasa BUD melalui PPK-SKPKD sebagai realisasi penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi atas penetapan Keputusan Gubernur Jawa Barat tanggal 5 Agustus 2022.    |
| 10 Sept 2022 | Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD menerima Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat dari Kuasa BUD melalui PPK-SKPKD yang menyatakan Pendapatan Hibah Provinsi sebesar Rp 100.000.000,-.                                    |
| 12 Sept 2022 | Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD menerima Nota Kredit dari Kuasa BUD melalui PPK-SKPKD sebagai realisasi penerimaan Pendapatan Hibah Provinsi atas penetapan Keputusan Gubernur Jawa Barat tanggal 10 September 2022. |

|             |  |
|-------------|--|
| 15 Okt 2022 | Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD menerima PMK/Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat dari Kuasa BUD melalui PPK-SKPKD yang menyatakan Pendapatan Dana Darurat sebesar Rp 50.000.000,-.   |
| 17 Okt 2022 | Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD menerima Nota Kredit dari Kuasa BUD melalui PPK-SKPKD sebagai realisasi penerimaan Pendapatan Dana Darurat atas penetapan PMK/Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat tanggal 15 Oktober 2022. |
| 20 Nov 2022 | Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD menerima Nota Kredit yang dilampiri Bukti Transfer atau STS atau Bukti Slip Setoran Bank dari Kuasa BUD melalui PPK-SKPKD atas Pendapatan Sumbangan Pihak Ketiga sebesar Rp 10.000.000,-.  |

Contoh sederhana tersebut diatas diberikan sebagai bahan untuk mempermudah penjelasan sistem dan prosedur akuntansi pendapatan di SKPKD-PPKD ini. Tetapi contoh tersebut diatas tidak menunjukkan semua bentuk transaksi pendapatan yang secara nyata terjadi.

**Langkah II : Menjurnal Transaksi Penerimaan**

Berdasarkan bukti-bukti transaksi pendapatan, maka kemudian Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD mencatat transaksi tersebut di buku jurnal. Pencatatan akuntansi dilakukan kedalam buku jurnal sesuai dengan jenis transaksi yang terjadi.

1. Untuk **pengakuan pendapatan-LO atas penetapan yang terbit** maka dilakukan pencatatan dalam Buku Jurnal Umum dengan melakukan jurnal, “Piutang Pendapatan sesuai jenisnya” di Debit dan “Akun Pendapatan – LO sesuai jenisnya” di kredit, sebagai berikut:

|                         | Debit | Kredit |
|-------------------------|-------|--------|
| Piutang Pendapatan_____ | xxxx  |        |
| Pendapatan _____-LO     |       | xxxx   |



Catatan : Kode dan nama rekening/akun piutang dan pendapatan (dalam contoh ditulis piutang retribusi \_\_\_\_\_ dan pendapatan retribusi\_\_\_\_-LO) disesuaikan dengan kode dan nama rekening/akun, sampai rincian obyek, sesuai dengan pengakuan pendapatannya.

2. Untuk transaksi **realisasi penerimaan atas penetapan yang disetor langsung ke Kas Daerah** atau melalui bank, oleh pemberi pendapatan maka dilakukan pencatatan dalam Buku Jurnal Umum dengan melakukan jurnal, “RK PPKD” di Debit dan “Piutang Pendapatan” sesuai jenisnya” di kredit, sebagai berikut :

|                         | Debit | Kredit |
|-------------------------|-------|--------|
| Kas di Kas Daerah       | xxxx  |        |
| Piutang Pendapatan_____ |       | xxxx   |

Kemudian untuk mencatat realisasi anggaran berbasis kas dicatat dalam Buku Jurnal Penerimaan kas dengan melakukan jurnal, “Estimasi Perubahan SAL” di Debit dan “Akun Pendapatan-LRA sesuai jenisnya” di kredit, sebagai berikut :

|                        | Debit | Kredit |
|------------------------|-------|--------|
| Estimasi Perubahan SAL | xxxx  |        |
| Pendapatan _____ -LRA  |       | xxxx   |

3. Untuk transaksi **pendapatan bukan atas penetapan yang disetor langsung ke Kas Daerah** atau melalui bank, oleh pemberi pendapatan maka dilakukan pencatatan dalam Buku Jurnal Umum dengan melakukan jurnal, “RK PPKD” di Debit dan “Pendapatan-LO sesuai jenisnya” di kredit, sebagai berikut :

|                    | Debit | Kredit |
|--------------------|-------|--------|
| Kas di Kas Daerah  | xxxx  |        |
| Pendapatan ____-LO |       | xxxx   |

Kemudian untuk mencatat realisasi anggaran berbasis kas dicatat dalam Buku Jurnal Penerimaan kas dengan melakukan jurnal, “Estimasi Perubahan SAL” di Debit dan “Akun Pendapatan-LRA sesuai jenisnya” di kredit, sebagai berikut :

|                               | Debit       | Kredit      |
|-------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Estimasi Perubahan SAL</b> | <b>xxxx</b> |             |
| <b>Pendapatan _____ -LRA</b>  |             | <b>xxxx</b> |

Catatan : Kode dan nama rekening/akun piutang dan pendapatan (dalam contoh ditulis piutang \_\_\_\_\_, pendapatan \_\_\_\_\_-LO dan pendapatan \_\_\_\_\_-LRA) disesuaikan dengan kode dan nama rekening/akun, sampai rincian obyek, sesuai dengan realisasi pendapatan yang diterima.

Berdasarkan uraian penjurnalan dan contoh transaksi tersebut diatas maka Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD yang mencatat transaksi Pemda melakukan pencatatan dalam buku jurnal sebagai berikut :

**Pertama,** penjurnalan untuk penerimaan PMK dari Kuasa BUD melalui PPK-SKPKD yang menyatakan adanya Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp 2.000.000.000,- pada tanggal 5 Januari 2022, dicatat di jurnal umum sebagai berikut :

|            |             |                          | Debit         | Kredit        |
|------------|-------------|--------------------------|---------------|---------------|
| 5 Jan 2022 | 1.1.3.05.01 | Piutang Bagi Hasil Pajak | 2.000.000.000 |               |
|            | 8.2.1.01.00 | Bagi Hasil Pajak-LO      |               | 2.000.000.000 |

**Kedua,** penjurnalan untuk penerimaan Nota Kredit dari Kuasa BUD melalui PPK-SKPKD sebagai realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak atas penetapan PMK tanggal 5 Januari 2022, dicatat di jurnal umum sebagai berikut :

|            |             |                          | Debit         | Kredit        |
|------------|-------------|--------------------------|---------------|---------------|
| 7 Jan 2022 | 1.1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah        | 2.000.000.000 |               |
|            | 1.1.3.05.01 | Piutang Bagi Hasil Pajak |               | 2.000.000.000 |

Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD juga mencatat transaksi realisasi anggaran pendapatan-LRA dengan melakukan pencatatan dalam buku jurnal penerimaan kas dengan jurnal sebagai berikut :

|            |             |                        | Debit         | Kredit        |
|------------|-------------|------------------------|---------------|---------------|
| 7 Jan 2022 | 3.1.2.05.01 | Estimasi Perubahan SAL | 2.000.000.000 |               |
|            | 4.2.1.01.00 | Bagi Hasil Pajak-LRA   |               | 2.000.000.000 |

**Ketiga**, penjurnalan untuk penerimaan PMK dari Kuasa BUD melalui PPK-SKPKD yang menyatakan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp 1.000.000.000,- tanggal 10 Februari 2022, dicatat di jurnal umum sebagai berikut :

|             |             |   | Debit         | Kredit        |
|-------------|-------------|---|---------------|---------------|
| 10 Feb 2022 | 1.1.3.05.02 | Piutang Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA | 1.000.000.000 |               |
|             | 8.2.1.02.00 | Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA-LO      |               | 1.000.000.000 |

**Keempat**, penjurnalan untuk penerimaan Nota Kredit dari Kuasa BUD melalui PPK-SKPKD sebagai realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak atas penetapan PMK tanggal 10 Februari 2022, dicatat di jurnal umum sebagai berikut :

|             |             |   | Debit         | Kredit        |
|-------------|-------------|---|---------------|---------------|
| 12 Feb 2022 | 1.1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah                       | 1.000.000.000 |               |
|             | 1.1.3.05.02 | Piutang Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA |               | 1.000.000.000 |

Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD juga mencatat transaksi realisasi anggaran pendapatan-LRA dengan melakukan pencatatan dalam buku jurnal penerimaan kas dengan jurnal sebagai berikut :

|             |             |                                     | Debit         | Kredit        |
|-------------|-------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| 12 Feb 2022 | 3.1.2.05.01 | Estimasi Perubahan SAL              | 1.000.000.000 |               |
|             | 4.2.1.02.00 | Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA-LRA |               | 1.000.000.000 |

**Kelima**, penjurnalan untuk penerimaan Perpres dari Kuasa BUD melalui PPK-SKPKD yang menyatakan Dana Alokasi Umum sebesar Rp 5.000.000.000,- tanggal 15 Maret 2022, dicatat di jurnal umum sebagai berikut :

|               |             |                           | Debit         | Kredit        |
|---------------|-------------|---------------------------|---------------|---------------|
| 15 Maret 2022 | 1.1.3.05.03 | Piutang Dana Alokasi Umum | 5.000.000.000 |               |
|               | 8.2.1.03.00 | Dana Alokasi Umum-LO      |               | 5.000.000.000 |

**Keenam**, penjurnalan untuk penerimaan Nota Kredit dari Kuasa BUD melalui PPK-SKPKD sebagai realisasi penerimaan Dana Alokasi Umum atas penetapan Perpres tanggal 15 Maret 2022, dicatat di jurnal umum sebagai berikut :

|               |                            |   | Debit         | Kredit        |
|---------------|----------------------------|---|---------------|---------------|
| 17 Maret 2022 | 1.1.1.01.01<br>1.1.3.05.03 | Kas di Kas Daerah<br>Piutang Dana Alokasi<br>Umum | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 |

Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD juga mencatat transaksi realisasi anggaran pendapatan-LRA dengan melakukan pencatatan dalam buku jurnal penerimaan kas dengan jurnal sebagai berikut :

|               |                            |   | Debit         | Kredit        |
|---------------|----------------------------|---|---------------|---------------|
| 17 Maret 2022 | 3.1.2.05.01<br>4.2.2.01.00 | Estimasi Perubahan SAL<br>Dana Alokasi Umum-<br>LRA | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 |

**Ketujuh,** penjurnalan untuk penerimaan PMK dari Kuasa BUD melalui PPK-SKPKD yang menyatakan Dana Alokasi Khusus sebesar Rp 3.000.000.000,- tanggal 20 April 2022, dicatat di jurnal umum sebagai berikut :

|               |                            |  | Debit         | Kredit        |
|---------------|----------------------------|--|---------------|---------------|
| 20 April 2022 | 1.1.3.05.04<br>8.2.1.04.00 | Piutang Dana Alokasi<br>Khusus<br>Dana Alokasi Khusus-<br>LO | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 |

**Kedelapan,** penjurnalan untuk penerimaan Nota Kredit dari Kuasa BUD melalui PPK-SKPKD sebagai realisasi penerimaan Dana Alokasi Khusus atas penetapan PMK tanggal 20 April 2022, dicatat di jurnal umum sebagai berikut :

|               |                            |   | Debit         | Kredit        |
|---------------|----------------------------|---|---------------|---------------|
| 23 April 2022 | 1.1.1.01.01<br>1.1.3.05.04 | Kas di Kas Daerah<br>Piutang Dana Alokasi<br>Khusus | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 |

Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD juga mencatat transaksi realisasi anggaran pendapatan-LRA dengan melakukan pencatatan dalam buku jurnal penerimaan kas dengan jurnal sebagai berikut :

|               |                            |   | Debit         | Kredit        |
|---------------|----------------------------|---|---------------|---------------|
| 23 April 2022 | 3.1.2.05.01<br>4.2.3.01.00 | Estimasi Perubahan SAL<br>Dana Alokasi Khusus-<br>LRA | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 |

**Kesembilan,** penjurnalan untuk penerimaan PMK dari Kuasa BUD melalui PPK-SKPKD yang menyatakan Pendapatan Dana Penyesuaian BOS sebesar Rp 700.000.000,- tanggal 25 Juni 2022, dicatat di jurnal umum sebagai berikut :

|              |             |                              | Debit       | Kredit      |
|--------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|
| 25 Juni 2022 | 1.1.3.06.01 | Piutang Dana Penyesuaian BOS | 700.000.000 |             |
|              | 8.2.2.03.06 | BOS-LO                       |             | 700.000.000 |

**Kesepuluh,** penjurnalan untuk penerimaan Nota Kredit dari Kuasa BUD melalui PPK-SKPKD sebagai realisasi penerimaan Dana Penyesuaian BOS atas penetapan PMK tanggal 25 Juni 2022, dicatat di jurnal umum sebagai berikut :

|              |             |                              | Debit       | Kredit      |
|--------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|
| 27 Juni 2022 | 1.1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah            | 700.000.000 |             |
|              | 1.1.3.06.01 | Piutang Dana Penyesuaian BOS |             | 700.000.000 |

Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD juga mencatat transaksi realisasi anggaran pendapatan-LRA dengan melakukan pencatatan dalam buku jurnal penerimaan kas dengan jurnal sebagai berikut :

|              |             |                        | Debit       | Kredit      |
|--------------|-------------|------------------------|-------------|-------------|
| 27 Juni 2022 | 3.1.2.05.01 | Estimasi Perubahan SAL | 700.000.000 |             |
|              | 4.3.4.01.01 | Dana BOS-LRA           |             | 700.000.000 |

**Kesebelas,** penjurnalan untuk penerimaan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat dari Kuasa BUD melalui PPK-SKPKD yang menyatakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi sebesar Rp 500.000.000,- tanggal 30 Juli 2022, dicatat di jurnal umum sebagai berikut :

|              |             |                                 | Debit       | Kredit      |
|--------------|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|
| 30 Juli 2022 | 1.1.3.07.01 | Piutang Bagi Hasil Pajak Daerah | 500.000.000 |             |
|              | 8.2.3.01.00 | Bagi Hasil Pajak Provinsi-LO    |             | 500.000.000 |

**Keduabelas,** penjurnalan untuk penerimaan Nota Kredit dari Kuasa BUD melalui PPK-SKPKD sebagai realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak Provinsi atas penetapan Keputusan Gubernur Jawa Barat tanggal 30 Juli 2022, dicatat di jurnal umum sebagai berikut :

|            |             |                                 | Debit       | Kredit      |
|------------|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|
| 1 Agt 2022 | 1.1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah               | 500.000.000 |             |
|            | 1.1.3.07.01 | Piutang Bagi Hasil Pajak Daerah |             | 500.000.000 |

Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD juga mencatat transaksi realisasi anggaran pendapatan-LRA dengan melakukan pencatatan dalam buku jurnal penerimaan kas dengan jurnal sebagai berikut :

|            |             |                               | Debit       | Kredit      |
|------------|-------------|-------------------------------|-------------|-------------|
| 1 Agt 2022 | 3.1.2.05.01 | Estimasi Perubahan SAL        | 500.000.000 |             |
|            | 4.3.3.01.00 | Bagi Hasil Pajak Provinsi-LRA |             | 500.000.000 |

**Ketigabelas,** penjurnalan untuk penerimaan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat dari Kuasa BUD melalui PPK-SKPKD yang menyatakan Pendapatan Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp 250.000.000,- tanggal 5 Agustus 2022, dicatat di jurnal umum sebagai berikut :

|            |             |  | Debit       | Kredit      |
|------------|-------------|--|-------------|-------------|
| 5 Agt 2022 | 1.1.3.07.02 | Piutang Pendapatan Bantuan Keuangan Provinsi | 250.000.000 |             |
|            | 8.2.4.01.00 | Pendapatan Bantuan Keuangan Provinsi-LO      |             | 250.000.000 |

**Keempatbelas,** penjurnalan untuk penerimaan Nota Kredit dari Kuasa BUD melalui PPK-SKPKD sebagai realisasi penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi atas penetapan Keputusan Gubernur Jawa Barat tanggal 5 Agustus 2022, dicatat di jurnal umum sebagai berikut :

|            |             |  | Debit       | Kredit      |
|------------|-------------|--|-------------|-------------|
| 7 Agt 2022 | 1.1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah                            | 250.000.000 |             |
|            | 1.1.3.07.02 | Piutang Pendapatan Bantuan Keuangan Provinsi |             | 250.000.000 |

Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD juga mencatat transaksi realisasi anggaran pendapatan-LRA dengan melakukan pencatatan dalam buku jurnal penerimaan kas dengan jurnal sebagai berikut :

|            |             |  | Debit       | Kredit      |
|------------|-------------|--|-------------|-------------|
| 7 Agt 2022 | 3.1.2.05.01 | Estimasi Perubahan SAL                   | 250.000.000 |             |
|            | 4.3.5.01.00 | Pendapatan Bantuan Keuangan Provinsi-LRA |             | 250.000.000 |

**Kelimabelas,** penjurnalan untuk penerimaan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat dari Kuasa BUD melalui PPK-SKPKD yang menyatakan Pendapatan Hibah Provinsi sebesar Rp 100.000.000,- tanggal 10 September 2022, dicatat di jurnal umum sebagai berikut :

|              |             |                                    | Debit       | Kredit      |
|--------------|-------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 10 Sept 2022 | 1.1.3.07.03 | Piutang Pendapatan Hibah Provinsi  | 100.000.000 |             |
|              | 8.3.1.02.01 | Pendapatan Hibah Daerah Lainnya-LO |             | 100.000.000 |

**Keenambelas,** penjurnalan untuk penerimaan Nota Kredit dari Kuasa BUD melalui PPK-SKPKD sebagai realisasi penerimaan Pendapatan Hibah Provinsi atas penetapan Keputusan Gubernur Jawa Barat tanggal 10 September 2022, dicatat di jurnal umum sebagai berikut :

|              |             |                                   | Debit       | Kredit      |
|--------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| 12 Sept 2022 | 1.1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah                 | 100.000.000 |             |
|              | 1.1.3.07.03 | Piutang Pendapatan Hibah Provinsi |             | 100.000.000 |

Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD juga mencatat transaksi realisasi anggaran pendapatan-LRA dengan melakukan pencatatan dalam buku jurnal penerimaan kas dengan jurnal sebagai berikut :

|              |             |                                     | Debit       | Kredit      |
|--------------|-------------|-------------------------------------|-------------|-------------|
| 12 Sept 2022 | 3.1.2.05.01 | Estimasi Perubahan SAL              | 100.000.000 |             |
|              | 4.3.1.02.01 | Pendapatan Hibah Daerah Lainnya-LRA |             | 100.000.000 |

**Ketujuhbelas,** penjurnalan untuk penerimaan PMK/Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat dari Kuasa BUD melalui PPK-SKPKD yang menyatakan Pendapatan Dana Darurat sebesar Rp 50.000.000,- tanggal 15 Oktober 2022, dicatat di jurnal umum sebagai berikut :

|             |             |                                 | Debit      | Kredit     |
|-------------|-------------|---------------------------------|------------|------------|
| 15 Okt 2022 | 1.1.3.07.04 | Piutang Pendapatan Dana Darurat | 50.000.000 |            |
|             | 8.3.2.01.00 | Pendapatan Dana Darurat-LO      |            | 50.000.000 |

**Kedelapanbelas,** penjurnalan untuk penerimaan Nota Kredit dari Kuasa BUD melalui PPK-SKPKD sebagai realisasi penerimaan Pendapatan Dana Darurat atas penetapan PMK/Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat tanggal 15 Oktober 2022, dicatat di jurnal umum sebagai berikut :

|             |             |                                 | Debit      | Kredit     |
|-------------|-------------|---------------------------------|------------|------------|
| 15 Okt 2022 | 1.1.3.07.04 | Piutang Pendapatan Dana Darurat | 50.000.000 |            |
|             | 8.3.2.01.00 | Pendapatan Dana Darurat-LO      |            | 50.000.000 |

Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD juga mencatat transaksi realisasi anggaran pendapatan-LRA dengan melakukan pencatatan dalam buku jurnal penerimaan kas dengan jurnal sebagai berikut :

|             |             |                             | Debit      | Kredit     |
|-------------|-------------|-----------------------------|------------|------------|
| 17 Okt 2022 | 3.1.2.05.01 | Estimasi Perubahan SAL      | 50.000.000 |            |
|             | 4.3.2.01.00 | Pendapatan Dana Darurat-LRA |            | 50.000.000 |

**Kesembilanbelas,** penjurnalan untuk penerimaan Nota Kredit yang dilampiri Bukti Transfer atau STS atau Bukti Slip Setoran Bank dari Kuasa BUD melalui PPK-SKPKD atas Pendapatan Sumbangan Pihak Ketiga sebesar Rp 10.000.000,- tanggal 20 November 2022, dicatat di jurnal umum sebagai berikut :

|             |             |                       | Debit      | Kredit     |
|-------------|-------------|-----------------------|------------|------------|
| 20 Nov 2022 | 1.1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah     | 50.000.000 |            |
|             | 8.3.3.01.01 | Pendapatan Lainnya-LO |            | 50.000.000 |

Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD juga mencatat transaksi realisasi anggaran pendapatan-LRA dengan melakukan pencatatan dalam buku jurnal penerimaan kas dengan jurnal sebagai berikut :

|             |             |                        | Debit      | Kredit     |
|-------------|-------------|------------------------|------------|------------|
| 20 Nov 2022 | 3.1.2.05.01 | Estimasi Perubahan SAL | 50.000.000 |            |
|             | 4.4.4.01.01 | Pendapatan Lainnya-LRA |            | 50.000.000 |



Bentuk dan Cara Pengisian Buku Jurnal

Berdasarkan contoh jurnal tersebut diatas maka dilakukan pencatatan dalam buku jurnal umum untuk transaksi berbasis akrual yang nantinya digunakan untuk menyusun LO dan Neraca sebagai berikut :

KABUPATEN KUNINGAN
BUKU JURNAL UMUM (JU)

SKPKD : .....( SKPKD Kabupaten Kuningan)

| Halaman 01 |                  |            |               |   |   |    |    |   |      |               |               |
|------------|------------------|------------|---------------|---|---|----|----|---|------|---------------|---------------|
| Tanggal    | Nomor            |            | Kode Rekening |   |   |    |    | Uraian                                  | Ref. | Debit (Rp)    | Kredit (Rp)   |
|            | Bukti Penerimaan | Bukti Lain |               |   |   |    |    |   |      |               |               |
| 1          | 2                |            | 3             |   |   |    |    | 4                                       | 5    | 6             | 7             |
|            |                  |            |               |   |   |    |    |   |      |               |               |
| 5/1/15     | -                | -          | 1             | 1 | 3 | 05 | 01 | Piutang Bagi Hasil Pajak                | -    | 2.000.000.000 | -             |
|            |                  |            | 8             | 2 | 1 | 01 | 00 | Bagi Hasil Pajak-LO                     | -    | -             | 2.000.000.000 |
|            |                  |            |               |   |   |    |    |   |      |               |               |
| 7/1/15     | -                | -          | 1             | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas di Kas Daerah                       | -    | 2.000.000.000 | -             |
|            |                  |            | 1             | 1 | 3 | 05 | 01 | Piutang Bagi Hasil Pajak                | -    | -             | 2.000.000.000 |
|            |                  |            |               |   |   |    |    |   |      |               |               |
| 10/2/15    |                  |            | 1             | 1 | 3 | 05 | 02 | Piutang Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA |      | 1.000.000.000 | -             |
|            |                  |            | 8             | 2 | 1 | 02 | 00 | Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA-LO      |      | -             | 1.000.000.000 |
|            |                  |            |               |   |   |    |    |   |      |               |               |
| 12/2/15    |                  |            | 1             | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas di Kas Daerah                       |      | 1.000.000.000 | -             |
|            |                  |            | 1             | 1 | 3 | 05 | 02 | Piutang Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA |      | -             | 1.000.000.000 |
|            |                  |            |               |   |   |    |    |   |      |               |               |
| 15/3/15    |                  |            | 1             | 1 | 3 | 05 | 03 | Piutang Dana Alokasi Umum               |      | 5.000.000.000 | -             |
|            |                  |            | 8             | 2 | 1 | 03 | 00 | Dana Alokasi Umum-LO                    |      | -             | 5.000.000.000 |
|            |                  |            |               |   |   |    |    |   |      |               |               |
| 17/3/15    |                  |            | 1             | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas di Kas Daerah                       |      | 5.000.000.000 | -             |
|            |                  |            | 1             | 1 | 3 | 05 | 03 | Piutang Dana Alokasi Umum               |      | -             | 5.000.000.000 |
|            |                  |            |               |   |   |    |    |   |      |               |               |
| 20/4/15    |                  |            | 1             | 1 | 3 | 05 | 04 | Piutang Dana Alokasi Khusus             |      | 3.000.000.000 | -             |
|            |                  |            | 8             | 2 | 1 | 04 | 00 | Dana Alokasi Khusus-LO                  |      | -             | 3.000.000.000 |
|            |                  |            |               |   |   |    |    |   |      |               |               |
| 23/4/15    |                  |            | 1             | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas di Kas Daerah                       |      | 3.000.000.000 | -             |
|            |                  |            | 1             | 1 | 3 | 05 | 04 | Piutang Dana Alokasi Khusus             |      |               | 3.000.000.000 |
|            |                  |            |               |   |   |    |    |   |      |               |               |
| 25/6/15    |                  |            | 1             | 1 | 3 | 06 | 01 | Piutang Dana Penyesuaian BOS            |      | 700.000.000   | -             |
|            |                  |            | 8             | 2 | 2 | 03 | 06 | BOS-LO                                  |      | -             | 700.000.000   |
|            |                  |            |               |   |   |    |    |   |      |               |               |
| 27/6/15    |                  |            | 1             | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas di Kas Daerah                       |      | 700.000.000   | -             |
|            |                  |            | 1             | 1 | 3 | 06 | 01 | Piutang Dana Penyesuaian BOS            |      | -             | 700.000.000   |
|            |                  |            |               |   |   |    |    |   |      |               |               |
| 30/7/15    |                  |            | 1             | 1 | 3 | 07 | 01 | Piutang Bagi Hasil Pajak Daerah         |      | 500.000.000   | -             |
|            |                  |            | 8             | 2 | 3 | 01 | 00 | Bagi Hasil Pajak Provinsi-LO            |      | -             | 500.000.000   |
|            |                  |            |               |   |   |    |    |   |      |               |               |

|          |  |  |   |   |   |    |    |  |  |                |                |
|----------|--|--|---|---|---|----|----|--|--|----------------|----------------|
| 1/8/15   |  |  | 1 | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas di Kas Daerah                            |  | 500.000.000    | -              |
|          |  |  | 1 | 1 | 3 | 07 | 01 | Piutang Bagi Hasil Pajak Daerah              |  | -              | 500.000.000    |
|          |  |  |   |   |   |    |    |  |  |                |                |
| 5/8/15   |  |  | 1 | 1 | 3 | 07 | 02 | Piutang Pendapatan Bantuan Keuangan Provinsi |  | 250.000.000    | -              |
|          |  |  | 8 | 2 | 4 | 01 | 00 | Pendapatan Bantuan Keuangan Provinsi-LO      |  | -              | 250.000.000    |
|          |  |  |   |   |   |    |    |  |  |                |                |
| 7/8/15   |  |  | 1 | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas di Kas Daerah                            |  | 250.000.000    | -              |
|          |  |  | 1 | 1 | 3 | 07 | 02 | Piutang Pendapatan Bantuan Keuangan Provinsi |  | -              | 250.000.000    |
|          |  |  |   |   |   |    |    |  |  |                |                |
| 10/9/15  |  |  | 1 | 1 | 3 | 07 | 03 | Piutang Pendapatan Hibah Provinsi            |  | 100.000.000    | -              |
|          |  |  | 8 | 3 | 1 | 02 | 01 | Pendapatan Hibah Daerah Lainnya-LO           |  | -              | 100.000.000    |
|          |  |  |   |   |   |    |    |  |  |                |                |
| 12/9/15  |  |  | 1 | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas di Kas Daerah                            |  | 100.000.000    | -              |
|          |  |  | 1 | 1 | 3 | 07 | 03 | Piutang Pendapatan Hibah Provinsi            |  | -              | 100.000.000    |
|          |  |  |   |   |   |    |    |  |  |                |                |
| 15/10/15 |  |  | 1 | 1 | 3 | 07 | 04 | Piutang Pendapatan Dana Darurat              |  | 50.000.000     | -              |
|          |  |  | 8 | 2 | 1 | 01 | 00 | Pendapatan Dana Darurat-LO                   |  | -              | 50.000.000     |
|          |  |  |   |   |   |    |    |  |  |                |                |
| 17/10/15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas di Kas Daerah                            |  | 50.000.000     | -              |
|          |  |  | 1 | 1 | 3 | 07 | 04 | Piutang Pendapatan Dana Darurat              |  | -              | 50.000.000     |
|          |  |  |   |   |   |    |    |  |  |                |                |
| 20/11/15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas di Kas Daerah                            |  | 50.000.000     | -              |
|          |  |  | 8 | 3 | 3 | 01 | 01 | Pendapatan Lainnya-LO                        |  | -              | 50.000.000     |
|          |  |  |   |   |   |    |    |  |  |                |                |
| Jumlah   |  |  |   |   |   |    |    |  |  | 25.250.000.000 | 25.250.000.000 |

PPK-SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Selain mencatat di buku jurnal umum dilakukan juga pencatatan dalam buku jurnal penerimaan kas untuk transaksi berbasis kas yang nantinya digunakan untuk menyusun LRA dan LAK sebagai berikut :

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU JURNAL PENERIMAAN KAS (JM)

SKPKD : .....( SKPKD Kabupaten Kuningan)

Halaman 01

| Tanggal  | Nomor               |               | Kode Rekening |   |   |    |    | Uraian                                   | Ref. | Debit<br>(Rp)  | Kredit<br>(Rp) |
|----------|---------------------|---------------|---------------|---|---|----|----|--|------|----------------|----------------|
|          | Bukti<br>Penerimaan | Bukti<br>Lain |               |   |   |    |    |  |      |                |                |
| 1        | 2                   |               | 3             |   |   |    |    | 4  | 5    | 6              | 7              |
|          |                     |               |               |   |   |    |    |  |      |                |                |
| 7/1/15   | -                   | -             | 3             | 1 | 2 | 05 | 01 | Estimasi Perubahan SAL                   | -    | 2.000.000.000  | -              |
|          |                     |               | 4             | 2 | 1 | 01 | 00 | Bagi Hasil Pajak-LRA                     | -    | -              | 2.000.000.000  |
|          |                     |               |               |   |   |    |    |  |      |                |                |
| 12/2/15  |                     |               | 3             | 1 | 2 | 05 | 01 | Estimasi Perubahan SAL                   |      | 1.000.000.000  | -              |
|          |                     |               | 4             | 2 | 1 | 02 | 00 | Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA-LRA      |      | -              | 1.000.000.000  |
|          |                     |               |               |   |   |    |    |  |      |                |                |
|          |                     |               |               |   |   |    |    |  |      |                |                |
| 17/3/15  |                     |               | 3             | 1 | 2 | 05 | 01 | Estimasi Perubahan SAL                   |      | 5.000.000.000  | -              |
|          |                     |               | 4             | 2 | 2 | 01 | 01 | Dana Alokasi Umum-LRA                    |      | -              | 5.000.000.000  |
|          |                     |               |               |   |   |    |    |  |      |                |                |
| 23/4/15  |                     |               | 3             | 1 | 2 | 05 | 01 | Estimasi Perubahan SAL                   |      | 3.000.000.000  | -              |
|          |                     |               | 4             | 2 | 3 | 01 | 00 | Dana Alokasi Khusus-LRA                  |      | -              | 3.000.000.000  |
|          |                     |               |               |   |   |    |    |  |      |                |                |
| 27/6/15  |                     |               | 3             | 1 | 2 | 05 | 01 | Estimasi Perubahan SAL                   |      | 700.000.000    | -              |
|          |                     |               | 4             | 3 | 4 | 01 | 01 | Dana BOS-LRA                             |      | -              | 700.000.000    |
|          |                     |               |               |   |   |    |    |  |      |                |                |
| 1/8/15   |                     |               | 3             | 1 | 2 | 05 | 01 | Estimasi Perubahan SAL                   |      | 250.000.000    | -              |
|          |                     |               | 4             | 3 | 3 | 01 | 00 | Bagi Hasil Pajak dari Provinsi-LRA       |      | -              | 250.000.000    |
|          |                     |               |               |   |   |    |    |  |      |                |                |
| 7/8/15   |                     |               | 3             | 1 | 2 | 05 | 01 | Estimasi Perubahan SAL                   |      | 500.000.000    | -              |
|          |                     |               | 4             | 3 | 5 | 01 | 00 | Pendapatan Bantuan Keuangan Provinsi-LRA |      | -              | 500.000.000    |
|          |                     |               |               |   |   |    |    |  |      |                |                |
| 12/9/15  |                     |               | 3             | 1 | 2 | 05 | 01 | Estimasi Perubahan SAL                   |      | 100.000.000    | -              |
|          |                     |               | 4             | 3 | 1 | 02 | 01 | Pendapatan Hibah Daerah Lainnya-LRA      |      | -              | 100.000.000    |
|          |                     |               |               |   |   |    |    |  |      |                |                |
| 17/10/15 |                     |               | 3             | 1 | 2 | 05 | 01 | Estimasi Perubahan SAL                   |      | 50.000.000     | -              |
|          |                     |               | 4             | 3 | 2 | 01 | 00 | Pendapatan Dana Darurat-LRA              |      | -              | 50.000.000     |
|          |                     |               |               |   |   |    |    |  |      |                |                |
| 20/11/15 |                     |               | 3             | 1 | 2 | 05 | 01 | Estimasi Perubahan SAL                   |      | 50.000.000     | -              |
|          |                     |               | 4             | 4 | 4 | 01 | 01 | Pendapatan Lainnya-LRA                   |      | -              | 50.000.000     |
|          |                     |               |               |   |   |    |    |  |      |                |                |
| Jumlah   |                     |               |               |   |   |    |    |  |      | 12.650.000.000 | 12.650.000.000 |

PPK-SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

**Langkah III : Melakukan Posting ke Buku Besar**

Setelah melakukan penjurnalan seluruh transaksi, maka PPK-SKPKD melakukan posting atas pencatatan jurnal tersebut ke buku besar. Posting ini berguna agar seluruh transaksi yang sama-sama mempengaruhi suatu kode rekening/akun dapat dikelompokkan dalam satu buku besar untuk kode rekening/akun yang bersangkutan. Periode posting harus semakin diusahakan dapat dilakukan dalam waktu yang semakin singkat misalkan untuk periode mingguan atau bahkan harian.

Contoh buku besar SKPKD-PPKD : Kas di Kas Daerah sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah :

**KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR**

**SKPKD** : BPKAD Kabupaten Kuningan  
**Kode Rekening** : 1.1.1.01.01  
**Nama Rekening** : Kas di Kas Daerah  
**Pagu APBD** :  
**Pagu perubahan APBD** :

Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian                                       | Debet<br>(Rp)         | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|--|-----------------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |  |                       |                |
| 1  |       | 7/01/2022  | JU  | Piutang Bagi Hasil Pajak                     | 2.000.000.000         | -              |
| 3  |       | 12/02/2022 | JU  | Piutang Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA      | 1.000.000.000         | -              |
| 4  |       | 17/03/2022 | JU  | Piutang Dana Alokasi Umum                    | 5.000.000.000         | -              |
| 5  |       | 23/04/2022 | JU  | Piutang Dana Alokasi Khusus                  | 3.000.000.000         | -              |
| 6  |       | 27/06/2022 | JU  | Piutang Dana Penyesuaian BOS                 | 700.000.000           | -              |
| 7  |       | 1/08/2022  | JU  | Piutang Bagi Hasil Pajak Daerah              | 500.000.000           | -              |
| 8  |       | 7/08/2022  | JU  | Piutang Pendapatan Bantuan Keuangan Provinsi | 250.000.000           | -              |
| 9  |       | 12/09/2022 | JU  | Piutang Pendapatan Hibah Provinsi            | 100.000.000           | -              |
| 10 |       | 17/10/2022 | JU  | Piutang Pendapatan Dana Darurat              | 50.000.000            | -              |
| 11 |       | 20/11/2022 | JU  | Pendapatan Lainnya-LO                        | 50.000.000            | -              |
|    |       |            |     |  |                       |                |
|    |       |            |     | <b>Jumlah</b>                                | <b>12.650.000.000</b> | -              |
|    |       |            |     | <b>Saldo</b>                                 | <b>12.650.000.000</b> | -              |

PPK-SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–PPKD : Piutang Bagi Hasil Pajak Daerah sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPKD : BPKAD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 1.1.3.05.01  
Nama Rekening : Piutang Bagi Hasil Pajak Daerah  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD :

Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian                       | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|------------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |                              |               |                |
| 1  |       | 5/01/2022  | JU  | Bagi Hasil Pajak-LO          | 2.000.000.000 | -              |
| 2  |       | 7/01/2022  | JU  | Kas di Kas Daerah            | -             | 2.000.000.000  |
| 3  |       | 30/07/2022 | JU  | Bagi Hasil Pajak Provinsi-LO | 500.000.000   | -              |
| 4  |       | 1/08/2022  | JU  | Kas di Kas Daerah            | -             | 500.000.000    |
|    |       |            |     |                              |               |                |
|    |       |            |     | Jumlah                       | 2.500.000.000 | 2.500.000.000  |
|    |       |            |     | Saldo                        | -             | -              |

PPK–SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–PPKD : Piutang Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah :

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPKD : BPKAD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 1.1.3.05.02  
Nama Rekening : Piutang Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD :

Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian                        | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|-------------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |                               |               |                |
| 1  |       | 10/02/2022 | JU  | Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA-LO | 1.000.000.000 | -              |
| 2  |       | 12/02/2022 | JU  | Kas di Kas Daerah             | -             | 1.000.000.000  |
|    |       |            |     |                               |               |                |
|    |       |            |     | Jumlah                        | 1.000.000.000 | 1.000.000.000  |
|    |       |            |     | Saldo                         | -             | -              |

PPK–SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–PPKD : Piutang Dana Alokasi Umum  
sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya :

**KABUPATEN KUNINGAN**  
**BUKU BESAR**

**SKPKD** : BPKAD Kabupaten Kuningan  
**Kode Rekening** : 1.1.3.05.03  
**Nama Rekening** : Piutang Dana Alokasi Umum  
**Pagu APBD** :  
**Pagu perubahan APBD** : **Halaman 01**

| No | Bukti |            | Ref | Uraian               | Debet<br>(Rp)        | Kredit<br>(Rp)       |
|----|-------|------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |                      |                      |                      |
| 1  |       | 15/03/2022 | JU  | Dana Alokasi Umum-LO | 5.000.000.000        | -                    |
| 2  |       | 17/03/2022 | JU  | Kas di Kas Daerah    | -                    | 5.000.000.000        |
|    |       |            |     |                      |                      |                      |
|    |       |            |     | <b>Jumlah</b>        | <b>5.000.000.000</b> | <b>5.000.000.000</b> |
|    |       |            |     | <b>Saldo</b>         | -                    | -                    |

PPK–SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–PPKD : Piutang Dana Alokasi Khusus  
sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya :

**KABUPATEN KUNINGAN**  
**BUKU BESAR**

**SKPKD** : BPKAD Kabupaten Kuningan  
**Kode Rekening** : 1.1.3.05.04  
**Nama Rekening** : Piutang–Dana Alokasi Khusus  
**Pagu APBD** :  
**Pagu perubahan APBD** : **Halaman 01**

| No | Bukti |            | Ref | Uraian                 | Debet<br>(Rp)        | Kredit<br>(Rp)       |
|----|-------|------------|-----|------------------------|----------------------|----------------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |                        |                      |                      |
| 1  |       | 20/04/2022 | JU  | Dana Alokasi Khusus-LO | 3.000.000.000        | -                    |
| 2  |       | 23/04/2022 | JU  | Kas di Kas Daerah      | -                    | 3.000.000.000        |
|    |       |            |     |                        |                      |                      |
|    |       |            |     | <b>Jumlah</b>          | <b>3.000.000.000</b> | <b>3.000.000.000</b> |
|    |       |            |     | <b>Saldo</b>           | -                    | -                    |

PPK–SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–PPKD : Piutang Dana Penyesuaian  
BOS sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya :

**KABUPATEN KUNINGAN**  
**BUKU BESAR**

**SKPKD** : BPKAD Kabupaten Kuningan  
**Kode Rekening** : 1.1.3.06.01  
**Nama Rekening** : Piutang Dana Penyesuaian BOS  
**Pagu APBD** :  
**Pagu perubahan APBD** : **Halaman 01**

| No | Bukti |            | Ref | Uraian            | Debet<br>(Rp)      | Kredit<br>(Rp)     |
|----|-------|------------|-----|-------------------|--------------------|--------------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |                   |                    |                    |
| 1  |       | 25/06/2022 | JU  | Dana BOS-LO       | 700.000.000        | -                  |
| 2  |       | 27/06/2022 | JU  | Kas di Kas Daerah | -                  | 700.000.000        |
|    |       |            |     |                   |                    |                    |
|    |       |            |     | <b>Jumlah</b>     | <b>700.000.000</b> | <b>700.000.000</b> |
|    |       |            |     | <b>Saldo</b>      | -                  | -                  |

PPK–SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–PPKD : Piutang Bagi Hasil Pajak  
Daerah sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal  
sebelumnya :

**KABUPATEN KUNINGAN**  
**BUKU BESAR**

**SKPKD** : BPKAD Kabupaten Kuningan  
**Kode Rekening** : 1.1.3.07.01  
**Nama Rekening** : Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi  
**Pagu APBD** :  
**Pagu perubahan APBD** : **Halaman 01**

| No | Bukti |            | Ref | Uraian                       | Debet<br>(Rp)      | Kredit<br>(Rp)     |
|----|-------|------------|-----|------------------------------|--------------------|--------------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |                              |                    |                    |
| 1  |       | 30/07/2022 | JU  | Bagi Hasil Pajak Provinsi-LO | 500.000.000        | -                  |
| 2  |       | 01/08/2022 | JU  | Kas di Kas Daerah            | -                  | 500.000.000        |
|    |       |            |     |                              |                    |                    |
|    |       |            |     | <b>Jumlah</b>                | <b>500.000.000</b> | <b>500.000.000</b> |
|    |       |            |     | <b>Saldo</b>                 | -                  | -                  |

PPK–SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–PPKD : Piutang Pendapatan Bantuan Keuangan Provinsi sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya :

**KABUPATEN KUNINGAN**  
**BUKU BESAR**

**SKPKD** : BPKAD Kabupaten Kuningan  
**Kode Rekening** : 1.1.3.07.02  
**Nama Rekening** : Piutang Pendapatan Bantuan Keuangan Provinsi  
**Pagu APBD** :  
**Pagu perubahan APBD** : **Halaman 01**

| No | Bukti |            | Ref | Uraian                               | Debet<br>(Rp)      | Kredit<br>(Rp)     |
|----|-------|------------|-----|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |                                      |                    |                    |
| 1  |       | 05/08/2022 | JU  | Pendapatan Bantuan Keuangan Provinsi | 250.000.000        | -                  |
| 2  |       | 07/08/2022 | JU  | Kas di Kas Daerah                    | -                  | 250.000.000        |
|    |       |            |     |                                      |                    |                    |
|    |       |            |     | <b>Jumlah</b>                        | <b>250.000.000</b> | <b>250.000.000</b> |
|    |       |            |     | <b>Saldo</b>                         | -                  | -                  |

PPK–SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–PPKD : Piutang Pendapatan Hibah Provinsi sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya :

**KABUPATEN KUNINGAN**  
**BUKU BESAR**

**SKPKD** : BPKAD Kabupaten Kuningan  
**Kode Rekening** : 1.1.3.07.03  
**Nama Rekening** : Piutang Pendapatan Hibah Provinsi  
**Pagu APBD** :  
**Pagu perubahan APBD** : **Halaman 01**

| No | Bukti |            | Ref | Uraian                             | Debet<br>(Rp)      | Kredit<br>(Rp)     |
|----|-------|------------|-----|------------------------------------|--------------------|--------------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |                                    |                    |                    |
| 1  |       | 10/09/2022 | JU  | Pendapatan Hibah Daerah Lainnya-LO | 100.000.000        | -                  |
| 2  |       | 07/08/2022 | JU  | Kas di Kas Daerah                  | -                  | 100.000.000        |
|    |       |            |     |                                    |                    |                    |
|    |       |            |     | <b>Jumlah</b>                      | <b>100.000.000</b> | <b>100.000.000</b> |
|    |       |            |     | <b>Saldo</b>                       | -                  | -                  |

PPK–SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....



Contoh buku besar SKPKD–PPKD : Piutang Pendapatan Dana Darurat sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya :

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPKD : BPKAD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 1.1.3.07.04  
Nama Rekening : Piutang Pendapatan Dana Darurat  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian                     | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|----------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |                            |               |                |
| 1  |       | 15/10/2022 | JU  | Pendapatan Dana Darurat-LO | 50.000.000    | -              |
| 2  |       | 17/10/2022 | JU  | Kas di Kas Daerah          | -             | 50.000.000     |
|    |       |            |     |                            |               |                |
|    |       |            |     | Jumlah                     | 50.000.000    | 50.000.000     |
|    |       |            |     | Saldo                      | -             | -              |

PPK–SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–PPKD : Estimasi Perubahan SAL sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya :

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPKD : BPKAD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 3.1.2.05.01  
Nama Rekening : Estimasi Perubahan SAL  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian                                   | Debet<br>(Rp)  | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|--|----------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |  |                |                |
| 1  |       | 7/01/2022  | JM  | Bagi Hasil Pajak-LRA                     | 2.000.000.000  | -              |
| 2  |       | 12/02/2022 | JM  | Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA-LRA      | 1.000.000.000  | -              |
| 3  |       | 17/03/2022 | JM  | Dana Alokasi Umum-LRA                    | 5.000.000.000  | -              |
| 4  |       | 23/04/2022 | JM  | Dana Alokasi Khusus-LRA                  | 3.000.000.000  | -              |
| 5  |       | 27/06/2022 | JM  | BOS-LRA                                  | 700.000.000    | -              |
| 6  |       | 1/08/2022  | JM  | Bagi Hasil Pajak Provinsi-LRA            | 250.000.000    | -              |
| 7  |       | 7/08/2022  | JM  | Pendapatan Bantuan Keuangan Provinsi-LRA | 500.000.000    | -              |
| 8  |       | 12/09/2022 | JM  | Pendapatan Hibah Daerah Lainnya-LRA      | 100.000.000    | -              |
| 9  |       | 17/10/2022 | JM  | Pendapatan Dana Darurat-LRA              | 50.000.000     | -              |
| 10 |       | 20/11/2022 | JM  | Pendapatan Lainnya-LRA                   | 50.000.000     | -              |
|    |       |            |     |  |                |                |
|    |       |            |     | Jumlah                                   | 12.650.000.000 | -              |
|    |       |            |     | Saldo                                    | 12.650.000.000 | -              |

PPK–SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–PPKD : Bagi Hasil Pajak-LRA sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya :

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPKD : BPKAD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 4.2.1.01.00  
Nama Rekening : Bagi Hasil Pajak-LRA  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |           | Ref | Uraian                 | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|-----------|-----|------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal   |     |                        |               |                |
| 1  |       | 7/01/2022 | JM  | Estimasi Perubahan SAL | -             | 2.000.000.000  |
|    |       |           |     |                        |               |                |
|    |       |           |     | Jumlah                 | -             | 2.000.000.000  |
|    |       |           |     | Saldo                  | -             | 2.000.000.000  |

PPK–SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–PPKD : Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA-LRA sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPKD : BPKAD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 4.2.1.02.00  
Nama Rekening : Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA-LRA  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian                 | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |                        |               |                |
| 1  |       | 12/02/2022 | JM  | Estimasi Perubahan SAL | -             | 1.000.000.000  |
|    |       |            |     |                        |               |                |
|    |       |            |     | Jumlah                 | -             | 1.000.000.000  |
|    |       |            |     | Saldo                  | -             | 1.000.000.000  |

PPK–SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–PPKD : Dana Alokasi Umum-LRA  
sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya :

**KABUPATEN KUNINGAN**  
**BUKU BESAR**

**SKPKD** : BPKAD Kabupaten Kuningan  
**Kode Rekening** : 4.2.2.01.01  
**Nama Rekening** : Dana Alokasi Umum-LRA  
**Pagu APBD** :  
**Pagu perubahan APBD** : **Halaman 01**

| No | Bukti |            | Ref | Uraian                 | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp)       |
|----|-------|------------|-----|------------------------|---------------|----------------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |                        |               |                      |
| 1  |       | 17/03/2022 | JM  | Estimasi Perubahan SAL | -             | 5.000.000.000        |
|    |       |            |     |                        |               |                      |
|    |       |            |     | <b>Jumlah</b>          | -             | <b>5.000.000.000</b> |
|    |       |            |     | <b>Saldo</b>           | -             | <b>5.000.000.000</b> |

PPK–SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–PPKD : Dana Alokasi Khusus-LRA  
sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya :

**KABUPATEN KUNINGAN**  
**BUKU BESAR**

**SKPKD** : BPKAD Kabupaten Kuningan  
**Kode Rekening** : 4.2.3.01.00  
**Nama Rekening** : Dana Alokasi Khusus-LRA  
**Pagu APBD** :  
**Pagu perubahan APBD** : **Halaman 01**

| No | Bukti |            | Ref | Uraian                 | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp)       |
|----|-------|------------|-----|------------------------|---------------|----------------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |                        |               |                      |
| 1  |       | 23/04/2022 | JM  | Estimasi Perubahan SAL | -             | 3.000.000.000        |
|    |       |            |     |                        |               |                      |
|    |       |            |     | <b>Jumlah</b>          | -             | <b>3.000.000.000</b> |
|    |       |            |     | <b>Saldo</b>           | -             | <b>3.000.000.000</b> |

PPK–SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–PPKD : Dana BOS-LRA sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya :

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPKD : BPKAD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 4.3.4.01.01  
Nama Rekening : Dana BOS-LRA  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian                 | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |                        |               |                |
| 1  |       | 27/06/2022 | JM  | Estimasi Perubahan SAL | -             | 700.000.000    |
|    |       |            |     |                        |               |                |
|    |       |            |     | Jumlah                 | -             | 700.000.000    |
|    |       |            |     | Saldo                  | -             | 700.000.000    |

PPK–SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–PPKD : Bagi Hasil Pajak Provinsi-LRA sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya :

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPKD : BPKAD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 4.3.3.01.01  
Nama Rekening : Bagi Hasil Pajak dari Provinsi-LRA  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |           | Ref | Uraian                 | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|-----------|-----|------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal   |     |                        |               |                |
| 1  |       | 1/08/2022 | JM  | Estimasi Perubahan SAL | -             | 250.000.000    |
|    |       |           |     |                        |               |                |
|    |       |           |     | Jumlah                 | -             | 250.000.000    |
|    |       |           |     | Saldo                  | -             | 250.000.000    |

PPK–SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–PPKD : Pendapatan Bantuan Keuangan Provinsi-LRA sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya :

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPKD : BPKAD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 4.3.5.01.00  
Nama Rekening : Pendapatan Bantuan Keuangan Provinsi-LRA  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |           | Ref | Uraian                 | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|-----------|-----|------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal   |     |                        |               |                |
| 1  |       | 7/08/2022 | JM  | Estimasi Perubahan SAL | -             | 500.000.000    |
|    |       |           |     |                        |               |                |
|    |       |           |     | Jumlah                 | -             | 500.000.000    |
|    |       |           |     | Saldo                  | -             | 500.000.000    |

PPK–SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–PPKD : Pendapatan Hibah Daerah Lainnya-LRA sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya :

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPKD : BPKAD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 4.3.1.02.01  
Nama Rekening : Pendapatan Hibah Daerah Lainnya-LRA  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian                 | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |                        |               |                |
| 1  |       | 12/09/2022 | JM  | Estimasi Perubahan SAL | -             | 100.000.000    |
|    |       |            |     |                        |               |                |
|    |       |            |     | Jumlah                 | -             | 100.000.000    |
|    |       |            |     | Saldo                  | -             | 100.000.000    |

PPK–SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–PPKD : Pendapatan Dana Darurat-LRA  
sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya :

**KABUPATEN KUNINGAN**  
**BUKU BESAR**

**SKPKD** : BPKAD Kabupaten Kuningan  
**Kode Rekening** : 4.3.2.01.00  
**Nama Rekening** : Pendapatan Dana Darurat-LRA  
**Pagu APBD** :  
**Pagu perubahan APBD** : **Halaman 01**

| No | Bukti |            | Ref | Uraian                 | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |                        |               |                |
| 1  |       | 17/10/2022 | JM  | Estimasi Perubahan SAL | -             | 50.000.000     |
|    |       |            |     |                        |               |                |
|    |       |            |     | Jumlah                 | -             | 50.000.000     |
|    |       |            |     | Saldo                  | -             | 50.000.000     |

PPK–SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–PPKD : Pendapatan Lainnya-LRA  
sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya :

**KABUPATEN KUNINGAN**  
**BUKU BESAR**

**SKPKD** : BPKAD Kabupaten Kuningan  
**Kode Rekening** : 4.4.4.01.01  
**Nama Rekening** : Pendapatan Lainnya-LRA  
**Pagu APBD** :  
**Pagu perubahan APBD** : **Halaman 01**

| No | Bukti |            | Ref | Uraian                 | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |                        |               |                |
| 1  |       | 20/11/2022 | JM  | Estimasi Perubahan SAL | -             | 50.000.000     |
|    |       |            |     |                        |               |                |
|    |       |            |     | Jumlah                 | -             | 50.000.000     |
|    |       |            |     | Saldo                  | -             | 50.000.000     |

PPK–SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–PPKD : Bagi Hasil Pajak-LO sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya :

**KABUPATEN KUNINGAN**  
**BUKU BESAR**

**SKPKD** : BPKAD Kabupaten Kuningan  
**Kode Rekening** : 8.2.1.01.00  
**Nama Rekening** : Bagi Hasil Pajak-LO  
**Pagu APBD** :  
**Pagu perubahan APBD** : **Halaman 01**

| No | Bukti |           | Ref | Uraian                   | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp)       |
|----|-------|-----------|-----|--------------------------|---------------|----------------------|
|    | Nomor | Tanggal   |     |                          |               |                      |
| 1  |       | 5/01/2022 | JU  | Piutang Bagi Hasil Pajak | -             | 2.000.000.000        |
|    |       |           |     |                          |               |                      |
|    |       |           |     | <b>Jumlah</b>            | -             | <b>2.000.000.000</b> |
|    |       |           |     | <b>Saldo</b>             | -             | <b>2.000.000.000</b> |

PPK–SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–PPKD : Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA-LO sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya :

**KABUPATEN KUNINGAN**  
**BUKU BESAR**

**SKPKD** : BPKAD Kabupaten Kuningan  
**Kode Rekening** : 8.2.1.02.00  
**Nama Rekening** : Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA-LO  
**Pagu APBD** :  
**Pagu perubahan APBD** : **Halaman 01**

| No | Bukti |            | Ref | Uraian                                  | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp)       |
|----|-------|------------|-----|---|---------------|----------------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |   |               |                      |
| 1  |       | 10/02/2022 | JU  | Piutang Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA | -             | 1.000.000.000        |
|    |       |            |     |   |               |                      |
|    |       |            |     | <b>Jumlah</b>                           | -             | <b>1.000.000.000</b> |
|    |       |            |     | <b>Saldo</b>                            | -             | <b>1.000.000.000</b> |

PPK–SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–PPKD : Dana Alokasi Umum-LO  
sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya :

**KABUPATEN KUNINGAN**  
**BUKU BESAR**

**SKPKD** : BPKAD Kabupaten Kuningan  
**Kode Rekening** : 8.2.1.03.00  
**Nama Rekening** : Dana Alokasi Umum-LO  
**Pagu APBD** :  
**Pagu perubahan APBD** : **Halaman 01**

| No | Bukti |            | Ref | Uraian                    | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp)       |
|----|-------|------------|-----|---------------------------|---------------|----------------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |                           |               |                      |
| 1  |       | 15/03/2022 | JU  | Piutang Dana Alokasi Umum | -             | 5.000.000.000        |
|    |       |            |     |                           |               |                      |
|    |       |            |     | <b>Jumlah</b>             | -             | <b>5.000.000.000</b> |
|    |       |            |     | <b>Saldo</b>              | -             | <b>5.000.000.000</b> |

PPK–SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–PPKD : Dana Alokasi Khusus-LO  
sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya :

**KABUPATEN KUNINGAN**  
**BUKU BESAR**

**SKPKD** : BPKAD Kabupaten Kuningan  
**Kode Rekening** : 8.2.1.04.00  
**Nama Rekening** : Dana Alokasi Khusus-LO  
**Pagu APBD** :  
**Pagu perubahan APBD** : **Halaman 01**

| No | Bukti |            | Ref | Uraian                      | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp)       |
|----|-------|------------|-----|-----------------------------|---------------|----------------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |                             |               |                      |
| 1  |       | 20/04/2022 | JU  | Piutang Dana Alokasi Khusus | -             | 3.000.000.000        |
|    |       |            |     |                             |               |                      |
|    |       |            |     | <b>Jumlah</b>               | -             | <b>3.000.000.000</b> |
|    |       |            |     | <b>Saldo</b>                | -             | <b>3.000.000.000</b> |

PPK–SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....



Contoh buku besar SKPKD–PPKD : BOS-LO sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya :

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPKD : BPKAD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 8.2.2.03.06  
Nama Rekening : BOS-LO  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian                       | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|------------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |                              |               |                |
| 1  |       | 25/06/2022 | JU  | Piutang Dana Penyesuaian BOS | -             | 700.000.000    |
|    |       |            |     |                              |               |                |
|    |       |            |     | Jumlah                       | -             | 700.000.000    |
|    |       |            |     | Saldo                        | -             | 700.000.000    |

PPK–SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–PPKD : Bagi Hasil Pajak Provinsi-LO sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya :

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPKD : BPKAD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 8.2.3.01.00  
Nama Rekening : Bagi Hasil Pajak Provinsi-LO  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian                          | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|---------------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |                                 |               |                |
| 1  |       | 30/07/2022 | JU  | Piutang Bagi Hasil Pajak Daerah | -             | 500.000.000    |
|    |       |            |     |                                 |               |                |
|    |       |            |     | Jumlah                          | -             | 500.000.000    |
|    |       |            |     | Saldo                           | -             | 500.000.000    |

PPK–SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–PPKD : Pendapatan Bantuan Keuangan Provinsi-LO sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya :

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPKD : BPKAD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 8.2.4.01.00  
Nama Rekening : Pendapatan Bantuan Keuangan Provinsi-LO  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian                                       | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|--|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |  |               |                |
| 1  |       | 05/08/2022 | JU  | Piutang Pendapatan Bantuan Keuangan Provinsi | -             | 250.000.000    |
|    |       |            |     |  |               |                |
|    |       |            |     | Jumlah                                       | -             | 250.000.000    |
|    |       |            |     | Saldo  | -             | 250.000.000    |

PPK–SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–PPKD : Pendapatan Dana Darurat-LO sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya :

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPKD : BPKAD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 8.3.2.01.00  
Nama Rekening : Pendapatan Dana Darurat-LO  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian                          | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|---------------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |                                 |               |                |
| 1  |       | 15/10/2022 | JU  | Piutang Pendapatan Dana Darurat | -             | 50.000.000     |
|    |       |            |     |                                 |               |                |
|    |       |            |     | Jumlah                          | -             | 50.000.000     |
|    |       |            |     | Saldo                           | -             | 50.000.000     |

PPK–SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–PPKD : Pendapatan Hibah Daerah Lainnya-LO sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya :

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPKD : BPKAD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 8.3.1.02.01  
Nama Rekening : Pendapatan Hibah Daerah Lainnya-LO  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian                            | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|-----------------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |                                   |               |                |
| 1  |       | 10/09/2022 | JU  | Piutang Pendapatan Hibah Provinsi | -             | 100.000.000    |
|    |       |            |     |                                   |               |                |
|    |       |            |     | Jumlah                            | -             | 100.000.000    |
|    |       |            |     | Saldo                             | -             | 100.000.000    |

PPK–SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–PPKD : Pendapatan Lainnya-LO sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya :

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPKD : BPKAD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 8.3.3.01.01  
Nama Rekening : Pendapatan Lainnya-LO  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian            | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|-------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |                   |               |                |
| 1  |       | 20/11/2022 | JU  | Kas di Kas Daerah | -             | 50.000.000     |
|    |       |            |     |                   |               |                |
|    |       |            |     | Jumlah            | -             | 50.000.000     |
|    |       |            |     | Saldo             | -             | 50.000.000     |

PPK–SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

#### **Langkah IV : Menyusun Neraca Saldo**

Setelah melakukan posting seluruh pencatatan dalam buku besar maka kemudian Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD membuat neraca saldo sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Penyusunan neraca saldo oleh Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD dilakukan secara triwulanan. Neraca saldo disusun dengan cara memindahkan saldo-saldo yang ada di tiap buku besar ke dalam Neraca Saldo. Contoh Neraca Saldo dari hasil pencatatan dan posting contoh transaksi keuangan diatas adalah sebagai berikut :

KABUPATEN KUNINGAN  
NERACA SALDO  
PER TANGGAL 31 Desember 2022

SKPKD : SPKD Kabupaten Kuningan

| Kode Rekening |   |   |    |    | Uraian                                   | Jumlah         |                |
|---------------|---|---|----|----|--|----------------|----------------|
|               |   |   |    |    |  | Debit          | Kredit         |
| 1             |   |   |    |    | 2  | 3              | 4              |
| 1             | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas di Kas Daerah                        | 12.650.000.000 | -              |
| 3             | 1 | 2 | 05 | 01 | Estimasi Perubahan SAL                   | 12.650.000.000 | -              |
| 4             | 2 | 1 | 01 | 00 | Bagi Hasil Pajak-LRA                     | -              | 2.000.000.000  |
| 4             | 2 | 1 | 02 | 00 | Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA-LRA           | -              | 1.000.000.000  |
| 4             | 2 | 2 | 01 | 01 | Dana Alokasi Umum-LRA                    | -              | 5.000.000.000  |
| 4             | 2 | 3 | 01 | 00 | Dana Alokasi Khusus-LRA                  | -              | 3.000.000.000  |
| 4             | 3 | 4 | 01 | 01 | Dana BOS-LRA                             | -              | 700.000.000    |
| 4             | 3 | 3 | 01 | 00 | Bagi Hasil Pajak Provinsi-LRA            | -              | 250.000.000    |
| 4             | 3 | 5 | 01 | 00 | Pendapatan Bantuan Keuangan Provinsi-LRA | -              | 500.000.000    |
| 4             | 3 | 1 | 02 | 01 | Pendapatan Hibah Daerah Lainnya-LRA      | -              | 100.000.000    |
| 4             | 3 | 2 | 01 | 00 | Pendapatan Dana Darurat-LRA              | -              | 50.000.000     |
| 4             | 4 | 4 | 01 | 01 | Pendapatan Lainnya-LRA                   | -              | 50.000.000     |
| 8             | 2 | 1 | 01 | 00 | Bagi Hasil Pajak-LO                      | -              | 2.000.000.000  |
| 8             | 2 | 1 | 02 | 00 | Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA-LO            | -              | 1.000.000.000  |
| 8             | 2 | 1 | 03 | 00 | Dana Alokasi Umum-LO                     | -              | 5.000.000.000  |
| 8             | 2 | 1 | 04 | 00 | Dana Alokasi Khusus-LO                   | -              | 3.000.000.000  |
| 8             | 2 | 2 | 03 | 06 | BOS-LO                                   | -              | 700.000.000    |
| 8             | 2 | 3 | 01 | 00 | Bagi Hasil Pajak Provinsi-LO             | -              | 500.000.000    |
| 8             | 2 | 4 | 01 | 00 | Pendapatan Bantuan Keuangan Provinsi-LO  | -              | 250.000.000    |
| 8             | 3 | 2 | 01 | 00 | Pendapatan Dana Darurat-LO               | -              | 50.000.000     |
| 8             | 3 | 2 | 02 | 01 | Pendapatan Hibah Daerah Lainnya-LO       | -              | 100.000.000    |
| 8             | 3 | 3 | 01 | 01 | Pendapatan Lainnya-LO                    | -              | 50.000.000     |
|               |   |   |    |    |  |                |                |
| Jumlah        |   |   |    |    |  | 25.300.000.000 | 25.300.000.000 |

PPK-SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

## **SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI BEBAN, BELANJA, DAN TRANSFER DI SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (SKPKD-PPKD) YANG MENCATAT TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH**

Bagian ini menjelaskan Sistem dan Prosedur Akuntansi Beban, Belanja dan Transfer di Pemerintah Kabupaten Kuningan untuk Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mencatat transaksi beban, belanja dan transfer pemerintah daerah.

### **KEBIJAKAN UMUM**

Prosedur akuntansi beban, belanja dan transfer pada SKPKD-PPKD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan beban, belanja dan transfer dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD khususnya yang tertuang dalam DPA-PPKD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Jadi selain mengelola belanja yang merupakan tanggungjawabnya seperti SKPD lainnya, maka SKPKD juga mengelola berbagai belanja yang terkait dengan tanggungjawab PPKD sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) yaitu Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Tidak Terduga dan Transfer yang meliputi Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan. Dalam akuntansi pengelolaan belanja dan transfer ini juga meliputi pengelolaan beban.

Sistem dan prosedur akuntansi beban, belanja dan transfer oleh SKPKD-PPKD merupakan salah satu sarana untuk menunjang pertanggungjawaban APBD. Sistem dan prosedur akuntansi ini disusun berdasarkan kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

## **PIHAK-PIHAK TERKAIT**

Berbagai pihak/fungsi yang terkait dalam proses akuntansi beban, belanja dan transfer di SKPKD-PPKD beserta tugas-tugasnya adalah :

1. Pemerintah Lainnya

Pemerintah Lainnya adalah entitas pemerintah yang menerima transfer dari Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Kuningan seperti dana bagi hasil atau bantuan keuangan kepada Pemerintah lainnya termasuk Pemerintah Desa. Pihak ini adalah pemberi dokumen kepada Kuasa BUD.

2. Pihak Lainnya

Pihak Lainnya adalah pihak diluar Bendahara Pengeluaran SKPD dan PPKD dan Pemerintah Lainnya yang menerima transfer dari Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Kuningan seperti Bank, Lembaga Keuangan bukan Bank, BUMN, BUMD, Masyarakat. Pihak ini adalah pemberi dokumen kepada Kuasa BUD.

3. Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD)

Dalam pelaksanaan prosedur ini, Kuasa BUD memiliki tugas menyiapkan dokumen-dokumen atas transaksi dengan pemerintah lain dan atau pihak lain yang terkait dengan proses pelaksanaan akuntansi beban, belanja, dan transfer SKPKD. Kuasa BUD juga menyerahkan Nota Debet beserta Kopi atau rangkap Dokumen belanja seperti SP2D LS kepada PPK-SKPKD.

4. Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD

Dalam pelaksanaan prosedur ini, Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD bekerja untuk mencatat transaksi Pemerintah Daerah memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Menerima Nota Debet beserta bukti-bukti transaksi dari Bendahara Pengeluaran PPKD seperti SP2D LS dan menganalisa data dan informasi akuntansi dari bukti transaksi tersebut;
- b. Mencatat transaksi-transaksi pemerintah daerah berdasarkan bukti-bukti yang terkait yang merupakan transaksi beban,

belanja dan transfer dari DPA-PPKD ke buku jurnal;

- c. Memposting jurnal-jurnal terkait beban, belanja, dan transfer pemerintah daerah ke dalam buku besarnya masing-masing;
  - d. Menyusun neraca saldo untuk persiapan penyusunan laporan keuangan, yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan; dan
  - e. Menyerahkan buku jurnal, buku besar dan neraca saldo kepada PPK-SKPKD untuk diperiksa dan ditandatangani.
5. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPKD) : Sekretaris Badan atau Koordinator/ Kepala Sub Bagian Keuangan BPKAD.

Dalam pelaksanaan prosedur ini, PPK-SKPKD memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Bertanggungjawab atas sistem akuntansi SKPKD-PPKD terkait transaksi beban, belanja dan transfer pemerintah daerah yang dipimpinnya;
  - b. Memeriksa dan menandatangani hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Tenaga Akuntansi PPK-SKPKD setiap bulannya seperti Buku Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo SKPKD-PPKD yang mencatat transaksi pemerintah daerah setiap triwulan; dan
  - c. Menyerahkan Buku Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo SKPKD-PPKD yang mencatat transaksi pemerintah daerah setiap triwulan kepada PPKD selaku pengguna anggaran untuk disetujui.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (tidak termasuk Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan).

Dalam pelaksanaan prosedur ini, PPKD memiliki tugas sebagai pengguna anggaran menyetujui Buku Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo yang diserahkan PPK-SKPKD setiap triwulan.



7. Kepala Daerah : Bupati untuk selanjutnya disebut KDH
- Dalam pelaksanaan prosedur ini, KDH memiliki tugas menerbitkan :
- a. Surat Keputusan Pemberian Subsidi
  - b. Surat Keputusan Pemberian Hibah
  - c. Surat Keputusan Pemberian Bantuan Sosial
  - d. Surat Keputusan Pemberian Transfer Bagi Hasil dan/atau Bantuan Keuangan
  - e. Disposisi tentang Tanggap Darurat Bencana

#### **DOKUMEN YANG DIGUNAKAN**

- 1. Nota Debit merupakan bukti transaksi pengeluaran uang di rekening kas umum daerah.
- 2. Surat Perintah Pencairan Dana Langsung yang selanjutnya disebut (SP2D-LS) adalah Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan Kuasa Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM-LS;
- 3. Bukti pengakuan Beban PPKD seperti :
  - a. Surat Keputusan Kepala Daerah (SK KDH) tentang Belanja Subsidi; Belanja Bantuan Sosial; dan Belanja Tak Terduga; dan
  - b. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NHPD) dan Keputusan Kepala Daerah tentang Belanja Hibah.
- 4. Bukti pengakuan Transfer PPKD seperti Surat Keputusan Kepala Daerah (SK KDH) tentang Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.
- 5. Bukti Memorial adalah bukti transaksi yang digunakan untuk mencatat transaksi non keuangan.

## **BUKU DAN ATAU FORMULIR YANG DIGUNAKAN**

Buku dan atau formulir yang digunakan dalam pelaksanaan prosedur akuntansi beban, belanja dan transfer di SKPKD-PPKD ini paling tidak terdiri dari :

1. Buku Jurnal Umum (JU)

Merupakan buku jurnal yang digunakan untuk melakukan pencatatan akuntansi atas transaksi beban, belanja dan transfer di SKPKD-PPKD yang berbasis akrual terkait penyusunan LO dan Neraca.

2. Buku Jurnal Pengeluaran Kas (JK)

Merupakan buku jurnal yang digunakan untuk melakukan pencatatan akuntansi atas transaksi pengeluaran kas untuk transaksi pengeluaran tunai beban, belanja dan transfer di SKPKD-PPKD. Pada umumnya buku jurnal pengeluaran kas digunakan untuk mencatat transaksi basis kas terkait penyusunan LRA dan LAK.

3. Buku Besar (BB)

Merupakan buku yang digunakan untuk menampung pencatatan hasil posting transaksi beban, belanja dan transfer di SKPKD-PPKD di buku jurnal. Buku besar ini merupakan pencatatan akuntansi atas seluruh transaksi untuk suatu rekening/akun per jenis atau obyek. Jadi setiap rekening/akun per jenis atau objek mempunyai buku besar tersendiri.

4. Buku Besar Pembantu (BP)

Buku besar dapat dilengkapi dengan buku besar pembantu sebagai alat uji silang dan kelengkapan informasi rekening/akun tertentu. Buku besar pembantu berisi rincian akun (rincian obyek) yang telah dicatat dalam buku besar. Jika dirasakan informasi dalam buku besar sudah mencukupi maka buku besar pembantu tidak perlu dibuat lagi.

5. Neraca Saldo (NS)

Merupakan formulir yang mencatat nilai saldo setiap

rekening/akun per rincian objek sehingga diketahui jumlah total dari seluruh rekening/akun.

## **KERANGKA SISTEM**

Tenaga akuntansi PPK-SKPKD menerima bukti-bukti transaksi beban, belanja dan transfer SKPKD-PPKD dari Kuasa BUD melalui PPK-SKPKD. Bukti-bukti transaksi beban, belanja dan transfer SKPKD-PPKD dapat berupa Nota Debet, SP2D-LS, SK KDH, NPHD, dan Bukti Memorial. Pada saat bukti transaksi beban, belanja dan transfer SKPKD-PPKD tersebut telah diterima maka Tenaga Akuntansi PPK-SKPKD, kemudian melakukan pencatatan akuntansi dalam :

1. Buku jurnal umum, untuk mencatat pengakuan beban baik yang sudah dibebankan (*expense*) maupun yang sudah dikeluarkan (*realized*) terkait penyusunan LO dan Neraca.
2. Buku jurnal pengeluaran kas, untuk mencatat pengeluaran kas dari realisasi anggaran belanja dan transfer terkait penyusunan LRA dan LAK.

Pencatatan transaksi atas beban, belanja dan transfer SKPKD-PPKD dilakukan pada saat terjadinya transaksi dan atau pada saat bukti transaksi tersebut diterima namun pengakuan transaksi tetap pada tanggal bukti transaksi. Setelah seluruh transaksi dicatat dalam buku jurnal maka Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD kemudian melakukan posting ke buku besar. Setelah posting dari buku jurnal ke buku besar selesai dilakukan maka kemudian Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD menyusun Neraca Saldo sebagai dasar pembuatan Laporan Keuangan untuk setiap triwulan yang diserahkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah triwulan berakhir kepada PPK-SKPKD.

## **ALUR PROSEDUR TEKNIS**

Teknis pelaksanaan sistem dan prosedur akuntansi beban, belanja dan transfer di SKPKD-PPKD ini adalah sebagai berikut :

## **Langkah I : Penerimaan Bukti Transaksi**

Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD menerima bukti-bukti transaksi beban, belanja dan transfer dari Kuasa BUD melalui PPK-SKPKD kemudian melakukan analisa informasi akuntansi. Dari bukti-bukti transaksi tersebut, Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD akan mendapatkan informasi transaksi beban, belanja dan transfer yang terjadi di SKPKD-PPKD. Sebagai contoh : misalkan diketahui bahwa selama tahun 2022, telah terjadi transaksi yang terkait dengan beban, belanja dan transfer di SKPKD-PPKD sebagai berikut (asumsi tanggal bukti transaksi sama dengan tanggal penerimaan bukti transaksi):

- |               |  |
|---------------|--|
| 31 Maret 2022 | Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD menerima perjanjian utang dengan pihak ketiga misalnya Bank atau berdasarkan tagihan bunga kreditur dari Kuasa BUD melalui PPK-SKPKD yang menyatakan beban bunga sebesar Rp 200.000.000,-.   |
| 7 April 2022  | Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD menerima SP2D LS dan Nota Debet dari Kuasa BUD melalui PPK-SKPKD yang menyatakan pelunasan tagihan bunga atas pengakuan utang beban bunga tanggal 31 Maret 2022.   |
| 10 April 2022 | Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD menerima Surat Keputusan Kepala Daerah/Perjanjian/Dokumen yang dipersamakan tentang pemberian subsidi kepada entitas lain seperti BUMD dari Kuasa BUD melalui PPK-SKPKD yang menyatakan beban subsidi sebesar Rp 500.000.000,-                     |
| 15 April 2022 | Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD menerima SP2D LS dan Nota Debet dari Kuasa BUD melalui PPK-SKPKD yang menyatakan pelunasan utang pemberian subsidi kepada entitas lain seperti BUMD atas Surat Keputusan Kepala Daerah/Perjanjian/Dokumen yang dipersamakan tanggal 10 April 2022. |
| 15 Juni 2022  | Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD menerima SK tentang nama-nama penerima hibah daerah dan telah  |

- menandatangani NPHD/Dokumen yang dipersamakan tentang pemberian hibah kepada kelompok masyarakat dari Kuasa BUD melalui PPK-SKPKD yang menyatakan beban hibah sebesar Rp 1.000.000.000,-.
- 17 Juli 2022 Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD menerima SP2D LS dan Nota Debet dari Kuasa BUD melalui PPK-SKPKD yang menyatakan pelunasan beban hibah atas SK tentang nama-nama penerima hibah daerah tanggal 15 juni 2022.
- 20 Agustus 2022 Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD menerima Surat Keputusan kepala daerah tentang penerima bantuan sosial berupa uang serta menandatangani Surat Perjanjian pemberian bantuan sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan dengan penerima bantuan sosial dari Kuasa BUD melalui PPK-SKPKD yang menyatakan beban bantuan sosial sebesar Rp 300.000.000,-.
- 23 Agustus 2022 Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD menerima SP2D LS dan Nota Debet dari Kuasa BUD melalui PPK-SKPKD yang menyatakan pelunasan beban bantuan sosial atas Surat Keputusan kepala daerah dan Surat Perjanjian pemberian bantuan sosial tanggal 20 April 2022.
- 25 Sept 2022 Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD menerima Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Ke Desa dari Kuasa BUD melalui PPK-SKPKD yang menyatakan beban transfer bagi hasil pajak dan retribusi ke desa sebesar Rp 500.000.000,-.
- 27 Sept 2022 Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD menerima SP2D LS dan Nota Debet dari Kuasa BUD melalui PPK-SKPKD yang menyatakan pelunasan beban transfer bagi hasil pajak dan retribusi ke desa atas Surat Keputusan Kepala Daerah tanggal 25 September 2022.
- 30 Okt 2022 Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD menerima Surat

|            |  |
|------------|--|
|            | Keputusan Kepala Daerah tentang bantuan keuangan ke desa dari Kuasa BUD melalui PPK-SKPKD yang menyatakan beban transfer bantuan keuangan ke desa sebesar Rp 100.000.000,-.  |
| 1 Nov 2022 | Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD menerima SP2D LS dan Nota Debet dari Kuasa BUD melalui PPK-SKPKD yang menyatakan pelunasan beban transfer bantuan keuangan ke desa atas Surat Keputusan Kepala Daerah tanggal 30 Oktober 2022.           |
| 5 Des 2022 | Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD menerima Dokumen Disposisi Kepala Daerah tentang Tanggap Darurat Bencana dari Kuasa BUD melalui PPK-SKPKD yang menyatakan beban lain-lain sebesar Rp 75.000.000,-.                                       |
| 7 Des 2022 | Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD menerima SP2D LS dan Nota Debet dari Kuasa BUD melalui PPK-SKPKD yang menyatakan pelunasan beban lain-lain atas Dokumen Disposisi Kepala Daerah tentang Tanggap Darurat Bencana tanggal 5 Desember 2022. |

Contoh sederhana tersebut diatas diberikan sebagai bahan untuk mempermudah penjelasan sistem dan prosedur akuntansi beban, belanja dan transfer di SKPKD ini. Tetapi contoh tersebut diatas tidak menunjukkan semua bentuk transaksi yang secara nyata terjadi.

## **Langkah II : Menjurnal Transaksi Belanja**

Berdasarkan bukti-bukti transaksi beban, belanja, dan transfer maka Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD mencatat transaksi tersebut di buku jurnal. Pencatatan akuntansi dilakukan kedalam buku jurnal sesuai dengan jenis transaksi yang terjadi.

1. Untuk **pengakuan beban atas penetapan yang terbit** maka dilakukan pencatatan dalam Buku Jurnal Umum dengan melakukan jurnal, “Beban sesuai jenisnya” di Debit dan “Akun Utang Belanja sesuai jenisnya” di kredit, sebagai berikut:

|                           | Debit       | Kredit      |
|---------------------------|-------------|-------------|
| <b>Beban_____</b>         | <b>xxxx</b> |             |
| <b>Utang Belanja_____</b> |             | <b>xxxx</b> |

Catatan : Kode dan nama rekening/akun beban dan utang (dalam contoh ditulis Beban\_\_\_\_\_ dan Utang Belanja\_\_\_\_\_) disesuaikan dengan kode dan nama rekening/akun, sampai rincian obyek, sesuai dengan pengakuan bebannya.

2. Untuk transaksi **pelunasan atas utang belanja yang dibayar oleh ke Kas Daerah** kepada penerima uang daerah maka dilakukan pencatatan dalam Buku Jurnal Umum dengan melakukan jurnal, “Utang Belanja” di Debit dan “RK PPKD” sesuai jenisnya” di kredit, sebagai berikut :

|                           | Debit       | Kredit      |
|---------------------------|-------------|-------------|
| <b>Utang Belanja_____</b> | <b>xxxx</b> |             |
| <b>Kas Daerah</b>         |             | <b>xxxx</b> |

Kemudian untuk mencatat realisasi anggaran berbasis kas dicatat dalam Buku Jurnal Pengeluaran kas dengan melakukan jurnal, “Belanja/Transfer” di Debit dan “Estimasi Perubahan SAL sesuai jenisnya” di kredit, sebagai berikut:

|                               | Debit       | Kredit      |
|-------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Belanja/Transfer_____</b>  | <b>xxxx</b> |             |
| <b>Estimasi Perubahan SAL</b> |             | <b>xxxx</b> |

Untuk transaksi **beban, belanja, dan transfer bukan atas penetapan yang dibayar langsung oleh Kas Daerah** atau melalui bank, kepada penerima uang daerah maka dilakukan pencatatan dalam Buku Jurnal Umum dengan melakukan jurnal, “Beban” di Debit dan “RK PPKD sesuai jenisnya” di kredit, sebagai berikut :

|                    | Debit       | Kredit      |
|--------------------|-------------|-------------|
| <b>Beban _____</b> | <b>xxxx</b> |             |
| <b>Kas Daerah</b>  |             | <b>xxxx</b> |

Kemudian untuk mencatat realisasi anggaran berbasis kas dicatat dalam Buku Jurnal Pengeluaran kas dengan melakukan jurnal, “Beban ” di Debit dan “Estimasi Perubahan SAL sesuai jenisnya” di kredit, sebagai berikut :

|                        | Debit | Kredit |
|------------------------|-------|--------|
| Belanja_____           | xxxx  |        |
| Estimasi Perubahan SAL |       | xxxx   |

Catatan : Kode dan nama rekening/akun beban, belanja, dan transfer serta utang belanja (dalam contoh ditulis beban\_\_\_\_\_, belanja/transfer\_\_\_\_\_, dan utang belanja\_\_\_\_\_) disesuaikan dengan kode dan nama rekening/akun, sampai rincian obyek, sesuai dengan realisasi pendapatan yang diterima.

Berdasarkan uraian penjurnalan dan contoh transaksi tersebut diatas maka Tenaga Akuntansi di PPK–SKPKD yang mencatat transaksi Pemda melakukan pencatatan dalam buku sebagai berikut :

**Pertama,** penjurnalan untuk penerimaan perjanjian utang dengan pihak ketiga misalnya Bank atau berdasarkan tagihan bunga kreditur dari Kuasa BUD melalui PPK-SKPKD yang menyatakan beban bunga sebesar Rp 200.000.000,- pada tanggal 31 Maret 2022, dicatat di jurnal umum sebagai berikut :

|               |             |   | Debit       | Kredit      |
|---------------|-------------|---|-------------|-------------|
| 31 Maret 2022 | 9.1.3.01.03 | Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank | 200.000.000 |             |
|               | 2.1.2.04.01 | Utang Bunga kepada Bank                                 |             | 200.000.000 |

**Kedua,** penjurnalan untuk penerimaan SP2D LS dan Nota Debet dari Kuasa BUD melalui PPK-SKPKD yang menyatakan pelunasan tagihan bunga atas pengakuan utang beban bunga tanggal 31 Maret 2022, dicatat di jurnal umum sebagai berikut :

|              |             |                         | Debit       | Kredit      |
|--------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|
| 7 April 2022 | 2.1.2.04.01 | Utang Bunga kepada Bank | 200.000.000 |             |
|              | 1.1.1.01.01 | Kas Daerah              |             | 200.000.000 |

Tenaga Akuntansi di PPK–SKPKD juga mencatat transaksi realisasi anggaran belanja dan transfer dengan melakukan pencatatan dalam buku jurnal pengeluaran kas dengan jurnal sebagai berikut :



|              |             |   |                      |             |
|--------------|-------------|---|----------------------|-------------|
| 7 April 2022 | 5.1.2.01.03 | Belanja Bunga Utang<br>Pinjaman kepada Lembaga<br>Keuangan Bank | Debit<br>200.000.000 | Kredit      |
|              | 3.1.2.05.01 | Estimasi Perubahan<br>SAL                                       |                      | 200.000.000 |

**Ketiga,** penjurnalan untuk penerimaan Keputusan Kepala Daerah/Perjanjian/Dokumen yang dipersamakan tentang pemberian subsidi kepada entitas lain seperti BUMD dari Kuasa BUD melalui PPK-SKPKD yang menyatakan beban subsidi sebesar Rp 500.000.000,- pada tanggal 10 April 2022, dicatat di jurnal umum sebagai berikut :

|               |             |                                      |                      |             |
|---------------|-------------|--------------------------------------|----------------------|-------------|
| 10 April 2022 | 9.1.4.01.02 | Beban Subsidi kepada<br>BUMD         | Debit<br>500.000.000 | Kredit      |
|               | 2.1.5.04.02 | Utang Belanja Subsidi<br>kepada BUMD |                      | 500.000.000 |

**Keempat,** penjurnalan untuk penerimaan SP2D LS dan Nota Debet dari Kuasa BUD melalui PPK-SKPKD yang menyatakan pelunasan utang pemberian subsidi kepada entitas lain seperti BUMD atas Surat Keputusan Kepala Daerah/Perjanjian/Dokumen yang dipersamakan pada tanggal 10 April 2022, dicatat di jurnal umum sebagai berikut :

|               |             |                                      |                      |             |
|---------------|-------------|--------------------------------------|----------------------|-------------|
| 15 April 2022 | 2.1.5.04.02 | Utang Belanja Subsidi<br>kepada BUMD | Debit<br>500.000.000 | Kredit      |
|               | 1.1.1.01.01 | Kas Daerah                           |                      | 500.000.000 |

Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD juga mencatat transaksi realisasi anggaran belanja dan transfer dengan melakukan pencatatan dalam buku jurnal pengeluaran kas dengan jurnal sebagai berikut :

|               |             |                                      |                      |             |
|---------------|-------------|--------------------------------------|----------------------|-------------|
| 15 April 2022 | 5.1.3.01.01 | Belanja Subsidi kepada<br>Perusahaan | Debit<br>500.000.000 | Kredit      |
|               | 3.1.2.05.01 | Estimasi Perubahan<br>SAL            |                      | 500.000.000 |

**Kelima,** penjurnalan untuk penerimaan SK tentang nama-nama penerima hibah daerah dan telah menandatangani NPHD/Dokumen yang dipersamakan tentang pemberian hibah kepada kelompok masyarakat dari Kuasa BUD melalui PPK-SKPKD yang menyatakan beban hibah sebesar Rp 1.000.000.000,- pada tanggal 15 Juni 2022, dicatat di jurnal umum sebagai berikut :

|              |             |                         | Debit         | Kredit        |
|--------------|-------------|-------------------------|---------------|---------------|
| 15 Juni 2022 | 9.1.9.03.01 | Beban Lain-lain         | 1.000.000.000 |               |
|              | 2.1.5.06.01 | Utang Belanja Lain-lain |               | 1.000.000.000 |

**Keenam,** penjurnalan untuk penerimaan SP2D LS dan Nota Debet dari Kuasa BUD melalui PPK-SKPKD yang menyatakan pelunasan beban hibah atas SK tentang nama-nama penerima hibah daerah tanggal 15 juni 2022, dicatat di jurnal umum sebagai berikut :

|              |             |                         | Debit         | Kredit        |
|--------------|-------------|-------------------------|---------------|---------------|
| 17 Juli 2022 | 2.1.5.06.01 | Utang Belanja Lain-lain | 1.000.000.000 |               |
|              | 1.1.1.01.01 | Kas Daerah              |               | 1.000.000.000 |

Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD juga mencatat transaksi realisasi anggaran belanja dan transfer dengan melakukan pencatatan dalam buku jurnal pengeluaran kas dengan jurnal sebagai berikut :

|              |             |  | Debit         | Kredit        |
|--------------|-------------|--|---------------|---------------|
| 17 Juli 2022 | 5.1.4.06.01 | Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat/ Perorangan | 1.000.000.000 |               |
|              | 3.1.2.05.01 | Estimasi Perubahan SAL                               |               | 1.000.000.000 |

**Ketujuh,** penjurnalan untuk penerimaan Surat Keputusan kepala daerah tentang penerima bantuan sosial berupa uang serta menandatangani Surat Perjanjian pemberian bantuan sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan dengan penerima bantuan sosial dari Kuasa BUD melalui PPK-SKPKD yang menyatakan beban bantuan sosial sebesar Rp 300.000.000,- pada tanggal 20 Agustus 2022, dicatat di jurnal umum sebagai berikut :

|             |             |  | Debit       | Kredit      |
|-------------|-------------|--|-------------|-------------|
| 20 Agt 2022 | 9.1.6.01.01 | Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan         | 300.000.000 |             |
|             | 2.1.5.06.02 | Utang Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan |             | 300.000.000 |

**Kedelapan,** penjurnalan untuk penerimaan SP2D LS dan Nota Debet dari Kuasa BUD melalui PPK-SKPKD yang menyatakan pelunasan beban bantuan sosial atas Surat Keputusan kepala daerah dan Surat Perjanjian pemberian bantuan sosial tanggal 20 April 2022, dicatat di jurnal umum sebagai berikut :

|             |             |                              |                      |             |
|-------------|-------------|------------------------------|----------------------|-------------|
| 23 Agt 2022 | 2.1.5.06.02 | Utang Belanja Bantuan Sosial | Debit<br>300.000.000 | Kredit      |
|             | 1.1.1.01.01 | Kas Daerah                   |                      | 300.000.000 |

Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD juga mencatat transaksi realisasi anggaran belanja dan transfer dengan melakukan pencatatan dalam buku jurnal pengeluaran kas dengan jurnal sebagai berikut :

|             |             |  |                      |             |
|-------------|-------------|--|----------------------|-------------|
| 23 Agt 2022 | 5.1.5.01.01 | Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan | Debit<br>300.000.000 | Kredit      |
|             | 3.1.2.05.01 | Estimasi Perubahan SAL                           |                      | 300.000.000 |

**Kesembilan,** penjurnalan untuk penerimaan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Ke Desa dari Kuasa BUD melalui PPK-SKPKD yang menyatakan beban transfer bagi hasil pajak dan retribusi ke desa sebesar Rp 500.000.000,- pada tanggal 25 September 2022, dicatat di jurnal umum sebagai berikut :

|              |             |  |                      |             |
|--------------|-------------|--|----------------------|-------------|
| 25 Sept 2022 | 9.2.1.02.01 | Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah | Debit<br>500.000.000 | Kredit      |
|              | 2.1.5.05.01 | Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah |                      | 500.000.000 |

**Kesepuluh,** penjurnalan untuk penerimaan SP2D LS dan Nota Debet dari Kuasa BUD melalui PPK-SKPKD yang menyatakan pelunasan beban transfer bagi hasil pajak dan retribusi ke desa atas Surat Keputusan Kepala Daerah tanggal 25 September 2022, dicatat di jurnal umum sebagai berikut :

|              |             |  |                      |             |
|--------------|-------------|--|----------------------|-------------|
| 27 Sept 2022 | 2.1.5.05.01 | Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah | Debit<br>500.000.000 | Kredit      |
|              | 1.1.1.01.01 | Kas Daerah                             |                      | 500.000.000 |

Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD juga mencatat transaksi realisasi anggaran belanja dan transfer dengan melakukan pencatatan dalam buku jurnal pengeluaran kas dengan jurnal sebagai berikut :

|              |             |   |                     |            |
|--------------|-------------|---|---------------------|------------|
| 27 Sept 2022 | 5.1.6.03.01 | Belanja/Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa | Debit<br>50.000.000 | Kredit     |
|              | 3.1.2.05.01 | Estimasi Perubahan SAL  |                     | 50.000.000 |

**Kesebelas,** penjurnalan untuk penerimaan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang bantuan keuangan ke desa dari Kuasa BUD melalui PPK-SKPKD yang menyatakan beban transfer bantuan keuangan ke desa sebesar Rp 100.000.000,- pada tanggal 30 Oktober 2022, dicatat di jurnal umum sebagai berikut :

|             |             |   | Debit       | Kredit      |
|-------------|-------------|---|-------------|-------------|
| 30 Okt 2022 | 9.2.4.01.01 | Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa | 100.000.000 |             |
|             | 2.1.6.04.04 | Utang Transfer Bantuan Keuangan ke Desa |             | 100.000.000 |

**Keduabelas,** penjurnalan untuk penerimaan SP2D LS dan Nota Debet dari Kuasa BUD melalui PPK-SKPKD yang menyatakan pelunasan beban transfer bantuan keuangan ke desa atas Surat Keputusan Kepala Daerah tanggal 30 Oktober 2022, dicatat di jurnal umum sebagai berikut :

|            |             |   | Debit       | Kredit      |
|------------|-------------|---|-------------|-------------|
| 1 Nov 2022 | 2.1.6.04.04 | Utang Transfer Bantuan Keuangan ke Desa | 100.000.000 |             |
|            | 1.1.1.01.01 | Kas Daerah                              |             | 100.000.000 |

Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD juga mencatat transaksi realisasi anggaran belanja dan transfer dengan melakukan pencatatan dalam buku jurnal pengeluaran kas dengan jurnal sebagai berikut :

|            |             |  | Debit       | Kredit      |
|------------|-------------|--|-------------|-------------|
| 1 Nov 2022 | 5.1.7.04.03 | Belanja/Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Desa | 100.000.000 |             |
|            | 3.1.2.05.01 | Estimasi Perubahan SAL                               |             | 100.000.000 |

**Ketigabelas,** penjurnalan untuk penerimaan Dokumen Disposisi Kepala Daerah tentang Tanggal Darurat Bencana dari Kuasa BUD melalui PPK-SKPKD yang menyatakan beban lain-lain sebesar Rp 75.000.000,- pada tanggal 5 Desember 2022, dicatat di jurnal umum sebagai berikut :

|            |             |                         | Debit      | Kredit     |
|------------|-------------|-------------------------|------------|------------|
| 5 Des 2022 | 9.1.9.03.01 | Beban Lain-lain         | 75.000.000 |            |
|            | 2.1.5.06.01 | Utang Belanja Lain-lain |            | 75.000.000 |

**Keempatbelas**, penjurnalan untuk penerimaan SP2D LS dan Nota Debet dari Kuasa BUD melalui PPK-SKPKD yang menyatakan pelunasan beban lain-lain atas Dokumen Disposisi Kepala Daerah tentang Tanggal Darurat Bencana tanggal 5 Desember 2022, dicatat di jurnal umum sebagai berikut :

|            |             |                         |            |            |
|------------|-------------|-------------------------|------------|------------|
| 7 Des 2022 | 2.1.5.06.01 | Utang Belanja Lain-lain | Debit      | Kredit     |
|            | 1.1.1.01.01 | Kas Daerah              | 75.000.000 | 75.000.000 |

Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD juga mencatat transaksi realisasi anggaran belanja dan transfer dengan melakukan pencatatan dalam buku jurnal pengeluaran kas dengan jurnal sebagai berikut :

|            |             |                        |            |            |
|------------|-------------|------------------------|------------|------------|
| 7 Des 2022 | 5.1.8.01.01 | Belanja Tak Terduga    | Debit      | Kredit     |
|            | 3.1.2.05.01 | Estimasi Perubahan SAL | 75.000.000 | 75.000.000 |

**Bentuk dan Cara Pengisian Buku Jurnal**

Berdasarkan contoh jurnal tersebut diatas maka dilakukan pencatatan dalam buku jurnal umum untuk transaksi berbasis akrual yang nantinya digunakan untuk menyusun LO dan Neraca sebagai berikut :

**KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU JURNAL UMUM (JU)**

**SKPKD** : .....( SKPKD Kabupaten Kuningan)

Halaman 01

| Tanggal  | Nomor               |               | Kode Rekening |   |   |    |    | Uraian  | Ref. | Debit<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----------|---------------------|---------------|---------------|---|---|----|----|---|------|---------------|----------------|
|          | Bukti<br>Penerimaan | Bukti<br>Lain |               |   |   |    |    |   |      |               |                |
| 1        | 2                   |               | 3             |   |   |    |    | 4   | 5    | 6             | 7              |
|          |                     |               |               |   |   |    |    |   |      |               |                |
| 31/03/15 | -                   | -             | 9             | 1 | 3 | 01 | 03 | Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank | -    | 200.000.000   | -              |
|          | -                   | -             | 2             | 1 | 2 | 04 | 01 | Utang Bunga kepada Bank                                 | -    | -             | 200.000.000    |
|          |                     |               |               |   |   |    |    |   |      |               |                |
| 7/04/15  | -                   | -             | 2             | 1 | 2 | 04 | 01 | Utang Bunga kepada Bank                                 | -    | 200.000.000   | -              |
|          |                     |               | 1             | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas Daerah  | -    | -             | 200.000.000    |
|          |                     |               |               |   |   |    |    |   |      |               |                |
| 10/04/15 | -                   | -             | 9             | 1 | 4 | 01 | 02 | Beban Subsidi kepada BUMN                               |      | 500.000.000   | -              |
|          | -                   | -             | 2             | 1 | 5 | 04 | 02 | Utang Belanja Subsidi kepada BUMD                       |      | -             | 500.000.000    |

|          |   |   |   |   |   |    |    |  |  |               |               |  |
|----------|---|---|---|---|---|----|----|--|--|---------------|---------------|--|
|          |   |   |   |   |   |    |    |  |  |               |               |  |
| 15/04/15 | - | - | 2 | 1 | 5 | 04 | 02 | Utang Belanja Subsidi kepada BUMD                                    |  | 500.000.000   | -             |  |
|          | - | - | 1 | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas Daerah   |  | -             | 500.000.000   |  |
|          |   |   |   |   |   |    |    |  |  |               |               |  |
| 15/06/15 | - | - | 9 | 1 | 9 | 03 | 01 | Beban Lain-lain  |  | 1.000.000.000 | -             |  |
|          | - | - | 2 | 1 | 5 | 06 | 01 | Utang Belanja Lain-lain  |  | -             | 1.000.000.000 |  |
|          |   |   |   |   |   |    |    |  |  |               |               |  |
| 17/07/15 | - | - | 2 | 1 | 5 | 06 | 01 | Utang Belanja Lain-lain  |  | 1.000.000.000 | -             |  |
|          | - | - | 1 | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas Daerah   |  | -             | 1.000.000.000 |  |
|          |   |   |   |   |   |    |    |  |  |               |               |  |
| 20/08/15 | - | - | 9 | 1 | 6 | 01 | 01 | Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan         |  | 300.000.000   | -             |  |
|          | - | - | 2 | 1 | 5 | 06 | 01 | Utang Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan |  | -             | 300.000.000   |  |
|          |   |   |   |   |   |    |    |  |  |               |               |  |
| 23/08/15 | - | - | 2 | 1 | 5 | 06 | 01 | Utang Belanja Bantuan Sosial   |  | 300.000.000   | -             |  |
|          | - | - | 1 | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas Daerah   |  |               | 300.000.000   |  |
|          |   |   |   |   |   |    |    |  |  |               |               |  |
| 25/09/15 | - | - | 9 | 2 | 1 | 02 | 01 | Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah ke Pemerintah Desa            |  | 500.000.000   | -             |  |
|          | - | - | 2 | 1 | 5 | 05 | 01 | Utang Transfer Bagi Hasil Pajak                                      |  | -             | 500.000.000   |  |
|          |   |   |   |   |   |    |    |  |  |               |               |  |
| 27/09/15 | - | - | 2 | 1 | 5 | 05 | 01 | Utang Bagi Hasil Pajak   |  | 50.000.000    | -             |  |
|          | - | - | 1 | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas Daerah   |  | -             | 50.000.000    |  |
|          |   |   |   |   |   |    |    |  |  |               |               |  |
| 30/10/15 | - | - | 9 | 2 | 4 | 01 | 01 | Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa                              |  | 100.000.000   | -             |  |
|          | - | - | 2 | 1 | 6 | 04 | 04 | Utang Transfer Bantuan Keuangan ke Desa                              |  | -             | 100.000.000   |  |
|          |   |   |   |   |   |    |    |  |  |               |               |  |
| 1/11/15  | - | - | 2 | 1 | 6 | 04 | 04 | Utang Transfer Bantuan Keuangan ke Desa                              |  | 100.000.000   | -             |  |
|          | - | - | 1 | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas Daerah   |  | -             | 100.000.000   |  |
|          |   |   |   |   |   |    |    |  |  |               |               |  |
| 5/12/15  | - | - | 9 | 1 | 9 | 03 | 01 | Beban Lain-lain  |  | 75.000.000    | -             |  |
|          | - | - | 2 | 1 | 5 | 06 | 01 | Utang Belanja Lain-lain  |  | -             | 75.000.000    |  |
|          |   |   |   |   |   |    |    |  |  |               |               |  |
| 7/12/15  | - | - | 2 | 1 | 5 | 06 | 01 | Utang Belanja Lain-lain  |  | 75.000.000    | -             |  |
|          | - | - | 1 | 1 | 3 | 07 | 02 | Kas di Kas Daerah  |  | -             | 75.000.000    |  |
|          |   |   |   |   |   |    |    |  |  |               |               |  |
| Jumlah   |   |   |   |   |   |    |    |  |  | 4.900.000.000 | 4.900.000.000 |  |

PPK–SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Selain mencatat di buku jurnal umum dilakukan juga pencatatan dalam buku jurnal pengeluaran kas untuk transaksi berbasis kas yang nantinya digunakan untuk menyusun LRA dan LAK sebagai berikut :

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU JURNAL PENGELUARAN KAS (JK)

SKPKD : .....( SKPKD Kabupaten Kuningan)

Halaman 01

| Tanggal  | Nomor                    |               | Kode Rekening |   |   |    |    | Uraian  | Ref. | Debit<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----------|--------------------------|---------------|---------------|---|---|----|----|---|------|---------------|----------------|
|          | Bukti<br>Pengelua<br>ran | Bukti<br>Lain |               |   |   |    |    |   |      |               |                |
| 1        | 2                        |               | 3             |   |   |    |    | 4   | 5    | 6             | 7              |
|          |                          |               |               |   |   |    |    |   |      |               |                |
| 7/04/15  | -                        | -             | 5             | 1 | 2 | 01 | 03 | Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank         | -    | 200.000.000   | -              |
|          |                          |               | 3             | 1 | 2 | 05 | 01 | Estimasi Perubahan SAL  | -    | -             | 200.000.000    |
|          |                          |               |               |   |   |    |    |   |      |               |                |
| 15/04/15 |                          |               | 5             | 1 | 3 | 01 | 01 | Belanja Subsidi kepada Perusahaan                                 |      | 500.000.000   | -              |
|          |                          |               | 3             | 1 | 2 | 05 | 01 | Estimasi Perubahan SAL  |      | -             | 500.000.000    |
|          |                          |               |               |   |   |    |    |   |      |               |                |
| 17/07/15 |                          |               | 5             | 1 | 4 | 06 | 01 | Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat/ Perorangan              |      | 1.000.000.000 | -              |
|          |                          |               | 3             | 1 | 2 | 05 | 01 | Estimasi Perubahan SAL  |      | -             | 1.000.000.000  |
|          |                          |               |               |   |   |    |    |   |      |               |                |
| 23/08/15 |                          |               | 5             | 1 | 5 | 01 | 01 | Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan                  |      | 300.000.000   | -              |
|          |                          |               | 3             | 1 | 2 | 05 | 01 | Estimasi Perubahan SAL  |      | -             | 300.000.000    |
|          |                          |               |               |   |   |    |    |   |      |               |                |
| 27/09/15 |                          |               | 5             | 1 | 6 | 03 | 01 | Belanja/Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa |      | 50.000.000    | -              |
|          |                          |               | 3             | 1 | 2 | 05 | 01 | Estimasi Perubahan SAL  |      | -             | 50.0000.000    |
|          |                          |               |               |   |   |    |    |   |      |               |                |
| 1/11/15  |                          |               | 5             | 1 | 7 | 04 | 03 | Belanja/Transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa          |      | 100.000.000   | -              |
|          |                          |               | 3             | 1 | 2 | 05 | 01 | Estimasi Perubahan SAL  |      | -             | 100.000.000    |
|          |                          |               |               |   |   |    |    |   |      |               |                |
| 7/12/15  |                          |               | 5             | 1 | 8 | 01 | 01 | Belanja Tak Terduga   |      | 75.000.000    | -              |
|          |                          |               | 3             | 1 | 2 | 05 | 01 | Estimasi Perubahan SAL  |      | -             | 75.000.000     |
|          |                          |               |               |   |   |    |    |   |      |               |                |
| Jumlah   |                          |               |               |   |   |    |    |   |      | 2.225.000.000 | 2.225.000.000  |

PPK-SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

**Langkah III : Melakukan Posting ke Buku Besar**

Setelah melakukan penjurnalan seluruh transaksi, maka PPK–SKPKD melakukan posting atas pencatatan jurnal tersebut ke buku besar. Posting ini berguna agar seluruh transaksi yang sama-sama mempengaruhi suatu kode rekening/akun dapat dikelompokkan dalam satu buku besar untuk kode rekening/akun yang bersangkutan. Periode posting harus semakin diusahakan dapat dilakukan dalam waktu yang semakin singkat misalkan untuk periode mingguan atau bahkan harian.

Contoh buku besar SKPKD–PPKD : Kas di Kas Daerah sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

**KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR**

**SKPKD** : BPKAD Kabupaten Kuningan  
**Kode Rekening** : 1.1.1.01.01  
**Nama Rekening** : Kas di Kas Daerah  
**Pagu APBD** :  
**Pagu perubahan APBD** : **Halaman 01**

| No | Bukti |            | Ref | Uraian                                  | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp)       |
|----|-------|------------|-----|---|---------------|----------------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |   |               |                      |
| 1  |       | 7/04/2022  | JU  | Utang Bunga kepada Bank                 | -             | 200.000.000          |
| 3  |       | 15/04/2022 | JU  | Utang Belanja Subsidi kepada BUMD       | -             | 500.000.000          |
| 4  |       | 17/07/2022 | JU  | Utang Belanja Lain-lain                 | -             | 1.000.000.000        |
| 5  |       | 23/08/2022 | JU  | Utang Belanja Bantuan Sosial            | -             | 300.000.000          |
| 6  |       | 27/09/2022 | JU  | Utang Transfer Bagi Hasil Pajak         | -             | 500.000.000          |
| 7  |       | 1/11/2022  | JU  | Utang Transfer Bantuan Keuangan ke Desa | -             | 100.000.000          |
| 8  |       | 7/12/2022  | JU  | Utang Belanja Lain-lain                 | -             | 75.000.000           |
|    |       |            |     |   |               |                      |
|    |       |            |     | <b>Jumlah</b>                           | -             | <b>2.675.000.000</b> |
|    |       |            |     | <b>Saldo</b>                            | -             | <b>2.675.000.000</b> |

PPK–SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....



Contoh buku besar SKPKD–PPKD : Utang Bunga kepada Bank sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPKD : BPKAD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 2.1.2.04.01  
Nama Rekening : Utang Bunga kepada Bank  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD :

Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian   | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|--|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |  |               |                |
| 1  |       | 31/04/2022 | JU  | Beban Bunga Utang Pinjaman<br>kepada Lembaga Keuangan Bank | -             | 200.000.000    |
| 2  |       | 7/04/2022  | JU  | Kas Daerah   | 200.000.000   | -              |
|    |       |            |     |  |               |                |
|    |       |            |     | Jumlah   | 200.000.000   | 200.000.000    |
|    |       |            |     | Saldo  | -             | -              |

PPK–SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–PPKD : Utang Belanja Subsidi kepada BUMD sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPKD : BPKAD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 2.1.5.04.02  
Nama Rekening : Utang Belanja Subsidi kepada BUMD  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD :

Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian                    | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|---------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |                           |               |                |
| 1  |       | 10/04/2022 | JU  | Beban Subsidi kepada BUMD | -             | 500.000.000    |
| 2  |       | 15/04/2022 | JU  | Kas Daerah                | 500.000.000   | -              |
|    |       |            |     |                           |               |                |
|    |       |            |     | Jumlah                    | 500.000.000   | 500.000.000    |
|    |       |            |     | Saldo                     | -             | -              |

PPK–SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–PPKD : Utang Transfer Bagi Hasil Pajak sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPKD : BPKAD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 2.1.5.05.01  
Nama Rekening : Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD :

Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian                                 | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|--|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |  |               |                |
| 1  |       | 25/09/2022 | JU  | Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah | -             | 500.000.000    |
| 2  |       | 27/09/2022 | JU  | Kas Daerah                             | 500.000.000   | -              |
|    |       |            |     |  |               |                |
|    |       |            |     | Jumlah                                 | 500.000.000   | 500.000.000    |
|    |       |            |     | Saldo                                  | -             | -              |

PPK– SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD-PPKD : Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah :

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPKD : BPKAD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 2.1.5.06.01  
Nama Rekening : Utang Belanja Lain-lain  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD :

Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian          | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|-----------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |                 |               |                |
| 1  |       | 15/06/2022 | JU  | Beban Lain-lain | -             | 1.000.000.000  |
| 2  |       | 17/07/2022 | JU  | Kas Daerah      | 1.000.000.000 | -              |
| 3  |       | 5/12/2013  | JU  | Beban Lain-lain | -             | 75.000.000     |
| 4  |       | 7/12/2022  | JU  | Kas Daerah      | 75.000.000    | -              |
|    |       |            |     |                 |               |                |
|    |       |            |     | Jumlah          | 1.075.000.000 | 1.075.000.000  |
|    |       |            |     | Saldo           | -             | -              |

PPK–SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–PPKD : Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah :

**KABUPATEN KUNINGAN**  
**BUKU BESAR**

**SKPKD** : BPKAD Kabupaten Kuningan  
**Kode Rekening** : 2.1.5.06.02  
**Nama Rekening** : Utang Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan  
**Pagu APBD** :  
**Pagu perubahan APBD** : **Halaman 01**

| No | Bukti |            | Ref | Uraian   | Debet<br>(Rp)      | Kredit<br>(Rp)     |
|----|-------|------------|-----|--|--------------------|--------------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |  |                    |                    |
| 1  |       | 20/08/2022 | JU  | Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan | -                  | 300.000.000        |
| 2  |       | 23/08/2022 | JU  | Kas Daerah   | 300.000.000        | -                  |
|    |       |            |     |  |                    |                    |
|    |       |            |     | <b>Jumlah</b>  | <b>300.000.000</b> | <b>300.000.000</b> |
|    |       |            |     | <b>Saldo</b>   | -                  | -                  |

PPK–SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–PPKD : Utang Transfer Bantuan Keuangan ke Desa sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah :

**KABUPATEN KUNINGAN**  
**BUKU BESAR**

**SKPKD** : BPKAD Kabupaten Kuningan  
**Kode Rekening** : 2.1.6.04.04  
**Nama Rekening** : Utang Transfer Bantuan Keuangan ke Desa  
**Pagu APBD** :  
**Pagu perubahan APBD** : **Halaman 01**

| No | Bukti |            | Ref | Uraian                                  | Debet<br>(Rp)      | Kredit<br>(Rp)     |
|----|-------|------------|-----|---|--------------------|--------------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |   |                    |                    |
| 1  |       | 30/10/2022 | JU  | Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa | -                  | 100.000.000        |
| 2  |       | 1/11/2022  | JU  | Kas Daerah                              | 100.000.000        |                    |
|    |       |            |     |   |                    |                    |
|    |       |            |     | <b>Jumlah</b>                           | <b>100.000.000</b> | <b>100.000.000</b> |
|    |       |            |     | <b>Saldo</b>                            | -                  | -                  |

PPK–SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–PPKD : Estimasi Perubahan SAL sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPKD : BPKAD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 3.1.2.05.01  
Nama Rekening : Estimasi Perubahan SAL  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian   | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|--|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |  |               |                |
| 1  |       | 07/04/2022 | JK  | Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank      | -             | 200.000.000    |
| 2  |       | 15/04/2022 | JK  | Belanja Subsidi kepada BUMD                                    | -             | 500.000.000    |
| 3  |       | 17/07/2022 | JK  | Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat                       | -             | 1.000.000.000  |
| 4  |       | 23/08/2022 | JK  | Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan | -             | 300.000.000    |
| 5  |       | 27/09/2022 | JK  | Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa      | -             | 50.000.000     |
| 6  |       | 1/11/2022  | JK  | Transfer Bantuan Keuangan ke Desa                              | -             | 100.000.000    |
| 7  |       | 7/12/2022  | JK  | Belanja Tak Terduga  | -             | 75.000.000     |
|    |       |            |     | Jumlah   | -             | 2.225.000.000  |
|    |       |            |     | Saldo  | -             | 2.225.000.000  |

PPK–SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–PPKD : Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah :

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPKD : BPKAD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 5.1.2.01.03  
Nama Rekening : Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian                 | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |                        |               |                |
| 1  |       | 07/04/2022 | JK  | Estimasi Perubahan SAL | 200.000.000   | -              |
|    |       |            |     | Jumlah                 | 200.000.000   | -              |
|    |       |            |     | Saldo                  | 200.000.000   | -              |

PPK–SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–PPKD : Belanja Subsidi kepada BUMD sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPKD : BPKAD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 5.1.3.01.01  
Nama Rekening : Belanja Subsidi kepada Perusahaan  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian                 | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |                        |               |                |
| 1  |       | 15/04/2022 | JK  | Estimasi Perubahan SAL | 500.000.000   | -              |
|    |       |            |     |                        |               |                |
|    |       |            |     | Jumlah                 | 500.000.000   | -              |
|    |       |            |     | Saldo                  | 500.000.000   | -              |

PPK–SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–PPKD : Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah :

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPKD : BPKAD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 5.1.4.06.01  
Nama Rekening : Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian                 | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |                        |               |                |
| 1  |       | 17/07/2022 | JK  | Estimasi Perubahan SAL | 1.000.000.000 | -              |
|    |       |            |     |                        |               |                |
|    |       |            |     | Jumlah                 | 1.000.000.000 | -              |
|    |       |            |     | Saldo                  | 1.000.000.000 | -              |

PPK–SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–PPKD : Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah :

**KABUPATEN KUNINGAN**  
**BUKU BESAR**

**SKPKD** : BPKAD Kabupaten Kuningan  
**Kode Rekening** : 5.1.5.01.01  
**Nama Rekening** : Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan  
**Pagu APBD** :  
**Pagu perubahan APBD** :

Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian                 | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |                        |               |                |
| 1  |       | 23/08/2022 | JK  | Estimasi Perubahan SAL | 300.000.000   | -              |
|    |       |            |     |                        |               |                |
|    |       |            |     | Jumlah                 | 300.000.000   | -              |
|    |       |            |     | Saldo                  | 300.000.000   | -              |

PPK–SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–PPKD : Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah :

**KABUPATEN KUNINGAN**  
**BUKU BESAR**

**SKPKD** : BPKAD Kabupaten Kuningan  
**Kode Rekening** : 5.1.6.03.01  
**Nama Rekening** : Belanja/Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa  
**Pagu APBD** :  
**Pagu perubahan APBD** :

Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian                 | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |                        |               |                |
| 1  |       | 27/09/2022 | JK  | Estimasi Perubahan SAL | 50.000.000    | -              |
|    |       |            |     |                        |               |                |
|    |       |            |     | Jumlah                 | 50.000.000    | -              |
|    |       |            |     | Saldo                  | 50.000.000    | -              |

PPK–SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–PPKD : Transfer Bantuan Keuangan ke Desa sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPKD : BPKAD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 5.1.7.04.03  
Nama Rekening : Belanja/Transfer Bantuan Keuangan ke Desa  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian                 | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |                        |               |                |
| 1  |       | 01/11/2022 | JK  | Estimasi Perubahan SAL | 100.000.000   | -              |
|    |       |            |     |                        |               |                |
|    |       |            |     | Jumlah                 | 100.000.000   | -              |
|    |       |            |     | Saldo                  | 100.000.000   | -              |

PPK–SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–PPKD : Belanja Tak Terduga sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPKD : BPKAD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 5.1.8.01.01  
Nama Rekening : Belanja Tak Terduga  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian                 | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |                        |               |                |
| 1  |       | 07/12/2022 | JK  | Estimasi Perubahan SAL | 75.000.000    | -              |
|    |       |            |     |                        |               |                |
|    |       |            |     | Jumlah                 | 75.000.000    | -              |
|    |       |            |     | Saldo                  | 75.000.000    | -              |

PPK–SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–PPKD : Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah :

**KABUPATEN KUNINGAN**  
**BUKU BESAR**

**SKPKD** : BPKAD Kabupaten Kuningan  
**Kode Rekening** : 9.1.3.01.03  
**Nama Rekening** : Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank  
**Pagu APBD** :  
**Pagu perubahan APBD** :

Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian                  | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|-------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |                         |               |                |
| 1  |       | 31/04/2022 | JU  | Utang Bunga kepada Bank | 200.000.000   | -              |
|    |       |            |     |                         |               |                |
|    |       |            |     | Jumlah                  | 200.000.000   | -              |
|    |       |            |     | Saldo                   | 200.000.000   | -              |

PPK–SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–PPKD : Beban Subsidi kepada BUMD sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

**KABUPATEN KUNINGAN**  
**BUKU BESAR**

**SKPKD** : BPKAD Kabupaten Kuningan  
**Kode Rekening** : 9.1.4.01.02  
**Nama Rekening** : Beban Subsidi kepada BUMD  
**Pagu APBD** :  
**Pagu perubahan APBD** :

Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian                            | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|-----------------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |                                   |               |                |
| 1  |       | 10/04/2022 | JU  | Utang Belanja Subsidi kepada BUMD | 500.000.000   | -              |
|    |       |            |     |                                   |               |                |
|    |       |            |     | Jumlah                            | 500.000.000   | -              |
|    |       |            |     | Saldo                             | 500.000.000   | -              |

PPK–SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....



Contoh buku besar SKPKD–PPKD : Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPKD : BPKAD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 9.1.6.01.01  
Nama Rekening : Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian   | Debet (Rp)  | Kredit (Rp) |
|----|-------|------------|-----|--|-------------|-------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |  |             |             |
| 1  |       | 20/08/2022 | JU  | Utang Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan | 300.000.000 | -           |
|    |       |            |     |  |             |             |
|    |       |            |     | Jumlah   | 300.000.000 | -           |
|    |       |            |     | Saldo  | 300.000.000 | -           |

PPK–SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–PPKD : Beban Lain-lain sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPKD : BPKAD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 9.1.9.03.01  
Nama Rekening : Beban Lain-lain  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian                  | Debet (Rp)    | Kredit (Rp) |
|----|-------|------------|-----|-------------------------|---------------|-------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |                         |               |             |
| 1  |       | 15/06/2022 | JU  | Utang Belanja Lain-lain | 1.000.000.000 | -           |
| 2  |       | 5/12/2022  | JU  | Utang Belanja Lain-lain | 75.000.000    | -           |
|    |       |            |     |                         |               |             |
|    |       |            |     | Jumlah                  | 1.075.000.000 | -           |
|    |       |            |     | Saldo                   | 1.075.000.000 | -           |

PPK–SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–PPKD : Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah ke Pemerintah Desa sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPKD : BPKAD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 9.2.1.02.01  
Nama Rekening : Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah ke Pemerintah Desa  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian                          | Debet (Rp)  | Kredit (Rp) |
|----|-------|------------|-----|---------------------------------|-------------|-------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |                                 |             |             |
| 1  |       | 25/09/2022 | JU  | Utang Transfer Bagi Hasil Pajak | 500.000.000 | -           |
|    |       |            |     |                                 |             |             |
|    |       |            |     | Jumlah                          | 500.000.000 | -           |
|    |       |            |     | Saldo                           | 500.000.000 | -           |

PPK–SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–Pemda : Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPKD : BPKAD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 9.2.4.01.01  
Nama Rekening : Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian                                  | Debet (Rp)  | Kredit (Rp) |
|----|-------|------------|-----|---|-------------|-------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |   |             |             |
| 1  |       | 30/10/2022 | JU  | Utang Transfer Bantuan Keuangan ke Desa | 100.000.000 | -           |
|    |       |            |     |   |             |             |
|    |       |            |     | Jumlah                                  | 100.000.000 | -           |
|    |       |            |     | Saldo                                   | 100.000.000 | -           |

PPK– SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

**Langkah IV : Menyusun Neraca Saldo dan Laporan Keuangan**

Setelah melakukan posting seluruh pencatatan dalam buku besar maka kemudian Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD membuat neraca saldo sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Penyusunan neraca saldo oleh Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD dilakukan secara triwulanan. Neraca saldo disusun dengan cara memindahkan saldo-saldo yang ada di tiap buku besar ke dalam Neraca Saldo. Contoh Neraca Saldo dari hasil pencatatan dan posting contoh transaksi keuangan diatas adalah sebagai berikut :

**KABUPATEN KUNINGAN  
NERACA SALDO  
PER TANGGAL 31 Desember 2022**

| SKPKD         |   |   |    |    | : BPKAD   |               |               |
|---------------|---|---|----|----|---|---------------|---------------|
| Kode Rekening |   |   |    |    | Uraian  | Jumlah        |               |
|               |   |   |    |    |   | Debit         | Kredit        |
| 1             |   |   |    |    | 2   | 3             | 4             |
| 1             | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas di Kas Daerah   | -             | 2.675.000.000 |
| 3             | 1 | 2 | 05 | 01 | Estimasi Perubahan SAL  | -             | 2.225.000.000 |
| 5             | 1 | 2 | 01 | 03 | Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank         | 200.000.000   | -             |
| 5             | 1 | 3 | 01 | 01 | Belanja Subsidi kepada Perusahaan                                 | 500.000.000   | -             |
| 5             | 1 | 4 | 06 | 01 | Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan               | 1.000.000.000 | -             |
| 5             | 1 | 5 | 01 | 01 | Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan                  | 300.000.000   | -             |
| 5             | 1 | 6 | 03 | 01 | Belanja/Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa | 50.000.000    | -             |
| 5             | 1 | 7 | 04 | 03 | Belanja/Transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa          | 100.000.000   | -             |
| 5             | 1 | 8 | 01 | 01 | Belanja Tak Terduga   | 75.000.000    | -             |
| 9             | 1 | 3 | 01 | 03 | Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank           | 200.000.000   | -             |
| 9             | 1 | 4 | 01 | 02 | Beban Belanja Subsidi kepada BUMD                                 | 500.000.000   | -             |
| 9             | 1 | 6 | 01 | 01 | Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan      | 300.000.000   | -             |
| 9             | 1 | 9 | 03 | 01 | Beban Lain-lain   | 1.075.000.000 | -             |
| 9             | 2 | 1 | 02 | 01 | Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah ke Pemerintah Desa         | 500.000.000   | -             |
| 9             | 2 | 4 | 01 | 01 | Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa                           | 100.000.000   | -             |
|               |   |   |    |    |   |               |               |
| Jumlah        |   |   |    |    |   | 4.900.000.000 | 4.900.000.000 |

PPK-SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

## **SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI ASET DI SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (SKPKD-PPKD) YANG MENCATAT TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH**

Bagian ini menjelaskan Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset di Pemerintah Kabupaten Kuningan untuk Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mencatat transaksi aset pemerintah daerah.

### **KEBIJAKAN UMUM**

Prosedur akuntansi aset pada SKPKD-PPKD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan aset dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD khususnya yang tertuang dalam anggaran pembiayaan pada DPA-PPKD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Ruang lingkup Aset SKPKD-PPKD yang dimaksud disini adalah aset yang terkait dengan investasi jangka pendek dan pembiayaan yaitu Dana Cadangan, Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah, Pemberian Pinjaman, dan Investasi Non Permanen.

Sistem dan prosedur akuntansi aset oleh SKPKD-PPKD merupakan salah satu sarana untuk menunjang pertanggungjawaban APBD. Sistem dan prosedur akuntansi ini disusun berdasarkan kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

### **PIHAK-PIHAK TERKAIT**

Berbagai pihak/fungsi yang terkait dalam proses akuntansi aset pada SKPKD-PPKD beserta tugas-tugasnya adalah :

1. Pemerintah Lainnya

Pemerintah Lainnya adalah entitas pemerintah selain Pemerintah Kabupaten Kuningan yang menjadi obyek pembiayaan Pemerintah Kabupaten Kuningan seperti pemberian pinjaman kepada pemerintah lain tersebut termasuk pengembaliannya. Semua obyek pembiayaan tersebut merupakan aset Pemerintah Kabupaten Kuningan. Pihak ini adalah pemberi dokumen kepada Kuasa BUD.

2. Pihak Lain

Pihak yang menjadi obyek pembiayaan Pemerintah Kabupaten Kuningan misalnya Bank tempat menyimpan Dana Cadangan, Perusahaan Daerah yang diberi modalnya oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan, Pihak ketiga yang diberikan pinjaman atau diberikan modal investasi non permanen lainnya. Semua obyek pembiayaan tersebut merupakan aset Pemerintah Kabupaten Kuningan. Pihak ini adalah pemberi dokumen kepada Kuasa BUD.

3. Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD)

Dalam pelaksanaan prosedur ini, Kuasa BUD memiliki tugas menyiapkan dokumen-dokumen atas transaksi dengan pemerintah lain dan atau pihak lain yang terkait dengan proses pelaksanaan akuntansi aset SKPKD. Nota Debet beserta dokumen perolehan aset atau hanya dokumen perolehan aset saja dan Nota Kredit beserta kopi/rangkap dokumen atau hanya kopi/rangkap dokumen perolehan aset saja yang terkait pelepasan aset akan diserahkan kepada PPKD-SKPKD.

4. Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD

Dalam pelaksanaan prosedur ini, Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD bekerja mencatat transaksi terkait aset SKPKD-PPKD, memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Menerima bukti-bukti transaksi terkait aset SKPKD-PPKD dari Kuasa BUD dan menganalisa data dan informasi akuntansi dari bukti transaksi tersebut;
- b. Mencatat transaksi-transaksi pemerintah daerah berdasarkan

bukti-bukti yang terkait aset SKPKD-PPKD yang merupakan transaksi DPA-PPKD ke buku jurnal;

- c. Memposting jurnal-jurnal terkait aset SKPKD-PPKD transaksi-transaksi pemerintah daerah ke dalam buku besarnya masing-masing;
  - d. Menyusun neraca saldo untuk persiapan penyusunan laporan keuangan, yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan; dan
  - e. Menyerahkan buku jurnal, buku besar dan neraca saldo kepada PPK-SKPKD untuk diperiksa dan ditandatangani.
5. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPKD) : Sekretaris Badan atau Koordinator/ Kepala Sub Bagian Keuangan BPKAD.

Dalam pelaksanaan prosedur ini, PPK-SKPKD memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Bertanggungjawab atas sistem akuntansi SKPKD-PPKD terkait transaksi aset SKPKD-PPKD yang dipimpinnya;
  - b. Memeriksa dan menandatangani hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Tenaga Akuntansi PPK-SKPKD setiap bulannya seperti Buku Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo SKPKD-PPKD yang mencatat transaksi pemerintah daerah setiap triwulan; dan
  - c. Menyerahkan Buku Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo SKPKD-PPKD yang mencatat transaksi pemerintah daerah setiap triwulan kepada PPKD selaku pengguna anggaran untuk disetujui.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (tidak termasuk Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan).

Dalam pelaksanaan prosedur ini, PPKD memiliki tugas sebagai pengguna anggaran yang menyetujui Buku Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo yang diserahkan PPK-SKPKD setiap triwulan.

## **DOKUMEN YANG DIGUNAKAN**

1. Bukti Setoran Bank merupakan formulir bukti melakukan setoran ke Rekening Umum Kas Daerah;
2. Bukti transfer merupakan slip bukti melakukan transfer dari suatu rekening ke rekening lainnya;
3. Nota Kredit merupakan bukti transaksi penerimaan uang di rekening kas umum daerah;
4. Nota Debit merupakan bukti transaksi pengeluaran uang di rekening kas umum daerah.
5. Surat Tanda Setoran selanjutnya disebut STS adalah bukti yang dibuat untuk melakukan penyetoran uang ke Kas Daerah.
6. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang selanjutnya disebut (SP2D) adalah Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan Kuasa Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM;
7. Bukti pengakuan Investasi PPKD seperti :
  - a. Sertifikat Saham untuk pengakuan investasi saham;
  - b. Sertifikat Deposito untuk pengakuan investasi dalam Deposito;
  - c. Sertifikat Obligasi/SUN untuk pengakuan investasi dalam Sertifikat Obligasi/SUN;
  - d. Sertifikat SBI untuk pengakuan investasi dalam Sertifikat SBI;
  - e. BAST (jika berupa aset) yang didukung oleh Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD serta Surat Keputusan Kepala Daerah untuk pengakuan : Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara/Daerah/Swasta; Investasi dalam Obligasi/Proyek Pembangunan; Dana Bergulir; dan Investasi Non Permanen Lainnya.

8. Bukti pengakuan Aset Lainnya PPKD seperti :
- a. Surat Keputusan Kepala Daerah, Kontrak/Perjanjian Penjualan termasuk secara Angsuran/Berita Acara Penjualan untuk pengakuan Tagihan Penjualan Angsuran: Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Kepada Kepala Daerah dan Penjualan Rumah Golongan III;
  - b. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak selanjutnya disebut SKTJM adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas kerugian negara yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian negara dimaksud;
  - c. Surat Keputusan Pembebanan Sementara adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh bupati tentang pembebanan penggantian sementara atas kerugian negara sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan;
  - d. Surat Keputusan Pembebanan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian kerugian negara terhadap bendahara
  - e. Kontrak/Perjanjian – Sewa untuk pengakuan Sewa;
  - f. Kontrak/Perjanjian Kerjasama – Pemanfaatan untuk pengakuan Kerjasama Pemanfaatan;
  - g. Kontrak/Perjanjian Kerjasama – BOT/BTO untuk pengakuan Bangun Guna Serah (BOT)/ Bangun Serah Guna (BTO); dan
  - h. Peraturan Kepala Daerah terkait *Restricted Cash*.
9. Surat Perintah BUD yang dilampiri Surat Keputusan Bupati tentang investasi jangka pendek yang dipilih adalah surat yang diterbitkan BUD untuk mengeluarkan kas atau menarik kas untuk Investasi Jangka Pendek, Dana Cadangan dan PFK.
10. Bukti Memorial adalah bukti transaksi yang digunakan untuk mencatat transaksi non keuangan.



## **BUKU DAN ATAU FORMULIR YANG DIGUNAKAN**

Buku dan atau Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan prosedur akuntansi aset di SKPKD ini paling tidak terdiri dari :

1. Buku Jurnal Umum (JU)

Merupakan buku jurnal yang digunakan untuk melakukan pencatatan akuntansi atas transaksi non kas pada basis kas dan transaksi basis akrual terkait penyusunan LO dan Neraca.

2. Buku Jurnal Penerimaan Kas (JM)

Merupakan buku jurnal yang digunakan untuk melakukan pencatatan akuntansi atas transaksi penerimaan kas yang berasal dari transaksi penerimaan pembiayaan yang terkait pelepasan aset SKPKD-PPKD. Pada umumnya buku jurnal penerimaan kas digunakan untuk mencatat transaksi basis kas terkait penyusunan LRA dan LAK.

3. Buku Jurnal Pengeluaran Kas (JK)

Merupakan buku jurnal yang digunakan untuk melakukan pencatatan akuntansi atas transaksi pengeluaran kas untuk transaksi pengeluaran pembiayaan yang terkait perolehan aset SKPKD-PPKD. Pada umumnya buku jurnal pengeluaran kas digunakan untuk mencatat transaksi basis kas terkait penyusunan LRA dan LAK.

4. Buku Besar (BB)

Merupakan buku yang digunakan untuk menampung pencatatan hasil posting transaksi dari buku jurnal. Buku besar ini merupakan pencatatan akuntansi atas seluruh transaksi untuk suatu rekening/akun per jenis atau obyek. Jadi setiap rekening/akun per jenis atau objek mempunyai buku besar tersendiri.

5. Buku Besar Pembantu (BP)

Buku besar dapat dilengkapi dengan buku besar pembantu sebagai alat uji silang dan kelengkapan informasi rekening/akun tertentu. Buku besar pembantu berisi rincian akun (rincian obyek)

yang telah dicatat dalam buku besar. Jika dirasakan informasi dalam buku besar sudah mencukupi maka buku besar pembantu tidak perlu dibuat lagi.

6. Neraca Saldo (NS)

Merupakan formulir yang mencatat nilai saldo setiap rekening/akun per rincian objek sehingga diketahui jumlah total dari seluruh rekening/akun.

### **KERANGKA SISTEM**

Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD menerima bukti-bukti transaksi dari Kuasa BUD melalui PPK-SKPKD. Bukti-bukti transaksi kewajiban SKPKD-PPKD dapat berupa Bukti Setoran Bank, Bukti transfer, Nota Kredit, Nota Debet, STS, SP2D-LS, Bukti pengakuan Investasi PPKD, Bukti pengakuan Aset Lainnya PPKD, SK KDH, Surat Perintah BUD, dan Bukti Memorial. Pada saat bukti transaksi kewajiban SKPKD-PPKD tersebut telah diterima maka Tenaga Akuntansi PPK-SKPKD kemudian melakukan pencatatan akuntansi dalam :

1. Buku jurnal umum, untuk mencatat pengakuan aset baik yang sudah diakui (*accrual*) atau ditangguhkan (*deferral*) maupun yang sudah direalisasikan (*realized*) baik saat perolehan maupun pelepasan aset terkait penyusunan LO dan Neraca.
2. Buku jurnal penerimaan kas, untuk mencatat penerimaan kas dari realisasi anggaran penerimaan pembiayaan terkait penyusunan LRA dan LAK.
3. Buku jurnal pengeluaran kas, untuk mencatat pengeluaran kas dari realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan terkait penyusunan LRA dan LAK.

Pencatatan transaksi atas kewajiban SKPKD-PPKD dilakukan pada saat terjadinya transaksi dan atau pada saat bukti transaksi tersebut diterima namun pengakuan transaksi tetap pada tanggal bukti transaksi. Setelah seluruh transaksi dicatat dalam buku jurnal maka Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD kemudian melakukan posting ke buku

besar. Setelah posting dari buku jurnal ke buku besar selesai dilakukan maka kemudian Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD menyusun Neraca Saldo sebagai dasar pembuatan Laporan Keuangan untuk setiap triwulan yang diserahkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah triwulan berakhir kepada PPK-SKPKD.

## **ALUR PROSEDUR TEKNIS**

Teknis pelaksanaan sistem dan prosedur akuntansi aset di SKPKD-PPKD ini adalah sebagai berikut :

### **Langkah I : Penerimaan Bukti Transaksi**

Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD menerima bukti-bukti yang terkait dengan aset di SKPKD-PPKD dari Kuasa BUD melalui PPK-SKPKD. Bukti tersebut bisa menunjukkan adanya perolehan aset, atau penambahan atas aset yang telah ada maupun berupa pengurangan atas aset yang telah ada karena ditarik atau telah dilunasi pihak lain atau karena sebab lainnya. Berdasarkan perolehan bukti-bukti transaksi tersebut kemudian Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD membuat bukti memorial sebagai dasar dilakukannya penjurnalan di Buku Jurnal Umum. Sebagai contoh : misalkan diketahui bahwa selama tahun 2022, telah terjadi transaksi yang terkait dengan Pemerintah daerah di SKPKD-PPKD sebagai berikut (asumsi tanggal bukti transaksi sama dengan tanggal penerimaan bukti transaksi) :

- |                 |  |
|-----------------|--|
| 5 Januari 2022  | Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD menerima sertifikat deposito, Surat Perintah BUD dan Nota Debet dari Kuasa BUD melalui PPK-SKPKD yang menyatakan pembentukan investasi dalam deposito diatas 3 bulan dan dibawah 12 bulan sebesar Rp 200.000.000,- |
| 10 Januari 2022 | Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD menerima SP2D LS dari Kuasa BUD melalui PPK-SKPKD yang menyatakan pengeluaran pembiayaan dana cadangan sebesar Rp 1.500.000.000,-  |
| 20 Januari 2022 | Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD menerima SP2D LS dari Kuasa BUD melalui PPK-SKPKD yang   |

- menyatakan pengeluaran pembiayaan penyertaan modal pada BUMD A sebesar Rp 500.000.000,-
- 1 Februari 2022 Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD menerima BAST dari Kuasa BUD melalui PPK-SKPKD yang menyatakan penyertaan modal berupa aset barang pada BUMD B sebesar Rp 100.000.000,-
- 10 Februari 2022 Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD menerima SP2D LS dari Kuasa BUD melalui PPK-SKPKD yang menyatakan pengeluaran pemberian pinjaman pada BUMD C sebesar Rp 200.000.000,- (Pinjaman ini bisa jangka pendek ada jangka panjang)
- 20 Februari 2022 Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD menerima SP2D LS dari Kuasa BUD melalui PPK-SKPKD yang menyatakan pengeluaran pembiayaan pembentukan dana bergulir pada BLUD Dana Bergulir sebesar Rp 1.000.000.000,-
- 1 Maret 2022 Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD menerima BAST dari Kuasa BUD melalui PPK-SKPKD yang menyatakan penyerahan aset barang untuk pembentukan dana bergulir pada BLUD Dana Bergulir sebesar Rp 150.000.000,-
- 5 Maret 2022 Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD menerima sertifikat deposito, Surat Perintah BUD dan Nota Kredit dari Kuasa BUD melalui PPK-SKPKD yang menyatakan penarikan investasi dalam deposito diatas 3 bulan dan dibawah 12 bulan sebesar Rp 100.000.000,-
- 10 Maret 2022 Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD menerima Surat Perintah BUD dan Nota Kredit dari Kuasa BUD melalui PPK-SKPKD yang menyatakan penerimaan pembiayaan atas penarikan dana cadangan sebesar Rp 500.000.000,-
- 20 Maret 2022 Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD menerima Nota Kredit dan/atau STS beserta Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Penarikan Investasi Daerah

|               |  |
|---------------|--|
|               | dari Kuasa BUD melalui PPK-SKPKD yang menyatakan penerimaan pembiayaan atas penarikan penyertaan modal pada BUMD A sebesar Rp 100.000.000,-  |
| 30 Maret 2022 | Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD menerima BAST dari Kuasa BUD melalui PPK-SKPKD yang menyatakan penarikan investasi atas penyertaan modal berupa aset barang pada BUMD B sebesar Rp 100.000.000,-     |
| 1 April 2022  | Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD menerima Nota Kredit dari Kuasa BUD melalui PPK-SKPKD yang menyatakan penerimaan pengembalian pemberian pinjaman pada BUMD C sebesar Rp 100.000.000,-                |
| 10 April 2022 | Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD menerima Nota Kredit dari Kuasa BUD melalui PPK-SKPKD yang menyatakan penerimaan pembiayaan penarikan dana bergulir pada BLUD Dana Bergulir sebesar Rp 200.000.000,- |
| 10 Mei 2022   | Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD menerima BAST dari Kuasa BUD melalui PPK-SKPKD yang menyatakan penerimaan aset barang untuk penarikan dana bergulir pada BLUD Dana Bergulir sebesar Rp 50.000.000,-  |

Contoh sederhana tersebut diatas diberikan sebagai bahan untuk mempermudah penjelasan sistem dan prosedur akuntansi aset di SKPKD-PPKD ini. Tetapi contoh tersebut diatas tidak menunjukkan semua bentuk transaksi yang secara nyata terjadi.

## **Langkah II : Menjurnal Transaksi Pengeluaran**

Berdasarkan bukti-bukti transaksi aset tersebut kemudian Tenaga Akuntansi PPK-SKPKD mencatat transaksi tersebut di buku jurnal. Pencatatan akuntansi dilakukan kedalam buku jurnal sesuai dengan jenis transaksi yang terjadi. Atas transaksi **aset di SKPKD-PPKD** maka dilakukan pencatatan dalam Buku Jurnal Umum dengan melakukan

jurnal:

1. “Aset sesuai dengan jenis sampai rincian obyeknya” di debit dan “Kas di Kas Daerah” di kredit untuk pembentukan aset seperti :

- a. Transaksi untuk **pembentukan Investasi Jangka Pendek**, dilakukan penjurnalan di buku jurnal umum sebagai berikut :

|                                | Debit       | Kredit      |
|--------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Investasi Jangka Pendek</b> | <b>xxxx</b> |             |
| <b>Kas di Kas Daerah</b>       |             | <b>xxxx</b> |

- b. Transaksi untuk pengeluaran **Penyertaan Modal Daerah**, dilakukan penjurnalan di buku jurnal umum sebagai berikut :

|                                      | Debit       | Kredit      |
|--------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Investasi Jangka Panjang_____</b> | <b>xxxx</b> |             |
| <b>Kas di Kas Daerah/Aset Tetap</b>  |             | <b>xxxx</b> |

- c. Transaksi untuk **pemberian pinjaman**, dilakukan penjurnalan di buku jurnal umum sebagai berikut :

|                                | Debit       | Kredit      |
|--------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Pemberian pinjaman_____</b> | <b>xxxx</b> |             |
| <b>Kas di Kas Daerah</b>       |             | <b>xxxx</b> |

- d. Transaksi untuk **pembentukan investasi non permanen**, dilakukan penjurnalan di buku jurnal umum sebagai berikut :

|                                     | Debit       | Kredit      |
|-------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Investasi Non Permanen_____</b>  | <b>xxxx</b> |             |
| <b>Kas di Kas Daerah/Aset Tetap</b> |             | <b>xxxx</b> |

2. Kemudian untuk mencatat realisasi anggaran berbasis kas dicatat dalam Buku Jurnal Penerimaan kas dengan melakukan jurnal, “Estimasi Perubahan SAL” di Debit dan “Akun Penerimaan Pembiayaan sesuai jenisnya” di kredit, sebagai berikut :

|                                   | Debit       | Kredit      |
|-----------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Estimasi Perubahan SAL</b>     | <b>xxxx</b> |             |
| <b>Penerimaan Pembiayaan_____</b> |             | <b>xxxx</b> |

3. “Kas di Kas Daerah” di debit dan “Aset sesuai dengan jenis sampai rincian obyeknya” di kredit untuk penarikan aset seperti :

- a. Transaksi untuk **penarikan Dana Cadangan**, dilakukan penjurnalan di buku jurnal umum sebagai berikut :

|                          | Debit       | Kredit      |
|--------------------------|-------------|-------------|
| <b>Kas di Kas Daerah</b> | <b>xxxx</b> |             |
| <b>Dana Cadangan</b>     |             | <b>xxxx</b> |

- b. Transaksi untuk penarikan **Penyertaan Modal Daerah**, dilakukan penjurnalan di buku jurnal umum sebagai berikut :

|                                      | Debit       | Kredit      |
|--------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Kas di Kas Daerah/Aset Tetap</b>  | <b>xxxx</b> |             |
| <b>Investasi Jangka Panjang_____</b> |             | <b>xxxx</b> |

- c. Transaksi untuk **penerimaan kembali pemberian pinjaman**, dilakukan penjurnalan di buku jurnal umum sebagai berikut :

|                                | Debit       | Kredit      |
|--------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Kas di Kas Daerah</b>       | <b>xxxx</b> |             |
| <b>Pemberian pinjaman_____</b> |             | <b>xxxx</b> |

- d. Transaksi untuk **penarikan investasi non permanen**, dilakukan penjurnalan di buku jurnal umum sebagai berikut :

|                                     | Debit       | Kredit      |
|-------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Kas di Kas Daerah/Aset Tetap</b> | <b>xxxx</b> |             |
| <b>Investasi Non Permanen_____</b>  |             | <b>xxxx</b> |

4. Kemudian untuk mencatat realisasi anggaran berbasis kas dicatat dalam Buku Jurnal Pengeluaran kas dengan melakukan jurnal, “Pengeluaran Pembiayaan” di Debit dan “Estimasi Perubahan SAL sesuai jenisnya” di kredit, sebagai berikut:

|                                    | Debit       | Kredit      |
|------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Pengeluaran Pembiayaan_____</b> | <b>xxxx</b> |             |
| <b>Estimasi Perubahan SAL</b>      |             | <b>xxxx</b> |

Berdasarkan uraian penjurnalan dan contoh transaksi terkait aset di SKPKD-PPKD tersebut diatas maka Tenaga Akuntansi PPK-SKPKD melakukan pencatatan dalam buku jurnal sebagai berikut :

**Pertama,** penjurnalan untuk penerimaan sertifikat deposito, Surat Perintah BUD dan Nota Debet dari Kuasa BUD melalui PPK-SKPKD yang menyatakan pembentukan investasi dalam deposito diatas 3 bulan dan dibawah 12 bulan sebesar Rp 200.000.000,- pada tanggal 5 Januari 2022, dicatat di jurnal umum sebagai berikut :

|                |             |                        | Debit       | Kredit      |
|----------------|-------------|------------------------|-------------|-------------|
| 5 Januari 2022 | 1.1.2.02.01 | Deposito Jangka Pendek | 200.000.000 |             |
|                | 1.1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah      |             | 200.000.000 |

**Kedua,** penjurnalan untuk penerimaan SP2D LS dari Kuasa BUD melalui PPK-SKPKD yang menyatakan pengeluaran pembiayaan dana cadangan sebesar Rp 1.500.000.000,- pada tanggal 10 Januari 2022, dicatat di jurnal umum sebagai berikut :

|                 |             |                   | Debit         | Kredit        |
|-----------------|-------------|-------------------|---------------|---------------|
| 10 Januari 2022 | 1.4.1.01.01 | Dana Cadangan     | 1.500.000.000 |               |
|                 | 1.1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah |               | 1.500.000.000 |

Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD juga mencatat transaksi realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan terkait pembentukan aset dengan melakukan pencatatan dalam buku jurnal pengeluaran kas dengan jurnal sebagai berikut :

|                 |             |  | Debit         | Kredit        |
|-----------------|-------------|--|---------------|---------------|
| 10 Januari 2022 | 6.1.2.01.01 | Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan | 1.500.000.000 |               |
|                 | 3.1.2.05.01 | Estimasi Perubahan SAL                           |               | 1.500.000.000 |



**Ketiga**, penjurnalan untuk penerimaan SP2D LS dari Kuasa BUD melalui PPK-SKPKD yang menyatakan pengeluaran pembiayaan penyertaan modal pada BUMD A sebesar Rp 500.000.000,- pada tanggal 20 Januari 2022, dicatat di jurnal umum sebagai berikut :

|                 |             |                              | Debit       | Kredit      |
|-----------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|
| 20 Januari 2022 | 1.2.2.01.02 | Penyertaan Modal kepada BUMD | 500.000.000 |             |
|                 | 1.1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah            |             | 500.000.000 |

Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD juga mencatat transaksi realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan terkait pembentukan aset dengan melakukan pencatatan dalam buku jurnal pengeluaran kas dengan jurnal sebagai berikut :

|                 |             |   | Debit       | Kredit      |
|-----------------|-------------|---|-------------|-------------|
| 20 Januari 2022 | 6.2.2.02.00 | Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal kepada BUMD | 500.000.000 |             |
|                 | 3.1.2.05.01 | Estimasi Perubahan SAL                              |             | 500.000.000 |

**Keempat**, penjurnalan untuk penerimaan BAST dari Kuasa BUD melalui PPK-SKPKD yang menyatakan penyertaan modal berupa aset barang pada BUMD B sebesar Rp 100.000.000,- pada tanggal 1 Februari 2022, dicatat di jurnal umum sebagai berikut :

|                 |             |                              | Debit       | Kredit      |
|-----------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|
| 1 Februari 2022 | 1.2.2.01.02 | Penyertaan Modal kepada BUMD | 100.000.000 |             |
|                 | 1.1.3.00.00 | Aset Tetap                   |             | 100.000.000 |

**Kelima**, penjurnalan untuk penerimaan SP2D LS dari Kuasa BUD melalui PPK-SKPKD yang menyatakan pengeluaran pemberian pinjaman pada BUMD C sebesar Rp 200.000.000,- pada tanggal 10 Februari 2022, dicatat di jurnal umum sebagai berikut :

|                  |             |                    | Debit       | Kredit      |
|------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| 10 Februari 2022 | 1.5.4.01.01 | Pemberian Pinjaman | 200.000.000 |             |
|                  | 1.1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah  |             | 200.000.000 |

Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD juga mencatat transaksi realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan terkait pembentukan aset dengan melakukan pencatatan dalam buku jurnal pengeluaran kas dengan jurnal sebagai berikut :

|                  |             |  | Debit       | Kredit      |
|------------------|-------------|--|-------------|-------------|
| 10 Februari 2022 | 6.2.4.00.00 | Pengeluaran Pembiayaan<br>Pemberian Pinjaman<br>Daerah | 200.000.000 |             |
|                  | 3.1.2.05.01 | Estimasi Perubahan<br>SAL                              |             | 200.000.000 |

**Keenam,** penjurnalan untuk penerimaan SP2D LS dari Kuasa BUD melalui PPK-SKPKD yang menyatakan pengeluaran pembiayaan pembentukan dana bergulir pada BLUD Dana Bergulir sebesar Rp 1.000.000.000,- pada tanggal 20 Februari 2022, dicatat di jurnal umum sebagai berikut :

|                 |             |                   | Debit         | Kredit        |
|-----------------|-------------|-------------------|---------------|---------------|
| 20 Febuari 2022 | 1.2.1.04.01 | Dana Bergulir     | 1.000.000.000 |               |
|                 | 1.1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah |               | 1.000.000.000 |

Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD juga mencatat transaksi realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan terkait pembentukan aset dengan melakukan pencatatan dalam buku jurnal pengeluaran kas dengan jurnal sebagai berikut :

|                 |             |   | Debit         | Kredit        |
|-----------------|-------------|---|---------------|---------------|
| 20 Febuari 2022 | 6.2.6.00.00 | Pengeluaran Pembiayaan<br>Dana Bergulir | 1.000.000.000 |               |
|                 | 3.1.2.05.01 | Estimasi Perubahan<br>SAL               |               | 1.000.000.000 |

**Ketujuh,** penjurnalan untuk penerimaan BAST dari Kuasa BUD melalui PPK-SKPKD yang menyatakan penyerahan aset barang untuk pembentukan dana bergulir pada BLUD Dana Bergulir sebesar Rp 150.000.000,- pada tanggal 1 Maret 2022, dicatat di jurnal umum sebagai berikut :

|              |             |               | Debit       | Kredit      |
|--------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| 1 Maret 2022 | 1.2.1.04.01 | Dana Bergulir | 150.000.000 |             |
|              | 1.1.3.00.00 | Aset Tetap    |             | 150.000.000 |

**Kedelapan,** penjurnalan untuk penerimaan sertifikat deposito, Surat Perintah BUD dan Nota Kredit dari Kuasa BUD melalui PPK-SKPKD yang menyatakan penarikan investasi dalam deposito diatas 3 bulan dan dibawah 12 bulan sebesar Rp 100.000.000,- pada tanggal 5 Maret 2022, dicatat di jurnal umum sebagai berikut :

|              |             |                                     |             |             |
|--------------|-------------|-------------------------------------|-------------|-------------|
|              |             |                                     | Debit       | Kredit      |
| 5 Maret 2022 | 1.1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah                   | 100.000.000 |             |
|              | 1.1.2.02.01 | Investasi Jangka Pendek<br>Deposito |             | 100.000.000 |

**Kesembilan,** penjurnalan untuk penerimaan Surat Perintah BUD dan Nota Kredit dari Kuasa BUD melalui PPK-SKPKD yang menyatakan penerimaan pembiayaan atas penarikan dana cadangan sebesar Rp 500.000.000,- pada tanggal 10 Maret 2022, dicatat di jurnal umum sebagai berikut :

|               |             |                   |             |             |
|---------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
|               |             |                   | Debit       | Kredit      |
| 10 Maret 2022 | 1.1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah | 500.000.000 |             |
|               | 1.4.1.01.01 | Dana Cadangan     |             | 500.000.000 |

Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD juga mencatat transaksi realisasi anggaran penerimaan pembiayaan terkait penarikan aset dengan melakukan pencatatan dalam buku jurnal penerimaan kas dengan jurnal sebagai berikut :

|               |             |   |             |             |
|---------------|-------------|---|-------------|-------------|
|               |             |   | Debit       | Kredit      |
| 10 Maret 2022 | 3.1.2.05.01 | Estimasi Perubahan SAL                              | 500.000.000 |             |
|               | 6.1.2.01.01 | Penerimaan Pembiayaan<br>Pencairan Dana<br>Cadangan |             | 500.000.000 |

**Kesepuluh,** penjurnalan untuk penerimaan Nota Kredit dan/atau STS beserta Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Penarikan Investasi Daerah dari Kuasa BUD melalui PPK-SKPKD yang menyatakan penerimaan pembiayaan atas penarikan penyertaan modal pada BUMD A sebesar Rp 100.000.000,- pada tanggal 20 Maret 2022, dicatat di jurnal umum sebagai berikut :

|               |             |                               |             |             |
|---------------|-------------|-------------------------------|-------------|-------------|
|               |             |                               | Debit       | Kredit      |
| 20 Maret 2022 | 1.1.1.01.01 | Kas Daerah                    | 100.000.000 |             |
|               | 1.2.2.01.02 | Penyertaan Modal pada<br>BUMD |             | 100.000.000 |

Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD juga mencatat transaksi realisasi anggaran penerimaan pembiayaan terkait penarikan aset dengan melakukan pencatatan dalam buku jurnal penerimaan kas dengan jurnal sebagai berikut :

|               |             |   | Debit       | Kredit      |
|---------------|-------------|---|-------------|-------------|
| 20 Maret 2022 | 3.1.2.05.01 | Estimasi Perubahan SAL                        | 100.000.000 |             |
|               | 6.1.3.01.01 | Penerimaan Pembiayaan<br>Hasil Penjualan BUMD |             | 100.000.000 |

**Kesebelas,** penjurnalan untuk penerimaan BAST dari Kuasa BUD melalui PPK-SKPKD yang menyatakan penarikan investasi atas penyertaan modal berupa aset barang pada BUMD B sebesar Rp 100.000.000, pada tanggal 30 Maret 2022, dicatat di jurnal umum sebagai berikut :

|               |             |                               | Debit       | Kredit      |
|---------------|-------------|-------------------------------|-------------|-------------|
| 30 Maret 2022 | 1.1.3.00.00 | Aset Tetap                    | 100.000.000 |             |
|               | 1.2.2.01.02 | Penyertaan Modal pada<br>BUMD |             | 100.000.000 |

**Keduabelas,** penjurnalan untuk penerimaan Nota Kredit dari Kuasa BUD melalui PPK-SKPKD yang menyatakan penerimaan pengembalian pemberian pinjaman pada BUMD C sebesar Rp 100.000.000,- pada tanggal 1 April 2022, dicatat di jurnal umum sebagai berikut :

|              |             |                    | Debit       | Kredit      |
|--------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| 1 April 2022 | 1.1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah  | 100.000.000 |             |
|              | 1.1.5.01.01 | Pemberian Pinjaman |             | 100.000.000 |

Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD juga mencatat transaksi realisasi anggaran penerimaan pembiayaan terkait penarikan aset dengan melakukan pencatatan dalam buku jurnal penerimaan kas dengan jurnal sebagai berikut :

|              |             |   | Debit       | Kredit      |
|--------------|-------------|---|-------------|-------------|
| 1 April 2022 | 3.1.2.05.01 | Estimasi Perubahan SAL  | 100.000.000 |             |
|              | 6.1.5.02.01 | Penerimaan Pembiayaan<br>Penerimaan kembali<br>Pinjaman kepada<br>Perusahaan Daerah |             | 100.000.000 |

**Ketigabelas,** penjurnalan untuk penerimaan Nota Kredit dari Kuasa BUD melalui PPK-SKPKD yang menyatakan penerimaan pembiayaan penarikan dana bergulir pada BLUD Dana Bergulir sebesar Rp 200.000.000,- pada tanggal 10 April 2022, dicatat di jurnal umum sebagai berikut :

|               |             |                   | Debit       | Kredit      |
|---------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| 10 April 2022 | 1.1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah | 200.000.000 |             |
|               | 1.2.1.04.01 | Dana Bergulir     |             | 200.000.000 |

Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD juga mencatat transaksi realisasi anggaran pembiayaan terkait penarikan aset dengan melakukan pencatatan dalam buku jurnal penerimaan kas dengan jurnal sebagai berikut :

|               |             |                         | Debit       | Kredit      |
|---------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|
| 10 April 2022 | 3.1.2.05.01 | Estimasi Perubahan SAL  | 200.000.000 |             |
|               | 6.1.6.06.01 | Penerimaan Pembiayaan   |             | 200.000.000 |
|               |             | Penarikan kembali       |             |             |
|               |             | Investasi Dana Bergulir |             |             |

**Keempatbelas,** penjurnalan untuk penerimaan BAST dari Kuasa BUD melalui PPK-SKPKD yang menyatakan penerimaan aset barang untuk penarikan dana bergulir pada BLUD Dana Bergulir sebesar Rp 50.000.000,- pada tanggal 10 April 2022, dicatat di jurnal umum sebagai berikut :

|             |             |               | Debit      | Kredit     |
|-------------|-------------|---------------|------------|------------|
| 10 Mei 2022 | 1.1.3.00.00 | Aset Tetap    | 50.000.000 |            |
|             | 1.2.1.04.01 | Dana Bergulir |            | 50.000.000 |

### **Bentuk dan Cara Pengisian Buku Jurnal**

Berdasarkan contoh jurnal tersebut diatas maka dilakukan pencatatan dalam buku jurnal umum untuk transaksi berbasis akrual yang nantinya digunakan untuk menyusun LO dan Neraca sebagai berikut :

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU JURNAL UMUM (JU)

SKPKD : .....( SKPKD Kabupaten Kuningan)

Halaman 01

| Tanggal | Nomor               |               | Kode Rekening |   |   |    |    | Uraian                           | Ref. | Debit<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|---------|---------------------|---------------|---------------|---|---|----|----|----------------------------------|------|---------------|----------------|
|         | Bukti<br>Penerimaan | Bukti<br>Lain |               |   |   |    |    |                                  |      |               |                |
| 1       | 2                   |               | 3             |   |   |    |    | 4                                | 5    | 6             | 7              |
|         |                     |               |               |   |   |    |    |                                  |      |               |                |
| 5/1/15  | -                   | -             | 1             | 1 | 2 | 02 | 01 | Deposito Jangka Pendek           | -    | 200.000.000   | -              |
|         |                     |               | 1             | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas di Kas Daerah                | -    | -             | 200.000.000    |
|         |                     |               |               |   |   |    |    |                                  |      |               |                |
| 10/1/15 | -                   | -             | 1             | 4 | 1 | 01 | 01 | Dana Cadangan                    | -    | 1.500.000.000 | -              |
|         |                     |               | 1             | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas di Kas Daerah                | -    | -             | 1.500.000.000  |
|         |                     |               |               |   |   |    |    |                                  |      |               |                |
| 20/1/15 | -                   | -             | 1             | 2 | 2 | 01 | 02 | Penyertaan Modal kepada BUMD     | -    | 500.000.000   | -              |
|         |                     |               | 1             | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas di Kas Daerah                | -    | -             | 500.000.000    |
|         |                     |               |               |   |   |    |    |                                  |      |               |                |
| 1/2/15  | -                   | -             | 1             | 2 | 2 | 01 | 02 | Penyertaan Modal kepada BUMD     | -    | 100.000.000   | -              |
|         |                     |               | 1             | 1 | 3 | 00 | 00 | Aset Tetap                       | -    | -             | 100.000.000    |
|         |                     |               |               |   |   |    |    |                                  |      |               |                |
| 10/2/15 | -                   | -             | 1             | 5 | 4 | 01 | 01 | Pemberian Pinjaman               | -    | 200.000.000   | -              |
|         |                     |               | 1             | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas di Kas Daerah                | -    | -             | 200.000.000    |
|         |                     |               |               |   |   |    |    |                                  |      |               |                |
| 20/2/15 | -                   | -             | 1             | 2 | 1 | 04 | 01 | Dana Bergulir                    | -    | 1.000.000.000 | -              |
|         |                     |               | 1             | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas di Kas Daerah                | -    | -             | 1.000.000.000  |
|         |                     |               |               |   |   |    |    |                                  |      |               |                |
| 1/3/15  | -                   | -             | 1             | 2 | 1 | 04 | 01 | Dana Bergulir                    | -    | 150.000.000   | -              |
|         |                     |               | 1             | 1 | 3 | 00 | 00 | Aset Tetap                       | -    | -             | 150.000.000    |
|         |                     |               |               |   |   |    |    |                                  |      |               |                |
| 5/3/15  | -                   | -             | 1             | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas di Kas Daerah                | -    | 100.000.000   | -              |
|         |                     |               | 1             | 1 | 2 | 02 | 01 | Investasi Jangka Pendek Deposito | -    | -             | 100.000.000    |
|         |                     |               |               |   |   |    |    |                                  |      |               |                |
| 10/3/15 | -                   | -             | 1             | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas di Kas Daerah                | -    | 500.000.000   | -              |
|         |                     |               | 1             | 4 | 1 | 01 | 01 | Dana Cadangan                    | -    | -             | 500.000.000    |
|         |                     |               |               |   |   |    |    |                                  |      |               |                |
| 20/3/15 | -                   | -             | 1             | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas di Kas Daerah                | -    | 100.000.000   | -              |
|         |                     |               | 1             | 2 | 2 | 01 | 02 | Penyertaan Modal pada BUMD       | -    | -             | 100.000.000    |
|         |                     |               |               |   |   |    |    |                                  |      |               |                |
| 30/3/15 | -                   | -             | 1             | 1 | 3 | 00 | 00 | Aset Tetap                       | -    | 100.000.000   | -              |
|         |                     |               | 1             | 2 | 2 | 01 | 02 | Penyertaan Modal pada BUMD       | -    | -             | 100.000.000    |
|         |                     |               |               |   |   |    |    |                                  |      |               |                |
| 1/4/15  | -                   | -             | 1             | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas di Kas Daerah                | -    | 100.000.000   | -              |
|         |                     |               | 1             | 5 | 4 | 01 | 01 | Pemberian Pinjaman               | -    | -             | 100.000.000    |
|         |                     |               |               |   |   |    |    |                                  |      |               |                |
| 10/4/15 | -                   | -             | 1             | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas di Kas Daerah                | -    | 200.000.000   | -              |
|         |                     |               | 1             | 2 | 1 | 04 | 01 | Dana Bergulir                    | -    | -             | 200.000.000    |
|         |                     |               |               |   |   |    |    |                                  |      |               |                |
| 10/5/15 | -                   | -             | 1             | 1 | 3 | 00 | 00 | Aset Tetap                       | -    | 50.000.000    | -              |
|         |                     |               | 1             | 2 | 1 | 04 | 01 | Dana Bergulir                    | -    | -             | 50.000.000     |
|         |                     |               |               |   |   |    |    |                                  |      |               |                |
| Jumlah  |                     |               |               |   |   |    |    |                                  |      | 4.800.000.000 | 4.800.000.000  |

PPK-SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)

NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)

NIP.....

Selain mencatat di buku jurnal umum dilakukan juga pencatatan dalam buku jurnal penerimaan kas untuk transaksi berbasis kas yang nantinya digunakan untuk menyusun LRA dan LAK sebagai berikut :

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU JURNAL PENERIMAAN KAS (JM)

SKPKD : .....( SKPKD Kabupaten Kuningan)

| Halaman 01 |                  |            |               |   |   |    |    |  |      |             |             |
|------------|------------------|------------|---------------|---|---|----|----|--|------|-------------|-------------|
| Tanggal    | Nomor            |            | Kode Rekening |   |   |    |    | Uraian   | Ref. | Debit (Rp)  | Kredit (Rp) |
|            | Bukti Penerimaan | Bukti Lain |               |   |   |    |    |  |      |             |             |
| 1          | 2                |            | 3             |   |   |    |    | 4  | 5    | 6           | 7           |
|            |                  |            |               |   |   |    |    |  |      |             |             |
| 10/03/15   | -                | -          | 3             | 1 | 2 | 05 | 01 | Estimasi Perubahan SAL   | -    | 500.000.000 | -           |
|            |                  |            | 6             | 1 | 2 | 01 | 01 | Penerimaan Pembiayaan Pencairan Dana Cadangan                              | -    | -           | 500.000.000 |
|            |                  |            |               |   |   |    |    |  |      |             |             |
| 20 /03/15  | -                | -          | 3             | 1 | 2 | 05 | 01 | Estimasi Perubahan SAL   | -    | 100.000.000 | -           |
|            |                  |            | 6             | 1 | 3 | 01 | 01 | Penerimaan Pembiayaan Hasil Penjualan BUMD                                 | -    | -           | 100.000.000 |
|            |                  |            |               |   |   |    |    |  |      |             |             |
| 01/04/15   | -                | -          | 3             | 1 | 2 | 05 | 01 | Estimasi Perubahan SAL   | -    | 100.000.000 | -           |
|            |                  |            | 6             | 1 | 5 | 02 | 01 | Penerimaan Pembiayaan Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah | -    | -           | 100.000.000 |
|            |                  |            |               |   |   |    |    |  |      |             |             |
| 10/04/15   | -                | -          | 3             | 1 | 2 | 05 | 01 | Estimasi Perubahan SAL   | -    | 200.000.000 | -           |
|            |                  |            | 6             | 1 | 6 | 06 | 01 | Penerimaan Pembiayaan Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir           | -    | -           | 200.000.000 |
|            |                  |            |               |   |   |    |    |  |      |             |             |
| Jumlah     |                  |            |               |   |   |    |    |  |      | 900.000.000 | 900.000.000 |

PPK-SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Selain mencatat di buku jurnal umum dan buku jurnal penerimaan kas dilakukan juga pencatatan dalam buku jurnal pengeluaran kas untuk transaksi berbasis kas yang nantinya digunakan untuk menyusun LRA dan LAK sebagai berikut :

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU JURNAL PENGELUARAN KAS (JK)

SKPKD : .....( SKPKD Kabupaten Kuningan)

Halaman 01

| Tanggal  | Nomor             |            | Kode Rekening |   |   |    |    | Uraian  | Ref. | Debit (Rp)    | Kredit (Rp)   |
|----------|-------------------|------------|---------------|---|---|----|----|---|------|---------------|---------------|
|          | Bukti Pengeluaran | Bukti Lain |               |   |   |    |    |   |      |               |               |
| 1        | 2                 |            | 3             |   |   |    |    | 4   | 5    | 6             | 7             |
|          |                   |            |               |   |   |    |    |   |      |               |               |
| 10/01/15 | -                 | -          | 6             | 2 | 1 | 01 | 00 | Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan    | -    | 1.500.000.000 | -             |
|          |                   |            | 3             | 1 | 2 | 05 | 01 | Estimasi Perubahan SAL                              | -    | -             | 1.500.000.000 |
|          |                   |            |               |   |   |    |    |   |      |               |               |
| 20/01/15 | -                 | -          | 6             | 2 | 2 | 02 | 00 | Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal kepada BUMD | -    | 500.000.000   | -             |
|          |                   |            | 3             | 1 | 2 | 05 | 01 | Estimasi Perubahan SAL                              | -    | -             | 500.000.000   |
|          |                   |            |               |   |   |    |    |   |      |               |               |
| 10/02/15 | -                 | -          | 6             | 2 | 4 | 00 | 00 | Pengeluaran Pembiayaan Pemberian Pinjaman Daerah    | -    | 200.000.000   | -             |
|          |                   |            | 3             | 1 | 2 | 05 | 01 | Estimasi Perubahan SAL                              | -    | -             | 200.000.000   |
|          |                   |            |               |   |   |    |    |   |      |               |               |
| 20/02/15 | -                 | -          | 6             | 2 | 6 | 00 | 00 | Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir                | -    | 1.000.000.000 | -             |
|          |                   |            | 3             | 1 | 2 | 05 | 01 | Estimasi Perubahan SAL                              | -    | -             | 1.000.000.000 |
|          |                   |            |               |   |   |    |    |   |      |               |               |
| Jumlah   |                   |            |               |   |   |    |    |   |      | 3.200.000.000 | 3.200.000.000 |

PPK-SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Langkah III : Melakukan Posting ke Buku Besar

Setelah melakukan penjurnalan seluruh transaksi, maka PPK-SKPKD melakukan posting atas pencatatan jurnal tersebut ke buku besar. Posting ini berguna agar seluruh transaksi yang sama-sama mempengaruhi suatu kode rekening/akun dapat dikelompokkan dalam satu buku besar untuk kode rekening/akun yang bersangkutan. Periode posting harus semakin diusahakan dapat dilakukan dalam waktu yang semakin singkat misalkan untuk periode mingguan atau bahkan harian.

Contoh buku besar SKPKD-PPKD : Kas di Kas Daerah sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:



KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPKD : BPKAD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 1.1.1.01.01  
Nama Rekening : Kas di Kas Daerah  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD :

Halaman 01

| No | Bukti |           | Ref | Uraian                       | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|-----------|-----|------------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal   |     |                              |               |                |
| 1  |       | 5/1/2022  | JU  | Deposito Jangka Pendek       | -             | 200.000.000    |
| 2  |       | 10/1/2022 | JU  | Dana Cadangan                | -             | 1.500.000.000  |
| 3  |       | 20/1/2022 | JU  | Penyertaan Modal kepada BUMD | -             | 500.000.000    |
| 4  |       | 10/2/2022 | JU  | Pemberian Pinjaman           | -             | 200.000.000    |
| 5  |       | 20/2/2022 | JU  | Dana Bergulir                | -             | 1.000.000.000  |
| 6  |       | 5/3/2022  | JU  | Investasi Jk Pendek Deposito | 100.000.000   | -              |
| 7  |       | 10/3/2105 | JU  | Dana Cadangan                | 500.000.000   | -              |
| 8  |       | 20/3/2022 | JU  | Penyertaan Modal pada BUMD   | 100.000.000   | -              |
| 9  |       | 1/4/2022  | JU  | Pemberian Pinjaman           | 100.000.000   | -              |
| 10 |       | 10/4/2022 | JU  | Dana Bergulir                | 200.000.000   | -              |
|    |       |           |     |                              |               |                |
|    |       |           |     | Jumlah                       | 1.000.000.000 | 3.400.000.000  |
|    |       |           |     | Saldo                        | -             | 2.400.000.000  |

PPK-SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD-PPKD : Deposito Jangka Pendek sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPKD : BPKAD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 1.1.2.02.01  
Nama Rekening : Deposito Jangka Pendek  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD :

Halaman 01

| No | Bukti |          | Ref | Uraian            | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|----------|-----|-------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal  |     |                   |               |                |
| 1  |       | 5/1/2022 | JU  | Kas di Kas Daerah | 200.000.000   | -              |
| 2  |       | 5/3/2022 | JU  | Kas di Kas Daerah | -             | 100.000.000    |
|    |       |          |     |                   |               |                |
|    |       |          |     | Jumlah            | 200.000.000   | 100.000.000    |
|    |       |          |     | Saldo             | 100.000.000   | -              |

PPK-SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–PPKD : Aset Tetap sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPKD : BPKAD Kabupaten Kuningan

Kode Rekening : 1.1.3.00.00

Nama Rekening : Aset Tetap

Pagu APBD :

Pagu perubahan APBD : 

Halaman 01

| No | Bukti |           | Ref | Uraian                       | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|-----------|-----|------------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal   |     |                              |               |                |
| 1  |       | 1/2/2022  | JU  | Penyertaan Modal kepada BUMD | -             | 100.000.000    |
| 2  |       | 1/3/2022  | JU  | Dana Bergulir                | -             | 150.000.000    |
| 3  |       | 30/3/2022 | JU  | Penyertaan Modal pada BUMD   | 100.000.000   | -              |
| 4  |       | 10/5/2022 | JU  | Dana Bergulir                | 50.000.000    | -              |
|    |       |           |     |                              |               |                |
|    |       |           |     | Jumlah                       | 150.000.000   | 250.000.000    |
|    |       |           |     | Saldo                        | -             | 100.000.000    |

PPK–SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–PPKD : Dana Bergulir sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPKD

Kode Rekening

Nama Rekening

Pagu APBD

Pagu perubahan APBD

:

:

:

:

:

BPKAD Kabupaten Kuningan

1.2.1.04.01

Dana Bergulir

PPK–SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–PPKD : Penyertaan Modal kepada BUMD sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPKD : BPKAD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 1.2.2.01.02  
Nama Rekening : Penyertaan Modal kepada BUMD  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD :

Halaman 01

| No | Bukti |           | Ref | Uraian            | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|-----------|-----|-------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal   |     |                   |               |                |
| 1  |       | 20/1/2022 | JU  | Kas di Kas Daerah | 500.000.000   | -              |
| 2  |       | 1/2/2022  | JU  | Aset Tetap        | 100.000.000   | -              |
| 3  |       | 20/3/2022 | JU  | Kas di Kas Daerah | -             | 100.000.000    |
| 4  |       | 30/3/2022 | JU  | Aset Tetap        | -             | 100.000.000    |
|    |       |           |     |                   |               |                |
|    |       |           |     | Jumlah            | 600.000.000   | 200.000.000    |
|    |       |           |     | Saldo             | 400.000.000   | -              |

PPK–SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–PPKD : Dana Cadangan sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPKD : BPKAD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 1.4.1.01.01  
Nama Rekening : Dana Cadangan  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD :

Halaman 01

| No | Bukti |           | Ref | Uraian            | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|-----------|-----|-------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal   |     |                   |               |                |
| 1  |       | 10/1/2022 | JU  | Kas di Kas Daerah | 1.500.000.000 | -              |
| 2  |       | 10/3/2022 | JU  | Kas di Kas Daerah | -             | 500.000.000    |
|    |       |           |     |                   |               |                |
|    |       |           |     | Jumlah            | 1.500.000.000 | 500.000.000    |
|    |       |           |     | Saldo             | 1.000.000.000 | -              |

PPK–SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–PPKD : Pemberian Pinjaman sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPKD : BPKAD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 1.5.4.01.01  
Nama Rekening : Pemberian Pinjaman  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD :

Halaman 01

| No | Bukti |           | Ref | Uraian            | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|-----------|-----|-------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal   |     |                   |               |                |
| 1  |       | 10/2/2022 | JU  | Kas di Kas Daerah | 200.000.000   | -              |
| 2  |       | 1/4/2022  | JU  | Kas di Kas Daerah | -             | 100.000.000    |
|    |       |           |     |                   |               |                |
|    |       |           |     | Jumlah            | 200.000.000   | 100.000.000    |
|    |       |           |     | Saldo             | 100.000.000   | -              |

PPK–SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–PPKD : Estimasi Perubahan SAL sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPKD : BPKAD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 3.1.2.05.01  
Nama Rekening : Estimasi Perubahan SAL  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD :

Halaman 01

| No | Bukti |           | Ref | Uraian   | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|-----------|-----|--|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal   |     |  |               |                |
| 1  |       | 10/3/2022 | JM  | Penerimaan Pemb. Pencairan Dana Cadangan       | 500.000.000   | -              |
| 2  |       | 20/3/2022 | JM  | Penerimaan Pemb. Hasil Penjualan BUMD          | 100.000.000   | -              |
| 3  |       | 1/4/2022  | JM  | Penerimaan Pemb. Penerimaan Kembali Piutang    | 100.000.000   | -              |
| 4  |       | 10/4/2022 | JM  | Penerimaan Pemb. Penarikan Dana Bergulir       | 200.000.000   | -              |
| 5  |       | 10/1/2022 | JK  | Pengeluaran Pemb. Pembentukan Dana Cadangan    | -             | 1.500.000.000  |
| 6  |       | 20/1/2022 | JK  | Pengeluaran Pemb. Penyertaan Modal kepada BUMD | -             | 500.000.000    |
| 7  |       | 10/2/2022 | JK  | Pengeluaran Pemb. Pemberian Pinjaman           | -             | 200.000.000    |
| 8  |       | 20/2/2022 | JK  | Pengeluaran Pemb. Dana Bergulir                | -             | 1.000.000.000  |
|    |       |           |     |  |               |                |
|    |       |           |     | Jumlah   | 900.000.000   | 3.200.000.000  |
|    |       |           |     | Saldo  | -             | 2.300.000.000  |

PPK–SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD-PPKD : Penerimaan Pembiayaan  
Pencairan Dana Cadangan sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku  
Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPKD : BPKAD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 6.1.2.01.01  
Nama Rekening : Penerimaan Pembiayaan Pencairan Dana Cadangan  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD :

Halaman 01

| No | Bukti |           | Ref | Uraian                  | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|-----------|-----|-------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal   |     |                         |               |                |
| 1  |       | 10/3/2105 | JM  | Estimasi Penerimaan SAL | -             | 500.000.000    |
|    |       |           |     |                         |               |                |
|    |       |           |     | Jumlah                  | -             | 500.000.000    |
|    |       |           |     | Saldo                   | -             | 500.000.000    |

PPK-SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD-PPKD : Penerimaan Pembiayaan Hasil  
Penjualan BUMD yang Dipisahkan sebagai hasil posting dari pencatatan  
di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPKD : BPKAD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 6.1.3.01.01  
Nama Rekening : Penerimaan Pembiayaan Hasil Penjualan BUMD  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD :

Halaman 01

| No | Bukti |           | Ref | Uraian                  | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|-----------|-----|-------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal   |     |                         |               |                |
| 1  |       | 20/3/2105 | JM  | Estimasi Penerimaan SAL | -             | 100.000.000    |
|    |       |           |     |                         |               |                |
|    |       |           |     | Jumlah                  | -             | 100.000.000    |
|    |       |           |     | Saldo                   | -             | 100.000.000    |

PPK-SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–PPKD : Penerimaan Pembiayaan Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPKD : BPKAD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 6.1.3.01.01  
Nama Rekening : Penerimaan Pembiayaan Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |          | Ref | Uraian                  | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|----------|-----|-------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal  |     |                         |               |                |
| 1  |       | 1/4/2105 | JM  | Estimasi Penerimaan SAL | -             | 100.000.000    |
|    |       |          |     |                         |               |                |
|    |       |          |     | Jumlah                  | -             | 100.000.000    |
|    |       |          |     | Saldo                   | -             | 100.000.000    |

PPK–SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–PPKD : Penerimaan Pembiayaan Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPKD : BPKAD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 6.1.6.06.01  
Nama Rekening : Penerimaan Pembiayaan Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |           | Ref | Uraian                  | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|-----------|-----|-------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal   |     |                         |               |                |
| 1  |       | 10/4/2105 | JM  | Estimasi Penerimaan SAL | -             | 200.000.000    |
|    |       |           |     |                         |               |                |
|    |       |           |     | Jumlah                  | -             | 200.000.000    |
|    |       |           |     | Saldo                   | -             | 200.000.000    |

PPK–SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–PPKD : Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPKD

Kode Rekening

Nama Rekening

Pagu APBD

Pagu perubahan APBD

:

:

:

:

:

BPKAD Kabupaten Kuningan

6.2.1.01.00

Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan

Halaman 01

| No | Bukti |           | Ref | Uraian                  | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|-----------|-----|-------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal   |     |                         |               |                |
| 1  |       | 10/1/2105 | JK  | Estimasi Penerimaan SAL | 1.500.000.000 | -              |
|    |       |           |     |                         |               |                |
|    |       |           |     | Jumlah                  | 1.500.000.000 | -              |
|    |       |           |     | Saldo                   | 1.500.000.000 | -              |

PPK–SKPKD

PPKD

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP.....

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–PPKD : Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal kepada BUMD sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPKD

Kode Rekening

Nama Rekening

Pagu APBD

Pagu perubahan APBD

:

:

:

:

:

BPKAD Kabupaten Kuningan

6.2.2.02.00

Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal kepada BUMD

Halaman 01

| No | Bukti |           | Ref | Uraian                  | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|-----------|-----|-------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal   |     |                         |               |                |
| 1  |       | 20/1/2105 | JK  | Estimasi Penerimaan SAL | 500.000.000   | -              |
|    |       |           |     |                         |               |                |
|    |       |           |     | Jumlah                  | 500.000.000   | -              |
|    |       |           |     | Saldo                   | 500.000.000   | -              |

PPK–SKPKD

PPKD

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP.....

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–PPKD : Pengeluaran Pembiayaan Pemberian Pinjaman Daerah sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

**KABUPATEN KUNINGAN**  
**BUKU BESAR**

| <b>SKPKD</b>               |       | :         | BPKAD Kabupaten Kuningan                         |                         |                    |                   |
|----------------------------|-------|-----------|--|-------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Kode Rekening</b>       |       | :         | 6.2.4.00.00                                      |                         |                    |                   |
| <b>Nama Rekening</b>       |       | :         | Pengeluaran Pembiayaan Pemberian Pinjaman Daerah |                         |                    |                   |
| <b>Pagu APBD</b>           |       | :         |  |                         |                    |                   |
| <b>Pagu perubahan APBD</b> |       | :         |  |                         |                    |                   |
|                            |       |           |  |                         |                    | <b>Halaman 01</b> |
| No                         | Bukti |           | Ref  | Uraian                  | Debet<br>(Rp)      | Kredit<br>(Rp)    |
|                            | Nomor | Tanggal   |  |                         |                    |                   |
| 1                          |       | 10/2/2105 | JK   | Estimasi Penerimaan SAL | 200.000.000        | -                 |
|                            |       |           |  |                         |                    |                   |
|                            |       |           |  | <b>Jumlah</b>           | <b>200.000.000</b> | -                 |
|                            |       |           |  | <b>Saldo</b>            | <b>200.000.000</b> | -                 |

PPK–SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–PPKD : Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

**KABUPATEN KUNINGAN**  
**BUKU BESAR**

| <b>SKPKD</b>               |       | :         | BPKAD Kabupaten Kuningan             |                         |                      |                   |
|----------------------------|-------|-----------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Kode Rekening</b>       |       | :         | 6.2.6.00.00                          |                         |                      |                   |
| <b>Nama Rekening</b>       |       | :         | Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir |                         |                      |                   |
| <b>Pagu APBD</b>           |       | :         |                                      |                         |                      |                   |
| <b>Pagu perubahan APBD</b> |       | :         |                                      |                         |                      |                   |
|                            |       |           |                                      |                         |                      | <b>Halaman 01</b> |
| No                         | Bukti |           | Ref                                  | Uraian                  | Debet<br>(Rp)        | Kredit<br>(Rp)    |
|                            | Nomor | Tanggal   |                                      |                         |                      |                   |
| 1                          |       | 20/2/2105 | JK                                   | Estimasi Penerimaan SAL | 1.000.000.000        | -                 |
|                            |       |           |                                      |                         |                      |                   |
|                            |       |           |                                      | <b>Jumlah</b>           | <b>1.000.000.000</b> | -                 |
|                            |       |           |                                      | <b>Saldo</b>            | <b>1.000.000.000</b> | -                 |

PPK–SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....



**Langkah IV : Menyusun Neraca Saldo**

Setelah melakukan posting seluruh pencatatan dalam buku besar maka kemudian Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD membuat neraca saldo sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Penyusunan neraca saldo oleh Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD dilakukan secara triwulanan. Neraca saldo disusun dengan cara memindahkan saldo-saldo yang ada di tiap buku besar ke dalam Neraca Saldo. Contoh Neraca Saldo dari hasil pencatatan dan posting contoh transaksi keuangan diatas adalah sebagai berikut :

**KABUPATEN KUNINGAN  
NERACA SALDO  
PER TANGGAL 31 Desember 2022**

| SKPKD         |   |   |    |    | : BPKAD  |               |               |
|---------------|---|---|----|----|--|---------------|---------------|
| Kode Rekening |   |   |    |    | Uraian   | Jumlah        |               |
|               |   |   |    |    |  | Debit         | Kredit        |
| 1             |   |   |    |    | 2  | 3             | 4             |
| 1             | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas di Kas daerah  | -             | 2.400.000.000 |
| 1             | 1 | 2 | 02 | 01 | Deposito Jangka Pendek   | 100.000.000   | -             |
| 1             | 1 | 3 | 00 | 00 | Aset Tetap   | -             | 100.000.000   |
| 1             | 2 | 1 | 04 | 01 | Dana Bergulir  | 900.000.000   | -             |
| 1             | 2 | 2 | 01 | 02 | Penyertaan Modal kepada BUMD   | 400.000.000   | -             |
| 1             | 4 | 1 | 01 | 01 | Dana Cadangan  | 1.000.000.000 | -             |
| 1             | 5 | 4 | 01 | 01 | Pemberian Pinjaman   | 100.000.000   | -             |
| 3             | 1 | 2 | 05 | 01 | Estimasi Perubahan SAL   | -             | 2.300.000.000 |
| 6             | 1 | 2 | 01 | 01 | Penerimaan Pembiayaan Pencairan Dana Cadangan                              | -             | 500.000.000   |
| 6             | 1 | 3 | 01 | 01 | Penerimaan Pembiayaan Hasil Penjualan BUMD                                 | -             | 100.000.000   |
| 6             | 1 | 5 | 02 | 01 | Penerimaan Pembiayaan Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah | -             | 100.000.000   |
| 6             | 1 | 6 | 06 | 01 | Penerimaan Pembiayaan Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir           | -             | 200.000.000   |
| 6             | 2 | 1 | 01 | 00 | Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan                           | 1.500.000.000 | -             |
| 6             | 2 | 2 | 02 | 00 | Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal kepada BUMD                        | 500.000.000   | -             |
| 6             | 2 | 4 | 00 | 00 | Pengeluaran Pembiayaan Pemberian Pinjaman Daerah                           | 200.000.000   | -             |
| 6             | 2 | 6 | 00 | 00 | Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir                                       | 1.000.000.000 | -             |
|               |   |   |    |    |  |               |               |
| Jumlah        |   |   |    |    |  | 5.700.000.000 | 5.700.000.000 |

PPK-SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

## **SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI KEWAJIBAN DI SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (SKPKD-PPKD) YANG MENCATAT TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH**

Bagian ini menjelaskan Sistem dan Prosedur Akuntansi Kewajiban di Pemerintah Kabupaten Kuningan untuk Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mencatat transaksi kewajiban pemerintah daerah.

### **KEBIJAKAN UMUM**

Prosedur akuntansi kewajiban pada SKPKD-PPKD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan kewajiban dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD khususnya yang tertuang dalam anggaran pembiayaan pada DPA-PPKD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Ruang lingkup Kewajiban SKPKD-PPKD yang dimaksud disini adalah kewajiban yang terkait dengan utang perhitungan pihak ketiga, utang bunga, bagian lancar utang jangka panjang, pendapatan diterima dimuka, utang belanja dan pembiayaan yaitu pinjaman dalam negeri, pinjaman luar negeri, dan penerimaan utang jangka panjang lainnya.

Sistem dan prosedur akuntansi kewajiban oleh SKPKD-PPKD merupakan salah satu sarana untuk menunjang pertanggungjawaban APBD. Sistem dan prosedur akuntansi ini disusun berdasarkan kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

### **PIHAK-PIHAK TERKAIT**

Berbagai pihak/fungsi yang terkait dalam proses akuntansi kewajiban pada SKPKD-PPKD beserta tugas-tugasnya adalah :

1. Pemerintah Lainnya

Pemerintah Lainnya adalah entitas pemerintah selain Pemerintah Kabupaten Kuningan yang memberikan pembiayaan kepada Pemerintah Kabupaten Kuningan seperti pemberian utang/pinjaman dan pengembalian utang/pinjaman tersebut. Semua obyek pembiayaan tersebut merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Kuningan. Pihak ini adalah pemberi dokumen kepada Kuasa BUD.

2. Pihak Lain

Pihak Lain adalah pihak yang memberikan pembiayaan kepada Pemerintah Kabupaten Kuningan misalnya Bank/Lembaga Keuangan/Obligator yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah Kabupaten Kuningan. Semua obyek pembiayaan tersebut merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Kuningan. Pihak ini adalah pemberi dokumen kepada Kuasa BUD.

3. Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD)

Dalam pelaksanaan prosedur ini, Kuasa BUD memiliki tugas menyiapkan dokumen-dokumen atas transaksi dengan pemerintah lain dan atau pihak lain yang terkait dengan proses pelaksanaan akuntansi kewajiban SKPKD-PPKD. Nota Debet beserta dokumen pengakuan utang atau hanya dokumen pengakuan utang dan Nota Kredit beserta dokumen atau hanya dokumen yang terkait pelunasan utang akan diserahkan kepada PPK-SKPKD.

4. Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD

Dalam pelaksanaan prosedur ini, Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD bekerja mencatat transaksi terkait kewajiban SKPKD-PPKD, memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Menerima bukti-bukti transaksi terkait kewajiban SKPKD-PPKD dari Kuasa BUD dan menganalisa data dan informasi akuntansi dari bukti transaksi tersebut;
- b. Mencatat transaksi-transaksi pemerintah daerah berdasarkan bukti-bukti yang terkait kewajiban SKPKD-PPKD yang

merupakan transaksi DPA-PPKD ke buku jurnal;

- c. Memposting jurnal-jurnal terkait kewajiban SKPKD-PPKD transaksi-transaksi pemerintah daerah ke dalam buku besarnya masing-masing;
  - d. Menyusun neraca saldo untuk persiapan penyusunan laporan keuangan, yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan; dan
  - e. Menyerahkan buku jurnal, buku besar dan neraca saldo kepada PPK-SKPKD untuk diperiksa dan ditandatangani.
5. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPKD) : **Sekretaris Badan atau Koordinator/** Kepala Sub Bagian Keuangan BPKAD.

Dalam pelaksanaan prosedur ini, PPK-SKPKD memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Bertanggungjawab atas sistem akuntansi SKPKD-PPKD terkait transaksi kewajiban SKPKD-PPKD yang dipimpinnya;
  - b. Memeriksa dan menandatangani hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Tenaga Akuntansi PPK-SKPKD setiap bulannya seperti Buku Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo SKPKD-PPKD yang mencatat transaksi pemerintah daerah setiap triwulan; dan
  - c. Menyerahkan Buku Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo SKPKD-PPKD yang mencatat transaksi pemerintah daerah setiap triwulan kepada PPKD selaku pengguna anggaran untuk disetujui.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (tidak termasuk Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan).

Dalam pelaksanaan prosedur ini, PPKD memiliki tugas sebagai pengguna anggaran yang menyetujui Buku Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo yang diserahkan PPK-SKPKD setiap triwulan.

## **DOKUMEN YANG DIGUNAKAN**

1. Bukti Setoran Bank merupakan formulir bukti melakukan setoran ke Rekening Umum Kas Daerah;
2. Bukti transfer merupakan slip bukti melakukan transfer dari suatu rekening ke rekening lainnya;
3. Nota Kredit merupakan bukti transaksi penerimaan uang di rekening kas umum daerah;
4. Nota Debit merupakan bukti transaksi pengeluaran uang di rekening kas umum daerah.
5. Surat Tanda Setoran selanjutnya disebut STS adalah bukti yang dibuat untuk melakukan penyetoran uang ke Kas Daerah.
6. Surat Perintah Pencairan Dana Langsung yang selanjutnya disebut SP2D-LS adalah Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan Kuasa Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM-LS;
7. Bukti pengakuan Transfer PPKD seperti Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.
8. Bukti pengakuan Kewajiban PPKD seperti :
  - a. Surat Perjanjian Hutang/Surat Tagihan Hutang untuk pengakuan Utang Bunga;
  - b. STS, Nota Kredit, Surat Perjanjian Sewa Aset Pemda dan Bukti Memorial untuk Pendapatan Diterima Dimuka;
  - c. Surat Keputusan Kepala Daerah (SK KDH) tentang Belanja Subsidi; Belanja Bantuan Sosial; dan Belanja Tak Terduga;
  - d. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NHPD) dan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Belanja Hibah; dan
  - e. Disposisi Kepala Daerah tentang Tanggap Darurat Bencana
9. Surat Perintah BUD adalah surat yang diterbitkan BUD untuk mengeluarkan kas untuk PFK.
10. Bukti Memorial adalah bukti transaksi yang digunakan untuk

mencatat transaksi non keuangan.

### **BUKU DAN ATAU FORMULIR YANG DIGUNAKAN**

Buku dan atau formulir yang digunakan dalam pelaksanaan prosedur akuntansi kewajiban di SKPKD ini paling tidak terdiri dari :

1. Buku Jurnal Umum (JU)

Merupakan buku jurnal yang digunakan untuk melakukan pencatatan akuntansi atas transaksi kewajiban SKPKD-PPKD yang berbasis akrual terkait penyusunan LO dan Neraca.

2. Buku Jurnal Penerimaan Kas (JM)

Merupakan buku jurnal yang digunakan untuk melakukan pencatatan akuntansi atas transaksi penerimaan kas yang berasal dari transaksi penerimaan pembiayaan yang terkait pengakuan utang SKPKD-PPKD. Pada umumnya buku jurnal penerimaan kas digunakan untuk mencatat transaksi basis kas terkait penyusunan LRA dan LAK.

3. Buku Jurnal Pengeluaran Kas (JK)

Merupakan buku jurnal yang digunakan untuk melakukan pencatatan akuntansi atas transaksi pengeluaran kas untuk transaksi pengeluaran pembiayaan yang terkait pelunasan utang SKPKD-PPKD. Pada umumnya buku jurnal pengeluaran kas digunakan untuk mencatat transaksi basis kas terkait penyusunan LRA dan LAK.

4. Buku Besar (BB)

Merupakan buku yang digunakan untuk menampung pencatatan hasil posting transaksi dari buku jurnal. Buku besar ini merupakan pencatatan akuntansi atas seluruh transaksi untuk suatu rekening/akun per jenis atau obyek. Jadi setiap rekening/akun per jenis atau objek mempunyai buku besar tersendiri.

5. Buku Besar Pembantu (BP)

Buku besar dapat dilengkapi dengan buku besar pembantu sebagai alat uji silang dan kelengkapan informasi rekening/akun tertentu. Buku besar pembantu berisi rincian akun (rincian obyek) yang telah dicatat dalam buku besar. Jika dirasakan informasi dalam buku besar sudah mencukupi maka buku besar pembantu tidak perlu dibuat lagi.

6. Neraca Saldo (NS)

Merupakan formulir yang mencatat nilai saldo setiap rekening/akun per rincian objek sehingga diketahui jumlah total dari seluruh rekening/akun.

## **KERANGKA SISTEM**

Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD menerima bukti-bukti transaksi kewajiban SKPKD-PPKD dari Kuasa BUD melalui PPK-SKPKD. Bukti-bukti transaksi kewajiban SKPKD-PPKD dapat berupa Bukti Setoran Bank, Bukti transfer, Nota Kredit, Nota Debet, STS, SP2D-LS, SK KDH, NPHD, Disposisi Kepala Daerah, Surat Perintah BUD, dan Bukti Memorial. Pada saat bukti transaksi kewajiban SKPKD-PPKD tersebut telah diterima maka Tenaga Akuntansi PPK-SKPKD kemudian melakukan pencatatan akuntansi dalam :

1. Buku jurnal umum, untuk mencatat pengakuan kewajiban baik yang sudah diakui (*accrued*) atau ditangguhkan (*deferral*) maupun yang sudah direalisasikan (*realized*) baik saat penerimaan maupun pelunasan kewajiban terkait penyusunan LO dan Neraca.
2. Buku jurnal penerimaan kas, untuk mencatat penerimaan kas dari realisasi anggaran penerimaan pembiayaan terkait penyusunan LRA dan LAK.
3. Buku jurnal pengeluaran kas, untuk mencatat pengeluaran kas dari realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan terkait penyusunan LRA dan LAK.

Pencatatan transaksi atas kewajiban SKPKD-PPKD dilakukan pada saat terjadinya transaksi dan atau pada saat bukti transaksi tersebut diterima namun pengakuan transaksi tetap pada tanggal bukti transaksi. Setelah seluruh transaksi dicatat dalam buku jurnal maka Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD kemudian melakukan posting ke buku besar. Setelah posting dari buku jurnal ke buku besar selesai dilakukan maka kemudian Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD menyusun Neraca Saldo sebagai dasar pembuatan Laporan Keuangan untuk setiap triwulan yang diserahkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah triwulan berakhir kepada PPK-SKPKD.

## **ALUR PROSEDUR TEKNIS**

Teknis pelaksanaan sistem dan prosedur akuntansi kewajiban di SKPKD-PPKD ini adalah sebagai berikut :

### **Langkah I : Penerimaan Bukti Transaksi**

Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD menerima bukti-bukti yang terkait dengan kewajiban di SKPKD-PPKD dari Kuasa BUD melalui PPK-SKPKD. Bukti tersebut bisa menunjukkan adanya pengakuan aset, atau penambahan pengakuan atas kewajiban yang telah ada maupun berupa pengurangan kewajiban yang telah ada telah dilunasi pemerintah daerah atau karena sebab lainnya. Berdasarkan perolehan bukti-bukti transaksi tersebut kemudian Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD membuat bukti memorial sebagai dasar dilakukannya penjurnalan di Buku Jurnal Umum. Sebagai contoh : misalkan diketahui bahwa selama tahun 2022, telah terjadi transaksi yang terkait dengan Pemerintah daerah di SKPKD-PPKD sebagai berikut (asumsi tanggal bukti transaksi sama dengan tanggal penerimaan bukti transaksi) :

5 Februari 2022    Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD menerima SP2D LS dari Kuasa BUD melalui PPK-SKPKD yang dibayarkan kepada pihak ketiga yang menyatakan pengakuan utang perhitungan pihak ketiga (PFK) atas PPN senilai Rp 10.000.000,- dan PPh 22 sebesar Rp1.000.000,-.



|               |   |
|---------------|---|
| 31 Maret 2022 | Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD menerima perjanjian utang dengan pihak ketiga misalnya Bank atau berdasarkan tagihan bunga dari kreditur dari Kuasa BUD melalui PPK-SKPKD yang menyatakan beban bunga sebesar Rp 200.000.000,-.   |
| 1 April 2022  | Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD menerima STS dan Nota Kredit serta perjanjian sewa menyewa ruangan gedung pemda dari Kuasa BUD melalui PPK-SKPKD yang menyatakan pendapatan diterima dimuka atas sewa ruangan gedung pemda selama 5 tahun sebesar Rp 60.000.000,- .   |
| 10 April 2022 | Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD menerima Surat Keputusan Kepala Daerah/Perjanjian/Dokumen yang dipersamakan tentang pemberian subsidi kepada entitas lain seperti BUMD dari Kuasa BUD melalui PPK-SKPKD yang menyatakan beban subsidi sebesar Rp 500.000.000,-  |
| 1 Mei 2022    | Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD menerima Nota Kredit beserta perjanjian peminjaman ke Bank Daerah dari Kuasa BUD melalui PPK-SKPKD yang menyatakan penerimaan pinjaman sebesar Rp 10.000.000.000,- yang dicicil selama 5 tahun (@Rp 2.000.000.000,-).   |
| 30 Mei 2022   | Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD menerima Nota Kredit beserta perjanjian peminjaman ke Lembaga Donor Internasional yang diteruspinjamkan melalui Kementerian Keuangan dari Kuasa BUD melalui PPK-SKPKD yang menyatakan penerimaan pinjaman luar negeri sebesar Rp 500.000.000.000,- yang dicicil selama 20 tahun (@Rp 25.000.000.000,-). |
| 10 Juni 2022  | Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD menerima Surat Perintah BUD dan Nota Debet dari Kuasa BUD melalui PPK-SKPKD yang menyatakan pelunasan utang perhitungan pihak ketiga (PFK) atas PPN senilai Rp  |

|                 |   |
|-----------------|---|
|                 | 10.000.000,- dan PPh 22 sebesar Rp1.000.000,-   |
| 11 Juli 2022    | Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD menerima SP2D LS dan perjanjian utang dengan pihak ketiga misalnya Lembaga Keuangan bukan Bank atau berdasarkan tagihan bunga dari kreditur tersebut dari Kuasa BUD melalui PPK-SKPKD yang menyatakan pembayaran beban bunga pinjaman sebesar Rp 200.000.000,-. |
| 15 Juli 2022    | Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD menerima SP2D LS dan Surat Keputusan Kepala Daerah/Perjanjian/Dokumen yang dipersamakan tentang pemberian subsidi kepada entitas lain seperti BUMD dari Kuasa BUD melalui PPK-SKPKD yang menyatakan pembayaran beban subsidi sebesar Rp 500.000.000,-.          |
| 19 Agustus 2022 | Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD menerima SP2D LS dan perjanjian utang dengan Bank atau berdasarkan tagihan cicilan pokok hutang pinjaman dari kreditur tersebut dari Kuasa BUD melalui PPK-SKPKD yang menyatakan pembayaran pokok pinjaman sebesar Rp 250.000.000,-.                            |
| 31 Des 2022     | Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD menerima perjanjian sewa menyewa ruangan gedung pemda dari Kuasa BUD melalui PPK-SKPKD yang menyatakan pendapatan atas sewa ruangan gedung pemda selama 1 April – 31 Desember 2022 sebesar Rp 9.000.000,-.  |
| 31 Des 2022     | Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD menerima perjanjian peminjaman ke Bank Daerah pada tanggal 1 Mei 2022 dari Kuasa BUD melalui PPK-SKPKD yang menyatakan bagian lancar utang jangka panjang sebesar Rp 1.500.000.000,-.   |
| 31 Des 2022     | Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD menerima perjanjian peminjaman ke Lembaga Donor Internasional yang diteruskanpinjamkan melalui Kementerian Keuangan pada tanggal 30 Mei 2022 dari Kuasa BUD melalui   |

PPK-SKPKD yang menyatakan bagian lancar utang jangka panjang sebesar Rp 14.583.333,33.

Contoh sederhana tersebut diatas diberikan sebagai bahan untuk mempermudah penjelasan sistem dan prosedur akuntansi kewajiban di SKPKD-PPKD ini. Tetapi contoh tersebut diatas tidak menunjukkan semua bentuk transaksi yang secara nyata terjadi.

**Langkah II : Menjurnal Transaksi Kewajiban**

Berdasarkan bukti-bukti transaksi kewajiban tersebut kemudian Tenaga Akuntansi PPK-SKPKD mencatat transaksi tersebut di buku jurnal. Pencatatan akuntansi dilakukan kedalam buku jurnal sesuai dengan jenis transaksi yang terjadi. Atas transaksi **kewajiban di SKPKD-PPKD** maka dilakukan pencatatan dalam Buku Jurnal sebagai berikut :

- 1. “Kas di Kas Daerah sesuai dengan jenis sampai rincian obyeknya” di debit dan “Kewajiban sesuai dengan jenis sampai rincian obyeknya” di kredit untuk penerimaan kas yang menjadi kewajiban pemerintah daerah seperti :
  - a. Transaksi untuk **penerimaan kas atas utang perhitungan fihak ketiga (PFK)**, dilakukan penjurnalan di buku jurnal umum sebagai berikut :

|                                | Debit       | Kredit      |
|--------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Kas di Kas Daerah</b>       | <b>xxxx</b> |             |
| <b>Penerimaan Potongan PFK</b> |             | <b>xxxx</b> |

- b. Transaksi untuk **penerimaan kas dari pendapatan diterima dimuka**, dilakukan penjurnalan di buku jurnal umum sebagai berikut :

|                                   | Debit       | Kredit      |
|-----------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Kas di Kas Daerah</b>          | <b>xxxx</b> |             |
| <b>Pendapatan diterima dimuka</b> |             | <b>xxxx</b> |

- c. Transaksi untuk **penerimaan pinjaman jangka panjang**, dilakukan penjurnalan di buku jurnal umum sebagai berikut :

|                                      | Debit       | Kredit      |
|--------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Kas di Kas Daerah</b>             | <b>xxxx</b> |             |
| <b>Utang Pinjaman Jangka Panjang</b> |             | <b>xxxx</b> |

2. Kemudian untuk mencatat realisasi anggaran berbasis kas dicatat dalam Buku Jurnal Penerimaan kas dengan melakukan jurnal, “Estimasi Perubahan SAL” di Debit dan “Akun Penerimaan Pembiayaan sesuai jenisnya” di kredit, sebagai berikut :

|                                   | Debit       | Kredit      |
|-----------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Estimasi Perubahan SAL</b>     | <b>xxxx</b> |             |
| <b>Penerimaan Pembiayaan_____</b> |             | <b>xxxx</b> |

3. “Beban sesuai dengan jenis sampai rincian obyeknya” di debit dan “Kewajiban sesuai dengan jenis sampai rincian obyeknya” di kredit untuk pengakuan kewajiban pemerintah daerah berdasarkan bukti transaksi tertentu seperti :

- a. Transaksi untuk **pengakuan utang bunga pinjaman**, dilakukan penjurnalan di buku jurnal umum sebagai berikut :

|                             | Debit       | Kredit      |
|-----------------------------|-------------|-------------|
| <b>Beban Bunga Pinjaman</b> | <b>xxxx</b> |             |
| <b>Utang Bunga Pinjaman</b> |             | <b>xxxx</b> |

- b. Transaksi untuk **pengakuan utang belanja berdasarkan dokumen tertentu**, dilakukan penjurnalan di buku jurnal umum sebagai berikut :

|                            | Debit       | Kredit      |
|----------------------------|-------------|-------------|
| <b>Beban_____</b>          | <b>xxxx</b> |             |
| <b>Utang Belanja _____</b> |             | <b>xxxx</b> |

4. “Kewajiban sesuai dengan jenis sampai rincian obyeknya” di debit dan “Kas di Kas Daerah” di kredit untuk pelunasan kewajiban seperti :

- a. Transaksi untuk **pengeluaran kas atas pembayaran utang perhitungan fihak ketiga (PFK)**, dilakukan penjurnalan di buku jurnal umum sebagai berikut :

- |  |   |       |        |
|--|---|-------|--------|
|  |   | Debit | Kredit |
|  | Utang Perhitungan Pihak Ketiga<br>(PFK) | xxxx  |        |
|  | Kas di Kas Daerah                       |       | xxxx   |
- b. Transaksi untuk **pembayaran utang bunga pinjaman**, dilakukan penjurnalan di buku jurnal umum sebagai berikut :

|  |                      |       |        |
|--|----------------------|-------|--------|
|  |                      | Debit | Kredit |
|  | Utang Bunga Pinjaman | xxxx  |        |
|  | Kas di Kas Daerah    |       | xxxx   |

- c. Transaksi untuk **pembayaran utang belanja berdasarkan dokumen tertentu**, dilakukan penjurnalan di buku jurnal umum sebagai berikut :

|  |                     |       |        |
|--|---------------------|-------|--------|
|  |                     | Debit | Kredit |
|  | Utang Belanja _____ | xxxx  |        |
|  | Kas di Kas Daerah   |       | xxxx   |

- d. Transaksi untuk **pembayaran cicilan pokok pinjaman jangka panjang**, dilakukan penjurnalan di buku jurnal umum sebagai berikut :

|  |                                    |       |        |
|--|------------------------------------|-------|--------|
|  |                                    | Debit | Kredit |
|  | Bagian Lancar Utang Jangka Panjang | xxxx  |        |
|  | Kas di Kas Daerah                  |       | xxxx   |

5. Kemudian untuk mencatat realisasi anggaran berbasis kas dicatat dalam Buku Jurnal Pengeluaran kas dengan melakukan jurnal, “Pengeluaran Pembiayaan” di Debit dan “Estimasi Perubahan SAL sesuai jenisnya” di kredit, sebagai berikut:

|  |                             |       |        |
|--|-----------------------------|-------|--------|
|  |                             | Debit | Kredit |
|  | Pengeluaran Pembiayaan_____ | xxxx  |        |
|  | Estimasi Perubahan SAL      |       | xxxx   |

6. “Kewajiban jangka panjang sesuai dengan jenis sampai rincian obyeknya” di debit dan “Kewajiban jangka pendek” di kredit untuk transaksi seperti :

- a. Transaksi untuk **pengakuan reklasifikasi utang pinjaman jangka panjang ke bagian lancar utang pinjaman jangka panjang**, dilakukan penjurnalan di buku jurnal umum sebagai berikut :

|                                | Debit       | Kredit      |
|--------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Utang Pinjaman</b>          |             |             |
| <b>Jangka Panjang</b>          | <b>xxxx</b> |             |
| <b>Bagian Lancara Utang</b>    |             |             |
| <b>Pinjaman Jangka Panjang</b> |             | <b>xxxx</b> |

7. “Kewajiban sesuai dengan jenis sampai rincian obyeknya” di debit dan “Pendapatan” di kredit untuk pengakuan pendapatan dari pendapatan yang ditangguhkan seperti :

- a. Transaksi untuk **pengakuan bagian pendapatan atas pendapatan diterima dimuka**, dilakukan penjurnalan di buku jurnal umum sebagai berikut :

|                                   | Debit       | Kredit      |
|-----------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Pendapatan diterima dimuka</b> | <b>xxxx</b> |             |
| <b>Pendapatan Sewa-LO</b>         |             | <b>xxxx</b> |

Berdasarkan uraian penjurnalan dan contoh transaksi tersebut diatas maka Tenaga Akuntansi di PPK–SKPKD yang mencatat transaksi Pemda melakukan pencatatan dalam buku jurnal sebagai berikut :

**Pertama**, penjurnalan untuk penerimaan SP2D LS dari Kuasa BUD melalui PPK-SKPKD yang dibayarkan kepada pihak ketiga yang menyatakan potongan perhitungan fihak ketiga (PFK) atas PPN senilai Rp 10.000.000,- dan PPh 22 sebesar Rp1.000.000,- pada tanggal 5 Februari 2022, dicatat di jurnal umum sebagai berikut :

|                 |             |                                  | Debit      | Kredit     |
|-----------------|-------------|----------------------------------|------------|------------|
| 5 Februari 2022 | 1.1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah                | 11.000.000 |            |
|                 | 7.1.2.01.02 | Penerimaan Potongan PPh Pasal 22 |            | 10.000.000 |
|                 | 7.1.2.01.04 | Penerimaan Potongan PPN          |            | 1.000.000  |

Apabila sampai dengan akhir tahun belum disetor ke Kas Negara maka akan dilakukan jurnal penyesuaian sebagai berikut :

|                  |             |                                  | Debit      | Kredit     |
|------------------|-------------|----------------------------------|------------|------------|
| 31 Desember 2022 | 7.1.2.01.02 | Penerimaan Potongan PPh Pasal 22 | 11.000.000 |            |
|                  | 7.1.2.01.04 | Penerimaan Potongan PPN          | 11.000.000 |            |
|                  | 2.1.1.03.02 | Utang PPh Pasal 22               |            | 10.000.000 |
|                  | 2.1.1.04.01 | Utang PPN                        |            | 1.000.000  |

**Kedua,** penjurnalan untuk penerimaan perjanjian utang dengan pihak ketiga misalnya Bank atau berdasarkan tagihan bunga dari kreditur dari Kuasa BUD melalui PPK-SKPKD yang menyatakan beban bunga sebesar Rp 200.000.000,- pada tanggal 31 Maret 2022, dicatat di jurnal umum sebagai berikut :

|               |             |   | Debit       | Kredit      |
|---------------|-------------|---|-------------|-------------|
| 31 Maret 2022 | 9.1.3.01.03 | Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank | 200.000.000 |             |
|               | 2.1.2.04.01 | Utang Bunga Kepada Bank                                 |             | 200.000.000 |

**Ketiga,** penjurnalan untuk penerimaan STS dan Nota Kredit serta perjanjian sewa menyewa ruangan gedung pemda dari Kuasa BUD melalui PPK-SKPKD yang menyatakan pendapatan diterima dimuka atas sewa ruangan gedung pemda selama 5 tahun sebesar Rp 60.000.000,- pada tanggal 1 April 2022, dicatat di jurnal umum sebagai berikut :

|              |             |                                    | Debit      | Kredit     |
|--------------|-------------|------------------------------------|------------|------------|
| 1 April 2022 | 1.1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah                  | 60.000.000 |            |
|              | 2.1.4.04.01 | Pendapatan diterima dimuka lainnya |            | 60.000.000 |

Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD juga mencatat transaksi realisasi anggaran pendapatan terkait pembentukan kewajiban dengan melakukan pencatatan dalam buku jurnal penerimaan kas dengan jurnal sebagai berikut :

|              |             |   | Debit      | Kredit     |
|--------------|-------------|---|------------|------------|
| 1 April 2022 | 3.1.2.05.01 | Estimasi Perubahan SAL                      | 60.000.000 |            |
|              | 4.1.2.02.01 | Retribusi Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LRA |            | 60.000.000 |

**Keempat,** penjurnalan untuk penerimaan Surat Keputusan Kepala Daerah/Perjanjian/Dokumen yang dipersamakan tentang pemberian subsidi kepada entitas lain seperti BUMD dari Kuasa BUD melalui PPK-SKPKD yang menyatakan beban subsidi sebesar Rp 500.000.000,- pada tanggal 10 April 2022, dicatat di jurnal umum sebagai berikut :

|               |             |                                   | Debit       | Kredit      |
|---------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| 10 April 2022 | 9.1.4.01.02 | Beban Subsidi kepada BUMD         | 500.000.000 |             |
|               | 2.2.1.01.01 | Utang Belanja Subsidi kepada BUMD |             | 500.000.000 |

**Kelima,** penjurnalan untuk penerimaan Nota Kredit beserta perjanjian peminjaman ke Bank Daerah dari Kuasa BUD melalui PPK-SKPKD yang menyatakan penerimaan pinjaman sebesar Rp 10.000.000.000,- yang dicicil selama 5 tahun (@Rp 2.000.000.000,-) pada tanggal 1 Mei 2022, dicatat di jurnal umum sebagai berikut :

|            |             |                                     | Debit          | Kredit         |
|------------|-------------|-------------------------------------|----------------|----------------|
| 1 Mei 2022 | 1.1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah                   | 10.000.000.000 |                |
|            | 2.2.1.01.01 | Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan |                | 10.000.000.000 |

Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD juga mencatat transaksi realisasi anggaran penerimaan pembiayaan terkait pembentukan kewajiban dengan melakukan pencatatan dalam buku jurnal penerimaan kas dengan jurnal sebagai berikut :

|            |             |   | Debit          | Kredit         |
|------------|-------------|---|----------------|----------------|
| 1 Mei 2022 | 3.1.2.05.01 | Estimasi Perubahan SAL                          | 10.000.000.000 |                |
|            | 6.1.4.03.01 | Penerimaan Pembiayaan Pinjaman Daerah dari Bank |                | 10.000.000.000 |

**Keenam,** penjurnalan untuk penerimaan Nota Kredit beserta perjanjian peminjaman ke Lembaga Donor Internasional yang diteruspinjamkan melalui Kementerian Keuangan dari Kuasa BUD melalui PPK-SKPKD yang menyatakan penerimaan pinjaman luar negeri sebesar Rp 500.000.000.000,- yang dicicil selama 20 tahun (@Rp 25.000.000.000,-) pada tanggal 30 Mei 2022, dicatat di jurnal umum sebagai berikut :

|             |             |                              | Debit           | Kredit          |
|-------------|-------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| 30 Mei 2022 | 1.1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah            | 500.000.000.000 |                 |
|             | 2.2.2.01.01 | Utang Jangka Panjang Lainnya |                 | 500.000.000.000 |

Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD juga mencatat transaksi realisasi anggaran penerimaan pembiayaan terkait pembentukan kewajiban dengan melakukan pencatatan dalam buku jurnal penerimaan kas dengan jurnal sebagai berikut :

Debit Kredit



|             |             |  |                 |                 |
|-------------|-------------|--|-----------------|-----------------|
| 30 Mei 2022 | 3.1.2.05.01 | Estimasi Perubahan SAL                     | 500.000.000.000 |                 |
|             | 6.1.4.07.01 | Penerimaan Pembiayaan Pinjaman Luar Negeri |                 | 500.000.000.000 |

**Ketujuh,** penjurnalan untuk penerimaan Surat Perintah BUD dan Nota Debet dari Kuasa BUD melalui PPK-SKPKD yang menyatakan pelunasan utang perhitungan fihak ketiga (PFK) atas PPN senilai Rp 10.000.000,- dan PPh 22 sebesar Rp1.000.000,- pada tanggal 10 Juni 2022, dicatat di jurnal umum sebagai berikut :

|              |             |                             | Debit      | Kredit     |
|--------------|-------------|-----------------------------|------------|------------|
| 10 Juni 2022 | 7.2.2.01.02 | Pengeluaran Potongan PPh 22 | 10.000.000 |            |
|              | 7.2.2.01.04 | Pengeluaran Potongan PPN    | 1.000.000  |            |
|              | 1.1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah           |            | 11.000.000 |

Pada akhir tahun dilakukan jurnal penyesuaian untuk menghapus saldo utang sebagai berikut :

|             |             |                                   | Debit      | Kredit     |
|-------------|-------------|-----------------------------------|------------|------------|
| 31 Des 2022 | 2.1.1.03.02 | Utang PPh Pasal 22                | 11.000.000 |            |
|             | 2.1.1.04.01 | Utang PPN                         | 11.000.000 |            |
|             | 7.2.2.01.02 | Pengeluaran Potongan PPh Pasal 22 |            | 10.000.000 |
|             | 7.2.2.01.04 | Pengeluaran Potongan PPN          |            | 1.000.000  |

**Kedelapan,** penjurnalan untuk penerimaan SP2D LS dan perjanjian utang dengan pihak ketiga misalnya Lembaga Keuangan bukan Bank atau berdasarkan tagihan bunga dari kreditur tersebut dari Kuasa BUD melalui PPK-SKPKD yang menyatakan pembayaran beban bunga pinjaman sebesar Rp 200.000.000,- pada tanggal 11 Juli 2022, dicatat di jurnal umum sebagai berikut :

|              |             |                         | Debit       | Kredit      |
|--------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|
| 11 Juli 2022 | 2.1.2.04.01 | Utang Bunga kepada Bank | 200.000.000 |             |
|              | 1.1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah       |             | 200.000.000 |

Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD juga mencatat transaksi realisasi anggaran belanja terkait pembentukan kewajiban sebelumnya dengan melakukan pencatatan dalam buku jurnal pengeluaran kas dengan jurnal sebagai berikut :

|              |             |   | Debit       | Kredit      |
|--------------|-------------|---|-------------|-------------|
| 11 Juli 2022 | 5.1.2.01.03 | Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank | 200.000.000 |             |
|              | 3.1.2.05.01 | Estimasi Perubahan SAL                                    |             | 200.000.000 |

**Kesembilan,** penjurnalan untuk penerimaan SP2D LS dan Surat Keputusan Kepala Daerah/Perjanjian/Dokumen yang dipersamakan tentang pemberian subsidi kepada entitas lain seperti BUMD dari Kuasa BUD melalui PPK-SKPKD yang menyatakan pembayaran beban subsidi sebesar Rp 500.000.000,- pada tanggal 15 Juli 2022, dicatat di jurnal umum sebagai berikut :

|              |             |                                   | Debit       | Kredit      |
|--------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| 15 Juli 2022 | 2.2.1.01.01 | Utang Belanja Subsidi kepada BUMD | 500.000.000 |             |
|              | 1.4.1.01.01 | Kas di Kas Daerah                 |             | 500.000.000 |

Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD juga mencatat transaksi realisasi anggaran belanja terkait pembentukan kewajiban sebelumnya dengan melakukan pencatatan dalam buku jurnal pengeluaran kas dengan jurnal sebagai berikut :

|              |             |                                   | Debit       | Kredit      |
|--------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| 15 Juli 2022 | 5.1.3.01.01 | Belanja Subsidi kepada Perusahaan | 500.000.000 |             |
|              | 3.1.2.05.01 | Estimasi Perubahan SAL            |             | 500.000.000 |

**Kesepuluh,** penjurnalan untuk penerimaan SP2D LS dan perjanjian utang dengan Bank atau berdasarkan tagihan cicilan pokok hutang pinjaman dari kreditur tersebut dari Kuasa BUD melalui PPK-SKPKD yang menyatakan pembayaran pokok pinjaman sebesar Rp 250.000.000,- pada tanggal 19 Agustus 2022, dicatat di jurnal umum sebagai berikut :

|                 |             |   | Debit       | Kredit      |
|-----------------|-------------|---|-------------|-------------|
| 19 Agustus 2022 | 2.1.3.01.01 | Bagian Lancar Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan | 250.000.000 |             |
|                 | 1.2.2.01.02 | Kas di Kas Daerah                                 |             | 250.000.000 |

Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD juga mencatat transaksi realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan terkait pelunasan kewajiban dengan melakukan pencatatan dalam buku jurnal pengeluaran kas dengan jurnal sebagai berikut :

|                 |             |  | Debit       | Kredit      |
|-----------------|-------------|--|-------------|-------------|
| 19 Agustus 2022 | 6.2.3.03.01 | Pengeluaran<br>Pembiayaan<br>Pembayaran Pokok<br>Utang yang jatuh tempo<br>kepada Lembaga<br>Keuangan Bank | 250.000.000 |             |
|                 | 3.1.2.05.01 | Estimasi Perubahan<br>SAL  |             | 250.000.000 |

**Kesebelas,** penjurnalan untuk perjanjian sewa menyewa ruangan gedung pemda dari Kuasa BUD melalui PPK-SKPKD yang menyatakan pendapatan atas sewa ruangan gedung pemda selama 1 April – 31 Desember 2022 sebesar Rp 9.000.000,- pada tanggal 31 Desember 2022, dicatat di jurnal umum sebagai berikut :

|             |             |   | Debit     | Kredit    |
|-------------|-------------|---|-----------|-----------|
| 31 Des 2022 | 2.1.4.04.01 | Pendapatan diterima<br>dimuka lainnya                     | 9.000.000 |           |
|             | 8.1.4.18.01 | Hasil dari<br>Pemanfaatan<br>Kekayaan Daerah<br>Sewa - LO |           | 9.000.000 |

**Keduabelas,** penjurnalan untuk perjanjian peminjaman ke Bank Daerah pada tanggal 1 Mei 2022 dari Kuasa BUD melalui PPK-SKPKD yang menyatakan bagian lancar utang jangka panjang sebesar Rp 1.500.000.000,- pada tanggal 31 Desember 2022, dicatat di jurnal umum sebagai berikut :

|             |             |   | Debit         | Kredit        |
|-------------|-------------|---|---------------|---------------|
| 31 Des 2022 | 1.2.1.04.01 | Utang Pinjaman Jangka<br>Panjang Dalam Negeri                     | 1.500.000.000 |               |
|             | 2.1.3.01.01 | Bagian Lancar Utang<br>Pinjaman Jangka<br>Panjang Dalam<br>Negeri |               | 1.500.000.000 |

**Keduabelas,** penjurnalan untuk perjanjian peminjaman ke Lembaga Donor Internasional yang diteruspinjamkan melalui Kementerian Keuangan pada tanggal 30 Mei 2022 dari Kuasa BUD melalui PPK-SKPKD yang menyatakan bagian lancar utang jangka panjang sebesar Rp 14.583.333,33 pada tanggal 31 Desember 2022, dicatat di jurnal umum sebagai berikut :

|             |             |  | Debit      | Kredit     |
|-------------|-------------|--|------------|------------|
| 31 Des 2022 | 2.2.2.01.01 | Utang Jangka Panjang<br>Lainnya                  | 14.583.333 |            |
|             | 2.1.3.06.01 | Bagian Lancar Utang<br>Jangka Panjang<br>Lainnya |            | 14.583.333 |

Bentuk dan Cara Pengisian Buku Jurnal

Berdasarkan contoh jurnal tersebut diatas maka dilakukan pencatatan dalam buku jurnal umum untuk transaksi berbasis akrual yang nantinya digunakan untuk menyusun LO dan Neraca sebagai berikut :

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU JURNAL UMUM (JU)

SKPKD : .....( SKPKD Kabupaten Kuningan)

Halaman 01

| Tanggal | Nomor               |               | Kode Rekening |   |   |    |    | Uraian  | Ref. | Debit<br>(Rp)   | Kredit<br>(Rp)  |
|---------|---------------------|---------------|---------------|---|---|----|----|---|------|-----------------|-----------------|
|         | Bukti<br>Penerimaan | Bukti<br>Lain |               |   |   |    |    |   |      |                 |                 |
| 1       | 2                   |               | 3             |   |   |    |    | 4   | 5    | 6               | 7               |
|         |                     |               |               |   |   |    |    |   |      |                 |                 |
| 5/2/15  | -                   | -             | 1             | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas di Kas Daerah                                       | -    | 11.000.000      | -               |
|         |                     |               | 7             | 1 | 2 | 01 | 02 | Penerimaan Potongan PPh 22                              | -    | -               | 10.000.000      |
|         |                     |               | 7             | 1 | 2 | 01 | 04 | Penerimaan Potongan PPN                                 | -    | -               | 1.000.000       |
|         |                     |               |               |   |   |    |    |   |      |                 |                 |
| 31/3/15 | -                   | -             | 9             | 1 | 3 | 01 | 03 | Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank | -    | 200.000.000     | -               |
|         |                     |               | 2             | 1 | 2 | 04 | 01 | Utang Bunga kepada Bank                                 | -    | -               | 200.000.000     |
|         |                     |               |               |   |   |    |    |   |      |                 |                 |
| 1/4/15  |                     |               | 1             | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas di Kas Daerah                                       |      | 60.000.000      | -               |
|         |                     |               | 2             | 1 | 4 | 04 | 01 | Pendapatan Diterima Dimuka Lainnya                      |      | -               | 60.000.000      |
|         |                     |               |               |   |   |    |    |   |      |                 |                 |
| 10/4/15 |                     |               | 9             | 1 | 4 | 01 | 02 | Beban Subsidi kepada BUMD                               |      | 500.000.000     | -               |
|         |                     |               | 2             | 1 | 5 | 04 | 01 | Utang Belanja Subsidi kepada BUMD                       |      | -               | 500.000.000     |
|         |                     |               |               |   |   |    |    |   |      |                 |                 |
| 1/5/15  |                     |               | 1             | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas di Kas Daerah                                       |      | 10.000.000.000  | -               |
|         |                     |               | 2             | 2 | 1 | 01 | 01 | Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan                     |      | -               | 10.000.000.000  |
|         |                     |               |               |   |   |    |    |   |      |                 |                 |
| 30/5/15 |                     |               | 1             | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas di Kas Daerah                                       |      | 500.000.000.000 | -               |
|         |                     |               | 2             | 2 | 2 | 01 | 01 | Utang Jangka Panjang Lainnya                            |      | -               | 500.000.000.000 |
|         |                     |               |               |   |   |    |    |   |      |                 |                 |
| 10/6/15 |                     |               | 7             | 2 | 2 | 01 | 02 | Pengeluaran Potongan PPh 22                             |      | 10.000.000      | -               |
|         |                     |               | 7             | 2 | 2 | 01 | 04 | Pengeluaran Potongan PPN                                |      | 1.000.000       | -               |
|         |                     |               | 1             | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas di Kas Daerah                                       |      | -               | 11.000.000      |
|         |                     |               |               |   |   |    |    |   |      |                 |                 |
| 11/7/15 |                     |               | 2             | 1 | 2 | 04 | 01 | Utang Bunga kepada Bank                                 |      | 200.000.000     | -               |
|         |                     |               | 1             | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas di Kas Daerah                                       |      | -               | 200.000.000     |
|         |                     |               |               |   |   |    |    |   |      |                 |                 |
|         |                     |               |               |   |   |    |    |   |      |                 |                 |

|          |  |  |   |   |   |    |    |  |  |                 |                 |
|----------|--|--|---|---|---|----|----|--|--|-----------------|-----------------|
| 15/7/15  |  |  | 2 | 1 | 5 | 04 | 01 | Utang Belanja Subsidi kepada BUMD                        |  | 500.000.000     | -               |
|          |  |  | 1 | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas di Kas Daerah  |  | -               | 500.000.000     |
|          |  |  |   |   |   |    |    |  |  |                 |                 |
| 19/8/15  |  |  | 2 | 1 | 3 | 01 | 01 | Bagian Lancar Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan        |  | 250.000.000     | -               |
|          |  |  | 1 | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas di Kas Daerah  |  | -               | 250.000.000     |
|          |  |  |   |   |   |    |    |  |  |                 |                 |
| 31/12/15 |  |  | 2 | 1 | 4 | 04 | 01 | Pendapatan Diterima Dimuka Lainnya                       |  | 9.000.000       | -               |
|          |  |  | 8 | 1 | 4 | 18 | 01 | Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa-LO           |  | -               | 9.000.000       |
|          |  |  |   |   |   |    |    |  |  |                 |                 |
| 31/12/15 |  |  | 1 | 2 | 1 | 04 | 01 | Utang Pinjaman Jangka Panjang Dalam Negeri               |  | 1.500.000.000   | -               |
|          |  |  | 2 | 1 | 3 | 01 | 01 | Bagian Lancar Utang Pinjaman Jangka Panjang Dalam Negeri |  | -               | 1.500.000.000   |
|          |  |  |   |   |   |    |    |  |  |                 |                 |
| 31/12/15 |  |  | 2 | 2 | 2 | 01 | 01 | Utang Jangka Panjang Lainnya                             |  | 14.583.000      | -               |
|          |  |  | 2 | 1 | 3 | 06 | 01 | Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya               |  | -               | 14.583.000      |
|          |  |  |   |   |   |    |    |  |  |                 |                 |
| Jumlah   |  |  |   |   |   |    |    |  |  | 513.255.583.000 | 513.255.583.000 |

PPK-SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Selain mencatat di buku jurnal umum dilakukan juga pencatatan dalam buku jurnal penerimaan kas untuk transaksi berbasis kas yang nantinya digunakan untuk menyusun LRA dan LAK sebagai berikut :

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU JURNAL PENERIMAAN KAS (JM)

SKPKD : .....( SKPKD Kabupaten Kuningan)

Halaman 01

| Tanggal  | Nomor               |               | Kode Rekening |   |   |    |    | Uraian  | Ref. | Debit<br>(Rp)   | Kredit<br>(Rp)  |
|----------|---------------------|---------------|---------------|---|---|----|----|---|------|-----------------|-----------------|
|          | Bukti<br>Penerimaan | Bukti<br>Lain |               |   |   |    |    |   |      |                 |                 |
| 1        | 2                   |               | 3             |   |   |    |    | 4   | 5    | 6               | 7               |
|          |                     |               |               |   |   |    |    |   |      |                 |                 |
| 1/04/15  | -                   | -             | 3             | 1 | 2 | 05 | 01 | Estimasi Perubahan SAL                          | -    | 60.000.000      | -               |
|          |                     |               | 4             | 1 | 2 | 02 | 01 | Retribusi Pemanfaatan Kekayaan Daerah-LRA       | -    | -               | 60.000.000      |
|          |                     |               |               |   |   |    |    |   |      |                 |                 |
| 1/05/15  |                     |               | 3             | 1 | 2 | 05 | 01 | Estimasi Perubahan SAL                          |      | 10.000.000.000  | -               |
|          |                     |               | 6             | 1 | 4 | 03 | 01 | Penerimaan Pembiayaan Pinjaman Daerah dari Bank |      | -               | 10.000.000.000  |
|          |                     |               |               |   |   |    |    |   |      |                 |                 |
| 30/05/15 |                     |               | 3             | 1 | 2 | 05 | 01 | Estimasi Perubahan SAL                          |      | 500.000.000.000 | -               |
|          |                     |               | 6             | 1 | 4 | 07 | 01 | Penerimaan Pembiayaan Pinjaman Luar Negeri      |      | -               | 500.000.000.000 |
|          |                     |               |               |   |   |    |    |   |      |                 |                 |
| Jumlah   |                     |               |               |   |   |    |    |   |      | 510.060.000.000 | 510.060.000.000 |

PPK-SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Selain mencatat di buku jurnal umum dan buku jurnal penerimaan kas dilakukan juga pencatatan dalam buku jurnal pengeluaran kas untuk transaksi berbasis kas yang nantinya digunakan untuk menyusun LRA dan LAK sebagai berikut :

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU JURNAL PENGELUARAN KAS (JK)

SKPKD : .....( SKPKD Kabupaten Kuningan)

Halaman 01

| Tanggal  | Nomor             |            | Kode Rekening |   |   |    |    | Uraian  | Ref. | Debit (Rp)  | Kredit (Rp) |
|----------|-------------------|------------|---------------|---|---|----|----|---|------|-------------|-------------|
|          | Bukti Pengeluaran | Bukti Lain |               |   |   |    |    |   |      |             |             |
| 1        | 2                 |            | 3             |   |   |    |    | 4   | 5    | 6           | 7           |
|          |                   |            |               |   |   |    |    |   |      |             |             |
| 11/07/15 | -                 | -          | 5             | 1 | 2 | 01 | 03 | Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank                                   | -    | 200.000.000 | -           |
|          |                   |            | 3             | 1 | 2 | 05 | 01 | Estimasi Perubahan SAL  | -    | -           | 200.000.000 |
| 15/07/15 |                   |            | 5             | 1 | 3 | 01 | 01 | Belanja Subsidi kepada Perusahaan   |      | 500.000.000 | -           |
|          |                   |            | 3             | 1 | 2 | 05 | 01 | Estimasi Perubahan SAL  |      | -           | 500.000.000 |
| 19/08/15 |                   |            | 6             | 2 | 3 | 03 | 00 | Pengeluaran Pembiayaan Pembayaran Pokok Utang yang jatuh tempo kepada Lembaga Keuangan Bank |      | 250.000.000 | -           |
|          |                   |            | 3             | 1 | 2 | 05 | 01 | Estimasi Perubahan SAL  |      | -           | 250.000.000 |
| Jumlah   |                   |            |               |   |   |    |    |   |      | 950.000.000 | 950.000.000 |

PPK-SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Langkah III : Melakukan Posting ke Buku Besar

Setelah melakukan penjurnalan seluruh transaksi, maka PPK-SKPKD melakukan posting atas pencatatan jurnal tersebut ke buku besar. Posting ini berguna agar seluruh transaksi yang sama-sama mempengaruhi suatu kode rekening/akun dapat dikelompokkan dalam satu buku besar untuk kode rekening/akun yang bersangkutan. Periode posting harus semakin diusahakan dapat dilakukan dalam waktu yang semakin singkat misalkan untuk periode mingguan atau bahkan harian.

Contoh buku besar SKPKD-PPKD : Kas di Kas Daerah sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPKD : BPKAD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 1.1.1.01.01  
Nama Rekening : Kas di Kas Daerah  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD :

Halaman 01

| No | Bukti |           | Ref | Uraian  | Debet<br>(Rp)   | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|-----------|-----|---|-----------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal   |     |   |                 |                |
| 1  |       | 5/2/2022  | JU  | Penerimaan Potongan PPh 22 dan PPN                | 11.000.000      | -              |
| 2  |       | 1/4/2022  | JU  | Pendapatan Diterima Dimuka Lainnya                | 60.000.000      | -              |
| 3  |       | 1/5/2022  | JU  | Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan               | 10.000.000.000  | -              |
| 4  |       | 30/5/2022 | JU  | Utang Jangka Panjang Lainnya                      | 500.000.000.000 | -              |
| 5  |       | 10/6/2022 | JU  | Utang PPh 22 dan Utang PPN                        | -               | 11.000.000     |
| 6  |       | 11/7/2022 | JU  | Utang Bunga kepada Bank                           | -               | 200.000.000    |
| 7  |       | 15/7/2022 | JU  | Utang Belanja Subsidi kepada BUMD                 | -               | 500.000.000    |
| 8  |       | 19/8/2022 | JU  | Bagian Lancar Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan | -               | 250.000.000    |
|    |       |           |     | Jumlah  | 510.071.000.000 | 961.000.000    |
|    |       |           |     | Saldo   | 509.110.000.000 | -              |

PPK-SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD-PPKD : Utang Pinjaman Jangka Panjang Dalam Negeri sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPKD : BPKAD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 1.2.1.04.01  
Nama Rekening : Utang Pinjaman Jangka Panjang Dalam Negeri  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD :

Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian   | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|--|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |  |               |                |
| 1  |       | 31/12/2022 | JU  | Bagian Lancar Utang Pinjaman Jangka Panjang Dalam Negeri | 1.500.000.000 | -              |
|    |       |            |     | Jumlah   | 1.500.000.000 | -              |
|    |       |            |     | Saldo  | 1.500.000.000 | -              |

PPK-SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....



Contoh buku besar SKPKD–PPKD : Utang Bunga kepada Bank sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPKD : BPKAD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 2.1.2.04.01  
Nama Rekening : Utang Bunga kepada Bank  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD :

Halaman 01

| No | Bukti |           | Ref | Uraian   | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|-----------|-----|--|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal   |     |  |               |                |
| 1  |       | 31/3/2022 | JU  | Beban Bunga Utang Pinjaman<br>kepada Lembaga Keuangan Bank | -             | 200.000.000    |
| 2  |       | 11/7/2022 | JU  | Kas di Kas Daerah  | 200.000.000   | -              |
|    |       |           |     |  |               |                |
|    |       |           |     | Jumlah   | 200.000.000   | 200.000.000    |
|    |       |           |     | Saldo  | -             | -              |

PPK–SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–PPKD : Bagian Lancar Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPKD : BPKAD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 2.1.3.01.01  
Nama Rekening : Bagian Lancar Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD :

Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian  | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|---|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |   |               |                |
| 1  |       | 19/8/2022  | JU  | Kas di Kas Daerah                             | 250.000.000   | -              |
| 2  |       | 31/12/2022 | JU  | Utang Pinjaman Jangka Panjang<br>Dalam Negeri | -             | 1.500.000.000  |
|    |       |            |     |   |               |                |
|    |       |            |     | Jumlah  | 250.000.000   | 1.500.000.000  |
|    |       |            |     | Saldo   | -             | 1.250.000.000  |

PPK–SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–PPKD : Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPKD : BPKAD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 2.1.3.06.01  
Nama Rekening : Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian                       | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|------------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |                              |               |                |
| 1  |       | 31/12/2022 | JU  | Utang Jangka Panjang Lainnya | -             | 14.583.000     |
|    |       |            |     |                              |               |                |
|    |       |            |     | Jumlah                       | -             | 14.583.000     |
|    |       |            |     | Saldo                        | -             | 14.583.000     |

PPK–SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–PPKD : Pendapatan Diterima Dimuka Lainnya sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPKD : BPKAD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 2.1.4.04.01  
Nama Rekening : Pendapatan Diterima Dimuka Lainnya  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian   | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|--|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |  |               |                |
| 1  |       | 1/4/2022   | JU  | Kas di Kas Daerah                              | -             | 60.000.000     |
| 2  |       | 31/12/2022 | JU  | Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa-LO | 9.000.000     | -              |
|    |       |            |     |  |               |                |
|    |       |            |     | Jumlah   | 9.000.000     | 60.000.000     |
|    |       |            |     | Saldo  | -             | 51.000.000     |

PPK–SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–PPKD : Utang Belanja Subsidi kepada BUMD sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPKD : BPKAD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 2.1.5.04.01  
Nama Rekening : Utang Belanja Subsidi kepada BUMD  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |           | Ref | Uraian                    | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|-----------|-----|---------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal   |     |                           |               |                |
| 1  |       | 10/4/2022 | JU  | Beban Subsidi kepada BUMD | -             | 500.000.000    |
| 2  |       | 15/7/2022 | JU  | Kas di Kas Daerah         | 500.000.000   |                |
|    |       |           |     |                           |               |                |
|    |       |           |     | Jumlah                    | 500.000.000   | 500.000.000    |
|    |       |           |     | Saldo                     | -             | -              |

PPK–SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–PPKD : Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPKD : BPKAD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 2.2.1.01.01  
Nama Rekening : Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |          | Ref | Uraian            | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|----------|-----|-------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal  |     |                   |               |                |
| 1  |       | 1/5/2022 | JU  | Kas di Kas Daerah | -             | 10.000.000.000 |
|    |       |          |     |                   |               |                |
|    |       |          |     | Jumlah            | -             | 10.000.000.000 |
|    |       |          |     | Saldo             | -             | 10.000.000.000 |

PPK–SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–PPKD : Utang Jangka Panjang Lainnya sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPKD : BPKAD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 2.2.2.01.01  
Nama Rekening : Utang Jangka Panjang Lainnya  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD :

Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian                                     | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp)  |
|----|-------|------------|-----|--|---------------|-----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |  |               |                 |
| 1  |       | 30/5/2022  | JU  | Kas di Kas Daerah                          | -             | 500.000.000.000 |
| 2  |       | 31/12/2022 | JU  | Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya | 14.583.000    | -               |
|    |       |            |     |  | -             | 500.000.000.000 |
|    |       |            |     | Jumlah                                     | 14.583.000    | 500.000.000.000 |
|    |       |            |     | Saldo                                      | -             | 499.985.417.000 |

PPK–SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–PPKD : Estimasi Perubahan SAL sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPKD : BPKAD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 3.1.2.05.01  
Nama Rekening : Estimasi Perubahan SAL  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD :

Halaman 01

| No | Bukti |           | Ref | Uraian   | Debet<br>(Rp)   | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|-----------|-----|--|-----------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal   |     |  |                 |                |
| 1  |       | 1/4/2022  | JM  | Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa-LRA                   | 60.000.000      | -              |
| 2  |       | 1/5/2022  | JM  | Penerimaan Pembiayaan Pinjaman dalam Negeri dari Bank        | 10.000.000.000  | -              |
| 3  |       | 30/5/2022 | JM  | Pinjaman Luar Negeri   | 500.000.000.000 | -              |
| 4  |       | 11/7/2022 | JK  | Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank            | -               | 200.000.000    |
| 5  |       | 15/7/2022 | JK  | Belanja Subsidi kepada BUMD                                  | -               | 500.000.000    |
| 6  |       | 19/8/2022 | JK  | Pengeluaran Pembiayaan Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Bank | -               | 250.000.000    |
|    |       |           |     |  |                 |                |
|    |       |           |     | Jumlah   | 510.060.000.000 | 950.000.000    |
|    |       |           |     | Saldo  | 509.110.000.000 | -              |

PPK–SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–PPKD : Retribusi Pemanfaatan Kekayaan Daerah-LRA sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPKD : BPKAD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 4.1.2.02.01  
Nama Rekening : Retribusi Pemanfaatan Kekayaan Daerah -LRA  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |          | Ref | Uraian                 | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|----------|-----|------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal  |     |                        |               |                |
| 1  |       | 1/4/2022 | JM  | Estimasi Perubahan SAL | -             | 60.000.000     |
|    |       |          |     |                        |               |                |
|    |       |          |     | Jumlah                 | -             | 60.000.000     |
|    |       |          |     | Saldo                  | -             | 60.000.000     |

PPK–SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–PPKD : Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPKD : BPKAD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 5.1.2.01.03  
Nama Rekening : Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |           | Ref | Uraian                 | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|-----------|-----|------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal   |     |                        |               |                |
| 1  |       | 11/7/2022 | JK  | Estimasi Perubahan SAL | 200.000.000   | -              |
|    |       |           |     |                        |               |                |
|    |       |           |     | Jumlah                 | 200.000.000   | -              |
|    |       |           |     | Saldo                  | 200.000.000   | -              |

PPK–SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–PPKD : Belanja Subsidi kepada Perusahaan sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPKD : BPKAD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 5.1.3.01.01  
Nama Rekening : Belanja Subsidi kepada Perusahaan  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |           | Ref | Uraian                 | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|-----------|-----|------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal   |     |                        |               |                |
| 1  |       | 15/7/2022 | JK  | Estimasi Perubahan SAL | 500.000.000   | -              |
|    |       |           |     |                        |               |                |
|    |       |           |     | Jumlah                 | 500.000.000   | -              |
|    |       |           |     | Saldo                  | 500.000.000   | -              |

PPK–SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–PPKD : Penerimaan Pembiayaan Pinjaman Daerah dari Bank sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPKD : BPKAD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 6.1.4.03.01  
Nama Rekening : Penerimaan Pembiayaan Pinjaman Daerah dari Bank  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |          | Ref | Uraian                 | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|----------|-----|------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal  |     |                        |               |                |
| 1  |       | 1/5/2022 | JM  | Estimasi Perubahan SAL | -             | 10.000.000.000 |
|    |       |          |     |                        |               |                |
|    |       |          |     | Jumlah                 | -             | 10.000.000.000 |
|    |       |          |     | Saldo                  | -             | 10.000.000.000 |

PPK–SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–PPKD : Penerimaan Pembiayaan Pinjaman Luar Negeri sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPKD

Kode Rekening

Nama Rekening

Pagu APBD

Pagu perubahan APBD

:

:

:

:

:

BPKAD Kabupaten Kuningan

6.1.4.07.01

Penerimaan Pembiayaan Pinjaman Luar Negeri

Halaman 01

| No | Bukti |           | Ref | Uraian                 | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp)  |
|----|-------|-----------|-----|------------------------|---------------|-----------------|
|    | Nomor | Tanggal   |     |                        |               |                 |
| 1  |       | 30/5/2022 | JU  | Estimasi Perubahan SAL | -             | 500.000.000.000 |
|    |       |           |     |                        |               |                 |
|    |       |           |     | Jumlah                 | -             | 500.000.000.000 |
|    |       |           |     | Saldo                  | -             | 500.000.000.000 |

PPK–SKPKD

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP.....

PPKD

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–PPKD : Pengeluaran Pembiayaan Pembayaran Pokok Utang yang jatuh tempo kepada Lembaga Keuangan Bank sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPKD

Kode Rekening

Nama Rekening

Pagu APBD

Pagu perubahan APBD

:

:

:

:

:

BPKAD Kabupaten Kuningan

6.2.3.03.00

Pengeluaran Pembiayaan Pembayaran Pokok Utang yang jatuh tempo kepada Lembaga Keuangan Bank

Halaman 01

| No | Bukti |           | Ref | Uraian                 | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|-----------|-----|------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal   |     |                        |               |                |
| 1  |       | 19/8/2022 | JK  | Estimasi Perubahan SAL | 250.000.000   | -              |
|    |       |           |     |                        |               |                |
|    |       |           |     | Jumlah                 | 250.000.000   | -              |
|    |       |           |     | Saldo                  | 250.000.000   | -              |

PPK–SKPKD

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP.....

PPKD

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–PPKD : Penerimaan Potongan PPh 22 sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPKD : BPKAD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 7.1.2.01.02  
Nama Rekening : Penerimaan Potongan PPh 22  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD :

Halaman 01

| No | Bukti |          | Ref | Uraian            | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|----------|-----|-------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal  |     |                   |               |                |
| 1  |       | 5/2/2022 | JU  | Kas di Kas Daerah | -             | 10.000.000     |
|    |       |          |     |                   |               |                |
|    |       |          |     | Jumlah            | -             | 10.000.000     |
|    |       |          |     | Saldo             | -             | 10.000.000     |

PPK–SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–PPKD : Penerimaan Potongan PPN sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPKD : BPKAD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 7.1.2.01.04  
Nama Rekening : Penerimaan Potongan PPN  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD :

Halaman 01

| No | Bukti |          | Ref | Uraian            | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|----------|-----|-------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal  |     |                   |               |                |
| 1  |       | 5/2/2022 | JU  | Kas di Kas Daerah | -             | 1.000.000      |
|    |       |          |     |                   |               |                |
|    |       |          |     | Jumlah            | -             | 1.000.000      |
|    |       |          |     | Saldo             | -             | 1.000.000      |

PPK–SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....



Contoh buku besar SKPKD–PPKD : Pengeluaran Potongan PPh 22 sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPKD : BPKAD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 7.2.2.01.02  
Nama Rekening : Pengeluaran Potongan PPh 22  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |           | Ref | Uraian            | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|-----------|-----|-------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal   |     |                   |               |                |
| 1  |       | 10/6/2022 | JU  | Kas di Kas Daerah | 10.000.000    | -              |
|    |       |           |     |                   |               |                |
|    |       |           |     | Jumlah            | 10.000.000    | -              |
|    |       |           |     | Saldo             | 10.000.000    | -              |

PPK–SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–PPKD : Pengeluaran Potongan PPN sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPKD : BPKAD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 7.2.2.01.04  
Nama Rekening : Pengeluaran Potongan PPN  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |           | Ref | Uraian            | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|-----------|-----|-------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal   |     |                   |               |                |
| 1  |       | 10/6/2022 | JU  | Kas di Kas Daerah | 1.000.000     | -              |
|    |       |           |     |                   |               |                |
|    |       |           |     | Jumlah            | 1.000.000     | -              |
|    |       |           |     | Saldo             | 1.000.000     | -              |

PPK–SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–PPKD : Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa-LO sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPKD : BPKAD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 8.1.4.18.01  
Nama Rekening : Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa-LO  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian                             | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|------------------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |                                    |               |                |
| 1  |       | 31/12/2022 | JU  | Pendapatan Diterima Dimuka Lainnya | -             | 9.000.000      |
|    |       |            |     |                                    |               |                |
|    |       |            |     | Jumlah                             | -             | 9.000.000      |
|    |       |            |     | Saldo                              |               | 9.000.000      |

PPK–SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–PPKD : Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPKD : BPKAD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 9.1.3.01.03  
Nama Rekening : Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |           | Ref | Uraian                  | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|-----------|-----|-------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal   |     |                         |               |                |
| 1  |       | 31/3/2022 | JU  | Utang Bunga kepada Bank | 200.000.000   | -              |
|    |       |           |     |                         |               |                |
|    |       |           |     | Jumlah                  | 200.000.000   | -              |
|    |       |           |     | Saldo                   | 200.000.000   | -              |

PPK–SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–PPKD : Beban Subsidi kepada BUMD sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

**KABUPATEN KUNINGAN**  
**BUKU BESAR**

**SKPKD** : BPKAD Kabupaten Kuningan  
**Kode Rekening** : 9.1.4.01.02  
**Nama Rekening** : Beban Subsidi kepada BUMD  
**Pagu APBD** :  
**Pagu perubahan APBD** :

Halaman 01

| No | Bukti |           | Ref | Uraian                            | Debet<br>(Rp)      | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|-----------|-----|-----------------------------------|--------------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal   |     |                                   |                    |                |
| 1  |       | 10/4/2022 | JU  | Utang Belanja Subsidi kepada BUMD | 500.000.000        | -              |
|    |       |           |     |                                   |                    |                |
|    |       |           |     | <b>Jumlah</b>                     | <b>500.000.000</b> | -              |
|    |       |           |     | <b>Saldo</b>                      | <b>500.000.000</b> | -              |

PPK–SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

**Langkah IV : Menyusun Neraca Saldo**

Setelah melakukan posting seluruh pencatatan dalam buku besar maka kemudian Tenaga Akuntansi di PPK–SKPKD membuat neraca saldo sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Penyusunan neraca saldo oleh Tenaga Akuntansi di PPK–SKPKD dilakukan secara triwulanan. Neraca saldo disusun dengan cara memindahkan saldo-saldo yang ada di tiap buku besar ke dalam Neraca Saldo. Contoh Neraca Saldo dari hasil pencatatan dan posting contoh transaksi keuangan diatas adalah sebagai berikut :

KABUPATEN KUNINGAN  
NERACA SALDO  
PER TANGGAL 31 Desember 2022

SKPKD : BPKAD

| Kode Rekening |   |   |    |    | Uraian  | Jumlah            |                   |
|---------------|---|---|----|----|---|-------------------|-------------------|
|               |   |   |    |    |   | Debit             | Kredit            |
| 1             |   |   |    |    | 2   | 3                 | 4                 |
| 1             | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas di Kas Daerah   | 509.110.000.000   | -                 |
| 1             | 2 | 1 | 04 | 01 | Utang Pinjaman Jangka Panjang Dalam Negeri  | 1.500.000.000     |                   |
| 2             | 1 | 3 | 01 | 01 | Bagian Lancar Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan   | -                 | 1.250.000.000     |
| 2             | 1 | 3 | 06 | 01 | Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya  | -                 | 14.583.000        |
| 2             | 1 | 4 | 04 | 01 | Pendapatan Diterima Dimuka Lainnya  | -                 | 51.000.000        |
| 2             | 2 | 1 | 01 | 01 | Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan   | -                 | 10.000.000.000    |
| 2             | 2 | 2 | 01 | 01 | Utang Jangka Panjang Lainnya  | -                 | 499.985.417.000   |
| 3             | 1 | 2 | 05 | 01 | Estimasi Perubahan SAL  | 509.110.000.000   | -                 |
| 4             | 1 | 2 | 02 | 01 | Retribusi Pemanfaatan Kekayaan Daerah -LRA  | -                 | 60.000.000        |
| 5             | 1 | 2 | 01 | 03 | Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank                                   | 200.000.000       | -                 |
| 5             | 1 | 3 | 01 | 01 | Belanja Subsidi kepada Perusahaan   | 500.000.000       | -                 |
| 6             | 1 | 4 | 03 | 01 | Penerimaan Pembiayaan Pinjaman Daerah dari Bank   | -                 | 10.000.000.000    |
| 6             | 1 | 4 | 07 | 01 | Penerimaan Pembiayaan Pinjaman Luar Negeri  | -                 | 500.000.000.000   |
| 6             | 2 | 3 | 03 | 00 | Pengeluaran Pembiayaan Pembayaran Pokok Utang yang jatuh tempo kepada Lembaga Keuangan Bank | 250.000.000       | -                 |
| 7             | 1 | 2 | 01 | 02 | Penerimaan Potongan PPh 22  | -                 | 10.000.000        |
| 7             | 1 | 2 | 01 | 04 | Penerimaan Potongan PPN   | -                 | 1.000.000         |
| 7             | 2 | 2 | 01 | 02 | Pengeluaran Potongan PPh 22   | 10.000.000        | -                 |
| 7             | 2 | 2 | 01 | 04 | Pengeluaran Potongan PPN  | 1.000.000         | -                 |
| 8             | 1 | 4 | 18 | 01 | Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa-LO  | -                 | 9.000.000         |
| 9             | 1 | 3 | 01 | 03 | Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank                                     | 200.000.000       | -                 |
| 9             | 1 | 4 | 01 | 02 | Beban Subsidi kepada BUMD   | 500.000.000       | -                 |
|               |   |   |    |    |   |                   |                   |
| Jumlah        |   |   |    |    |   | 1.021.381.000.000 | 1.021.381.000.000 |

PPK-SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

## **SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI KONSOLIDATOR DI SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (SKPKD-PPKD) YANG MENCATAT TRANSAKSI KAS DAERAH**

Bagian ini menjelaskan Sistem dan Prosedur Akuntansi Konsolidator di Pemerintah Kabupaten Kuningan untuk Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mencatat transaksi kas daerah.

### **KEBIJAKAN UMUM**

Prosedur akuntansi konsolidator pada SKPKD-PPKD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pencatatan kas daerah, RK SKPD dan PFK yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Sistem dan prosedur akuntansi ini disusun berdasarkan kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

### **PIHAK-PIHAK TERKAIT**

Berbagai pihak/fungsi yang terkait dalam proses akuntansi SKPKD-PPKD yang mencatat transaksi kas daerah beserta tugas-tugasnya adalah :

1. Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD)

Dalam pelaksanaan prosedur ini, Kuasa BUD memiliki tugas menyiapkan Laporan Posisi Kas Harian (LPKH) yang dilampiri semua bukti-bukti transaksi pendapatan, beban, belanja, transfer, dan pembiayaan yang terkait aset dan kewajiban serta PFK di pemerintah Kabupaten Kuningan pada hari/tanggal tertentu yang diserahkan kepada Tenaga Akuntansi di Fungsi Akuntansi

Pemerintah Daerah untuk dicatat.

## 2. Tenaga Akuntansi di Fungsi Akuntansi Pemerintah Daerah

Dalam pelaksanaan prosedur ini, Tenaga Akuntansi di Fungsi Akuntansi Pemerintah Daerah bekerja mencatat transaksi kas daerah yang memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Menerima Laporan Posisi Kas Harian (LPKH) dan semua bukti-bukti transaksi pendapatan, beban, belanja, transfer, dan pembiayaan yang terkait aset dan kewajiban serta PFK di pemerintah Kabupaten Kuningan pada hari tertentu dari Kuasa BUD dan menganalisa data dan informasi akuntansi dari bukti transaksi tersebut;
- b. Mencatat transaksi-transaksi berdasarkan informasi akuntansi dari Laporan Posisi Kas Harian (LPKH) dan semua bukti-bukti transaksi pendapatan, beban, belanja, transfer, dan pembiayaan yang terkait aset dan kewajiban serta PFK di pemerintah Kabupaten Kuningan pada hari tertentu dari Kuasa BUD ke buku jurnal;
- c. Memposting jurnal-jurnal terkait informasi akuntansi dari Laporan Posisi Kas Harian (LPKH) dan semua bukti-bukti transaksi pendapatan, beban, belanja, transfer, dan pembiayaan yang terkait aset dan kewajiban serta PFK di pemerintah Kabupaten Kuningan pada hari tertentu dari Kuasa BUD ke dalam buku besarnya masing-masing;
- d. Menyusun neraca saldo untuk persiapan penyusunan laporan keuangan Neraca; dan
- e. Menyerahkan buku jurnal, buku besar dan neraca saldo kepada Kepala Fungsi Akuntansi Pemerintah Daerah untuk diperiksa dan ditandatangani.

## 3. Kepala Fungsi Akuntansi Pemerintah Daerah : Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi BPKAD.

Dalam pelaksanaan prosedur ini, Kepala Fungsi Akuntansi Pemerintah Daerah memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Bertanggungjawab atas sistem akuntansi SKPKD-PPKD

terkait transaksi kas daerah yang dipimpinnya; dan

- b. Memeriksa dan menandatangani hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Tenaga Akuntansi Fungsi Akuntansi Pemerintah Daerah setiap bulannya seperti Buku Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo SKPKD-PPKD yang mencatat transaksi kas daerah.
  - c. Menyerahkan buku jurnal, buku besar dan neraca saldo kepada PPKD untuk diperiksa dan ditandatangani.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (tidak termasuk Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan).

Dalam pelaksanaan prosedur ini, PPKD memiliki tugas sebagai BUD :

- a. Menandatangani Laporan Posisi Kas Harian (LPKH) yang disiapkan oleh Kuasa BUD yang menjadi dasar pencatatan akuntansi oleh Tenaga Akuntansi di Fungsi Akuntansi Pemerintah Daerah; dan
- b. Menyetujui Buku Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo yang diserahkan Kepala Fungsi Akuntansi Pemda setiap triwulan.

#### **DOKUMEN YANG DIGUNAKAN**

- 1. Bukti Setoran Bank merupakan formulir bukti melakukan setoran ke Rekening Umum Kas Daerah;
- 2. Bukti transfer merupakan slip bukti melakukan transfer dari suatu rekening ke rekening lainnya;
- 3. Nota Kredit merupakan bukti transaksi penerimaan uang di rekening kas umum daerah;
- 4. Nota Debit merupakan bukti transaksi pengeluaran uang di rekening kas umum daerah.
- 5. Surat Tanda Setoran selanjutnya disebut STS adalah bukti yang dibuat untuk melakukan penyetoran uang ke Kas Daerah.
- 6. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang selanjutnya disebut

(SP2D) adalah Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan Kuasa Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM;

7. Surat Perintah BUD adalah surat yang diterbitkan BUD untuk mengeluarkan kas untuk Dana Cadangan dan PFK.
8. Laporan Posisi Kas Harian merupakan atas kas umum daerah yang berada dalam pengelolaannya yang dibuat setiap hari dan diserahkan kepada Kepala Daerah setiap hari kerja pertama setiap minggunya.

### **BUKU DAN ATAU FORMULIR YANG DIGUNAKAN**

Dokumen-dokumen yang digunakan dalam pelaksanaan prosedur akuntansi konsolidator di SKPKD-PPKD ini paling tidak terdiri dari :

1. Buku Jurnal Umum (JU)

Merupakan buku jurnal yang digunakan untuk melakukan pencatatan akuntansi atas transaksi basis akrual kas daerah, RK, dan PFK yang terkait penyusunan Neraca.

2. Buku Besar (BB)

Merupakan buku yang digunakan untuk menampung pencatatan hasil posting transaksi dari buku jurnal. Buku besar ini merupakan pencatatan akuntansi atas seluruh transaksi untuk suatu rekening/akun per jenis atau obyek. Jadi setiap rekening/akun per jenis atau objek mempunyai buku besar tersendiri.

3. Buku Besar Pembantu (BP)

Buku besar dapat dilengkapi dengan buku besar pembantu sebagai alat uji silang dan kelengkapan informasi rekening/akun tertentu. Buku besar pembantu berisi rincian akun (rincian obyek) yang telah dicatat dalam buku besar. Jika dirasakan informasi dalam buku besar sudah mencukupi maka buku besar pembantu tidak perlu dibuat lagi.



4. Neraca Saldo (NS)

Merupakan formulir yang mencatat nilai saldo setiap rekening/akun per rincian objek sehingga diketahui jumlah total dari seluruh rekening/akun.

5. Buku Jurnal Penyesuaian (JP)

Merupakan buku jurnal yang digunakan untuk melakukan pencatatan akuntansi penyesuaian khususnya atas transaksi-transaksi kas daerah, RK SKPD, dan PFK di SKPKD-PPKD.

### **KERANGKA SISTEM**

Secara umum proses akuntansi di SKPKD-PPKD yang mencatat transaksi kas daerah, dimulai dari menerima Laporan Posisi Kas Harian (LPKH) dan yang dilampiri semua bukti-bukti transaksi pendapatan, beban, belanja, transfer, dan pembiayaan yang terkait aset dan kewajiban serta PFK di pemerintah Kabupaten Kuningan pada hari tertentu dari Kuasa BUD. Pada saat bukti transaksi keuangan tersebut telah diterima maka Tenaga Akuntansi Fungsi Akuntansi Pemda, kemudian melakukan pencatatan akuntansi dalam buku jurnal terkait. Jadi pencatatan akuntansi untuk setiap transaksi dilakukan pada saat terjadinya transaksi dan atau pada saat bukti transaksi tersebut diterima namun pengakuan transaksi tetap pada tanggal bukti transaksi.

Setelah seluruh transaksi dicatat dalam buku jurnal maka Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD kemudian melakukan posting ke buku besar. Setelah posting dari buku jurnal ke buku besar selesai dilakukan maka kemudian Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD menyusun Neraca Saldo sebagai dasar pembuatan Laporan Keuangan untuk setiap triwulan yang diserahkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah triwulan berakhir kepada PPK-SKPKD.

### **ALUR PROSEDUR TEKNIS**

Teknis pelaksanaan sistem dan prosedur akuntansi konsolidator di SKPKD-PPKD yang mencatat transaksi kas daerah ini adalah sebagai berikut :

## **Langkah I : Penerimaan Bukti Transaksi**

Tenaga Akuntansi Fungsi Akuntansi Pemda di Bidang Akuntansi BPKAD menerima Laporan Posisi Kas Harian (LPKH) yang dilampiri semua bukti-bukti transaksi pendapatan, beban, belanja, transfer, dan pembiayaan yang terkait aset dan kewajiban serta PFK di Pemerintah Kabupaten Kuningan pada hari tertentu dari Kuasa BUD. Atas penerimaan bukti transaksi ini, Tenaga Akuntansi Fungsi Akuntansi Pemda harus menganalisa hingga benar-benar meyakini informasi akuntansi dari bukti tersebut. Setelah digunakan sebagai dasar melakukan pencatatan akuntansi maka bukti transaksi tersebut harus disimpan dengan baik. Sebagai contoh : misalkan diketahui bahwa pada tanggal 1 Februari 2022, telah terjadi transaksi yang terkait dengan Kas Daerah di SKPKD-PPKD sebagai berikut (asumsi tanggal bukti transaksi sama dengan tanggal penerimaan bukti transaksi) :

1. Tenaga Akuntansi di Fungsi Akuntansi Pemda menerima Surat Ketetapan Pajak Daerah, Slip Setoran Bank atau Bukti Transfer yang telah divalidasi Bank Kas Daerah dari Kuasa BUD melalui Kepala Fungsi Akuntansi Pemda yang menyatakan pendapatan Pajak Hotel dari Hotel Purnama senilai Rp 20.000.000,-;
2. Tenaga Akuntansi di Fungsi Akuntansi Pemda menerima STS Retribusi Kesehatan Dinas Kesehatan dari Kuasa BUD melalui Kepala Fungsi Akuntansi Pemda yang menyatakan pendapatan senilai Rp 50.000.000,-;
3. Tenaga Akuntansi di Fungsi Akuntansi Pemda menerima SP2D LS dari Kuasa BUD melalui Kepala Fungsi Akuntansi Pemda atas pembayaran gaji bulan februari dengan rincian sebagai berikut :
  - Gaji Pokok Rp. 100.000.000,-
  - Tunjangan Keluarga Rp. 20.000.000,-
  - Tunjangan Fungsional Rp. 30.000.000,-
  - Tunjangan Fungsional Umum Rp. 10.000.000,-
  - Potongan PPH 21 Rp 5.000.000,-
  - Potongan IWP Rp 2.500.000,-

- Potongan Taperum Rp 1.500.000,-
4. Tenaga Akuntansi di Fungsi Akuntansi Pemda menerima SP2D UP dari Kuasa BUD melalui Kepala Fungsi Akuntansi Pemda untuk pengisian uang persediaan sebesar Rp 200.000.000,-;
  5. Tenaga Akuntansi di Fungsi Akuntansi Pemda menerima SP2D LS dari Kuasa BUD melalui Kepala Fungsi Akuntansi Pemda untuk pembayaran pengadaan kendaraan bermotor roda empat sebesar Rp 250.000.000,-;
  6. Tenaga Akuntansi di Fungsi Akuntansi Pemda menerima SP2D LS dari Kuasa BUD melalui Kepala Fungsi Akuntansi Pemda untuk pembayaran jasa kebersihan kantor sebesar Rp 20.000.000,-;
  7. Tenaga Akuntansi di Fungsi Akuntansi Pemda menerima Nota Kredit dari Kuasa BUD melalui Kepala Fungsi Akuntansi Pemda yang menyatakan pendapatan Dana Alokasi Umum senilai Rp 100.000.000.000,-;
  8. Tenaga Akuntansi di Fungsi Akuntansi Pemda menerima SP2D LS dari Kuasa BUD melalui Kepala Fungsi Akuntansi Pemda untuk Belanja Bantuan Sosial terhadap Organisasi Sosial Kemasyarakatan senilai Rp 100.000.000,-;
  9. Tenaga Akuntansi di Fungsi Akuntansi Pemda menerima SP2D LS dari Kuasa BUD melalui Kepala Fungsi Akuntansi Pemda untuk Belanja Bantuan Keuangan terhadap Partai Politik senilai Rp 75.000.000,-;
  10. Tenaga Akuntansi di Fungsi Akuntansi Pemda menerima Nota Kredit dari Kuasa BUD melalui Kepala Fungsi Akuntansi Pemda yang menyatakan penerimaan pinjaman dari Bank Daerah sebesar Rp 2.000.000.000,-; dan
  11. Tenaga Akuntansi di Fungsi Akuntansi Pemda menerima SP2D LS dari Kuasa BUD melalui Kepala Fungsi Akuntansi Pemda untuk pengeluaran pembiayaan pembentukan dana bergulir senilai Rp 300.000.000,-.

**Langkah II : Melakukan Pencatatan di Buku Jurnal**

Berdasarkan (LPKH) dan yang dilampiri semua bukti-bukti transaksi pendapatan, beban, belanja, transfer, dan pembiayaan yang terkait aset dan kewajiban serta PFK di pemerintah Kabupaten Kuningan pada hari tertentu dari Kuasa BUD, maka kemudian Tenaga Akuntansi di Fungsi Akuntansi Pemda mencatat transaksi tersebut di buku jurnal sesuai jenis transaksinya.

- 1. Untuk mencatat **pendapatan baik dari bendahara penerimaan SKPD maupun dari wajib bayar** maka dilakukan pencatatan dalam Buku Jurnal Umum dengan melakukan jurnal, “Kas di Kas Daerah” di Debit dan “RK SKPD dari SKPD yang memiliki realisasi anggaran pendapatan terkait” di kredit, sebagai berikut:

|                          | Debit | Kredit |
|--------------------------|-------|--------|
| Kas di Kas Daerah        | xxxx  |        |
| Penerimaan RK SKPD _____ |       | xxxx   |

- 2. Untuk mencatat **pengeluaran baik UP/GI/TU maupun LS** maka dilakukan pencatatan dalam Buku Jurnal Umum dengan melakukan jurnal, “RK SKPD dari SKPD yang diberi UP/GU/TU atau yang memiliki realisasi anggaran belanja terkait” di Debit dan “Kas di Kas Daerah” di kredit, sebagai berikut:

|                           | Debit | Kredit |
|---------------------------|-------|--------|
| Pengeluaran RK SKPD _____ | xxxx  |        |
| Kas di Kas Daerah         |       | xxxx   |

- 3. Untuk mencatat **pemotongan PFK** maka dilakukan pencatatan dalam Buku Jurnal Umum dengan melakukan jurnal, “Kas di Kas Daerah” di Debit dan “potongan/pungutan PFK terkait” di kredit, sebagai berikut:

|                                  | Debit | Kredit |
|----------------------------------|-------|--------|
| Kas di Kas Daerah                | xxxx  |        |
| Penerimaan Potongan/pungutan PFK |       | xxxx   |

Untuk mencatat **pembayaran PFK** maka dilakukan pencatatan dalam Buku Jurnal Umum dengan melakukan jurnal, “potongan/pungutan PFK” di Debit dan “Kas di Kas Daerah” di kredit, sebagai berikut:

|   | Debit                    | Kredit      |
|---|--------------------------|-------------|
| <b>Pengeluaran Potongan/pungutan PFK xxxx</b>   |                          |             |
|   | <b>Kas di Kas Daerah</b> | <b>xxxx</b> |
| 4. Pencatatan atas akun Kas di Kas Daerah pada realisasi <b>pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan</b> milik SKPKD-PPKD, tidak dicatat oleh sistem dan prosedur SKPKD-PPKD yang mencatat transaksi Kas Daerah, karena sudah dicatat oleh sistem dan prosedur SKPKD-PPKD yang mencatat transaksi pemda. |                          |             |

Berdasarkan uraian penjurnalan dan contoh transaksi terkait transaksi Kas Daerah di SKPKD-PPKD tersebut diatas maka Tenaga Akuntansi Fungsi Akuntansi Pemda melakukan pencatatan dalam buku jurnal umum sebagai berikut :

**Pertama,** penjurnalan untuk penerimaan Surat Ketetapan Pajak Daerah, Slip Setoran Bank atau Bukti Transfer yang telah divalidasi Bank Kas Daerah dari Kuasa BUD melalui Kepala Fungsi Akuntansi Pemda yang menyatakan pendapatan Pajak Hotel dari Hotel Purnama senilai Rp 20.000.000,-, dicatat di jurnal umum sebagai berikut :

|                 |             |                        | Debit      | Kredit     |
|-----------------|-------------|------------------------|------------|------------|
| 1 Februari 2022 | 1.1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah      | 20.000.000 |            |
|                 | 7.1.8.99.00 | Penerimaan RK SKPD____ |            | 20.000.000 |

**Kedua,** penjurnalan untuk penerimaan STS Retribusi Kesehatan Dinas Kesehatan dari Kuasa BUD melalui Kepala Fungsi Akuntansi Pemda yang menyatakan pendapatan senilai Rp 50.000.000,-, dicatat di jurnal umum sebagai berikut :

| 1 Februari 2022 | 1.1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah      | 50.000.000 |            |
|-----------------|-------------|------------------------|------------|------------|
|                 | 7.1.8.99.00 | Penerimaan RK SKPD____ |            | 50.000.000 |

**Ketiga,** penjurnalan untuk penerimaan SP2D LS dari Kuasa BUD melalui Kepala Fungsi Akuntansi Pemda atas pembayaran gaji bulan februari dicatat di jurnal umum sebagai berikut :

|                 |             |                          | Debit       | Kredit      |
|-----------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
| 1 Februari 2022 | 7.2.8.99.00 | Pengeluaran RK SKPD_____ | 160.000.000 |             |
|                 | 1.1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah        |             | 160.000.000 |

**Keempat,** penjurnalan untuk penerimaan SP2D UP dari Kuasa BUD melalui Kepala Fungsi Akuntansi Pemda untuk pengisian uang persediaan sebesar Rp 200.000.000,- dicatat di jurnal umum sebagai berikut :

|                 |             |                          | Debit       | Kredit      |
|-----------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
| 1 Februari 2022 | 7.2.8.99.00 | Pengeluaran RK SKPD_____ | 200.000.000 |             |
|                 | 1.1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah        |             | 200.000.000 |

**Kelima,** penjurnalan untuk penerimaan SP2D LS dari Kuasa BUD melalui Kepala Fungsi Akuntansi Pemda untuk pembayaran pengadaan kendaraan bermotor roda empat sebesar Rp 250.000.000,- dicatat di jurnal umum sebagai berikut :

|                 |             |                          | Debit       | Kredit      |
|-----------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
| 1 Februari 2022 | 7.2.8.99.00 | Pengeluaran RK SKPD_____ | 250.000.000 |             |
|                 | 1.1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah        |             | 250.000.000 |

**Keenam,** penjurnalan untuk penerimaan SP2D LS dari Kuasa BUD melalui Kepala Fungsi Akuntansi Pemda untuk pembayaran jasa kebersihan kantor sebesar Rp 20.000.000,- dicatat di jurnal umum sebagai berikut :

|                 |             |                          | Debit      | Kredit     |
|-----------------|-------------|--------------------------|------------|------------|
| 1 Februari 2022 | 7.2.8.99.00 | Pengeluaran RK SKPD_____ | 20.000.000 |            |
|                 | 1.1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah        |            | 20.000.000 |

**Ketujuh,** penjurnalan untuk penerimaan Nota Kredit dari Kuasa BUD melalui Kepala Fungsi Akuntansi Pemda yang menyatakan pendapatan Dana Alokasi Umum senilai Rp 100.000.000.000,- sebagai berikut :

1 Februari 2022      DAU : Tidak ada Jurnal

**Kedelapan,** penjurnalan untuk penerimaan SP2D LS dari Kuasa BUD melalui Kepala Fungsi Akuntansi Pemda untuk Belanja Bantuan Sosial terhadap Organisasi Sosial Kemasyarakatan senilai Rp 100.000.000,- sebagai berikut :

1 Februari 2022      Belanja Bantuan Sosial Organisasi Sosial Kemasyarakatan: Tidak ada Jurnal

**Kesembilan,** penjurnalan untuk penerimaan SP2D LS dari Kuasa BUD melalui Kepala Fungsi Akuntansi Pemda untuk Belanja Bantuan Keuangan terhadap Partai Politik senilai Rp 75.000.000,- sebagai berikut:

1 Februari 2022      Belanja Transfer Bantuan Keuangan Partai Politik : Tidak ada Jurnal

**Kesepuluh,** penjurnalan untuk penerimaan Nota Kredit dari Kuasa BUD melalui Kepala Fungsi Akuntansi Pemda yang menyatakan penerimaan pinjaman dari Bank Daerah sebesar Rp 2.000.000.000,- sebagai berikut:

1 Februari 2022      Penerimaan Pembiayaan Pinjaman Bank : Tidak ada Jurnal

**Kesebelas,** penjurnalan untuk penerimaan SP2D LS dari Kuasa BUD melalui Kepala Fungsi Akuntansi Pemda untuk pengeluaran pembiayaan pembentukan dana bergulir senilai Rp 300.000.000,- sebagai berikut:

1 Februari 2022      Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Bergulir : Tidak ada Jurnal

### **Bentuk dan Cara Pengisian Buku Jurnal**

Berdasarkan contoh jurnal tersebut diatas maka dilakukan pencatatan dalam buku jurnal umum untuk transaksi berbasis akrual yang nantinya digunakan untuk menyusun Neraca sebagai berikut :

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU JURNAL UMUM (JU)

SKPD : .....( SKPKD Kabupaten Kuningan)

Halaman 01

| Tanggal | Nomor               |               | Kode Rekening |   |   |    |    | Uraian                   | Ref. | Debit<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|---------|---------------------|---------------|---------------|---|---|----|----|--------------------------|------|---------------|----------------|
|         | Bukti<br>Penerimaan | Bukti<br>Lain |               |   |   |    |    |                          |      |               |                |
| 1       | 2                   |               | 3             |   |   |    |    | 4                        | 5    | 6             | 7              |
|         |                     |               |               |   |   |    |    |                          |      |               |                |
| 1/2/15  | -                   | -             | 1             | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas di Kas Daerah        | -    | 20.000.000    | -              |
|         |                     |               | 7             | 1 | 8 | 99 | 00 | Penerimaan RK SKPD_____  | -    | -             | 20.000.000     |
|         |                     |               |               |   |   |    |    |                          |      |               |                |
| 1/2/15  | -                   | -             | 1             | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas di Kas Daerah        | -    | 50.000.000    | -              |
|         |                     |               | 7             | 1 | 8 | 99 | 00 | Penerimaan RK SKPD_____  | -    | -             | 50.000.000     |
|         |                     |               |               |   |   |    |    |                          |      |               |                |
| 1/2/15  |                     |               | 1             | 1 | 8 | 01 | 01 | Pengeluaran RK SKPD_____ |      | 160.000.000   | -              |
|         |                     |               | 7             | 2 | 8 | 99 | 00 | Kas di Kas Daerah        |      | -             | 160.000.000    |
|         |                     |               |               |   |   |    |    |                          |      |               |                |
| 1/2/15  |                     |               | 1             | 1 | 8 | 01 | 01 | Pengeluaran RK SKPD_____ |      | 200.000.000   | -              |
|         |                     |               | 7             | 2 | 8 | 99 | 00 | Kas di Kas Daerah        |      | -             | 200.000.000    |
|         |                     |               |               |   |   |    |    |                          |      |               |                |
| 1/2/15  |                     |               | 1             | 1 | 8 | 01 | 01 | Pengeluaran RK SKPD_____ |      | 250.000.000   | -              |
|         |                     |               | 7             | 2 | 8 | 99 | 00 | Kas di Kas Daerah        |      | -             | 250.000.000    |
|         |                     |               |               |   |   |    |    |                          |      |               |                |
| 1/2/15  |                     |               | 1             | 1 | 8 | 01 | 01 | Pengeluaran RK SKPD_____ |      | 20.000.000    | -              |
|         |                     |               | 7             | 2 | 8 | 99 | 00 | Kas di Kas Daerah        |      | -             | 20.000.000     |
|         |                     |               |               |   |   |    |    |                          |      |               |                |
|         |                     |               |               |   |   |    |    |                          |      |               |                |
| Jumlah  |                     |               |               |   |   |    |    |                          |      | 700.000.000   | 700.000.000    |

Kepala Fungsi  
Akuntansi  
Pemda

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Langkah III : Melakukan Posting ke Buku Besar

Setelah melakukan penjurnalan seluruh transaksi, maka PPK-SKPKD melakukan posting atas pencatatan jurnal tersebut ke buku besar. Posting ini berguna agar seluruh transaksi yang sama-sama mempengaruhi suatu kode rekening/akun dapat dikelompokkan dalam satu buku besar untuk kode rekening/akun yang bersangkutan. Periode posting harus semakin diusahakan dapat dilakukan dalam waktu yang semakin singkat misalkan untuk periode mingguan atau bahkan harian.



Contoh buku besar SKPKD-PPKD : Kas di Kas Daerah sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD : BPKAD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 1.1.1.01.01  
Nama Rekening : Kas di Kas Daerah  
Pagu APBD : Rp. 1.000.000.000  
Pagu perubahan APBD : Rp. 1.000.000.000

Halaman 01

| No | Bukti |           | Ref | Uraian              | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|-----------|-----|---------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal   |     |                     |               |                |
| 1  |       | 1/02/2022 | JU  | Penerimaan RK SKPD  | 20.000.000    | -              |
| 2  |       | 1/02/2022 | JU  | Penerimaan RK SKPD  | 50.000.000    |                |
| 3  |       | 1/02/2022 | JU  | Pengeluaran RK SKPD | -             | 160.000.000    |
| 4  |       | 1/02/2022 | JU  | Pengeluaran RK SKPD | -             | 200.000.000    |
| 5  |       | 1/02/2022 | JU  | Pengeluaran RK SKPD | -             | 250.000.000    |
| 6  |       | 1/02/2022 | JU  | Pengeluaran RK SKPD | -             | 20.000.000     |
|    |       |           |     |                     |               |                |
|    |       |           |     | Jumlah              | 70.000.000    | 630.000.000    |
|    |       |           |     | Saldo               | -             | 560.000.000    |

Kepala Fungsi  
Akuntansi Pemda

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD-PPKD : Penerimaan RK SKPD sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPD : BPKAD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 7.1.8.99.00  
Nama Rekening : Penerimaan RK SKPD\_\_\_\_\_  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD :

Halaman 01

| No | Bukti |           | Ref | Uraian            | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|-----------|-----|-------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal   |     |                   |               |                |
| 1  |       | 1/02/2022 | JU  | Kas di Kas Daerah | -             | 20.000.000     |
| 2  |       | 1/02/2022 | JU  | Kas di Kas Daerah | -             | 50.000.000     |
|    |       |           |     |                   |               |                |
|    |       |           |     | Jumlah            | -             | 70.000.000     |
|    |       |           |     | Saldo             | -             | 70.000.000     |

Kepala Fungsi  
Akuntansi Pemda

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD-PPKD : Pengeluaran RK SKPD sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

**KABUPATEN KUNINGAN**  
**BUKU BESAR**

**SKPD** : BPKAD Kabupaten Kuningan  
**Kode Rekening** : 7.2.8.99.00  
**Nama Rekening** : Pengeluaran RK SKPD  
**Pagu APBD** :  
**Pagu perubahan APBD** :

Halaman 01

| No | Bukti |           | Ref | Uraian            | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|-----------|-----|-------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal   |     |                   |               |                |
| 1  |       | 1/02/2022 | JU  | Kas di Kas Daerah | 160.000.000   | -              |
| 2  |       | 1/02/2022 | JU  | Kas di Kas Daerah | 200.000.000   | -              |
| 3  |       | 1/02/2022 | JU  | Kas di Kas Daerah | 250.000.000   | -              |
| 4  |       | 1/02/2022 | JU  | Kas di Kas Daerah | 20.000.000    | -              |
|    |       |           |     |                   |               |                |
|    |       |           |     | Jumlah            | 630.000.000   | -              |
|    |       |           |     | Saldo             | 630.000.000   | -              |

Kepala Fungsi  
Akuntansi Pemda

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

**Langkah IV : Menyusun Neraca Saldo**

Setelah melakukan posting seluruh pencatatan dalam buku besar maka kemudian Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD membuat neraca saldo sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Penyusunan neraca saldo oleh Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD dilakukan secara triwulanan. Neraca saldo disusun dengan cara memindahkan saldo-saldo yang ada di tiap buku besar ke dalam Neraca Saldo. Contoh Neraca Saldo dari hasil pencatatan dan posting contoh transaksi keuangan diatas adalah sebagai berikut :

KABUPATEN KUNINGAN  
NERACA SALDO  
PER TANGGAL 31 Desember 2022

SKPKD : BPKAD

| Kode Rekening |   |   |    |    | Uraian                  | Jumlah      |             |
|---------------|---|---|----|----|-------------------------|-------------|-------------|
|               |   |   |    |    |                         | Debit       | Kredit      |
| 1             |   |   |    |    | 2                       | 3           | 4           |
| 1             | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas di Kas Daerah       | -           | 560.000.000 |
| 7             | 1 | 8 | 99 | 00 | Penerimaan RK SKPD____  | -           | 70.000.000  |
| 7             | 2 | 8 | 99 | 00 | Pengeluaran RK SKPD____ | 630.000.000 | -           |
|               |   |   |    |    |                         |             |             |
| Jumlah        |   |   |    |    |                         | 630.000.000 | 630.000.000 |

Kepala Fungsi  
Akuntansi  
Pemda

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

## **SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI KOREKSI DAN PENYESUAIAN DI SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (SKPKD-PPKD)**

Bagian ini menjelaskan Sistem dan Prosedur Akuntansi Koreksi dan Penyesuaian di Pemerintah Kabupaten Kuningan untuk Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mencatat transaksi pemerintah daerah dan kas daerah.

### **KEBIJAKAN UMUM**

Prosedur akuntansi koreksi dan penyesuaian pada SKPKD-PPKD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian koreksi dan penyesuaian yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Transaksi-transaksi atau pencatatan akuntansi ini meliputi :

1. Koreksi atas kesalahan pencatatan

Koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan merupakan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Sehingga koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan penyajian dalam suatu akun/pos. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Penyesuaian

Merupakan pengakuan di akhir tahun periode pelaporan keuangan yang bertujuan untuk mencatat akun terhutang/*accrual*, ditangguhkan/*defferal*, koreksi, dan ayat

jurnal lain yang diperlukan untuk memutakhirkan akun-akun neraca dan akun-akun pendapatan LO dan Beban. Dengan demikian sebetulnya koreksi termasuk dalam penyesuaian, namun karena ada koreksi di tahun berjalan maka, diatur secara terpisah.

Prosedur akuntansi atas transaksi koreksi dan penyesuaian ini harus dapat dijalankan dengan baik dan benar agar laporan keuangan dapat disajikan dengan benar. Kesalahan dalam melaksanakan prosedur akuntansi koreksi dan penyesuaian ini akan mengakibatkan laporan keuangan yang disajikan tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

#### **PIHAK-PIHAK TERKAIT**

Berbagai pihak/fungsi yang terkait dalam proses akuntansi koreksi dan penyesuaian SKPKD-PPKD beserta tugas-tugasnya adalah :

1. Pemerintah Lain
  - a. Pemerintah Lain adalah entitas pemerintah selain Pemerintah Kabupaten Kuningan yang memberikan informasi koreksi atau penyesuaian atas dana transfer seperti Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) atau Bantuan Hibah pemda lain misalnya karena ada kerjasama kegiatan.
  - b. Pemerintah Lainnya adalah entitas pemerintah selain Pemerintah Kabupaten Kuningan yang menjadi obyek pembiayaan Pemerintah Kabupaten Kuningan yang memberikan informasi koreksi atau penyesuaian atas pemberian pinjaman kepada pemerintah lain tersebut termasuk pengembaliannya. Semua obyek pembiayaan tersebut merupakan aset Pemerintah Kabupaten Kuningan.
  - c. Pemerintah Lainnya adalah entitas pemerintah selain Pemerintah Kabupaten Kuningan yang memberikan informasi koreksi atau penyesuaian atas penerimaan transfer dari Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Kuningan seperti dana

bantuan keuangan kepada Pemerintah lainnya.

- d. Pemerintah Lainnya adalah entitas pemerintah selain Pemerintah Kabupaten Kuningan yang memberikan informasi koreksi atau penyesuaian atas pemberian pembiayaan kepada Pemerintah Kabupaten Kuningan seperti pemberian utang/pinjaman dan pengembalian utang/pinjaman tersebut. Semua obyek pembiayaan tersebut merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Kuningan.

Pihak-pihak ini adalah pemberi dokumen kepada Kuasa BUD.

## 2. Pihak Lain

Pihak Lainnya adalah pihak yang memberikan dokumen sumber kepada Kuasa BUD yaitu :

- a. Pihak diluar Bendahara Penerimaan PPKD, Wajib Pajak/ Retribusi Daerah dan Pemerintah Lainnya seperti Masyarakat atau Pihak Ketiga yang memberikan informasi koreksi atau penyesuaian pendapatan kepada Pemerintah Kabupaten Kuningan misalnya sumbangan/ donasi.
- b. Pihak yang memberikan informasi koreksi atau penyesuaian yang menjadi obyek pembiayaan Pemerintah Kabupaten Kuningan misalnya Bank tempat menyimpan Dana Cadangan, Perusahaan Daerah yang diberi modalnya oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan, Pihak ketiga yang diberikan pinjaman atau diberikan modal investasi non permanen lainnya. Semua obyek pembiayaan tersebut merupakan aset Pemerintah Kabupaten Kuningan.
- c. Pihak diluar Bendahara Pengeluaran PPKD dan Pemerintah Lainnya yang memberikan informasi koreksi atau penyesuaian atas penerimaan transfer dari Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Kuningan seperti BUMN, BUMD, Masyarakat.
- d. Pihak yang memberikan pembiayaan kepada Pemerintah Kabupaten Kuningan misalnya Bank/Lembaga Keuangan/Obligator yang memberikan informasi koreksi atau penyesuaian atas pinjaman kepada Pemerintah Kabupaten

Kuningan. Semua obyek pembiayaan tersebut merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Kuningan.

Pihak-pihak ini adalah pemberi dokumen kepada Kuasa BUD.

3. Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD)

- a. Dalam pelaksanaan prosedur akuntansi koreksi atau penyesuaian SKPKD-PPKD yang mencatat transaksi pemerintah daerah, Kuasa BUD memiliki tugas menyiapkan dokumen-dokumen untuk koreksi atau penyesuaian atas transaksi dengan pemerintah lain dan atau pihak lain yang terkait dengan proses pelaksanaan akuntansi SKPKD. Nota Kredit beserta Dokumen Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan dan Nota Debet beserta Dokumen Belanja, Transfer dan Pengeluaran Pembiayaan akan diserahkan kepada PPK-SKPKD.
- b. Dalam pelaksanaan prosedur akuntansi SKPKD yang mencatat transaksi kas daerah, Kuasa BUD memiliki tugas menyiapkan Laporan Posisi Kas Harian (LPKH) yang dilampiri semua kopi atau rangkap bukti-bukti transaksi pendapatan, beban, belanja, transfer, dan pembiayaan yang terkait aset dan kewajiban serta PFK di pemerintah Kabupaten Kuningan pada hari tertentu yang diserahkan kepada Tenaga Akuntansi di Fungsi Akuntansi Pemerintah Daerah untuk pencatatan koreksi atau penyesuaiannya.

4. Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD

Dalam pelaksanaan prosedur ini, Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD bekerja mencatat transaksi koreksi atau penyesuaian Pemerintah Daerah memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Menerima dan menganalisa data dan informasi koreksi atau penyesuaian akuntansi dari dokumen anggaran DPA-PPKD yang diperoleh dari PPKD melalui PPK-SKPKD;
- b. Menerima bukti-bukti transaksi Kuasa BUD dan menganalisa data dan informasi koreksi atau penyesuaian akuntansi dari bukti transaksi tersebut;

- c. Mencatat transaksi-transaksi pemerintah daerah berdasarkan bukti-bukti yang terkait yang merupakan koreksi atau penyesuaian anggaran DPA-PPKD dan koreksi atau penyesuaian transaksi DPA-PPKD ke buku jurnal;
  - d. Memposting jurnal-jurnal terkait transaksi-transaksi koreksi atau penyesuaian pemerintah daerah ke dalam buku besarnya masing-masing;
  - a. Menyusun neraca saldo untuk persiapan penyusunan laporan keuangan, yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan; dan
  - e. Menyerahkan buku jurnal, buku besar dan neraca saldo kepada PPK-SKPKD untuk diperiksa dan ditandatangani.
5. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPKD) : **Sekretaris Badan atau Koordinator/ Kepala Sub Bagian Keuangan BPKAD.**

Dalam pelaksanaan prosedur ini, PPK-SKPKD memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Bertanggungjawab atas sistem akuntansi koreksi atau penyesuaian SKPKD-PPKD terkait transaksi pemerintah daerah yang dipimpinnya;
  - b. Memeriksa dan menandatangani hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Tenaga Akuntansi PPK-SKPKD setiap bulannya seperti Buku Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo SKPKD-PPKD yang mencatat transaksi pemerintah daerah setiap triwulan; dan
  - c. Menyerahkan Buku Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo SKPKD-PPKD yang mencatat transaksi pemerintah daerah setiap triwulan kepada PPKD selaku pengguna anggaran untuk disetujui
6. Tenaga Akuntansi di Fungsi Akuntansi Pemerintah Daerah

Dalam pelaksanaan prosedur ini, Tenaga Akuntansi di Fungsi Akuntansi Pemerintah Daerah bekerja mencatat transaksi kas daerah yang memiliki tugas sebagai berikut:



- a. Menerima Laporan Posisi Kas Harian (LPKH) dan semua kopi atau rangkap bukti-bukti transaksi pendapatan, beban, belanja, transfer, dan pembiayaan yang terkait koreksi atau penyesuaian aset dan kewajiban serta PFK di pemerintah Kabupaten Kuningan pada hari tertentu dari Kuasa BUD dan menganalisa data dan informasi akuntansi dari bukti transaksi tersebut;
- b. Mencatat transaksi-transaksi berdasarkan informasi akuntansi dari Laporan Posisi Kas Harian (LPKH) dan semua kopi atau rangkap bukti-bukti transaksi pendapatan, beban, belanja, transfer, dan pembiayaan yang terkait koreksi atau penyesuaian aset dan kewajiban serta PFK di pemerintah Kabupaten Kuningan pada hari tertentu dari Kuasa BUD ke buku jurnal;
- c. Memposting jurnal-jurnal terkait informasi akuntansi dari Laporan Posisi Kas Harian (LPKH) dan semua kopi atau rangkap bukti-bukti transaksi pendapatan, beban, belanja, transfer, dan pembiayaan yang terkait koreksi atau penyesuaian aset dan kewajiban serta PFK di pemerintah Kabupaten Kuningan pada hari tertentu dari Kuasa BUD ke dalam buku besarnya masing-masing;
- d. Menyusun neraca saldo untuk persiapan penyusunan laporan keuangan Neraca; dan
- e. Menyerahkan buku jurnal, buku besar dan neraca saldo kepada Kepala Fungsi Akuntansi Pemerintah Daerah untuk diperiksa dan ditandatangani.

**7. Kepala Fungsi Akuntansi Pemerintah Daerah : Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi BPKAD.**

Dalam pelaksanaan prosedur ini, Kepala Fungsi Akuntansi Pemerintah Daerah memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Bertanggungjawab atas sistem akuntansi koreksi atau penyesuaian SKPKD-PPKD terkait transaksi kas daerah yang dipimpinnya; dan

- b. Memeriksa dan menandatangani hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Tenaga Akuntansi Fungsi Akuntansi Pemerintah Daerah terkait koreksi atau penyesuaian setiap bulannya seperti Buku Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo SKPKD-PPKD yang mencatat transaksi kas daerah setiap triwulan; dan
  - c. Menyerahkan Buku Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo SKPKD-PPKD yang mencatat transaksi pemerintah daerah setiap triwulan kepada PPKD selaku Bendahara Umum Daerah untuk disetujui.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (tidak termasuk Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan).

dalam pelaksanaan prosedur ini, PPKD memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Sebagai Pengguna Anggaran, menyerahkan dokumen anggaran PPKD seperti DPA-PPKD kepada Tenaga Akuntansi PPK-SKPKD melalui PPK-SKPKD apabila ada koreksi atau penyesuaian;
- b. Sebagai BUD, menandatangani Laporan Posisi Kas Harian (LPKH) yang disiapkan oleh Kuasa BUD yang menjadi dasar pencatatan akuntansi oleh Tenaga Akuntansi di Fungsi Akuntansi Pemerintah Daerah apabila ada koreksi atau penyesuaian;
- c. Sebagai pengguna anggaran yang menyetujui Buku Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo yang diserahkan PPK-SKPKD setiap triwulan; dan
- d. Sebagai BUD yang menyetujui Buku Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo yang diserahkan Kepala Fungsi Akuntansi Pemda setiap triwulan.

## **DOKUMEN YANG DIGUNAKAN**

1. Bukti Setoran Bank merupakan formulir bukti melakukan setoran ke Rekening Umum Kas Daerah;
2. Bukti transfer merupakan slip bukti melakukan transfer dari suatu rekening ke rekening lainnya apabila ada koreksi atau penyesuaian;
3. Nota Kredit merupakan bukti transaksi penerimaan uang di rekening kas umum daerah apabila ada koreksi atau penyesuaian;
4. Nota Debit merupakan bukti transaksi pengeluaran uang di rekening kas umum daerah apabila ada koreksi atau penyesuaian;
5. Surat Tanda Setoran selanjutnya disebut STS adalah bukti yang dibuat untuk melakukan penyetoran uang ke Kas Daerah apabila ada koreksi atau penyesuaian;
6. Bukti pengakuan koreksi atau penyesuaian pendapatan PPKD seperti :
  - a. Peraturan Presiden tentang Dana Alokasi Umum;
  - b. Peraturan Menteri Keuangan tentang Bagi Hasil Pajak; Bagi Hasil Bukan Pajak; Dana Alokasi Khusus; dan Dana Darurat; dan
  - c. Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pendapatan Bagi Hasil Pajak; Bantuan Keuangan; Hibah; Dana Darurat dari Pemerintah Provinsi
7. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang selanjutnya disebut (SP2D) adalah Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan Kuasa Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM apabila ada koreksi atau penyesuaian;
8. Bukti pengakuan koreksi atau penyesuaian Belanja PPKD seperti :
  - a. Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Belanja Subsidi; Belanja Bantuan Sosial;
  - b. Disposisi Kepala Daerah tentang Tanggap Darurat Bencana untu Belanja Tak Terduga; dan
  - c. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NHPD) dan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Belanja Hibah.

9. Bukti pengakuan koreksi atau penyesuaian Transfer PPKD seperti Keputusan Kepala Daerah tentang Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.
10. Bukti pengakuan koreksi atau penyesuaian Investasi PPKD seperti:
  - a. Sertifikat Saham untuk pengakuan investasi saham;
  - b. Sertifikat Deposito untuk pengakuan investasi dalam Deposito;
  - c. Sertifikat Obligasi/SUN untuk pengakuan investasi dalam Sertifikat Obligasi/SUN;
  - d. Sertifikat SBI untuk pengakuan investasi dalam Sertifikat SBI;
  - e. Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Penarikan Investasi Daerah; dan
  - f. BAST (jika berupa aset) untuk pengakuan : Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara/Daerah/Swasta; Investasi dalam Obligasi/Proyek Pembangunan; Dana Bergulir; dan Investasi Non Permanen Lainnya.
11. Bukti pengakuan koreksi atau penyesuaian Aset Lainnya PPKD seperti :
  - a. Kontrak/Perjanjian Penjualan secara Angsuran/Berita Acara Penjualan untuk pengakuan Tagihan Penjualan Angsuran: Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Kepada Kepala Daerah dan Penjualan Rumah Golongan III;
  - b. Keputusan Pembebanan untuk Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
  - c. Kontrak/Perjanjian – Sewa untuk pengakuan Sewa;
  - d. Kontrak/Perjanjian Kerjasama – Pemanfaatan untuk pengakuan Kerjasama Pemanfaatan;
  - e. Kontrak/Perjanjian Kerjasama – BOT/BTO untuk pengakuan Bangun Guna Serah (BOT)/ Bangun Serah Guna (BTO); dan
  - f. Peraturan Kepala Daerah terkait *Restricted Cash*.

12. Bukti pengakuan koreksi atau penyesuaian Kewajiban PPKD seperti :
- a. Surat Perjanjian Hutang/Surat Tagihan Hutang untuk pengakuan Utang Bunga;
  - b. Surat Perjanjian Sewa Aset Pemda dan Bukti Memorial untuk Pendapatan Diterima Dimuka;
  - c. Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Belanja Subsidi; Belanja Bantuan Sosial; dan Belanja Tak Terduga; dan
  - d. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NHPD) dan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Belanja Hibah.
13. Surat Perintah BUD adalah surat yang diterbitkan BUD untuk mengeluarkan kas untuk Investasi Jangka Pendek, Dana Cadangan dan PFK apabila ada koreksi atau penyesuaian.
14. Laporan Posisi Kas Harian merupakan atas kas umum daerah yang berada dalam pengelolaannya yang dibuat setiap hari dan diserahkan kepada Kepala Daerah setiap hari kerja pertama setiap minggunya apabila ada koreksi atau penyesuaian.
15. Bukti Memorial adalah bukti transaksi yang digunakan untuk mencatat transaksi non keuangan apabila ada koreksi atau penyesuaian;

#### **BUKU DAN ATAU FORMULIR YANG DIGUNAKAN**

Buku dan atau formulir yang digunakan dalam pelaksanaan prosedur akuntansi koreksi dan penyesuaian di SKPKD-PPKD terdiri dari :

1. Buku Jurnal Koreksi (Jk)

Merupakan buku jurnal yang digunakan untuk melakukan pencatatan akuntansi penyesuaian khususnya atas transaksi-transaksi koreksi pendapatan, belanja, pembiayaan, beban, transfer, aset dan kewajiban di SKPKD-PPKD.

2. Buku Jurnal Penyesuaian (JP)

Merupakan buku jurnal yang digunakan untuk melakukan

pencatatan akuntansi penyesuaian khususnya atas transaksi-transaksi reklasifikasi akun.

3. Buku Besar (BB)

Merupakan buku yang digunakan untuk menampung pencatatan hasil posting transaksi dari buku jurnal. Buku besar ini merupakan pencatatan akuntansi atas seluruh transaksi untuk suatu rekening/akun per jenis atau obyek. Jadi setiap rekening/akun per jenis atau objek mempunyai buku besar tersendiri.

4. Buku Besar Pembantu (BP)

Buku besar dapat dilengkapi dengan buku besar pembantu sebagai alat uji silang dan kelengkapan informasi rekening tertentu. Buku besar pembantu berisi rincian akun (rincian obyek) yang telah dicatat dalam buku besar. Jika dirasakan informasi dalam buku besar sudah mencukupi maka buku besar pembantu tidak perlu dibuat lagi.

5. Neraca Saldo (NS)

Merupakan formulir yang mencatat nilai saldo setiap rekening/akun per rincian objek sehingga diketahui jumlah total dari seluruh rekening/akun.

## **KERANGKA SISTEM**

Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD diharuskan melakukan pengecekan atas penjurnalan dan posting yang telah dilakukan. Selain dari pengecekan tersebut, bisa juga diperoleh informasi kesalahan dari hasil rekonsiliasi data keuangan daerah dari analisa SPJ Fungsional yang dituangkan dalam bukti memorial. Jika dari hasil pengecekan dan hasil rekonsiliasi keuangan daerah tersebut :

1. Terdapat transaksi kesalahan tidak berulang (kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi lagi) yang mana :

a. Kesalahan yang terjadi pada periode berjalan

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada

periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun Belanja, maupun pendapatan-LO atau akun Beban

b. Kesalahan yang terjadi pada periode sebelumnya yang meliputi :

- i. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun Belanja, maupun akun pendapatan-LO dan akun Beban;
- ii. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun belanja tak terduga;
- iii. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset yang bersangkutan
- iv. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi ceraca material posisi aset selain kas, apabila laporan

keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun koreksi ekuitas;

- v. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun pendapatan lain-lain-LRA jika menambah kas dan pembetulan pada akun belanja tak terduga jika mengurangi kas;
- vi. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun koreksi ekuitas;
- vii. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun pembiayaan.
- viii. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan; dan
- ix. Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, pembetulan



dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan;

2. Terdapat kesalahan berulang dan sistemik (kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang) maka kesalahan ini dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengakui belanja tak terduga untuk LRA dan mencatat pada akun koreksi ekuitas untuk LO dan dicatat pada saat terjadi penerimaan kas untuk mengembalikan kelebihan belanja dengan mengakui pendapatan lain-lain untuk LRA dan mencatat pada akun koreksi ekuitas untuk LO;
3. Terdapat transaksi yang mengandung akun terhutang/*accrual* untuk mengakui kewajiban yang belum dibayar atau hak pemda yang belum diterima sampai dengan akhir tahun anggaran;
4. Terdapat transaksi yang mengandung akun Tangguhan/*defferal* adalah kas yang sudah diterima atau dibayarkan tetapi sampai akhir tahun anggaran belum menjadi hak/ kewajiban Pemda; dan
5. Terdapat transaksi reklasifikasi dari akun jangka panjang menjadi akun jangka pendek.

Pada saat hal tersebut diatas diketahui maka dibuatkan bukti memorialnya oleh Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD/Fungsi Akuntansi Pemda untuk dilakukan penjurnalan dalam Buku Jurnal Koreksi Dan Penyesuaian. Setelah seluruh transaksi dicatat dalam buku jurnal maka Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD/Fungsi Akuntansi Pemda kemudian melakukan posting ke buku besar paling lambat setiap triwulan atau setelah seluruh transaksi pendapatan per triwulan dicatat dalam buku jurnal.

Setelah posting dari buku jurnal ke buku besar selesai dilakukan maka kemudian Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD/Fungsi Akuntansi Pemda menyusun Neraca Saldo sebagai dasar pembuatan Laporan Keuangan untuk setiap triwulan.

## **ALUR PROSEDUR TEKNIS**

Teknis pelaksanaan sistem dan prosedur akuntansi koreksi dan penyesuaian di SKPKD-PPKD ini adalah sebagai berikut :

### **Langkah I : Menyiapkan Bukti Transaksi Koreksi dan Penyesuaian.**

Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD berdasarkan bukti transaksi koreksi dan penyesuaian membuat bukti memorial. Bukti transaksi koreksi dan penyesuaian yang dapat digunakan sebagai pendukung penyusunan bukti memorial adalah :

1. Dokumen pada transaksi kesalahan tidak berulang (kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi lagi) yang mana :
  - a. Kesalahan yang terjadi pada periode berjalan

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun Belanja, maupun pendapatan-LO atau akun Beban. Dokumen pengakuan koreksi yang dapat digunakan adalah STS, Bukti Setoran Bank, Bukti Transfer Bank, Nota Kredit, SP2D LS atau bukti pendukung koreksi non kas lainnya.
  - b. Kesalahan yang terjadi pada periode sebelumnya yang meliputi :
    - i. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan. Dokumen pengakuan koreksi yang dapat digunakan adalah STS, Bukti Setoran Bank, Bukti Transfer Bank, Nota Kredit, SP2D LS atau bukti pendukung koreksi non kas lainnya;
    - ii. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode

sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan. Dokumen pengakuan koreksi yang dapat digunakan adalah STS, Bukti Setoran Bank, Bukti Transfer Bank, Nota Kredit atau bukti pendukung koreksi non kas lainnya;

- iii. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan. Dokumen pengakuan koreksi yang dapat digunakan adalah STS, Bukti Setoran Bank, Bukti Transfer Bank, Nota Kredit, SP2D LS atau bukti pendukung koreksi non kas lainnya;
- iv. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan. Dokumen pengakuan koreksi yang dapat digunakan adalah STS, Bukti Setoran Bank, Bukti Transfer Bank, Nota Kredit, SP2D LS atau bukti pendukung koreksi non kas lainnya;
- v. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan. Dokumen pengakuan koreksi yang dapat digunakan adalah STS, Bukti Setoran Bank, Bukti Transfer Bank, Nota Kredit, SP2D LS atau bukti pendukung koreksi non kas lainnya;
- vi. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode

sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan. Dokumen pengakuan koreksi yang dapat digunakan adalah STS, Bukti Setoran Bank, Bukti Transfer Bank, Nota Kredit, SP2D LS atau bukti pendukung koreksi non kas lainnya;

vii. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih. Dokumen pengakuan koreksi yang dapat digunakan adalah STS, Bukti Setoran Bank, Bukti Transfer Bank, Nota Kredit, SP2D LS atau bukti pendukung koreksi non kas lainnya;

viii. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan. Dokumen pengakuan koreksi yang dapat digunakan adalah STS, Bukti Setoran Bank, Bukti Transfer Bank, Nota Kredit, SP2D LS atau bukti pendukung koreksi non kas lainnya; dan

ix. Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan. Dokumen pengakuan koreksi yang dapat digunakan adalah bukti pendukung koreksi non kas lainnya seperti hasil rekon data aset;

2. Dokumen pada kesalahan berulang dan sistemik (kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi

tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang). Dokumen pengakuan koreksi yang dapat digunakan adalah STS, Bukti Setoran Bank, Bukti Transfer Bank, Nota Kredit, SP2D LS atau bukti pendukung koreksi lainnya seperti surat ketetapan pendapatan;

3. Dokumen pada transaksi yang mengandung akun terhutang/*accrual* untuk mengakui kewajiban yang belum dibayar atau hak pemda yang belum diterima sampai dengan akhir tahun anggaran. Dokumen pengakuan koreksi yang dapat digunakan adalah Surat Ketetapan Pendapatan, BAST atau bukti pendukung koreksi non kas lainnya; dan
4. Dokumen pada transaksi yang mengandung akun Tangguhan/*defferal* adalah kas yang sudah diterima atau dibayarkan tetapi sampai akhir tahun anggaran belum menjadi hak/kewajiban Pemda. Dokumen pengakuan koreksi yang dapat digunakan adalah STS, Bukti Setoran Bank, Bukti Transfer Bank, Nota Kredit, SP2D LS, Nota Debet atau bukti pendukung koreksi non kas lainnya seperti daftar perhitung nilai tangguhan/*deferral*.

Berdasarkan perolehan bukti-bukti transaksi tersebut maka Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD membuat bukti memorial. Bentuk formulir atau format dari Bukti memorial dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan atau oleh masing-masing SKPKD sebagai contoh :

| <b>PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN</b><br><b>Bukti Memorial</b> |                     |   |                |
|---|---------------------|---|----------------|
| Satuan Kerja  | :                   | SKPKD Kabupaten Kuningan  |                |
| Keterangan Transaksi  | :                   | Koreksi kesalahan pencatatan penerimaan DAU yang seharusnya DAK senilai Rp 10.000.000.000,- |                |
| Tanggal bukti transaksi                                       | :                   | 24 Agustus 2022   |                |
| Nomor Bukti Transaksi   | :                   | xx.xx.x.xx.xx Tahun xxxx  |                |
| Nama Bukti Transaksi  | :                   | Peraturan Menteri Keuangan tentang DAK  |                |
| Kode Rekening/Akun  | Uraian              | Debet   | Kredit         |
|   | Jurnal sebelumnya : |   |                |
| 1.1.1.01.01   | Kas di Kas Daerah   | 10.000.000.000  | -              |
| 4.2.2.01.01   | Dana Alokasi Umum   | -   | 10.000.000.000 |
|   |                     |   |                |
|   | Jurnal koreksi :    |   |                |
| 4.2.2.01.01   | Dana Alokasi Umum   | 10.000.000.000  | -              |
| 4.2.3.01.00   | Dana Alokasi Khusus | -   | 10.000.000.000 |
| PPK-SKPD  |                     | Kepala SKPD   |                |
| (tanda tangan)  |                     | (tanda tangan)  |                |
| (nama lengkap)  |                     | (nama lengkap)  |                |
| NIP .....   |                     | NIP .....   |                |

|            |   |
|------------|---|
| 1 Des 2022 | Ditemukan kesalahan transfer pendapatan bantuan keuangan provinsi ke Pemerintah Kabupaten Kuningan yang seharusnya ke Pemerintah Daerah lainnya senilai Rp 1.000.000.000,- yang terjadi pada tanggal 5 November 2022 dan senilai Rp 500.000.000,- pada tanggal 10 November 2014. Atas kesalahan ini harus dikembalikan nilai tersebut kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat atau ke Pemerintah Daerah Lainnya dengan menggunakan SP2D LS berdasarkan informasi dari Bank Kas Daerah atau pengirim dana. |
| 5 Des 2022 | Ditemukan kesalahan kelebihan pembayaran bantuan sosial kepada partai politik bulan Desember 2014 senilai Rp 20.000.000,-. Atas kesalahan ini dilakukan koreksi dengan menyeter kelebihan pembayaran tersebut ke  |

|             |  |
|-------------|--|
|             | Kas Daerah dengan menggunakan Bukti Setoran Bank atau Bukti Transfer yang dibuat partai politik bersangkutan.  |
| 10 Des 2022 | Berdasarkan pemeriksaan BPK ditemukan mark up pada pengadaan tenda atau genset untuk korban bencana alam senilai Rp 500.000.000,- yang dilakukan pada tahun 2014. Rumah tersebut belum diserahkan sehingga masih tercatat pada aset daerah. Atas kesalahan ini dilakukan koreksi pengembalian nilai mark up tersebut ke kas daerah dengan STS/Bukti Setoran Bank/Bukti Transfer yang dibuat pejabat yang bersalah.   |
| 12 Des 2022 | Ditemukan kesalahan kekurangan pembentukan dana cadangan yang seharusnya senilai Rp 250.000.000,- tetapi dibentuk senilai Rp 200.000.000,- Atas kesalahan ini dilakukan koreksi dengan mengeluarkan selisihnya menggunakan SP2D LS. Kemudian juga terjadi kesalahan penerimaan pengembalian dana bergulir, yang seharusnya diterima sebesar Rp 110.000.000,- tetapi hanya diterima sebesar Rp 100.000.000,-. Atas kesalahan ini dilakukan koreksi selisihnya menggunakan Nota Kredit |
| 15 Des 2022 | Ditemukan kesalahan pengakuan beban dan utang belanja hibah karena kesalahan dokumen SK Kepala Daerah tentang Hibah dan/atau BAST yang seharusnya senilai Rp 24.000.000,- tetapi dibayar senilai Rp 20.000.000 yang terjadi pada bulan desember 2014. Atas kesalahan ini dilakukan koreksi dengan membayar selisihnya ke penerima hibah menggunakan SP2D LS.   |
| 20 Des 2022 | Ditemukan kesalahan pencatatan penyertaan modal pada BUMN A dicatat pada akun  |

|             |  |
|-------------|--|
|             | <p>Penyertaan modal pada BUMD B senilai Rp 500.000.000,-. Atas kesalahan ini dilakukan koreksi dengan membalik jurnal yang salah dan memunculkan jurnal yang benar atau mengurangi akun Penyertaan modal pada BUMD dan Penyertaan modal pada BUMN berdasarkan hasil rekon data aset.</p> |
| 24 Des 2022 | <p>Dilakukan pengembalian ke kas negara atas kesalahan perhitungan penetapan dana penyesuaian tunjangan profesi guru senilai Rp 2.500.000.000,- dengan cara menerbitkan SP2D LS.</p>   |
| 27 Des 2022 | <p>Ditemukan kesalahan pencatatan belanja bagi hasil pajak ke Desa sebesar Rp 54.000.000,00 yang seharusnya belanja bantuan keuangan ke Desa sebesar Rp 45.000.000,00. Atas kesalahan ini dilakukan koreksi dengan bukti memorial yang dilampiri dengan STS transaksi sebelumnya.</p>    |
| 31 Des 2022 | <p>Diketahui terdapat kesalahan kekurangan pencatatan penetapan belanja hibah kepada kelompok masyarakat senilai Rp 10.000.000,- dan terdapat kesalahan kekurangan pencatatan penetapan DAU senilai Rp 500.000.000,-.</p>  |
| 31 Des 2022 | <p>Berdasarkan perjanjian peminjaman ke Bank Daerah pada tanggal 1 Mei 2022 dicatat bagian lancar utang jangka panjang sebesar Rp 1.500.000.000,-.</p>   |
| 31 Des 2022 | <p>Berdasarkan Surat Keputusan TGR pada tanggal 1 Juli 2022 dicatat bagian lancar utang jangka panjang sebesar Rp 15.000.000,-.</p>  |



**Langkah II : Penjurnalan Transaksi Koreksi dan Penyesuaian**

Setelah ditemukan adanya transaksi koreksi dan penyesuaian yang terjadi maka Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD membuat bukti memorial sebagai dasar dilakukannya penjurnalan. Berdasarkan contoh yang diberikan diatas maka dapat dijelaskan jurnal yang telah dilakukan sebelumnya dan jurnal koreksi dan penyesuaian yang seharusnya dilakukan, seperti diuraikan dibawah ini.

Untuk contoh **pertama**, dimana diketahui pada 1 Desember 2022 ada kesalahan transfer pendapatan bantuan keuangan provinsi ke Pemerintah Kabupaten Kuningan yang seharusnya ke Pemerintah Daerah lainnya senilai Rp 1.000.000.000,- yang terjadi pada tanggal 5 November 2022 dan senilai Rp 500.000.000,- pada tanggal 10 November 2014. Jurnal koreksi atas transaksi 5 November 2022 yang dilakukan SKPKD-PPKD berdasarkan SP2D LS adalah :

|            |             |   | Debit         | Kredit        |
|------------|-------------|---|---------------|---------------|
| 1 Des 2022 | 8.2.4.01.01 | Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi –LO   | 1.000.000.000 | -             |
|            | 1.1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah                               | -             | 1.000.000.000 |
| 1 Des 2022 | 4.3.5.01.00 | Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi – LRA | 1.000.000.000 | -             |
|            | 3.1.2.05.01 | Estimasi Perubahan SAL                          | -             | 1.000.000.000 |

Sedangkan jurnal koreksi atas transaksi 10 November 2014 yang dilakukan SKPKD-PPKD adalah sebagai berikut :

|            |             |                         | Debit       | Kredit      |
|------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|
| 1 Des 2022 | 3.1.1.03.01 | Koreksi Ekuitas         | 500.000.000 | -           |
|            | 1.1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah       | -           | 500.000.000 |
| 1 Des 2022 | 5.1.8.01.01 | Belanja Tak Terduga-LRA | 500.000.000 | -           |
|            | 3.1.2.05.01 | Estimasi Perubahan SAL  | -           | 500.000.000 |

Transaksi contoh **kedua**, dimana diketahui pada 5 Desember 2022 kesalahan kelebihan pembayaran bantuan sosial kepada partai politik bulan Desember 2014 senilai Rp 20.000.000,-. Jurnal koreksi yang dilakukan berdasarkan STS/Bukti Setoran Bank/Bukti Transfer adalah:

|            |             |                         | Debit      | Kredit     |
|------------|-------------|-------------------------|------------|------------|
| 5 Des 2022 | 1.1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah       | 20.000.000 | -          |
|            | 3.1.1.03.01 | Koreksi Ekuitas         | -          | 20.000.000 |
| 5 Des 2022 | 3.1.2.05.01 | Estimasi Perubahan SAL  | 20.000.000 | -          |
|            | 4.4.4.01.01 | Pendapatan Lainnya- LRA | -          | 20.000.000 |

Transaksi contoh **ketiga**, dimana diketahui pada 10 Desember 2022, berdasarkan pemeriksaan BPK ditemukan mark up pada pengadaan rumah untuk korban bencana alam senilai Rp 500.000.000,- yang dilakukan pada tahun 2014. Rumah tersebut belum diserahkan sehingga masih tercatat pada aset daerah. Jurnal koreksi yang dilakukan berdasarkan STS/Bukti Setoran Bank/Bukti Transfer yang dibuat pejabat yang bersalah dan LHP BPK adalah :

|             |             |                        | Debit       | Kredit      |
|-------------|-------------|------------------------|-------------|-------------|
| 10 Des 2022 | 1.1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah      | 500.000.000 | -           |
|             | 1.3.3.02.09 | Bangunan Rumah Tinggal | -           | 500.000.000 |
| 10 Des 2022 | 3.1.2.05.01 | Estimasi Perubahan SAL | 500.000.000 | -           |
|             | 4.4.4.01.01 | Pendapatan Lainnya-LRA | -           | 500.00.000  |

Transaksi contoh **keempat**, dimana diketahui pada 12 Desember 2022, ditemukan kesalahan kesalahan kekurangan pembentukan dana cadangan yang seharusnya senilai Rp 250.000.000,- tetapi dibentuk senilai Rp 200.000.000. Atas kesalahan ini di lakukan koreksi dengan mengeluarkan selisihnya menggunakan SP2D LS :

|             |             |  | Debit      | Kredit     |
|-------------|-------------|--|------------|------------|
| 12 Des 2022 | 1.4.1.01.01 | Dana Cadangan  | 50.000.000 | -          |
|             | 1.1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah                                      | -          | 50.000.000 |
| 12 Des 2022 | 6.2.1.01.00 | Pengeluaran Pembiayaan<br>Pembentukan Dana<br>Cadangan | 50.000.000 | -          |
|             | 3.1.2.05.01 | Estimasi Perubahan SAL                                 | -          | 50.000.000 |

diketahui pula pada 12 Desember 2022, ditemukan kesalahan kesalahan kesalahan penerimaan pengembalian dana bergulir, yang seharusnya diterima sebesar Rp 110.000.000,- tetapi hanya diterima sebesar Rp 100.000.000,-. Atas kesalahan ini dilakukan koreksi selisihnya menggunakan Nota Kredit:

|             |             |   | Debit      | Kredit     |
|-------------|-------------|---|------------|------------|
| 12 Des 2022 | 1.1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah   | 10.000.000 | -          |
|             | 1.2.1.04.01 | Investasi Non Permanen<br>Dana Bergulir                               | -          | 10.000.000 |
| 12 Des 2022 | 3.1.2.05.01 | Estimasi Perubahan SAL  | 10.000.000 | -          |
|             | 7.1.6.02.01 | Penerimaan Pembiayaan<br>Penarikan kembali<br>Investasi Dana Bergulir | -          | 10.000.000 |

Transaksi contoh **kelima**, dimana diketahui pada 15 Desember 2022, ditemukan kesalahan pengakuan beban dan utang belanja karena kesalahan dokumen SK Kepala Daerah tentang Hibah dan/atau BAST yang seharusnya senilai Rp 24.000.000,- tetapi dibayar senilai Rp 20.000.000 yang terjadi pada bulan desember 2014. Jurnal koreksi yang dilakukan berdasarkan SP2D LS adalah :

|             |             |                         | Debit     | Kredit    |
|-------------|-------------|-------------------------|-----------|-----------|
| 15 Des 2022 | 3.1.1.03.01 | Koreksi Ekuitas         | 4.000.000 | -         |
|             | 1.1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah       | -         | 4.000.000 |
| 15 Des 2022 | 5.3.1.01.01 | Belanja Tak Terduga-LRA | 4.000.000 | -         |
|             | 3.1.2.05.01 | Estimasi Perubahan SAL  | -         | 4.000.000 |

Transaksi contoh **keenam**, dimana diketahui pada 20 Desember 2022, ditemukan kesalahan pencatatan penyertaan modal pada BUMN A dicatat pada akun Penyertaan modal pada BUMD B senilai Rp 500.000.000,-. Jurnal koreksi yang dilakukan SKPKD-PPKD berdasarkan Berita Acara Koreksi Pencatatan Aset adalah :

|             |             |                              | Debit       | Kredit      |
|-------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|
| 20 Des 2022 | 1.3.2.00.00 | Penyertaan Modal pada BUMN A | 500.000.000 | -           |
|             | 1.3.4.00.00 | Penyertaan Modal pada BUMD B | -           | 500.000.000 |

Transaksi contoh **ketujuh**, dimana diketahui pada 24 Desember 2022 dilakukan restitusi atas sumbangan masyarakat karena kelebihan pembayaran sumbangan senilai Rp 2.500.000,-. Jurnal koreksi yang dilakukan SKPD berdasarkan SP2D LS adalah :

|             |             |                         | Debit     | Kredit    |
|-------------|-------------|-------------------------|-----------|-----------|
| 24 Des 2022 | 3.1.1.03.01 | Koreksi Ekuitas         | 2.500.000 | -         |
|             | 1.1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah       | -         | 2.500.000 |
| 24 Des 2022 | 5.1.8.01.01 | Belanja Tak Terduga-LRA | 2.500.000 | -         |
|             | 3.1.2.05.01 | Estimasi Perubahan SAL  | -         | 2.500.000 |

Transaksi contoh **kedelapan**, dimana diketahui pada 27 Desember 2022 ditemukan kesalahan pencatatan belanja bagi hasil sebesar Rp 54.000.000,00 yang seharusnya belanja bantuan keuangan sebesar Rp 45.000.000,00. Jurnal koreksi yang dilakukan SKPKD-PPKD adalah :

|             |             |                        |         |         |
|-------------|-------------|------------------------|---------|---------|
|             |             |                        | Debit   | Kredit  |
| 27 Des 2022 | 7.2.8.99.99 | RK PPKD                | 900.000 | -       |
|             | 3.1.1.03.01 | Koreksi Ekuitas        | -       | 900.000 |
| 27 Des 2022 | 3.1.2.05.01 | Estimasi Perubahan SAL | 900.000 | -       |
|             | 4.4.1.01.01 | Pendapatan Lainnya-LRA | -       | 900.000 |

Transaksi contoh **kesembilan**, dimana diketahui pada 31 Desember 2022, diketahui terdapat kekurangan belanja hibah kepada masyarakat senilai Rp 10.000.000,- dan terdapat kekurangan pembayaran DAU senilai Rp 500.000.000,-. Jurnal penyesuaian sebelum direalisasikan (*realized*) yang dilakukan SKPKD berdasarkan SK Bupati dan NPHD (Untuk koreksi belanja hibah) dan Perpres DAU serta rekap realisasi penerimaan DAU 2022 (untuk koreksi DAU) adalah :

|             |             |  |             |             |
|-------------|-------------|--|-------------|-------------|
|             |             |  | Debit       | Kredit      |
| 31 Des 2022 | 9.1.5.04.01 | Beban Hibah kepada Kelompok masyarakat | 10.000.000  | -           |
|             | 2.1.5.06.01 | Utang Hibah kepada Kelompok masyarakat | -           | 10.000.000  |
|             | 1.1.3.05.03 | Piutang Dana Alokasi Umum              | 500.000.000 | -           |
|             | 8.2.1.03.01 | Dana Alokasi Umum-LO                   | -           | 500.000.000 |

Transaksi contoh **kesepuluh**, dimana diketahui Berdasarkan perjanjian peminjaman ke Bank Daerah pada tanggal 1 Mei 2022 dicatat bagian lancar utang jangka panjang sebesar Rp 1.500.000.000,-. Jurnal penyesuaian yang dilakukan SKPKD berdasarkan Perjanjian utang pinjaman ke Bank Daerah adalah :

|             |             |   |               |               |
|-------------|-------------|---|---------------|---------------|
|             |             |   | Debit         | Kredit        |
| 31 Des 2022 | 1.5.2.02.02 | Tuntutan Ganti Kerugian terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara               | 1.500.000.000 |               |
|             | 1.1.4.04.02 | Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara |               | 1.500.000.000 |

Transaksi contoh **kesebelas**, dimana diketahui Berdasarkan perjanjian peminjaman ke Bank Daerah pada tanggal 1 Mei 2022 dicatat bagian lancar utang jangka panjang sebesar Rp 1.500.000.000,-. Jurnal penyesuaian yang dilakukan SKPKD berdasarkan Perjanjian utang pinjaman ke Bank Daerah adalah :

|             |             |  | Debit         | Kredit        |
|-------------|-------------|--|---------------|---------------|
| 31 Des 2022 | 1.2.1.04.01 | Utang Pinjaman Jangka Panjang Dalam Negeri               | 1.500.000.000 |               |
|             | 1.1.1.01.01 | Bagian Lancar Utang Pinjaman Jangka Panjang Dalam Negeri |               | 1.500.000.000 |

**Bentuk dan Cara Pengisian Buku Jurnal**

Berdasarkan contoh jurnal tersebut diatas maka dilakukan pencatatan dalam buku jurnal umum untuk transaksi berbasis akrual yang nantinya digunakan untuk menyusun LO dan Neraca sebagai berikut :

**KABUPATEN KUNINGAN**  
**BUKU JURNAL KOREKSI (Jk)**

**SKPKD** : .....( SKPKD Kabupaten Kuningan)

**Halaman 01**

| Tanggal  | Nomor            |            | Kode Rekening |   |   |    |    | Uraian  | Ref. | Debit (Rp)    | Kredit (Rp)   |
|----------|------------------|------------|---------------|---|---|----|----|---|------|---------------|---------------|
|          | Bukti Penerimaan | Bukti Lain |               |   |   |    |    |   |      |               |               |
| 1        | 2                |            | 3             |   |   |    |    | 4   | 5    | 6             | 7             |
|          |                  |            |               |   |   |    |    |   |      |               |               |
| 1/12/15  | -                | -          | 8             | 2 | 4 | 01 | 01 | Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi-LO  | -    | 1.000.000.000 | -             |
|          |                  |            | 1             | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas di Kas Daerah                             | -    | -             | 1.000.000.000 |
|          |                  |            |               |   |   |    |    |   |      |               |               |
| 1/12/15  | -                | -          | 4             | 3 | 5 | 01 | 00 | Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi-LRA | -    | 1.000.000.000 | -             |
|          |                  |            | 3             | 1 | 2 | 05 | 01 | Estimasi Perubahan SAL                        | -    | -             | 1.000.000.000 |
|          |                  |            |               |   |   |    |    |   |      |               |               |
| 1/12/15  | -                | -          | 3             | 1 | 1 | 03 | 01 | Koreksi Ekuitas                               | -    | 500.000.000   | -             |
|          |                  |            | 1             | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas di Kas Daerah                             | -    | -             | 500.000.000   |
|          |                  |            |               |   |   |    |    |   |      |               |               |
| 1/12/15  | -                | -          | 5             | 1 | 8 | 01 | 01 | Belanja Tak Terduga-LRA                       | -    | 500.000.000   | -             |
|          |                  |            | 3             | 1 | 2 | 05 | 01 | Estimasi Perubahan SAL                        | -    | -             | 500.000.000   |
|          |                  |            |               |   |   |    |    |   |      |               |               |
| 5/12/15  | -                | -          | 1             | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas di Kas Daerah                             | -    | 20.000.000    | -             |
|          |                  |            | 3             | 1 | 1 | 03 | 01 | Koreksi Ekuitas                               | -    | -             | 20.000.000    |
|          |                  |            |               |   |   |    |    |   |      |               |               |
| 5/12/15  | -                | -          | 3             | 1 | 2 | 05 | 01 | Estimasi Perubahan SAL                        | -    | 20.000.000    | -             |
|          |                  |            | 4             | 4 | 1 | 01 | 01 | Pendapatan Lainnya-LRA                        | -    | -             | 20.000.000    |
|          |                  |            |               |   |   |    |    |   |      |               |               |
| 10/12/15 | -                | -          | 1             | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas di Kas Daerah                             | -    | 500.000.000   | -             |
|          |                  |            | 1             | 3 | 3 | 02 | 09 | Bangunan Rumah Tinggal                        | -    | -             | 500.000.000   |
|          |                  |            |               |   |   |    |    |   |      |               |               |
| 10/12/15 | -                | -          | 3             | 1 | 2 | 05 | 01 | Estimasi Perubahan SAL                        | -    | 500.000.000   | -             |
|          |                  |            | 4             | 4 | 4 | 01 | 01 | Pendapatan Lainnya-LRA                        | -    | -             | 500.000.000   |
|          |                  |            |               |   |   |    |    |   |      |               |               |

|          |   |   |   |   |   |    |    |   |   |               |               |
|----------|---|---|---|---|---|----|----|---|---|---------------|---------------|
| 12/12/15 | - | - | 1 | 4 | 1 | 01 | 01 | Dana Cadangan   | - | 50.000.000    | -             |
|          |   |   | 1 | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas di Kas Daerah   | - | -             | 50.000.000    |
|          |   |   |   |   |   |    |    |   |   |               |               |
| 12/12/15 | - | - | 6 | 2 | 1 | 01 | 00 | Pengeluaran<br>Pembiayaan<br>Pembentukan Dana<br>Cadangan                                 | - | 50.000.000    | -             |
|          |   |   | 3 | 1 | 2 | 05 | 01 | Estimasi Perubahan<br>SAL   | - | -             | 50.000.000    |
|          |   |   |   |   |   |    |    |   |   |               |               |
| 12/12/15 | - | - | 1 | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas di Kas Daerah   | - | 10.000.000    | -             |
|          |   |   | 1 | 2 | 1 | 04 | 01 | Investasi Non<br>Permanen Dana<br>Bergulir  | - | -             | 10.000.000    |
|          |   |   |   |   |   |    |    |   |   |               |               |
| 12/12/15 | - | - | 3 | 1 | 2 | 05 | 01 | Estmasi Perubahan<br>SAL  | - | 10.000.000    | -             |
|          |   |   | 6 | 1 | 6 | 06 | 01 | Penerimaan<br>Pembiayaan<br>Penarikan kembali<br>Investasi Dana<br>Bergulir               | - | -             | 10.000.000    |
|          |   |   |   |   |   |    |    |   |   |               |               |
| 15/12/15 | - | - | 3 | 1 | 1 | 03 | 01 | Koreksi Ekuitas   | - | 4.000.000     | -             |
|          |   |   | 1 | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas di Kas Daerah   | - | -             | 4.000.000     |
|          |   |   |   |   |   |    |    |   |   |               |               |
| 15/12/15 | - | - | 5 | 1 | 8 | 01 | 01 | Belanja Tak<br>Terduga-LRA  | - | 4.000.000     | -             |
|          |   |   | 3 | 1 | 2 | 05 | 01 | Estimasi Perubahan<br>SAL   | - | -             | 4.000.000     |
|          |   |   |   |   |   |    |    |   |   |               |               |
| 20/12/15 | - | - | 1 | 3 | 2 | 00 | 00 | Penyertaan Modal<br>pada BUMN A   | - | 500.000.000   | -             |
|          |   |   | 1 | 3 | 4 | 00 | 00 | Penyertaan Modal<br>pada BUMD B   | - | -             | 500.000.000   |
|          |   |   |   |   |   |    |    |   |   |               |               |
| 24/12/15 | - | - | 3 | 1 | 1 | 03 | 01 | Koreksi Ekuitas   | - | 2.500.000     | -             |
|          |   |   | 1 | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas di Kas Daerah   | - | -             | 2.500.000     |
|          |   |   |   |   |   |    |    |   |   |               |               |
| 24/12/15 | - | - | 5 | 1 | 8 | 01 | 01 | Belanja Tak<br>Terduga-LRA  | - | 2.500.000     | -             |
|          |   |   | 3 | 1 | 2 | 05 | 01 | Estimasi Perubahan<br>SAL   | - | -             | 2.500.000     |
|          |   |   |   |   |   |    |    |   |   |               |               |
| 27/12/15 | - | - | 7 | 2 | 8 | 99 | 99 | Pengeluaran RK<br>PPKD  | - | 900.000       | -             |
|          |   |   | 3 | 1 | 1 | 03 | 01 | Koreksi Ekuitas   | - | -             | 900.000       |
|          |   |   |   |   |   |    |    |   |   |               |               |
| 27/12/15 | - | - | 3 | 1 | 2 | 05 | 01 | Estimasi Perubahan<br>SAL   | - | 900.000       | -             |
|          |   |   | 4 | 4 | 1 | 01 | 01 | Pendapatan<br>Lainnya-LRA   | - | -             | 900.000       |
|          |   |   |   |   |   |    |    |   |   |               |               |
| 31/12/15 | - | - | 9 | 1 | 5 | 04 | 01 | Beban Hibah<br>kepada Kelompok<br>Masyarakat  | - | 10.000.000    | -             |
|          |   |   | 2 | 1 | 5 | 06 | 01 | Utang Hibah kepada<br>Kelompok<br>Masyarakat  | - | -             | 10.000.000    |
|          |   |   |   |   |   |    |    |   |   |               |               |
| 31/12/15 | - | - | 1 | 1 | 3 | 05 | 03 | Piutang Dana<br>Alokasi Umum  | - | 500.000.000   | -             |
|          |   |   | 8 | 2 | 1 | 03 | 01 | Dana Alokasi<br>Umum-LO   | - | -             | 500.000.000   |
|          |   |   |   |   |   |    |    |   |   |               |               |
| 31/12/15 | - | - | 1 | 5 | 2 | 02 | 02 | Tuntutan Ganti<br>Kerugian terhadap<br>Pegawai Negeri<br>bukan Bendahara                  | - | 1.500.000.000 | -             |
|          |   |   | 1 | 1 | 4 | 04 | 02 | Bagian Lancar<br>Tuntutan Ganti<br>Kerugian terhadap<br>Pegawai Negeri<br>bukan Bendahara | - | -             | 1.500.000.000 |
|          |   |   |   |   |   |    |    |   |   |               |               |
|          |   |   |   |   |   |    |    |   |   |               |               |
|          |   |   |   |   |   |    |    |   |   |               |               |

|           |   |   |   |   |   |    |    |  |      |               |               |
|-----------|---|---|---|---|---|----|----|--|------|---------------|---------------|
| 31/12/15  | - | - | 2 | 2 | 1 | 00 | 00 | Utang Pinjaman<br>Jangka Panjang<br>Dalam Negeri         | -    | 1.500.000.000 | -             |
|           |   |   | 2 | 1 | 3 | 00 | 00 | Bagian Lancar<br>Utang Jangka<br>Panjang Dalam<br>Negeri | -    | -             | 1.500.000.000 |
| Jumlah    |   |   |   |   |   |    |    |  |      | 8.184.800.000 | 8.184.800.000 |
| PPK-SKPKD |   |   |   |   |   |    |    |  | PPKD |               |               |

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Langkah III : Melakukan Posting ke Buku Besar

Setelah melakukan penjurnalan seluruh transaksi, maka PPK-SKPKD melakukan posting atas pencatatan jurnal tersebut ke buku besar. Posting ini berguna agar seluruh transaksi yang sama-sama mempengaruhi suatu kode rekening/akun dapat dikelompokkan dalam satu buku besar untuk kode rekening/akun yang bersangkutan. Periode posting harus semakin diusahakan dapat dilakukan dalam waktu yang semakin singkat misalkan untuk periode mingguan atau bahkan harian.

Contoh buku besar SKPKD-PPKD : Kas di Kas Daerah sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPKD : BPKAD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 1.1.1.01.01  
Nama Rekening : Kas di Kas Daerah  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD :

Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian  | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|---|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |   |               |                |
| 1  |       | 1/12/2022  | Jk  | Bantuan Keuangan dari<br>Pemerintah Provinsi-LO | -             | 1.000.000.000  |
| 2  |       | 1/12/2022  | Jk  | Koreksi Ekuitas                                 | -             | 500.000.000    |
| 3  |       | 5/12/2022  | Jk  | Koreksi Ekuitas                                 | 20.000.000    | -              |
| 4  |       | 10/12/2022 | Jk  | Bangunan Rumah Tinggal                          | 500.000.000   | -              |
| 5  |       | 12/12/2022 | Jk  | Dana Cadangan                                   | -             | 50.000.000     |
| 6  |       | 12/12/2022 | Jk  | Investasi Non Permanen Dana<br>Bergulir         | 10.000.000    | -              |
| 7  |       | 15/12/2022 | Jk  | Koreksi Ekuitas                                 | -             | 4.000.000      |
| 8  |       | 24/12/2022 | Jk  | Koreksi Ekuitas                                 | -             | 2.500.000      |
|    |       |            |     |   |               |                |
|    |       |            |     | Jumlah  | 530.000.000   | 1.556.500.000  |
|    |       |            |     | Saldo   | -             | 1.026.500.000  |

PPK-SKPKD  
  
(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

PPKD  
  
(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–PPKD : Piutang Dana Alokasi Umum sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPKD : BPKAD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 1.1.3.05.03  
Nama Rekening : Piutang Dana Alokasi Umum  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD :

Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian            | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|-------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |                   |               |                |
| 1  |       | 31/12/2022 | Jk  | Dana Alokasi Umum | 500.000.000   | -              |
|    |       |            |     |                   |               |                |
|    |       |            |     | Jumlah            | 500.000.000   | -              |
|    |       |            |     | Saldo             | 500.000.000   | -              |

PPK–SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–PPKD : Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPKD : BPKAD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 1.1.4.04.02  
Nama Rekening : Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD :

Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian  | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|---|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |   |               |                |
| 1  |       | 31/12/2022 | Jk  | Tuntutan Ganti Kerugian terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara | -             | 1.500.000.000  |
|    |       |            |     |   |               |                |
|    |       |            |     | Jumlah  | -             | 1.500.000.000  |
|    |       |            |     | Saldo   | -             | 1.500.000.000  |

PPK–SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....



Contoh buku besar SKPKD–PPKD : Investasi Non Permanen Dana Bergulir sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPKD : BPKAD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 1.2.1.04.01  
Nama Rekening : Investasi Non Permanen Dana Bergulir  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD :

Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian            | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|-------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |                   |               |                |
| 1  |       | 12/12/2022 | Jk  | Kas di Kas Daerah | -             | 10.000.000     |
|    |       |            |     |                   |               |                |
|    |       |            |     | Jumlah            | -             | 10.000.000     |
|    |       |            |     | Saldo             | -             | 10.000.000     |

PPK–SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–PPKD : Penyertaan Modal pada BUMN A sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPKD : BPKAD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 1.3.2.00.00  
Nama Rekening : Penyertaan Modal pada BUMN A  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD :

Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian                       | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|------------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |                              |               |                |
| 1  |       | 20/12/2022 | Jk  | Penyertaan Modal pada BUMD B | 500.000.000   | -              |
|    |       |            |     |                              |               |                |
|    |       |            |     | Jumlah                       | 500.000.000   | -              |
|    |       |            |     | Saldo                        | 500.000.000   | -              |

PPK–SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–PPKD : Bangunan Rumah Tinggal sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPKD

Kode Rekening

Nama Rekening

Pagu APBD

Pagu perubahan APBD

:

:

:

:

:

BPKAD Kabupaten Kuningan

1.3.3.02.09

Bangunan Rumah Tinggal

Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian            | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|-------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |                   |               |                |
| 1  |       | 10/12/2022 | Jk  | Kas di Kas Daerah | -             | 500.000.000    |
|    |       |            |     |                   |               |                |
|    |       |            |     | Jumlah            | -             | 500.000.000    |
|    |       |            |     | Saldo             | -             | 500.000.000    |

PPK–SKPKDPPKD

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP.....

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–PPKD : Penyertaan Modal pada BUMD B sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPKD

Kode Rekening

Nama Rekening

Pagu APBD

Pagu perubahan APBD

:

:

:

:

:

BPKAD Kabupaten Kuningan

1.3.4.00.00

Penyertaan Modal pada BUMD B

Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian                       | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|------------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |                              |               |                |
| 1  |       | 20/12/2022 | Jk  | Penyertaan Modal pada BUMN A | -             | 500.000.000    |
|    |       |            |     |                              |               |                |
|    |       |            |     | Jumlah                       | -             | 500.000.000    |
|    |       |            |     | Saldo                        | -             | 500.000.000    |

PPK–SKPKDPPKD

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP.....

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–PPKD : Dana Cadangan sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

**KABUPATEN KUNINGAN**  
**BUKU BESAR**

**SKPKD**  
**Kode Rekening**  
**Nama Rekening**  
**Pagu APBD**  
**Pagu perubahan APBD**

: BPKAD Kabupaten Kuningan  
: 1.4.1.01.01  
: Dana Cadangan  
:  
:

Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian            | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|-------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |                   |               |                |
| 1  |       | 12/12/2022 | Jk  | Kas di Kas Daerah | 50.000.000    | -              |
|    |       |            |     |                   |               |                |
|    |       |            |     | Jumlah            | 50.000.000    | -              |
|    |       |            |     | Saldo             | 50.000.000    | -              |

PPK–SKPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–PPKD : Tuntutan Ganti Kerugian terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

**KABUPATEN KUNINGAN**  
**BUKU BESAR**

**SKPKD**  
**Kode Rekening**  
**Nama Rekening**  
**Pagu APBD**  
**Pagu perubahan APBD**

: BPKAD Kabupaten Kuningan  
: 1.5.2.02.02  
: Tuntutan Ganti Kerugian terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara  
:  
:

Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian   | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|--|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |  |               |                |
| 1  |       | 31/12/2022 | Jk  | Bag Lancar Tuntutan Ganti Kerugian terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara | 1.500.000.000 | -              |
|    |       |            |     |  |               |                |
|    |       |            |     | Jumlah   | 1.500.000.000 | -              |
|    |       |            |     | Saldo  | 1.500.000.000 | -              |

PPK–SKPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–PPKD : Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Dalam Negeri sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPKD  
Kode Rekening  
Nama Rekening  
Pagu APBD  
Pagu perubahan APBD

: BPKAD Kabupaten Kuningan  
: 2.1.3.00.00  
: Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Dalam Negeri  
:  
:

Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian                                 | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|--|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |  |               |                |
| 1  |       | 31/12/2022 | Jk  | Utang Pinjaman Jk Panjang Dalam Negeri | -             | 1.500.000.000  |
|    |       |            |     |  |               |                |
|    |       |            |     | Jumlah                                 | -             | 1.500.000.000  |
|    |       |            |     | Saldo                                  | -             | 1.500.000.000  |

PPK–SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–PPKD : Utang Hibah kepada Kelompok Masyarakat sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPKD  
Kode Rekening  
Nama Rekening  
Pagu APBD  
Pagu perubahan APBD

: BPKAD Kabupaten Kuningan  
: 2.1.5.06.01  
: Utang Hibah kepada Kelompok Masyarakat  
:  
:

Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian                                 | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|--|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |  |               |                |
| 1  |       | 31/12/2022 | Jk  | Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat | -             | 10.000.000     |
|    |       |            |     |  |               |                |
|    |       |            |     | Jumlah                                 | -             | 10.000.000     |
|    |       |            |     | Saldo                                  | -             | 10.000.000     |

PPK–SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–PPKD : Utang Pinjaman Jangka Panjang Dalam Negeri sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPKD : BPKAD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 2.2.1.00.00  
Nama Rekening : Utang Pinjaman Jangka Panjang Dalam Negeri  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD :

Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian                                       | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|--|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |  |               |                |
| 1  |       | 31/12/2022 | Jk  | Bag Lancar Utang Jangka Panjang Dalam Negeri | 1.500.000.000 | -              |
|    |       |            |     |  |               |                |
|    |       |            |     | Jumlah                                       | 1.500.000.000 | -              |
|    |       |            |     | Saldo  | 1.500.000.000 | -              |

PPK–SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–PPKD : Koreksi Ekuitas sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPKD : BPKAD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 3.1.1.03.01  
Nama Rekening : Koreksi Ekuitas  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD :

Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian            | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|-------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |                   |               |                |
| 1  |       | 1/12/2022  | Jk  | Kas di Kas Daerah | 500.000.000   | -              |
| 2  |       | 5/12/2022  | Jk  | Kas di Kas Daerah | -             | 20.000.000     |
| 3  |       | 15/12/2022 | Jk  | Kas di Kas Daerah | 4.000.000     | -              |
| 4  |       | 24/12/2022 | Jk  | Kas di Kas Daerah | 2.500.000     | -              |
| 5  |       | 27/12/2022 | Jk  | RK PPKD           | -             | 900.000        |
|    |       |            |     |                   |               |                |
|    |       |            |     | Jumlah            | 506.500.000   | 20.900.000     |
|    |       |            |     | Saldo             | 485.600.000   | -              |

PPK–SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–PPKD : Estimasi Perubahan SAL sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPKD : BPKAD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 3.1.2.05.01  
Nama Rekening : Estimasi Perubahan SAL  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD :

Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian  | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|---|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |   |               |                |
| 1  |       | 1/12/2022  | Jk  | Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi-LRA | -             | 1.000.000.000  |
| 2  |       | 1/12/2022  | Jk  | Belanja Tak Terduga                           | -             | 500.000.000    |
| 3  |       | 5/12/2022  | Jk  | Pendapatan Lain-lain-LRA                      | 20.000.000    | -              |
| 4  |       | 10/12/2022 | Jk  | Pendapatan Lain-lain- LRA                     | 500.000.000   | -              |
| 5  |       | 12/12/2022 | Jk  | Pengeluaran Pemb.Pembentukan Dana Cadangan    | -             | 50.000.000     |
| 6  |       | 12/12/2022 | Jk  | Pnerimaan Pemb.Penarikan Dana Bergulir        | 10.000.000    | -              |
| 7  |       | 15/12/2022 | Jk  | Belanja Tak Terduga-LRA                       | -             | 4.000.000      |
| 8  |       | 24/12/2022 | Jk  | Belanja Tak Terduga-LRA                       | -             | 2.500.000      |
| 9  |       | 27/12/2022 | Jk  | Pendapatan Lain-lain-LRA                      | 900.000       | -              |
|    |       |            |     | Jumlah  | 530.900.000   | 1.556.500.000  |
|    |       |            |     | Saldo   | -             | 1.025.600.000  |

PPK–SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–PPKD : Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi-LRA sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPKD : BPKAD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 4.3.5.01.00  
Nama Rekening : Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi-LRA  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD :

Halaman 01

| No | Bukti |           | Ref | Uraian                 | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|-----------|-----|------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal   |     |                        |               |                |
| 1  |       | 1/12/2022 | Jk  | Estimasi Perubahan SAL | 1.000.000.000 | -              |
|    |       |           |     | Jumlah                 | 1.000.000.000 | -              |
|    |       |           |     | Saldo                  | 1.000.000.000 | -              |

PPK–SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD-PPKD : Pendapatan Lainnya-LRA sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPKD : BPKAD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 4.4.4.01.01  
Nama Rekening : Pendapatan Lainnya-LRA  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD :

Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian                 | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |                        |               |                |
| 1  |       | 5/12/2022  | Jk  | Estimasi Perubahan SAL | -             | 20.000.000     |
| 2  |       | 10/12/2022 | Jk  | Estimasi Perubahan SAL | -             | 500.000.000    |
| 3  |       | 27/12/2022 | Jk  | Estimasi Perubahan SAL | -             | 900.000        |
|    |       |            |     |                        |               |                |
|    |       |            |     | Jumlah                 | -             | 520.900.000    |
|    |       |            |     | Saldo                  | -             | 520.900.000    |

PPK-SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD-PPKD : Belanja Tak Terduga sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPKD : BPKAD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 5.1.8.01.01  
Nama Rekening : Belanja Tak Terduga-LRA  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD :

Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian                 | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |                        |               |                |
| 1  |       | 1/12/2022  | Jk  | Estimasi Perubahan SAL | 500.000.000   | -              |
| 2  |       | 15/12/2022 | Jk  | Estimasi Perubahan SAL | 4.000.000     | -              |
| 3  |       | 24/12/2022 | Jk  | Estimasi Perubahan SAL | 2.500.000     | -              |
|    |       |            |     |                        |               |                |
|    |       |            |     | Jumlah                 | 506.500.000   | -              |
|    |       |            |     | Saldo                  | 506.500.000   | -              |

PPK-SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD-PPKD : Penerimaan Pembiayaan  
Penarikan kembali Investasi Dana Bergulir sebagai hasil posting dari  
pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPKD : BPKAD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 6.1.6.06.01  
Nama Rekening : Penerimaan Pembiayaan Penarikan kembali Investasi Dana  
Bergulir  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian                 | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |                        |               |                |
| 1  |       | 12/12/2022 | Jk  | Estimasi Perubahan SAL | -             | 10.000.000     |
|    |       |            |     |                        |               |                |
|    |       |            |     | Jumlah                 | -             | 10.000.000     |
|    |       |            |     | Saldo                  | -             | 10.000.000     |

PPK-SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD-PPKD : Pengeluaran Pembiayaan  
Pembentukan Dana Cadangan sebagai hasil posting dari pencatatan di  
Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPKD : BPKAD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 6.2.1.01.00  
Nama Rekening : Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian                 | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |                        |               |                |
| 1  |       | 12/12/2022 | Jk  | Estimasi Perubahan SAL | 50.000.000    | -              |
|    |       |            |     |                        |               |                |
|    |       |            |     | Jumlah                 | 50.000.000    | -              |
|    |       |            |     | Saldo                  | 50.000.000    | -              |

PPK-SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....



Contoh buku besar SKPKD–PPKD : Pengeluaran RK PPKD sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPKD  
Kode Rekening  
Nama Rekening  
Pagu APBD  
Pagu perubahan APBD

:  
:  
:  
:  
:

BPKAD Kabupaten Kuningan  
7.2.8.99.99  
Pengeluaran RK PPKD

Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian          | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|-----------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |                 |               |                |
| 1  |       | 27/12/2022 | Jk  | Koreksi Ekuitas | 900.000       | -              |
|    |       |            |     |                 |               |                |
|    |       |            |     | Jumlah          | 900.000       | -              |
|    |       |            |     | Saldo           | 900.000       | -              |

PPK–SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–PPKD : Dana Alokasi Umum-LO sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPKD  
Kode Rekening  
Nama Rekening  
Pagu APBD  
Pagu perubahan APBD

:  
:  
:  
:  
:

BPKAD Kabupaten Kuningan  
8.2.1.03.01  
Dana Alokasi Umum-LO

Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian                    | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|---------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |                           |               |                |
| 1  |       | 31/12/2022 | Jk  | Piutang Dana Alokasi Umum | -             | 500.000.000    |
|    |       |            |     |                           |               |                |
|    |       |            |     | Jumlah                    | -             | 500.000.000    |
|    |       |            |     | Saldo                     | -             | 500.000.000    |

PPK–SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–PPKD : Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi-LO sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPKD : BPKAD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 8.2.4.01.01  
Nama Rekening : Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi-LO  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |           | Ref | Uraian            | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|-----------|-----|-------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal   |     |                   |               |                |
| 1  |       | 1/12/2022 | Jk  | Kas di Kas Daerah | 1.000.000.000 | -              |
|    |       |           |     |                   |               |                |
|    |       |           |     | Jumlah            | 1.000.000.000 | -              |
|    |       |           |     | Saldo             | 1.000.000.000 | -              |

PPK–SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–PPKD : Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPKD : BPKAD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 9.1.5.04.01  
Nama Rekening : Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian                                 | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|--|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |  |               |                |
| 1  |       | 31/12/2022 | Jk  | Utang Hibah kepada Kelompok Masyarakat | 10.000.000    | -              |
|    |       |            |     |  |               |                |
|    |       |            |     | Jumlah                                 | 10.000.000    | -              |
|    |       |            |     | Saldo                                  | 10.000.000    | -              |

PPK–SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

#### **Langkah IV : Menyusun Neraca Saldo**

Setelah melakukan posting seluruh pencatatan dalam buku besar maka kemudian Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD membuat neraca saldo sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Penyusunan neraca saldo oleh Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD dilakukan secara triwulanan. Neraca saldo disusun dengan cara memindahkan saldo-saldo yang ada di tiap buku besar ke dalam Neraca Saldo. Contoh Neraca Saldo dari hasil pencatatan dan posting contoh transaksi keuangan diatas adalah sebagai berikut :

KABUPATEN KUNINGAN  
NERACA SALDO  
PER TANGGAL 31 Desember 2022

SKPKD : BPKAD

| Kode Rekening |   |   |    |    | Uraian  | Jumlah        |               |
|---------------|---|---|----|----|---|---------------|---------------|
|               |   |   |    |    |   | Debit         | Kredit        |
| 1             |   |   |    |    | 2   | 3             | 4             |
| 1             | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas di Kas Daerah   | -             | 1.026.500.000 |
| 1             | 1 | 3 | 05 | 03 | Piutang Dana Alokasi Umum   | 500.000.000   | -             |
| 1             | 1 | 4 | 04 | 02 | Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara | -             | 1.500.000.000 |
| 1             | 2 | 1 | 04 | 01 | Investasi Non Permanen Dana Bergulir  | -             | 10.000.000    |
| 1             | 3 | 2 | 00 | 00 | Penyertaan Modal pada BUMN A  | 500.000.000   | -             |
| 1             | 3 | 3 | 02 | 09 | Bangunan Rumah Tinggal  | -             | 500.000.000   |
| 1             | 3 | 4 | 00 | 00 | Penyertaan Modal pada BUMD B  | -             | 500.000.000   |
| 1             | 4 | 1 | 01 | 01 | Dana Cadangan   | 50.000.000    | -             |
| 1             | 5 | 2 | 02 | 02 | Tuntutan Ganti Kerugian Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara               | 1.500.000.000 | -             |
| 2             | 1 | 3 | 00 | 00 | Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Dalam Negeri                               | -             | 1.500.000.000 |
| 2             | 1 | 5 | 06 | 01 | Utang Hibah Kepada Kelompok Masyarakat  | -             | 10.000.000    |
| 2             | 2 | 1 | 00 | 00 | Utang Pinjaman Jangka Panjang Dalam Negeri                                    | 1.500.000.000 | -             |
| 3             | 1 | 1 | 03 | 01 | Koreksi Ekuitas   | 485.600.000   | -             |
| 3             | 1 | 2 | 05 | 01 | Estimasi Perubahan SAL  | -             | 1.025.600.000 |
| 4             | 3 | 5 | 01 | 00 | Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi-LRA                                 | 1.000.000.000 | -             |
| 4             | 4 | 4 | 01 | 01 | Pendapatan Lainnya-LRA  | -             | 520.900.000   |
| 5             | 1 | 8 | 01 | 01 | Belanja Tak Terduga-LRA   | 506.500.000   | -             |
| 6             | 1 | 6 | 06 | 01 | Penerimaan Pembiayaan Penarikan kembali Investasi Dana Bergulir               | -             | 10.000.000    |
| 6             | 2 | 1 | 01 | 00 | Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan                              | 50.000.000    | -             |
| 7             | 2 | 8 | 99 | 99 | Pengeluaran RK PPKD   | 900.000       | -             |
| 8             | 2 | 1 | 03 | 01 | Dana Alokasi Umum-LO  | -             | 500.000.000   |
| 8             | 2 | 4 | 01 | 01 | Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi-LO                                  | 1.000.000.000 | -             |
| 9             | 1 | 5 | 04 | 01 | Beban Hibah Kepada Kelompok Masyarakat  | 10.000.000    | -             |
|               |   |   |    |    |   |               |               |
| Jumlah        |   |   |    |    |   | 7.103.000.000 | 7.103.000.000 |

PPK-SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

## **SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI DI KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH (SKPKD- KUASA BUD)**

Bagian ini menjelaskan Sistem dan Prosedur Akuntansi secara umum di Pemerintah Kabupaten Kuningan untuk Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mencatat transaksi di Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut sistem dan prosedur akuntansi SKPKD-Kuasa BUD.

### **KEBIJAKAN UMUM**

Sistem dan prosedur akuntansi di SKPKD-Kuasa BUD meliputi serangkaian proses mulai dari diperolehnya bukti transaksi keuangan, dilakukannya pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual ataupun menggunakan aplikasi komputer.

Akuntansi SKPKD-Kuasa BUD dijalankan oleh Bidang Perbendaharaan Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah yang bertugas untuk menyusun Laporan Arus Kas (LAK) sesuai amanat PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan khususnya pada Lampiran I.02 PSAP 01 tentang Laporan Keuangan di paragraf 15 yang berbunyi :

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas pelaporan, kecuali:

- (a) Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum
- (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum Negara dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya.

Terkait dengan peranan tersebut diatas maka sistem dan prosedur akuntansi yang dijalankan di SKPKD-Kuasa BUD adalah meliputi :

1. Akuntansi pendapatan;
2. Akuntansi belanja;
3. Akuntansi penerimaan pembiayaan;
4. Akuntansi pengeluaran pembiayaan;
5. Akuntansi koreksi; dan
6. Akuntansi lain-lain.

Berdasarkan peran SKPKD-Kuasa BUD sebagai entitas akuntansi tersebut diatas maka sistem akuntansi di SKPKD-Kuasa BUD dilaksanakan untuk menghasilkan Laporan Keuangan yang terdiri atas:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Daerah,
2. Neraca Kuasa BUD, dan
3. Laporan Arus Kas (LAK) Daerah

#### **PIHAK-PIHAK TERKAIT**

Berbagai pihak/fungsi yang terkait dalam proses akuntansi pada SKPKD-Kuasa BUD beserta tugas-tugasnya adalah :

1. Bendahara Penerimaan SKPD

Dalam pelaksanaan prosedur ini, Bendahara Penerimaan SKPD memiliki tugas menyiapkan dokumen-dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan akuntansi pendapatan SKPD karena telah melakukan penerimaan pendapatan dan menyetorkannya ke Kas Daerah. Pihak ini adalah pemberi dokumen kepada Kuasa BUD.

2. Bendahara Penerimaan PPKD

Dalam pelaksanaan prosedur ini, Bendahara Penerimaan PPKD memiliki tugas menerima dokumen-dokumen atas transaksi yang pendapatan SKPKD-PPKD yang diterima dari Kuasa BUD dan menyempurnakannya untuk kepentingan pencatatan PPK-SKPKD.

3. Bendahara Pengeluaran SKPD

Dalam pelaksanaan prosedur ini, Bendahara Pengeluaran SKPD memiliki tugas menyiapkan dokumen-dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan akuntansi belanja SKPD karena telah melakukan penerimaan uang persediaan (UP/GU/TU) dari dan menyetorkannya sisanya ke Kas Daerah serta mencatat belanja yang dibayar langsung oleh Kas Daerah. Pihak ini adalah pemberi dokumen kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD).

4. Bendahara Pengeluaran PPKD

Dalam pelaksanaan prosedur ini, Bendahara Pengeluaran PPKD memiliki tugas menerima dokumen-dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan akuntansi belanja dan pembiayaan PPKD yang melalui Bendahara Pengeluaran PPKD dan menyiapkannya untuk kepentingan pencatatan oleh Kuasa BUD dan PPK-SKPKD.

5. Wajib Pajak/Wajib Retribusi Daerah

Dalam pelaksanaan prosedur ini, Wajib Pajak/Wajib Retribusi Daerah adalah pihak yang menyetorkan pajak/retribusi daerah ke rekening kas umum daerah melalui transfer atau langsung setor ke bank, yang tidak melalui Bendahara Penerimaan SKPD. Pihak ini adalah pemberi dokumen pendapatan SKPD kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD).

6. Pemerintah Lainnya

- a. Pemerintah Lainnya adalah entitas pemerintah yang lebih tinggi kedudukannya daripada Pemerintah Kabupaten Kuningan yang memberikan dana bantuan seperti Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
- b. Pemerintah Lainnya adalah entitas pemerintah selain Pemerintah Kabupaten Kuningan yang memberikan pembiayaan atau mengembalikan pembiayaan kepada Pemerintah Kabupaten Kuningan seperti pemberian

pinjaman atau pengembalian pinjaman.

- c. Pemerintah Lainnya adalah entitas pemerintah yang menerima transfer dari Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Kuningan seperti dana bantuan keuangan kepada Pemerintah lainnya.
- d. Pemerintah Lainnya adalah entitas pemerintah selain pemerintah Kabupaten Kuningan yang menerima pembiayaan dari Pemerintah Kabupaten Kuningan seperti pemberian utang/pinjaman dan pengembalian utang/pinjaman dari Pemerintah Kabupaten Kuningan kepada Pemerintah Lainnya.

Pihak-pihak ini adalah pemberi dokumen kepada Kuasa BUD.

7. Pihak Ketiga

Dalam pelaksanaan prosedur ini, Pihak Ketiga adalah pihak yang menerima pembayaran belanja melalui transfer langsung Kas Daerah, yang tidak melalui Bendahara Pengeluaran. Pihak ini adalah pemberi dokumen kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD).

8. Pihak Lainnya

Pihak Lainnya adalah pihak yang memberikan dokumen sumber kepada Kuasa BUD yaitu :

- a. Pihak di luar Bendahara Penerimaan PPKD, Wajib Pajak/Retribusi Daerah dan Pemerintah Lainnya yang memberikan pendapatan kepada Pemerintah Kabupaten Kuningan misalnya sumbangan/donasi.
- b. Pihak yang memberikan kas sebagai penerimaan pembiayaan kepada Pemerintah Kabupaten Kuningan misalnya Bank tempat menyimpan Dana Cadangan, Perusahaan Daerah yang asetnya dijual, Pihak Ketiga yang memberikan pinjaman atau mengembalikan kepada Pemerintah Daerah.
- c. Pihak di luar Bendahara Pengeluaran PPKD dan Pemerintah Lainnya yang menerima transfer dari Kas Daerah



Pemerintah Kabupaten Kuningan seperti BUMN, BUMD dan Masyarakat.

- d. Pihak yang menerima kas dari pengeluaran pembiayaan Pemerintah Kabupaten Kuningan misalnya Bank tempat menyimpan Dana Cadangan, Perusahaan Daerah yang kepemilikannya dibeli sebagian atau seluruhnya, Pihak ketiga yang menerima pinjaman atau menerima pembayaran utang dari Pemerintah Kabupaten Kuningan.

9. Tenaga Akuntansi di Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD)

Dalam pelaksanaan prosedur ini, Tenaga Akuntansi di Kuasa BUD memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menerima kopi atau rangkap bukti-bukti transaksi dari Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran baik SKPD maupun PPKD dan menganalisa data dan informasi akuntansi dari bukti transaksi tersebut;
- b. Mencatat transaksi-transaksi pemerintah daerah berdasarkan bukti-bukti transaksi ke buku jurnal;
- c. Memposting jurnal-jurnal terkait transaksi-transaksi pemerintah daerah ke dalam buku besarnya masing-masing;
- d. Menyusun neraca saldo untuk persiapan penyusunan laporan keuangan, yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas; dan
- e. Menyerahkan buku jurnal, buku besar dan neraca saldo kepada Kuasa BUD untuk diperiksa dan ditandatangani.

10. Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD)

Dalam pelaksanaan prosedur ini, Kuasa BUD memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Bertanggungjawab atas sistem akuntansi SKPKD-Kuasa BUD yang dipimpinnya;
- b. Melaksanakan perintah PPKD untuk melakukan rekonsiliasi keuangan daerah dengan menganalisa laporan pertanggungjawaban fungsional dari seluruh Bendahara

SKPD dan seluruh Bendahara PPKD;

- c. Memeriksa dan menandatangani hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Tenaga Akuntansi PPK-Kuasa BUD setiap bulannya seperti Buku Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo SKPKD-Kuasa BUD; dan
  - d. Menyerahkan Buku Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo SKPKD-Kuasa BUD setiap triwulan kepada PPKD selaku BUD untuk disetujui.
11. Pengguna Anggaran/Kepala SKPD : Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, Kepala Satuan, Camat, Lurah, Asisten Administrasi, Sekretaris DPRD, dan Direktur. Dalam pelaksanaan prosedur ini, Pengguna Anggaran memiliki tugas membantu rekonsiliasi keuangan daerah dengan menyerahkan laporan pertanggungjawaban fungsional SKPD dan SKPKD-PPKD-nya kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Bendahara Umum Daerah (BUD) : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (tidak termasuk Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan).

Dalam pelaksanaan prosedur ini, PPKD/BUD memiliki tugas :

- a. Meminta Kuasa BUD melakukan rekonsiliasi keuangan daerah dengan menganalisa laporan pertanggungjawaban pendapatan fungsional yang diterima dari seluruh Bendahara SKPD dan Penerimaan PPKD; dan
- b. Mengetahui dan menandatangani hasil pekerjaan Kuasa BUD seperti Buku Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo SKPKD-Kuasa BUD setiap triwulan; dan

#### **DOKUMEN YANG DIGUNAKAN**

- 1. Bukti transfer merupakan slip bukti melakukan transfer dari suatu rekening ke rekening lainnya;
- 2. Nota Kredit merupakan bukti transaksi penerimaan uang di

- rekening kas umum daerah;
3. Nota Debit merupakan bukti transaksi pengeluaran uang di rekening kas umum daerah;
  4. Surat Tanda Setoran selanjutnya disebut STS adalah bukti yang dibuat untuk melakukan penyetoran uang ke Kas Daerah;
  5. Kuitansi Pembayaran, adalah dokumen yang menunjukkan informasi koreksi atas pembayaran barang dan/atau jasa dari mekanisme UP/GU/TU;
  6. Bukti tambahan pengakuan koreksi pendapatan PPKD seperti :
    - a. Peraturan Presiden tentang Dana Alokasi Umum;
    - b. Peraturan Menteri Keuangan tentang Bagi Hasil Pajak; Bagi Hasil Bukan Pajak; Dana Alokasi Khusus; dan Dana Darurat; dan
    - c. Keputusan Kepala Daerah tentang Pendapatan Bagi Hasil Pajak; Bantuan Keuangan; Hibah; Dana Darurat dari Pemerintah Provinsi
  7. Surat Perintah BUD adalah surat yang diterbitkan BUD untuk mengeluarkan kas untuk Investasi Jangka Pendek dan PFK;
  8. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut (SP2D) adalah dokumen yang digunakan sebagai pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM;
  9. Bukti tambahan pengakuan koreksi Belanja PPKD seperti Keputusan Kepala Daerah tentang Belanja Subsidi; Belanja Bantuan Sosial; dan Belanja Tak Terduga;
  10. Bukti tambahan pengakuan koreksi Transfer PPKD seperti Keputusan Kepala Daerah tentang Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan;
  11. Bukti tambahan pengakuan koreksi Investasi PPKD seperti:
    - a. Sertifikat Saham untuk pengakuan investasi saham;
    - b. Sertifikat Deposito untuk pengakuan investasi dalam Deposito;

- c. Sertifikat Obligasi/SUN untuk pengakuan investasi dalam Sertifikat Obligasi/SUN;
  - d. Sertifikat SBI untuk pengakuan investasi dalam Sertifikat SBI;
12. Bukti tambahan pengakuan koreksi Aset Lainnya PPKD seperti :
- a. Kontrak/Perjanjian Penjualan secara Angsuran/Berita Acara Penjualan untuk pengakuan Tagihan Penjualan Angsuran: Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Kepada Kepala Daerah dan Penjualan Rumah Golongan III;
  - b. Keputusan Pembebanan untuk Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
  - c. Kontrak/Perjanjian – Sewa untuk pengakuan Sewa;
  - d. Kontrak/Perjanjian Kerjasama – Pemanfaatan untuk pengakuan Kerjasama Pemanfaatan;
  - e. Kontrak/Perjanjian Kerjasama – BOT/BTO untuk pengakuan Bangun Guna Serah (BOT)/ Bangun Serah Guna (BTO); dan
  - f. Peraturan Kepala Daerah terkait *Restricted Cash*.
13. Bukti tambahan pengakuan koreksi Kewajiban PPKD seperti :
- a. Surat Perjanjian Hutang/Surat Tagihan Hutang untuk pengakuan Utang Bunga;
  - b. Surat Perjanjian Sewa Aset Pemda dan Bukti Memorial untuk Pendapatan Diterima Dimuka;
  - c. Keputusan Kepala Daerah tentang Belanja Subsidi; Belanja Bantuan Sosial; dan Belanja Tak Terduga; dan
  - d. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NHPD) dan Keputusan Kepala Daerah tentang Belanja Hibah;
14. Laporan Pertanggungjawaban Transaksi dari bendahara pengeluaran SKPD;
15. Laporan Pertanggungjawaban Fungsional dari semua bendahara baik di SKPD maupun SKPKD-PPKD; dan

16. Bukti Memorial adalah bukti transaksi yang digunakan untuk mencatat transaksi non keuangan apabila ada koreksi khususnya yang berdasarkan hasil rekonsiliasi keuangan daerah.

## **BUKU DAN ATAU FORMULIR YANG DIGUNAKAN**

Buku dan atau formulir yang digunakan dalam pelaksanaan prosedur akuntansi di SKPKD-Kuasa BUD ini paling tidak terdiri dari :

1. Buku Jurnal Penerimaan Kas (JM)

Merupakan buku jurnal yang digunakan untuk melakukan pencatatan akuntansi atas transaksi penerimaan kas yang berasal dari penerimaan pendapatan maupun koreksi atas pengembalian belanja baik dari SKPD maupun SKPKD-PPKD.

2. Buku Jurnal Pengeluaran Kas (JK)

Merupakan buku jurnal yang digunakan untuk melakukan pencatatan akuntansi atas transaksi pengeluaran kas untuk pengeluaran belanja maupun koreksi atas pengembalian pendapatan.

3. Buku Besar (BB)

Merupakan buku yang digunakan untuk menampung pencatatan hasil posting transaksi dari buku jurnal. Buku besar ini merupakan pencatatan akuntansi atas seluruh transaksi untuk suatu rekening/akun per jenis atau obyek. Jadi setiap rekening/akun per jenis atau objek mempunyai buku besar tersendiri.

4. Buku Besar Pembantu (BP)

Buku besar dapat dilengkapi dengan buku besar pembantu sebagai alat uji silang dan kelengkapan informasi rekening/akun tertentu. Buku besar pembantu berisi rincian akun (rincian obyek) yang telah dicatat dalam buku besar. Jika dirasakan informasi dalam buku besar sudah mencukupi maka buku besar pembantu tidak perlu dibuat lagi.

5. Neraca Saldo (NS)

Merupakan formulir yang mencatat nilai saldo setiap rekening/akun per rincian objek sehingga diketahui jumlah total dari seluruh rekening/akun.

6. Buku Jurnal Koreksi (Jk)

Merupakan buku jurnal yang digunakan untuk melakukan pencatatan akuntansi penyesuaian khususnya atas transaksi-transaksi koreksi pendapatan, belanja, beban, transfer, pembiayaan, aset dan kewajiban.

### **KERANGKA SISTEM**

Secara umum proses akuntansi di SKPKD-Kuasa BUD dimulai saat Tenaga Akuntansi di Kuasa BUD berdasarkan bukti-bukti transaksi dari Kuasa BUD yang diperoleh dari berbagai pihak seperti :

1. Bendahara Penerimaan SKPD
2. Bendahara Penerimaan PPKD
3. Bendahara Pengeluaran SKPD
4. Bendahara Pengeluaran PPKD
5. Wajib Pajak/Wajib Retribusi
6. Pemerintah Lain
7. Pihak Ketiga
8. Pihak Lain

Berdasarkan bukti transaksi keuangan dari para pihak tersebut tersebut telah diterima maka Tenaga Akuntansi di Kuasa BUD kemudian melakukan pencatatan akuntansi dalam buku jurnal terkait. Jadi pencatatan akuntansi untuk setiap transaksi dilakukan pada saat terjadinya transaksi dan atau pada saat bukti transaksi tersebut diterima namun pengakuan transaksi tetap pada tanggal bukti transaksi.

Kemudian secara berkala, Tenaga Akuntansi di Kuasa BUD melakukan posting dari buku jurnal ke buku besar (pembantu). Posting ini merupakan pengelompokkan pencatatan transaksi ke dalam buku besar (pembantu) berdasarkan pada suatu kode rekening/akun transaksi. Setelah posting dari buku jurnal ke buku besar selesai dilakukan maka kemudian Tenaga Akuntansi di Kuasa BUD menyusun Neraca Saldo sebagai dasar pembuatan Laporan Keuangan untuk setiap triwulan yang diserahkan paling lambat **1 (satu) bulan setelah triwulan berakhir kepada Kuasa BUD.**

### **ALUR PROSEDUR TEKNIS**

Penjelasan alur prosedur teknis dalam prosedur akuntansi di SKPKD-Kuasa BUD ini meliputi penjelasan atas sistem dan prosedur untuk :

1. Akuntansi Pendapatan;
2. Akuntansi Penerimaan Pembiayaan;
3. Akuntansi Belanja;
4. Akuntansi Pengeluaran Pembiayaan;
5. Akuntansi Koreksi; dan
6. Akuntansi Lain-lain.

Untuk lebih memperjelas masing-masing sistem dan prosedur tersebut maka diberikan penjelasan tersendiri dalam bagian tersendiri sebagai lampiran dari penjelasan sistem dan prosedur ini. Bagian ini bisa dianggap sebagai pengantar yang memberikan penjelasan secara umum dari penjelasan teknis pelaksanaan di setiap sistem dan prosedur akuntansi di SKPKD-Kuasa BUD.

### **Langkah I : Penerimaan Bukti Transaksi**

Tenaga Akuntansi SKPKD-Kuasa BUD yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menerima dokumen transaksi keuangan dari Kuasa BUD. Atas penerimaan bukti transaksi ini, Tenaga Akuntansi SKPKD-Kuasa BUD harus menganalisa hingga

benar-benar meyakini informasi akuntansi dari bukti tersebut. Setelah digunakan sebagai dasar melakukan pencatatan akuntansi maka bukti transaksi tersebut harus disimpan dengan baik.

## **Langkah II : Melakukan Pencatatan di Buku Jurnal**

Berdasarkan bukti transaksi yang diterimanya maka Tenaga Akuntansi di SKPKD-Kuasa BUD melakukan pencatatan akuntansi di buku jurnal terkait. Pencatatan di buku jurnal disesuaikan dengan jenis transaksi yang terjadi, yaitu :

1. Buku Jurnal Penerimaan Kas (JM)

Pencatatan akuntansi di buku jurnal penerimaan kas dilakukan untuk transaksi penerimaan kas berasal baik dari pendapatan, belanja maupun pembiayaan.

2. Buku Jurnal Pengeluaran Kas (JK)

Pencatatan akuntansi di buku jurnal pengeluaran kas dilakukan untuk transaksi pengeluaran kas berasal baik dari pendapatan, belanja maupun pembiayaan.

Dibawah ini akan dijelaskan mengenai bentuk dari masing-masing buku jurnal serta tata cara pengisian buku jurnal tersebut.

### **Bentuk dan Cara Pengisian Buku Jurnal Penerimaan Kas (JM)**

Merupakan buku jurnal yang digunakan untuk melakukan pencatatan akuntansi atas transaksi pendapatan, pengembalian belanja, transfer, penerimaan pembiayaan pemerintah daerah, investasi jangka pendek dan PFK. Contoh Buku Jurnal Penerimaan Kas (JM), yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:



KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU JURNAL PENERIMAAN KAS (JM)

SKPKD : ..... Halaman .....

| Tanggal | Nomor               |               | Kode Rekening | Uraian | Ref. | Debit<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|---------|---------------------|---------------|---------------|--------|------|---------------|----------------|
|         | Bukti<br>Penerimaan | Bukti<br>Lain |               |        |      |               |                |
| 1       | 2                   |               | 3             | 4      | 5    | 6             | 7              |
|         |                     |               |               |        |      |               |                |
|         |                     |               |               |        |      |               |                |
|         |                     |               |               |        |      |               |                |
|         |                     |               |               |        |      |               |                |
|         |                     |               |               |        |      |               |                |
| Jumlah  |                     |               |               |        |      |               |                |

Kuasa BUD PPKD/BUD

(tanda tangan) (tanda tangan)  
(nama lengkap) (nama lengkap)  
NIP..... NIP.....

Adapun cara Pengisian Buku Jurnal Penerimaan Kas adalah sebagai berikut:

1. Diisikan Nama SKPKD yang menggunakan buku jurnal penerimaan kas ini.
2. Diisikan no dari halaman buku jurnal ini.
3. Kolom 1 diisi dengan tanggal transaksi penerimaan kas.
4. Kolom 2 diisi dengan nomor bukti penerimaan kas.
5. Kolom 3 diisi dengan kode rekening kas dan sumber penerimaan kasnya, sesuai dengan jurnal yang dilakukan.
6. Kolom 4 diisi dengan nama rekening kas dan sumber penerimaan kasnya, sesuai dengan jurnal yang dilakukan. Bisa juga ditambah uraian lain berupa keterangan dari penerimaan kas tersebut.
7. Kolom 5 diisi dengan tanda checklist disesuaikan dengan nomor dokumen sumber dan saat posting ke buku besar.
8. Kolom 6 diisi dengan nilai jurnal untuk sisi debit.
9. Kolom 7 diisi dengan nilai jumlah untuk sisi kredit.
10. Diisikan jumlah total dari kolom 6 dan kolom 7.
11. Pada akhir suatu periode, misalkan pada periode setelah

dilakukan posting, buku jurnal ditandatangani oleh Kuasa BUD dan PPKD/BUD dengan mencantumkan nama dan NIP.

**Bentuk dan Cara Pengisian Buku Jurnal Pengeluaran Kas (JK)**

Merupakan buku jurnal yang digunakan untuk melakukan pencatatan akuntansi atas transaksi pengembalian pendapatan, belanja, transfer, pengeluaran pembiayaan pemerintah daerah, investasi jangka pendek dan PFK. Contoh Buku Jurnal Pengeluaran Kas (JK), yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

**KABUPATEN KUNINGAN**  
**BUKU JURNAL PENGELUARAN KAS (JK)**

**SKPD** : ..... Halaman .....

| Tanggal | Nomor                |               | Kode Rekening | Uraian | Ref. | Debit<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|---------|----------------------|---------------|---------------|--------|------|---------------|----------------|
|         | Bukti<br>Pengeluaran | Bukti<br>Lain |               |        |      |               |                |
| 1       | 2                    |               | 3             | 4      | 5    | 6             | 7              |
|         |                      |               |               |        |      |               |                |
|         |                      |               |               |        |      |               |                |
|         |                      |               |               |        |      |               |                |
|         |                      |               |               |        |      |               |                |
|         |                      |               |               |        |      |               |                |
| Jumlah  |                      |               |               |        |      |               |                |

Kuasa BUD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

PPKD/BUD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Adapun cara Pengisian Buku Jurnal Pengeluaran Kas adalah sebagai berikut :

1. Diisikan nama SKPKD yang menggunakan buku jurnal pengeluaran Kas ini.
2. Diisikan no dari halaman buku jurnal ini.
3. Kolom 1 diisi dengan tanggal transaksi pengeluaran kas.
4. Kolom 2 diisi dengan nomor bukti pengeluaran kas yang sah.

5. Kolom 3 diisi dengan kode rekening sumber dan rekening yang mengakibatkan pengeluaran kas terjadi, sesuai dengan jurnal yang dilakukan.
6. Kolom 4 diisi dengan nama rekening sumber dan rekening yang mengakibatkan pengeluaran kas terjadi, sesuai dengan jurnal yang dilakukan.
7. Kolom 5 diisi dengan tanda checklist disesuaikan dengan nomor dokumen sumber dan saat posting ke buku besar.
8. Kolom 6 diisi dengan nilai jurnal untuk sisi debit.
9. Kolom 7 diisi dengan nilai jumlah untuk sisi kredit.
10. Diisikan jumlah total dari kolom 6 dan kolom 7.
11. Pada akhir suatu periode, misalkan pada periode setelah dilakukan posting, buku jurnal ditandatangani oleh Kuasa BUD dan PPKD/BUD dengan mencantumkan nama dan NIP.

### **Langkah III : Melakukan Posting ke Buku Besar**

Setiap periode secara berkala, seluruh pencatatan jurnal yang telah dilakukan diposting ke Buku Besar SKPKD sesuai dengan kode rekeningnya masing-masing. Posting dilakukan paling lambat setelah selesainya pencatatan atas seluruh transaksi pada suatu bulan. Posting ini merupakan pengelompokan pencatatan transaksi ke dalam buku besar berdasarkan pada suatu kode rekening transaksi.

Contoh format Buku Besar SKPKD yang dapat digunakan adalah sebagai berikut :

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPKD : .....  
Kode Rekening : .....  
Nama Rekening : .....  
Pagu APBD : .....  
Pagu perubahan APBD : .....  
Halaman .....

| No | Bukti |         | Ref | Uraian | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp) |
|----|-------|---------|-----|--------|---------------|----------------|---------------|
|    | Nomor | Tanggal |     |        |               |                |               |
| 1  | 2     | 3       | 4   | 5      | 6             | 7              | 8             |
|    |       |         |     |        |               |                |               |
|    |       |         |     |        |               |                |               |
|    |       |         |     |        |               |                |               |
|    |       |         |     |        |               |                |               |
|    |       |         |     | Jumlah |               |                |               |

Kuasa BUD PPKD/BUD

(tanda tangan) (tanda tangan)  
(nama lengkap) (nama lengkap)  
NIP..... NIP.....

Cara Pengisian Buku Besar, yang contoh bentuknya seperti terlihat diatas, adalah sebagai berikut :

1. Diisikan Nama SKPKD yang menggunakan buku besar ini.
2. Diisikan nomor kode rekening untuk buku besar ini, diisikan kode rekening sampai dengan rincian objek.
3. Diisikan dengan nama rekening untuk buku besar ini.
4. Diisikan nilai pagu anggaran dalam APBD atau nilai yang telah ditetapkan dalam anggaran untuk kode rekening ini.
5. Diisikan nilai pagu perubahan anggaran dalam Perubahan APBD atau nilai yang telah ditetapkan dalam perubahan anggaran untuk kode rekening ini.
6. Diisikan nomor halaman dari buku besar ini.
7. Kolom no 1 diisikan nomor urut transaksi
8. Kolom no 2 diisikan nomor bukti transaksi.
9. Kolom no 3 diisikan tanggal bukti transaksi.
10. Kolom no 4 diisikan kode buku jurnal (JM, JK, JU, JP) untuk menandakan rekening yang terpengaruh oleh transaksi yang

terjadi, sesuai dengan buku jurnal yang sudah dibuat sebelumnya.

11. Kolom no 5 diisikan nama rekening terpengaruh oleh transaksi yang terjadi, sesuai dengan jurnal yang dilakukan. Bisa juga ditambah uraian lain berupa keterangan dari transaksi tersebut.
12. Kolom no 6 diisikan nilai pencatatan di sebelah debit, sesuai dengan nilai dalam buku jurnal.
13. Kolom no 7 diisikan nilai pencatatan di sebelah kredit, sesuai dengan nilai dalam buku jurnal.
14. Kolom no 8 diisikan nilai saldo setelah memperhitungkan debit dan kredit sesuai saldo normalnya.
15. Diisikan jumlah total dari kolom 6 dan kolom 7.
16. Pada akhir suatu periode buku besar ditandatangani oleh Kuasa BUD dan PPKD/BUD dengan mencantumkan nama dan NIP.

Posting kedalam buku besar ini sesuai dengan kode rekening dari transaksi. Sehingga untuk satu kode dan nama rekening akan terdapat satu buku besar. Untuk itu jumlah dari buku besar sangat tergantung dari banyaknya kode rekening yang digunakan dalam transaksi yang terjadi.

#### **Langkah IV : Menyusun Neraca Saldo dan Laporan Keuangan**

Paling lambat sebelum periode penyampaian laporan keuangan maka Kuasa BUD membuat neraca saldo sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Neraca saldo disusun dengan cara memindahkan nilai saldo yang ada di tiap buku besar ke dalam formulir Neraca Saldo.

Contoh format Neraca Saldo yang dapat digunakan adalah :

KABUPATEN KUNINGAN  
NERACA SALDO  
PER TANGGAL .....

SKPKD : ..... Halaman .....

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |        |
|---------------|--------|--------|--------|
|               |        | Debit  | Kredit |
| 1             | 2      | 3      | 4      |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               | Jumlah |        |        |

PPKD/BUD

Kuasa BUD

(tanda tangan)

(tanda tangan)

(nama lengkap)

(nama lengkap)

NIP.....

NIP.....

Cara pengisian formulir neraca saldo, yang contoh bentuknya seperti terlihat dihalaman sebelumnya, adalah sebagai berikut :

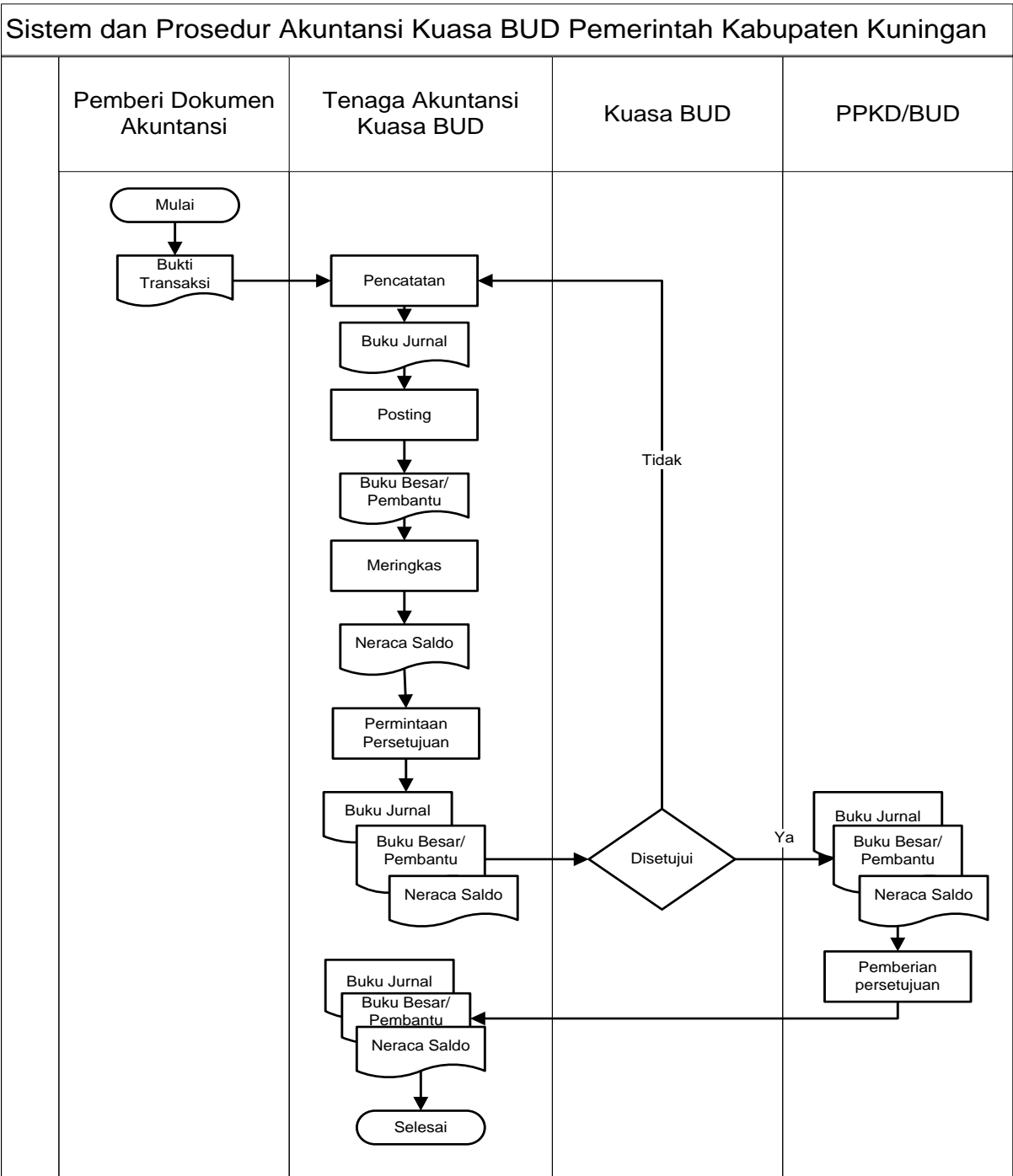
1. Diisikan tanggal dari periode penyusunan neraca saldo, misalkan jika neraca saldo disusun untuk periode 1 januari hingga 31 maret, maka dituliskan pertanggal 31 maret 20xx.
2. Diisikan nama dari SKPKD yang menyusun neraca saldo ini.
3. Diisikan no halaman dari formulir neraca saldo ini.
4. Kolom 1 diisi kode rekening – kode rekening yang mempunyai nilai saldo di buku besar.
5. Kolom 2 diisi nama rekening – nama rekening yang mempunyai nilai saldo di buku besar sesuai dengan kode rekeningnya yang telah dicatat di kolom sebelumnya.
6. Kolom 3 diisi nilai saldo sebelah debit yaitu nilai saldo dari kode / nama rekening yang mempunyai nilai saldo di sebelah debit seperti tercatat dalam buku besar atau sesuai dengan kondisi saldo normal kode / nama rekening tersebut.
7. Kolom 4 diisi nilai saldo sebelah kredit yaitu nilai saldo dari kode / nama rekening yang mempunyai nilai saldo di sebelah

kredit seperti tercatat dalam buku besar atau sesuai dengan kondisi saldo normal kode / nama rekening tersebut.

8. Diisikan nilai jumlah masing-masing dari total sisi debit dan total sisi kredit.
9. Formulir neraca saldo yang disusun ditandatangani oleh Kuasa BUD dan PPKD/BUD dengan mencantumkan nama dan NIP-nya.

Setelah menyusun neraca saldo maka Kuasa BUD dapat menyusun laporan keuangan dengan cara memindahkan nama dan kode rekening/akun serta nilainya yang tertera dalam neraca saldo ke dalam bentuk format laporan keuangan. Untuk kode rekening/akun aset, dan ekuitas maka dimasukkan kedalam format laporan Neraca, untuk kode rekening/akun yang terkait dengan pendapatan-LRA dan belanja transfer, dan pembiayaan maka dimasukkan kedalam format Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas.

Demikianlah uraian penjelasan mengenai sistem dan prosedur akuntansi di SKPKD-Kuasa BUD Pemerintah Kabupaten Kuningan. Seluruh uraian penjelasan diatas dapat digambarkan secara sederhana dalam suatu gambaran aliran proses sebagai berikut :



**Keterangan Simbol Flowchart :**

- : Simbol Terminator yaitu simbol untuk memulai dan mengakhiri sistem dan prosedur
- : Simbol Dokumen yaitu simbol untuk melambangkan dokumen, buku atau formulir
- : Simbol proses yaitu simbol untuk melambangkan proses pengelolaan data dari dokumen, buku atau formulir
- : Simbol keputusan yaitu simbol yang melambangkan pengambilan keputusan ya atau tidak
- : Simbol panah yaitu simbol yang melambangkan arah dokumen, buku atau formulir dan arah proses



## **SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI PENDAPATAN DI SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (SKPKD) – KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH**

Bagian ini menjelaskan Sistem dan Prosedur Akuntansi Pendapatan di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mencatat transaksi di kuasa bendahara umum daerah.

### **KEBIJAKAN UMUM**

Prosedur akuntansi pendapatan pada SKPKD-Kuasa BUD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan transaksi realisasi pendapatan SKPD dan SKPKD-PPKD dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Sistem dan prosedur akuntansi ini disusun berdasarkan kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

### **PIHAK-PIHAK TERKAIT**

Berbagai pihak/fungsi yang terkait dalam proses akuntansi pendapatan pada SKPKD-Kuasa BUD beserta tugas-tugasnya adalah :

1. Bendahara Penerimaan SKPD

Dalam pelaksanaan prosedur ini, Bendahara Penerimaan SKPD memiliki tugas menyiapkan dokumen-dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan akuntansi pendapatan SKPD karena telah melakukan penerimaan pendapatan dan menyetorkannya ke Kas Daerah. Dokumen-dokumen tersebut diserahkan Bendahara Penerimaan SKPD kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) pada saat penyetoran pendapatan ke Rekening Kas Umum Daerah.

2. Bendahara Penerimaan PPKD

Dalam pelaksanaan prosedur ini, Bendahara Penerimaan PPKD memiliki tugas menerima dokumen-dokumen atas transaksi realisasi pendapatan SKPKD-PPKD yang diterima dari Kuasa BUD dan menyiapkannya untuk kepentingan pencatatan PPK-SKPKD.

3. Wajib Pajak/Wajib Retribusi Daerah

Dalam pelaksanaan prosedur ini, Wajib Pajak/Wajib Retribusi Daerah adalah pihak yang menyetorkan pajak/retribusi daerah ke rekening kas umum daerah melalui transfer atau langsung setor ke bank, yang tidak melalui Bendahara Penerimaan SKPD. Pihak ini adalah pemberi dokumen pendapatan SKPD kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD).

4. Pemerintah Lainnya

Pemerintah Lain adalah entitas pemerintah yang lebih tinggi kedudukannya daripada Pemerintah Kabupaten Kuningan yang memberikan dana transfer seperti Pendapatan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pihak ini adalah pemberi dokumen pendapatan kepada Kuasa BUD.

5. Pihak Lainnya

Pihak Lainnya adalah pihak diluar Bendahara Penerimaan SKPD dan PPKD, Wajib Pajak/Retribusi Daerah dan Pemerintah Lainnya yang memberikan pendapatan kepada Pemerintah Kabupaten Kuningan misalnya hasil perusahaan daerah dan sumbangan/donasi. Pihak ini adalah pemberi dokumen pendapatan kepada Kuasa BUD.

6. Tenaga Akuntansi di Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD)

Dalam pelaksanaan prosedur ini, Tenaga Akuntansi di Kuasa BUD memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menerima kopi atau rangkap bukti-bukti transaksi pendapatan dari Bendahara Penerimaan baik SKPD maupun SKPKD-PPKD dan menganalisa data dan informasi akuntansi dari bukti transaksi tersebut;

- b. Mencatat transaksi-transaksi pendapatan SKPD maupun SKPKD-PPKD berdasarkan bukti-bukti transaksi ke buku jurnal;
  - c. Memposting jurnal-jurnal terkait transaksi-transaksi pendapatan SKPD maupun SKPKD-PPKD ke dalam buku besarnya masing-masing;
  - d. Menyusun neraca saldo untuk persiapan penyusunan laporan keuangan, yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas; dan
  - a. Menyerahkan buku jurnal, buku besar dan neraca saldo kepada Kuasa BUD untuk diperiksa dan ditandatangani.
- 7. Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD)
 

Dalam pelaksanaan prosedur ini, Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) memiliki tugas sebagai berikut :

  - a. Bertanggungjawab atas sistem akuntansi pendapatan SKPKD-Kuasa BUD yang dipimpinnya;
  - b. Memeriksa dan menandatangani hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Tenaga Akuntansi PPK-Kuasa BUD setiap bulannya seperti Buku Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo SKPKD-Kuasa BUD; dan
  - c. Menyerahkan Buku Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo SKPD yang mencatat transaksi pendapatan SKPD dan SKPKD-PPKD di Kuasa BUD setiap triwulan kepada PPKD/BUD untuk disetujui.
- 8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Bendahara Umum Daerah (BUD) : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (tidak termasuk Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan).

Dalam pelaksanaan prosedur ini, PPKD/BUD memiliki tugas mengetahui dan menandatangani hasil pekerjaan Kuasa BUD setiap bulannya seperti Buku Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo SKPKD-Kuasa BUD **setiap triwulan**.

## **DOKUMEN YANG DIGUNAKAN**

1. Surat Ketetapan Pajak Daerah selanjutnya disebut SKP Daerah adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak dan digunakan pula untuk membayar pajak daerah metode *official assessment*;
2. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar selanjutnya disebut SKPDKB adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar serta digunakan pula untuk membayar pajak daerah kurang bayar tersebut untuk metode *official assessment*;
3. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya disebut SKPDKBT adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan dan digunakan pula untuk membayar pajak daerah kurang bayar tambahan tersebut metode *official assessment*;
4. Surat Tanda Terima Setoran selanjutnya disebut STTS adalah bukti tanda terima pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;
5. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar selanjutnya disebut SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih kurang dibayar serta digunakan pula untuk membayar retribusi daerah kurang bayar tersebut metode *official assessment*;
6. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya disebut SKRDKBT adalah surat keputusan yang

menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan SKRDKBT dan digunakan pula untuk membayar retribusi daerah kurang bayar tambahan tersebut metode *official assessment*;

7. Surat Setoran Pajak Daerah selanjutnya disebut SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak metode *self assessment* yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
8. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi metode *self assessment* yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
9. Surat Tanda Setoran selanjutnya disebut STS adalah bukti yang dibuat untuk melakukan penyetoran uang ke Kas Daerah.
10. Bukti penerimaan lain yang sah seperti Slip Setoran Bank, Slip Transfer Bank, dan Nota Kredit (NK); dan

## **BUKU DAN ATAU FORMULIR YANG DIGUNAKAN**

Buku dan atau formulir yang digunakan dalam pelaksanaan prosedur akuntansi pendapatan di SKPKD-Kuasa BUD ini paling tidak terdiri dari :

1. Buku Jurnal Penerimaan Kas (JM)

Merupakan buku jurnal yang digunakan untuk melakukan pencatatan akuntansi atas transaksi penerimaan kas yang berasal dari pendapatan-LRA baik dari SKPD maupun SKPKD-PPKD.

2. Buku Besar (BB)

Merupakan buku yang digunakan untuk menampung pencatatan hasil posting transaksi pendapatan-LRA dari buku jurnal. Buku besar ini merupakan pencatatan akuntansi atas seluruh transaksi untuk suatu rekening/akun per jenis atau obyek. Jadi setiap

rekening/akun per jenis atau objek mempunyai buku besar tersendiri.

3. Buku Besar Pembantu (BP)

Buku besar dapat dilengkapi dengan buku besar pembantu sebagai alat uji silang dan kelengkapan informasi rekening/akun tertentu. Buku besar pembantu berisi rincian akun (rincian obyek) yang telah dicatat dalam buku besar. Jika dirasakan informasi dalam buku besar sudah mencukupi maka buku besar pembantu tidak perlu dibuat lagi.

4. Neraca Saldo (NS)

Merupakan formulir yang mencatat nilai saldo setiap rekening/akun per rincian objek termasuk rekening/akun termasuk transaksi pendapatan SKPD dan SKPKD-Pemda di Kuasa BUD sehingga diketahui jumlah total dari seluruh rekening/akun.

## **KERANGKA SISTEM**

Tenaga Akuntansi di Kuasa BUD berdasarkan bukti-bukti transaksi pendapatan dari Kuasa BUD yang diperoleh dari berbagai pihak seperti :

1. Bendahara Penerimaan SKPD
2. Wajib Pajak/Wajib Retribusi Daerah
3. Pemerintah Lain
4. Pihak Lain

Berdasarkan bukti transaksi keuangan dari para pihak tersebut maka Tenaga Akuntansi di Kuasa BUD kemudian melakukan pencatatan akuntansi pendapatan Kuasa BUD dalam buku jurnal terkait. Jadi pencatatan akuntansi untuk setiap transaksi dilakukan pada saat terjadinya transaksi dan atau pada saat bukti transaksi tersebut diterima namun pengakuan transaksi tetap pada tanggal bukti transaksi.

Setelah seluruh transaksi dicatat dalam buku jurnal maka Tenaga Akuntansi di Kuasa BUD kemudian melakukan posting jurnal pendapatan SKPD dan SKPKD-PPKD dari buku jurnal ke buku besar. Setelah posting dari buku jurnal ke buku besar selesai dilakukan maka kemudian Tenaga Akuntansi di Kuasa BUD menyusun Neraca Saldo sebagai dasar pembuatan Laporan Keuangan untuk setiap triwulan yang diserahkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah triwulan berakhir kepada Kuasa BUD.

## **ALUR PROSEDUR TEKNIS**

Teknis pelaksanaan sistem dan prosedur akuntansi pendapatan di SKPKD-Kuasa BUD ini adalah sebagai berikut :

### **Langkah I : Penerimaan Bukti Transaksi**

Tenaga Akuntansi SKPKD-Kuasa BUD yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menerima dokumen transaksi keuangan pendapatan dari Kuasa BUD. Atas penerimaan bukti transaksi pendapatan ini, Tenaga Akuntansi SKPKD-Kuasa BUD harus menganalisa hingga benar-benar meyakini informasi akuntansi dari bukti tersebut. Setelah digunakan sebagai dasar melakukan pencatatan akuntansi pendapatan maka bukti transaksi tersebut harus disimpan dengan baik. Sebagai contoh : misalkan diketahui bahwa selama tahun 2022, telah terjadi transaksi yang terkait dengan pendapatan di SKPD SKPD maupun yang juga dicatat oleh SKPKD-Kuasa BUD sebagai berikut (asumsi tanggal bukti transaksi sama dengan tanggal penerimaan bukti transaksi) :

- |                 |   |
|-----------------|---|
| 1 Februari 2022 | Tenaga akuntansi di PPK-SKPD menerima SKRD yang diterbitkan Pengguna Anggaran sebesar Rp 3.000.000,-.   |
| 5 Februari 2022 | Tenaga akuntansi di Kuasa BUD menerima bukti TBP dari Kuasa BUD atas pendapatan retribusi sebesar Rp 2.000.000,- yang merupakan pembayaran atas SKRD tanggal 1 Februari 2022. |

- 10 Februari 2022 Tenaga akuntansi di Kuasa BUD menerima bukti STS yang telah divalidasi Bank Kas Daerah dari Kuasa BUD sebagai informasi bahwa uang retribusi sebesar Rp 2.000.000,- tersebut telah disetor ke Kas Daerah.
- 15 Februari 2022 Tenaga akuntansi di Kuasa BUD menerima bukti Slip Setoran Bank dari Kuasa BUD atas pembayaran retribusi oleh wajib retribusi langsung melalui bank atau langsung ke Kas Daerah sebesar Rp 1.000.000,- yang merupakan pembayaran atas SKRD tanggal 1 Februari 2022.
- 19 Februari 2022 Tenaga akuntansi di Kuasa BUD menerima bukti TBP dari Kuasa BUD atas pendapatan retribusi sebesar Rp 500.000,- yang bukan merupakan pembayaran atas SKRD.
- 20 Februari 2022 Tenaga akuntansi di Kuasa BUD menerima bukti STS yang telah divalidasi Bank Kas Daerah dari Kuasa BUD sebagai informasi bahwa uang retribusi sebesar Rp 500.000,- tersebut telah disetor ke Kas Daerah.
- 25 Februari 2022 Tenaga akuntansi di Kuasa BUD menerima bukti Slip Setoran Bank dari Kuasa BUD atas pembayaran retribusi oleh wajib retribusi langsung melalui bank atau langsung ke Kas Daerah sebesar Rp 1.000.000,- yang bukan merupakan pembayaran atas SKRD.

Untuk transaksi SKPKD-PPKD misalkan diketahui bahwa selama tahun 2022, telah terjadi transaksi yang terkait dengan pendapatan di SKPKD-PPKD yang juga dicatat oleh SKPKD-Kuasa BUD sebagai berikut (asumsi tanggal bukti transaksi sama dengan tanggal penerimaan bukti transaksi) :

- 5 Januari 2022 Tenaga Akuntansi di SKPKD-PPKD menerima PMK yang mengakui Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp 2.000.000.000,-.
- 7 Januari 2022 Tenaga Akuntansi di Kuasa BUD menerima Nota Kredit dari Kuasa BUD atas realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak atas penetapan PMK tanggal 5



Januari 2022.

- 10 Februari 2022 Tenaga Akuntansi di SKPKD-PPKD menerima PMK yang mengakui Dana Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp 1.000.000.000,-.
- 12 Februari 2022 Tenaga Akuntansi di Kuasa BUD menerima Nota Kredit dari Kuasa BUD atas realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak atas penetapan PMK tanggal 10 Februari 2022.
- 15 Maret 2022 Tenaga Akuntansi di SKPKD-PPKD menerima Perpres yang mengakui Dana Alokasi Umum sebesar Rp 5.000.000.000,-.
- 17 Maret 2022 Tenaga Akuntansi di Kuasa BUD menerima Nota Kredit dari Kuasa BUD atas realisasi penerimaan Dana Alokasi Umum atas penetapan Perpres tanggal 15 Maret 2022.
- 20 April 2022 Tenaga Akuntansi di SKPKD-PPKD menerima PMK yang mengakui Dana Alokasi Khusus sebesar Rp 3.000.000.000,-.
- 23 April 2022 Tenaga Akuntansi di Kuasa BUD menerima Nota Kredit dari Kuasa BUD atas realisasi penerimaan Dana Alokasi Khusus atas penetapan PMK tanggal 20 April 2022.
- 25 Juni 2022 Tenaga Akuntansi di SKPKD-PPKD menerima PMK yang mengakui Pendapatan Dana Penyesuaian BOS sebesar Rp 700.000.000,-.
- 27 Juni 2022 Tenaga Akuntansi di Kuasa BUD menerima Nota Kredit dari Kuasa BUD atas realisasi penerimaan Dana Penyesuaian BOS atas penetapan PMK tanggal 25 Juni 2022.
- 30 Juli 2022 Tenaga Akuntansi di SKPKD-PPKD menerima Keputusan Gubernur Jawa Barat yang mengakui Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi sebesar Rp 500.000.000,-.

|              |  |
|--------------|--|
| 1 Agt 2022   | Tenaga Akuntansi di Kuasa BUD menerima Nota Kredit dari Kuasa BUD atas realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak Provinsi atas penetapan Keputusan Gubernur Jawa Barat tanggal 30 Juli 2022.   |
| 5 Agt 2022   | Tenaga Akuntansi di SKPKD-PPKD menerima Keputusan Gubernur Jawa Barat yang mengakui Pendapatan Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp 250.000.000,-  |
| 7 Agt 2022   | Tenaga Akuntansi di Kuasa BUD menerima Nota Kredit dari Kuasa BUD atas realisasi penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi atas penetapan Keputusan Gubernur Jawa Barat tanggal 5 Agustus 2022. |
| 10 Sept 2022 | Tenaga Akuntansi di SKPKD-PPKD menerima Keputusan Gubernur Jawa Barat yang mengakui Pendapatan Hibah Provinsi sebesar Rp 100.000.000,-.  |
| 12 Sept 2022 | Tenaga Akuntansi di Kuasa BUD menerima Nota Kredit dari Kuasa BUD atas realisasi penerimaan Pendapatan Hibah Provinsi atas penetapan Keputusan Gubernur Jawa Barat tanggal 10 Sept 2022.   |
| 15 Okt 2022  | Tenaga Akuntansi di SKPKD-PPKD menerima PMK/Keputusan Gubernur Jawa Barat yang mengakui Pendapatan Dana Darurat sebesar Rp 50.000.000,-.   |
| 17 Okt 2022  | Tenaga Akuntansi di Kuasa BUD menerima Nota Kredit dari Kuasa BUD atas realisasi penerimaan Pendapatan Dana Darurat atas penetapan PMK/Keputusan Gubernur Jawa Barat tanggal 15 Okt 2022.  |
| 20 Nov 2022  | Tenaga Akuntansi di Kuasa BUD menerima Nota Kredit yang dilampiri Bukti Transfer atau STS atau Bukti Slip Setoran Bank dari Kuasa BUD atas   |

Pendapatan Sumbangan Pihak Ketiga sebesar Rp 10.000.000,-.

Contoh sederhana tersebut diatas diberikan sebagai bahan untuk mempermudah penjelasan sistem dan prosedur akuntansi pendapatan SKPKD-Kuasa BUD. Tetapi contoh tersebut diatas tidak menunjukkan semua bentuk transaksi pendapatan yang secara nyata terjadi.

**Langkah II : Menjurnal Transaksi Pendapatan**

Berdasarkan bukti-bukti transaksi pendapatan tersebut kemudian Tenaga Akuntansi di SKPKD-Kuasa BUD mencatat transaksi tersebut di buku jurnal. Pencatatan akuntansi dilakukan kedalam buku jurnal sesuai dengan jenis transaksi yang terjadi. Untuk pendapatan baik di SKPD maupun SKPKD-PPKD yang dicatat oleh Kuasa BUD maka dilakukan pencatatan dalam Buku Jurnal Penerimaan Kas dengan melakukan jurnal, “Kas di Kas Daerah” di Debit dan “Akun Pendapatan sesuai jenisnya” di kredit, sebagai berikut :

|                       | Debit | Kredit |
|-----------------------|-------|--------|
| Kas di Kas Daerah     | xxxx  |        |
| Pendapatan _____ -LRA |       | xxxx   |

Catatan : Kode dan nama rekening/akun pendapatan (dalam contoh ditulis pendapatan \_\_\_\_\_) disesuaikan dengan kode dan nama rekening/akun, sampai rincian obyek, sesuai dengan realisasi pendapatan yang diterima.

Berdasarkan uraian penjurnalan dan contoh transaksi pendapatan SKPD tersebut diatas maka Tenaga Akuntansi di Kuasa BUD melakukan pencatatan dalam buku jurnal penerimaan kas dengan jurnal sebagai berikut :

**Pertama,** transaksi pengakuan pendapatan atas diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah sebesar Rp 3.000.000,- tidak dicatat oleh tenaga akuntansi Kuasa BUD karena belum ada realisasi kas :

|                                  | Debit | Kredit |
|----------------------------------|-------|--------|
| 1 Feb 2022      Tidak ada Jurnal |       |        |

**Kedua,** transaksi penerimaan kas dari pendapatan retribusi oleh bendahara penerimaan SKPD sebesar Rp 2.000.000,- juga tidak dicatat oleh tenaga akuntansi Kuasa BUD karena belum ada penerimaan kas oleh Kuasa BUD:

|            |                  |  | Debit | Kredit |
|------------|------------------|--|-------|--------|
| 5 Feb 2022 | Tidak ada Jurnal |  |       |        |

Saat dilakukan penyetoran pendapatan retribusi SKPD ke rekening kas umum daerah sebesar Rp 2.000.000,- dengan menggunakan STS maka tenaga akuntansi Kuasa BUD mencatat berdasarkan STS yang sudah divalidasi Bank sebagai berikut :

|             |             |                   | Debit     | Kredit    |
|-------------|-------------|-------------------|-----------|-----------|
| 10 Feb 2022 | 1.1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah | 2.000.000 |           |
|             | 4.1.2.01.01 | Retribusi____-LRA |           | 2.000.000 |

**Ketiga,** pada saat terdapat bukti STS/Slip Setoran Bank dari wajib retribusi langsung melalui bank atau langsung ke rekening umum kas daerah sebesar Rp 1.000.000,- yang merupakan pembayaran atas SKRD tanggal 1 Februari 2022, maka tenaga akuntansi Kuasa BUD akan mencatat :

|             |             |                   | Debit     | Kredit    |
|-------------|-------------|-------------------|-----------|-----------|
| 15 Feb 2022 | 1.1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah | 1.000.000 |           |
|             | 4.1.2.01.01 | Retribusi____-LRA |           | 1.000.000 |

**Keempat,** transaksi penerimaan kas dari pendapatan retribusi berdasarkan TBP oleh bendahara penerimaan sebesar Rp 500.000,- juga tidak dicatat oleh tenaga akuntansi Kuasa BUD karena belum ada penerimaan kas oleh Kuasa BUD:

|             |                  |  | Debit | Kredit |
|-------------|------------------|--|-------|--------|
| 19 Feb 2022 | Tidak ada Jurnal |  |       |        |

Saat dilakukan penyetoran pendapatan retribusi SKPD ke rekening kas umum daerah sebesar Rp 500.000,- dengan menggunakan STS maka tenaga akuntansi Kuasa BUD mencatat berdasarkan STS yang sudah divalidasi Bank sebagai berikut :

|             |             |                   |         |         |
|-------------|-------------|-------------------|---------|---------|
|             |             |                   | Debit   | Kredit  |
| 20 Feb 2022 | 1.1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah | 500.000 |         |
|             | 4.1.2.01.01 | Retribusi____-LRA |         | 500.000 |

**Kelima,** pada saat terdapat bukti Slip Setoran Bank dari Bendahara penerimaan SKPD atas pembayaran retribusi oleh wajib retribusi langsung melalui bank atau langsung ke rekening umum kas daerah sebesar Rp 1.000.000,- yang bukan merupakan pembayaran atas SKRD, maka tenaga akuntansi Kuasa BUD akan mencatat :

|             |             |                   |           |           |
|-------------|-------------|-------------------|-----------|-----------|
|             |             |                   | Debit     | Kredit    |
| 25 Feb 2022 | 1.1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah | 1.000.000 |           |
|             | 4.1.2.01.01 | Retribusi____-LRA |           | 1.000.000 |

Berdasarkan uraian penjurnalan dan contoh transaksi pendapatan SKPKD-PPKD tersebut diatas maka Tenaga Akuntansi di Kuasa BUD melakukan pencatatan dalam buku jurnal penerimaan kas dengan jurnal sebagai berikut :

**Pertama,** transaksi pengakuan pendapatan atas diterbitkannya PMK Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp 2.000.000.000,- tidak dicatat oleh tenaga akuntansi Kuasa BUD karena belum ada realisasi kas :

|            |                  |  |       |        |
|------------|------------------|--|-------|--------|
|            |                  |  | Debit | Kredit |
| 5 Jan 2022 | Tidak ada Jurnal |  |       |        |

**Kedua,** pada saat terdapat bukti Nota Kredit dari Bendahara penerimaan PPKD atas pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak atas penetapan PMK tanggal 5 Januari 2022, maka tenaga akuntansi Kuasa BUD akan mencatat :

|            |             |                      |               |               |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|
|            |             |                      | Debit         | Kredit        |
| 7 Jan 2022 | 1.1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah    | 2.000.000.000 |               |
|            | 4.2.1.01.00 | Bagi Hasil Pajak-LRA |               | 2.000.000.000 |

**Ketiga,** transaksi pengakuan pendapatan atas diterbitkannya PMK Dana Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp 1.000.000.000,- tidak dicatat oleh tenaga akuntansi Kuasa BUD karena belum ada realisasi kas :

10 Feb 2022    Tidak ada Jurnal

|  |  |  | Debit | Kredit |
|--|--|--|-------|--------|
|--|--|--|-------|--------|

**Keempat,** pada saat terdapat bukti Nota Kredit dari Bendahara penerimaan PPKD atas pembayaran Dana Bagi Hasil Bukan Pajak atas penetapan PMK tanggal 10 Februari 2022, maka tenaga akuntansi Kuasa BUD akan mencatat :

|             |             |                                     | Debit         | Kredit        |
|-------------|-------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| 12 Feb 2022 | 1.1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah                   | 1.000.000.000 |               |
|             | 4.2.1.02.00 | Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA-LRA |               | 1.000.000.000 |

**Kelima,** transaksi pengakuan pendapatan atas diterbitkannya Perpres Dana Alokasi Umum sebesar Rp 5.000.000.000,- tidak dicatat oleh tenaga akuntansi Kuasa BUD karena belum ada realisasi kas :

15 Maret 2022    Tidak ada Jurnal

|  |  |  | Debit | Kredit |
|--|--|--|-------|--------|
|--|--|--|-------|--------|

**Keenam,** pada saat terdapat bukti Nota Kredit dari Bendahara penerimaan PPKD atas pembayaran Dana Alokasi Umum atas penetapan Perpres tanggal 15 Maret 2022, maka tenaga akuntansi Kuasa BUD akan mencatat :

|               |             |                       | Debit         | Kredit        |
|---------------|-------------|-----------------------|---------------|---------------|
| 17 Maret 2022 | 1.1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah     | 5.000.000.000 |               |
|               | 4.2.2.01.01 | Dana Alokasi Umum-LRA |               | 5.000.000.000 |

**Ketujuh,** transaksi pengakuan pendapatan atas diterbitkannya PMK Dana Alokasi Khusus sebesar Rp 3.000.000.000,- tidak dicatat oleh tenaga akuntansi Kuasa BUD karena belum ada realisasi kas :

20 April 2022    Tidak ada Jurnal

|  |  |  | Debit | Kredit |
|--|--|--|-------|--------|
|--|--|--|-------|--------|

**Kedelapan,** pada saat terdapat bukti Nota Kredit dari Bendahara penerimaan PPKD atas pembayaran Dana Alokasi Khusus atas penetapan PMK tanggal 20 April 2022, maka tenaga akuntansi Kuasa BUD akan mencatat :

|  |  |  | Debit | Kredit |
|--|--|--|-------|--------|
|--|--|--|-------|--------|

|               |             |                         |               |               |
|---------------|-------------|-------------------------|---------------|---------------|
| 23 April 2022 | 1.1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah       | 3.000.000.000 |               |
|               | 4.2.3.01.00 | Dana Alokasi Khusus-LRA |               | 3.000.000.000 |

**Kesembilan,** transaksi pengakuan pendapatan atas diterbitkannya PMK Pendapatan Dana Penyesuaian BOS sebesar Rp 700.000.000,- tidak dicatat oleh tenaga akuntansi Kuasa BUD karena belum ada realisasi kas :

|              |                  |  |       |        |
|--------------|------------------|--|-------|--------|
|              |                  |  | Debit | Kredit |
| 25 Juni 2022 | Tidak ada Jurnal |  |       |        |

**Kesepuluh,** pada saat terdapat bukti Nota Kredit dari Bendahara penerimaan PPKD atas pembayaran Dana Penyesuaian BOS atas penetapan PMK tanggal 25 Juni 2022, maka tenaga akuntansi Kuasa BUD akan mencatat :

|              |             |                   |             |             |
|--------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
|              |             |                   | Debit       | Kredit      |
| 27 Juni 2022 | 1.1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah | 700.000.000 |             |
|              | 4.3.4.01.01 | Dana BOS-LRA      |             | 700.000.000 |

**Kesebelas,** transaksi pengakuan pendapatan atas diterbitkannya Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi sebesar Rp 500.000.000,- tidak dicatat oleh tenaga akuntansi Kuasa BUD karena belum ada realisasi kas :

|              |                  |  |       |        |
|--------------|------------------|--|-------|--------|
|              |                  |  | Debit | Kredit |
| 30 Juli 2022 | Tidak ada Jurnal |  |       |        |

**Keduabelas,** pada saat terdapat bukti Nota Kredit dari Bendahara penerimaan PPKD atas pembayaran Bagi Hasil Pajak Provinsi atas penetapan Keputusan Gubernur Jawa Barat tanggal 30 Juli 2022, maka tenaga akuntansi Kuasa BUD akan mencatat :

|              |             |                               |             |             |
|--------------|-------------|-------------------------------|-------------|-------------|
|              |             |                               | Debit       | Kredit      |
| 1 Agust 2022 | 1.1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah             | 500.000.000 |             |
|              | 4.3.3.01.00 | Bagi Hasil Pajak Provinsi-LRA |             | 500.000.000 |

**Ketigabelas,** transaksi pengakuan pendapatan atas diterbitkannya Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Pendapatan Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp 250.000.000,- tidak dicatat oleh tenaga akuntansi Kuasa BUD karena belum ada realisasi kas :

|              |                  |  | Debit | Kredit |
|--------------|------------------|--|-------|--------|
| 5 Agust 2022 | Tidak ada Jurnal |  |       |        |

**Keempatbelas,** pada saat terdapat bukti Nota Kredit dari Bendahara penerimaan PPKD atas pembayaran Bantuan Keuangan Provinsi atas penetapan Keputusan Gubernur Jawa Barat tanggal 5 Agustus 2022, maka tenaga akuntansi Kuasa BUD akan mencatat :

|              |             |  | Debit       | Kredit      |
|--------------|-------------|--|-------------|-------------|
| 7 Agust 2022 | 1.1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah                        | 250.000.000 |             |
|              | 4.3.5.01.00 | Pendapatan Bantuan Keuangan Provinsi-LRA |             | 250.000.000 |

**Kelimabelas,** transaksi pengakuan pendapatan atas diterbitkannya Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Pendapatan Hibah Provinsi sebesar Rp 100.000.000,- tidak dicatat oleh tenaga akuntansi Kuasa BUD karena belum ada realisasi kas :

|              |                  |  | Debit | Kredit |
|--------------|------------------|--|-------|--------|
| 10 Sept 2022 | Tidak ada Jurnal |  |       |        |

**Keenambelas,** pada saat terdapat bukti Nota Kredit dari Bendahara penerimaan PPKD atas pembayaran Pendapatan Hibah Provinsi atas penetapan Keputusan Gubernur Jawa Barat tanggal 10 Sept 2022, maka tenaga akuntansi Kuasa BUD akan mencatat :

|              |             |                                     | Debit       | Kredit      |
|--------------|-------------|-------------------------------------|-------------|-------------|
| 12 Sept 2022 | 1.1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah                   | 100.000.000 |             |
|              | 4.3.1.02.00 | Pendapatan Hibah Daerah Lainnya-LRA |             | 100.000.000 |

**Ketujuhbelas,** transaksi pengakuan pendapatan atas diterbitkannya PMK/Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Pendapatan Dana Darurat sebesar Rp 50.000.000,- tidak dicatat oleh tenaga akuntansi Kuasa BUD karena belum ada realisasi kas :



|             |                  | Debit | Kredit |
|-------------|------------------|-------|--------|
| 15 Okt 2022 | Tidak ada Jurnal |       |        |

**Kedelapanbelas,** pada saat terdapat bukti Nota Kredit dari Bendahara penerimaan PPKD atas pembayaran Pendapatan Dana Darurat atas penetapan PMK/Keputusan Gubernur Jawa Barat tanggal 15 Okt 2022, maka tenaga akuntansi Kuasa BUD akan mencatat :

|             |                            |   | Debit      | Kredit     |
|-------------|----------------------------|---|------------|------------|
| 17 Okt 2022 | 1.1.1.01.01<br>4.3.2.00.00 | Kas di Kas Daerah<br>Pendapatan Dana<br>Darurat-LRA | 50.000.000 | 50.000.000 |

**Kesembilanbelas,** pada saat terdapat bukti Nota Kredit dari Bendahara penerimaan PPKD atas pembayaran Pendapatan Sumbangan Pihak Ketiga sebesar Rp 10.000.000,-, maka tenaga akuntansi Kuasa BUD akan mencatat :

|             |                            |   | Debit      | Kredit     |
|-------------|----------------------------|---|------------|------------|
| 20 Nov 2022 | 1.1.1.01.01<br>4.4.4.01.01 | Kas di Kas Daerah<br>Pendapatan Lainnya-<br>LRA | 10.000.000 | 10.000.000 |

### Bentuk dan Cara Pengisian Buku Jurnal

Berdasarkan contoh jurnal tersebut diatas maka dilakukan pencatatan dalam buku jurnal penerimaan kas untuk transaksi berbasis kas yang nantinya digunakan untuk menyusun LRA dan LAK sebagai berikut :

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU JURNAL PENERIMAAN KAS (JM)

SKPKD : .....( SKPKD Kabupaten Kuningan)

Halaman 01

| Tanggal  | Nomor               |               | Kode Rekening |   |   |    |    | Uraian                                   | Ref. | Debit<br>(Rp)  | Kredit<br>(Rp) |
|----------|---------------------|---------------|---------------|---|---|----|----|--|------|----------------|----------------|
|          | Bukti<br>Penerimaan | Bukti<br>Lain |               |   |   |    |    |  |      |                |                |
| 1        | 2                   |               | 3             |   |   |    |    | 4  | 5    | 6              | 7              |
|          |                     |               |               |   |   |    |    |  |      |                |                |
| 7/01/15  | NK                  |               | 1             | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas di Kas Daerah                        |      | 2.000.000.000  |                |
|          |                     |               | 4             | 2 | 1 | 01 | 00 | Bagi Hasil Pajak____-LRA                 |      |                | 2.000.000.000  |
|          |                     |               |               |   |   |    |    |  |      |                |                |
| 10/02/15 | STS/SSB             |               | 1             | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas di Kas Daerah                        |      | 2.000.000      |                |
|          |                     |               | 4             | 1 | 2 | 01 | 01 | Retribusi____-LRA                        |      |                | 2.000.000      |
|          |                     |               |               |   |   |    |    |  |      |                |                |
| 12/02/15 | NK                  |               | 1             | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas di Kas Daerah                        |      | 1.000.000.000  |                |
|          |                     |               | 4             | 2 | 1 | 02 | 00 | Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA-LRA           |      |                | 1.000.000.000  |
|          |                     |               |               |   |   |    |    |  |      |                |                |
| 15/02/15 | STS/SSB             |               | 1             | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas di Kas Daerah                        |      | 1.000.000      |                |
|          |                     |               | 4             | 1 | 2 | 01 | 01 | Retribusi____-LRA                        |      |                | 1.000.000      |
|          |                     |               |               |   |   |    |    |  |      |                |                |
| 20/02/15 | STS                 |               | 1             | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas di Kas Daerah                        |      | 500.000        |                |
|          |                     |               | 4             | 1 | 2 | 01 | 01 | Retribusi____-LRA                        |      |                | 500.000        |
|          |                     |               |               |   |   |    |    |  |      |                |                |
| 25/02/15 | SSB                 |               | 1             | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas di Kas Daerah                        |      | 1.000.000      |                |
|          |                     |               | 4             | 1 | 2 | 01 | 01 | Retribusi____-LRA                        |      |                | 1.000.000      |
|          |                     |               |               |   |   |    |    |  |      |                |                |
| 17/03/15 | NK                  |               | 1             | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas di Kas Daerah                        |      | 5.000.000.000  |                |
|          |                     |               | 4             | 2 | 2 | 01 | 01 | Dana Alokasi Umum-LRA                    |      |                | 5.000.000.000  |
|          |                     |               |               |   |   |    |    |  |      |                |                |
| 23/04/15 | NK                  |               | 1             | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas di Kas Daerah                        |      | 3.000.000.000  |                |
|          |                     |               | 4             | 2 | 3 | 01 | 00 | Dana Alokasi Khusus-LRA                  |      |                | 3.000.000.000  |
|          |                     |               |               |   |   |    |    |  |      |                |                |
| 27/06/15 | NK                  |               | 1             | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas di Kas Daerah                        |      | 700.000.000    |                |
|          |                     |               | 4             | 3 | 4 | 01 | 01 | Dana BOS-LRA                             |      |                | 700.000.000    |
|          |                     |               |               |   |   |    |    |  |      |                |                |
| 1/08/15  | NK                  |               | 1             | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas di Kas Daerah                        |      | 500.000.000    |                |
|          |                     |               | 4             | 3 | 3 | 01 | 00 | Bagi Hasil Pajak Provinsi-LRA            |      |                | 500.000.000    |
|          |                     |               |               |   |   |    |    |  |      |                |                |
| 7/08/15  | NK                  |               | 1             | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas di Kas Daerah                        |      | 250.000.000    |                |
|          |                     |               | 4             | 3 | 5 | 01 | 00 | Pendapatan Bantuan Keuangan Provinsi-LRA |      |                | 250.000.000    |
|          |                     |               |               |   |   |    |    |  |      |                |                |
| 12/09/15 | NK                  |               | 1             | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas di Kas Daerah                        |      | 100.000.000    |                |
|          |                     |               | 4             | 3 | 1 | 02 | 00 | Pendapatan Hibah Daerah Lainnya-LRA      |      |                | 100.000.000    |
|          |                     |               |               |   |   |    |    |  |      |                |                |
| 17/10/15 | NK                  |               | 1             | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas di Kas Daerah                        |      | 50.000.000     |                |
|          |                     |               | 4             | 3 | 2 | 00 | 00 | Pendapatan Dana Darurat-LRA              |      |                | 50.000.000     |
|          |                     |               |               |   |   |    |    |  |      |                |                |
| 20/11/15 | NK                  |               | 1             | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas di Kas Daerah                        |      | 10.000.000     |                |
|          |                     |               | 4             | 4 | 4 | 01 | 01 | Pendapatan Lainnya-LRA                   |      |                | 10.000.000     |
|          |                     |               |               |   |   |    |    |  |      |                |                |
| Jumlah   |                     |               |               |   |   |    |    |  |      | 12.614.500.000 | 12.614.500.000 |

Kuasa BUD PPKD/BUD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Langkah III : Melakukan Posting ke Buku Besar

Setelah melakukan penjurnalan seluruh transaksi, maka Tenaga Akuntansi Kuasa BUD melakukan posting atas pencatatan jurnal tersebut ke buku besar. Posting ini berguna agar seluruh transaksi yang sama-sama mempengaruhi suatu kode rekening/akun dapat dikelompokkan dalam satu buku besar untuk kode rekening/akun yang bersangkutan. Periode posting harus semakin diusahakan dapat dilakukan dalam waktu yang semakin singkat misalkan untuk periode mingguan atau bahkan harian.

Contoh buku besar SKPKD–Kuasa BUD : Kas di Kas Daerah sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

| KABUPATEN KUNINGAN  |       |            |                            |  |                |                |
|---------------------|-------|------------|----------------------------|--|----------------|----------------|
| BUKU BESAR          |       |            |                            |  |                |                |
| SKPKD               |       |            | : BPKAD Kabupaten Kuningan |  |                |                |
| Kode Rekening       |       |            | : 1.1.1.01.01              |  |                |                |
| Nama Rekening       |       |            | : Kas di Kas Daerah        |  |                |                |
| Pagu APBD           |       |            | :                          |  |                |                |
| Pagu perubahan APBD |       |            | :                          |  |                |                |
|                     |       |            |                            |  |                | Halaman 01     |
| No                  | Bukti |            | Ref                        | Uraian                                   | Debet<br>(Rp)  | Kredit<br>(Rp) |
|                     | Nomor | Tanggal    |                            |  |                |                |
| 1                   |       | 7/01/2022  | JM                         | Bagi Hasil Pajak____-LRA                 | 2.000.000.000  | -              |
| 2                   |       | 10/02/2022 | JM                         | Retribusi____-LRA                        | 2.000.000      | -              |
| 3                   |       | 12/02/2022 | JM                         | Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA-LRA      | 1.000.000.000  | -              |
| 4                   |       | 12/02/2022 | JM                         | Retribusi____-LRA                        | 1.000.000      | -              |
| 5                   |       | 20/01/2022 | JM                         | Retribusi____-LRA                        | 500.000        | -              |
| 6                   |       | 25/02/2022 | JM                         | Retribusi____-LRA                        | 1.000.000      | -              |
| 7                   |       | 17/03/2022 | JM                         | Dana Alokasi Umum-LRA                    | 5.000.000.000  | -              |
| 8                   |       | 23/04/2022 | JM                         | Dana Alokasi Khusus-LRA                  | 3.000.000.000  | -              |
| 9                   |       | 27/06/2022 | JM                         | BOS-LRA                                  | 700.000.000    | -              |
| 10                  |       | 1/08/2022  | JM                         | Bagi Hasil Pajak Provinsi-LRA            | 500.000.000    | -              |
| 11                  |       | 7/08/2022  | JM                         | Pendapatan Bantuan Keuangan Provinsi-LRA | 250.000.000    | -              |
|                     |       |            | JM                         | Pendapatan Hibah Daerah Lainnya-LRA      | 100.000.000    | -              |
| 12                  |       | 12/09/2022 | JM                         | Pendapatan Dana Darurat-LRA              | 50.000.000     | -              |
| 13                  |       | 17/10/2022 | JM                         | Pendapatan Lainnya-LRA                   | 10.000.000     | -              |
| 14                  |       | 20/11/2022 | JM                         |  |                |                |
|                     |       |            |                            |  |                |                |
|                     |       |            |                            | Jumlah                                   | 12.614.500.000 | -              |
|                     |       |            |                            | Saldo                                    | 12.614.500.000 | -              |

Kuasa BUD

PPKD/BUD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–Kuasa BUD : Retribusi\_\_\_-LRA sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

**KABUPATEN KUNINGAN**  
**BUKU BESAR**

**SKPKD** : BPKAD Kabupaten Kuningan  
**Kode Rekening** : 4.1.2.01.00  
**Nama Rekening** : Retribusi\_\_\_-LRA  
**Pagu APBD** :  
**Pagu perubahan APBD** :

Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian                         | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|--------------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |                                |               |                |
| 1  |       | 10/02/2022 | JM  | Retribusi___-LRA melalui Kasda | -             | 2.000.000      |
| 2  |       | 15/02/15   | JM  | Retribusi___-LRA melalui Kasda | -             | 1.000.000      |
| 3  |       | 20/02/15   | JM  | Retribusi___-LRA melalui Kasda | -             | 500.000        |
| 4  |       | 25/02/15   | JM  | Retribusi___-LRA melalui Kasda | -             | 1.000.000      |
|    |       |            |     |                                |               |                |
|    |       |            |     |                                |               |                |
|    |       |            |     | Jumlah                         | -             | 2.000.000      |
|    |       |            |     | Saldo                          | -             | 4.500.000      |

Kuasa BUD

PPKD/BUD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–Kuasa BUD : Bagi Hasil Pajak\_\_\_-LRA sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

**KABUPATEN KUNINGAN**  
**BUKU BESAR**

**SKPKD** : BPKAD Kabupaten Kuningan  
**Kode Rekening** : 4.2.1.01.00  
**Nama Rekening** : Bagi Hasil Pajak\_\_\_-LRA  
**Pagu APBD** :  
**Pagu perubahan APBD** :

Halaman 01

| No | Bukti |           | Ref | Uraian                                | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|-----------|-----|---------------------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal   |     |                                       |               |                |
| 1  |       | 7/01/2022 | JM  | Bagi Hasil Pajak___-LRA melalui Kasda | -             | 2.000.000.000  |
|    |       |           |     |                                       |               |                |
|    |       |           |     | Jumlah                                | -             | 2.000.000.000  |
|    |       |           |     | Saldo                                 | -             | 2.000.000.000  |

Kuasa BUD

PPKD/BUD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–Kuasa BUD : Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA\_\_\_-LRA sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPKD : BPKAD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 4.2.1.02.00  
Nama Rekening : Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA\_\_\_-LRA  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |           | Ref | Uraian                                | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|-----------|-----|---------------------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal   |     |                                       |               |                |
| 1  |       | 7/01/2022 | JM  | Bagi Hasil Pajak___-LRA melalui Kasda | -             | 1.000.000.000  |
|    |       |           |     |                                       |               |                |
|    |       |           |     | Jumlah                                | -             | 1.000.000.000  |
|    |       |           |     | Saldo                                 | -             | 1.000.000.000  |

Kuasa BUD

PPKD/BUD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–Kuasa BUD : Dana Alokasi Umum-LRA sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPKD : BPKAD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 4.2.2.01.01  
Nama Rekening : Dana Alokasi Umum-LRA  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian                              | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|-------------------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |                                     |               |                |
| 1  |       | 17/03/2022 | JM  | Dana Alokasi Umum-LRA melalui Kasda | -             | 5.000.000.000  |
|    |       |            |     |                                     |               |                |
|    |       |            |     | Jumlah                              | -             | 5.000.000.000  |
|    |       |            |     | Saldo                               | -             | 5.000.000.000  |

Kuasa BUD

PPKD/BUD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–Kuasa BUD : Dana Alokasi Khusus-LRA sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPKD : BPKAD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 4.2.3.01.00  
Nama Rekening : Dana Alokasi Khusus-LRA  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD :

Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian                                | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|---------------------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |                                       |               |                |
| 1  |       | 23/03/2022 | JM  | Dana Alokasi Khusus-LRA melalui Kasda | -             | 3.000.000.000  |
|    |       |            |     |                                       |               |                |
|    |       |            |     | Jumlah                                | -             | 3.000.000.000  |
|    |       |            |     | Saldo                                 | -             | 3.000.000.000  |

Kuasa BUD

PPKD/BUD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–Kuasa BUD : Pendapatan Hibah Daerah Lainnya-LRA sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPKD : BPKAD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 4.3.1.02.00  
Nama Rekening : Pendapatan Hibah Daerah Lainnya-LRA  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD :

Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian   | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|--|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |  |               |                |
| 1  |       | 12/09/2022 | JM  | Pendapatan Hibah Daerah Lainnya -LRA melalui Kasda | -             | 100.000.000    |
|    |       |            |     |  |               |                |
|    |       |            |     | Jumlah   | -             | 100.000.000    |
|    |       |            |     | Saldo  | -             | 100.000.000    |

Kuasa BUD

PPKD/BUD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–Kuasa BUD : Pendapatan Dana Darurat-LRA sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPKD : BPKAD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 4.3.2.00.00  
Nama Rekening : Pendapatan Dana Darurat-LRA  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD :

Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian   | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|--|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |  |               |                |
| 1  |       | 17/10/2022 | JM  | Pendapatan Dana Darurat -<br>LRA melalui Kasda | -             | 50.000.000     |
|    |       |            |     |  |               |                |
|    |       |            |     | Jumlah   | -             | 50.000.000     |
|    |       |            |     | Saldo  | -             | 50.000.000     |

Kuasa BUD

PPKD/BUD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–Kuasa BUD : Bagi Hasil Pajak Provinsi-LRA sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPKD : BPKAD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 4.3.3.01.00  
Nama Rekening : Bagi Hasil Pajak Provinsi-LRA  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD :

Halaman 01

| No | Bukti |           | Ref | Uraian   | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|-----------|-----|--|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal   |     |  |               |                |
| 1  |       | 1/08/2022 | JM  | Bagi Hasil Pajak Provinsi-LRA<br>melalui Kasda | -             | 500.000.000    |
|    |       |           |     |  |               |                |
|    |       |           |     | Jumlah   | -             | 500.000.000    |
|    |       |           |     | Saldo  | -             | 500.000.000    |

Kuasa BUD

PPKD/BUD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–Kuasa BUD : Dana BOS-LRA sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

**KABUPATEN KUNINGAN**  
**BUKU BESAR**

**SKPKD** : BPKAD Kabupaten Kuningan  
**Kode Rekening** : 4.3.4.01.01  
**Nama Rekening** : Dana BOS-LRA  
**Pagu APBD** :  
**Pagu perubahan APBD** :

Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian                | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|-----------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |                       |               |                |
| 1  |       | 27/06/2022 | JM  | BOS-LRA melalui Kasda | -             | 700.000.000    |
|    |       |            |     |                       |               |                |
|    |       |            |     | Jumlah                | -             | 700.000.000    |
|    |       |            |     | Saldo                 | -             | 700.000.000    |

Kuasa BUD

PPKD/BUD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–Kuasa BUD : Pendapatan Bantuan Keuangan Provinsi-LRA sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

**KABUPATEN KUNINGAN**  
**BUKU BESAR**

**SKPKD** : BPKAD Kabupaten Kuningan  
**Kode Rekening** : 4.3.5.01.01  
**Nama Rekening** : Pendapatan Bantuan Keuangan Provinsi-LRA  
**Pagu APBD** :  
**Pagu perubahan APBD** :

Halaman 01

| No | Bukti |           | Ref | Uraian  | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|-----------|-----|---|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal   |     |   |               |                |
| 1  |       | 7/08/2022 | JM  | Pendapatan Bantuan Keuangan Provinsi -LRA melalui Kasda | -             | 250.000.000    |
|    |       |           |     |   |               |                |
|    |       |           |     | Jumlah  | -             | 250.000.000    |
|    |       |           |     | Saldo   | -             | 250.000.000    |

Kuasa BUD

PPKD/BUD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....



Contoh buku besar SKPKD–Kuasa BUD : Pendapatan Lainnya-LRA sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

**KABUPATEN KUNINGAN**  
**BUKU BESAR**

**SKPKD** : BPKAD Kabupaten Kuningan  
**Kode Rekening** : 4.4.4.01.01  
**Nama Rekening** : Pendapatan Lainnya-LRA  
**Pagu APBD** :  
**Pagu perubahan APBD** :

Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian                                | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp)    |
|----|-------|------------|-----|---------------------------------------|---------------|-------------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |                                       |               |                   |
| 1  |       | 20/11/2022 | JM  | Pendapatan Lainnya -LRA melalui Kasda | -             | 10.000.000        |
|    |       |            |     |                                       |               |                   |
|    |       |            |     | <b>Jumlah</b>                         | -             | <b>10.000.000</b> |
|    |       |            |     | <b>Saldo</b>                          | -             | <b>10.000.000</b> |

Kuasa BUD

PPKD/BUD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

**Langkah IV : Menyusun Neraca Saldo dan Laporan Keuangan**

Setelah melakukan posting seluruh pencatatan dalam buku besar maka kemudian Tenaga Akuntansi di Kuasa BUD membuat neraca saldo sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Penyusunan neraca saldo oleh Tenaga Akuntansi di Kuasa BUD dilakukan secara triwulanan. Neraca saldo disusun dengan cara memindahkan saldo-saldo yang ada di tiap buku besar ke dalam Neraca Saldo. Contoh Neraca Saldo dari hasil pencatatan dan posting contoh transaksi keuangan diatas adalah sebagai berikut :

KABUPATEN KUNINGAN  
NERACA SALDO  
PER TANGGAL 31 Desember 2022

SKPKD : BPKAD

| Kode Rekening |   |   |    |    | Uraian                                   | Jumlah         |                |
|---------------|---|---|----|----|--|----------------|----------------|
|               |   |   |    |    |  | Debit          | Kredit         |
| 1             |   |   |    |    | 2  | 3              | 4              |
| 1             | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas di Kas Daerah                        | 12.614.500.000 | -              |
| 4             | 1 | 2 | 01 | 00 | Retribusi____-LRA                        | -              | 4.500.000      |
| 4             | 2 | 1 | 01 | 00 | Bagi Hasil Pajak-LRA                     | -              | 2.000.000.000  |
| 4             | 2 | 1 | 02 | 00 | Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA-LRA           | -              | 1.000.000.000  |
| 4             | 2 | 2 | 01 | 01 | Dana Alokasi Umum-LRA                    | -              | 5.000.000.000  |
| 4             | 2 | 3 | 01 | 01 | Dana Alokasi Khusus-LRA                  | -              | 3.000.000.000  |
| 4             | 3 | 1 | 02 | 00 | Pendapatan Hibah Daerah Lainnya-LRA      | -              | 100.000.000    |
| 4             | 3 | 2 | 00 | 00 | Pendapatan Dana Darurat-LRA              | -              | 50.000.000     |
| 4             | 3 | 3 | 01 | 00 | Bagi Hasil Pajak Provinsi-LRA            | -              | 500.000.000    |
| 4             | 3 | 4 | 01 | 01 | Dana BOS-LRA                             | -              | 700.000.000    |
| 4             | 3 | 5 | 01 | 01 | Pendapatan Bantuan Keuangan Provinsi-LRA | -              | 250.000.000    |
| 4             | 4 | 4 | 01 | 01 | Pendapatan Lainnya-LRA                   | -              | 10.000.000     |
|               |   |   |    |    |  |                |                |
|               |   |   |    |    | Jumlah                                   | 12.614.500.000 | 12.614.500.000 |

Kuasa BUD

PPKD/BUD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

## **SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI PENERIMAAN PEMBIAYAAN DI SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (SKPKD) – KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH**

Bagian ini menjelaskan Sistem dan Prosedur Akuntansi Penerimaan Pembiayaan di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mencatat transaksi di kuasa bendahara umum daerah.

### **KEBIJAKAN UMUM**

Prosedur akuntansi penerimaan pembiayaan pada SKPKD-Kuasa BUD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan transaksi realisasi penerimaan pembiayaan SKPKD-PPKD dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Sistem dan prosedur akuntansi ini disusun berdasarkan kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

### **PIHAK-PIHAK TERKAIT**

Berbagai pihak/fungsi yang terkait dalam proses akuntansi penerimaan pembiayaan pada SKPKD-Kuasa BUD beserta tugas-tugasnya adalah :

1. Bendahara Penerimaan PPKD

Dalam pelaksanaan prosedur ini, Bendahara Penerimaan PPKD memiliki tugas menerima dokumen-dokumen atas transaksi realisasi penerimaan pembiayaan SKPKD-PPKD yang diterima dari Kuasa BUD dan menyiapkannya untuk kepentingan pencatatan PPK-SKPKD.

2. Pemerintah Lainnya

Pemerintah Lainnya adalah entitas pemerintah selain Pemerintah Kabupaten Kuningan yang memberikan pembiayaan atau mengembalikan pembiayaan kepada Pemerintah Kabupaten Kuningan seperti pemberian pinjaman atau pengembalian pinjaman. Pihak-pihak ini adalah pemberi dokumen kepada Kuasa BUD.

3. Pihak Lainnya

Pihak yang memberikan kas sebagai penerimaan pembiayaan kepada Pemerintah Kabupaten Kuningan misalnya Bank tempat menyimpan Dana Cadangan, Perusahaan Daerah yang asetnya dijual, Pihak Ketiga yang memberikan pinjaman atau mengembalikan kepada Pemerintah Daerah. Pihak-pihak ini adalah pemberi dokumen kepada Kuasa BUD.

4. Tenaga Akuntansi di Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD)

Dalam pelaksanaan prosedur ini, Tenaga Akuntansi di Kuasa BUD memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menerima kopi atau rangkap bukti-bukti transaksi penerimaan pembiayaan SKPKD-PPKD dari Bendahara Penerimaan PPKD dan menganalisa data dan informasi akuntansi dari bukti transaksi tersebut;
- b. Mencatat transaksi-transaksi penerimaan pembiayaan SKPKD-PPKD berdasarkan bukti-bukti transaksi ke buku jurnal;
- c. Memposting jurnal-jurnal terkait transaksi-transaksi penerimaan pembiayaan SKPKD-PPKD ke dalam buku besarnya masing-masing;
- d. Menyusun neraca saldo untuk persiapan penyusunan laporan keuangan, yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas; dan
- e. Menyerahkan buku jurnal, buku besar dan neraca saldo kepada Kuasa BUD untuk diperiksa dan ditandatangani.

5. Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD)

Dalam pelaksanaan prosedur ini, Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Bertanggungjawab atas sistem akuntansi penerimaan pembiayaan SKPKD-Kuasa BUD yang dipimpinnya;
- b. Memeriksa dan menandatangani hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Tenaga Akuntansi PPK-Kuasa BUD setiap bulannya seperti Buku Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo SKPKD-Kuasa BUD; dan
- c. Menyerahkan Buku Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo SKPKD-Kuasa BUD setiap triwulan kepada PPKD/BUD untuk disetujui.

6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Bendahara Umum Daerah (BUD) : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (tidak termasuk Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan).

Dalam pelaksanaan prosedur ini, PPKD/BUD memiliki tugas mengetahui dan menandatangani hasil pekerjaan Kuasa BUD setiap bulannya seperti Buku Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo SKPKD-Kuasa BUD setiap triwulan.

**DOKUMEN YANG DIGUNAKAN**

1. Bukti transfer merupakan slip bukti melakukan transfer dari suatu rekening ke rekening lainnya;
2. Nota Kredit merupakan bukti transaksi penerimaan uang di rekening kas umum daerah;

**BUKU DAN ATAU FORMULIR YANG DIGUNAKAN**

Buku dan atau formulir yang digunakan dalam pelaksanaan prosedur akuntansi penerimaan pembiayaan di SKPKD-Kuasa BUD ini paling tidak terdiri dari :

1. Buku Jurnal Penerimaan Kas (JM)

Merupakan buku jurnal yang digunakan untuk melakukan pencatatan akuntansi atas transaksi penerimaan kas yang berasal dari penerimaan pembiayaan di SKPKD-PPKD.

2. Buku Besar (BB)

Merupakan buku yang digunakan untuk menampung pencatatan hasil posting transaksi dari buku jurnal. Buku besar ini merupakan pencatatan akuntansi atas seluruh transaksi untuk suatu rekening/akun per jenis atau obyek. Jadi setiap rekening/akun per jenis atau objek mempunyai buku besar tersendiri.

3. Buku Besar Pembantu (BP)

Buku besar dapat dilengkapi dengan buku besar pembantu sebagai alat uji silang dan kelengkapan informasi rekening/akun tertentu. Buku besar pembantu berisi rincian akun (rincian obyek) yang telah dicatat dalam buku besar. Jika dirasakan informasi dalam buku besar sudah mencukupi maka buku besar pembantu tidak perlu dibuat lagi.

4. Neraca Saldo (NS)

Merupakan formulir yang mencatat nilai saldo setiap rekening/akun per rincian objek sehingga diketahui jumlah total dari seluruh rekening/akun.

## **KERANGKA SISTEM**

Tenaga Akuntansi di Kuasa BUD berdasarkan bukti-bukti transaksi penerimaan pembiayaan dari Kuasa BUD yang diperoleh dari berbagai pihak seperti :

1. Pemerintah Lain
2. Pihak Lain

Berdasarkan bukti transaksi keuangan dari para pihak tersebut maka Tenaga Akuntansi di Kuasa BUD kemudian melakukan pencatatan akuntansi penerimaan pembiayaan Kuasa BUD dalam buku

jurnal terkait. Jadi pencatatan akuntansi untuk setiap transaksi dilakukan pada saat terjadinya transaksi dan atau pada saat bukti transaksi tersebut diterima namun pengakuan transaksi tetap pada tanggal bukti transaksi.

Setelah seluruh transaksi dicatat dalam buku jurnal maka Tenaga Akuntansi di Kuasa BUD kemudian melakukan posting jurnal penerimaan pembiayaan di SKPKD-PPKD dari buku jurnal ke buku besar. Setelah posting dari buku jurnal ke buku besar selesai dilakukan maka kemudian Tenaga Akuntansi di Kuasa BUD menyusun Neraca Saldo sebagai dasar pembuatan Laporan Keuangan untuk setiap triwulan yang diserahkan paling lambat **1 (satu) bulan setelah triwulan berakhir kepada Kuasa BUD.**

## **ALUR PROSEDUR TEKNIS**

Teknis pelaksanaan sistem dan prosedur akuntansi pendapatan di SKPKD-Kuasa BUD ini adalah sebagai berikut :

### **Langkah I : Penerimaan Bukti Transaksi**

Tenaga Akuntansi SKPKD-Kuasa BUD yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menerima dokumen transaksi keuangan penerimaan pembiayaan dari Kuasa BUD. Atas penerimaan bukti transaksi penerimaan pembiayaan ini, Tenaga Akuntansi SKPKD-Kuasa BUD harus menganalisa hingga benar-benar meyakini informasi akuntansi dari bukti tersebut. Setelah digunakan sebagai dasar melakukan pencatatan akuntansi penerimaan pembiayaan maka bukti transaksi tersebut harus disimpan dengan baik. Sebagai contoh : misalkan diketahui bahwa selama tahun 2022, telah terjadi transaksi yang terkait dengan penerimaan pembiayaan di SKPKD-PPKD yang juga dicatat oleh SKPKD-Kuasa BUD sebagai berikut (asumsi tanggal bukti transaksi sama dengan tanggal penerimaan bukti transaksi) :

|               |  |
|---------------|--|
| 10 Maret 2022 | Tenaga akuntansi di Kuasa BUD menerima Nota Kredit dari Kuasa BUD atas realisasi penerimaan pembiayaan atas penarikan dana cadangan sebesar Rp 500.000.000,- |
|---------------|--|

|               |  |
|---------------|--|
| 20 Maret 2022 | Tenaga akuntansi di Kuasa BUD menerima Nota Kredit dari Kuasa BUD atas penerimaan pembiayaan atas penarikan penyertaan modal pada BUMD A sebesar Rp 100.000.000,-  |
| 1 April 2022  | Tenaga akuntansi di Kuasa BUD menerima Nota Kredit dari Kuasa BUD atas penerimaan pengembalian pemberian pinjaman pada BUMD C sebesar Rp 100.000.000,-   |
| 10 April 2022 | Tenaga akuntansi di Kuasa BUD menerima Nota Kredit dari Kuasa BUD atas penerimaan pembiayaan penarikan dana bergulir pada BLUD Dana Bergulir sebesar Rp 200.000.000,-  |
| 1 Mei 2022    | Tenaga akuntansi di Kuasa BUD menerima Nota Kredit beserta perjanjian peminjaman ke Bank Daerah dari Kuasa BUD atas penerimaan pinjaman sebesar Rp 10.000.000.000,- yang dicicil selama 5 tahun (@Rp 2.000.000.000),-.   |
| 30 Mei 2022   | Tenaga akuntansi di Kuasa BUD menerima Nota Kredit beserta perjanjian peminjaman ke Lembaga Donor Internasional yang diteruspinjamkan melalui Kementerian Keuangan dari Kuasa BUD atas penerimaan pinjaman luar negeri sebesar Rp 500.000.000.000,- yang dicicil selama 20 tahun (@Rp 25.000.000.000,-). |

Contoh sederhana tersebut diatas diberikan sebagai bahan untuk mempermudah penjelasan sistem dan prosedur akuntansi penerimaan pembiayaan di SKPKD-Kuasa BUD ini. Tetapi contoh tersebut diatas tidak menunjukkan semua bentuk transaksi yang secara nyata terjadi.

## **Langkah II : Menjurnal Transaksi Penerimaan**

Berdasarkan bukti-bukti transaksi penerimaan pembiayaan tersebut kemudian Tenaga Akuntansi di SKPKD-Kuasa BUD mencatat transaksi tersebut di buku jurnal. Pencatatan akuntansi dilakukan



kedalam buku jurnal sesuai dengan jenis transaksi yang terjadi. Untuk penerimaan kas dari penerimaan pembiayaan di SKPKD-Kuasa BUD maka dilakukan pencatatan dalam Buku Jurnal Penerimaan Kas dengan melakukan jurnal, “Kas di Kas Daerah” di Debit dan “Akun penerimaan pembiayaan” sesuai jenisnya sampai rincian obyeknya di kredit, sebagai berikut :

|                            | Debit | Kredit |
|----------------------------|-------|--------|
| Kas di Kas Daerah          | xxxx  |        |
| Penerimaan Pembiayaan_____ |       | xxxx   |

Transaksi penerimaan kas dari Kas Daerah untuk **penarikan Dana Cadangan**, dilakukan penjurnalan di buku jurnal penerimaan kas sebagai berikut :

|                         | Debit | Kredit |
|-------------------------|-------|--------|
| Kas di Kas Daerah       | xxxx  |        |
| Penerimaan Pembiayaan   |       |        |
| Penarikan Dana Cadangan |       | xxxx   |

Transaksi penerimaan kas dari Kas Daerah untuk **Pinjaman hutang daerah dalam negeri**, atas transaksi ini dilakukan penjurnalan di buku jurnal penerimaan kas sebagai berikut :

|                       | Debit | Kredit |
|-----------------------|-------|--------|
| Kas di Kas Daerah     | xxxx  |        |
| Penerimaan Pembiayaan |       |        |
| Pinjaman Dalam Negeri |       | xxxx   |

Transaksi penerimaan kas dari Kas Daerah dari **penjualan investasi/kekayaan daerah yang dipisahkan**, atas transaksi ini dilakukan penjurnalan di buku jurnal penerimaan kas sebagai berikut :

|   | Debit | Kredit |
|---|-------|--------|
| Kas di Kas Daerah                               | xxxx  |        |
| Penerimaan Pembiayaan                           |       |        |
| Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan |       | xxxx   |

Transaksi penerimaan kas dari Kas Daerah untuk **penerimaan piutang pinjaman**, dilakukan penjurnalan di buku jurnal penerimaan kas sebagai berikut :

|                                   | Debit       | Kredit      |
|-----------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Kas di Kas Daerah</b>          | <b>xxxx</b> |             |
| <b>Penerimaan Pembiayaan</b>      |             |             |
| <b>Penerimaan kembali piutang</b> |             | <b>xxxx</b> |

Transaksi penerimaan kas dari Kas Daerah untuk **Penerimaan kembali investasi jangka panjang non permanen**, dilakukan penerimaan di buku jurnal penerimaan kas sebagai berikut :

|                                       | Debit       | Kredit      |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Kas di Kas Daerah</b>              | <b>xxxx</b> |             |
| <b>Penerimaan Pembiayaan</b>          |             |             |
| <b>Penerimaan kembali</b>             |             |             |
| <b>Investasi Non Permanen Lainnya</b> |             | <b>xxxx</b> |

Catatan : Kode dan nama rekening/akun penerimaan pembiayaan (dalam contoh ditulis penerimaan pembiayaan\_\_\_\_\_) disesuaikan dengan kode dan nama rekening/akun, sampai rincian obyek, sesuai dengan realisasi penerimaan pembiayaan yang diterima.

Berdasarkan uraian penjurnalan dan contoh transaksi tersebut diatas maka Tenaga Akuntansi di Kuasa BUD melakukan pencatatan dalam buku jurnal penerimaan kas dengan jurnal sebagai berikut :

**Pertama**, pada saat terdapat Nota Kredit dicatat penerimaan pembiayaan atas penarikan dana cadangan sebesar Rp 500.000.000,-, maka tenaga akuntansi Kuasa BUD akan mencatat :

|               |             |                       | Debit       | Kredit      |
|---------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|
| 10 Maret 2022 | 1.1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah     | 500.000.000 |             |
|               | 6.1.2.01.01 | Penerimaan Pembiayaan |             | 500.000.000 |
|               |             | Pencairan Dana        |             |             |
|               |             | Cadangan              |             |             |

**Kedua**, pada saat terdapat Nota Kredit dicatat penerimaan pembiayaan atas penarikan penyertaan modal pada BUMD A sebesar Rp 100.000.000,-, maka tenaga akuntansi Kuasa BUD akan mencatat :

|               |             |   |             |             |
|---------------|-------------|---|-------------|-------------|
| 20 Maret 2022 | 1.1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah                             | 100.000.000 |             |
|               | 6.1.3.01.01 | Penerimaan Pembiayaan<br>Hasil Penjualan BUMD |             | 100.000.000 |

**Ketiga,** pada saat terdapat Nota Kredit dicatat penerimaan pengembalian pemberian pinjaman pada BUMD C sebesar Rp 100.000.000,-, maka tenaga akuntansi Kuasa BUD akan mencatat :

|              |             |   |             |             |
|--------------|-------------|---|-------------|-------------|
| 1 April 2022 | 1.1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah   | 100.000.000 |             |
|              | 6.1.5.02.01 | Penerimaan Pembiayaan<br>Penerimaan kembali<br>Pinjaman kepada<br>Perusahaan Daerah |             | 100.000.000 |

**Keempat,** pada saat terdapat Nota Kredit dicatat penerimaan pembiayaan penarikan dana bergulir pada BLUD Dana Bergulir sebesar Rp 200.000.000,-, maka tenaga akuntansi Kuasa BUD akan mencatat :

|               |             |  |             |             |
|---------------|-------------|--|-------------|-------------|
| 10 April 2022 | 1.1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah  | 200.000.000 |             |
|               | 6.1.6.06.01 | Penerimaan Pembiayaan<br>Penerimaan kembali<br>Investasi Dana Bergulir |             | 200.000.000 |

**Kelima,** pada saat terdapat Nota Kredit beserta perjanjian peminjaman ke Bank Daerah dicatat penerimaan pinjaman sebesar Rp 10.000.000.000,- yang dicicil selama 5 tahun (@Rp 2.000.000.000,-), maka tenaga akuntansi Kuasa BUD akan mencatat :

|            |             |  | Debit          | Kredit         |
|------------|-------------|--|----------------|----------------|
| 1 Mei 2022 | 1.1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah  | 10.000.000.000 |                |
|            | 6.1.4.03.01 | Penerimaan<br>Pembiayaan<br>Pinjaman Dalam<br>Negeri dari Bank |                | 10.000.000.000 |

**Keenam,** pada saat terdapat Nota Kredit beserta perjanjian peminjaman ke Lembaga Donor Internasional yang diteruspinjamkan melalui Kementerian Keuangan dicatat penerimaan pinjaman luar negeri sebesar Rp 500.000.000.000,- yang dicicil selama 20 tahun (@Rp 25.000.000.000,-), maka tenaga akuntansi Kuasa BUD akan mencatat:

|             |             |  |                 |                 |
|-------------|-------------|--|-----------------|-----------------|
| 30 Mei 2022 | 1.1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah                                | 500.000.000.000 |                 |
|             | 6.1.8.00.00 | Penerimaan<br>Pembiayaan<br>Pinjaman Luar Negeri |                 | 500.000.000.000 |

Bentuk dan Cara Pengisian Buku Jurnal

Berdasarkan contoh jurnal tersebut diatas maka dilakukan pencatatan dalam buku jurnal penerimaan kas untuk transaksi berbasis kas yang nantinya digunakan untuk menyusun LRA dan LAK sebagai berikut :

KABUPATEN KUNINGAN
BUKU JURNAL PENERIMAAN KAS (JM)

SKPKD : .....( SKPKD Kabupaten Kuningan)

Halaman 01

| Tanggal  | Nomor            |            | Kode Rekening |   |   |    |    | Uraian   | Ref. | Debit<br>(Rp)  | Kredit<br>(Rp) |
|----------|------------------|------------|---------------|---|---|----|----|--|------|----------------|----------------|
|          | Bukti Penerimaan | Bukti Lain |               |   |   |    |    |  |      |                |                |
| 1        | 2                |            | 3             |   |   |    |    | 4  | 5    | 6              | 7              |
| 10/03/15 | NK               |            | 1             | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas di Kas Daerah  |      | 500.000.000    |                |
|          |                  |            | 6             | 1 | 2 | 01 | 01 | Penerimaan<br>Pembiayaan<br>Pencairan Dana<br>Cadangan                                 |      |                | 500.000.000    |
| 20/03/15 | NK               |            | 1             | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas di Kas Daerah  |      | 100.000.000    |                |
|          |                  |            | 6             | 1 | 3 | 01 | 01 | Penerimaan<br>Pembiayaan Hasil<br>Penjualan BUMD                                       |      |                | 100.000.000    |
| 1/04/15  | NK               |            | 1             | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas di Kas Daerah  |      | 100.000.000    |                |
|          |                  |            | 6             | 1 | 5 | 02 | 01 | Penerimaan<br>Pembiayaan<br>Penerimaan kembali<br>Pinjaman kepada<br>Perusahaan Daerah |      |                | 100.000.000    |
| 10/04/15 | NK               |            | 1             | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas di Kas Daerah  |      | 200.000.000    |                |
|          |                  |            | 6             | 1 | 6 | 06 | 01 | Penerimaan<br>Pembiayaan<br>Penarikan kembali<br>Investasi Dana<br>Bergulir            |      |                | 200.000.000    |
| 1/05/15  | NK               |            | 1             | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas di Kas Daerah  |      | 10.000.000.000 |                |
|          |                  |            | 6             | 1 | 4 | 03 | 01 | Penerimaan<br>Pembiayaan<br>Pinjaman Dalam<br>Negeri dari Bank                         |      |                | 10.000.000.000 |
| 30/05/15 | NK               |            | 1             | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas di Kas Daerah  |      | 500.000.000    |                |
|          |                  |            | 6             | 1 | 8 | 01 | 01 | Penerimaan<br>Pembiayaan<br>Pinjaman Luar<br>Negeri                                    |      |                | 500.000.000    |
| Jumlah   |                  |            |               |   |   |    |    |  |      |                |                |

Kuasa BUD

PPKD/BUD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

**Langkah III : Melakukan Posting ke Buku Besar**

Setelah melakukan penjurnalan seluruh transaksi, maka Tenaga Akuntansi Kuasa BUD melakukan posting atas pencatatan jurnal tersebut ke buku besar. Posting ini berguna agar seluruh transaksi yang sama-sama mempengaruhi suatu kode rekening/akun dapat dikelompokkan dalam satu buku besar untuk kode rekening/akun yang bersangkutan. Periode posting harus semakin diusahakan dapat dilakukan dalam waktu yang semakin singkat misalkan untuk periode mingguan atau bahkan harian.

Contoh buku besar SKPKD–Kuasa BUD : Kas di Kas Daerah sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

**KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR**

**SKPKD** : BPKAD Kabupaten Kuningan  
**Kode Rekening** : 1.1.1.01.01  
**Nama Rekening** : Kas di Kas Daerah  
**Pagu APBD** :  
**Pagu perubahan APBD** :

Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian  | Debet<br>(Rp)         | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|---|-----------------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |   |                       |                |
| 1  |       | 10/03/2022 |     | Penerimaan Pembiayaan<br>Pencairan Dana Cadangan                            | 500.000.000           |                |
| 2  |       | 20/03/2022 |     | Penerimaan Pembiayaan Hasil<br>Penjualan Kekayaan Daerah yang<br>Dipisahkan | 100.000.000           |                |
| 3  |       | 1/04/2022  |     | Penerimaan Pembiayaan<br>Penerimaan kembali Piutang                         | 100.000.000           |                |
| 4  |       | 10/04/2022 |     | Penerimaan Pembiayaan<br>Penarikan Dana Bergulir                            | 200.000.000           |                |
| 5  |       | 1/05/2022  |     | Penerimaan Pembiayaan Pinjaman<br>Dalam Negeri dari Bank                    | 10.000.000.000        |                |
| 6  |       | 30/05/2022 |     | Penerimaan Pembiayaan Pinjaman<br>Luar Negeri                               | 500.000.000           |                |
|    |       |            |     |   |                       |                |
|    |       |            |     | <b>Jumlah</b>   | <b>11.400.000.000</b> | -              |
|    |       |            |     | <b>Saldo</b>  | <b>11.400.000.000</b> | -              |

Kuasa BUD

PPKD/BUD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–Kuasa BUD : Penerimaan Pembiayaan  
Pencairan Dana Cadangan sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku  
Jurnal sebelumnya adalah:

**KABUPATEN KUNINGAN**  
**BUKU BESAR**

**SKPKD** : BPKAD Kabupaten Kuningan  
**Kode Rekening** : 6.1.2.01.01  
**Nama Rekening** : Penerimaan Pembiayaan Pencairan Dana Cadangan  
**Pagu APBD** :  
**Pagu perubahan APBD** :

Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian   | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp)     |
|----|-------|------------|-----|--|---------------|--------------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |  |               |                    |
| 1  |       | 10/03/2022 |     | Penerimaan Pembiayaan<br>Pencairan Dana Cadangan melalui<br>Kas Daerah | -             | 500.000.000        |
|    |       |            |     |  |               |                    |
|    |       |            |     | <b>Jumlah</b>  | -             | <b>500.000.000</b> |
|    |       |            |     | <b>Saldo</b>   | -             | <b>500.000.000</b> |

Kuasa BUD

PPKD/BUD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–Kuasa BUD : Penerimaan Pembiayaan  
Hasil Penjualan BUMD sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku  
Jurnal sebelumnya adalah:

**KABUPATEN KUNINGAN**  
**BUKU BESAR**

**SKPKD** : BPKAD Kabupaten Kuningan  
**Kode Rekening** : 6.1.3.01.01  
**Nama Rekening** : Penerimaan Pembiayaan Hasil BUMD  
**Pagu APBD** :  
**Pagu perubahan APBD** :

Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian   | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp)     |
|----|-------|------------|-----|--|---------------|--------------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |  |               |                    |
| 1  |       | 20/03/2022 |     | Penerimaan Pembiayaan Hasil<br>Penjualan Kekayaan Daerah yang<br>Dipisahkan melalui Kas Daerah | -             | 100.000.000        |
|    |       |            |     |  |               |                    |
|    |       |            |     | <b>Jumlah</b>  | -             | <b>100.000.000</b> |
|    |       |            |     | <b>Saldo</b>   | -             | <b>100.000.000</b> |

Kuasa BUD

PPKD/BUD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–Kuasa BUD : Penerimaan Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri dari Bank sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPKD : BPKAD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 6.1.4.03.01  
Nama Rekening : Penerimaan Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri dari Bank  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |           | Ref | Uraian   | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|-----------|-----|--|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal   |     |  |               |                |
| 1  |       | 1/05/2022 |     | Penerimaan Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri dari Bank melalui Kas Daerah | -             | 10.000.000.000 |
|    |       |           |     |  |               |                |
|    |       |           |     | Jumlah   | -             | 10.000.000.000 |
|    |       |           |     | Saldo  | -             | 10.000.000.000 |

Kuasa BUD

PPKD/BUD

(tanda tangan) (tanda tangan)  
(nama lengkap) (nama lengkap)  
NIP..... NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–Kuasa BUD : Penerimaan Pembiayaan Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPKD : BPKAD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 6.1.5.02.01  
Nama Rekening : Penerimaan Pembiayaan Penerimaan kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |           | Ref | Uraian  | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|-----------|-----|---|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal   |     |   |               |                |
| 1  |       | 1/04/2022 |     | Penerimaan Pembiayaan Penerimaan kembali Piutang melalui Kas Daerah | -             | 100.000.000    |
|    |       |           |     |   |               |                |
|    |       |           |     | Jumlah  | -             | 100.000.000    |
|    |       |           |     | Saldo   | -             | 100.000.000    |

Kuasa BUD

PPKD/BUD

(tanda tangan) (tanda tangan)  
(nama lengkap) (nama lengkap)  
NIP..... NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–Kuasa BUD : Penerimaan Pembiayaan Penarikan kembali Investasi Dana Bergulir sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPKD : BPKAD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 6.1.6.06.01  
Nama Rekening : Penerimaan Pembiayaan Penarikan kembali Investasi Dana Bergulir  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD :

Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian   | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|--|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |  |               |                |
| 1  |       | 10/04/2022 |     | Penerimaan Pembiayaan<br>Penarikan Dana Bergulir melalui<br>Kas Daerah | -             | 200.000.000    |
|    |       |            |     |  |               |                |
|    |       |            |     | Jumlah   | -             | 200.000.000    |
|    |       |            |     | Saldo  | -             | 200.000.000    |

Kuasa BUD

PPKD/BUD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–Kuasa BUD : Penerimaan Pembiayaan Pinjaman Luar Negeri sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPKD : BPKAD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 6.1.8.01.01  
Nama Rekening : Penerimaan Pembiayaan Pinjaman Luar Negeri  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD :

Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian   | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|--|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |  |               |                |
| 1  |       | 30/05/2022 |     | Penerimaan Pembiayaan Pinjaman<br>Luar Negeri melalui Kas Daerah | -             | 500.000.000    |
|    |       |            |     |  |               |                |
|    |       |            |     | Jumlah   | -             | 500.000.000    |
|    |       |            |     | Saldo  | -             | 500.000.000    |

Kuasa BUD

PPKD/BUD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....



**Langkah IV : Menyusun Neraca Saldo dan Laporan Keuangan**

Setelah melakukan posting seluruh pencatatan dalam buku besar maka kemudian Tenaga Akuntansi di Kuasa BUD membuat neraca saldo sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Penyusunan neraca saldo oleh Tenaga Akuntansi di Kuasa BUD dilakukan secara triwulanan. Neraca saldo disusun dengan cara memindahkan saldo-saldo yang ada di tiap buku besar ke dalam Neraca Saldo. Contoh Neraca Saldo dari hasil pencatatan dan posting contoh transaksi keuangan diatas adalah sebagai berikut :

**KABUPATEN KUNINGAN  
NERACA SALDO  
PER TANGGAL 31 Desember 2022**

| SKPKD         |   |   |    |    | : BPKAD  |                |                |
|---------------|---|---|----|----|--|----------------|----------------|
| Kode Rekening |   |   |    |    | Uraian   | Jumlah         |                |
|               |   |   |    |    |  | Debit          | Kredit         |
| 1             |   |   |    |    | 2  | 3              | 4              |
| 1             | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas di Kas Daerah  | 11.400.000.000 | -              |
| 6             | 1 | 2 | 01 | 01 | Penerimaan Pembiayaan Pencairan Dana Cadangan                              | -              | 500.000.000    |
| 6             | 1 | 3 | 01 | 01 | Penerimaan Pembiayaan Hasil Penjualan BUD                                  | -              | 100.000.000    |
| 6             | 1 | 4 | 03 | 01 | Penerimaan Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri dari Bank                      | -              | 10.000.000.000 |
| 6             | 1 | 5 | 02 | 01 | Penerimaan Pembiayaan Penerimaan kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah | -              | 100.000.000    |
| 6             | 1 | 6 | 06 | 01 | Penerimaan Pembiayaan Penarikan kembali Investasi Dana Bergulir            | -              | 200.000.000    |
| 6             | 1 | 8 | 01 | 01 | Penerimaan Pembiayaan Pinjaman Luar Negeri                                 | -              | 500.000.000    |
|               |   |   |    |    |  |                |                |
| Jumlah        |   |   |    |    |  | 11.400.000.000 | 11.400.000.000 |

Kuasa BUD

PPKD/BUD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

## **SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI BELANJA DAN TRANSFER DI SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (SKPKD) – KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH**

Bagian ini menjelaskan Sistem dan Prosedur Akuntansi Belanja dan Transfer di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mencatat transaksi di kuasa bendahara umum daerah

### **KEBIJAKAN UMUM**

Prosedur akuntansi belanja dan transfer pada SKPKD-Kuasa BUD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan transaksi realisasi belanja SKPD dan belanja serta transfer di SKPKD-PPKD dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Sistem dan prosedur akuntansi ini disusun berdasarkan kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

### **PIHAK-PIHAK TERKAIT**

Berbagai pihak/fungsi yang terkait dalam proses akuntansi belanja dan transfer pada SKPKD-Kuasa BUD beserta tugas-tugasnya adalah :

1. Bendahara Pengeluaran SKPD

Dalam pelaksanaan prosedur ini, Bendahara Pengeluaran SKPD memiliki tugas menyiapkan dokumen-dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan akuntansi belanja SKPD karena telah melakukan penerimaan uang persediaan dari Rekening Umum Kas Daerah dan menyetorkannya sisanya ke

Rekening Umum Kas Daerah serta mencatat belanja yang dibayar langsung oleh Kas Daerah. Pihak ini adalah pemberi dokumen kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD).

2. Bendahara Pengeluaran PPKD

Dalam pelaksanaan prosedur ini, Bendahara Pengeluaran PPKD memiliki tugas menerima dokumen-dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan akuntansi belanja dan transfer SKPKD seperti Nota Debet dan kopi atau rangkap SP2D LS dari Kuasa BUD dan menyiapkannya untuk kepentingan pencatatan oleh PPK-Kuasa BUD.

3. Pemerintah Lainnya

Pemerintah Lainnya adalah entitas pemerintah yang menerima transfer dari Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Kuningan seperti dana bantuan keuangan kepada Pemerintah lainnya. Pihak ini adalah pemberi dokumen kepada Bendahara Umum Daerah (BUD).

4. Pihak Lainnya

Pihak Lainnya adalah pihak diluar Bendahara Pengeluaran SKPD dan PPKD, dan Pemerintah Lainnya yang menerima transfer dari Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Kuningan seperti BUMN, BUMD, Masyarakat. Pihak ini adalah pemberi dokumen kepada Bendahara Umum Daerah (BUD).

5. Tenaga Akuntansi di Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD)

Dalam pelaksanaan prosedur ini, Tenaga Akuntansi di Kuasa BUD memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menerima kopi atau rangkap bukti-bukti transaksi belanja dan transfer dari Bendahara Pengeluaran baik SKPD maupun SKPKD-PPKD dan menganalisa data dan informasi akuntansi dari bukti transaksi tersebut;
- b. Mencatat transaksi-transaksi belanja dan transfer SKPD maupun SKPKD-PPKD berdasarkan bukti-bukti transaksi ke buku jurnal;

- c. Memposting jurnal-jurnal terkait transaksi-transaksi belanja dan transfer SKPD maupun SKPKD-PPKD ke dalam buku besarnya masing-masing;
- d. Menyusun neraca saldo untuk persiapan penyusunan laporan keuangan, yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas; dan
- e. Menyerahkan buku jurnal, buku besar dan neraca saldo kepada Kuasa BUD untuk diperiksa dan ditandatangani.

6. Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD)

Dalam pelaksanaan prosedur ini, Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Bertanggungjawab atas sistem akuntansi belanja dan transfer SKPKD-Kuasa BUD yang dipimpinnya;
- b. Memeriksa dan menandatangani hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Tenaga Akuntansi PPKD-Kuasa BUD setiap bulannya seperti Buku Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo SKPKD-Kuasa BUD; dan
- c. Menyerahkan Buku Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo SKPD yang mencatat transaksi pendapatan SKPD dan SKPKD-PPKD di Kuasa BUD setiap triwulan kepada PPKD/BUD untuk disetujui.

7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Bendahara Umum Daerah (BUD) : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (tidak termasuk Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan).

Dalam pelaksanaan prosedur ini, PPKD/BUD memiliki tugas mengetahui dan menandatangani hasil pekerjaan Kuasa BUD setiap bulannya seperti Buku Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo SKPKD-Kuasa BUD setiap triwulan.

## **DOKUMEN YANG DIGUNAKAN**

1. Surat Perintah Pencairan Dana Uang Persediaan yang selanjutnya disebut (SP2D-UP) adalah dokumen yang digunakan sebagai pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkan SPM –UP;
2. Surat Perintah Pencairan Dana Ganti Uang yang selanjutnya disebut (SP2D-GU) adalah dokumen yang digunakan sebagai pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkan SPM –GU;
3. Surat Perintah Pencairan Dana Tambahan Uang yang selanjutnya disebut (SP2D-TU) adalah dokumen yang digunakan sebagai pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkan SPM –TU;
4. Surat Perintah Pencairan Dana Langsung yang selanjutnya disebut (SP2D-LS) adalah dokumen yang digunakan sebagai pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM -LS;
5. Nota Debit merupakan bukti transaksi pengeluaran uang di rekening kas umum daerah; dan
6. Surat Tanda Setoran selanjutnya disebut STS adalah bukti yang dibuat untuk melakukan penyetoran uang ke Kas Daerah.

## **BUKU DAN ATAU FORMULIR YANG DIGUNAKAN**

Buku dan atau formulir yang digunakan dalam pelaksanaan prosedur akuntansi belanja di SKPKD-Kuasa BUD paling tidak terdiri dari :

1. Buku Jurnal Pengeluaran Kas (JK)  
Merupakan buku jurnal yang digunakan untuk melakukan pencatatan akuntansi atas transaksi pengeluaran kas berupa belanja dan transfer baik kepada SKPD maupun SKPKD-PPKD.

2. Buku Jurnal Umum (JU)

Merupakan buku jurnal yang digunakan untuk melakukan pencatatan akuntansi atas transaksi-transaksi selain kas di kas daerah.

3. Buku Besar (BB)

Merupakan buku yang digunakan untuk menampung pencatatan hasil posting transaksi belanja dan transfer dari buku jurnal. Buku besar ini merupakan pencatatan akuntansi atas seluruh transaksi untuk suatu rekening/akun per jenis atau obyek. Jadi setiap rekening/akun per jenis atau objek mempunyai buku besar tersendiri.

4. Buku Besar Pembantu (BP)

Buku besar dapat dilengkapi dengan buku besar pembantu sebagai alat uji silang dan kelengkapan informasi rekening/akun tertentu. Buku besar pembantu berisi rincian akun (rincian obyek) yang telah dicatat dalam buku besar. Jika dirasakan informasi dalam buku besar sudah mencukupi maka buku besar pembantu tidak perlu dibuat lagi.

5. Neraca Saldo (NS)

Merupakan formulir yang mencatat nilai saldo setiap rekening/akun per rincian objek termasuk rekening/akun termasuk transaksi belanja SKPD dan belanja serta transfer SKPKD-Pemda di Kuasa BUD sehingga diketahui jumlah total dari seluruh rekening/akun.

## **KERANGKA SISTEM**

Tenaga Akuntansi di Kuasa BUD berdasarkan bukti-bukti transaksi belanja dan transfer dari Kuasa BUD yang diperoleh dari berbagai pihak seperti :

1. Bendahara Pengeluaran SKPD
2. Bendahara Pengeluaran PPKD
3. Pemerintah Lain

#### 4. Pihak Ketiga

#### 5. Pihak Lain

Berdasarkan bukti transaksi keuangan dari para pihak tersebut maka Tenaga Akuntansi di Kuasa BUD kemudian melakukan pencatatan akuntansi belanja dan transfer Kuasa BUD dalam buku jurnal terkait. Jadi pencatatan akuntansi untuk setiap transaksi dilakukan pada saat terjadinya transaksi dan atau pada saat bukti transaksi tersebut diterima namun pengakuan transaksi tetap pada tanggal bukti transaksi.

Setelah seluruh transaksi dicatat dalam buku jurnal maka Tenaga Akuntansi di Kuasa BUD kemudian melakukan posting jurnal belanja SKPD dan belanja serta transfer SKPKD-PPKD dari buku jurnal ke buku besar. Setelah posting dari buku jurnal ke buku besar selesai dilakukan maka kemudian Tenaga Akuntansi di Kuasa BUD menyusun Neraca Saldo sebagai dasar pembuatan Laporan Keuangan untuk setiap triwulan yang diserahkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah triwulan berakhir kepada Kuasa BUD.

### **ALUR PROSEDUR TEKNIS**

Teknis pelaksanaan sistem dan prosedur akuntansi belanja dan transfer di SKPKD-Kuasa BUD ini adalah sebagai berikut :

#### **Langkah I : Penerimaan Bukti Transaksi**

Tenaga Akuntansi SKPKD-Kuasa BUD yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menerima dokumen transaksi keuangan belanja dan transaksi dari Kuasa BUD. Atas penerimaan bukti transaksi belanja dan transaksi ini, Tenaga Akuntansi SKPKD-Kuasa BUD harus menganalisa hingga benar-benar meyakini informasi akuntansi dari bukti tersebut. Setelah digunakan sebagai dasar melakukan pencatatan akuntansi belanja dan transaksi maka bukti transaksi tersebut harus disimpan dengan baik. Sebagai contoh : misalkan diketahui bahwa selama tahun 2015, telah terjadi transaksi yang terkait dengan belanja dan transaksi di SKPD maupun SKPKD-PPKD yang juga dicatat oleh SKPKD-Kuasa BUD sebagai berikut (asumsi

tanggal bukti transaksi sama dengan tanggal penerimaan bukti transaksi) :

5 Februari 2015 Tenaga akuntansi di Kuasa BUD menerima SP2D UP dari Kuasa BUD sebesar Rp10.000.000,- atas pencairan UP untuk belanja SKPD sebagai berikut :

- Belanja uang lembur PNS senilai Rp1.000.000,-
- Belanja alat tulis kantor senilai Rp 5.000.000,-.
- Belanja cetak senilai Rp 4.000.000,-

28 Des 2015 Tenaga akuntansi di Kuasa BUD menerima STS dari Kuasa BUD sebesar Rp4.000.000,- atas pengembalian uang sisa UP/GU/TU dari rekeng belanja cetak.

Kemudian dari bukti-bukti transaksi yang lain diketahui adanya transaksi belanja LS SKPD sebagai berikut :

4 Februari 2015 Tenaga akuntansi di Kuasa BUD menerima SP2D LS atas pembayaran gaji bulan Januari dengan rincian sebagai berikut :

- Gaji Pokok Rp. 100.000.000,-
- Tunjangan Keluarga Rp. 20.000.000,-
- Tunjangan Fungsional Rp. 30.000.000,-
- Tunjangan Fungsional Umum Rp. 10.000.000,-

28 Februari 2015 Tenaga akuntansi di Kuasa BUD menerima SP2D LS atas pembelian ambulans yang dilengkapi dengan alat-alat kesehatan senilai Rp 250 juta dengan potongan PPN sebesar Rp 22.727.273 dan Potongan PPh Pasal 22 sebesar Rp 3.409.091.

Selain itu dari bukti-bukti transaksi SKPKD-PPKD diketahui adanya transaksi belanja dan transfer sebagai berikut :

31 Maret 2015 Tenaga akuntansi di PPK-SKPKD menerima perjanjian utang dengan pihak ketiga misalnya Bank atau berdasarkan tagihan bunga dari kreditur yang



|                 |   |
|-----------------|---|
|                 | menyatakan beban bunga sebesar Rp 200.000.000,-.  |
| 7 April 2015    | Tenaga akuntansi di Kuasa BUD menerima SP2D LS dan Nota Debet dari Kuasa BUD atas pelunasan tagihan bunga atas pengakuan utang beban bunga tanggal 31 Maret 2015.   |
| 10 April 2015   | Tenaga akuntansi di PPK-SKPKD menerima Surat Keputusan Kepala Daerah/Perjanjian/Dokumen yang dipersamakan tentang pemberian subsidi kepada entitas lain seperti BUMD yang menyatakan beban subsidi sebesar Rp 500.000.000,-.  |
| 15 April 2015   | Tenaga akuntansi di Kuasa BUD menerima SP2D LS dan Nota Debet dari Kuasa BUD atas pelunasan utang pemberian subsidi kepada entitas lain seperti BUMD atas Surat Keputusan Kepala Daerah/Perjanjian/Dokumen yang dipersamakan tanggal 10 April 2015.   |
| 15 Juni 2015    | Tenaga akuntansi di PPK-SKPKD menerima Surat Keputusan Kepala Daerah tentang nama-nama penerima hibah daerah dan telah menandatangani NPHD/Dokumen yang dipersamakan tentang pemberian hibah kepada kelompok masyarakat yang menyatakan beban hibah sebesar Rp 1.000.000.000,-.                                       |
| 17 Juli 2015    | Tenaga akuntansi di Kuasa BUD menerima SP2D LS dan Nota Debet dari Kuasa BUD atas pelunasan beban hibah atas SK tentang nama-nama penerima hibah daerah tanggal 15 juni 2015.   |
| 20 Agustus 2015 | Tenaga akuntansi di PPK-SKPKD menerima Surat Keputusan kepala daerah tentang penerima bantuan sosial berupa uang serta menandatangani Surat Perjanjian pemberian bantuan sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan dengan penerima bantuan sosial yang menyatakan beban bantuan sosial sebesar Rp 300.000.000,-. |

- 23 Agustus 2015 Tenaga akuntansi di Kuasa BUD menerima SP2D LS dan Nota Debet dari Kuasa BUD atas pelunasan beban bantuan sosial atas Surat Keputusan kepala daerah dan Surat Perjanjian pemberian bantuan sosial tanggal 20 April 2015.
- 25 Sept 2015 Tenaga akuntansi di PPK-SKPKD menerima Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Ke Desa yang menyatakan beban transfer bagi hasil pajak dan retribusi ke desa sebesar Rp 500.000.000,-.
- 27 Sept 2015 Tenaga akuntansi di Kuasa BUD menerima SP2D LS dan Nota Debet dari Kuasa BUD atas pelunasan beban transfer bagi hasil pajak dan retribusi ke desa atas Surat Keputusan Kepala Daerah tanggal 25 Sept 2015.
- 30 Okt 2015 Tenaga akuntansi di PPK-SKPKD menerima Surat Keputusan Kepala Daerah tentang bantuan keuangan ke desa yang menyatakan beban transfer bantuan keuangan ke desa sebesar Rp 100.000.000,-.
- 1 Nov 2015 Tenaga akuntansi di Kuasa BUD menerima SP2D LS dan Nota Debet dari Kuasa BUD atas pelunasan beban transfer bantuan keuangan ke desa atas Surat Keputusan Kepala Daerah tanggal 30 Okt 2015.
- 5 Des 2015 Tenaga akuntansi di PPK-SKPKD menerima Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Bencana Alam yang menyatakan beban tak terduga sebesar Rp 75.000.000,-.
- 7 Des 2015 Tenaga akuntansi di Kuasa BUD menerima SP2D LS dan Nota Debet dari Kuasa BUD atas pelunasan beban tak terduga atas penetapan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Bencana Alam tanggal 5 Desember 2015.

Contoh sederhana tersebut diatas diberikan sebagai bahan untuk mempermudah penjelasan sistem dan prosedur akuntansi belanja dan transfer di SKPKD-Kuasa BUD ini. Tetapi contoh tersebut diatas tidak menunjukkan semua bentuk transaksi yang secara nyata terjadi.

**Langkah II : Menjurnal Transaksi Belanja**

Berdasarkan bukti-bukti transaksi belanja dan transfer kemudian Tenaga Akuntansi di SKPKD-Kuasa BUD mencatat transaksi tersebut di buku jurnal. Pencatatan akuntansi dilakukan kedalam buku jurnal sesuai dengan jenis transaksi yang terjadi. Pencatatan akuntansi dilakukan kedalam buku jurnal pengeluaran sesuai dengan jenis transaksi yang terjadi sebagai berikut :

- 1. Untuk **pengeluaran kas dari Belanja LS di SKPKD-Kuasa BUD** maka dilakukan pencatatan :

Pencatatan oleh Tenaga Akuntansi Kuasa BUD di Buku Jurnal Pengeluaran Kas jika belanja atau transfer ditransfer langsung kepada Pihak Ketiga

|                        | Debit | Kredit |
|------------------------|-------|--------|
| Belanja/Transfer _____ | xxxx  |        |
| Kas di Kas Daerah      |       | xxxx   |

- 2. Untuk **pengeluaran kas dari SKPKD-Kuasa BUD kepada SKPD (UP/GU/TU)** maka dilakukan:

Pencatatan oleh Tenaga Akuntansi Kuasa BUD di Buku Jurnal Pengeluaran Kas jika Kas Daerah dikeluarkan kepada Bendahara Pengeluaran berdasarkan dokumen SP2D UP/GU/TU langsung mengakui belanja yang akan menggunakan UP/GU/TU tersebut sebagai berikut :

|                   | Debit | Kredit |
|-------------------|-------|--------|
| Belanja _____     | xxxx  |        |
| Kas di Kas Daerah |       | xxxx   |

3. Untuk **penerimaan kas dari pengembalian belanja di SKPKD-Kuasa BUD terhadap penggunaan UP/GU/TU** maka dilakukan :

Pencatatan oleh Tenaga Akuntansi di Kuasa BUD di Buku Jurnal pengeluaran kas jika terdapat STS atas pengembalian belanja atas Penggunaan UP/GU/TU sebagai berikut :

|                       | Debit | Kredit |
|-----------------------|-------|--------|
| Belanja/transfer_____ | xxxx  |        |
| Kas di Kas Daerah     |       | xxxx   |

Catatan : Kode dan nama rekening/akun belanja/transfer (dalam contoh ditulis belanja/transfer\_\_\_\_\_) disesuaikan dengan kode dan nama rekening/akun, sampai rincian obyek, sesuai dengan realisasi pengeluaran belanjanya.

Berdasarkan uraian penjurnalan dan contoh transaksi tersebut diatas maka Tenaga Akuntansi di Kuasa BUD melakukan pencatatan dalam buku jurnal pengeluaran kas atau jurnal umum dengan jurnal sebagai berikut :

**Pertama,** penjurnalan untuk penerimaan uang UP/GU/TU yang dalam contoh tersebut terjadi pada tanggal 5 Februari 2015, dicatat di jurnal pengeluaran kas sebagai berikut :

|            |             |                           | Debit     | Kredit     |
|------------|-------------|---------------------------|-----------|------------|
| 5 Feb 2015 | 5.2.1.03.01 | Belanja Uang Lembur PNS   | 1.000.000 |            |
|            | 5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 5.000.000 |            |
|            | 5.2.2.06.01 | Belanja Cetak             | 4.000.000 |            |
|            | 1.1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah         |           | 10.000.000 |

**Kedua,** penjurnalan dilakukan atas pembalian belanja dari UP/GU/TU berdasarkan STS, yang dicatat di jurnal pengeluaran kas, yaitu sebagai berikut :

|             |             |                   | Debit     | Kredit    |
|-------------|-------------|-------------------|-----------|-----------|
| 28 Des 2015 | 1.1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah | 4.000.000 |           |
|             | 5.2.2.06.01 | Belanja Cetak     |           | 4.000.000 |

Penjurnalan untuk pungutan atau potongan dari perhitungan fihak ketiga (PFK) tidak dilakukan karena dipungut/dipotong dan disetor oleh SKPD.

**Ketiga,** untuk mencatat realisasi belanja pegawai dan perolehan aset tetap dicatat pada jurnal pengeluaran kas sebagai berikut :

|             |             |  | Debit       | Kredit      |
|-------------|-------------|--|-------------|-------------|
| 4 Feb 2015  | 5.1.1.01.01 | Belanja Gaji Pokok   | 100.000.000 | -           |
|             | 5.1.1.01.02 | Belanja Tunjangan Keluarga   | 20.000.000  | -           |
|             | 5.1.1.01.04 | Belanja Tunjangan Fungsional                                       | 30.000.000  | -           |
|             | 5.1.1.01.05 | Belanja Tunjangan Daerah   | 10.000.000  | -           |
|             | 1.1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah  | -           | 160.000.000 |
| 28 Feb 2015 | 5.2.3.03.10 | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulans | 250.000.000 | -           |
|             | 1.1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah  | -           | 250.000.000 |

Penjurnalan untuk pungutan atau potongan dari perhitungan fihak ketiga (PFK) dicatat oleh Kuasa BUD dan dijelaskan tersendiri dalam lampiran 4-F.

**Keempat,** transaksi pengakuan utang dengan pihak ketiga misalnya Bank atau berdasarkan tagihan bunga dari kreditur diakui beban bunga sebesar Rp 200.000.000,- tidak dicatat oleh tenaga akuntansi Kuasa BUD karena belum ada realisasi kas :

|               |                  |  | Debit | Kredit |
|---------------|------------------|--|-------|--------|
| 31 Maret 2015 | Tidak ada jurnal |  |       |        |

**Kelima,** berdasarkan SP2D LS dan Nota Debet dicatat pelunasan tagihan bunga atas pengakuan utang beban bunga tanggal 31 Maret 2015 :

|              |             |   | Debit       | Kredit      |
|--------------|-------------|---|-------------|-------------|
| 7 April 2015 | 5.1.2.01.03 | Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank | 200.000.000 |             |
|              | 1.1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah   |             | 200.000.000 |

**Keenam,** transaksi pengakuan utang pemberian subsidi kepada entitas lain seperti BUMD diakui beban subsidi sebesar Rp 500.000.000,- tidak dicatat oleh tenaga akuntansi Kuasa BUD karena belum ada realisasi kas :

|               |                  |  | Debit | Kredit |
|---------------|------------------|--|-------|--------|
| 10 April 2015 | Tidak ada jurnal |  |       |        |

**Ketujuh,** berdasarkan SP2D LS dan Nota Debet dicatat pelunasan utang pemberian subsidi kepada entitas lain seperti BUMD atas Surat Keputusan Kepala Daerah/Perjanjian/Dokumen yang dipersamakan tanggal 10 April 2015:

|               |             |                                   | Debit       | Kredit      |
|---------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| 15 April 2015 | 5.1.3.01.01 | Belanja Subsidi kepada Perusahaan | 500.000.000 |             |
|               | 1.1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah                 |             | 500.000.000 |

**Kedelapan,** transaksi berdasarkan SK tentang nama-nama penerima hibah daerah dan telah menandatangani NPHD/Dokumen yang dipersamakan tentang pemberian hibah kepada kelompok masyarakat yang diakui sebagai beban hibah sebesar Rp 1.000.000.000,- tidak dicatat oleh tenaga akuntansi Kuasa BUD karena belum ada realisasi kas :

|              |                  |  | Debit | Kredit |
|--------------|------------------|--|-------|--------|
| 15 Juni 2015 | Tidak ada jurnal |  |       |        |

**Kesembilan,** berdasarkan SP2D LS dan Nota Debet dicatat pelunasan beban hibah atas SK tentang nama-nama penerima hibah daerah tanggal 15 juni 2015:

|              |             |  | Debit         | Kredit        |
|--------------|-------------|--|---------------|---------------|
| 17 Juli 2015 | 5.1.4.06.00 | Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat/ Perorangan | 1.000.000.000 |               |
|              | 1.1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah                                    |               | 1.000.000.000 |

**Kesepuluh,** transaksi berdasarkan Surat Keputusan kepala daerah tentang penerima bantuan sosial berupa uang serta menandatangani Surat Perjanjian pemberian bantuan sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan dengan penerima bantuan sosial diakui beban bantuan sosial sebesar Rp 300.000.000,- tidak dicatat oleh tenaga akuntansi Kuasa BUD karena belum ada realisasi kas :

|               |                  |  | Debit | Kredit |
|---------------|------------------|--|-------|--------|
| 20 Agust 2015 | Tidak ada jurnal |  |       |        |

**Kesebelas,** berdasarkan SP2D LS dan Nota Debet dicatat pelunasan beban bantuan sosial atas Surat Keputusan kepala daerah dan Surat Perjanjian pemberian bantuan sosial tanggal 20 April 2015:

|             |             |  | Debit       | Kredit      |
|-------------|-------------|--|-------------|-------------|
| 23 Agt 2015 | 5.1.5.01.01 | Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan | 300.000.000 |             |
|             | 1.1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah                                |             | 300.000.000 |

**Keduabelas,** transaksi berdasarkan Surat Keputusan kepala daerah tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Ke Desa diakui beban transfer bagi hasil pajak dan retribusi ke desa sebesar Rp 500.000.000,- tidak dicatat oleh tenaga akuntansi Kuasa BUD karena belum ada realisasi kas :

|              |                  |  | Debit | Kredit |
|--------------|------------------|--|-------|--------|
| 25 Sept 2015 | Tidak ada jurnal |  |       |        |

**Ketigabelas,** berdasarkan SP2D LS dan Nota Debet dicatat pelunasan beban transfer bagi hasil pajak dan retribusi ke desa atas Surat Keputusan Kepala Daerah tanggal 25 Sept 2015:

|              |             |   | Debit      | Kredit     |
|--------------|-------------|---|------------|------------|
| 27 Sept 2015 | 5.1.6.03.01 | Belanja/Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa | 50.000.000 |            |
|              | 1.1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah   |            | 50.000.000 |

**Keempatbelas,** transaksi berdasarkan Surat Keputusan kepala daerah tentang bantuan keuangan ke desa diakui beban transfer bantuan keuangan ke desa sebesar Rp 100.000.000,-, tidak dicatat oleh tenaga akuntansi Kuasa BUD karena belum ada realisasi kas :

|             |                  |  | Debit | Kredit |
|-------------|------------------|--|-------|--------|
| 30 Okt 2015 | Tidak ada jurnal |  |       |        |

**Kelimabelas,** berdasarkan SP2D LS dan Nota Debet dicatat pelunasan beban transfer bantuan keuangan ke desa atas Surat Keputusan Kepala Daerah tanggal 30 Okt 2015:

|            |             |  | Debit       | Kredit      |
|------------|-------------|--|-------------|-------------|
| 1 Nov 2015 | 5.1.7.03.00 | Belanja/Transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa | 100.000.000 |             |
|            | 1.1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah  |             | 100.000.000 |

**Keenambelas,** transaksi berdasarkan Surat Keputusan kepala daerah tentang Bencana Alam diakui beban tak terduga sebesar Rp 75.000.000,-, tidak dicatat oleh tenaga akuntansi Kuasa BUD karena belum ada realisasi kas :

|            |                  |  |       |        |
|------------|------------------|--|-------|--------|
|            |                  |  | Debit | Kredit |
| 5 Des 2015 | Tidak ada jurnal |  |       |        |

**Ketujuhbelas,** berdasarkan SP2D LS dan Nota Debet dicatat pelunasan beban tak terduga atas penetapan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Bencana Alam tanggal 5 Desember 2015:

|            |             |                     |            |            |
|------------|-------------|---------------------|------------|------------|
|            |             |                     | Debit      | Kredit     |
| 7 Des 2015 | 5.1.8.01.01 | Belanja Tak Terduga | 75.000.000 |            |
|            | 1.1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah   |            | 75.000.000 |

**Bentuk dan Cara Pengisian Buku Jurnal**

Berdasarkan contoh jurnal tersebut diatas maka dilakukan pencatatan dalam buku jurnal pengeluaran kas untuk transaksi berbasis kas yang nantinya digunakan untuk menyusun LRA dan LAK sebagai berikut :

**KABUPATEN KUNINGAN**  
**BUKU JURNAL PENGELUARAN KAS (JK)**

**SKPKD** : .....( SKPKD Kabupaten Kuningan)

Halaman 01

| Tanggal | Nomor               |               | Kode Rekening |   |   |    |    | Uraian                       | Ref. | Debit<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|---------|---------------------|---------------|---------------|---|---|----|----|------------------------------|------|---------------|----------------|
|         | Bukti<br>Penerimaan | Bukti<br>Lain |               |   |   |    |    |                              |      |               |                |
| 1       | 2                   |               | 3             |   |   |    |    | 4                            | 5    | 6             | 7              |
| 4/02/15 | SP2D LS             |               | 5             | 1 | 1 | 01 | 01 | Belanja Gaji Pokok           |      | 100.000.000   |                |
|         |                     |               | 5             | 1 | 1 | 01 | 02 | Belanja Tunjangan Keluarga   |      | 20.000.000    |                |
|         |                     |               | 5             | 1 | 1 | 01 | 04 | Belanja Tunjangan Fungsional |      | 30.000.000    |                |
|         |                     |               | 5             | 1 | 1 | 01 | 05 | Belanja Tunjangan Daerah     |      | 10.000.000    |                |
|         |                     |               | 1             | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas di Kas Daerah            |      |               | 160.000.000    |
| 5/02/15 | SP2D UP             |               | 5             | 2 | 1 | 03 | 01 | Belanja Uang Lembur PNS      |      | 1.000.000     |                |
|         |                     |               | 5             | 2 | 2 | 01 | 01 | Belanja Alat Tulis Kantor    |      | 5.000.000     |                |
|         |                     |               | 5             | 2 | 2 | 06 | 01 | Belanja Cetak                |      | 4.000.000     |                |
|         |                     |               | 1             | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas di Kas Daerah            |      |               | 10.000.000     |



|          |         |  |   |   |   |    |    |   |  |               |               |
|----------|---------|--|---|---|---|----|----|---|--|---------------|---------------|
| 28/02/15 | SP2D LS |  | 5 | 2 | 3 | 03 | 10 | Belanja Modal<br>Pengadaan Alat-alat<br>Angkutan Darat<br>Bermotor Ambulans |  | 250.000.000   |               |
|          |         |  | 1 | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas di Kas Daerah   |  |               | 250.000.000   |
| 7/04/15  | SP2D LS |  | 5 | 1 | 2 | 01 | 03 | Belanja Bunga<br>Utang Pinjaman<br>kepada Lembaga<br>Keuangan Bank          |  | 200.000.000   |               |
|          |         |  | 1 | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas di Kas Daerah   |  |               | 200.000.000   |
| 15/04/15 | SP2D LS |  | 5 | 1 | 3 | 01 | 01 | Belanja Bunga<br>Subsidi kepada<br>Perusahaan                               |  | 500.000.000   |               |
|          |         |  | 1 | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas di Kas Daerah   |  |               | 500.000.000   |
| 17/07/15 | SP2D LS |  | 5 | 1 | 4 | 06 | 00 | Belanja Hibah<br>kepada Kelompok<br>Masyarakat/<br>Perorangan               |  | 1.000.000.000 |               |
|          |         |  | 1 | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas di Kas Daerah   |  |               | 1.000.000.000 |
| 23/08/15 | SP2D LS |  | 5 | 1 | 5 | 01 | 01 | Belanja Bantuan<br>Sosial Organisasi<br>Kemasyarakatan                      |  | 300.000.000   |               |
|          |         |  | 1 | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas di Kas Daerah   |  |               | 300.000.000   |
| 27/09/15 | SP2D LS |  | 5 | 1 | 6 | 03 | 01 | Belanja/Transfer<br>Bagi Hasil Pajak<br>Daerah kepada<br>Pemerintahan Desa  |  | 50.000.000    |               |
|          |         |  | 1 | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas di Kas Daerah   |  |               | 50.000.000    |
| 1/11/15  | SP2D LS |  | 5 | 1 | 7 | 03 | 00 | Belanja/Transfer<br>Bantuan Keuangan<br>kepada<br>Pemerintahan Desa         |  | 100.000.000   |               |
|          |         |  | 1 | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas di Kas Daerah   |  |               | 100.000.000   |
| 7/12/15  | SP2D LS |  | 5 | 1 | 8 | 01 | 01 | Belanja Tak Terduga   |  | 75.000.000    |               |
|          |         |  | 1 | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas di Kas Daerah   |  |               | 75.000.000    |
| 28/12/15 | STS     |  | 1 | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas di Kas Daerah   |  | 4.000.000     |               |
|          |         |  | 5 | 2 | 2 | 06 | 01 | Belanja Cetak   |  |               | 4.000.000     |
| Jumlah   |         |  |   |   |   |    |    |   |  |               |               |

Kuasa BUD

PPKD/BUD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Langkah III : Melakukan Posting ke Buku Besar

Setelah melakukan penjurnalan seluruh transaksi, maka Tenaga Akuntansi Kuasa BUD melakukan posting atas pencatatan jurnal tersebut ke buku besar. Posting ini berguna agar seluruh transaksi yang sama-sama mempengaruhi suatu kode rekening/akun dapat

dikelompokkan dalam satu buku besar untuk kode rekening/akun yang bersangkutan. Periode posting harus semakin diusahakan dapat dilakukan dalam waktu yang semakin singkat misalkan untuk periode mingguan atau bahkan harian.

Contoh buku besar SKPKD–Kuasa BUD : Kas di Kas Daerah sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

**KABUPATEN KUNINGAN**  
**BUKU BESAR**

**SKPKD** : BPKAD Kabupaten Kuningan  
**Kode Rekening** : 1.1.1.01.01  
**Nama Rekening** : Kas di Kas Daerah  
**Pagu APBD** :  
**Pagu perubahan APBD** :

Halaman 01

| No | Bukti |          | Ref | Uraian   | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|----------|-----|--|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal  |     |  |               |                |
|    |       |          |     | Saldo Awal   | 3.000.000.000 |                |
| 1  |       | 4/02/15  | JK  | Belanja Gaji dan Tunjangan LS                                  |               | 160.000.000    |
| 2  |       | 5/02/15  | JK  | Belanja UP   |               | 10.000.000     |
| 3  |       | 28/02/15 | JK  | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang LS                  |               | 250.000.000    |
| 4  |       | 7/04/15  | JK  | Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank      |               | 200.000.000    |
| 5  |       | 15/04/15 | JK  | Belanja Bunga Subsidi kepada BUMD                              |               | 500.000.000    |
| 6  |       | 17/07/15 | JK  | Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat                       |               | 1.000.000.000  |
| 7  |       | 23/08/15 | JK  | Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan |               | 300.000.000    |
| 8  |       | 27/09/15 | JK  | Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa      |               | 50.000.000     |
| 9  |       | 1/11/15  | JK  | Transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa             |               | 100.000.000    |
| 10 |       | 7/12/15  | JK  | Belanja Tak Terduga  |               | 75.000.000     |
| 11 |       | 28/12/15 | JK  | Belanja Cetak  | 4.000.000     |                |
|    |       |          |     |  |               |                |
|    |       |          |     | Jumlah   | 3.004.000.000 | 2.645.000.000  |
|    |       |          |     | Saldo  | 355.000.000   |                |

Kuasa BUD

PPKD/BUD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–Kuasa BUD : Ekuitas sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPKD : BPKAD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 3.1.1.01.01  
Nama Rekening : Ekuitas  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |         | Ref | Uraian | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|---------|-----|--------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal |     |        |               |                |
| 1  |       |         |     | Saldo  |               | 3.000.000.000  |
|    |       |         |     |        |               |                |
|    |       |         |     | Jumlah |               | 3.000.000.000  |
|    |       |         |     | Saldo  |               | 3.000.000.000  |

Kuasa BUD

PPKD/BUD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–Kuasa BUD : Belanja Gaji Pokok sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPKD : BPKAD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 5.1.1.01.01  
Nama Rekening : Belanja Gaji Pokok  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |         | Ref | Uraian                | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|---------|-----|-----------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal |     |                       |               |                |
| 1  |       | 4/02/15 | JK  | Belanja Gaji Pokok LS | 100.000.000   |                |
|    |       |         |     |                       |               |                |
|    |       |         |     | Jumlah                | 100.000.000   |                |
|    |       |         |     | Saldo                 | 100.000.000   |                |

Kuasa BUD

PPKD/BUD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–Kuasa BUD : Belanja Tunjangan Keluarga sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

**KABUPATEN KUNINGAN**  
**BUKU BESAR**

**SKPKD** : BPKAD Kabupaten Kuningan  
**Kode Rekening** : 5.1.1.01.02  
**Nama Rekening** : Belanja Tunjangan Keluarga  
**Pagu APBD** :  
**Pagu perubahan APBD** :

Halaman 01

| No | Bukti |         | Ref | Uraian                        | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|---------|-----|-------------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal |     |                               |               |                |
| 1  |       | 4/02/15 | JK  | Belanja Tunjangan Keluarga LS | 20.000.000    |                |
|    |       |         |     |                               |               |                |
|    |       |         |     | Jumlah                        | 20.000.000    |                |
|    |       |         |     | Saldo                         | 20.000.000    |                |

Kuasa BUD

PPKD/BUD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–Kuasa BUD : Belanja Tunjangan Fungsional sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

**KABUPATEN KUNINGAN**  
**BUKU BESAR**

**SKPKD** : BPKAD Kabupaten Kuningan  
**Kode Rekening** : 5.1.1.01.04  
**Nama Rekening** : Belanja Tunjangan Fungsional  
**Pagu APBD** :  
**Pagu perubahan APBD** :

Halaman 01

| No | Bukti |         | Ref | Uraian                          | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|---------|-----|---------------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal |     |                                 |               |                |
| 1  |       | 4/02/15 | JK  | Belanja Tunjangan Fungsional LS | 30.000.000    |                |
|    |       |         |     |                                 |               |                |
|    |       |         |     | Jumlah                          | 30.000.000    |                |
|    |       |         |     | Saldo                           | 30.000.000    |                |

Kuasa BUD

PPKD/BUD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–Kuasa BUD : Belanja Tunjangan Daerah sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPKD : BPKAD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 5.1.1.01.05  
Nama Rekening : Belanja Tunjangan Daerah  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD :

Halaman 01

| No | Bukti |         | Ref | Uraian                      | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|---------|-----|-----------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal |     |                             |               |                |
| 1  |       | 4/02/15 | JK  | Belanja Tunjangan Daerah LS | 10.000.000    |                |
|    |       |         |     |                             |               |                |
|    |       |         |     | Jumlah                      | 10.000.000    |                |
|    |       |         |     | Saldo                       | 10.000.000    |                |

Kuasa BUD

PPKD/BUD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–Kuasa BUD : Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPKD : BPKAD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 5.1.2.01.03  
Nama Rekening : Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD :

Halaman 01

| No | Bukti |         | Ref | Uraian   | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|---------|-----|--|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal |     |  |               |                |
| 1  |       | 7/04/15 | JK  | Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank LS | 200.000.000   |                |
|    |       |         |     |  |               |                |
|    |       |         |     | Jumlah   | 200.000.000   |                |
|    |       |         |     | Saldo  | 200.000.000   |                |

Kuasa BUD

PPKD/BUD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–Kuasa BUD : Belanja Bunga Subsidi kepada Perusahaan sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPKD : BPKAD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 5.1.3.01.01  
Nama Rekening : Belanja Bunga Subsidi kepada Perusahaan  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |         | Ref | Uraian                               | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|---------|-----|--------------------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal |     |                                      |               |                |
| 1  |       | 7/04/15 | JK  | Belanja Bunga Subsidi kepada BUMD LS | 500.000.000   |                |
|    |       |         |     |                                      |               |                |
|    |       |         |     | Jumlah                               | 500.000.000   |                |
|    |       |         |     | Saldo                                | 500.000.000   |                |

Kuasa BUD

PPKD/BUD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–Kuasa BUD : Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPKD : BPKAD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 5.1.4.06.00  
Nama Rekening : Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |          | Ref | Uraian                                      | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|----------|-----|---|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal  |     |   |               |                |
| 1  |       | 17/07/15 | JK  | Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat LS | 1.000.000.000 |                |
|    |       |          |     |   |               |                |
|    |       |          |     | Jumlah                                      | 1.000.000.000 |                |
|    |       |          |     | Saldo                                       | 1.000.000.000 |                |

Kuasa BUD

PPKD/BUD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–Kuasa BUD : Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPKD : BPKAD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 5.1.5.01.01  
Nama Rekening : Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |          | Ref | Uraian  | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|----------|-----|---|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal  |     |   |               |                |
| 1  |       | 23/08/15 | JK  | Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan LS | 300.000.000   |                |
|    |       |          |     |   |               |                |
|    |       |          |     | Jumlah  | 300.000.000   |                |
|    |       |          |     | Saldo   | 300.000.000   |                |

Kuasa BUD

PPKD/BUD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–Kuasa BUD : Belanja/Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPKD : BPKAD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 5.1.6.03.01  
Nama Rekening : Belanja/Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |          | Ref | Uraian   | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|----------|-----|--|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal  |     |  |               |                |
| 1  |       | 27/09/15 | JK  | Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa LS | 50.000.000    |                |
|    |       |          |     |  |               |                |
|    |       |          |     | Jumlah   | 50.000.000    |                |
|    |       |          |     | Saldo  | 50.000.000    |                |

Kuasa BUD

PPKD/BUD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–Kuasa BUD : Belanja/Transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPKD : BPKAD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 5.1.7.03.00  
Nama Rekening : Belanja/Transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |         | Ref | Uraian  | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|---------|-----|---|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal |     |   |               |                |
| 1  |       | 1/11/15 | JK  | Transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa LS | 100.000.000   |                |
|    |       |         |     |   |               |                |
|    |       |         |     | Jumlah  | 100.000.000   |                |
|    |       |         |     | Saldo   | 100.000.000   |                |

Kuasa BUD

PPKD/BUD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–Kuasa BUD : Belanja Tak teduga sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPKD : BPKAD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 5.1.8.01.01  
Nama Rekening : Belanja Tak Terduga  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |         | Ref | Uraian                 | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|---------|-----|------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal |     |                        |               |                |
| 1  |       | 7/12/15 | JK  | Belanja Tak Terduga LS | 75.000.000    |                |
|    |       |         |     |                        |               |                |
|    |       |         |     | Jumlah                 | 75.000.000    |                |
|    |       |         |     | Saldo                  | 75.000.000    |                |

Kuasa BUD

PPKD/BUD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....



Contoh buku besar SKPKD–Kuasa BUD : Belanja Uang Lembur PNS sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPKD : BPKAD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 5.2.1.03.01  
Nama Rekening : Belanja Uang Lembur PNS  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD :

Halaman 01

| No | Bukti |         | Ref | Uraian                 | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|---------|-----|------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal |     |                        |               |                |
| 1  |       | 5/02/15 | JK  | Belanja Uang Lembur UP | 1.000.000     |                |
|    |       |         |     |                        |               |                |
|    |       |         |     | Jumlah                 | 1.000.000     |                |
|    |       |         |     | Saldo                  | 1.000.000     |                |

Kuasa BUD

PPKD/BUD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–Kuasa BUD : Belanja Uang Alat Tulis Kantor sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPKD : BPKAD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 5.2.2.01.01  
Nama Rekening : Belanja Alat Tulis Kantor  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD :

Halaman 01

| No | Bukti |         | Ref | Uraian                       | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|---------|-----|------------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal |     |                              |               |                |
| 1  |       | 5/02/15 | JK  | Belanja Alat Tulis Kantor UP | 5.000.000     |                |
|    |       |         |     |                              |               |                |
|    |       |         |     | Jumlah                       | 5.000.000     |                |
|    |       |         |     | Saldo                        | 5.000.000     |                |

Kuasa BUD

PPKD/BUD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–Kuasa BUD : Belanja Cetak sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

**KABUPATEN KUNINGAN**  
**BUKU BESAR**

**SKPKD** : BPKAD Kabupaten Kuningan  
**Kode Rekening** : 5.2.2.06.01  
**Nama Rekening** : Belanja Cetak  
**Pagu APBD** :  
**Pagu perubahan APBD** : **Halaman 01**

| No | Bukti |          | Ref | Uraian                        | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|----------|-----|-------------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal  |     |                               |               |                |
| 1  |       | 5/02/15  | JK  | Belanja Cetak UP              | 4.000.000     |                |
| 2  |       | 28/12/15 | JK  | Pengembalian Belanja Cetak UP |               | 4.000.000      |
|    |       |          |     |                               |               |                |
|    |       |          |     | Jumlah                        | 4.000.000     | 4000.000       |
|    |       |          |     | Saldo                         | -             | -              |

Kuasa BUD

PPKD/BUD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–Kuasa BUD : Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

**KABUPATEN KUNINGAN**  
**BUKU BESAR**

**SKPKD** : BPKAD Kabupaten Kuningan  
**Kode Rekening** : 5.2.3.03.10  
**Nama Rekening** : Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulans  
**Pagu APBD** :  
**Pagu perubahan APBD** : **Halaman 01**

| No | Bukti |          | Ref | Uraian  | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|----------|-----|---|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal  |     |   |               |                |
| 1  |       | 28/02/15 | JK  | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang LS | 250.000.000   |                |
|    |       |          |     |   |               |                |
|    |       |          |     | Jumlah  | 250.000.000   |                |
|    |       |          |     | Saldo   | 250.000.000   |                |

Kuasa BUD

PPKD/BUD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

**Langkah IV : Menyusun Neraca Saldo dan Laporan Keuangan**

Setelah melakukan posting seluruh pencatatan dalam buku besar maka kemudian Tenaga Akuntansi di Kuasa BUD membuat neraca saldo sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Penyusunan neraca saldo oleh Tenaga Akuntansi di Kuasa BUD dilakukan secara triwulanan. Neraca saldo disusun dengan cara memindahkan saldo-saldo yang ada di tiap buku besar ke dalam Neraca Saldo. Contoh Neraca Saldo dari hasil pencatatan dan posting contoh transaksi keuangan diatas adalah sebagai berikut :

**KABUPATEN KUNINGAN  
NERACA SALDO  
PER TANGGAL 31 Desember 2015**

| SKPKD         |   |   |    |    | : BPKAD  |               |               |
|---------------|---|---|----|----|--|---------------|---------------|
| Kode Rekening |   |   |    |    | Uraian   | Jumlah        |               |
|               |   |   |    |    |  | Debit         | Kredit        |
| 1             |   |   |    |    | 2  | 3             | 4             |
| 1             | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas di Kas Daerah  | 355.000.000   | -             |
| 3             | 1 | 1 | 01 | 01 | Ekuitas  | -             | 3.000.000.000 |
| 5             | 1 | 1 | 01 | 01 | Belanja Gaji Pokok   | 100.000.000   | -             |
| 5             | 1 | 1 | 01 | 02 | Belanja Tunjangan Keluarga   | 20.000.000    | -             |
| 5             | 1 | 1 | 01 | 04 | Belanja Tunjangan Fungsional                                       | 30.000.000    | -             |
| 5             | 1 | 1 | 01 | 05 | Belanja Tunjangan Daerah   | 10.000.000    | -             |
| 5             | 1 | 2 | 01 | 03 | Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank          | 200.000.000   | -             |
| 5             | 1 | 3 | 01 | 02 | Belanja Bunga Subsidi kepada Perusahaan                            | 500.000.000   | -             |
| 5             | 1 | 4 | 06 | 00 | Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan                | 1.000.000.000 | -             |
| 5             | 1 | 5 | 01 | 01 | Belanja Bantuan Sosial Organisasi Sosial Kemasyarakatan            | 300.000.000   | -             |
| 5             | 1 | 6 | 03 | 01 | Belanja/Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa  | 50.000.000    | -             |
| 5             | 1 | 7 | 03 | 01 | Belanja/Transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa         | 100.000.000   | -             |
| 5             | 1 | 8 | 01 | 01 | Belanja Tak Terduga  | 75.000.000    | -             |
| 5             | 2 | 1 | 03 | 01 | Belanja Uang Lembur PNS  | 1.000.000     | -             |
| 5             | 2 | 2 | 01 | 01 | Belanja Alat Tulis Kantor  | 5.000.000     | -             |
| 5             | 2 | 2 | 06 | 01 | Belanja Cetak  | 4.000.000     | -             |
| 5             | 2 | 3 | 03 | 10 | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulans | 250.000.000   | -             |
|               |   |   |    |    |  |               |               |
| Jumlah        |   |   |    |    |  | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 |

Kuasa BUD

PPKD/BUD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

## **SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI PENGELUARAN PEMBIAYAAN DI SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (SKPKD) – KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH**

Bagian ini menjelaskan Sistem dan Prosedur Akuntansi Pengeluaran Pembiayaan di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mencatat transaksi di kuasa bendahara umum daerah.

### **KEBIJAKAN UMUM**

Prosedur akuntansi pengeluaran pembiayaan pada SKPKD-Kuasa BUD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan transaksi realisasi pengeluaran pembiayaan SKPKD-PPKD dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Sistem dan prosedur akuntansi ini disusun berdasarkan kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

### **PIHAK-PIHAK TERKAIT**

Berbagai pihak/fungsi yang terkait dalam proses akuntansi di SKPKD beserta tugas-tugasnya adalah :

1. Bendahara Pengeluaran PPKD

Dalam pelaksanaan prosedur ini, Bendahara Pengeluaran PPKD memiliki tugas menerima dokumen-dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan akuntansi pengeluaran pembiayaan PPKD yang melalui Bendahara Pengeluaran PPKD dan menyiapkannya untuk kepentingan pencatatan oleh Kuasa BUD dan PPK-SKPKD. Pihak ini adalah pemberi dokumen kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD).

2. Pemerintah Lainnya

Pemerintah Lainnya adalah entitas pemerintah selain Pemerintah Kabupaten Kuningan yang menerima pembiayaan dari Pemerintah Kabupaten Kuningan seperti pemberian pinjaman atau sebaliknya pengembalian pinjaman dari Pemerintah Kabupaten Kuningan kepada Pemerintah Lainnya. Pihak ini adalah pemberi dokumen kepada BUD.

3. Pihak Lain

Pihak Lain adalah pihak yang menerima kas dari pengeluaran pembiayaan Pemerintah Kabupaten Kuningan misalnya Bank tempat menyimpan Dana Cadangan, Perusahaan Daerah yang kepemilikannya dibeli sebagian atau seluruhnya, Pihak ketiga yang menerima pinjaman atau menerima pembayaran utang dari Pemerintah Kabupaten Kuningan. Pihak ini adalah pemberi dokumen kepada Kuasa BUD.

4. Tenaga Akuntansi di Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD)

Dalam pelaksanaan prosedur ini, Tenaga Akuntansi di Kuasa BUD memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menerima kopi atau rangkap bukti-bukti transaksi pengeluaran pembiayaan SKPKD-PPKD dari Pengeluaran PPKD dan menganalisa data dan informasi akuntansi dari bukti transaksi tersebut;
- b. Mencatat transaksi-transaksi pengeluaran pembiayaan SKPKD-PPKD berdasarkan bukti-bukti transaksi ke buku jurnal;
- c. Memposting jurnal-jurnal terkait transaksi-transaksi pengeluaran pembiayaan SKPKD-PPKD ke dalam buku besarnya masing-masing;
- d. Menyusun neraca saldo untuk persiapan penyusunan laporan keuangan, yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas; dan
- e. Menyerahkan buku jurnal, buku besar dan neraca saldo kepada Kuasa BUD untuk diperiksa dan ditandatangani.

5. Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD)

Dalam pelaksanaan prosedur ini, Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Bertanggungjawab atas sistem akuntansi pengeluaran pembiayaan SKPKD-Kuasa BUD yang dipimpinnya;
- b. Memeriksa dan menandatangani hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Tenaga Akuntansi PPK-Kuasa BUD setiap bulannya seperti Buku Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo SKPKD-Kuasa BUD; dan
- c. Menyerahkan Buku Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo SKPD yang mencatat transaksi pendapatan SKPD dan SKPKD-PPKD di Kuasa BUD setiap triwulan kepada PPKD /BUD untuk disetujui.

6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Bendahara Umum Daerah (BUD) : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (tidak termasuk Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan).

Dalam pelaksanaan prosedur ini, PPKD/BUD memiliki tugas mengetahui dan menandatangani hasil pekerjaan Kuasa BUD setiap bulannya seperti Buku Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo SKPKD-Kuasa BUD setiap triwulan.

**DOKUMEN YANG DIGUNAKAN**

1. Nota Debit merupakan bukti transaksi pengeluaran uang di rekening kas umum daerah.
2. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut (SP2D) adalah dokumen yang digunakan sebagai pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.

## **BUKU DAN ATAU FORMULIR YANG DIGUNAKAN**

Buku dan atau formulir yang digunakan dalam pelaksanaan prosedur akuntansi pengeluaran pembiayaan di SKPKD-Kuasa BUD ini paling tidak terdiri dari :

1. Buku Jurnal Pengeluaran Kas (JK)

Merupakan buku jurnal yang digunakan untuk melakukan pencatatan akuntansi atas transaksi pengeluaran kas yang berasal dari pengeluaran pembiayaan di SKPKD-PPKD.

2. Buku Besar (BB)

Merupakan buku yang digunakan untuk menampung pencatatan hasil posting transaksi dari buku jurnal. Buku besar ini merupakan pencatatan akuntansi atas seluruh transaksi untuk suatu rekening/akun per jenis atau obyek. Jadi setiap rekening/akun per jenis atau objek mempunyai buku besar tersendiri.

3. Buku Besar Pembantu (BP)

Buku besar dapat dilengkapi dengan buku besar pembantu sebagai alat uji silang dan kelengkapan informasi rekening/akun tertentu. Buku besar pembantu berisi rincian akun (rincian obyek) yang telah dicatat dalam buku besar. Jika dirasakan informasi dalam buku besar sudah mencukupi maka buku besar pembantu tidak perlu dibuat lagi.

4. Neraca Saldo (NS)

Merupakan formulir yang mencatat nilai saldo setiap rekening/akun per rincian objek sehingga diketahui jumlah total dari seluruh rekening/akun.

## **KERANGKA SISTEM**

Tenaga Akuntansi di Kuasa BUD berdasarkan bukti-bukti transaksi pengeluaran pembiayaan dari Kuasa BUD yang diperoleh dari berbagai pihak seperti :

1. Bendahara Pengeluaran PPKD
2. Pemerintah Lain
3. Pihak Lain

Berdasarkan bukti transaksi keuangan dari para pihak tersebut maka Tenaga Akuntansi di Kuasa BUD kemudian melakukan pencatatan akuntansi pengeluaran pembiayaan Kuasa BUD dalam buku jurnal terkait. Jadi pencatatan akuntansi untuk setiap transaksi dilakukan pada saat terjadinya transaksi dan atau pada saat bukti transaksi tersebut diterima namun pengakuan transaksi tetap pada tanggal bukti transaksi.

Setelah seluruh transaksi dicatat dalam buku jurnal maka Tenaga Akuntansi di Kuasa BUD kemudian melakukan posting jurnal belanja SKPD dan belanja serta transfer SKPKD-PPKD dari buku jurnal ke buku besar. Setelah posting dari buku jurnal ke buku besar selesai dilakukan maka kemudian Tenaga Akuntansi di Kuasa BUD menyusun Neraca Saldo sebagai dasar pembuatan Laporan Keuangan untuk setiap triwulan yang diserahkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah triwulan berakhir kepada Kuasa BUD.

## **ALUR PROSEDUR TEKNIS**

Teknis pelaksanaan sistem dan prosedur akuntansi pengeluaran pembiayaan di SKPKD-Kuasa BUD ini adalah sebagai berikut :

### **Langkah I : Penerimaan Bukti Transaksi**

Tenaga Akuntansi SKPKD-Kuasa BUD yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menerima dokumen transaksi keuangan pengeluaran pembiayaan dari Kuasa BUD. Atas penerimaan bukti transaksi pengeluaran pembiayaan ini, Tenaga Akuntansi SKPKD-Kuasa BUD harus menganalisa hingga benar-benar meyakini informasi akuntansi dari bukti tersebut. Setelah digunakan sebagai dasar melakukan pencatatan akuntansi pengeluaran pembiayaan maka bukti transaksi tersebut harus disimpan dengan baik. Sebagai contoh : misalkan diketahui bahwa selama tahun 2022, telah terjadi transaksi yang terkait dengan pengeluaran pembiayaan di



SKPKD-PPKD yang juga dicatat oleh SKPKD-Kuasa BUD sebagai berikut (asumsi tanggal bukti transaksi sama dengan tanggal penerimaan bukti transaksi) :

- 10 Januari 2022 Tenaga akuntansi di Kuasa BUD menerima SP2D LS dari Kuasa BUD atas pengeluaran pembiayaan dana cadangan sebesar Rp 1.500.000.000,-
- 20 Januari 2022 Tenaga akuntansi di Kuasa BUD menerima SP2D LS dari Kuasa BUD atas pengeluaran pembiayaan penyertaan modal pada BUMD A sebesar Rp 500.000.000,-
- 10 Februari 2022 Tenaga akuntansi di Kuasa BUD menerima SP2D LS dari Kuasa BUD atas pengeluaran pemberian pinjaman pada BUMD C sebesar Rp 200.000.000,-
- 20 Februari 2022 Tenaga akuntansi di Kuasa BUD menerima SP2D LS dari Kuasa BUD atas pengeluaran pembiayaan pembentukan dana bergulir pada BLUD Dana Bergulir sebesar Rp 1.000.000.000,-
- 19 Agustus 2022 Tenaga akuntansi di Kuasa BUD menerima SP2D LS dan perjanjian utang dengan Bank atau berdasarkan tagihan cicilan pokok hutang pinjaman dari kreditur tersebut dari Kuasa BUD atas pembayaran pokok pinjaman sebesar Rp 250.000.000,-.

Contoh sederhana tersebut diatas diberikan sebagai bahan untuk mempermudah penjelasan sistem dan prosedur akuntansi pengeluaran pembiayaan di SKPKD-Kuasa BUD ini. Tetapi contoh tersebut diatas tidak menunjukkan semua bentuk transaksi yang secara nyata terjadi.

## **Langkah II : Menjurnal Transaksi Pengeluaran**

Berdasarkan bukti-bukti transaksi pengeluaran pembiayaan tersebut kemudian Tenaga Akuntansi di SKPKD-Kuasa BUD mencatat transaksi tersebut di buku jurnal. Pencatatan akuntansi dilakukan kedalam buku jurnal sesuai dengan jenis transaksi yang terjadi. Untuk pengeluaran kas dari pengeluaran pembiayaan di SKPKD-Kuasa BUD

maka dilakukan pencatatan dalam Buku Jurnal Pengeluaran Kas dengan melakukan jurnal, “Pengeluaran Pembiayaan sesuai dengan jenis sampai rincian obyeknya” di debit dan “Kas di Kas Daerah” di kredit, sebagai berikut :

|                             | Debit | Kredit |
|-----------------------------|-------|--------|
| Penerimaan Pembiayaan _____ | xxxx  |        |
| Kas di Kas Daerah           |       | xxxx   |

Transaksi pengeluaran kas dari Kas Daerah untuk **pembentukan Dana Cadangan**, dilakukan penjurnalan di buku jurnal pengeluaran kas sebagai berikut :

|                         | Debit | Kredit |
|-------------------------|-------|--------|
| Pengeluaran Pembiayaan  |       |        |
| Pencairan Dana Cadangan | xxxx  |        |
| Kas di Kas Daerah       |       | xxxx   |

Transaksi pengeluaran kas dari Kas Daerah untuk **pembayaran pokok pinjaman hutang daerah**, atas transaksi ini dilakukan penjurnalan di buku jurnal pengeluaran kas sebagai berikut :

|                             | Debit | Kredit |
|-----------------------------|-------|--------|
| Pengeluaran Pembiayaan      |       |        |
| Pokok Pinjaman kepada _____ | xxxx  |        |
| Kas di Kas Daerah           |       | xxxx   |

Transaksi pengeluaran kas dari Kas Daerah untuk **investasi daerah**, atas transaksi ini dilakukan penjurnalan di buku jurnal pengeluaran kas sebagai berikut :

|                               | Debit | Kredit |
|-------------------------------|-------|--------|
| Pengeluaran Pembiayaan        |       |        |
| Penyertaan Modal kepada _____ | xxxx  |        |
| Kas di Kas Daerah             |       | xxxx   |

Transaksi pengeluaran kas dari Kas Daerah untuk **pemberian pinjaman**, dilakukan penjurnalan di buku jurnal pengeluaran kas sebagai berikut :

|  | Debit        | Kredit       |
|--|--------------|--------------|
| <b>Pengeluaran Pembiayaan</b>          |              |              |
| <b>Pemberian pinjaman kepada _____</b> | <b>xxxxx</b> |              |
| <b>Kas di Kas Daerah</b>               |              | <b>xxxxx</b> |

Transaksi pengeluaran kas dari Kas Daerah untuk **pembentukan investasi jangka panjang non permanen**, dilakukan penjurnalan di buku jurnal pengeluaran kas sebagai berikut :

|                               | Debit        | Kredit       |
|-------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Pengeluaran Pembiayaan</b> |              |              |
| <b>Pembentukan Inv jk Pjg</b> |              |              |
| <b>Non Permanen_____</b>      | <b>xxxxx</b> |              |
| <b>Kas di Kas Daerah</b>      |              | <b>xxxxx</b> |

Catatan : Kode dan nama rekening/akun pengeluaran pembiayaan (dalam contoh ditulis penerimaan pembiayaan\_\_\_\_\_) disesuaikan dengan kode dan nama rekening/akun, sampai rincian obyek, sesuai dengan realisasi pengeluaran pembiayaan yang dikeluarkan.

Berdasarkan uraian penjurnalan dan contoh transaksi tersebut diatas maka Tenaga Akuntansi di Kuasa BUD melakukan pencatatan dalam buku jurnal pengeluaran kas dengan jurnal sebagai berikut :

**Pertama,** berdasarkan SP2D LS pengeluaran pembiayaan dana cadangan sebesar Rp 1.500.000.000, maka tenaga akuntansi Kuasa BUD akan mencatat :

|                 |             |                        | Debit         | Kredit        |
|-----------------|-------------|------------------------|---------------|---------------|
| 10 Januari 2022 | 6.2.1.01.01 | Pengeluaran Pembiayaan | 1.500.000.000 |               |
|                 |             | Pembentukan Dana       |               |               |
|                 |             | Cadangan               |               |               |
|                 | 1.1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah      |               | 1.500.000.000 |

**Kedua,** berdasarkan SP2D LS pengeluaran pembiayaan penyertaan modal pada BUMD A sebesar Rp 500.000.000,-, maka tenaga akuntansi Kuasa BUD akan mencatat :

|                 |             |   | Debit       | Kredit      |
|-----------------|-------------|---|-------------|-------------|
| 20 Januari 2022 | 6.2.2.01.00 | Pengeluaran Pembiayaan<br>Penyertaan Modal Pemda<br>kepada BUMD | 500.000.000 |             |
|                 | 1.1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah   |             | 500.000.000 |

**Ketiga,** berdasarkan SP2D LS pengeluaran pemberian pinjaman pada BUMD C sebesar Rp 200.000.000,-, maka tenaga akuntansi Kuasa BUD akan mencatat :

|                  |             |   | Debit       | Kredit      |
|------------------|-------------|---|-------------|-------------|
| 10 Februari 2022 | 6.2.4.03.01 | Pengeluaran Pembiayaan<br>Pemberian Pinjaman<br>kepada BUMD | 200.000.000 |             |
|                  | 1.1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah   |             | 200.000.000 |

**Keempat,** berdasarkan SP2D LS pengeluaran pembiayaan pembentukan dana bergulir pada BLUD Dana Bergulir sebesar Rp 1.000.000.000,-, maka tenaga akuntansi Kuasa BUD akan mencatat :

|                 |             |  | Debit         | Kredit        |
|-----------------|-------------|--|---------------|---------------|
| 20 Febuari 2022 | 6.2.6.01.01 | Pengeluaran Pembiayaan<br>Pembentukan Dana<br>Bergulir | 1.000.000.000 |               |
|                 | 1.1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah                                      |               | 1.000.000.000 |

**Kelima,** berdasarkan SP2D LS dan perjanjian utang dengan Bank atau berdasarkan tagihan cicilan pokok hutang pinjaman dari kreditur tersebut dicatat pembayaran pokok pinjaman sebesar Rp 250.000.000,-, maka tenaga akuntansi Kuasa BUD akan mencatat :

|                 |             |  | Debit       | Kredit      |
|-----------------|-------------|--|-------------|-------------|
| 19 Agustus 2022 | 6.2.3.03.00 | Pengeluaran<br>Pembiayaan<br>Pembayaran Pokok<br>Utang yang Jatuh<br>Tempo kepada Lembaga<br>Keuangan Bank | 250.000.000 |             |
|                 | 1.1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah  |             | 250.000.000 |

Bentuk dan Cara Pengisian Buku Jurnal

Berdasarkan contoh jurnal tersebut diatas maka dilakukan pencatatan dalam buku jurnal pengeluaran kas untuk transaksi berbasis kas yang nantinya digunakan untuk menyusun LRA dan LAK sebagai berikut :

KABUPATEN KUNINGAN
BUKU JURNAL PENGELUARAN KAS (JK)

SKPKD : .....( SKPKD Kabupaten Kuningan)

Halaman 01

| Tanggal   | Nomor            |            | Kode Rekening |   |   |    |    | Uraian  | Ref . | Debit (Rp)    | Kredit (Rp)   |
|-----------|------------------|------------|---------------|---|---|----|----|---|-------|---------------|---------------|
|           | Bukti Penerimaan | Bukti Lain |               |   |   |    |    |   |       |               |               |
| 1         | 2                |            | 3             |   |   |    |    | 4   | 5     | 6             | 7             |
| 10/1/2022 | -                | -          | 6             | 2 | 1 | 01 | 01 | Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan  | -     | 1.500.000.000 | -             |
|           |                  |            | 1             | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas Di Kas Daerah   | -     | -             | 1.500.000.000 |
| 20/1/2022 | -                | -          | 6             | 2 | 2 | 01 | 01 | Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Pemda Modal kepada BUMD                                   | -     | 500.000.000   | -             |
|           |                  |            | 1             | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas di Kas Daerah   | -     | -             | 500.000.000   |
| 10/2/2022 |                  |            | 6             | 2 | 4 | 03 | 01 | Pengeluaran Pembiayaan Pemberian Pinjaman kepada BUMD                                       |       | 200.000.000   | -             |
|           |                  |            | 1             | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas di Kas Daerah   |       | -             | 200.000.000   |
| 20/2/2022 |                  |            | 6             | 2 | 6 | 01 | 01 | Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Bergulir  |       | 1.000.000.000 | -             |
|           |                  |            | 1             | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas di Kas Daerah   |       | -             | 1.000.000.000 |
| 19/8/2022 |                  |            | 6             | 2 | 3 | 03 | 00 | Pengeluaran Pembiayaan Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Lembaga Keuangan Bank |       | 250.000.000   | -             |
|           |                  |            | 1             | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas di Kas Daerah   |       | -             | 250.000.000   |
| Jumlah    |                  |            |               |   |   |    |    |   |       | 3.450.000.000 | 3.450.000.000 |

Kuasa-BUD PPKD/BUD

(tanda tangan) (tanda tangan)
(nama lengkap) (nama lengkap)

NIP..... NIP.....

**Langkah III : Melakukan Posting ke Buku Besar**

Setelah melakukan penjurnalan seluruh transaksi, maka Tenaga Akuntansi Kuasa BUD melakukan posting atas pencatatan jurnal tersebut ke buku besar. Posting ini berguna agar seluruh transaksi yang sama-sama mempengaruhi suatu kode rekening/akun dapat dikelompokkan dalam satu buku besar untuk kode rekening/akun yang bersangkutan. Periode posting harus semakin diusahakan dapat dilakukan dalam waktu yang semakin singkat misalkan untuk periode mingguan atau bahkan harian.

Contoh buku besar SKPKD–Kuasa BUD : Kas di Kas Daerah sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

**KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR**

**SKPKD**  
**Kode Rekening**  
**Nama Rekening**  
**Pagu APBD**  
**Pagu perubahan APBD**

: BPKAD Kabupaten Kuningan  
: 1.1.1.01.01  
: Kas di Kas Daerah  
:  
:

Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian   | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|--|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |  |               |                |
| 1  |       | 10/01/2022 | JU  | Pengeluaran Pembiayaan<br>Pembentukan Dana Cadangan  | -             | 1.500.000.000  |
| 2  |       | 20/01/2022 | JU  | Pengeluaran Pembiayaan<br>Penyertaan Pemda Modal kepada<br>BUMD                                      | -             | 500.000.000    |
| 3  |       | 10/02/2022 | JU  | Pengeluaran Pembiayaan<br>Pemberian Pinjaman kepada<br>BUMD n  | -             | 200.000.000    |
| 4  |       | 20/02/2022 | JU  | Pengeluaran Pembiayaan<br>Pembentukan Dana Bergulir  | -             | 1.000.000.000  |
| 5  |       | 9/08/2022  | JU  | Pengeluaran Pembiayaan<br>Pembayaran Pokok Utang yang<br>Jatuh Tempo kepada Lembaga<br>Keuangan Bank | -             | 250.000.000    |
|    |       |            |     |  |               |                |
|    |       |            |     | Jumlah   | -             | 3.450.000.000  |
|    |       |            |     | Saldo  | -             | 3.450.000.000  |

Kuasa BUD

PPKD/BUD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–Kuasa BUD : Pengeluaran Pembiayaan Dana Cadangan sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

**KABUPATEN KUNINGAN**  
**BUKU BESAR**

**SKPKD** : BPKAD Kabupaten Kuningan  
**Kode Rekening** : 6.2.1.01.01  
**Nama Rekening** : Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan  
**Pagu APBD** :  
**Pagu perubahan APBD** :

Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian            | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|-------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |                   |               |                |
| 1  |       | 10/01/2022 | JU  | Kas di Kas Daerah | 1.500.000.000 | -              |
|    |       |            |     |                   |               |                |
|    |       |            |     | Jumlah            | 1.500.000.000 | -              |
|    |       |            |     | Saldo             | 1.500.000.000 | -              |

Kuasa BUD

PPKD/BUD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–Kuasa BUD : Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Pemda kepada BUMD sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya:

**KABUPATEN KUNINGAN**  
**BUKU BESAR**

**SKPKD** : BPKAD Kabupaten Kuningan  
**Kode Rekening** : 6.2.2.02.01  
**Nama Rekening** : Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Pemda kepada BUMD  
**Pagu APBD** :  
**Pagu perubahan APBD** :

Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian            | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|-------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |                   |               |                |
| 1  |       | 20/01/2022 | JU  | Kas di Kas Daerah | 500.000.000   | -              |
|    |       |            |     |                   |               |                |
|    |       |            |     | Jumlah            | 500.000.000   | -              |
|    |       |            |     | Saldo             | 500.000.000   | -              |

Kuasa BUD

PPKD/BUD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–Kuasa BUD : Pengeluaran Pembiayaan Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Lembaga Keuangan Bank sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPKD : BPKAD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 6.2.3.03.00  
Nama Rekening : Pengeluaran Pembiayaan Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Lembaga Keuangan Bank  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian            | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|-------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |                   |               |                |
| 1  |       | 19/08/2022 | JU  | Kas di Kas Daerah | 250.000.000   | -              |
|    |       |            |     |                   |               |                |
|    |       |            |     | Jumlah            | 250.000.000   | -              |
|    |       |            |     | Saldo             | 250.000.000   | -              |

Kuasa BUD  
  
(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

PPKD/BUD  
  
(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–Kuasa BUD : Pengeluaran Pembiayaan Pemberian Pinjaman kepada BUMD sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPKD : BPKAD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 6.2.4.03.01  
Nama Rekening : Pengeluaran Pembiayaan Pemberian Pinjaman kepada BUMD  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian            | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|-------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |                   |               |                |
| 1  |       | 10/02/2022 | JU  | Kas di Kas Daerah | 200.000.000   | -              |
|    |       |            |     |                   |               |                |
|    |       |            |     | Jumlah            | 200.000.000   | -              |
|    |       |            |     | Saldo             | 200.000.000   | -              |

Kuasa BUD  
  
(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

PPKD/BUD  
  
(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....



Contoh buku besar SKPKD–Kuasa BUD : Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Bergulir sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya:

**KABUPATEN KUNINGAN**  
**BUKU BESAR**

**SKPKD** : BPKAD Kabupaten Kuningan  
**Kode Rekening** : 6.2.6.01.01  
**Nama Rekening** : Pengeluaran Pembiayaan Pembantuan Dana Bergulir  
**Pagu APBD** :  
**Pagu perubahan APBD** : **Halaman 01**

| No | Bukti |            | Ref | Uraian            | Debet<br>(Rp)        | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|-------------------|----------------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |                   |                      |                |
| 1  |       | 19/08/2022 | JU  | Kas di Kas Daerah | 1.000.000.000        | -              |
|    |       |            |     |                   |                      |                |
|    |       |            |     | <b>Jumlah</b>     | <b>1.000.000.000</b> | -              |
|    |       |            |     | <b>Saldo</b>      | <b>1.000.000.000</b> | -              |

Kuasa BUD

PPKD/BUD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

**Langkah IV : Menyusun Neraca Saldo dan Laporan Keuangan**

Setelah melakukan posting seluruh pencatatan dalam buku besar maka kemudian Tenaga Akuntansi di Kuasa BUD membuat neraca saldo sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Penyusunan neraca saldo oleh Tenaga Akuntansi di Kuasa BUD dilakukan secara triwulanan. Neraca saldo disusun dengan cara memindahkan saldo-saldo yang ada di tiap buku besar ke dalam Neraca Saldo. Contoh Neraca Saldo dari hasil pencatatan dan posting contoh transaksi keuangan diatas adalah sebagai berikut :

KABUPATEN KUNINGAN  
NERACA SALDO  
PER TANGGAL 31 Desember 2022

SKPKD : BPKAD

| Kode Rekening |   |   |    |    | Uraian  | Jumlah        |               |
|---------------|---|---|----|----|---|---------------|---------------|
|               |   |   |    |    |   | Debit         | Kredit        |
| 1             |   |   |    |    | 2   | 3             | 4             |
| 1             | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas di Kas Daerah   | -             | 3.450.000.000 |
| 6             | 2 | 1 | 01 | 01 | Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan  | 1.500.000.000 | -             |
| 6             | 2 | 2 | 02 | 01 | Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Pemda kepada BUMD                                   | 500.000.000   | -             |
| 6             | 2 | 3 | 03 | 00 | Pengeluaran Pembiayaan Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Lembaga Keuangan Bank | 250.000.000   | -             |
| 6             | 2 | 4 | 03 | 01 | Pengeluaran Pembiayaan Pemberian Pinjaman kepada BUMD                                       | 200.000.000   | -             |
| 6             | 2 | 6 | 01 | 01 | Pengeluaran Pembiayaan Pembantuan Dana Bergulir   | 1.000.000.000 | -             |
|               |   |   |    |    |   |               |               |
|               |   |   |    |    |   |               |               |
| Jumlah        |   |   |    |    |   | 3.450.000.000 | 3.450.000.000 |

Kuasa BUD

PPKD/BUD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

## **SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI KOREKSI DI SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (SKPKD-PPKD)**

Bagian ini menjelaskan Sistem dan Prosedur Akuntansi Koreksi di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mencatat transaksi di kuasa bendahara umum daerah.

### **KEBIJAKAN UMUM**

Prosedur akuntansi koreksi pada SKPKD-Kuasa BUD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian koreksi yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Transaksi-transaksi atau pencatatan akuntansi ini meliputi koreksi atas kesalahan pencatatan.

Koreksi ini termasuk di SKPKD-Kuasa BUD merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar rekening/akun yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan merupakan penyajian rekening/akun yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Sehingga koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan penyajian dalam suatu rekening/akun. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Prosedur akuntansi atas transaksi koreksi dan penyesuaian ini harus dapat dijalankan dengan baik dan benar agar laporan keuangan dapat disajikan dengan benar. Kesalahan dalam melaksanakan prosedur akuntansi koreksi dan penyesuaian ini akan mengakibatkan laporan keuangan yang disajikan tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Sistem dan prosedur akuntansi ini disusun berdasarkan

kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

### **PIHAK-PIHAK TERKAIT**

Berbagai pihak/fungsi yang terkait dalam proses akuntansi koreksi SKPKD-Kuasa BUD beserta tugas-tugasnya adalah :

1. Bendahara di SKPD

Dalam pelaksanaan prosedur ini, Bendahara SKPD baik bendahara penerimaan maupun pengeluaran memiliki tugas menyiapkan dokumen-dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan akuntansi koreksi di SKPD kepada Kuasa BUD seperti STS, SP2D dan Laporan Pertanggungjawaban Fungsional.

2. Pemerintah Lain

- a. Pemerintah Lain adalah entitas pemerintah yang lebih tinggi kedudukannya daripada Pemerintah Daerah/Kabupaten yang memberikan informasi koreksi atas dana transfer seperti Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
- b. Pemerintah Lainnya adalah entitas pemerintah selain Pemerintah Kabupaten Kuningan yang menjadi obyek pembiayaan Pemerintah Kabupaten Kuningan yang memberikan informasi koreksi atas pemberian pinjaman kepada pemerintah lain tersebut termasuk pengembaliannya.
- c. Pemerintah Lainnya adalah entitas pemerintah yang memberikan informasi koreksi atas penerimaan transfer dari Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Kuningan seperti dana bantuan keuangan kepada Pemerintah lainnya.
- d. Pemerintah Lainnya adalah entitas pemerintah selain Pemerintah Kabupaten Kuningan yang memberikan informasi koreksi atas pemberian pembiayaan kepada Pemerintah Kabupaten Kuningan seperti pemberian utang/pinjaman dan pengembalian utang/pinjaman tersebut.

Pihak-pihak ini adalah pemberi dokumen kepada Kuasa BUD.

3. Pihak Lain

Pihak Lainnya adalah pihak yang memberikan dokumen sumber pendapatan SKPKD-PPKD kepada Kuasa BUD yaitu :

- a. Pihak diluar Bendahara Penerimaan PPKD, Wajib Pajak/Retribusi dan Pemerintah Lainnya seperti Masyarakat atau Pihak Ketiga yang memberikan informasi koreksi pendapatan SKPKD-PPKD kepada Pemerintah Kabupaten Kuningan misalnya sumbangan/donasi.
- b. Pihak yang memberikan informasi koreksi yang menjadi obyek pembiayaan Pemerintah Kabupaten Kuningan misalnya Bank tempat menyimpan Dana Cadangan, Perusahaan Daerah yang diberi modalnya oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan, Pihak ketiga yang diberikan pinjaman atau diberikan modal investasi non permanen lainnya.
- c. Pihak diluar Bendahara Pengeluaran PPKD dan Pemerintah Lainnya yang memberikan informasi koreksi atas penerimaan transfer dari Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Kuningan seperti BUMN, BUMD, Masyarakat.
- d. Pihak yang memberikan pembiayaan kepada Pemerintah Kabupaten Kuningan misalnya Bank/Lembaga Keuangan/Obligator yang memberikan informasi koreksi atas pinjaman kepada Pemerintah Kabupaten Kuningan.

4. Bendahara Penerimaan PPKD

Dalam pelaksanaan prosedur ini, Bendahara Penerimaan PPKD memiliki tugas menerima dokumen-dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses koreksi pendapatan dan penerimaan pembiayaan atas pelepasan aset/penerimaan utang SKPKD dari Kuasa BUD dan menyiapkannya untuk kepentingan pencatatan PPK-SKPKD.

5. Bendahara Pengeluaran PPKD

Dalam pelaksanaan prosedur ini, Bendahara Pengeluaran PPKD memiliki tugas menerima dokumen-dokumen atas transaksi yang

terkait dengan proses koreksi akuntansi belanja dan pengeluaran pembiayaan atas perolehan aset/pelunasan utang SKPKD dari Kuasa BUD dan menyiapkannya untuk kepentingan pencatatan PPK-SKPKD.

6. Tenaga Akuntansi di Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD)

Dalam pelaksanaan prosedur ini, Tenaga Akuntansi di Kuasa BUD memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menerima kopi atau rangkap bukti-bukti transaksi terkait koreksi akuntansi dari Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran baik SKPD maupun PPKD dan menganalisa data dan informasi koreksi akuntansi dari bukti transaksi tersebut;
- b. Mencatat transaksi-transaksi pemerintah daerah berdasarkan bukti-bukti transaksi terkait koreksi ke buku jurnal;
- c. Memposting jurnal-jurnal terkait transaksi-transaksi terkait koreksi pemerintah daerah ke dalam buku besarnya masing-masing;
- d. Menyusun neraca saldo untuk persiapan penyusunan laporan keuangan, yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas; dan
- e. Menyerahkan buku jurnal, buku besar dan neraca saldo kepada Kuasa BUD untuk diperiksa dan ditandatangani.

7. Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD)

Dalam pelaksanaan prosedur ini, Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Bertanggungjawab atas sistem akuntansi pendapatan SKPKD-Kuasa BUD yang dipimpinnya;
- b. Menyiapkan dokumen-dokumen untuk koreksi atas transaksi dengan pemerintah lain dan atau pihak lain yang terkait dengan proses pelaksanaan akuntansi SKPKD-Kuasa BUD. Nota Kredit beserta Kopi atau rangkap Dokumen Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan terkait koreksi akan diserahkan kepada Bendahara Penerimaan SKPD dan PPKD serta Tenaga

Akuntansi Kuasa BUD. Nota Debet beserta Kopi atau rangkap Dokumen Belanja, Transfer dan Pengeluaran Pembiayaan terkait koreksi akan diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran SKPD dan PPKD serta Tenaga Akuntansi Kuasa BUD.

- c. Melaksanakan perintah PPKD untuk melakukan rekonsiliasi keuangan daerah dengan menganalisa laporan pertanggungjawaban fungsional dari seluruh Bendahara SKPD dan seluruh Bendahara PPKD. Hasil perbedaan data dari rekonsiliasi keuangan daerah tersebut menjadi bahan untuk akuntansi koreksi;
  - d. Memeriksa dan menandatangani hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Tenaga Akuntansi di Kuasa BUD setiap bulannya seperti Buku Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo SKPKD-Kuasa BUD; dan
  - e. Menyerahkan Buku Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo SKPD yang mencatat transaksi pendapatan SKPD dan SKPKD-PPKD di Kuasa BUD setiap triwulan kepada PPKD/BUD untuk disetujui.
8. Pengguna Anggaran/Kepala SKPD : Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, Kepala Satuan, Camat, Lurah, Asisten Administrasi, Sekretaris DPRD, dan Direktur.

Dalam pelaksanaan prosedur ini, Pengguna Anggaran memiliki tugas membantu rekonsiliasi keuangan daerah dengan menyerahkan laporan pertanggungjawaban pendapatan fungsional Kuasa Bendahara Umum Daerah. Hasil perbedaan data dari rekonsiliasi keuangan daerah tersebut menjadi bahan untuk akuntansi koreksi.

9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Bendahara Umum Daerah (BUD) : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (tidak termasuk Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan).

Dalam pelaksanaan prosedur ini, PPKD/BUD memiliki tugas :

- a. Mengetahui dan menandatangani hasil pekerjaan Kuasa BUD setiap bulannya seperti Buku Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo SKPKD-Kuasa BUD setiap triwulan; dan
- b. Meminta Kuasa BUD melakukan rekonsiliasi keuangan daerah dengan menganalisa laporan pertanggungjawaban fungsional yang diterima dari seluruh Bendahara SKPD dan PPKD.

### **DOKUMEN YANG DIGUNAKAN**

1. Bukti transfer merupakan slip bukti melakukan transfer dari suatu rekening ke rekening lainnya apabila ada koreksi;
2. Nota Kredit merupakan bukti transaksi penerimaan uang di rekening kas umum daerah apabila ada koreksi;
3. Nota Debit merupakan bukti transaksi pengeluaran uang di rekening kas umum daerah apabila ada koreksi;
4. Surat Tanda Setoran selanjutnya disebut STS adalah bukti yang dibuat untuk melakukan penyetoran uang ke Kas Daerah apabila ada koreksi;
5. Kuitansi Pembayaran, adalah dokumen yang menunjukkan informasi koreksi atas pembayaran barang dan/atau jasa dari mekanisme UP/GU/TU;
6. Bukti tambahan pengakuan koreksi pendapatan PPKD seperti :
  - a. Peraturan Presiden tentang Dana Alokasi Umum;
  - b. Peraturan Menteri Keuangan tentang Bagi Hasil Pajak; Bagi Hasil Bukan Pajak; Dana Alokasi Khusus; dan Dana Darurat; dan
  - c. Keputusan Kepala Daerah tentang Pendapatan Bagi Hasil Pajak; Bantuan Keuangan; Hibah; Dana Darurat dari Pemerintah Provinsi
7. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang selanjutnya disebut (SP2D) adalah Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan Kuasa Bendahara Umum Daerah



berdasarkan SPM apabila ada koreksi;

8. Bukti tambahan pengakuan koreksi Belanja PPKD seperti Keputusan Kepala Daerah tentang Belanja Subsidi; Belanja Bantuan Sosial; dan Belanja Tak Terduga;
9. Bukti tambahan pengakuan koreksi Transfer PPKD seperti Keputusan Kepala Daerah tentang Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.
10. Bukti tambahan pengakuan koreksi Investasi PPKD seperti:
  - a. Sertifikat Saham untuk pengakuan investasi saham;
  - b. Sertifikat Deposito untuk pengakuan investasi dalam Deposito;
  - c. Sertifikat Obligasi/SUN untuk pengakuan investasi dalam Sertifikat Obligasi/SUN;
  - d. Sertifikat SBI untuk pengakuan investasi dalam Sertifikat SBI;
11. Bukti tambahan pengakuan koreksi Aset Lainnya PPKD seperti :
  - a. Kontrak/Perjanjian Penjualan secara Angsuran/Berita Acara Penjualan untuk pengakuan Tagihan Penjualan Angsuran: Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Kepada Kepala Daerah dan Penjualan Rumah Golongan III;
  - b. Keputusan Pembebanan untuk Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
  - c. Kontrak/Perjanjian – Sewa untuk pengakuan Sewa;
  - d. Kontrak/Perjanjian Kerjasama – Pemanfaatan untuk pengakuan Kerjasama Pemanfaatan;
  - e. Kontrak/Perjanjian Kerjasama – BOT/BTO untuk pengakuan Bangun Guna Serah (BOT)/ Bangun Serah Guna (BTO); dan
  - f. Peraturan Kepala Daerah terkait *Restricted Cash*.
12. Bukti tambahan pengakuan koreksi Kewajiban PPKD seperti :
  - a. Surat Perjanjian Hutang/Surat Tagihan Hutang untuk

- pengakuan Utang Bunga;
- b. Surat Perjanjian Sewa Aset Pemda dan Bukti Memorial untuk Pendapatan Diterima Dimuka;
  - c. Keputusan Kepala Daerah tentang Belanja Subsidi; Belanja Bantuan Sosial; dan Belanja Tak Terduga; dan
  - d. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NHPD) dan Keputusan Kepala Daerah tentang Belanja Hibah.
13. Bukti penerimaan lain yang sah seperti Slip Setoran Bank, Slip Transfer Bank, Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD), dan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP); dan
  14. Bukti Memorial adalah bukti transaksi yang digunakan untuk mencatat transaksi non keuangan apabila ada koreksi khususnya yang berdasarkan hasil rekonsiliasi keuangan daerah;

#### **BUKU DAN ATAU FORMULIR YANG DIGUNAKAN**

Buku dan atau formulir yang digunakan dalam pelaksanaan prosedur akuntansi koreksi di SKPKD-Kuasa BUD terdiri dari :

1. Buku Jurnal Koreksi (Jk)  
  
Merupakan buku jurnal yang digunakan untuk melakukan pencatatan akuntansi atas koreksi dari transaksi-transaksi yang sudah pernah dilakukan sebelumnya.
2. Buku Besar (BB)  
  
Merupakan buku yang digunakan untuk menampung pencatatan hasil posting transaksi koreksi dari buku jurnal. Buku besar ini merupakan pencatatan akuntansi atas seluruh transaksi untuk suatu rekening/akun per jenis atau obyek. Jadi setiap rekening/akun per jenis atau objek mempunyai buku besar tersendiri.
3. Buku Besar Pembantu (BP)  
  
Buku besar dapat dilengkapi dengan buku besar pembantu sebagai alat uji silang dan kelengkapan informasi rekening/akun

tertentu. Buku besar pembantu berisi rincian akun (rincian obyek) yang telah dicatat dalam buku besar. Jika dirasakan informasi dalam buku besar sudah mencukupi maka buku besar pembantu tidak perlu dibuat lagi.

4. Neraca Saldo (NS)

Merupakan formulir yang mencatat nilai saldo setiap rekening/akun per rincian objek sehingga diketahui jumlah total dari seluruh rekening/akun.

### **KERANGKA SISTEM**

Tenaga Akuntansi di Kuasa BUD diharuskan melakukan pengecekan atas penjurnalan dan posting yang telah dilakukan. Selain dari pengecekan tersebut, bisa juga diperoleh informasi kesalahan dari hasil rekonsiliasi data keuangan daerah. Jika dari hasil pengecekan dan hasil rekonsiliasi keuangan daerah tersebut :

1. Terdapat transaksi kesalahan tidak berulang (kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi lagi) yang mana :
  - a. Kesalahan yang terjadi pada periode berjalan

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun Belanja.
  - b. Kesalahan yang terjadi pada periode sebelumnya yang meliputi :
    - i. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun Belanja;
    - ii. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga

mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun belanja tak terduga;

- iii. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset yang bersangkutan
  - iv. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun pendapatan lain-lain-LRA jika menambah kas dan pembetulan pada akun belanja tak terduga jika mengurangi kas;
  - v. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun pembiayaan.
2. Terdapat kesalahan berulang dan sistemik (kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang) maka kesalahan ini dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengakui belanja tak terduga untuk LRA dan dicatat pada saat terjadi penerimaan

kas untuk mengembalikan kelebihan belanja dengan mengakui pendapatan lain-lain untuk LRA;

Pada saat hal tersebut diatas diketahui maka dibuatkan bukti memorialnya oleh Tenaga Akuntansi di Kuasa BUD untuk dilakukan penjurnalan dalam Buku Jurnal Koreksi. Setelah seluruh transaksi koreksi dicatat dalam buku jurnal maka Tenaga Akuntansi di Kuasa BUD kemudian melakukan posting jurnal pendapatan SKPD dan SKPKD-PPKD dari buku jurnal ke buku besar. Setelah posting dari buku jurnal ke buku besar selesai dilakukan maka kemudian Tenaga Akuntansi di Kuasa BUD menyusun Neraca Saldo sebagai dasar pembuatan Laporan Keuangan untuk setiap triwulan yang diserahkan paling lambat **1 (satu) bulan setelah triwulan berakhir kepada Kuasa BUD.**

## **ALUR PROSEDUR TEKNIS**

Teknis pelaksanaan sistem dan prosedur akuntansi koreksi di SKPKD-Kuasa BUD ini adalah sebagai berikut :

### **Langkah I : Penerimaan Bukti Transaksi**

Tenaga Akuntansi di Kuasa BUD berdasarkan bukti transaksi koreksi membuat bukti memorial. Bukti transaksi koreksi yang dapat digunakan sebagai pendukung penyusunan bukti memorial adalah :

1. Dokumen pada transaksi kesalahan tidak berulang (kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi lagi) yang mana :

- a. Kesalahan yang terjadi pada periode berjalan

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun Belanja. Dokumen pengakuan koreksi yang dapat digunakan adalah Nota Kredit, SP2D LS atau bukti pendukung koreksi lainnya.

- b. Kesalahan yang terjadi pada periode sebelumnya yang meliputi :
- i. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan. Dokumen pengakuan koreksi yang dapat digunakan adalah Nota Kredit, SP2D LS atau bukti pendukung koreksi lainnya;
  - ii. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan. Dokumen pengakuan koreksi yang dapat digunakan adalah Nota Kredit atau bukti pendukung koreksi lainnya;
  - iii. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan. Dokumen pengakuan koreksi yang dapat digunakan adalah Nota Kredit, SP2D LS atau bukti pendukung koreksi lainnya;
  - iv. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan. Dokumen pengakuan koreksi yang dapat digunakan adalah Nota Kredit, SP2D LS atau bukti pendukung koreksi lainnya;
  - v. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan

periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih. Dokumen pengakuan koreksi yang dapat digunakan adalah Nota Kredit, SP2D LS atau bukti pendukung koreksi lainnya;

2. Dokumen pada kesalahan berulang dan sistemik (kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang). Dokumen pengakuan koreksi yang dapat digunakan adalah Nota Kredit, SP2D LS atau bukti pendukung koreksi lainnya seperti surat ketetapan pendapatan;

Berdasarkan perolehan bukti-bukti transaksi tersebut maka Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD membuat bukti memorial. Bentuk formulir atau format dari Bukti memorial dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan atau oleh masing-masing SKPKD sebagai contoh :

| <b>PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN</b><br><b>Bukti Memorial</b>  |   |   |                               |
|--|---|---|-------------------------------|
| Satuan Kerja   | : | SKPKD Kabupaten Kuningan  |                               |
| Keterangan Transaksi   | : | Koreksi kesalahan pencatatan penerimaan DAU yang seharusnya DAK senilai Rp 10.000.000.000,- |                               |
| Tanggal bukti transaksi  | : | 24 Agustus 2022   |                               |
| Nomor Bukti Transaksi  | : | xx.xx.x.xx.xx Tahun xxxx  |                               |
| Nama Bukti Transaksi   | : | Peraturan Menteri Keuangan tentang DAK  |                               |
| <b>Kode Rekening/Akun</b>                                      |   | <b>Uraian</b>   | <b>Debet</b><br><b>Kredit</b> |
|  |   | Jurnal sebelumnya :   |                               |
| 1.1.1.01.01  |   | Kas di Kas Daerah   | 10.000.000.000 -              |
| 4.2.2.01.01  |   | Dana Alokasi Umum   | - 10.000.000.000              |
|  |   |   |                               |
|  |   | Jurnal koreksi :  |                               |
| 4.2.2.01.01  |   | Dana Alokasi Umum   | 10.000.000.000 -              |
| 4.2.3.01.00  |   | Dana Alokasi Khusus   | - 10.000.000.000              |
| Kuasa BUD<br><br>(tanda tangan)<br>(nama lengkap)<br>NIP ..... |   | PPKD/BUD<br><br>(tanda tangan)<br>(nama lengkap)<br>NIP .....                               |                               |

Pada bagian ini akan diberikan beberapa contoh jurnal terkait dengan transaksi koreksi di SKPD yang harus dicatat di SKPKD-Kuasa BUD, yaitu sebagai berikut :

- |             |  |
|-------------|--|
| 1 Des 2022  | Ditemukan kesalahan penyetoran retribusi penyewaan ruangan ke SKPD Pemda A yang seharusnya ke SKPD Pemda B senilai Rp 1.000.000,- yang terjadi pada tanggal 5 November 2022 dan senilai Rp 500.000,- pada tanggal 10 November 2014. Atas kesalahan ini harus dikembalikan nilai tersebut kepada penyetor atau ke SKPD Pemda B melalui PPKD dengan menggunakan SP2D LS. |
| 5 Des 2022  | Ditemukan kesalahan kelebihan pembayaran gaji bulan Desember 2014 senilai Rp 20.000.000,-. Atas kesalahan ini dilakukan koreksi dengan menyetor kelebihan gaji tersebut ke Kas Daerah dengan menggunakan STS yang dibuat SKPD bersangkutan.  |
| 10 Des 2022 | Berdasarkan pemeriksaan BPK ditemukan mark up pada pengadaan aset tetap kendaraan bermotor penumpang senilai Rp 50.000.000,- yang dilakukan pada tahun 2014. Atas kesalahan ini dilakukan koreksi pengembalian nilai mark up tersebut ke kas daerah dengan STS yang dibuat SKPD bersangkutan.  |
| 24 Des 2022 | Dilakukan restitusi atas retribusi penyewaan tanah dan bangunan karena kelebihan pembayaran senilai Rp 2.500.000,- dengan cara menerbitkan SP2D LS.  |

Kemudian pada bagian ini juga akan diberikan beberapa contoh jurnal terkait dengan transaksi koreksi di SKPKD-Kuasa BUD atas koreksi jurnal di SKPKD-PPKD yaitu sebagai berikut :

- |            |   |
|------------|---|
| 1 Des 2022 | Ditemukan kesalahan transfer pendapatan bantuan keuangan provinsi ke Pemerintah Kabupaten Kuningan yang seharusnya ke Pemerintah Daerah lainnya senilai Rp 1.000.000.000,- yang terjadi pada tanggal 5 November 2022 dan senilai Rp |
|------------|---|



500.000.000,- pada tanggal 10 November 2014. Atas kesalahan ini harus dikembalikan nilai tersebut kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat atau ke Pemerintah Daerah Lainnya dengan menggunakan SP2D LS.

5 Des 2022 Ditemukan kesalahan kelebihan pembayaran bantuan sosial kepada partai politik bulan Desember 2014 senilai Rp 20.000.000,-. Atas kesalahan ini dilakukan koreksi dengan menyetor kelebihan pembayaran tersebut ke Kas Daerah dengan menggunakan Slip Setoran Bank atau Bukti Transfer yang dibuat partai politik bersangkutan.

10 Des 2022 Berdasarkan pemeriksaan BPK ditemukan mark up pada pengadaan rumah untuk korban bencana alam senilai Rp 500.000.000,- yang dilakukan pada tahun 2014. Rumah tersebut belum diserahkan sehingga masih tercatat pada aset daerah. Atas kesalahan ini dilakukan koreksi pengembalian nilai mark up tersebut ke kas daerah dengan Bukti Slip Setoran atau Bukti Transfer yang dibuat pejabat yang bersalah.

12 Des 2022 Ditemukan kesalahan kekurangan pembentukan dana cadangan yang seharusnya senilai Rp 250.000.000,- tetapi dibentuk senilai Rp 200.000.000,-. Atas kesalahan ini dilakukan koreksi dengan mengeluarkan selisihnya menggunakan SP2D LS. Kemudian juga terjadi kesalahan penerimaan pengembalian dana bergulir, yang seharusnya diterima sebesar Rp 110.000.000,- tetapi hanya diterima sebesar Rp 100.000.000,-. Atas kesalahan ini dilakukan koreksi selisihnya menggunakan Nota Kredit

|             |  |
|-------------|--|
| 24 Des 2022 | Dilakukan restitusi tahun lalu atas sumbangan masyarakat karena kelebihan pembayaran sumbangan senilai Rp 2.500.000,- dengan cara menerbitkan SP2D LS.   |
| 27 Des 2022 | Ditemukan kesalahan pencatatan belanja bagi hasil pajak ke Desa sebesar Rp 54.000.000,00 yang seharusnya belanja bantuan keuangan ke Desa sebesar Rp 45.000.000,00. Atas kesalahan ini dilakukan koreksi dengan bukti memorial yang dilampiri dengan SP2D LS transaksi sebelumnya. |

**Langkah II : Penjurnalan Transaksi Koreksi dan Penyesuaian**

Setelah ditemukan adanya transaksi koreksi baik yang terjadi di SKPD maka Tenaga Akuntansi di Kuasa BUD membuat bukti memorial sebagai dasar dilakukannya penjurnalan. Berdasarkan contoh yang diberikan diatas maka dapat dijelaskan jurnal yang telah dilakukan sebelumnya dan jurnal koreksi yang seharusnya dilakukan, seperti diuraikan dibawah ini:

Untuk contoh **pertama**, dimana diketahui pada 1 Desember 2022 ada kesalahan penyetoran retribusi penyewaan ruangan ke SKPD Pemda A yang seharusnya ke SKPD Pemda B senilai Rp 1.000.000,- yang terjadi pada tanggal 5 November 2022 dan senilai Rp 500.000,- pada tanggal 10 November 2014. Jurnal koreksi atas transaksi 5 November 2022 yang dilakukan tenaga Akuntansi di Kuasa BUD adalah :

|            |             |                       | Debit     | Kredit    |
|------------|-------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 1 Des 2022 | 4.1.2.02.01 | Retribusi Pemakaian   | 1.000.000 | -         |
|            |             | Kekayaan Daerah – LRA |           |           |
|            | 1.1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah     | -         | 1.000.000 |

Sedangkan jurnal koreksi atas transaksi 10 November 2014 yang dilakukan tenaga Akuntansi di Kuasa BUD adalah :

|            |             |                     | Debit   | Kredit  |
|------------|-------------|---------------------|---------|---------|
| 1 Des 2022 | 5.1.8.01.01 | Belanja Tak Terduga | 500.000 | -       |
|            | 3.1.2.05.01 | Kas di Kas Daerah   | -       | 500.000 |

Transaksi contoh **kedua**, dimana diketahui pada 5 Desember 2022 kesalahan kelebihan pembayaran gaji bulan Desember 2014 senilai Rp 20.000.000,- sehingga dilakukan penyetoran ke rekening umum kas daerah. Jurnal koreksi yang dilakukan tenaga akuntansi di Kuasa BUD berdasarkan STS adalah :

|            |             |                        | Debit      | Kredit     |
|------------|-------------|------------------------|------------|------------|
| 5 Des 2022 | 1.1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah      | 20.000.000 | -          |
|            | 4.4.4.01.01 | Pendapatan Lainnya-LRA | -          | 20.000.000 |

Transaksi contoh **ketiga**, dimana diketahui pada 10 Desember 2022, berdasarkan pemeriksaan BPK ditemukan mark up pada pengadaan aset tetap kendaraan bermotor penumpang senilai Rp 50.000.000,- yang dilakukan pada tahun 2014, sehingga dilakukan pengembalian ke rekening kas umum daerah menggunakan STS. Jurnal koreksi yang dilakukan tenaga akuntansi di Kuasa BUD berdasarkan STS adalah :

|             |             |                        | Debit      | Kredit    |
|-------------|-------------|------------------------|------------|-----------|
| 10 Des 2022 | 1.1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah      | 50.000.000 | -         |
|             | 4.4.4.01.01 | Pendapatan Lainnya-LRA | -          | 50.00.000 |

Transaksi contoh **keempat**, dimana diketahui pada 24 Desember 2022 dilakukan restitusi atas retribusi penyewaan tanah dan bangunan karena kelebihan pembayaran senilai Rp 2.500.000,-. Jurnal koreksi yang dilakukan SKPD berdasarkan SP2D LS adalah :

|             |             |                     | Debit     | Kredit    |
|-------------|-------------|---------------------|-----------|-----------|
| 24 Des 2022 | 5.1.8.01.01 | Belanja Tak Terduga | 2.500.000 | -         |
|             | 1.1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah   | -         | 2.500.000 |

Kemudian untuk di SKPKD-PPKD, setelah ditemukan adanya transaksi koreksi maka Tenaga Akuntansi di Kuasa BUD membuat bukti memorial sebagai dasar dilakukannya penjurnalan. Berdasarkan contoh yang diberikan diatas maka dapat dijelaskan jurnal yang telah dilakukan sebelumnya dan jurnal koreksi yang seharusnya dilakukan, seperti diuraikan dibawah ini:

Untuk contoh **pertama**, dimana diketahui pada 1 Desember 2022 ada kesalahan transfer pendapatan bantuan keuangan provinsi ke Pemerintah Kabupaten Kuningan yang seharusnya ke Pemerintah Daerah lainnya senilai Rp 1.000.000.000,- yang terjadi pada tanggal 5 November 2022 dan senilai Rp 500.000.000,- pada tanggal 10 November 2014. Jurnal koreksi atas transaksi 5 November 2022 yang dilakukan tenaga akuntansi di Kuasa BUD adalah :

|            |             |  | Debit         | Kredit        |
|------------|-------------|--|---------------|---------------|
| 1 Des 2022 | 4.3.5.01.00 | Bantuan Keuangan dari<br>Pemerintah Daerah Provinsi<br>- LRA | 1.000.000.000 | -             |
|            | 1.1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah  | -             | 1.000.000.000 |

Sedangkan jurnal koreksi atas transaksi 10 November 2014 yang dilakukan tenaga akuntansi di Kuasa BUD adalah sebagai berikut :

|            |             |                     | Debit       | Kredit      |
|------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|
| 1 Des 2022 | 5.1.8.01.01 | Belanja Tak Terduga | 500.000.000 | -           |
|            | 1.1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah   | -           | 500.000.000 |

Transaksi contoh **kedua**, dimana diketahui pada 5 Desember 2022 kesalahan kelebihan pembayaran bantuan sosial kepada partai politik bulan Desember 2014 senilai Rp 20.000.000,-. Jurnal koreksi yang dilakukan tenaga akuntansi di Kuasa BUD berdasarkan Slip Setoran Bank atau Bukti Transfer adalah :

|            |             |                        | Debit      | Kredit     |
|------------|-------------|------------------------|------------|------------|
| 5 Des 2022 | 1.1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah      | 20.000.000 | -          |
|            | 4.4.4.01.01 | Pendapatan Lainnya-LRA | -          | 20.000.000 |

Transaksi contoh **ketiga**, dimana diketahui pada 10 Desember 2022, berdasarkan pemeriksaan BPK ditemukan mark up pada pengadaan rumah untuk korban bencana alam senilai Rp 500.000.000,- yang dilakukan pada tahun 2014. Rumah tersebut belum diserahkan sehingga masih tercatat pada aset daerah. Jurnal koreksi yang dilakukan tenaga akuntansi di Kuasa BUD berdasarkan Bukti Slip Setoran atau Bukti Transfer yang dibuat pejabat yang bersalah dan LHP BPK adalah :

|             |             |                        |                      |             |
|-------------|-------------|------------------------|----------------------|-------------|
| 10 Des 2022 | 1.1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah      | Debit<br>500.000.000 | Kredit<br>- |
|             | 4.4.4.01.01 | Pendapatan Lainnya-LRA | -                    | 500.00.000  |

Transaksi contoh **keempat**, dimana diketahui pada 12 Desember 2022, ditemukan kesalahan kesalahan kekurangan pembentukan dana cadangan yang seharusnya senilai Rp 250.000.000,- tetapi dibentuk senilai Rp 200.000.000. Atas kesalahan ini dilakukan koreksi oleh tenaga akuntansi di Kuasa BUD dengan mengeluarkan selisihnya menggunakan SP2D LS :

|             |             |  |                     |             |
|-------------|-------------|--|---------------------|-------------|
| 12 Des 2022 | 6.2.1.01.01 | Pengeluaran Pembiayaan<br>Pembentukan Dana<br>Cadangan | Debit<br>50.000.000 | Kredit<br>- |
|             | 1.1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah                                      | -                   | 50.000.000  |

diketahui pula pada 12 Desember 2022, ditemukan kesalahan penerimaan pengembalian dana bergulir, yang seharusnya diterima sebesar Rp 110.000.000,- tetapi hanya diterima sebesar Rp 100.000.000,-. Atas kesalahan ini dilakukan koreksi oleh tenaga akuntansi di Kuasa BUD selisihnya menggunakan Nota Kredit:

|             |             |  |                     |             |
|-------------|-------------|--|---------------------|-------------|
| 12 Des 2022 | 1.1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah  | Debit<br>10.000.000 | Kredit<br>- |
|             | 6.1.6.06.01 | Penerimaan Pembiayaan<br>Penerimaan kembali<br>Investasi Dana Bergulir | -                   | 10.000.000  |

Transaksi contoh **kelima**, dimana diketahui pada 24 Desember 2022 dilakukan restitusi atas sumbangan masyarakat tahun sebelumnya karena kelebihan pembayaran sumbangan senilai Rp 2.500.000,-. Jurnal koreksi yang dilakukan tenaga akuntansi di Kuasa BUD berdasarkan SP2D LS adalah:

|             |             |                     |                    |             |
|-------------|-------------|---------------------|--------------------|-------------|
| 24 Des 2022 | 5.1.8.01.01 | Belanja Tak Terduga | Debit<br>2.500.000 | Kredit<br>- |
|             | 1.1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah   | -                  | 2.500.000   |

Transaksi contoh **keenam**, dimana diketahui pada 27 Desember 2022 ditemukan kesalahan pencatatan belanja bagi hasil sebesar Rp 54.000.000,00 yang seharusnya belanja bantuan keuangan sebesar Rp 45.000.000,00. Jurnal koreksi yang dilakukan tenaga akuntansi di Kuasa BUD adalah :

|             |             |   | Debit      | Kredit     |
|-------------|-------------|---|------------|------------|
| 27 Des 2022 | 1.1.1.03.01 | Kas di Kas Daerah   | 9.000.000  | -          |
|             | 5.1.7.03.00 | Belanja/Transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa          | 45.000.000 | -          |
|             | 5.1.6.03.01 | Belanja/Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa | -          | 54.000.000 |

**Bentuk dan Cara Pengisian Buku Jurnal**

Berdasarkan contoh jurnal tersebut diatas maka dilakukan pencatatan dalam buku jurnal koreksi yang nantinya digunakan untuk menyusun LRA dan LAK sebagai berikut :

**KABUPATEN KUNINGAN**  
**BUKU JURNAL KOREKSI (Jk)**

**SKPKD** : .....( SKPKD Kabupaten Kuningan)

| Halaman 01 |                  |            |               |   |   |    |    |  |      |               |               |
|------------|------------------|------------|---------------|---|---|----|----|--|------|---------------|---------------|
| Tanggal    | Nomor            |            | Kode Rekening |   |   |    |    | Uraian   | Ref. | Debit (Rp)    | Kredit (Rp)   |
|            | Bukti Penerimaan | Bukti Lain |               |   |   |    |    |  |      |               |               |
| 1          | 2                |            | 3             |   |   |    |    | 4  | 5    | 6             | 7             |
|            |                  |            |               |   |   |    |    |  |      |               |               |
| 01/12/2022 | -                | -          | 4             | 1 | 2 | 02 | 01 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA              | -    | 1.000.000     | -             |
|            |                  |            | 1             | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas di Kas Daerah                                      |      | -             | 1.000.000     |
|            |                  |            |               |   |   |    |    |  |      |               |               |
| 01/12/2022 | -                | -          | 5             | 1 | 8 | 01 | 01 | Belanja Tak Terduga                                    | -    | 500.000       | -             |
|            |                  |            | 1             | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas di Kas Daerah                                      |      | -             | 500.000       |
|            |                  |            |               |   |   |    |    |  |      |               |               |
| 01/12/2022 |                  |            | 4             | 3 | 5 | 01 | 01 | Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi – LRA |      | 1.000.000.000 |               |
|            |                  |            | 1             | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas di Kas Daerah                                      |      |               | 1.000.000.000 |
|            |                  |            |               |   |   |    |    |  |      |               |               |
| 01/12/2022 |                  |            | 5             | 1 | 8 | 01 | 01 | Belanja Tak Terduga                                    |      | 500.000.000   |               |
|            |                  |            | 1             | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas di Kas Daerah                                      |      |               | 500.000.000   |
|            |                  |            |               |   |   |    |    |  |      |               |               |
| 05/12/2022 | -                | -          | 1             | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas di Kas Daerah                                      |      | 20.000.000    | -             |
|            |                  |            | 4             | 4 | 4 | 01 | 01 | Pendapatan Lainnya-LRA                                 |      | -             | 20.000.000    |

|            |   |   |   |   |   |    |    |   |  |               |               |
|------------|---|---|---|---|---|----|----|---|--|---------------|---------------|
|            |   |   |   |   |   |    |    |   |  |               |               |
| 05/12/2022 | - | - | 1 | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas di Kas Daerah   |  | 20.000.000    | -             |
|            |   |   | 4 | 4 | 4 | 01 | 02 | Pendapatan Lainnya-LRA  |  | -             | 20.000.000    |
|            |   |   |   |   |   |    |    |   |  |               |               |
| 10/12/2022 |   |   | 1 | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas di Kas Daerah   |  | 50.000.000    | -             |
|            |   |   | 4 | 4 | 4 | 01 | 02 | Pendapatan Lainnya-LRA  |  | -             | 50.000.000    |
|            |   |   |   |   |   |    |    |   |  |               |               |
| 10/12/2022 |   |   | 1 | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas di Kas Daerah   |  | 500.000.000   | -             |
|            |   |   | 4 | 4 | 4 | 01 | 02 | Pendapatan Lainnya-LRA  |  | -             | 500.000.000   |
|            |   |   |   |   |   |    |    |   |  |               |               |
| 12/12/2022 |   |   | 6 | 2 | 1 | 01 | 01 | Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan                  |  | 50.000.000    | -             |
|            |   |   | 1 | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas di Kas Daerah   |  | -             | 50.000.000    |
|            |   |   |   |   |   |    |    |   |  |               |               |
| 12/12/2022 |   |   | 1 | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas di Kas Daerah   |  | 10.000.000    |               |
|            |   |   | 6 | 1 | 6 | 06 | 01 | Penerimaan Pembiayaan Penerimaan kembali Investasi Dana Bergulir  |  |               | 10.000.000    |
|            |   |   |   |   |   |    |    |   |  |               |               |
| 24/12/2022 |   |   | 5 | 1 | 8 | 01 | 01 | Belanja Tak Terduga   |  | 2.500.000     | -             |
|            |   |   | 1 | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas di Kas Daerah   |  | -             | 2.500.000     |
|            |   |   |   |   |   |    |    |   |  |               |               |
| 27/12/2022 |   |   | 1 | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas di Kas Daerah   |  | 9.000.000     |               |
|            |   |   | 5 | 1 | 7 | 03 | 00 | Belanja/Transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa          |  | 45.000.000    |               |
|            |   |   | 5 | 1 | 6 | 03 | 01 | Belanja/Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa |  |               | 54.000.000    |
|            |   |   |   |   |   |    |    |   |  |               |               |
| Jumlah     |   |   |   |   |   |    |    |   |  | 2.210.500.000 | 2.210.500.000 |

Kuasa-BUD

PPKD/BUD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)

(tanda tangan)  
(nama lengkap)

NIP.....

NIP.....

Contoh buku besar SKPKD-Kuasa BUD : Kas di Kas Daerah sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPKD : BPKAD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 1.1.1.01.01  
Nama Rekening : Kas di Kas Daerah  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD :

Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian   | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|--|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |  |               |                |
|    |       |            |     | Saldo  | 1.000.000.000 |                |
| 1  |       | 01/12/2022 | Jk  | Koreksi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA  |               | 1.000.000      |
| 2  |       | 01/12/2022 | Jk  | Belanja Tak Terduga - koreksi  |               | 500.000        |
| 3  |       | 01/12/2022 | Jk  | Koreksi Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi - LRA                             |               | 1.000.000.000  |
| 4  |       | 01/12/2022 | Jk  | Belanja Tak Terduga- koreksi   |               | 500.000.000    |
| 5  |       | 05/12/2022 | Jk  | Pendapatan Lainnya-LRA- koreksi  | 20.000.000    | -              |
| 6  |       | 05/12/2022 | Jk  | Pendapatan Lainnya-LRA- koreksi  | 20.000.000    | -              |
| 7  |       | 10/12/2022 | Jk  | Pendapatan Lainnya-LRA- koreksi  | 50.000.000    | -              |
| 8  |       | 10/12/2022 | Jk  | Pendapatan Lainnya-LRA- koreksi  | 500.000.000   | -              |
| 9  |       | 12/12/2022 | Jk  | Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan   |               | 50.000.000     |
| 10 |       | 12/12/2022 | Jk  | Koreksi Penerimaan Pembiayaan Penarikan Dana Bergulir                                      | 10.000.000    |                |
| 11 |       | 24/12/2022 | Jk  | Belanja Tak Terduga- koreksi   |               | 2.500.000      |
| 12 |       | 27/12/2022 | Jk  | Koreksi Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah ke Desa menjadi Transfer Bantuan Keuangan ke Desa | 9.000.000     |                |
|    |       |            |     |  |               |                |
|    |       |            |     | Jumlah   | 1.609.000.000 | 1.554.000.000  |
|    |       |            |     | Saldo  | 55.000.000    | -              |

Kuasa BUD

PPKD/BUD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–Kuasa BUD : Ekuitas sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPKD : BPKAD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 3.1.1.01.01  
Nama Rekening : Ekuitas  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD :

Halaman 01

| No | Bukti |         | Ref | Uraian | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|---------|-----|--------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal |     |        |               |                |
|    |       |         |     | Saldo  |               | 51.000.000     |
|    |       |         |     |        |               |                |
|    |       |         |     | Jumlah | -             | 51.000.000     |
|    |       |         |     | Saldo  | -             | 51.000.000     |

Kuasa BUD

PPKD/BUD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....



Contoh buku besar SKPKD–Kuasa BUD : Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Ruangan - LRA sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPKD : BPKAD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 4.1.2.02.01  
Nama Rekening : Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian  | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|---------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |         |               |                |
| 1  |       | 01/12/2022 | Jk  | Koreksi | 1.000.000     |                |
|    |       |            |     |         |               |                |
|    |       |            |     | Jumlah  | 1.000.000     | -              |
|    |       |            |     | Saldo   | 1.000.000     | -              |

Kuasa BUD

PPKD/BUD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–Kuasa BUD : Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi – LRA sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPKD : BPKAD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 4.3.5.01.01  
Nama Rekening : Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi – LRA  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian  | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|---------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |         |               |                |
| 1  |       | 01/12/2022 | Jk  | Koreksi | 1.000.000.000 |                |
|    |       |            |     |         |               |                |
|    |       |            |     | Jumlah  | 1.000.000.000 | -              |
|    |       |            |     | Saldo   | 1.000.000.000 | -              |

Kuasa BUD

PPKD/BUD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–Kuasa BUD : Pendapatan Lainnya – LRA sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

**KABUPATEN KUNINGAN**  
**BUKU BESAR**

**SKPKD** : BPKAD Kabupaten Kuningan  
**Kode Rekening** : 4.4.4.01.01  
**Nama Rekening** : Pendapatan Lainnya-LRA  
**Pagu APBD** :  
**Pagu perubahan APBD** :

Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian  | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|---------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |         |               |                |
| 1  |       | 05/12/2022 | Jk  | Koreksi |               | 20.000.000     |
| 2  |       | 05/12/2022 | Jk  | Koreksi |               | 20.000.000     |
| 3  |       | 10/12/2022 | Jk  | Koreksi |               | 50.00.000      |
| 4  |       | 10/12/2022 | Jk  | Koreksi |               | 500.000.000    |
|    |       |            |     |         |               |                |
|    |       |            |     | Jumlah  |               | 540.000.000    |
|    |       |            |     | Saldo   |               | 540.000.000    |

Kuasa BUD

PPKD/BUD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–Kuasa BUD : Belanja/Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

**KABUPATEN KUNINGAN**  
**BUKU BESAR**

**SKPKD** : BPKAD Kabupaten Kuningan  
**Kode Rekening** : 5.1.6.03.01  
**Nama Rekening** : Belanja/Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa  
**Pagu APBD** :  
**Pagu perubahan APBD** :

Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian  | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|---------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |         |               |                |
| 1  |       | 27/12/2022 | Jk  | Koreksi |               | 54.000.000     |
|    |       |            |     |         |               |                |
|    |       |            |     | Jumlah  | -             | 54.000.000     |
|    |       |            |     | Saldo   | -             | 54.000.000     |

Kuasa BUD

PPKD/BUD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–Kuasa BUD : Belanja/Transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPKD : BPKAD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 5.1.7.03.00  
Nama Rekening : Belanja/Transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD :

Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian  | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|---------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |         |               |                |
| 1  |       | 27/12/2022 | Jk  | Koreksi | 45.000.000    |                |
|    |       |            |     |         |               |                |
|    |       |            |     | Jumlah  | 45.000.000    | -              |
|    |       |            |     | Saldo   | 45.000.000    | -              |

Kuasa BUD

PPKD/BUD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–Kuasa BUD : Belanja Tak Terduga sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPKD : BPKAD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 5.1.8.01.01  
Nama Rekening : Belanja Tak Terduga  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD :

Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian  | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|---------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |         |               |                |
| 1  |       | 01/12/2022 | Jk  | Koreksi | 500.000       |                |
| 2  |       | 01/12/2022 | Jk  | Koreksi | 500.000.000   |                |
| 3  |       | 24/12/2022 | Jk  | Koreksi | 2.500.000     |                |
|    |       |            |     |         |               |                |
|    |       |            |     | Jumlah  | 503.000.000   |                |
|    |       |            |     | Saldo   | 503.000.000   |                |

Kuasa BUD

PPKD/BUD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–Kuasa BUD : Penerimaan Pembiayaan Penarikan Dana Bergulir sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPKD : BPKAD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 6.1.6.06.01  
Nama Rekening : Penerimaan Pembiayaan Penerimaan kembali Investasi Dana Bergulir  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian  | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|---------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |         |               |                |
| 1  |       | 12/12/2022 | Jk  | Koreksi |               | 10.000.000     |
|    |       |            |     |         |               |                |
|    |       |            |     | Jumlah  | -             | 10.000.000     |
|    |       |            |     | Saldo   | -             | 10.000.000     |

Kuasa BUD

PPKD/BUD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–Kuasa BUD : Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPKD : BPKAD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 6.2.1.01.01  
Nama Rekening : Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian  | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|---------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |         |               |                |
| 1  |       | 12/12/2022 | Jk  | Koreksi | 50.000.000    |                |
|    |       |            |     |         |               |                |
|    |       |            |     | Jumlah  | 50.000.000    | -              |
|    |       |            |     | Saldo   | 50.000.000    | -              |

Kuasa BUD

PPKD/BUD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

**Langkah IV : Menyusun Neraca Saldo dan Laporan Keuangan**

Setelah melakukan posting seluruh pencatatan dalam buku besar maka kemudian Tenaga Akuntansi di Kuasa BUD membuat neraca saldo sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Penyusunan neraca saldo oleh Tenaga Akuntansi di Kuasa BUD dilakukan secara triwulanan. Neraca saldo disusun dengan cara memindahkan saldo-saldo yang ada di tiap buku besar ke dalam Neraca Saldo. Contoh Neraca Saldo dari hasil pencatatan dan posting contoh transaksi keuangan diatas adalah sebagai berikut :

**KABUPATEN KUNINGAN  
NERACA SALDO  
PER TANGGAL 31 Desember 2022**

| SKPKD         |   |   |    |    | : BPKAD   |             |             |
|---------------|---|---|----|----|---|-------------|-------------|
| Kode Rekening |   |   |    |    | Uraian  | Jumlah      |             |
|               |   |   |    |    |   | Debit       | Kredit      |
| 1             |   |   |    |    | 2   | 3           | 4           |
| 1             | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas di Kas Daerah   | 55.000.000  | -           |
| 3             | 1 | 1 | 01 | 01 | Ekuitas   | -           | 51.000.000  |
| 4             | 1 | 2 | 02 | 01 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA                         | 1.000.000   | -           |
| 4             | 3 | 5 | 01 | 01 | Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi – LRA            | 1.000.000   | -           |
| 4             | 4 | 4 | 01 | 01 | Pendapatan Lainnya-LRA  | -           | 540.000.000 |
| 5             | 1 | 6 | 03 | 01 | Belanja/Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa | -           | 54.000.000  |
| 5             | 1 | 7 | 03 | 00 | Belanja/Transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa          | 45.000.000  | -           |
| 5             | 1 | 8 | 01 | 01 | Belanja Tak Terduga   | 503.000.000 | -           |
| 6             | 1 | 6 | 06 | 01 | Penerimaan Pembiayaan Penerimaan kembali Investasi Dana Bergulir  | -           | 10.000.000  |
| 6             | 2 | 1 | 01 | 01 | Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan                  | 50.000.000  | -           |
|               |   |   |    |    |   |             |             |
| Jumlah        |   |   |    |    |   | 655.000.000 | 655.000.000 |

Kuasa BUD

PPKD/BUD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

## **SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI LAIN-LAIN DI SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (SKPKD) – KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH**

Bagian ini menjelaskan Sistem dan Prosedur Akuntansi Lain-lain di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)–Kuasa BUD untuk mencatat transaksi selain pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang sering disebut transaksi non anggaran.

### **KEBIJAKAN UMUM**

Prosedur akuntansi lain-lain pada SKPKD–Kuasa BUD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain pendapatan, belanja dan pembiayaan yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Transaksi-transaksi atau pencatatan akuntansi lain-lain pada SKPKD–Kuasa BUD meliputi :

1.     Investasi Jangka Pendek

Merupakan pelaksanaan penjurnalan dalam rangka mencatat penempatan atau penarikan investasi jangka pendek seperti Deposito berjangka 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan.

2.     Utang PFK

Merupakan penjurnalan untuk mencatat pemotongan dan penyetoran perhitungan pihak ketiga (PFK) seperti Potongan Pajak Penghasilan (PPh 21, 22, 23), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Iuran Wajib Pegawai (IWP), dan Taperum.

Prosedur akuntansi atas transaksi lain-lain ini harus dapat dijalankan dengan baik dan benar agar laporan keuangan dapat disajikan dengan benar. Kesalahan dalam melaksanakan prosedur akuntansi lain-lain ini akan mengakibatkan laporan keuangan yang disajikan tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Sistem dan prosedur akuntansi ini disusun berdasarkan kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

### **PIHAK-PIHAK TERKAIT**

Berbagai pihak/fungsi yang terkait dalam proses akuntansi lain-lain di SKPKD–Kuasa BUD beserta tugas-tugasnya adalah :

1. Bendahara Penerimaan SKPD & SKPKD

Dalam pelaksanaan prosedur ini, Bendahara Pengeluaran SKPD & PPKD berfungsi memberikan informasi saldo Kas di Bendahara Penerimaan.

2. Kantor Pelayanan Kas Negara (KPKN)

Kantor Pelayanan Kas Negara adalah pihak yang menerima penyetoran PFK atas Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut atau dipotong Pemerintah Kabupaten Kuningan.

3. Pihak Lainnya

Pihak Lainnya adalah pihak diluar Bendahara Penerimaan SKPD, Bendahara Penerimaan PPKD dan Kantor Pelayanan Kas Negara yang menerima investasi jangka pendek atau PFK lainnya (IWP dan Taperum).

4. Tenaga Akuntansi di Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD)

Dalam pelaksanaan prosedur ini, Tenaga Akuntansi di Kuasa BUD memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menerima kopi atau rangkap bukti-bukti transaksi investasi jangka pendek dan PFK dari pihak-pihak terkait yang disebut sebelumnya dan menganalisa data dan informasi akuntansi dari bukti transaksi tersebut;

- b. Mencatat transaksi-transaksi investasi jangka pendek dan PFK berdasarkan bukti-bukti transaksi ke buku jurnal;
- c. Memposting jurnal-jurnal terkait investasi jangka pendek dan PFK ke dalam buku besarnya masing-masing;
- d. Menyusun neraca saldo untuk persiapan penyusunan laporan keuangan, yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas; dan
- e. Menyerahkan buku jurnal, buku besar dan neraca saldo kepada Kuasa BUD untuk diperiksa dan ditandatangani.

5. Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD)

Dalam pelaksanaan prosedur ini, Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Bertanggungjawab atas sistem akuntansi lain-lain di SKPKD-Kuasa BUD yang dipimpinnya;
- b. Memeriksa dan menandatangani hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Tenaga Akuntansi PPK-Kuasa BUD setiap bulannya seperti Buku Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo SKPKD-Kuasa BUD; dan
- c. Menyerahkan Buku Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo SKPD yang mencatat transaksi pendapatan SKPD dan SKPKD-PPKD di Kuasa BUD setiap triwulan kepada PPKD/BUD untuk disetujui

6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Bendahara Umum Daerah (BUD) : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (tidak termasuk Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan).

Dalam pelaksanaan prosedur ini, PPKD/BUD memiliki tugas mengetahui dan menandatangani hasil pekerjaan Kuasa BUD setiap bulannya seperti Buku Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo SKPKD-Kuasa BUD setiap triwulan.



## **DOKUMEN YANG DIGUNAKAN**

1. Nota Kredit merupakan bukti transaksi penerimaan uang di rekening kas umum daerah;
2. Nota Debit merupakan bukti transaksi pengeluaran uang di rekening kas umum daerah;
3. Surat Perintah BUD adalah surat yang diterbitkan BUD untuk mengeluarkan kas untuk Investasi Jangka Pendek dan PFK;
4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut (SP2D) adalah dokumen yang digunakan sebagai pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM; dan

## **BUKU DAN ATAU FORMULIR YANG DIGUNAKAN**

Buku dan atau formulir yang digunakan dalam pelaksanaan prosedur akuntansi lain-lain di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah–Kuasa BUD terdiri dari :

1. Buku Jurnal Penerimaan Kas (JM)  
Merupakan buku jurnal yang digunakan untuk melakukan pencatatan atas penarikan investasi jangka pendek, pemotongan PFK, dan penyajian saldo Kas di Bendahara Penerimaan.
2. Buku Jurnal Pengeluaran Kas (JK)  
Merupakan buku jurnal yang digunakan untuk melakukan pencatatan atas penempatan investasi jangka pendek dan penyetoran PFK
3. Buku Besar (BB)  
Merupakan buku yang digunakan untuk menampung pencatatan hasil posting transaksi dari buku jurnal. Buku besar ini merupakan pencatatan akuntansi atas seluruh transaksi untuk suatu rekening/akun per jenis atau obyek. Jadi setiap rekening/akun per jenis atau objek mempunyai buku besar tersendiri.

4. Buku Besar Pembantu (BP)

Buku besar dapat dilengkapi dengan buku besar pembantu sebagai alat uji silang dan kelengkapan informasi rekening/akun tertentu. Buku besar pembantu berisi rincian akun (rincian obyek) yang telah dicatat dalam buku besar. Jika dirasakan informasi dalam buku besar sudah mencukupi maka buku besar pembantu tidak perlu dibuat lagi.

5. Neraca Saldo (NS)

Merupakan formulir yang mencatat nilai saldo setiap rekening/akun per rincian objek sehingga diketahui jumlah total dari seluruh rekening/akun.

## **KERANGKA SISTEM**

Tenaga Akuntansi di Kuasa BUD berdasarkan bukti transaksi investasi jangka pendek, PFK dan pengisian kas di Bendahara Pengeluaran melakukan pencatatan ke dalam buku jurnal. Pencatatan transaksi atas transaksi-transaksi tersebut tersebut dilakukan pada saat terjadinya transaksi dan atau diterimanya bukti transaksi tersebut, namun pengakuan transaksi tetap pada tanggal bukti transaksi.

Setelah seluruh transaksi dicatat dalam buku jurnal maka Tenaga Akuntansi di Kuasa BUD kemudian melakukan posting jurnal pendapatan SKPD dan SKPKD-PPKD dari buku jurnal ke buku besar. Setelah posting dari buku jurnal ke buku besar selesai dilakukan maka kemudian Tenaga Akuntansi di Kuasa BUD menyusun Neraca Saldo sebagai dasar pembuatan Laporan Keuangan untuk setiap triwulan yang diserahkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah triwulan berakhir kepada Kuasa BUD.

## **ALUR PROSEDUR TEKNIS**

Teknis pelaksanaan sistem dan prosedur akuntansi lain-lain di SKPKD-Kuasa BUD ini adalah sebagai berikut :

### **Langkah I : Penerimaan Bukti Transaksi.**

Tenaga Akuntansi SKPKD-Kuasa BUD yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menerima dokumen terkait akuntansi lain-lain dari Kuasa BUD. Atas penerimaan bukti transaksi ini, Tenaga Akuntansi SKPKD-Kuasa BUD harus menganalisa hingga benar-benar meyakini informasi akuntansi dari bukti tersebut. Setelah digunakan sebagai dasar melakukan pencatatan akuntansi lain-lain maka bukti transaksi tersebut harus disimpan dengan baik. Sebagai contoh : misalkan diketahui bahwa selama tahun 2022, telah terjadi transaksi yang terkait dengan investasi jangka pendek dan PFK sebagai berikut (asumsi tanggal bukti transaksi sama dengan tanggal penerimaan bukti transaksi) :

|             |   |
|-------------|---|
| 1 Juli 2022 | Pemerintah Kabupaten Kuningan menempatkan deposito jangka pendek sebesar Rp 1.000.000.000,- pada Bank Jabar dengan menggunakan Surat Perintah BUD dilampiri Surat Keputusan Bupati (khususnya untuk Bank NonPersepsi) dan ditandai oleh Nota Debit. |
| 1 Des 2022  | Pemerintah Kabupaten Kuningan memotong PPh 22 dan PPN dari Pihak Ketiga masing-masing sebesar Rp 1.000.000,- dan Rp 2.500.000,- berdasarkan SP2D.   |
| 2 Des 2022  | Pemerintah Kabupaten Kuningan menarik deposito jangka pendek sebesar Rp 750.000.000,- pada Bank Jabar dengan menggunakan surat perintah BUD dan ditandai oleh Nota Kredit.  |
| 12 Des 2022 | Pemerintah Kabupaten Kuningan menyeter PPh 22 dan PPN dari Pihak Ketiga masing-masing sebesar Rp 1.000.000 dan Rp 2.500.000 kepada KPKN dengan menggunakan surat perintah Kuasa BUD, SSP dan ditandai oleh Nota Debit.                              |

Contoh sederhana tersebut diatas diberikan sebagai bahan untuk mempermudah penjelasan sistem dan prosedur akuntansi lain-lain di SKPKD-Kuasa BUD ini. Tetapi contoh tersebut diatas tidak menunjukkan semua bentuk transaksi yang secara nyata terjadi.

**Langkah II : Penjurnalan Transaksi Lain-lain**

Berdasarkan bukti-bukti transaksi lain-lain tersebut kemudian Tenaga Akuntansi di Kuasa BUD mencatat transaksi tersebut di buku jurnal. Berdasarkan uraian penjurnalan dan contoh transaksi tersebut diatas maka Tenaga Akuntansi di Kuasa BUD melakukan pencatatan dalam buku umum sebagai berikut :

**Pertama,** transaksi penempatan deposito jangka pendek sebesar Rp 1.000.000.000,- pada Bank Jabar dengan menggunakan Surat Perintah BUD dilampiri Surat Keputusan Bupati (khususnya untuk Bank NonPersepsi) dan ditandai oleh Nota Debit:

|             |             |                     | Debit         | Kredit        |
|-------------|-------------|---------------------|---------------|---------------|
| 1 Juli 2022 | 1.1.4.01.01 | Investasi Jk Pendek | 1.000.000.000 |               |
|             | 1.1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah   |               | 1.000.000.000 |

**Kedua,** transaksi pemotongan PPh 22 dan PPN dari Pihak Ketiga masing-masing sebesar Rp 1.000.000,- dan Rp 2.500.000,- berdasarkan SP2D :

|            |             |                                  | Debit     | Kredit    |
|------------|-------------|----------------------------------|-----------|-----------|
| 1 Des 2022 | 1.1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah                | 3.500.000 |           |
|            | 7.1.2.01.02 | Penerimaan Potongan PPh Pasal 22 |           | 1.000.000 |
|            | 7.1.2.01.04 | Penerimaan Pungutan PPN          |           | 2.500.000 |

**Ketiga,** transaksi penarikan deposito jangka pendek sebesar Rp 750.000.000,- pada Bank Jabar dengan menggunakan surat perintah BUD dan ditandai oleh Nota Kredit :

|            |             |                     | Debit       | Kredit      |
|------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|
| 2 Des 2022 | 1.1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah   | 750.000.000 |             |
|            | 1.1.4.01.01 | Investasi Jk Pendek |             | 750.000.000 |

**Keempat,** transaksi penyetoran PPh 22 dan PPN dari Pihak Ketiga masing-masing sebesar Rp 1.000.000 dan Rp 2.500.000 kepada KPKN dengan menggunakan surat perintah Kuasa BUD, SSP dan ditandai oleh Nota Debit:

|             |             |                               |                    |           |
|-------------|-------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 12 Des 2022 | 7.2.2.01.02 | Pengeluaran – Potongan PPh 22 | Debit<br>1.000.000 | Kredit    |
|             | 7.2.2.01.04 | Pengeluaran – Pungutan PPN    | 2.500.000          |           |
|             | 1.1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah             |                    | 3.500.000 |

Bentuk dan Cara Pengisian Buku Jurnal

Berdasarkan contoh jurnal tersebut diatas maka dilakukan pencatatan dalam buku jurnal umum yang nantinya digunakan untuk menyusun LRA dan LAK sebagai berikut :

KABUPATEN KUNINGAN
BUKU JURNAL UMUM (JU)

SKPKD : .....( SKPKD Kabupaten Kuningan)

Halaman 01

| Tanggal    | Nomor            |            | Kode Rekening |   |   |    |    | Uraian                      | Ref. | Debit (Rp)    | Kredit (Rp)   |
|------------|------------------|------------|---------------|---|---|----|----|-----------------------------|------|---------------|---------------|
|            | Bukti Penerimaan | Bukti Lain |               |   |   |    |    |                             |      |               |               |
| 1          | 2                |            | 3             |   |   |    |    | 4                           | 5    | 6             | 7             |
| 1/7/2022   | -                | -          | 1             | 1 | 2 | 04 | 01 | Deposito Jangka Pendek      | -    | 1.000.000.000 | -             |
|            |                  |            | 1             | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas di Kas Dearah           | -    | -             | 1.000.000.000 |
| 1/12/2022  | -                | -          | 1             | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas di Kas Dearh            | -    | 3.500.000     | -             |
|            |                  |            | 7             | 1 | 2 | 01 | 02 | Penerimaan Potongan PPh 22  |      | -             | 1.000.000     |
|            |                  |            | 7             | 1 | 2 | 01 | 04 | Penerimaan Pungutan PPN     |      | -             | 2.500.000     |
| 2/12/2022  |                  |            | 1             | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas di Kas Daerah           |      | 750.000.000   | -             |
|            |                  |            | 1             | 1 | 2 | 04 | 01 | Deposito Jangka Pendek      |      | -             | 750.000.000   |
| 12/12/2022 |                  |            | 7             | 2 | 2 | 01 | 02 | Pengeluaran Potongan PPH 22 |      | 1.000.000     | -             |
|            |                  |            | 7             | 2 | 2 | 01 | 04 | Pengeluaran Pungutan PPN    |      | 2.500.000     | -             |
|            |                  |            | 1             | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas di Kas Daerah           |      | -             | 3.500.000     |
| Jumlah     |                  |            |               |   |   |    |    |                             |      | 92.000.000    | 92.000.000    |

Kuasa-BUD
(tanda tangan)
(nama lengkap)
NIP.....

PPKD/BUD
(tanda tangan)
(nama lengkap)
NIP.....

**Langkah III : Melakukan Posting ke Buku Besar**

Setelah melakukan penjurnalan seluruh transaksi untuk suatu periode misalkan untuk transaksi dalam satu bulan, maka PPK – SKPKD melakukan posting atas pencatatan jurnal tersebut ke buku besar. Posting ini berguna agar seluruh transaksi yang sama-sama mempengaruhi suatu akun atau kode rekening dapat dikelompokkan dalam satu buku besar untuk kode rekening yang bersangkutan. Periode posting harus semakin diusahakan dapat dilakukan dalam waktu yang semakin singkat misalkan untuk periode mingguan atau bahkan harian.

Contoh buku besar SKPKD–Kuasa BUD: Kas di Kas Daerah sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN

BUKU BESAR

SKPKD : BPKAD Kabupaten Kuningan

Kode Rekening : 1.1.1.01.01

Nama Rekening : Kas di Kas Daerah

Pagu APBD :

Pagu perubahan APBD : Halaman 01

| No | Bukti |            | Ref | Uraian                            | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|-----------------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |                                   |               |                |
|    |       |            |     | Saldo Awal                        | 500.000.000   |                |
| 1  |       | 1/06/2022  | JU  | Deposito Jangka Pendek            | -             | 1.000.000.000  |
| 2  |       | 1/12/2022  | JU  | Peerimaan PPH 22 & Pungutan PPN   | 3.500.000     | -              |
| 3  |       | 2/12/2022  | JU  | Investasi Jangka Pendek           | 750.000.000   | -              |
| 4  |       | 12/12/2022 | JU  | Pengeluaran PPH 22 & Pungutan PPN | -             | 3.500.000      |
|    |       |            |     |                                   |               |                |
|    |       |            |     | Jumlah                            | 1.253.500.000 | 1.003.500.000  |
|    |       |            |     | Saldo                             | 250.000.000   | -              |

Kuasa–BUD

PPKD/BUD

(tanda tangan)

(tanda tangan)

(nama lengkap)

(nama lengkap)

NIP.....

NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–Kuasa BUD: Deposito Jangka Pendek sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPKD : BPKAD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 1.1.2.04.01  
Nama Rekening : Deposito Jangka Pendek  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD :

Halaman 01

| No | Bukti |           | Ref | Uraian                     | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|-----------|-----|----------------------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal   |     |                            |               |                |
|    |       |           |     | Saldo Awal                 | -             |                |
| 1  |       | 1/07/2022 | JU  | Penempatan dari Kas Daerah | 1.000.000.000 | -              |
| 2  |       | 2/12/2022 | JU  | Penarikan ke Kas Daerah    | -             | 750.000.000    |
|    |       |           |     |                            |               |                |
|    |       |           |     |                            |               |                |
|    |       |           |     | Jumlah                     | 1.000.000.000 | 750.000.000    |
|    |       |           |     | Saldo                      | 250.000.000   | -              |

Kuasa–BUD

PPKD/BUD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–Kuasa BUD: Ekuitas sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU BESAR

SKPKD : BPKAD Kabupaten Kuningan  
Kode Rekening : 3.1.1.01.01  
Nama Rekening : Ekuitas  
Pagu APBD :  
Pagu perubahan APBD :

Halaman 01

| No | Bukti |         | Ref | Uraian     | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|---------|-----|------------|---------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal |     |            |               |                |
|    |       |         |     | Saldo Awal | -             | 500.000.000    |
|    |       |         |     |            |               |                |
|    |       |         |     | Jumlah     | -             | 500.000.000    |
|    |       |         |     | Saldo      | -             | 500.000.000    |

Kuasa–BUD

PPKD/BUD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–Kuasa BUD: Penerimaan Potongan PPh 22 sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

**KABUPATEN KUNINGAN**  
**BUKU BESAR**

**SKPKD** : BPKAD Kabupaten Kuningan  
**Kode Rekening** : 7.1.2.01.02  
**Nama Rekening** : Penerimaan Potongan PPh 22  
**Pagu APBD** :  
**Pagu perubahan APBD** : **Halaman 01**

| No | Bukti |           | Ref | Uraian                     | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp)   |
|----|-------|-----------|-----|----------------------------|---------------|------------------|
|    | Nomor | Tanggal   |     |                            |               |                  |
|    |       |           |     | Saldo Awal                 | -             |                  |
| 1  |       | 1/12/2022 | JU  | Pemotongan oleh Kas Daerah | -             | 1.000.000        |
|    |       |           |     |                            |               |                  |
|    |       |           |     | <b>Jumlah</b>              | -             | <b>1.000.000</b> |
|    |       |           |     | <b>Saldo</b>               | -             | <b>1.000.000</b> |

Kuasa–BUD

PPKD/BUD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–Kuasa BUD: Penerimaan Potongan PPN sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

**KABUPATEN KUNINGAN**  
**BUKU BESAR**

**SKPKD** : BPKAD Kabupaten Kuningan  
**Kode Rekening** : 7.1.2.01.04  
**Nama Rekening** : Penerimaan Potongan PPN  
**Pagu APBD** :  
**Pagu perubahan APBD** : **Halaman 01**

| No | Bukti |           | Ref | Uraian                     | Debet<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp)   |
|----|-------|-----------|-----|----------------------------|---------------|------------------|
|    | Nomor | Tanggal   |     |                            |               |                  |
|    |       |           |     | Saldo Awal                 | -             |                  |
| 1  |       | 1/12/2022 | JU  | Pemotongan oleh Kas Daerah | -             | 2.500.000        |
|    |       |           |     |                            |               |                  |
|    |       |           |     | <b>Jumlah</b>              | -             | <b>2.500.000</b> |
|    |       |           |     | <b>Saldo</b>               | -             | <b>2.500.000</b> |

Kuasa–BUD

PPKD/BUD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....



Contoh buku besar SKPKD–Kuasa BUD: Pengeluaran Potongan PPh 22 sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

**KABUPATEN KUNINGAN**  
**BUKU BESAR**

**SKPKD** : BPKAD Kabupaten Kuningan  
**Kode Rekening** : 7.2.2.01.02  
**Nama Rekening** : Pengeluaran Potongan PPh 22  
**Pagu APBD** :  
**Pagu perubahan APBD** : **Halaman 01**

| No | Bukti |            | Ref | Uraian                     | Debet<br>(Rp)    | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|----------------------------|------------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |                            |                  |                |
|    |       |            |     | Saldo Awal                 | -                |                |
| 1  |       | 12/12/2022 | JU  | Pembayaran oleh Kas Daerah | 1.000.000        | -              |
|    |       |            |     |                            |                  |                |
|    |       |            |     | <b>Jumlah</b>              | <b>1.000.000</b> | -              |
|    |       |            |     | <b>Saldo</b>               | <b>1.000.000</b> | -              |

Kuasa–BUD

PPKD/BUD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Contoh buku besar SKPKD–Kuasa BUD: Pengeluaran Potongan PPN sebagai hasil posting dari pencatatan di Buku Jurnal sebelumnya adalah:

**KABUPATEN KUNINGAN**  
**BUKU BESAR**

**SKPKD** : BPKAD Kabupaten Kuningan  
**Kode Rekening** : 7.2.2.01.04  
**Nama Rekening** : Pengeluaran Potongan PPN  
**Pagu APBD** :  
**Pagu perubahan APBD** : **Halaman 01**

| No | Bukti |            | Ref | Uraian                     | Debet<br>(Rp)    | Kredit<br>(Rp) |
|----|-------|------------|-----|----------------------------|------------------|----------------|
|    | Nomor | Tanggal    |     |                            |                  |                |
|    |       |            |     | Saldo Awal                 | -                |                |
| 1  |       | 12/12/2022 | JU  | Pembayaran oleh Kas Daerah | 2.500.000        | -              |
|    |       |            |     |                            |                  |                |
|    |       |            |     | <b>Jumlah</b>              | <b>2.500.000</b> | -              |
|    |       |            |     | <b>Saldo</b>               | <b>2.500.000</b> | -              |

Kuasa–BUD

PPKD/BUD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

**Langkah IV : Menyusun Neraca Saldo dan Laporan Keuangan**

Setelah melakukan posting seluruh pencatatan dalam buku besar maka kemudian Tenaga Akuntansi di Kuasa BUD membuat neraca saldo sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Penyusunan neraca saldo oleh Tenaga Akuntansi di Kuasa BUD dilakukan secara triwulanan. Neraca saldo disusun dengan cara memindahkan saldo-saldo yang ada di tiap buku besar ke dalam Neraca Saldo. Contoh Neraca Saldo dari hasil pencatatan dan posting contoh transaksi keuangan diatas adalah sebagai berikut :

**KABUPATEN KUNINGAN  
NERACA SALDO  
PER TANGGAL 31 Desember 2022**

| SKPKD         |   |   |    |    | : BPKAD                     |             |             |  |  |
|---------------|---|---|----|----|-----------------------------|-------------|-------------|--|--|
| Kode Rekening |   |   |    |    | Uraian                      | Jumlah      |             |  |  |
|               |   |   |    |    |                             | Debit       | Kredit      |  |  |
| 1             |   |   |    |    | 2                           | 3           | 4           |  |  |
| 1             | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas di Kas Daerah           | 250.000.000 | -           |  |  |
| 1             | 1 | 2 | 04 | 01 | Deposito Jangka Pendek      | 250.000.000 | -           |  |  |
| 3             | 1 | 1 | 01 | 01 | Ekuitas                     | -           | 500.000.000 |  |  |
| 7             | 1 | 2 | 01 | 02 | Penerimaan Potongan PPh 22  | -           | -           |  |  |
| 7             | 1 | 2 | 01 | 04 | Penerimaan Potongan PPN     | -           | -           |  |  |
| 7             | 2 | 2 | 01 | 02 | Pengeluaran Potongan PPh 22 | -           | -           |  |  |
| 7             | 2 | 2 | 01 | 04 | Pengeluaran Potongan PPN    | -           | -           |  |  |
|               |   |   |    |    |                             |             |             |  |  |
| Jumlah        |   |   |    |    |                             | 500.000.000 | 500.000.000 |  |  |

Kuasa BUD  
  
(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

PPKD/BUD  
  
(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

## **SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Bagian ini menjelaskan Sistem dan Prosedur Akuntansi secara umum di Pemerintah Kabupaten Kuningan dalam menyusun Laporan Keuangan.

### **KEBIJAKAN UMUM**

Bagian ini akan menguraikan tentang penyusunan laporan keuangan oleh Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD), Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah baik sebagai entitas yang mencatat transaksi Pemerintah Daerah (Pemda) maupun sebagai Kas Daerah (SKPKD-PPKD), Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang berlaku sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah (SKPKD-Kuasa BUD), dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang berlaku sebagai konsolidator penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

Sistem akuntansi di Pemerintah Kabupaten Kuningan menggunakan konsep konsolidasian dimana setiap SKPD termasuk SKPKD sebagai entitas akuntansi harus dapat menyajikan laporan keuangan untuk dikonsolidasikan dengan laporan keuangan SKPD lainnya menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai pertanggungjawaban dari entitas pelaporan.

Akuntansi di SKPD sebagai entitas akuntansi melakukan pencatatan realisasi DPA-SKPD yang dilaksanakan untuk menghasilkan Laporan Keuangan berikut :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
5. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).

Akuntansi di SKPKD-PPKD sebagai entitas akuntansi melakukan pencatatan realisasi DPA-PPKD dan pencatatan Kas Daerah menghasilkan Laporan Keuangan berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
3. Neraca;
4. Laporan Operasional (LO);
5. Laporan Arus Kas (LAK);
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
7. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).

Akuntansi di Fungsi Akuntansi Pemerintah Daerah yang menjadi pelaksana teknis entitas pelaporan menghasilkan Laporan Keuangan berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
3. Neraca;
4. Laporan Operasional (LO);
5. Laporan Arus Kas (LAK);
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
7. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).

Serupa dengan entitas akuntansi lain, akuntansi Kuasa BUD juga menyusun Laporan Keuangan yang terdiri atas:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Daerah;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
3. Neraca; dan
4. Laporan Arus Kas (LAK);

Penyajian Laporan Keuangan dalam satu tahun anggaran dilakukan minimal dalam 2 kali, yaitu :

1. Semester, yaitu laporan keuangan untuk periode Januari – Juni.
2. Tahunan, yaitu laporan keuangan untuk periode satu tahun (Januari – Desember).

Namun untuk keperluan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik dengan melakukan rekonsiliasi data keuangan daerah maka penyajian laporan keuangan dalam satu tahun anggaran dilakukan secara triwulanan.

## **PIHAK-PIHAK TERKAIT**

Berbagai pihak/fungsi yang terkait dalam sistem dan prosedur laporan keuangan beserta tugas-tugasnya adalah :

1. Tenaga Akuntansi di Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD)

Dalam pelaksanaan prosedur ini, Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Membuat laporan keuangan, yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan; dan
- b. Menyampaikan laporan keuangan SKPD yang disusunnya kepada PPK-SKPD.

2. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) : Sekretaris Badan atau Koordinator/ Kepala Sub Bagian Keuangan (Sekretariat Daerah, Badan, Kantor, Dinas, Rumah Sakit Umum Daerah Linggarjati, Kecamatan, dan Kelurahan), Kepala Bagian Keuangan (Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRD dan Rumah Sakit Umum Daerah 45).

Dalam pelaksanaan prosedur ini, PPK-SKPD memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Bertanggungjawab atas sistem akuntansi pelaporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
  - b. Memeriksa dan menandatangani laporan keuangan SKPD yang disusun oleh Tenaga Akuntansi PPK-SKPD sesuai periodenya; dan
  - c. Menyampaikan laporan keuangan SKPD yang disusunnya kepada Kepala SKPD (pengguna anggaran) untuk disetujui.
3. Pengguna Anggaran (Kepala SKPD) : Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, Kepala Satuan, Camat, Lurah, Asisten Administrasi, Sekretaris DPRD, dan Direktur.

Dalam pelaksanaan prosedur ini, Pengguna Anggaran memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menerima dan menyetujui laporan keuangan SKPD-nya yang telah dibuat oleh PPK-SKPD; dan
  - b. Menyampaikan Laporan Keuangan SKPD-nya kepada PPKD melalui Kepala Fungsi Akuntansi Pemda.
4. Tenaga Akuntansi di Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (PPK-SKPKD)

Dalam pelaksanaan prosedur ini, Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD bekerja mencatat transaksi Pemerintah Daerah memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Membuat laporan keuangan, yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan; dan
  - b. Menyampaikan laporan keuangan SKPKD-PPKD yang mencatat transaksi pemerintah daerah kepada PPK-SKPKD.
5. Pejabat Penatausahaan Keuangan di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (PPK-SKPKD) : Sekretaris Bdan atau Koordinator/ Kepala Sub Bagian Keuangan BPKAD.

Dalam pelaksanaan prosedur ini, PPK-SKPKD memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Bertanggungjawab atas sistem akuntansi pelaporan keuangan SKPKD-PPKD yang mencatat transaksi pemerintah daerah yang dipimpinnya;
  - b. Memeriksa dan menandatangani laporan keuangan SKPKD-PPKD yang disusun oleh Tenaga Akuntansi PPK-SKPKD sesuai periodenya; dan
  - c. Menyampaikan laporan keuangan SKPKD-PPKD yang disusunnya kepada PPKD (pengguna anggaran) untuk disetujui.
6. Tenaga Akuntansi di Fungsi Akuntansi Pemerintah Daerah

Dalam pelaksanaan prosedur ini, Tenaga Akuntansi di Fungsi Akuntansi Pemerintah Daerah bekerja mencatat transaksi kas daerah yang memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Membuat laporan keuangan, yang terdiri dari: Neraca, dan Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- b. Menyampaikan laporan keuangan SKPKD-PPKD yang mencatat transaksi kas daerah (akuntansi konsolidator) kepada Kepala Fungsi Akuntansi Pemerintah Daerah.

Dalam hal Tenaga Akuntansi di Fungsi Akuntansi Pemerintah Daerah bekerja sebagai konsolidator laporan keuangan memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Menerima laporan keuangan SKPD dari Pengguna Anggaran/Kepala SKPD;
  - b. Menerima laporan keuangan SKPKD-PPKD dari PPKD selaku Pengguna Anggaran;
  - c. Menerima laporan keuangan SKPKD-Kuasa BUD dari PPKD selaku BUD; dan
  - d. Melakukan konsolidasi laporan keuangan SKPD dan laporan keuangan SKPKD-PPKD menjadi laporan keuangan pemerintah daerah serta melakukan rekonsiliasi dengan laporan keuangan SKPKD-Kuasa BUD; dan
  - e. Menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah kepada Kepala Fungsi Akuntansi Pemda untuk diperiksa.
7. Kepala Fungsi Akuntansi Pemerintah Daerah : Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi BPKAD.

Dalam pelaksanaan prosedur ini, Kepala Fungsi Akuntansi Pemerintah Daerah memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Bertanggungjawab atas sistem akuntansi pelaporan keuangan SKPKD-PPKD yang mencatat transaksi kas daerah yang dipimpinnya;
- b. Memeriksa dan menandatangani laporan keuangan SKPKD-PPKD yang disusun oleh Tenaga Akuntansi Fungsi Akuntansi Pemerintah Daerah sesuai periodenya; dan
- c. Menyampaikan laporan keuangan SKPKD-PPKD yang disusunnya kepada PPKD (pengguna anggaran) untuk disetujui.

Dalam hal Kepala Fungsi Akuntansi Pemerintah Daerah bekerja sebagai konsolidator laporan keuangan memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Memeriksa laporan keuangan pemerintah daerah yang disusun oleh Tenaga Akuntansi Fungsi Akuntansi Pemerintah Daerah sesuai periodenya; dan
- b. Menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah yang disusunnya kepada PPKD.

8. Tenaga Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Daerah

Dalam pelaksanaan prosedur ini, Tenaga Akuntansi Kuasa BUD bekerja mencatat transaksi kas daerah yang memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Membuat laporan keuangan, yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran Daerah, Neraca, dan Laporan Arus Kas; dan
- b. Menyampaikan laporan keuangan SKPKD-Kuasa BUD kepada Kepala Fungsi Akuntansi Pemerintah Daerah untuk rekonsiliasi.

9. Kuasa Bendahara Umum Daerah : Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi BPKAD.

Dalam pelaksanaan prosedur ini, Kepala Fungsi Akuntansi Pemerintah Daerah memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Bertanggungjawab atas sistem akuntansi pelaporan keuangan SKPKD-Kuasa BUD yang dipimpinnya;
- b. Memeriksa dan menandatangani laporan keuangan SKPKD-Kuasa BUD yang disusun oleh Tenaga Akuntansi Kuasa BUD sesuai periodenya; dan
- c. Menyampaikan laporan keuangan SKPKD-Kuasa BUD yang disusunnya kepada PPKD/BUD untuk disetujui.

10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (tidak termasuk Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan):

Dalam pelaksanaan prosedur ini, PPKD memiliki tugas :

- a. Menerima dan memeriksa laporan keuangan SKPKD-PPKD yang mencatat transaksi Pemerintah Daerah dari PPK-SKPKD;
- b. Menerima dan memeriksa laporan keuangan SKPKD-PPKD yang mencatat transaksi Kas Daerah dari Kepala Fungsi Akuntansi



Pemda;

- c. Menerima dan memeriksa laporan keuangan SKPKD-Kuasa BUD dari Kuasa BUD;
- d. Menerima dan memeriksa laporan keuangan pemerintah daerah dari Kepala Fungsi Akuntansi Pemda; dan
- e. Menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah kepada Kepala Daerah untuk disetujui.

## **BUKU DAN ATAU FORMULIR YANG DIGUNAKAN**

Buku dan atau formulir yang digunakan dalam pelaksanaan prosedur akuntansi penyusunan laporan keuangan ini paling tidak terdiri dari :

1. Neraca Saldo (NS)

Merupakan formulir yang mencatat nilai saldo setiap rekening/akun per rincian objek sehingga diketahui jumlah total dari seluruh rekening/akun.

2. Kertas Kerja Konsolidasi (KKk)

Merupakan kertas kerja (worksheet) dengan lajur sesuai banyaknya entitas akuntansi (SKPD dan SKPKD-PPKD) sebagai alat untuk menyusun Neraca Saldo Pemerintah Daerah.

3. Buku Jurnal Penyesuaian (Jp)

Merupakan buku jurnal yang digunakan untuk melakukan pencatatan akuntansi penyesuaian khususnya atas jurnal eliminasi pada saat menyusun Neraca Saldo Pemerintah Daerah pada Kertas Kerja Konsolidasi.

4. Buku Jurnal Penutup (JPn)

Merupakan buku jurnal yang digunakan untuk menutup akun temporer. Ada beberapa jurnal penutup yang dapat disusun yaitu:

- a. Buku Jurnal Penutup LRA, yang digunakan untuk menutup akun-akun estimasi pendapatan, apropirasi belanja dan transfer, estimasi perubahan SAL, pendapatan-LRA, belanja, dan transfer setelah selesai menyusun LRA;

- b. Buku Jurnal Penutup LO, yang digunakan untuk menutup akun pendapatan-LO dan beban setelah selesai menyusun LO; dan
- c. Buku Jurnal Penutup Akhir, yang digunakan untuk menutup akun surplus/(defisit)-LO untuk menyusun Neraca.

**KERANGKA SISTEM**

Prosedur penyusunan laporan keuangan dimulai saat Tenaga Akuntansi di setiap entitas akuntansi (di SKPD, SKPKD-PPKD, dan SKPKD-Kuasa BUD) telah melakukan posting pencatatan jurnal ke buku besar. Setelah seluruh pencatatan jurnal transaksi dan koreksi telah diposting ke buku besar maka Tenaga Akuntansi di masing-masing entitas akuntansi kemudian menyusun Neraca Saldo.

Setelah Neraca Saldo tersusun maka Tenaga Akuntansi di semua entitas akuntansi melakukan analisa dan identifikasi untuk mulai menyusun laporan keuangan dengan urutan pekerjaan sebagai berikut :

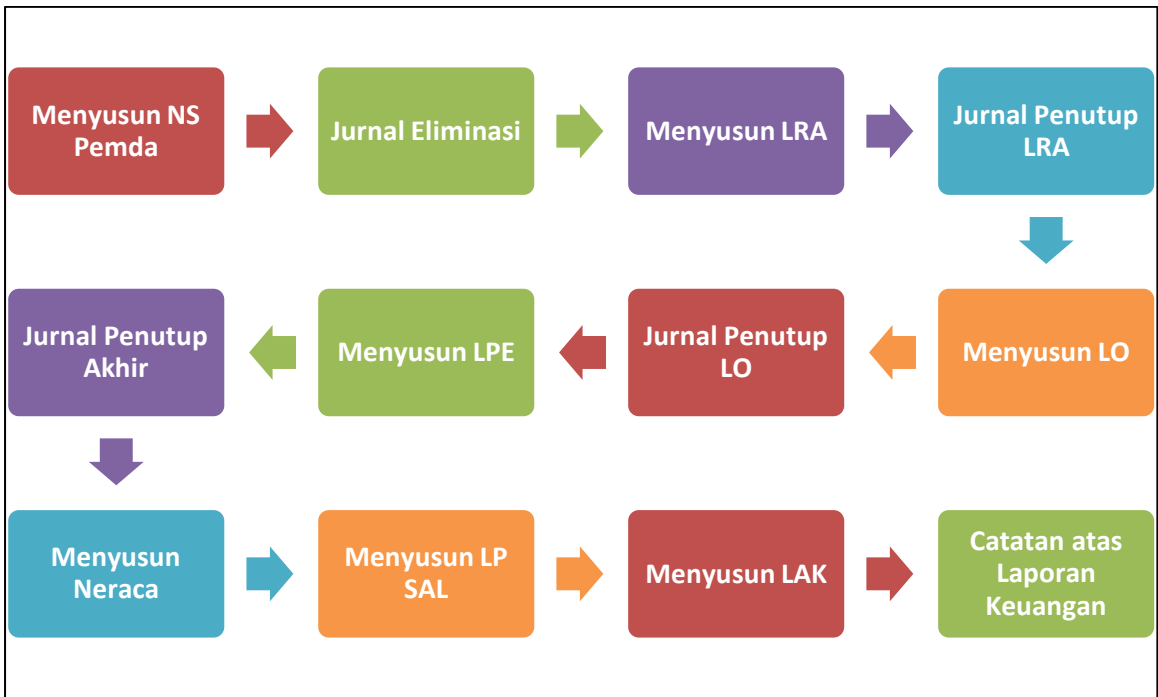


Setelah laporan keuangan disusun maka Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD/PPK-SKPKD Pemda dan Kas Daerah/Kuasa BUD melengkapi laporan keuangan tersebut dengan memuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang berisi berbagai penjelasan yang diperlukan terkait dengan laporan

keuangan yang disajikan. Kecuali untuk SKPKD-PPKD yang mencatat transaksi Kas Daerah dan Kuasa BUD tidak dibuat CaLK. Kemudian laporan keuangan masing-masing entitas akuntansi tersebut diserahkan kepada :

- PPK-SKPD untuk SKPD oleh Tenaga Akuntansi PPK – SKPD;
- PPK-SKPKD untuk SKPKD-PPKD (transaksi Pemda dan Kas Daerah) oleh Tenaga Akuntansi PPK–SKPKD; dan
- Kuasa BUD oleh Tenaga Akuntansi Kuasa BUD.

Waktu penyerahan laporan keuangan adalah paling lambat 1 (satu) bulan setelah batas penyusunan laporan keuangan berakhir. Berdasarkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi maka PPKD menyusun laporan keuangan daerah. Penyusunan laporan keuangan daerah untuk akhir tahun paling lambat diselesaikan 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sudah termasuk pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan oleh Inspektorat Daerah dengan urutan pekerjaan sebagai berikut :



**ALUR PROSEDUR TEKNIS**

Prosedur teknis penyusunan laporan keuangan ini dimulai dari penyusunan neraca saldo hingga laporan keuangan disampaikan entitas akuntansi kepada entitas pelaporan untuk dikonsolidasikan menjadi laporan keuangan pemerintah daerah. Secara lebih rinci uraian alur prosedur ini adalah sebagai berikut :

**Langkah I : Penyusunan Neraca Saldo setelah Penyesuaian**

Setelah seluruh penjurnalan transaksi, koreksi dan penyesuaian di posting ke buku besar maka Tenaga Akuntansi PPK-SKPD/PPK-SKPKD PPKD/Kuasa BUD menyusun neraca saldo. Penyusunan neraca saldo dilakukan dengan cara memindahkan nilai saldo akhir di buku besar untuk setiap rekening/akun ke dalam formulir bagian neraca saldo. Pindahkan saldo yang berada disisi debit suatu rekening di buku besar kedalam kolom debit didalam formulir bagian neraca saldo dan demikian juga untuk saldo disisi kredit dipindahkan ke dalam kolom kredit didalam formulir bagian neraca saldo. Contoh format Neraca Saldo yang dapat digunakan adalah sebagai berikut :

KABUPATEN KUNINGAN

NERACA SALDO

Urusan : 1.xx – Urusan Wajib xx

Organisasi : 1.xx.xx.xx – .... - ....

Halaman : ...

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |        |
|---------------|--------|--------|--------|
|               |        | Debit  | Kredit |
| 1             | 2      | 3      | 4      |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |
|               |        |        |        |

Cara pengisian formulir neraca saldo adalah sebagai berikut :

1. Diisikan satuan kerja (SKPD/SKPKD)
2. Diisikan no halaman dari formulir neraca saldo ini.
3. Kolom 1 diisi kode rekening – kode rekening yang mempunyai nilai saldo di buku besar.
4. Kolom 2 diisi nama rekening – nama rekening yang mempunyai nilai saldo di buku besar sesuai dengan kode rekeningnya yang telah dicatat di kolom sebelumnya.
5. Kolom 3 diisi nilai saldo sebelah debit yaitu nilai saldo dari kode/nama rekening yang mempunyai nilai saldo di sebelah debit seperti tercatat dalam buku besar atau sesuai dengan kondisi saldo normal kode/nama rekening tersebut.

- 6. Kolom 4 diisi nilai saldo sebelah kredit yaitu nilai saldo dari kode/nama rekening yang mempunyai nilai saldo di sebelah kredit seperti tercatat dalam buku besar atau sesuai dengan kondisi saldo normal kode/nama rekening tersebut.
- 7. Diisikan nilai jumlah masing-masing dari total sisi debit dan total sisi kredit.

Kode rekening yang dicantumkan dalam penyusunan neraca saldo tersebut adalah cukup kode rekening dalam klasifikasi ekonomi hingga rincian obyek, sehingga tidak muncul kode program dan kegiatannya.

Khusus untuk penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh Fungsi Akuntansi Pemda, neraca saldo setelah penyesuaian ini disusun dengan menggunakan kertas kerja konsolidasi (KKk). Pada KKk ini dimasukan Neraca Saldo semua entitas akuntansi (SKPD dan SKPKD-PPKD) kecuali SKPKD-Kuasa BUD. Neraca saldo yang dimasukkan kedalam kertas kerja konsolidasi adalah Neraca Saldo yang sudah disesuaikan. Setelah memasukkan semua neraca saldo kedalam kertas kerja konsolidasi, Fungsi Akuntansi Pemda membuat jurnal eliminasi untuk menghapus akun transitoris yaitu RK PPKD dan RK SKPD. Berdasarkan semua entitas akuntansi (SKPD dan SKPKD-PPKD) kecuali SKPKD-Kuasa BUD serta Jurnal Eliminasi, Fungsi Akuntansi Pemda mengisi Neraca Saldo Pemerintah Daerah. Untuk eliminasi kedua akun tersebut, fungsi akuntansi PPKD mencatat “RK-PPKD” di debit dan “RK-SKPD” di kredit dengan jurnal:

|         |     |
|---------|-----|
| RK-PPKD | xxx |
| RK-SKPD | xxx |

Penggunaan format dalam hal ini disesuaikan dengan kebutuhan yang berkembang. Informasi minimal yang harus ada pada format kertas kerja sebagai berikut :

Contoh KKK :

| Kode<br>Akun | Uraian | Neraca Saldo<br>SKPD A |   | Neraca Saldo<br>SKPD B |   | Neraca Saldo<br>SKPD C |   | Neraca Saldo<br>SKPD dst |   | Neraca Saldo<br>SKPKD-PPKD |   | Neraca Saldo<br>Pemda |   |
|--------------|--------|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|--------------------------|---|----------------------------|---|-----------------------|---|
|              |        | D                      | K | D                      | D | D                      | K | D                        | K | D                          | K | D                     | K |
|              |        |                        |   |                        |   |                        |   |                          |   |                            |   |                       |   |
|              |        |                        |   |                        |   |                        |   |                          |   |                            |   |                       |   |
|              |        |                        |   |                        |   |                        |   |                          |   |                            |   |                       |   |
|              |        |                        |   |                        |   |                        |   |                          |   |                            |   |                       |   |
|              |        |                        |   |                        |   |                        |   |                          |   |                            |   |                       |   |
|              |        |                        |   |                        |   |                        |   |                          |   |                            |   |                       |   |
|              |        |                        |   |                        |   |                        |   |                          |   |                            |   |                       |   |
|              |        |                        |   |                        |   |                        |   |                          |   |                            |   |                       |   |
|              |        |                        |   |                        |   |                        |   |                          |   |                            |   |                       |   |
|              |        |                        |   |                        |   |                        |   |                          |   |                            |   |                       |   |
|              |        |                        |   |                        |   |                        |   |                          |   |                            |   |                       |   |
|              |        |                        |   |                        |   |                        |   |                          |   |                            |   |                       |   |
|              |        |                        |   |                        |   |                        |   |                          |   |                            |   |                       |   |
|              |        |                        |   |                        |   |                        |   |                          |   |                            |   |                       |   |
|              |        |                        |   |                        |   |                        |   |                          |   |                            |   |                       |   |
|              |        |                        |   |                        |   |                        |   |                          |   |                            |   |                       |   |

**Langkah II : Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)**

Dengan menggunakan neraca saldo setelah penyesuaian tersebut diatas maka Tenaga Akuntansi pada entitas akuntansi/pelaporan dapat mulai menyusun laporan realisasi anggaran (LRA) entitas akuntansi yang menjadi tanggungjawabnya. Tenaga Akuntansi pada entitas akuntansi/pelaporan memindahkan saldo-saldo pada rekening/akun yang terkait dengan penyusunan laporan realisasi anggaran, yaitu untuk nomor rekening (akun) : 4 (pendapatan-LRA), 5 (belanja) dan 6 (pembiayaan) ke kolom realisasi anggaran pada LRA sesuai dengan kelompok masing-masing rekening/akun dan sesuai jenis entitas akuntansi/pelaporan. LRA yang terbentuk akan menyajikan informasi realisasi pendapatan dan belanja daerah serta pembiayaan untuk LRA yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode sebagai berikut :

**LRA SKPD :**

**PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN**  
**SKPD.....**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAERAH**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER Tahun N**

| (Dalam Rupiah) |  |                            |           |                |
|----------------|--|----------------------------|-----------|----------------|
| Nomor Urut     | Uraian   | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Lebih (Kurang) |
| 1              | 2  | 3                          | 4         | 5              |
| 4              | Pendapatan   |                            |           |                |
| 4.1            | Pendapatan Asli Daerah                                       |                            |           |                |
| 4.1.1          | Pendapatan pajak daerah                                      |                            |           |                |
| 4.1.2          | Pendapatan retribusi daerah                                  |                            |           |                |
| 4.1.3          | Pendapatan hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan |                            |           |                |
| 4.1.4          | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah                    |                            |           |                |
|                | Jumlah Pendapatan  |                            |           |                |
| 5              | Belanja  |                            |           |                |
| 5.1            | Belanja Operasi  |                            |           |                |
| 5.1.01         | Belanja Pegawai  |                            |           |                |
| 5.1.02         | Belanja Barang dan Jasa                                      |                            |           |                |
| 5.1.05         | Belanja Hibah  |                            |           |                |
| 5.2            | Belanja Modal  |                            |           |                |
| 5.2.01         | Belanja Modal Tanah  |                            |           |                |
| 5.2.02         | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                            |                            |           |                |
| 5.2.03         | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                            |                            |           |                |
| 5.2.04         | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan                    |                            |           |                |
| 5.2.05         | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                             |                            |           |                |
| 5.2.06         | Belanja Modal Aset Lainnya                                   |                            |           |                |
|                | Jumlah Belanja   |                            |           |                |
|                | SURPLUS/(DEFISIT)  |                            |           |                |

LRA SKPKD-PPKD

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN  
SKPKD-PPKD  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAERAH  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER Tahun N

| (Dalam Rupiah) |  |                            |           |                |
|----------------|--|----------------------------|-----------|----------------|
| Nomor Urut     | Uraian   | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Lebih (Kurang) |
| 1              | 2  | 3                          | 4         | 5              |
| 4              | Pendapatan   |                            |           |                |
| 4.2            | Pendapatan Transfer  |                            |           |                |
| 4.2.01         | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat   |                            |           |                |
| 4.2.02         | Pendapatan Transfer Antar Daerah   |                            |           |                |
| 4.3            | Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah   |                            |           |                |
| 4.3.01         | Pendapatan Hibah   |                            |           |                |
| 4.3.02         | Dana Darurat   |                            |           |                |
| 4.3.03         | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan          |                            |           |                |
|                | Jumlah Pendapatan  |                            |           |                |
| 5              | Belanja  |                            |           |                |
| 5.1            | Belanja Operasional  |                            |           |                |
| 5.1.03         | Belanja Bunga  |                            |           |                |
| 5.1.04         | Belanja Subsidi  |                            |           |                |
| 5.1.05         | Belanja Hibah  |                            |           |                |
| 5.1.06         | Belanja Bantuan Sosial   |                            |           |                |
| 5.3            | Belanja Tidak Terduga  |                            |           |                |
| 5.3.01         | Belanja Tidak Terduga  |                            |           |                |
| 5.4            | Belanja Transfer   |                            |           |                |
| 5.4.01         | Belanja Bagi Hasil   |                            |           |                |
| 5.4.02         | Belanja Bantuan Keuangan   |                            |           |                |
|                | Jumlah Belanja   |                            |           |                |
|                | SURPLUS/(DEFISIT)  |                            |           |                |
| 6              | Pembiayaan Daerah  |                            |           |                |
| 6.1            | Penerimaan Pembiayaan Daerah   |                            |           |                |
| 6.1.01         | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya                                   |                            |           |                |
| 6.1.02         | Pencairan Dana Cadangan  |                            |           |                |
| 6.1.03         | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan                                    |                            |           |                |
| 6.1.04         | Penerimaan Pinjaman Daerah   |                            |           |                |
| 6.1.05         | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman  |                            |           |                |
| 6.1.06         | Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan PerundangUndangan  |                            |           |                |
|                | Jumlah Penerimaan Pembiayaan   |                            |           |                |
| 6.2            | Pengeluaran Pembiayaan Daerah  |                            |           |                |
| 6.2.01         | Pembentukan Dana Cadangan  |                            |           |                |
| 6.2.02         | Penyertaan Modal Daerah  |                            |           |                |
| 6.2.03         | Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo                                    |                            |           |                |
| 6.2.04         | Pemberian Pinjaman Daerah  |                            |           |                |
| 6.2.05         | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan PerundangUndangan |                            |           |                |
|                | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan  |                            |           |                |
|                | Pembiayaan Neto  |                            |           |                |
|                | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)   |                            |           |                |



LRA Kuasa BUD & Pemda :

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAERAH  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER Tahun N  
(Dalam Rupiah)

| Nomor Urut | Uraian   | Anggaran Tahun N | Realisasi Tahun N | % | Realisasi (Tahun N-1) |
|------------|--|------------------|-------------------|---|-----------------------|
| 1          | 2  | 3                | 4                 | 5 | 6                     |
| 4          | Pendapatan   |                  |                   |   |                       |
| 4.1        | Pendapatan Asli Daerah   |                  |                   |   |                       |
| 4.1.1      | Pendapatan pajak daerah  |                  |                   |   |                       |
| 4.1.2      | Pendapatan retribusi daerah  |                  |                   |   |                       |
| 4.1.3      | Pendapatan hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan                       |                  |                   |   |                       |
| 4.1.4      | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah  |                  |                   |   |                       |
| 4.2        | Pendapatan Transfer  |                  |                   |   |                       |
| 4.2.01     | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat   |                  |                   |   |                       |
| 4.2.02     | Pendapatan Transfer Antar Daerah   |                  |                   |   |                       |
| 4.3        | Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah   |                  |                   |   |                       |
| 4.3.01     | Pendapatan Hibah   |                  |                   |   |                       |
| 4.3.02     | Dana Darurat   |                  |                   |   |                       |
| 4.3.03     | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan          |                  |                   |   |                       |
|            | Jumlah Pendapatan  |                  |                   |   |                       |
| 5          | Belanja  |                  |                   |   |                       |
| 5.1        | Belanja Operasi  |                  |                   |   |                       |
| 5.1.01     | Belanja Pegawai  |                  |                   |   |                       |
| 5.1.02     | Belanja Barang dan Jasa  |                  |                   |   |                       |
| 5.1.03     | Belanja Bunga  |                  |                   |   |                       |
| 5.1.04     | Belanja Subsidi  |                  |                   |   |                       |
| 5.1.05     | Belanja Hibah  |                  |                   |   |                       |
| 5.1.06     | Belanja Bantuan Sosial   |                  |                   |   |                       |
| 5.2        | Belanja Modal  |                  |                   |   |                       |
| 5.2.01     | Belanja Modal Tanah  |                  |                   |   |                       |
| 5.2.02     | Belanja Modal Peralatan dan Mesin  |                  |                   |   |                       |
| 5.2.03     | Belanja Modal Gedung dan Bangunan  |                  |                   |   |                       |
| 5.2.04     | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan  |                  |                   |   |                       |
| 5.2.05     | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya   |                  |                   |   |                       |
| 5.2.06     | Belanja Modal Aset Lainnya   |                  |                   |   |                       |
| 5.3        | Belanja Tidak Terduga  |                  |                   |   |                       |
| 5.3.01     | Belanja Tidak Terduga  |                  |                   |   |                       |
| 5.4        | Belanja Transfer   |                  |                   |   |                       |
| 5.4.01     | Belanja Bagi Hasil   |                  |                   |   |                       |
| 5.4.02     | Belanja Bantuan Keuangan   |                  |                   |   |                       |
|            | Jumlah Belanja   |                  |                   |   |                       |
|            | SURPLUS/(DEFISIT)  |                  |                   |   |                       |
| 6          | Pembiayaan Daerah  |                  |                   |   |                       |
| 6.1        | Penerimaan Pembiayaan Daerah   |                  |                   |   |                       |
| 6.1.01     | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya                                   |                  |                   |   |                       |
| 6.1.02     | Pencairan Dana Cadangan  |                  |                   |   |                       |
| 6.1.03     | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan                                    |                  |                   |   |                       |
| 6.1.04     | Penerimaan Pinjaman Daerah   |                  |                   |   |                       |
| 6.1.05     | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman  |                  |                   |   |                       |
| 6.1.06     | Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan PerundangUndangan  |                  |                   |   |                       |
|            | Jumlah Penerimaan Pembiayaan   |                  |                   |   |                       |
| 6.2        | Pengeluaran Pembiayaan Daerah  |                  |                   |   |                       |
| 6.2.01     | Pembentukan Dana Cadangan  |                  |                   |   |                       |
| 6.2.02     | Penyertaan Modal Daerah  |                  |                   |   |                       |
| 6.2.03     | Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo                                    |                  |                   |   |                       |
| 6.2.04     | Pemberian Pinjaman Daerah  |                  |                   |   |                       |
| 6.2.05     | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan PerundangUndangan |                  |                   |   |                       |
|            | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan  |                  |                   |   |                       |
|            | Pembiayaan Neto  |                  |                   |   |                       |
|            | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)   |                  |                   |   |                       |

Cara pengisian laporan realisasi anggaran sebelum konversi adalah sebagai berikut :

1. Kolom 1 diisi nomor urut pos-pos rekening laporan realisasi anggaran.
2. Kolom 2 diisi nama pos rekening – nama rekening laporan realisasi anggaran.
3. Kolom 3 diisi nilai anggaran setelah perubahan APBD per pos rekening .
4. Kolom 4 diisi nilai realisasi anggaran per pos rekening.
5. Kolom 5 diisi nilai persen realisasi per rekening dengan cara membagi nilai realisasi anggaran (kolom 4) dibagi nilai anggaran setelah perubahan APBD (kolom 3) dikali seratus.
6. Kolom 6 diisi nilai realisasi anggaran tahun sebelumnya (tahun n-1)

**Langkah III : Menutup nilai saldo Laporan Realisasi Anggaran (LRA)**

Setelah menyusun laporan realisasi anggaran maka Tenaga Akuntansi pada entitas akuntansi harus melakukan jurnal penutup LRA agar dapat menyusun laporan keuangan selanjutnya yaitu laporan operasional (LO). Jurnal penutup ini dilakukan dengan maksud agar rekening/akun yang bersifat sementara (*nominal account*) nilai saldo dibuku besar terkait rekening/akun LRA kembali menjadi nihil pada akhir periode akuntansi. Rekening/akun nominal adalah rekening/akun yang digunakan dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, yaitu Pendapatan-LRA, Belanja, dan Pembiayaan. Berikut adalah jurnal penutup yang dimaksud :

1. Jurnal Penutup untuk menutup jurnal penganggaran yang dibuat di awal tahun anggaran :

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Apropriasi Belanja                | xxx |
| Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan | xxx |
| Estimasi Perubahan SAL            | xxx |
| Estimasi Pendapatan               | xxx |
| Estimasi Penerimaan Pembiayaan    | xxx |

2. Jurnal Penutup untuk realisasi anggaran, ditutup pada akun surplus/defisit – LRA :

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Pendapatan – LRA      | xxx |
| Penerimaan Pembiayaan | xxx |

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Belanja                | xxx |
| Pengeluaran Pembiayaan | xxx |
| Surplus/Defisit - LRA  | xxx |

3. Jurnal Penutup untuk menutup akun surplus/defisit – LRA pada akun Estimasi Perubahan SAL yang terbentuk selama transaksi :

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Surplus/Defisit- LRA   | xxx |
| Estimasi Perubahan SAL | xxx |

Setelah membuat jurnal penutup, Tenaga Akuntansi pada entitas akuntansi menyusun Neraca Saldo setelah Penutupan LRA.

**Langkah V : Penyusunan Laporan Operasional (LO)**

Laporan Operasional (LO) ini menyajikan informasi pendapatan-LO dan beban SKPD yang masing-masing diperbandingkan dengan pendapatan-LO dan beban tahun sebelumnya untuk diketahui kenaikan/penurunannya baik dalam angka maupun prosentase. LO ini disusun berdasarkan Neraca Saldo setelah Penutup LRA.

Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penutup LRA diatas, gunakan nilai saldo kode akun 7 (pendapatan-LO) dan nilai saldo kode akun 8 (beban) untuk menyusun Laporan Operasional SKPD sebagai berikut :

**LO SKPD**

| <b>PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN</b><br><b>SKPD .....</b><br><b>LAPORAN OPERASIONAL</b><br><b>Per 31 Desember Tahun N dan Tahun N-1</b> |         |           |                         |   |
|---|---------|-----------|-------------------------|---|
| URAIAN  | Tahun N | Tahun N-1 | Kenaikan<br>(Penurunan) | % |
| 1   | 2       | 3         | 4                       | 5 |
| <b>PENDAPATAN</b>   |         |           |                         |   |
| <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH-LO</b>  |         |           |                         |   |
| Pendapatan Pajak Daerah-LO  |         |           |                         |   |
| Pendapatan Retribusi Daerah-LO  |         |           |                         |   |
| Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO   |         |           |                         |   |
| Lain-lain PAD yang Sah-Lo   |         |           |                         |   |
| <b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah-LO</b>   |         |           |                         |   |
| <b>JUMLAH PENDAPATAN-LO</b>   |         |           |                         |   |
| <b>BEBAN</b>  |         |           |                         |   |
| <b>BEBAN OPERASI</b>  |         |           |                         |   |
| Beban Pegawai   |         |           |                         |   |
| Beban Barang Jasa   |         |           |                         |   |
| <b>Jumlah Beban Operasi</b>   |         |           |                         |   |
| <b>JUMLAH BEBAN</b>   |         |           |                         |   |
| <b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI</b>  |         |           |                         |   |
| <b>SURPLUS/DEFISIT – LO</b>   |         |           |                         |   |

LO SKPKD-PPKD

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN  
SKPKD-PPKD  
LAPORAN OPERASIONAL  
Per 31 Desember Tahun N dan Tahun N-1

| URAIAN  | Tahun N | Tahun N-1 | Kenaikan<br>(Penurunan) | % |
|---|---------|-----------|-------------------------|---|
| 1   | 2       | 3         | 4                       | 5 |
| <b>PENDAPATAN</b>   |         |           |                         |   |
| <b>PENDAPATAN TRANSFER-LO</b>   |         |           |                         |   |
| Transfer Pemerintah Pusat-LO  |         |           |                         |   |
| Transfer Antar Pemerintah Daerah Lainnya-LO                                     |         |           |                         |   |
| <b>Jumlah Pendapatan Transfer-LO</b>  |         |           |                         |   |
| <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH-LO</b>   |         |           |                         |   |
| Pendapatan Hibah-LO   |         |           |                         |   |
| Dana Darurat-LO   |         |           |                         |   |
| Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan<br>Peraturan Perundang-Undangan-LO |         |           |                         |   |
| <b>Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO</b>                                  |         |           |                         |   |
| <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>  |         |           |                         |   |
| <b>SURPLUS NON OPERASIONAL</b>  |         |           |                         |   |
| Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset<br>Non Lancar-LO                    |         |           |                         |   |
| Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka<br>Panjang-LO                             |         |           |                         |   |
| <b>Jumlah Surplus Non Operasional</b>   |         |           |                         |   |
| <b>BEBAN</b>  |         |           |                         |   |
| <b>BEBAN OPERASI</b>  |         |           |                         |   |
| Beban Bunga   |         |           |                         |   |
| Beban Subsidi   |         |           |                         |   |
| Beban Hibah   |         |           |                         |   |
| Beban Bantuan Sosial  |         |           |                         |   |
| Beban Penyisihan Piutang  |         |           |                         |   |
| Beban Penyusutan  |         |           |                         |   |
| Beban Lain-lain   |         |           |                         |   |
| <b>Jumlah Beban Operasi</b>   |         |           |                         |   |
| <b>BEBAN TRANSFER</b>   |         |           |                         |   |
| Beban Bagi Hasil  |         |           |                         |   |
| Beban Bantuan Keuangan  |         |           |                         |   |
| <b>Jumlah beban Transfer</b>  |         |           |                         |   |
| <b>JUMLAH BEBAN</b>   |         |           |                         |   |
| <b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI</b>                                      |         |           |                         |   |
| <b>DEFISIT NON OPERASIONAL</b>  |         |           |                         |   |
| Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset<br>Non Lancar-LO                    |         |           |                         |   |
| Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang                                   |         |           |                         |   |
| <b>Jumlah Defisit Non Operasional</b>   |         |           |                         |   |
| <b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN<br/>NON OPERASIONAL</b>                 |         |           |                         |   |
| <b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR<br/>BIASA</b>                               |         |           |                         |   |
| <b>POS LUAR BIASA</b>   |         |           |                         |   |
| Pendapatan Luar Biasa   |         |           |                         |   |
| Beban Luar Biasa  |         |           |                         |   |
| <b>POS LUAR BIASA</b>   |         |           |                         |   |
| <b>SURPLUS/DEFISIT - LO</b>   |         |           |                         |   |

LO Pemda

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN  
LAPORAN OPERASIONAL  
Per 31 Desember Tahun N dan Tahun N-1

| URAIAN  | Tahun N | Tahun N-1 | Kenaikan<br>(Penurunan) | % |
|---|---------|-----------|-------------------------|---|
| 1   | 2       | 3         | 4                       | 5 |
| <b>PENDAPATAN</b>   |         |           |                         |   |
| <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH-LO</b>  |         |           |                         |   |
| Pendapatan Pajak Daerah-LO  |         |           |                         |   |
| Pendapatan Retribusi Daerah-LO  |         |           |                         |   |
| Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah<br>yang Dipisahkan-LO              |         |           |                         |   |
| Lain-lain PAD yang Sah-Lo   |         |           |                         |   |
| <b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah-LO</b>   |         |           |                         |   |
| <b>PENDAPATAN TRANSFER-LO</b>   |         |           |                         |   |
| Transfer Pemerintah Pusat-LO  |         |           |                         |   |
| Transfer Antar Pemerintah Daerah Lainnya-LO                                     |         |           |                         |   |
| <b>Jumlah Pendapatan Transfer-LO</b>  |         |           |                         |   |
| <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH-LO</b>   |         |           |                         |   |
| Pendapatan Hibah-LO   |         |           |                         |   |
| Dana Darurat-LO   |         |           |                         |   |
| Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan<br>Peraturan Perundang-Undangan-LO |         |           |                         |   |
| <b>Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO</b>                                  |         |           |                         |   |
| <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>  |         |           |                         |   |
| <b>SURPLUS NON OPERASIONAL</b>  |         |           |                         |   |
| Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset<br>Non Lancar-LO                    |         |           |                         |   |
| Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka<br>Panjang-LO                             |         |           |                         |   |
| <b>Jumlah Surplus Non Operasional</b>   |         |           |                         |   |
| <b>BEBAN</b>  |         |           |                         |   |
| <b>BEBAN OPERASI</b>  |         |           |                         |   |
| Beban Pegawai   |         |           |                         |   |
| Beban Barang Jasa   |         |           |                         |   |
| Beban Bunga   |         |           |                         |   |
| Beban Subsidi   |         |           |                         |   |
| Beban Hibah   |         |           |                         |   |
| Beban Bantuan Sosial  |         |           |                         |   |
| Beban Penyisihan Piutang  |         |           |                         |   |
| Beban Penyusutan  |         |           |                         |   |
| Beban Lain-lain   |         |           |                         |   |
| <b>Jumlah Beban Operasi</b>   |         |           |                         |   |
| <b>BEBAN TRANSFER</b>   |         |           |                         |   |
| Beban Bagi Hasil  |         |           |                         |   |
| Beban Bantuan Keuangan  |         |           |                         |   |
| <b>Jumlah beban Transfer</b>  |         |           |                         |   |
| <b>JUMLAH BEBAN</b>   |         |           |                         |   |
| <b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI</b>                                      |         |           |                         |   |
| <b>DEFISIT NON OPERASIONAL</b>  |         |           |                         |   |
| Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset<br>Non Lancar-LO                    |         |           |                         |   |
| Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang                                   |         |           |                         |   |
| <b>Jumlah Defisit Non Operasional</b>   |         |           |                         |   |
| <b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN<br/>NON OPERASIONAL</b>                 |         |           |                         |   |
| <b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>                                   |         |           |                         |   |
| <b>POS LUAR BIASA</b>   |         |           |                         |   |
| Pendapatan Luar Biasa   |         |           |                         |   |
| Beban Luar Biasa  |         |           |                         |   |
| <b>POS LUAR BIASA</b>   |         |           |                         |   |
| <b>SURPLUS/DEFISIT - LO</b>   |         |           |                         |   |

Cara pengisian LO adalah sebagai berikut :

- 1. Kolom 1 diisi nama pos rekening – nama rekening LO.
- 2. Kolom 2 diisi nilai uraian pos rekening – nama rekening LO tahun berjalan.
- 3. Kolom 3 diisi nilai uraian pos rekening – nama rekening LO tahun sebelum tahun berjalan.
- 4. Kolom 4 diisi nilai kenaikan/(penurunan) pos rekening – nama rekening LO tahun berjalan dibandingkan tahun sebelumnya (kolom 2 – kolom 3).
- 5. Kolom 5 diisi nilai prosentase kenaikan/(penurunan) pos rekening – nama rekening LO tahun berjalan dibandingkan tahun sebelumnya (kolom 4 dibagi kolom 3, dikali 100)

**Langkah VI : Menutup nilai saldo Laporan Operasional (LO)**

Setelah menyusun laporan operasional maka Tenaga Akuntansi pada entitas akuntansi harus melakukan jurnal penutup LO agar dapat menyusun laporan keuangan selanjutnya yaitu Neraca. Jurnal penutup ini dilakukan dengan maksud agar rekening/akun yang bersifat sementara (*nominal account*) nilai saldo dibuku besar terkait rekening/akun LO dan rekening/akun non anggaran kembali menjadi nihil pada akhir periode akuntansi. Rekening/akun nominal adalah rekening/akun yang digunakan dalam penyusunan Laporan Operasional, yaitu Pendapatan-LO, Beban dan RK. Berikut adalah jurnal penutup yang dimaksud :

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Pendapatan-LO         | xxx        |
| Penerimaan RK         | xxx        |
| Surplus/Defisit...-LO | xxx        |
| Beban                 | xxx        |
| Pengeluaran RK        | xxx        |
| <b>RK PPKD</b>        | <b>xxx</b> |

atau

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Pendapatan-LO         | xxx        |
| Penerimaan RK         | xxx        |
| <b>RK PPKD</b>        | <b>xxx</b> |
| Surplus/Defisit...-LO | xxx        |

|                |     |
|----------------|-----|
| Beban          | xxx |
| Pengeluaran RK | xxx |

Setelah membuat jurnal penutup LO, Tenaga Akuntansi pada entitas akuntansi menyusun Neraca Saldo setelah Penutupan LO.

**Langkah VII : Penyusunan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)**

Setelah LO tersusun, kemudian melakukan jurnal penutup LO, selanjutnya tenaga akuntansi pada entitas akuntansi menyusun Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) sebelum menyusun Neraca SKPD. LPE ini disusun berdasarkan Neraca Saldo setelah Penutup LO yang telah tersusun sebelumnya sebagai berikut :

**PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN  
(SKPD/SKPKD).....  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
Per 31 Desember Tahun N dan Tahun N-1**

| URAIAN  | Tahun N | Tahun N-1 |
|---|---------|-----------|
| 1   | 2       | 3         |
| EKUITAS AWAL  |         |           |
| SURPLUS/(DEFISIT)-LO                                      |         |           |
| RK PPKD   |         |           |
| DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR : |         |           |
| KOREKSI NILAI PERSEDIAAN                                  |         |           |
| SELISIH REVALUASI ASET TETAP                              |         |           |
| LAIN-LAIN   |         |           |
| EKUITAS AKHIR   |         |           |

Cara pengisian LPE adalah sebagai berikut :

1. Kolom 1 diisi nama uraian LPE.
2. Kolom 3 diisi nilai uraian LPE tahun berjalan.
3. Kolom 4 diisi nilai uraian LPE tahun sebelum tahun berjalan.

**Langkah VIII : Melakukan Penutup Akhir**

Setelah menyusun LPE maka Tenaga Akuntansi pada entitas akuntansi harus melakukan jurnal penutup akhir agar dapat menyusun laporan

keuangan selanjutnya yaitu Neraca. Jurnal penutup ini dilakukan dengan maksud menutup akun 3.1.01.02.01 (Surplus/(Defisit)-LO dan 3.1.03.01.01 (RK PPKD) untuk membentuk nilai akhir dari akun 3.1.01.01.01 (Ekuitas). Berikut adalah buku jurnal penutup akhir yang dimaksud :

atau

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Surplus/Defisit...-LO | xxx |
| RK PPKD               | xxx |
| Ekuitas               | xxx |

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Ekuitas               | xxx |
| Surplus/Defisit...-LO | xxx |
| RK PPKD               | xxx |

Setelah membuat jurnal penutup akhir, Tenaga Akuntansi pada entitas akuntansi menyusun Neraca Saldo Akhir. Neraca Saldo Akhir ini akan menjadi Neraca Awal untuk periode akuntansi yang selanjutnya.

**Langkah IX: Penyusunan Neraca**

Selanjutnya tenaga akuntansi pada entitas akuntansi menyusun Neraca. Neraca ini menyajikan informasi tentang posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca ini disusun berdasarkan Neraca Saldo akhir yang telah tersusun sebelumnya sebagai berikut :



Neraca SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN  
SKPD.....  
NERACA  
Per 31 Desember Tahun N dan Tahun N-1

| Uraian                                | Jumlah  |           |
|---------------------------------------|---------|-----------|
|                                       | Tahun N | Tahun N-1 |
| 1                                     | 2       | 3         |
| <b>ASET</b>                           |         |           |
| <b>ASET LANCAR</b>                    |         |           |
| Kas di Bendahara Pengeluaran          |         |           |
| Kas di Bendahara Penerimaan           |         |           |
| Piutang Pajak                         |         |           |
| Piutang Retribusi                     |         |           |
| Piutang Lainnya                       |         |           |
| Penyisihan Piutang                    |         |           |
| Persediaan                            |         |           |
| Belanja dibayar dimuka                |         |           |
| <b>Jumlah Aset Lancar</b>             |         |           |
| <b>ASET TETAP</b>                     |         |           |
| Tanah                                 |         |           |
| Peralatan dan Mesin                   |         |           |
| Gedung dan Bangunan                   |         |           |
| Jalan, Irigasi dan Jaringan           |         |           |
| Aset Tetap Lainnya                    |         |           |
| Konstruksi dalam Pengerjaan           |         |           |
| Akumulasi Penyusutan                  |         |           |
| <b>Jumlah Aset Tetap</b>              |         |           |
| <b>ASET LAINNYA</b>                   |         |           |
| Kemitraan dengan Pihak Ketiga         |         |           |
| Aset Tak Berwujud                     |         |           |
| Aset lain-Lain                        |         |           |
| <b>Jumlah Aset Lainnya</b>            |         |           |
| <b>JUMLAH ASET</b>                    |         |           |
| <b>KEWAJIBAN</b>                      |         |           |
| <b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>        |         |           |
| Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)  |         |           |
| Utang Bunga                           |         |           |
| Utang Belanja                         |         |           |
| Utang Jangka Pendek Lainnya           |         |           |
| <b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b> |         |           |
| <b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>               |         |           |
| <b>EKUITAS</b>                        |         |           |
| <b>EKUITAS</b>                        |         |           |
| Ekuitas                               |         |           |
| <b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>   |         |           |

Neraca SKPKD-PPKD

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN

SKPKD-PPKD

NERACA

Per 31 Desember Tahun N dan Tahun N-1

| Uraian  | Jumlah  |           |
|---|---------|-----------|
|   | Tahun N | Tahun N-1 |
| <b>ASET</b>   |         |           |
| <b>ASET LANCAR</b>                                      |         |           |
| Kas di Kas Daerah                                       |         |           |
| Investasi Jangka Pendek                                 |         |           |
| Piutang Lainnya   |         |           |
| Penyisihan Piutang                                      |         |           |
| Belanja dibayar dimuka                                  |         |           |
| Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara         |         |           |
| Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah         |         |           |
| Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat          |         |           |
| Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya |         |           |
| Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran                |         |           |
| Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi                       |         |           |
| <b>Jumlah Aset Lancar</b>                               |         |           |
|   |         |           |
| <b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>                         |         |           |
| <b>Investasi Nonpermanen</b>                            |         |           |
| Pinjaman Jangka Panjang                                 |         |           |
| Investasi dalam Surat Utang Negara                      |         |           |
| Investasi dalam Proyek Pembangunan                      |         |           |
| Investasi Nonpermanen Lainnya                           |         |           |
| <b>Jumlah Investasi Nonpermanen</b>                     |         |           |
|   |         |           |
| <b>Investasi Permanen</b>                               |         |           |
| Penyertaan Modal Pemerintah Daerah                      |         |           |
| Investasi Permanen Lainnya                              |         |           |
| <b>Jumlah Investasi Permanen</b>                        |         |           |
| <b>Jumlah Investasi Jangka Panjang</b>                  |         |           |
|   |         |           |
| <b>ASET TETAP</b>                                       |         |           |
| Tanah   |         |           |
| Peralatan dan Mesin                                     |         |           |
| Gedung dan Bangunan                                     |         |           |
| Jalan, Irigasi dan Jaringan                             |         |           |
| Aset Tetap Lainnya                                      |         |           |
| Konstruksi dalam Pengerjaan                             |         |           |
| Akumulasi Penyusutan                                    |         |           |
| <b>Jumlah Aset Tetap</b>                                |         |           |
|   |         |           |
| <b>DANA CADANGAN</b>                                    |         |           |
| Dana Cadangan   |         |           |
| <b>Jumlah Dana Cadangan</b>                             |         |           |
|   |         |           |
| <b>ASET LAINNYA</b>                                     |         |           |
| Kemitraan dengan Pihak Ketiga                           |         |           |
| Aset Tak Berwujud                                       |         |           |
| Aset Lain-lain  |         |           |
| <b>Jumlah Aset Lainnya</b>                              |         |           |
|   |         |           |
| <b>JUMLAH ASET</b>                                      |         |           |
|   |         |           |
| <b>KEWAJIBAN</b>  |         |           |
| <b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>                          |         |           |
| Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)                    |         |           |
| Utang Bunga   |         |           |
| Utang Pinjaman Jangka Pendek                            |         |           |
| Bagian Lancar Utang Jangka Panjang                      |         |           |
| Pendapatan Diterima Dimuka                              |         |           |
| Utang Belanja   |         |           |
| Utang Jangka Pendek Lainnya                             |         |           |
| <b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>                   |         |           |
|   |         |           |
| <b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>                         |         |           |

|  |  |  |
|--|--|--|
| Utang Kepada Pemerintah Pusat            |  |  |
| Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) |  |  |
| Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank |  |  |
| Utang kepada Masyarakat                  |  |  |
| <b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang</b>   |  |  |
| <b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>                  |  |  |
|  |  |  |
| <b>EKUITAS</b>                           |  |  |
| <b>EKUITAS</b>                           |  |  |
| Ekuitas                                  |  |  |
| <b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>      |  |  |

Neraca SKPKD-Kuasa BUD

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN  
SKPKD-Kuasa BUD  
NERACA  
Per 31 Desember Tahun N dan Tahun N-1

| Uraian                                | Jumlah  |           |
|---------------------------------------|---------|-----------|
|                                       | Tahun N | Tahun N-1 |
| 1                                     | 2       | 3         |
| <b>ASET</b>                           |         |           |
| <b>ASET LANCAR</b>                    |         |           |
| Kas di Kas Daerah                     |         |           |
| Investasi Jangka Pendek               |         |           |
| <b>Jumlah Aset Lancar</b>             |         |           |
|                                       |         |           |
| <b>JUMLAH ASET</b>                    |         |           |
|                                       |         |           |
| <b>KEWAJIBAN</b>                      |         |           |
| <b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>        |         |           |
| Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)  |         |           |
| <b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b> |         |           |
|                                       |         |           |
| <b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>               |         |           |
|                                       |         |           |
| <b>EKUITAS</b>                        |         |           |
| <b>EKUITAS</b>                        |         |           |
| Ekuitas                               |         |           |
| <b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>   |         |           |

Neraca Pemerintah Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN  
NERACA  
Per 31 Desember Tahun N dan Tahun N-1

| Uraian  | Jumlah  |           |
|---|---------|-----------|
|   | Tahun N | Tahun N-1 |
| 1   | 2       | 3         |
| <b>ASET</b>   |         |           |
| <b>ASET LANCAR</b>                                      |         |           |
| Kas di Kas Daerah                                       |         |           |
| Kas di Bendahara Pengeluaran                            |         |           |
| Kas di Bendahara Penerimaan                             |         |           |
| Investasi Jangka Pendek                                 |         |           |
| Piutang Pajak   |         |           |
| Piutang Retribusi                                       |         |           |
| Piutang Lainnya   |         |           |
| Penyisihan Piutang                                      |         |           |
| Belanja dibayar dimuka                                  |         |           |
| Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara         |         |           |
| Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah         |         |           |
| Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat          |         |           |
| Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya |         |           |

|  |  |  |
|--|--|--|
| Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran |  |  |
| Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi        |  |  |
| Persediaan                               |  |  |
| <b>Jumlah Aset Lancar</b>                |  |  |
|  |  |  |
| <b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>          |  |  |
| <b>Investasi Nonpermanen</b>             |  |  |
| Pinjaman Jangka Panjang                  |  |  |
| Investasi dalam Surat Utang Negara       |  |  |
| Investasi dalam Proyek Pembangunan       |  |  |
| Investasi Nonpermanen Lainnya            |  |  |
| <b>Jumlah Investasi Nonpermanen</b>      |  |  |
|  |  |  |
| <b>Investasi Permanen</b>                |  |  |
| Penyertaan Modal Pemerintah Daerah       |  |  |
| Investasi Permanen Lainnya               |  |  |
| <b>Jumlah Investasi Permanen</b>         |  |  |
| <b>Jumlah Investasi Jangka Panjang</b>   |  |  |
|  |  |  |
| <b>ASET TETAP</b>                        |  |  |
| Tanah                                    |  |  |
| Peralatan dan Mesin                      |  |  |
| Gedung dan Bangunan                      |  |  |
| Jalan, Irigasi dan Jaringan              |  |  |
| Aset Tetap Lainnya                       |  |  |
| Konstruksi dalam Pengerjaan              |  |  |
| Akumulasi Penyusutan                     |  |  |
| <b>Jumlah Aset Tetap</b>                 |  |  |
|  |  |  |
| <b>DANA CADANGAN</b>                     |  |  |
| Dana Cadangan                            |  |  |
| <b>Jumlah Dana Cadangan</b>              |  |  |
|  |  |  |
| <b>ASET LAINNYA</b>                      |  |  |
| Tagihan Penjualan Angsuran               |  |  |
| Tuntutan Ganti Rugi                      |  |  |
| Kemitraan dengan Pihak Ketiga            |  |  |
| Aset Tak Berwujud                        |  |  |
| Aset Lain-lain                           |  |  |
| <b>Jumlah Aset Lainnya</b>               |  |  |
|  |  |  |
| <b>JUMLAH ASET</b>                       |  |  |
|  |  |  |
| <b>KEWAJIBAN</b>                         |  |  |
| <b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>           |  |  |
| Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)     |  |  |
| Utang Bunga                              |  |  |
| Utang Pinjaman Jangka Pendek             |  |  |
| Bagian Lancar Utang Jangka Panjang       |  |  |
| Pendapatan Diterima Dimuka               |  |  |
| Utang Belanja                            |  |  |
| Utang Jangka Pendek Lainnya              |  |  |
| <b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>    |  |  |
|  |  |  |
| <b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>          |  |  |
| Utang Kepada Pemerintah Pusat            |  |  |
| Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) |  |  |
| Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank |  |  |
| Utang kepada Masyarakat                  |  |  |
| <b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang</b>   |  |  |
| <b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>                  |  |  |
|  |  |  |
| <b>EKUITAS</b>                           |  |  |
| <b>EKUITAS</b>                           |  |  |
| Ekuitas                                  |  |  |
| <b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>      |  |  |

Cara pengisian Neraca adalah sebagai berikut :

- 1. Kolom 1 diisi nama uraian Neraca.
- 2. Kolom 2 diisi nilai uraian Neraca tahun berjalan.
- 3. Kolom 3 diisi nilai uraian Neraca tahun sebelum tahun berjalan.

**Langkah X : Menyusun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL)**

Dari Laporan Realisasi Anggaran yang telah dibuat sebelumnya, khusus untuk Fungsi Akuntansi Pemerintah Daerah, menyusun Laporan Perubahan SAL (LP SAL). LPS SAL ini merupakan laporan atas SAL akhir yang dibentuk dari akumulasi SiLPA periode berjalan dan tahun-tahun sebelumnya. Berikut ini merupakan contoh format Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Daerah.

**PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN  
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH  
Per 31 Desember Tahun N dan Tahun N-1**

| URAIAN  | Tahun N | Tahun N-1 |
|---|---------|-----------|
| 1   | 2       | 3         |
| Saldo Anggaran Lebih Awal                                   |         |           |
| Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan |         |           |
| Subtotal  |         |           |
| Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)         |         |           |
| Subtotal  |         |           |
| Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya                |         |           |
| Lain-lain   |         |           |
| Saldo Anggaran Lebih Akhir                                  |         |           |

Cara pengisian LPE adalah sebagai berikut :

- 1. Kolom 1 diisi nama uraian LPE.
- 2. Kolom 2 diisi nilai uraian LPE tahun berjalan.
- 3. Kolom 3 diisi nilai uraian LPE tahun sebelum tahun berjalan.

**Langkah XI: Menyusun Laporan Arus Kas (LAK)**

Laporan Arus Kas disusun oleh unit pemerintahan yang melaksanakan fungsi perbendaharaan. Penyusunan laporan arus kas ini dilakukan dengan menggunakan metode langsung (*direct method*) terhadap seluruh transaksi yang dilakukan secara kas. Hal ini berarti bahwa laporan arus kas hampir

menyerupai laporan realisasi anggaran karena pendapatan dan belanja serta pembiayaan semua dicatat berdasarkan atas asas kas (*cash basis*).

Contoh bentuk Laporan Arus Kas, baik untuk laporan semesteran maupun untuk laporan akhir tahun bentuknya sama, adalah sebagai berikut :

**PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember Tahun N dan Tahun N-1**  
**Metode Langsung**

| Uraian   | Jumlah  |           |
|--|---------|-----------|
|  | Tahun N | Tahun N-1 |
| 1  | 2       | 3         |
| <b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>                       |         |           |
| <b>Arus Kas Masuk</b>  |         |           |
| Penerimaan Pajak Daerah                                      |         |           |
| Penerimaan Retribusi Daerah                                  |         |           |
| Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan |         |           |
| Penerimaan Lain-lainPAD yang Sah                             |         |           |
| Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak                             |         |           |
| Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam                  |         |           |
| Penerimaan Dana Alokasi Umum                                 |         |           |
| Penerimaan Dana AlokasiKhusus                                |         |           |
| Penerimaan Dana Otonomi Khusus                               |         |           |
| Penerimaan Dana Penyesuaian                                  |         |           |
| Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak                       |         |           |
| Penerimaan Bagi Hasil Lainnya                                |         |           |
| Penerimaan Hibah   |         |           |
| Penerimaan Dana Darurat                                      |         |           |
| Penerimaan Lainnya   |         |           |
| Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa                        |         |           |
| <b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>                                 |         |           |
|  |         |           |
| <b>Arus Keluar Kas</b>                                       |         |           |
| Pembayaran Pegawai   |         |           |
| Pembayaran Barang  |         |           |
| Pembayaran Bunga   |         |           |
| Pembayaran Subsidi   |         |           |
| Pembayaran Hibah   |         |           |
| Pembayaran Bantuan Sosial                                    |         |           |
| Pembayaran Tak Terduga                                       |         |           |
| Pembayaran Bagi Hasil Pajak                                  |         |           |
| Pembayaran Bagi Hasil Retribusi                              |         |           |
| Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya                     |         |           |
| Pembayaran Kejadian Luar Biasa                               |         |           |
| <b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>                                |         |           |
| <b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>                |         |           |
|  |         |           |
| <b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>                     |         |           |
| <b>Arus Masuk Kas</b>  |         |           |
| Pencairan Dana Cadangan                                      |         |           |
| Penjualan atas Tanah   |         |           |
| Penjualan atas Peralatan dan Mesin                           |         |           |
| Penjualan atas Gedung dan Bangunan                           |         |           |
| Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan                   |         |           |
| Penjualan Aset Tetap   |         |           |
| Penjualan Aset Lainnya                                       |         |           |
| Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan              |         |           |
| Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen                  |         |           |
| <b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>                                 |         |           |
|  |         |           |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>Arus Keluar Kas</b>   |  |  |
| Pembentukan Dana Cadangan  |  |  |
| Perolehan Tanah  |  |  |
| Perolehan Tanah dan Mesin  |  |  |
| Perolehan Gedung dan Bangunan  |  |  |
| Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan                                |  |  |
| Perolehan Aset Tetap Lainnya   |  |  |
| Perolehan Aset Lainnya   |  |  |
| Penyertaan Modal Pemerintah Daerah                                   |  |  |
| Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen                         |  |  |
| <b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>  |  |  |
| <b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>                      |  |  |
|  |  |  |
| <b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>                             |  |  |
| <b>Arus Masuk Kas</b>  |  |  |
| Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat                             |  |  |
| Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Daerah Lainnya                    |  |  |
| Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank                        |  |  |
| Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bukan Bank                  |  |  |
| Pinjaman Dalam Negeri – Obligasi                                     |  |  |
| Pinjaman Dalam Negeri – Lainnya                                      |  |  |
| Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara                 |  |  |
| Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah                 |  |  |
| Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya         |  |  |
| <b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>   |  |  |
| <b>Arus Keluar Kas</b>   |  |  |
| Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat            |  |  |
| Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Daerah Lainnya   |  |  |
| Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank       |  |  |
| Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bukan Bank |  |  |
| Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Obligasi                    |  |  |
| Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lainnya                     |  |  |
| Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara                          |  |  |
| Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah                          |  |  |
| Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya                  |  |  |
| <b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>  |  |  |
| <b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</b>                      |  |  |
|  |  |  |
| <b>Arus Kas dari Aktivitas Transitoris</b>                           |  |  |
| <b>Arus Masuk Kas</b>  |  |  |
| Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga                                  |  |  |
| <b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>   |  |  |
| <b>Arus Keluar Kas</b>   |  |  |
| Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)                           |  |  |
| <b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>  |  |  |
| <b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris</b>                    |  |  |
| <b>Kenaikan/Penurunan Kas</b>  |  |  |
| <b>Saldo Awal Kas di BUD &amp; Kas di Bendahara Pengeluaran</b>      |  |  |
| <b>Saldo Akhir Kas di BUD</b>  |  |  |
| <b>Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran</b>                      |  |  |
| <b>Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan</b>                       |  |  |
| <b>Saldo Akhir Kas</b>   |  |  |

Cara pengisian laporan arus kas adalah sebagai berikut :

1. Kolom 1 diisi nama pos rekening – nama rekening laporan arus kas.
2. Kolom 2 diisi nilai arus kas per pos rekening pada tahun pelaporan.
3. Kolom 3 diisi nilai arus kas per pos rekening pada satu tahun sebelum

tahun pelaporan.

## **Langkah XII : Menyusun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)**

Setelah Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Neraca dan laporan Arus Kas dapat disusun maka PPK-SKPD/PPK-SKPKD yang mencatat transaksi Pemda dan Tenaga Akuntansi di Fungsi Akuntansi Pemda kemudian menyusun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang menjelaskan berbagai hal terkait dengan laporan keuangan yang disajikan sehingga laporan keuangan tersebut dapat dimengerti dan dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Hal-hal yang diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain:

- Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- Informasi tentang kebijakan keuangan dan ekonomi makro;
- Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Berikut ini merupakan contoh format Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kuningan.



**PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

| PENDAHULUAN |  |   |                  |
|-------------|--|---|------------------|
| Bab I       | Pendahuluan  |   |                  |
|             | 1.1  | Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah   |                  |
|             | 1.2  | Landasan hukum penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah  |                  |
|             | 1.3  | Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan pemerintah daerah   |                  |
| Bab II      | Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD |   |                  |
|             | 2.1  | Ekonomi makro   |                  |
|             | 2.2  | Kebijakan keuangan  |                  |
|             | 2.3  | Indikator pencapaian target kinerja APBD  |                  |
| Bab III     | Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah               |   |                  |
|             | 3.1  | Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah daerah   |                  |
|             | 3.2  | Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan   |                  |
| Bab IV      | Ikhtisar Pencapaian Kinerja Program                                  |   |                  |
|             | 4.1  | Ikhtisar Realisasi Pencapaian Sasaran Kinerja Program   |                  |
|             | 4.2  | Faktor Pendukung dan Penghambatan Pencapaian Kinerja  |                  |
| Bab V       | Kebijakan akuntansi  |   |                  |
|             | 5.1  | Entitas akuntansi / entitas pelaporan keuangan daerah   |                  |
|             | 5.2  | Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah  |                  |
| Bab VI      | Penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah                |   |                  |
|             | 6.1  | Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemerintah daerah  |                  |
|             |  | 5.1.1   | Pendapatan – LRA |
|             |  | 5.1.2   | Belanja          |
|             |  | 5.1.3   | Transfer         |
|             |  | 5.1.4   | Pembiayaan       |
|             |  | 5.1.5   | Pendapatan – LO  |
|             |  | 5.1.6   | Beban            |
|             |  | 5.1.7   | Aset             |
|             |  | 5.1.8   | Kewajiban        |
|             |  | 5.1.9   | Ekuitas Dana     |
|             | 6.2  | Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah. |                  |
| Bab VII     | Penutup  |   |                  |

## **SISTEM DAN PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)**

Bagian ini menjelaskan Sistem dan Prosedur Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

### **KEBIJAKAN UMUM**

Sistem akuntansi di Pemerintah Kabupaten Kuningan menggunakan konsep konsolidasian sehingga setiap entitas akuntansi, yaitu setiap SKPD, harus menjalankan sistem akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangannya masing-masing. Seluruh laporan keuangan SKPD kemudian dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan. Oleh karena itu maka Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh masing-masing SKPD di Pemerintah Kabupaten Kuningan merupakan dasar penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

SKPD sebagai entitas akuntansi menyajikan Laporan Keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
5. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).

Penyajian Laporan Keuangan dalam satu tahun anggaran dilakukan minimal dalam 2 kali, yaitu :

1. Semester, yaitu laporan keuangan untuk periode Januari – Juni.
2. Tahunan, yaitu laporan keuangan untuk periode satu tahun (Januari – Desember).

Namun untuk keperluan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik dengan melakukan rekonsiliasi data keuangan daerah maka penyajian laporan keuangan dalam satu tahun anggaran dilakukan secara triwulanan.

## **PIHAK-PIHAK TERKAIT**

Berbagai pihak/fungsi yang terkait dalam sistem dan prosedur laporan keuangan SKPD beserta tugas-tugasnya adalah :

1. Tenaga Akuntansi di Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)

Dalam pelaksanaan prosedur ini, Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Membuat laporan keuangan, yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
- b. Menyampaikan laporan keuangan SKPD yang disusunnya kepada PPK-SKPD.

2. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) : Sekretaris Badan/ Dinas atau Koordinator/ Kepala Sub Bagian Keuangan (Sekretariat Daerah, Badan, Kantor, Dinas, Rumah Sakit Umum Daerah Linggarjati, Kecamatan, dan Kelurahan), Kepala Bagian Keuangan (Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRD dan Rumah Sakit Umum Daerah 45).

Dalam pelaksanaan prosedur ini, PPK-SKPD memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Bertanggungjawab atas sistem akuntansi pelaporan keuangan SKPD yang dipimpinnya.
- b. Memeriksa dan menandatangani laporan keuangan SKPD yang disusun oleh Tenaga Akuntansi PPK-SKPD sesuai periodenya.
- c. Menyampaikan laporan keuangan SKPD yang disusunnya kepada Kepala SKPD (pengguna anggaran).

3. Pengguna Anggaran (Kepala SKPD) : Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, Kepala Satuan, Camat, Lurah, Asisten Administrasi, Sekretaris DPRD, dan Direktur.

Dalam pelaksanaan prosedur ini, Pengguna Anggaran memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menerima dan menyetujui laporan keuangan SKPD-nya yang telah dibuat oleh PPK-SKPD.
- b. Menyampaikan Laporan Keuangan SKPD-nya kepada PPKD

### **BUKU DAN ATAU FORMULIR YANG DIGUNAKAN**

Buku dan atau formulir yang digunakan dalam pelaksanaan sistem dan prosedur laporan keuangan ini adalah :

1. Neraca Saldo (NS)

Merupakan formulir yang digunakan untuk mencatat nilai saldo setiap rekening/akun per rincian objek yang berasal dari nilai saldo rekening/akun tersebut di buku besar/buku besar pembantu. Di neraca saldo ini dilihat atau diketahui jumlah nilai masing-masing rekening/akun dan jumlah nilai total dari seluruh rekening. Dalam sistem dan prosedur penyusunan laporan keuangan SKPD ini ada beberapa jenis neraca saldo yaitu : neraca saldo setelah penyesuaian; neraca saldo setelah penutup LRA; neraca saldo setelah penutup LO; dan neraca saldo akhir.

2. Buku Jurnal Penutup (JPn)

Merupakan buku jurnal yang digunakan untuk melakukan pencatatan akuntansi atas transaksi-transaksi non kas khususnya digunakan untuk menutup akun nominal atau akun sementara yang ada pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO). Dalam sistem dan prosedur penyusunan laporan keuangan SKPD ini ada beberapa jenis jurnal penutup yaitu : jurnal penutup LRA; jurnal penutup LO; dan jurnal penutup akhir

## **KERANGKA SISTEM**

Prosedur penyusunan laporan keuangan di SKPD dimulai saat Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD telah menghasilkan neraca saldo setelah penyesuaian sebagaimana yang telah dijelaskan dalam sistem dan prosedur lampiran 2 (sistem dan prosedur akuntansi SKPD).

Setelah itu Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD mulai menyusun laporan keuangan berupa LRA berdasarkan neraca saldo setelah penyesuaian, kemudian menyusun jurnal penutup LRA. Setelah menyusun jurnal penutup LRA, terbentuklah neraca saldo setelah penutup LRA untuk menyusun LO. Berdasarkan neraca saldo setelah penutup LRA, disusun laporan operasional, kemudian menyusun jurnal penutup LO yang selanjutnya menghasilkan neraca saldo setelah penutup LO. Berdasarkan neraca saldo setelah penutup LO, disusun LPE, kemudian menyusun jurnal penutup akhir, yang selanjutnya menghasilkan neraca saldo akhir. Berdasarkan neraca saldo akhir ini, disusun neraca.

Setelah LRA, LO, LPE dan Neraca disusun maka Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD melengkapi keempat laporan keuangan tersebut dengan membuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang berisi berbagai penjelasan yang diperlukan terkait dengan laporan keuangan yang disajikan. Kemudian laporan keuangan SKPD tersebut diserahkan Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD kepada PPK-SKPD untuk diperiksa. Setelah itu PPK-SKPD menyerahkan Laporan Keuangan kepada PPKD melalui Pengguna Anggaran paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Berdasarkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi maka PPKD menyusun laporan keuangan daerah. Penyusunan laporan keuangan daerah tersebut paling lambat diselesaikan 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sudah termasuk pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan oleh Inspektorat Daerah.

## **ALUR PROSEDUR TEKNIS**

Prosedur teknis penyusunan laporan keuangan SKPD ini dimulai dari penyiapan neraca saldo setelah penyesuaian hingga laporan keuangan disampaikan kepada PPKD oleh Kepala SKPD. Secara lebih rinci uraian alur prosedur ini adalah sebagai berikut :

### **Langkah I : Penyusunan Neraca Saldo setelah Penyesuaian**

Setelah seluruh penjurnalan transaksi dan penyesuaian serta koreksi di posting ke buku besar maka Tenaga Akuntansi di PPK - SKPD menyusun neraca saldo setelah penyesuaian. Misalkan terdapat neraca saldo setelah penyesuaian pada suatu SKPD sebagai berikut :

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN  
NERACA SALDO SETELAH PENYESUAIAN

Urusan : 1.01 - Urusan Wajib xxx  
Organisasi : 1.01.01 – SKPD xxx

Halaman .....

| Kode rekening |   |   |    |    | Uraian  | Neraca Saldo  |               |
|---------------|---|---|----|----|---|---------------|---------------|
|               |   |   |    |    |   | Debit         | Kredit        |
|               |   |   |    |    |   |               |               |
| 1             | 1 | 1 | 02 | 01 | Kas di Bendahara Penerimaan   | 0             |               |
| 1             | 1 | 1 | 03 | 01 | Kas di Bendahara Pengeluaran  | 5.000.000     |               |
| 1             | 1 | 3 | 01 | 15 | Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan                  | 0             |               |
| 1             | 1 | 7 | 01 | 01 | Persediaan ATK  | 500.000       |               |
| 1             | 3 | 2 | 04 | 01 | Kendaraan Bermotor Penumpang  | 325.000.000   |               |
| 1             | 3 | 3 | 01 | 01 | Bangunan Gedung Kantor  | 5.000.000.000 |               |
| 1             | 3 | 7 | 01 | 04 | Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor                       |               | 20.000.000    |
| 1             | 3 | 7 | 02 | 01 | Akumulasi Penyusutan Gedung   |               | 50.000.000    |
| 2             | 1 | 5 | 03 | 02 | Utang Belanja Modal Peralatan dan mesin                                 |               | 0             |
| 3             | 1 | 1 | 01 | 01 | Ekuitas   |               | 5.125.000.000 |
| 3             | 1 | 2 | 01 | 01 | Estimasi Pendapatan   | 400.000.000   |               |
| 3             | 1 | 2 | 03 | 01 | Apropriasi Belanja  |               | 550.000.000   |
| 3             | 1 | 2 | 05 | 01 | Estimasi Perubahan SAL  |               | 275.000.000   |
| 3             | 1 | 3 | 01 | 01 | RK PPKD   |               | 0             |
| 4             | 1 | 1 | 15 | 01 | Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA         |               | 20.000.000    |
| 4             | 1 | 2 | 05 | 01 | Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA                    |               | 15.000.000    |
| 5             | 1 | 1 | 01 | 01 | Belanja Gaji Pokok  | 200.000.000   |               |
| 5             | 1 | 1 | 01 | 02 | Belanja Tunjangan Keluarga  | 20.000.000    |               |
| 5             | 1 | 1 | 01 | 03 | Belanja Tunjangan Jabatan   | 25.000.000    |               |
| 5             | 2 | 2 | 01 | 01 | Belanja Alat Tulis Kantor   | 10.000.000    |               |
| 5             | 2 | 2 | 11 | 02 | Belanja Makan dan Minum Rapat   | 5.000.000     |               |
| 5             | 2 | 3 | 03 | 03 | Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor station wagon | 200.000.000   |               |
| 3             | 1 | 8 | 99 | 99 | Penerimaan RK PPKD  |               | 465.000.000   |
| 3             | 2 | 8 | 99 | 99 | Pengeluaran RK PPKD   | 35.000.000    |               |
| 7             | 1 | 1 | 15 | 01 | Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO          |               | 20.000.000    |
| 7             | 1 | 2 | 05 | 01 | Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO                     |               | 15.000.000    |
| 8             | 1 | 1 | 01 | 01 | Beban Gaji Pokok  | 200.000.000   |               |
| 8             | 1 | 1 | 01 | 02 | Beban Tunjangan Keluarga  | 20.000.000    |               |
| 8             | 1 | 1 | 01 | 03 | Beban Tunjangan Jabatan   | 25.000.000    |               |
| 8             | 1 | 2 | 01 | 01 | Beban Alat Tulis Kantor   | 9.500.000     |               |
| 8             | 1 | 2 | 11 | 02 | Beban Makan dan Minum Rapat   | 5.000.000     |               |
| 8             | 1 | 7 | 01 | 04 | Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor                           | 20.000.000    |               |
| 8             | 1 | 7 | 02 | 01 | Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja                           | 50.000.000    |               |
|               |   |   |    |    | Jumlah  | 6.555.000.000 | 6.555.000.000 |

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Kode rekening/akun yang dicantumkan dalam penyusunan neraca saldo tersebut adalah cukup kode rekening/akun dalam klasifikasi ekonomi hingga rincian obyek, sehingga tidak muncul kode program dan kegiatannya.

## **Langkah II : Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) SKPD**

Dengan menggunakan neraca saldo setelah penyesuaian tersebut diatas maka Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD dapat mulai menyusun laporan realisasi anggaran (LRA) SKPD yang menjadi tanggungjawabnya sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN  
NERACA SALDO SETELAH PENYESUAIAN

Urusan : 1.01 - Urusan Wajib xxx  
Organisasi : 1.01.01 – SKPD xxx

Halaman .....

| Kode rekening |   |   |    |    | Uraian  | Neraca Saldo  |               |
|---------------|---|---|----|----|---|---------------|---------------|
|               |   |   |    |    |   | Debit         | Kredit        |
|               |   |   |    |    |   |               |               |
| 1             | 1 | 1 | 02 | 01 | Kas di Bendahara Penerimaan   | 0             |               |
| 1             | 1 | 1 | 03 | 01 | Kas di Bendahara Pengeluaran  | 5.000.000     |               |
| 1             | 1 | 3 | 01 | 15 | Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan                  | 0             |               |
| 1             | 1 | 7 | 01 | 01 | Persediaan ATK  | 500.000       |               |
| 1             | 3 | 2 | 04 | 01 | Kendaraan Bermotor Penumpang  | 325.000.000   |               |
| 1             | 3 | 3 | 01 | 01 | Bangunan Gedung Kantor  | 5.000.000.000 |               |
| 1             | 3 | 7 | 01 | 04 | Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor                       |               | 20.000.000    |
| 1             | 3 | 7 | 02 | 01 | Akumulasi Penyusutan Gedung   |               | 50.000.000    |
| 2             | 1 | 5 | 03 | 02 | Utang Belanja Modal Peralatan dan mesin                                 |               | 0             |
| 3             | 1 | 1 | 01 | 01 | Ekuitas   |               | 5.125.000.000 |
| 3             | 1 | 2 | 01 | 01 | Estimasi Pendapatan   | 400.000.000   |               |
| 3             | 1 | 2 | 03 | 01 | Apropriasi Belanja  |               | 550.000.000   |
| 3             | 1 | 2 | 05 | 01 | Estimasi Perubahan SAL  |               | 275.000.000   |
| 3             | 1 | 3 | 01 | 01 | RK PPKD   |               | 0             |
| 4             | 1 | 1 | 15 | 01 | Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA         |               | 20.000.000    |
| 4             | 1 | 2 | 05 | 01 | Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA                    |               | 15.000.000    |
| 5             | 1 | 1 | 01 | 01 | Belanja Gaji Pokok  | 200.000.000   |               |
| 5             | 1 | 1 | 01 | 02 | Belanja Tunjangan Keluarga  | 20.000.000    |               |
| 5             | 1 | 1 | 01 | 03 | Belanja Tunjangan Jabatan   | 25.000.000    |               |
| 5             | 2 | 2 | 01 | 01 | Belanja Alat Tulis Kantor   | 10.000.000    |               |
| 5             | 2 | 2 | 11 | 02 | Belanja Makan dan Minum Rapat   | 5.000.000     |               |
| 5             | 2 | 3 | 03 | 03 | Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor station wagon | 200.000.000   |               |
| 3             | 1 | 8 | 99 | 99 | Penerimaan RK PPKD  |               | 465.000.000   |
| 3             | 2 | 8 | 99 | 99 | Pengeluaran RK PPKD   | 35.000.000    |               |
| 7             | 1 | 1 | 15 | 01 | Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO          |               | 20.000.000    |
| 7             | 1 | 2 | 05 | 01 | Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO                     |               | 15.000.000    |
| 8             | 1 | 1 | 01 | 01 | Beban Gaji Pokok  | 200.000.000   |               |
| 8             | 1 | 1 | 01 | 02 | Beban Tunjangan Keluarga  | 20.000.000    |               |
| 8             | 1 | 1 | 01 | 03 | Beban Tunjangan Jabatan   | 25.000.000    |               |
| 8             | 1 | 2 | 01 | 01 | Beban Alat Tulis Kantor   | 9.500.000     |               |
| 8             | 1 | 2 | 11 | 02 | Beban Makan dan Minum Rapat   | 5.000.000     |               |
| 8             | 1 | 7 | 01 | 04 | Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor                           | 20.000.000    |               |
| 8             | 1 | 7 | 02 | 01 | Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja                           | 50.000.000    |               |
|               |   |   |    |    | Jumlah  | 6.555.000.000 | 6.555.000.000 |

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)

NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)

NIP.....

Berdasarkan Neraca Saldo setelah penyesuaian diatas, gunakan nilai saldo kode akun 4 (pendapatan-LRA) dan kode 5 (belanja) untuk menyusun Laporan Realisasi Anggaran sebagai berikut :

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN  
SKPD .....  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

| Kode Rekening | Uraian   | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi            | Lebih (Kurang) |
|---------------|--|----------------------------|----------------------|----------------|
| <b>4</b>      | <b>Pendapatan</b>  |                            |                      |                |
| <b>4.1</b>    | <b>Pendapatan Asli Daerah</b>                                |                            |                      |                |
| 4.1.1         | Pendapatan pajak daerah                                      |                            | 20.000.000           |                |
| 4.1.2         | Pendapatan retribusi daerah                                  |                            | 15.000.000           |                |
| 4.1.3         | Pendapatan hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan |                            |                      |                |
| 4.1.4         | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah                    |                            |                      |                |
|               | <b>Jumlah</b>  |                            | <b>35.000.000</b>    |                |
| <b>5</b>      | <b>Belanja</b>   |                            |                      |                |
| <b>5.1</b>    | <b>Belanja Tidak Langsung</b>                                |                            |                      |                |
| 5.1.1         | Belanja Pegawai  |                            | 245.000.000          |                |
| <b>5.2</b>    | <b>Belanja Langsung</b>                                      |                            |                      |                |
| 5.2.1         | Belanja Pegawai  |                            |                      |                |
| 5.2.2         | Belanja Barang dan Jasa                                      |                            | 15.000.000           |                |
| 5.2.3         | Belanja Modal  |                            | 200.000.00           |                |
|               | <b>Jumlah</b>  |                            | <b>460.000.000</b>   |                |
|               | <b>Surplus / (Defisit)</b>                                   |                            | <b>(425.000.000)</b> |                |

PPK-SKPD  
  
(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Kepala SKPD  
  
(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Langkah III
: Menutup nilai saldo Laporan Realisasi Anggaran (LRA) SKPD

Setelah menyusun laporan realisasi anggaran maka Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD harus melakukan jurnal penutup LRA agar dapat menyusun laporan keuangan selanjutnya yaitu laporan operasional (LO). Jurnal penutup ini dilakukan dengan maksud agar rekening/akun yang bersifat sementara (*nominal account*) nilai saldo dibuku besar terkait rekening/akun LRA kembali menjadi nihil pada akhir periode akuntansi. Rekening/akun nominal adalah rekening/akun

yang digunakan dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, yaitu Pendapatan-LRA, Belanja, dan Pembiayaan. Untuk melakukan jurnal penutup LRA, kita persiapkan dulu Neraca Saldo Sesudah Penyesuaian yang paling terakhir yaitu :

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN  
NERACA SALDO SETELAH PENYESUAIAN

Urusan : 1.01 - Urusan Wajib xxx  
Organisasi : 1.01.01 – SKPD xxx

Halaman .....

| Kode rekening |   |   |    |    | Uraian  | Neraca Saldo  |               |
|---------------|---|---|----|----|---|---------------|---------------|
|               |   |   |    |    |   | Debit         | Kredit        |
|               |   |   |    |    |   |               |               |
| 1             | 1 | 1 | 02 | 01 | Kas di Bendahara Penerimaan   | 0             |               |
| 1             | 1 | 1 | 03 | 01 | Kas di Bendahara Pengeluaran  | 5.000.000     |               |
| 1             | 1 | 3 | 01 | 15 | Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan                  | 0             |               |
| 1             | 1 | 7 | 01 | 01 | Persediaan ATK  | 500.000       |               |
| 1             | 3 | 2 | 04 | 01 | Kendaraan Bermotor Penumpang  | 325.000.000   |               |
| 1             | 3 | 3 | 01 | 01 | Bangunan Gedung Kantor  | 5.000.000.000 |               |
| 1             | 3 | 7 | 01 | 04 | Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor                       |               | 20.000.000    |
| 1             | 3 | 7 | 02 | 01 | Akumulasi Penyusutan Gedung   |               | 50.000.000    |
| 2             | 1 | 5 | 03 | 02 | Utang Belanja Modal Peralatan dan mesin                                 |               | 0             |
| 3             | 1 | 1 | 01 | 01 | Ekuitas   |               | 5.125.000.000 |
| 3             | 1 | 2 | 01 | 01 | Estimasi Pendapatan   | 400.000.000   |               |
| 3             | 1 | 2 | 03 | 01 | Apropriasi Belanja  |               | 550.000.000   |
| 3             | 1 | 2 | 05 | 01 | Estimasi Perubahan SAL  |               | 275.000.000   |
| 3             | 1 | 3 | 01 | 01 | RK PPKD   |               | 0             |
| 4             | 1 | 1 | 15 | 01 | Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA         |               | 20.000.000    |
| 4             | 1 | 2 | 05 | 01 | Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA                    |               | 15.000.000    |
| 5             | 1 | 1 | 01 | 01 | Belanja Gaji Pokok  | 200.000.000   |               |
| 5             | 1 | 1 | 01 | 02 | Belanja Tunjangan Keluarga  | 20.000.000    |               |
| 5             | 1 | 1 | 01 | 03 | Belanja Tunjangan Jabatan   | 25.000.000    |               |
| 5             | 2 | 2 | 01 | 01 | Belanja Alat Tulis Kantor   | 10.000.000    |               |
| 5             | 2 | 2 | 11 | 02 | Belanja Makan dan Minum Rapat   | 5.000.000     |               |
| 5             | 2 | 3 | 03 | 03 | Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor station wagon | 200.000.000   |               |
| 3             | 1 | 8 | 99 | 99 | Penerimaan RK PPKD  |               | 465.000.000   |
| 3             | 2 | 8 | 99 | 99 | Pengeluaran RK PPKD   | 35.000.000    |               |
| 7             | 1 | 1 | 15 | 01 | Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO          |               | 20.000.000    |
| 7             | 1 | 2 | 05 | 01 | Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO                     |               | 15.000.000    |
| 8             | 1 | 1 | 01 | 01 | Beban Gaji Pokok  | 200.000.000   |               |
| 8             | 1 | 1 | 01 | 02 | Beban Tunjangan Keluarga  | 20.000.000    |               |
| 8             | 1 | 1 | 01 | 03 | Beban Tunjangan Jabatan   | 25.000.000    |               |
| 8             | 1 | 2 | 01 | 01 | Beban Alat Tulis Kantor   | 9.500.000     |               |
| 8             | 1 | 2 | 11 | 02 | Beban Makan dan Minum Rapat   | 5.000.000     |               |
| 8             | 1 | 7 | 01 | 04 | Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor                           | 20.000.000    |               |
| 8             | 1 | 7 | 02 | 01 | Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja                           | 50.000.000    |               |
|               |   |   |    |    | Jumlah  | 6.555.000.000 | 6.555.000.000 |

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Berdasarkan nilai saldo kode akun 4 (pendapatan-LRA) dan kode akun 5 (belanja) maka dibuatlah jurnal penutup LRA dengan cara mencatat balik akun 4 (pendapatan-LRA) dari semula di kredit menjadi di debet dan mencatat balik kode akun 5 (belanja) dari semula di debet menjadi di kredit. Selain kedua akun tersebut, ada akun lain yang juga ditutup yaitu akun anggaran seperti estimasi pendapatan, apropriasi belanja dan estimasi perubahan SAL sebagai berikut :

**KABUPATEN KUNINGAN**  
**BUKU JURNAL PENUTUP LRA (JP LRA)**

**SKPD** : .....( SKPD Kabupaten Kuningan)

| Halaman 01 |                     |               |               |   |   |    |    |   |      |               |                |
|------------|---------------------|---------------|---------------|---|---|----|----|---|------|---------------|----------------|
| Tanggal    | Nomor               |               | Kode Rekening |   |   |    |    | Uraian  | Ref. | Debit<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|            | Bukti<br>Penerimaan | Bukti<br>Lain |               |   |   |    |    |   |      |               |                |
| 1          | 2                   |               | 3             |   |   |    |    | 4   | 5    | 6             | 7              |
| 31/12/22   |                     |               | 3             | 1 | 2 | 03 | 01 | Apropriasi Belanja  |      | 550.000.000   |                |
|            |                     |               | 3             | 1 | 2 | 05 | 01 | Estimasi Perubahan SAL  |      | 275.000.000   |                |
|            |                     |               | 4             | 1 | 1 | 15 | 01 | Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA         |      | 20.000.000    |                |
|            |                     |               | 4             | 1 | 2 | 05 | 01 | Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA                    |      | 15.000.000    |                |
|            |                     |               | 3             | 1 | 2 | 01 | 01 | Estimasi Pendapatan   |      |               | 400.000.000    |
|            |                     |               | 5             | 1 | 1 | 01 | 01 | Belanja Gaji Pokok  |      |               | 200.000.000    |
|            |                     |               | 5             | 1 | 1 | 01 | 02 | Belanja Tunjangan Keluarga  |      |               | 20.000.000     |
|            |                     |               | 5             | 1 | 1 | 01 | 03 | Belanja Tunjangan Jabatan   |      |               | 25.000.000     |
|            |                     |               | 5             | 2 | 2 | 01 | 01 | Belanja Alat Tulis Kantor   |      |               | 10.000.000     |
|            |                     |               |               |   |   |    |    |   |      |               |                |
|            |                     |               | 5             | 2 | 2 | 11 | 02 | Belanja Makan dan Minum Rapat   |      |               | 5.000.000      |
|            |                     |               | 5             | 2 | 3 | 03 | 03 | Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor station wagon |      |               | 200.000.000    |
|            |                     |               |               |   |   |    |    |   |      |               |                |
| Jumlah     |                     |               |               |   |   |    |    |   |      | 860.000.000   | 860.000.000    |

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Setelah dilakukan jurnal penutup LRA tersebut maka terbentuklah Neraca Saldo setelah penutup LRA sebagai berikut :

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN  
NERACA SALDO SETELAH PENUTUP LRA

Urusan : 1.01 - Urusan Wajib xxx  
Organisasi : 1.01.01 – SKPD xxx

Halaman .....

| Kode rekening |   |   |    |    | Uraian   | Neraca Saldo  |               |
|---------------|---|---|----|----|--|---------------|---------------|
|               |   |   |    |    |  | Debit         | Kredit        |
|               |   |   |    |    |  |               |               |
| 1             | 1 | 1 | 02 | 01 | Kas di Bendahara Penerimaan                                    | 0             |               |
| 1             | 1 | 1 | 03 | 01 | Kas di Bendahara Pengeluaran                                   | 5.000.000     |               |
| 1             | 1 | 3 | 01 | 15 | Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan         | 0             |               |
| 1             | 1 | 7 | 01 | 01 | Persediaan ATK   | 500.000       |               |
| 1             | 3 | 2 | 04 | 01 | Kendaraan Bermotor Penumpang                                   | 325.000.000   |               |
| 1             | 3 | 3 | 01 | 01 | Bangunan Gedung Kantor   | 5.000.000.000 |               |
| 1             | 3 | 7 | 01 | 04 | Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor              |               | 20.000.000    |
| 1             | 3 | 7 | 02 | 01 | Akumulasi Penyusutan Gedung                                    |               | 50.000.000    |
| 2             | 1 | 5 | 03 | 02 | Utang Belanja Modal Peralatan dan mesin                        |               | 0             |
| 3             | 1 | 1 | 01 | 01 | Ekuitas  |               | 5.125.000.000 |
| 3             | 1 | 3 | 01 | 01 | RK PPKD  |               | 0             |
| 3             | 1 | 8 | 99 | 99 | Penerimaan RK PPKD   |               | 465.000.000   |
| 3             | 2 | 8 | 99 | 99 | Pengeluaran RK PPKD  | 35.000.000    |               |
| 7             | 1 | 1 | 15 | 01 | Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO |               | 20.000.000    |
| 7             | 1 | 2 | 05 | 01 | Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO            |               | 15.000.000    |
| 8             | 1 | 1 | 01 | 01 | Beban Gaji Pokok   | 200.000.000   |               |
| 8             | 1 | 1 | 01 | 02 | Beban Tunjangan Keluarga                                       | 20.000.000    |               |
| 8             | 1 | 1 | 01 | 03 | Beban Tunjangan Jabatan  | 25.000.000    |               |
| 8             | 1 | 2 | 01 | 01 | Beban Alat Tulis Kantor  | 9.500.000     |               |
| 8             | 1 | 2 | 11 | 02 | Beban Makan dan Minum Rapat                                    | 5.000.000     |               |
| 8             | 1 | 7 | 01 | 04 | Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor                  | 20.000.000    |               |
| 8             | 1 | 7 | 02 | 01 | Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja                  | 50.000.000    |               |
|               |   |   |    |    | Jumlah   | 5.695.000.000 | 5.695.000.000 |

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Pada Neraca Saldo setelah penutup LRA ini sudah tidak tersaji lagi akun-akun pendapatan-LRA, belanja dan akun-akun anggaran.

Langkah IV: Penyusunan Laporan Operasional (LO) SKPD

Laporan Operasional (LO) SKPD ini menyajikan informasi pendapatan-LO dan beban SKPD yang masing-masing diperbandingkan dengan pendapatan-LO dan beban SKPD tahun sebelumnya untuk diketahui kenaikan/penurunannya baik dalam angka maupun prosentase. LO SKPD ini disusun berdasarkan Neraca Saldo setelah Penutup LRA sebagai berikut :

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN  
NERACA SALDO SETELAH PENYESUAIAN

Urusan : 1.01 - Urusan Wajib xxx  
Organisasi : 1.01.01 – SKPD xxx

Halaman .....

| Kode rekening |   |   |    |    | Uraian   | Neraca Saldo  |               |
|---------------|---|---|----|----|--|---------------|---------------|
|               |   |   |    |    |  | Debit         | Kredit        |
|               |   |   |    |    |  |               |               |
| 1             | 1 | 1 | 02 | 01 | Kas di Bendahara Penerimaan                                    | 0             |               |
| 1             | 1 | 1 | 03 | 01 | Kas di Bendahara Pengeluaran                                   | 5.000.000     |               |
| 1             | 1 | 3 | 01 | 15 | Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan         | 0             |               |
| 1             | 1 | 7 | 01 | 01 | Persediaan ATK   | 500.000       |               |
| 1             | 3 | 2 | 04 | 01 | Kendaraan Bermotor Penumpang                                   | 325.000.000   |               |
| 1             | 3 | 3 | 01 | 01 | Bangunan Gedung Kantor   | 5.000.000.000 |               |
| 1             | 3 | 7 | 01 | 04 | Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor              |               | 20.000.000    |
| 1             | 3 | 7 | 02 | 01 | Akumulasi Penyusutan Gedung                                    |               | 50.000.000    |
| 2             | 1 | 5 | 03 | 02 | Utang Belanja Modal Peralatan dan mesin                        |               | 0             |
| 3             | 1 | 1 | 01 | 01 | Ekuitas  |               | 5.125.000.000 |
| 3             | 1 | 3 | 01 | 01 | RK PPKD  |               | 0             |
| 3             | 1 | 8 | 99 | 99 | Penerimaan RK PPKD   |               | 465.000.000   |
| 3             | 2 | 8 | 99 | 99 | Pengeluaran RK PPKD  | 35.000.000    |               |
| 7             | 1 | 1 | 15 | 01 | Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO |               | 20.000.000    |
| 7             | 1 | 2 | 05 | 01 | Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO            |               | 15.000.000    |
| 8             | 1 | 1 | 01 | 01 | Beban Gaji Pokok   | 200.000.000   |               |
| 8             | 1 | 1 | 01 | 02 | Beban Tunjangan Keluarga                                       | 20.000.000    |               |
| 8             | 1 | 1 | 01 | 03 | Beban Tunjangan Jabatan  | 25.000.000    |               |
| 8             | 1 | 2 | 01 | 01 | Beban Alat Tulis Kantor  | 9.500.000     |               |
| 8             | 1 | 2 | 11 | 02 | Beban Makan dan Minum Rapat                                    | 5.000.000     |               |
| 8             | 1 | 7 | 01 | 04 | Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor                  | 20.000.000    |               |
| 8             | 1 | 7 | 02 | 01 | Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja                  | 50.000.000    |               |
|               |   |   |    |    | Jumlah   | 5.695.000.000 | 5.695.000.000 |

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penutup LRA diatas, gunakan nilai saldo kode akun 7 (pendapatan-LO) dan nilai saldo kode akun 8 (beban) untuk menyusun Laporan Operasional SKPD sebagai berikut :

**PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN**  
**SKPD .....**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**Per 31 Desember 20X1 dan 20X0**

| URAIAN  | 20X1                 | 20X0 | Kenaikan<br>(Penurunan) | % |
|---|----------------------|------|-------------------------|---|
| <b>PENDAPATAN</b>                             |                      |      |                         |   |
| <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>                 |                      |      |                         |   |
| Pendapatan Pajak Daerah                       | 20.000.000           |      |                         |   |
| Pendapatan Retribusi Daerah                   | 15.000.000           |      |                         |   |
| Lain-lain PAD yang Sah                        |                      |      |                         |   |
| <b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>          | <b>35.000.000</b>    |      |                         |   |
|   |                      |      |                         |   |
| <b>BEBAN</b>                                  |                      |      |                         |   |
| <b>BEBAN OPERASI</b>                          |                      |      |                         |   |
| Beban Pegawai                                 |                      |      |                         |   |
| Beban Gaji Pokok                              | 200.000.000          |      |                         |   |
| Beban Tunjangan Keluarga                      | 20.000.000           |      |                         |   |
| Beban Alat Tulis Kantor                       | 25.000.000           |      |                         |   |
| Beban Barang Jasa                             |                      |      |                         |   |
| Beban Alat Tulis Kantor                       | 9.500.000            |      |                         |   |
| Beban Makan dan Minum Rapat                   | 5.000.000            |      |                         |   |
| Beban Bunga                                   |                      |      |                         |   |
| Beban Subsidi                                 |                      |      |                         |   |
| Beban Hibah                                   |                      |      |                         |   |
| Beban Bantuan Sosial                          |                      |      |                         |   |
| Beban Penyusutan                              |                      |      |                         |   |
| Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor | 20.000.000           |      |                         |   |
| Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja | 50.000.000           |      |                         |   |
| Beban Lain-lain                               |                      |      |                         |   |
| <b>Jumlah Beban Operasi</b>                   | <b>329.500.000</b>   |      |                         |   |
|   |                      |      |                         |   |
| <b>JUMLAH BEBAN</b>                           | <b>329.500.000</b>   |      |                         |   |
|   |                      |      |                         |   |
| <b>SURPLUS/(DEFISIT)-LO</b>                   | <b>(249.500.000)</b> |      |                         |   |

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....



Langkah V : Menutup nilai saldo Laporan Operasional SKPD

Setelah menyusun laporan operasional SKPD maka Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD harus melakukan jurnal penutup LO SKPD agar dapat menyusun laporan keuangan selanjutnya yaitu Neraca. Jurnal penutup ini dilakukan dengan maksud agar rekening/akun yang bersifat sementara (*nominal account*) nilai saldo dibuku besar terkait rekening/akun LO kembali menjadi nihil pada akhir periode akuntansi. Rekening/akun nominal adalah rekening/akun yang digunakan dalam penyusunan Laporan Operasional, yaitu Pendapatan-LO dan Beban. Untuk melakukan jurnal penutup LRA, kita persiapkan dulu Neraca Saldo setelah penutup LRA yang paling terakhir yaitu :

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN  
NERACA SALDO SETELAH PENUTUP LRA

Urusan : 1.01 - Urusan Wajib xxx  
Organisasi : 1.01.01 – SKPD xxx

Halaman .....

| Kode rekening |   |   |    |    | Uraian   | Neraca Saldo  |               |
|---------------|---|---|----|----|--|---------------|---------------|
|               |   |   |    |    |  | Debit         | Kredit        |
|               |   |   |    |    |  |               |               |
| 1             | 1 | 1 | 02 | 01 | Kas di Bendahara Penerimaan                                    | 0             |               |
| 1             | 1 | 1 | 03 | 01 | Kas di Bendahara Pengeluaran                                   | 5.000.000     |               |
| 1             | 1 | 3 | 01 | 15 | Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan         | 0             |               |
| 1             | 1 | 7 | 01 | 01 | Persediaan ATK   | 500.000       |               |
| 1             | 3 | 2 | 04 | 01 | Kendaraan Bermotor Penumpang                                   | 325.000.000   |               |
| 1             | 3 | 3 | 01 | 01 | Bangunan Gedung Kantor   | 5.000.000.000 |               |
| 1             | 3 | 7 | 01 | 04 | Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor              |               | 20.000.000    |
| 1             | 3 | 7 | 02 | 01 | Akumulasi Penyusutan Gedung                                    |               | 50.000.000    |
| 2             | 1 | 5 | 03 | 02 | Utang Belanja Modal Peralatan dan mesin                        |               | 0             |
| 3             | 1 | 1 | 01 | 01 | Ekuitas  |               | 5.125.000.000 |
| 3             | 1 | 3 | 01 | 01 | RK PPKD  |               | 0             |
| 3             | 1 | 8 | 99 | 99 | Penerimaan RK PPKD   |               | 465.000.000   |
| 3             | 2 | 8 | 99 | 99 | Pengeluaran RK PPKD  | 35.000.000    |               |
| 7             | 1 | 1 | 15 | 01 | Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO |               | 20.000.000    |
| 7             | 1 | 2 | 05 | 01 | Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO            |               | 15.000.000    |
| 8             | 1 | 1 | 01 | 01 | Beban Gaji Pokok   | 200.000.000   |               |
| 8             | 1 | 1 | 01 | 02 | Beban Tunjangan Keluarga                                       | 20.000.000    |               |
| 8             | 1 | 1 | 01 | 03 | Beban Tunjangan Jabatan  | 25.000.000    |               |
| 8             | 1 | 2 | 01 | 01 | Beban Alat Tulis Kantor  | 9.500.000     |               |
| 8             | 1 | 2 | 11 | 02 | Beban Makan dan Minum Rapat                                    | 5.000.000     |               |
| 8             | 1 | 7 | 01 | 04 | Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor                  | 20.000.000    |               |
| 8             | 1 | 7 | 02 | 01 | Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja                  | 50.000.000    |               |
|               |   |   |    |    | Jumlah   | 5.695.000.000 | 5.695.000.000 |

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)

(tanda tangan)  
(nama lengkap)

NIP.....

NIP.....

Berdasarkan nilai saldo kode akun 7 (pendapatan-LO) dan kode akun 8 (beban) maka dibuatlah jurnal penutup LO dengan cara mencatat balik akun 7 (pendapatan-LO) dari semula di kredit menjadi di debet dan mencatat balik kode akun 8 (beban) dari semula di debet menjadi di kredit. Selisihnya akan membentuk suatu nilai yang dicatat dalam akun surplus/(defisit)-LO. Selain itu dilakukan pula penutupan akun 3.1.8.99.99 (Penerimaan RK PPKD) dan akun 3.2.8.99.99 (Pengeluaran RK PPKD) untuk membentuk akun 3.1.3.01.01 (RK PPKD). Berikut adalah buku jurnal penutup LO yang dimaksud :

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU JURNAL PENUTUP LO (JP LO)

SKPD : .....( SKPD Kabupaten Kuningan)

Halaman 01

| Tanggal  | Nomor            |            | Kode Rekening |   |   |    |    | Uraian   | Ref. | Debit<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----------|------------------|------------|---------------|---|---|----|----|--|------|---------------|----------------|
|          | Bukti Penerimaan | Bukti Lain |               |   |   |    |    |  |      |               |                |
| 1        | 2                |            | 3             |   |   |    |    | 4  | 5    | 6             | 7              |
|          |                  |            |               |   |   |    |    |  |      |               |                |
| 31/12/22 |                  |            | 7             | 1 | 1 | 15 | 01 | Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO |      | 20.000.000    |                |
|          |                  |            | 7             | 1 | 2 | 05 | 01 | Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO            |      | 15.000.000    |                |
|          |                  |            | 3             | 1 | 1 | 02 | 01 | Surplus/(Defisit)-LO   |      | 294.500.000   |                |
|          |                  |            | 8             | 1 | 1 | 01 | 01 | Beban Gaji Pokok   |      |               | 200.000.000    |
|          |                  |            | 8             | 1 | 1 | 01 | 02 | Beban Tunjangan Keluarga                                       |      |               | 20.000.000     |
|          |                  |            | 8             | 1 | 1 | 01 | 03 | Beban Tunjangan Jabatan  |      |               | 25.000.000     |
|          |                  |            | 8             | 1 | 2 | 01 | 01 | Beban Alat Tulis Kantor  |      |               | 9.500.000      |
|          |                  |            | 8             | 1 | 2 | 11 | 02 | Beban Makan dan Minum Rapat                                    |      |               | 5.000.000      |
|          |                  |            | 8             | 1 | 7 | 01 | 04 | Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor                  |      |               | 20.000.000     |
|          |                  |            | 8             | 1 | 7 | 02 | 01 | Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja                  |      |               | 50.000.000     |
| 31/12/22 |                  |            | 3             | 1 | 8 | 99 | 99 | RK PPKD Penerimaan   |      | 465.000.000   |                |
|          |                  |            | 3             | 2 | 8 | 99 | 99 | RK PPKD Pengeluaran  |      |               | 35.000.000     |
|          |                  |            | 3             | 1 | 3 | 01 | 01 | RK PPKD  |      |               | 430.000.000    |
|          |                  |            |               |   |   |    |    |  |      |               |                |
| Jumlah   |                  |            |               |   |   |    |    |  |      | 329.500.000   | 329.500.000    |

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Setelah dilakukan jurnal penutup LO tersebut maka terbentuklah Neraca Saldo setelah penutup LO sebagai berikut :

**PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN**  
**NERACA SALDO SETELAH PENUTUP LO**

Urusan : 1.01 - Urusan Wajib xxx  
Organisasi : 1.01.01 – SKPD xxx

Halaman .....

| Kode rekening |   |   |    |    | Uraian   | Neraca Saldo  |               |
|---------------|---|---|----|----|--|---------------|---------------|
|               |   |   |    |    |  | Debit         | Kredit        |
|               |   |   |    |    |  |               |               |
| 1             | 1 | 1 | 02 | 01 | Kas di Bendahara Penerimaan                            | 0             |               |
| 1             | 1 | 1 | 03 | 01 | Kas di Bendahara Pengeluaran                           | 5.000.000     |               |
| 1             | 1 | 3 | 01 | 15 | Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan | 0             |               |
| 1             | 1 | 7 | 01 | 01 | Persediaan ATK   | 500.000       |               |
| 1             | 3 | 2 | 04 | 01 | Kendaraan Bermotor Penumpang                           | 325.000.000   |               |
| 1             | 3 | 3 | 01 | 01 | Bangunan Gedung Kantor                                 | 5.000.000.000 |               |
| 1             | 3 | 7 | 01 | 04 | Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor      |               | 20.000.000    |
| 1             | 3 | 7 | 02 | 01 | Akumulasi Penyusutan Gedung                            |               | 50.000.000    |
| 2             | 1 | 5 | 03 | 02 | Utang Belanja Modal Peralatan dan mesin                |               | 0             |
| 3             | 1 | 1 | 01 | 01 | Ekuitas  |               | 5.125.000.000 |
| 3             | 1 | 1 | 02 | 01 | Surplus/(Defisit)-LO                                   | 294.500.000   |               |
| 3             | 1 | 3 | 01 | 01 | RK PPKD  |               | 430.000.000   |
|               |   |   |    |    | Jumlah   | 5.625.000.000 | 5.625.000.000 |

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)

NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)

NIP.....

Pada Neraca Saldo setelah penutup LO ini sudah tidak tersaji lagi akun-akun pendapatan-LO, beban, RK PPKD Penerimaan dan RK PPKD Pengeluaran.

**Langkah VI: Penyusunan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) SKPD**

Setelah LO SKPD tersusun, kemudian melakukan jurnal penutup LO, selanjutnya tenaga akuntansi SKPD menyusun Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) SKPD sebelum menyusun Neraca SKPD. LPE SKPD ini disusun berdasarkan Neraca Saldo setelah Penutup LO yang telah tersusun sebelumnya sebagai berikut :

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN  
NERACA SALDO SETELAH PENUTUP LO

Urusan : 1.01 - Urusan Wajib xxx  
Organisasi : 1.01.01 – SKPD xxx

Halaman .....

| Kode rekening |   |   |    |    | Uraian   | Neraca Saldo  |               |
|---------------|---|---|----|----|--|---------------|---------------|
|               |   |   |    |    |  | Debit         | Kredit        |
|               |   |   |    |    |  |               |               |
| 1             | 1 | 1 | 02 | 01 | Kas di Bendahara Penerimaan                            | 0             |               |
| 1             | 1 | 1 | 03 | 01 | Kas di Bendahara Pengeluaran                           | 5.000.000     |               |
| 1             | 1 | 3 | 01 | 15 | Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan | 0             |               |
| 1             | 1 | 7 | 01 | 01 | Persediaan ATK   | 500.000       |               |
| 1             | 3 | 2 | 04 | 01 | Kendaraan Bermotor Penumpang                           | 325.000.000   |               |
| 1             | 3 | 3 | 01 | 01 | Bangunan Gedung Kantor                                 | 5.000.000.000 |               |
| 1             | 3 | 7 | 01 | 04 | Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor      |               | 20.000.000    |
| 1             | 3 | 7 | 02 | 01 | Akumulasi Penyusutan Gedung                            |               | 50.000.000    |
| 2             | 1 | 5 | 03 | 02 | Utang Belanja Modal Peralatan dan mesin                |               | 0             |
| 3             | 1 | 1 | 01 | 01 | Ekuitas  |               | 5.125.000.000 |
| 3             | 1 | 1 | 02 | 01 | Surplus/(Defisit)-LO                                   | 294.500.000   |               |
| 3             | 1 | 3 | 01 | 01 | RK PPKD  |               | 430.000.000   |
|               |   |   |    |    | Jumlah   | 5.625.000.000 | 5.625.000.000 |

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)

NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)

NIP.....

Berdasarkan semua nilai saldo kode akun 3 seperti 3.1.1.01.01 (Ekuitas), 3.1.1.02.01 (Surplus/(Deifisit)-LO dan 3.1.3.01.01 (RK PPKD) maka dibuatlah LPE SKPD sebagai berikut :

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN  
SKPD .....  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
Per 31 Desember 20X1 dan 20X0

| URAIAN  | 20X1          | 20X0 |
|---|---------------|------|
| EKUITAS AWAL  | 5.125.000.000 |      |
| SURPLUS/(DEFISIT)-LO                                      | (294.500.000) |      |
| RK PPKD   | 430.000.000   |      |
| DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR : |               |      |
| KOREKSI NILAI PERSEDIAAN                                  |               |      |
| SELISIH REVALUASI ASET TETAP                              |               |      |
| LAIN-LAIN   |               |      |
| EKUITAS AKHIR   | 5.260.500.000 |      |

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)

NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)

NIP.....

**Langkah VII : Melakukan Penutup Akhir**

Setelah menyusun LPE SKPD maka Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD harus melakukan jurnal penutup akhir agar dapat menyusun laporan keuangan selanjutnya yaitu Neraca. Jurnal penutup ini dilakukan dengan maksud menutup akun 3.1.1.02.01 (Surplus/(Defisit)-LO dan 3.1.3.01.01 (RK PPKD) untuk membentuk nilai akhir dari akun 3.1.1.01.01 (Ekuitas). Berikut adalah buku jurnal penutup akhir yang dimaksud :

**KABUPATEN KUNINGAN**  
**BUKU JURNAL PENUTUP AKHIR (JP AKHIR)**

**SKPD** : .....( SKPD Kabupaten Kuningan)

| Halaman 01 |                  |            |               |   |   |    |    |                        |      |             |             |
|------------|------------------|------------|---------------|---|---|----|----|------------------------|------|-------------|-------------|
| Tanggal    | Nomor            |            | Kode Rekening |   |   |    |    | Uraian                 | Ref. | Debit (Rp)  | Kredit (Rp) |
|            | Bukti Penerimaan | Bukti Lain |               |   |   |    |    |                        |      |             |             |
| 1          | 2                |            | 3             |   |   |    |    | 4                      | 5    | 6           | 7           |
|            |                  |            |               |   |   |    |    |                        |      |             |             |
| 31/12/15   |                  |            | 3             | 1 | 3 | 01 | 01 | RK PPKD                |      | 430.000.000 |             |
|            |                  |            | 3             | 1 | 2 | 02 | 01 | Surplus (Defisit) - LO |      |             | 294.500.000 |
|            |                  |            | 3             | 1 | 1 | 01 | 01 | Ekuitas                |      |             | 135.500.000 |
|            |                  |            |               |   |   |    |    |                        |      |             |             |
| Jumlah     |                  |            |               |   |   |    |    |                        |      | 430.000.000 | 430.000.000 |

|                |                |
|----------------|----------------|
| PPK-SKPD       | Kepala SKPD    |
| (tanda tangan) | (tanda tangan) |
| (nama lengkap) | (nama lengkap) |
| NIP.....       | NIP.....       |

Setelah dilakukan jurnal penutup akhir tersebut maka terbentuklah Neraca Saldo akhir sebagai berikut :

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN  
NERACA SALDO AKHIR

Urusan : 1.01 - Urusan Wajib xxx  
Organisasi : 1.01.01 – SKPD xxx

Halaman .....

| Kode rekening |   |   |    |    | Uraian   | Neraca Saldo  |               |
|---------------|---|---|----|----|--|---------------|---------------|
|               |   |   |    |    |  | Debit         | Kredit        |
|               |   |   |    |    |  |               |               |
| 1             | 1 | 1 | 02 | 01 | Kas di Bendahara Penerimaan                            | 0             |               |
| 1             | 1 | 1 | 03 | 01 | Kas di Bendahara Pengeluaran                           | 5.000.000     |               |
| 1             | 1 | 3 | 01 | 15 | Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan | 0             |               |
| 1             | 1 | 7 | 01 | 01 | Persediaan ATK   | 500.000       |               |
| 1             | 3 | 2 | 04 | 01 | Kendaraan Bermotor Penumpang                           | 325.000.000   |               |
| 1             | 3 | 3 | 01 | 01 | Bangunan Gedung Kantor                                 | 5.000.000.000 |               |
| 1             | 3 | 7 | 01 | 04 | Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor      |               | 20.000.000    |
| 1             | 3 | 7 | 02 | 01 | Akumulasi Penyusutan Gedung                            |               | 50.000.000    |
| 2             | 1 | 5 | 03 | 02 | Utang Belanja Modal Peralatan dan mesin                |               | 0             |
| 3             | 1 | 1 | 01 | 01 | Ekuitas  |               | 5.260.500.000 |
|               |   |   |    |    | Jumlah   | 5.330.500.000 | 5.330.500.000 |

PPK-SKPD

Kepala SKPD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Pada Neraca Saldo setelah penutup LO ini sudah tidak tersaji lagi akun-  
akun 3.1.02.01 (Surplus/(Defisit)-LO dan 3.1.3.01.01 (RK PPKD).

Langkah VI: Penyusunan Neraca SKPD

Selanjutnya tenaga akuntansi SKPD menyusun Neraca SKPD. Neraca ini menyajikan informasi tentang posisi keuangan SKPD mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca SKPD ini disusun berdasarkan Neraca Saldo akhir yang telah tersusun sebelumnya sebagai berikut :

**PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN**  
**SKPD .....**  
**NERACA**  
**Per 31 Desember 20X1 dan 20X0**

| Uraian                                   | Jumlah               |      |
|--|----------------------|------|
|  | 20X1                 | 20X0 |
| <b>ASET</b>                              |                      |      |
| <b>ASET LANCAR</b>                       |                      |      |
| Kas di Bendahara Penerimaan              |                      |      |
| Kas di Bendahara Pengeluaran             | 5.000.000            |      |
| Piutang Pajak Daerah                     |                      |      |
| Piutang Retribusi Daerah                 |                      |      |
| Penyisihan Piutang                       |                      |      |
| Belanja dibayar dimuka                   |                      |      |
| Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran |                      |      |
| Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi        |                      |      |
| Piutang Lainnya                          |                      |      |
| Persediaan                               | 500.000              |      |
| <b>Jumlah Aset Lancar</b>                | 5.500.000            |      |
| <b>ASET TETAP</b>                        |                      |      |
| Tanah                                    |                      |      |
| Peralatan dan Mesin                      | 325.000.000          |      |
| Gedung dan Bangunan                      | 5.000.000.000        |      |
| Jalan, Irigasi dan Jaringan              |                      |      |
| Uraian                                   | Jumlah               |      |
|  | 20X1                 | 20X0 |
| Aset Tetap Lainnya                       |                      |      |
| Konstruksi dalam Pengerjaan              |                      |      |
| Akumulasi Penyusutan Aset Tetap          | (70.000.000)         |      |
| <b>Jumlah Aset Tetap</b>                 |                      |      |
| <b>ASET LAINNYA</b>                      |                      |      |
| Tagihan Penjualan Angsuran               |                      |      |
| Tuntutan Ganti Rugi                      |                      |      |
| Kemitraan dengan Pihak Ketiga            |                      |      |
| Aset Tak Berwujud                        |                      |      |
| Aset Lain-lain                           |                      |      |
| <b>Jumlah Aset Lainnya</b>               |                      |      |
| <b>JUMLAH ASET</b>                       | <b>5.260.500.000</b> |      |
| <b>KEWAJIBAN</b>                         |                      |      |
| <b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>           |                      |      |
| Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)     |                      |      |
| Pendapatan diterima dimuka               |                      |      |
| Utang Belanja                            |                      |      |
| Utang Jangka Pendek Lainnya              |                      |      |
| <b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>    |                      |      |
| <b>Jumlah Kewajiban</b>                  |                      |      |
| <b>EKUITAS</b>                           |                      |      |
| <b>EKUITAS</b>                           |                      |      |
| Ekuitas                                  | 5.260.500.000        |      |
| <b>Jumlah Ekuitas</b>                    | <b>5.260.500.000</b> |      |
| <b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>      | <b>5.260.500.000</b> |      |

PPK-SKPD  
(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Kepala SKPD  
(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Dalam setiap Laporan Neraca yang disusun harus disajikan nilai neraca untuk 2 (dua) periode anggaran. Misalkan : jika membuat Laporan Neraca untuk tahun 2022 (per 31 Desember 2022) maka dalam Laporan Neraca tersebut juga harus dicantumkan nilai untuk neraca tahun sebelumnya (n-1) yaitu tahun 2021 (per 31 Desember 2021).

**Langkah VII : Menyusun Catatan atas Laporan Keuangan**

Setelah LRA, LO, LPE dan Neraca dapat disusun maka Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD kemudian menyusun Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang menjelaskan berbagai hal terkait dengan laporan keuangan yang disajikan sehingga laporan keuangan tersebut dapat dimengerti dan dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Informasi yang harus ada dalam CALK adalah sebagai berikut :

**PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
SKPD .....**

|                  |  |   |
|------------------|--|---|
| <b>PENGANTAR</b> |  |   |
| <b>BAB I</b>     | <b>PENDAHULUAN</b>   |   |
|                  | 1.1  | Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan SKPD                          |
|                  | 1.2  | Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan SKPD                             |
|                  | 1.3  | Sistematika penulisan catatan atas Laporan Keuangan SKPD                    |
| <b>BAB II</b>    | <b>IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD</b>             |   |
|                  | 2.1  | Ikhtisar pencapaian target kinerja keuangan SKPD                            |
|                  | 2.2  | Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan |
| <b>BAB III</b>   | <b>PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD</b>              |   |
|                  | 3.1  | Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD       |
|                  | 3.1.1  | Pendapatan  |
|                  | 3.1.2  | Beban   |
|                  | 3.1.3  | Belanja   |
|                  | 3.1.4  | Aset  |
|                  | 3.1.5  | Kewajiban   |
|                  | 3.1.6  | Ekuitas   |
| <b>BAB IV</b>    | <b>PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD</b> |   |
| <b>BAB V</b>     | <b>PENUTUP</b>   |   |

Penyusunan CaLK tersebut diatas secara rinci dijelaskan sebagaimana berikut dibawah ini :



## **Bab I Pendahuluan**

### Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Bagian ini dapat diisi dengan maksud dan tujuan sesuai isi dari Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No.01 tentang Penyajian Laporan Keuangan. Pada PSAP tersebut diatur tujuan umum dan tujuan khusus penyajian laporan keuangan. Selain itu SKPD dapat menambahkan sendiri maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan dari sudut pandang akuntabilitas dan transparansi terkait dengan adanya otonomi daerah. Bagian ini dapat disiapkan sendiri oleh PPK-SKPD beserta stafnya.

### Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Bagian ini dapat diisi dengan berbagai regulasi yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan SKPD mulai dari Undang-undang sampai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri termasuk juga Buletin Teknis (Bultek) yang dikeluarkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP). Akan lebih baik jika pasal dan ayat yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan SKPD juga disebutkan. Bagian ini dapat disiapkan sendiri oleh PPK-SKPD beserta stafnya.

### Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Bagian ini diisi dengan kerangka atau struktur penulisan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya diatas. Bagian ini dapat disiapkan sendiri oleh PPK-SKPD beserta stafnya.

## **Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD**

### Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Bagian ini dapat diisi dengan ikhtisar indikator dan pencapaian kinerja kegiatan operasional yang berdimensi keuangan dalam suatu periode pelaporan. Pencapaian kinerja keuangan yang telah ditetapkan dijelaskan secara obyektif. Keberhasilan pencapaian kinerja dapat

diketahui berdasarkan tingkat efisiensi dan efektivitas suatu program dan kegiatan. Efisiensi dapat diukur dengan membandingkan keluaran (*output*) dengan masukan (*input*). Sedangkan Efektivitas diukur dengan membandingkan hasil (*outcome*) dengan target yang ditetapkan.

Pembahasan mengenai kinerja keuangan harus dihubungkan dengan tujuan dan sasaran dari rencana strategis pemerintah dan indikator sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ikhtisar pembahasan kinerja keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus:

- (a) Menguraikan strategi dan sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan;
- (b) Memberikan gambaran yang jelas atas realisasi dan rencana kinerja keuangan dalam satu entitas pelaporan; dan
- (c) Menguraikan prosedur yang telah disusun dan dijalankan oleh manajemen untuk dapat memberikan keyakinan yang beralasan bahwa informasi kinerja keuangan yang dilaporkan adalah relevan dan andal;

Pembahasan mengenai kinerja keuangan harus:

- (a) Meliputi baik hasil yang positif maupun negatif;
- (b) Menyajikan data historis yang relevan;
- (c) Membandingkan hasil yang dicapai dengan tujuan dan rencana yang telah ditetapkan;
- (d) Menyajikan informasi penjelasan lainnya yang diyakini oleh manajemen akan dibutuhkan oleh pembaca laporan keuangan untuk dapat memahami indikator, hasil, dan perbedaan yang ada dengan tujuan atau rencana.

Untuk lebih meningkatkan kegunaan informasi, penjelasan entitas pelaporan harus juga meliputi penjelasan mengenai apa yang semestinya dilakukan dan rencana untuk meningkatkan kinerja program. Bagian ini dapat disiapkan dengan meminta data ke Badan Perencanaan Daerah atau meminta Laporan Kinerja (LAKIP) ke setiap SKPD.

### Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

Bagian ini dapat diisi dengan penjelasan atas keterbatasan dan kesulitan yang penting sehubungan dengan pengukuran dan pelaporan kinerja keuangan yang harus diungkapkan sesuai dengan relevansinya atas indikator kinerja yang diuraikan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Keterbatasan yang relevan akan beragam dari satu program ke program lainnya, namun biasanya faktor yang dibahas termasuk, antara lain:

- (a) Kinerja biasanya tidak dapat diungkapkan secara utuh dengan hanya menggunakan satu indikator saja;
- (b) Indikator kinerja tidak dapat memperlihatkan alasan mengapa kinerja berada pada tingkat yang dilaporkan; dan
- (c) Melihat indikator kuantitatif secara eksklusif sering kali menghasilkan konsekuensi yang tidak diinginkan.

Oleh karena itu, indikator kinerja harus dilengkapi dengan informasi penjelasan yang sesuai. Informasi penjelasan ini akan membantu pengguna memahami indikator yang dilaporkan, mendapat gambaran mengenai kinerja keuangan entitas pelaporan, dan mengevaluasi pentingnya faktor yang mendasari yang mungkin mempengaruhi kinerja keuangan yang dilaporkan.

Informasi penjelasan mungkin termasuk, sebagai contoh, informasi mengenai faktor yang substansial yang berada di luar kendali entitas, dan informasi mengenai faktor-faktor yang membuat entitas mempunyai pengaruh penting. Bagian ini dapat disiapkan dengan meminta data ke Badan Perencanaan Daerah atau meminta Laporan Kinerja (LAKIP) ke setiap SKPD.

### **Bab III Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD**

#### Rincian dari penjelasan setiap pos-pos pelaporan keuangan SKPD

Penjelasan setiap pos-pos dalam laporan keuangan SKPD merupakan

bagian yang paling dominan dalam suatu CaLK karena menjelaskan secara rinci aktivitas pemerintah pada setiap pos akun. Pada dasarnya ada 2 (dua) jenis penjelasan pos-pos dalam laporan keuangan yaitu :

(a) Pos Pendapatan, Beban, dan Belanja

Penjelasan rinci atas pos ini dijelaskan minimal sampai dengan kode rekening jenis. Hal yang disajikan adalah realisasi tahun berjalan dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya dan dibandingkan dengan anggaran murni dan perubahannya. Setiap rupiah yang disajikan pada pos tersebut diberi penjelasan mengapa lebih tinggi atau lebih rendah daripada tahun lalu serta penjelasan mengapa melebihi atau kurang dari anggarannya khususnya anggaran perubahan. Setiap pos juga sebaiknya dijelaskan dengan diagram, misalnya diagram pie yang menjelaskan komposisi prosentasi pos tersebut dibandingkan dengan pos pada klasifikasi rekening yang lebih tinggi (kelompok atau akun).

(b) Pos Aset, Kewajiban, dan Ekuitas

Penjelasan rinci atas pos ini dijelaskan minimal sampai dengan kode rekening jenis. Hal yang disajikan adalah nilai pos tahun berjalan dan dibandingkan dengan nilai pos tahun sebelumnya. Setiap rupiah yang disajikan pada pos tersebut diberi penjelasan mengapa lebih tinggi atau lebih rendah daripada tahun lalu. Setiap pos juga sebaiknya dijelaskan dengan diagram, misalnya diagram pie yang menjelaskan komposisi prosentasi pos tersebut dibandingkan dengan pos pada klasifikasi rekening yang lebih tinggi (kelompok atau akun).

Bagian ini dapat disiapkan sendiri oleh PPK-SKPD beserta stafnya dengan tambahan informasi dari pihak terkait di SKPD masing-masing.

#### **Bab IV Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan SKPD**

Suatu entitas pelaporan mengungkapkan hal-hal berikut ini apabila belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, yaitu:

(a) domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi tempat

entitas tersebut berada;

- (b) penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya;
- (c) ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya.

Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan kejadian-kejadian penting selama tahun pelaporan, seperti:

- (a) Penggantian manajemen SKPD selama tahun berjalan;
- (b) Kesalahan manajemen SKPD terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen baru;
- (c) Komitmen atau kontinjensi yang tidak dapat disajikan pada Neraca; dan
- (d) Penggabungan atau pemekaran entitas tahun berjalan.
- (e) Kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya adanya pemogokan yang harus ditanggulangi pemerintah.

Bagian ini dapat disiapkan sendiri oleh PPK-SKPD beserta stafnya.

## **Bab V Penutup**

Bagian ini berisi paragraf penutup.

Laporan keuangan SKPD yang telah disusun oleh Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD kemudian diserahkan kepada Kepala SKPD melalui PPK-SKPD untuk kemudian diserahkan kepada PPKD melalui Fungsi Akuntansi Pemda PPKD untuk penyusunan Laporan Keuangan Daerah. Dengan tersusunnya Laporan Keuangan ini maka seluruh siklus sistem akuntansi di SKPD telah dijalankan.

## **SISTEM DAN PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH YANG MENCATAT TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH DAN KAS DAERAH (SKPKD-PPKD)**

Bagian ini menjelaskan Sistem dan Prosedur Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mencatat transaksi pemerintah daerah dan kas daerah yang selanjutnya disebut sistem dan prosedur penyusunan Laporan Keuangan SKPKD-PPKD.

### **KEBIJAKAN UMUM**

Sistem akuntansi di Pemerintah Kabupaten Kuningan menggunakan konsep konsolidasian sehingga setiap entitas akuntansi, termasuk SKPKD-PPKD, harus menjalankan sistem akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangannya masing-masing. Seluruh laporan keuangan termasuk laporan keuangan SKPKD-PPKD kemudian dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan. Oleh karena itu maka Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh SKPKD-PPKD di Pemerintah Kabupaten Kuningan merupakan dasar penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

SKPKD-PPKD sebagai entitas akuntansi menyajikan Laporan Keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
5. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).

Penyajian Laporan Keuangan dalam satu tahun anggaran dilakukan minimal dalam 2 kali, yaitu :

1. Semester, yaitu laporan keuangan untuk periode Januari – Juni.
2. Tahunan, yaitu laporan keuangan untuk periode satu tahun (Januari – Desember).

Namun untuk keperluan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik dengan melakukan rekonsiliasi data keuangan daerah maka penyajian laporan keuangan dalam satu tahun anggaran dilakukan secara triwulanan.

### **PIHAK-PIHAK TERKAIT**

Berbagai pihak/fungsi yang terkait dalam sistem dan prosedur laporan keuangan SKPD-PPKD beserta tugas-tugasnya adalah :

1. Tenaga Akuntansi di di Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD)

Dalam pelaksanaan prosedur ini, Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD bekerja mencatat transaksi Pemerintah Daerah memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Membuat laporan keuangan, yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan; dan
  - b. Menyampaikan laporan keuangan SKPKD-PPKD yang mencatat transaksi pemerintah daerah kepada PPK-SKPKD.
2. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) : **Sekretaris Badan atau Koordinator/ Kepala Sub Bagian Keuangan BPKAD.**

Dalam pelaksanaan prosedur ini, PPK-SKPKD memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Bertanggungjawab atas sistem akuntansi pelaporan keuangan SKPKD-PPKD yang mencatat transaksi pemerintah daerah yang dipimpinnya;

- b. Memeriksa dan menandatangani laporan keuangan SKPKD-PPKD yang disusun oleh Tenaga Akuntansi PPK-SKPKD sesuai periodenya; dan
  - c. Menyampaikan laporan keuangan SKPKD-PPKD yang disusunnya kepada PPKD (pengguna anggaran) untuk disetujui.
- 3. Tenaga Akuntansi di Fungsi Akuntansi Pemerintah Daerah

Dalam pelaksanaan prosedur ini, Tenaga Akuntansi di Fungsi Akuntansi Pemerintah Daerah bekerja mencatat transaksi kas daerah yang memiliki tugas sebagai berikut:

  - a. Membuat laporan keuangan, yang terdiri dari: Neraca, dan Laporan Perubahan Ekuitas; dan
  - b. Menyampaikan laporan keuangan SKPKD-PPKD yang mencatat transaksi kas daerah (akuntansi konsolidator) kepada Kepala Fungsi Akuntansi Pemerintah Daerah.

4. Kepala Fungsi Akuntansi Pemerintah Daerah : Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi BPKAD.

Dalam pelaksanaan prosedur ini, Kepala Fungsi Akuntansi Pemerintah Daerah memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Bertanggungjawab atas sistem akuntansi pelaporan keuangan SKPKD-PPKD yang mencatat transaksi kas daerah yang dipimpinnya;
  - b. Memeriksa dan menandatangani laporan keuangan SKPKD-PPKD yang disusun oleh Tenaga Akuntansi Fungsi Akuntansi Pemerintah Daerah sesuai periodenya; dan
  - c. Menyampaikan laporan keuangan SKPKD-PPKD yang disusunnya kepada PPKD (pengguna anggaran) untuk disetujui.
- 5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (tidak termasuk Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan):

Dalam pelaksanaan prosedur ini, PPKD memiliki tugas menerima



dan memeriksa laporan keuangan SKPKD-PPKD yang mencatat transaksi Pemerintah Daerah dari PPK-SKPKD;

### **BUKU DAN ATAU FORMULIR YANG DIGUNAKAN**

Buku dan atau formulir yang digunakan dalam pelaksanaan sistem dan prosedur laporan keuangan ini adalah :

1. Neraca Saldo (NS)

Merupakan formulir yang digunakan untuk mencatat nilai saldo setiap rekening/akun per rincian objek yang berasal dari nilai saldo rekening/akun tersebut di buku besar/buku besar pembantu. Di neraca saldo ini dilihat atau diketahui jumlah nilai masing-masing rekening/akun dan jumlah nilai total dari seluruh rekening. Dalam sistem dan prosedur penyusunan laporan keuangan SKPKD-PPKD ini ada beberapa jenis neraca saldo yaitu : neraca saldo setelah penyesuaian; neraca saldo setelah penutup LRA; neraca saldo setelah penutup LO; dan neraca saldo akhir.

2. Buku Jurnal Penutup (JPn)

Merupakan buku jurnal yang digunakan untuk melakukan pencatatan akuntansi atas transaksi-transaksi non kas khususnya digunakan untuk menutup akun nominal atau akun sementara yang ada pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO). Dalam sistem dan prosedur penyusunan laporan keuangan SKPKD-PPKD ini ada beberapa jenis jurnal penutup yaitu : jurnal penutup LRA; jurnal penutup LO; dan jurnal penutup akhir

### **KERANGKA SISTEM**

Prosedur penyusunan laporan keuangan di SKPKD-PPKD dimulai saat Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD dan Tenaga Akuntansi di Fungsi Akuntansi Pemda telah menghasilkan neraca saldo setelah penyesuaian sebagaimana yang telah dijelaskan dalam sistem dan prosedur lampiran 3 (sistem dan prosedur akuntansi SKPD-PPKD).

Setelah itu Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD mulai menyusun laporan keuangan berupa LRA berdasarkan neraca saldo setelah penyesuaian, kemudian menyusun jurnal penutup LRA. Setelah menyusun jurnal penutup LRA, terbentuklah neraca saldo setelah penutup LRA untuk menyusun LO. Berdasarkan neraca saldo setelah penutup LRA, disusun laporan operasional, kemudian menyusun jurnal penutup LO yang selanjutnya menghasilkan neraca saldo setelah penutup LO. Berdasarkan neraca saldo setelah penutup LO, disusun LPE, kemudian menyusun jurnal penutup akhir, yang selanjutnya menghasilkan neraca saldo akhir. Berdasarkan neraca saldo akhir ini, disusun neraca. Khusus untuk SKPKD-PPKD yang mencatat kas daerah, tidak menyusun LRA dan LO, karena hanya memiliki rekening/akun kas di kas daerah dan rekening/akun non anggaran seperti RK yang hanya bisa digunakan untuk menyusun neraca dan LPE.

Setelah LRA, LO, LPE dan Neraca disusun maka Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD dan Tenaga Akuntansi di Fungsi Akuntansi Pemda melengkapi keempat laporan keuangan tersebut dengan membuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang berisi berbagai penjelasan yang diperlukan terkait dengan laporan keuangan yang disajikan. Kemudian laporan keuangan SKPKD-PPKD yang mencatat transaksi pemerintah daerah diserahkan Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD kepada PPK-SKPD untuk diperiksa. Sedangkan laporan keuangan SKPKD-PPKD yang mencatat transaksi kas daerah diserahkan Tenaga Akuntansi di Fungsi Akuntansi Pemda kepada Kepala Fungsi Akuntansi Pemda untuk diperiksa.

Setelah itu PPK-SKPKD dan Kepala Fungsi Akuntansi Pemda menyerahkan Laporan Keuangan kepada PPKD paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Berdasarkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi maka PPKD menyusun laporan keuangan daerah. Penyusunan laporan keuangan daerah tersebut paling lambat diselesaikan 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sudah termasuk pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan oleh Inspektorat Daerah.

ALUR PROSEDUR TEKNIS

Prosedur teknis penyusunan laporan keuangan SKPKD-PPKD ini dimulai dari penyiapan neraca saldo setelah penyesuaian hingga laporan keuangan disampaikan kepada PPKD. Secara lebih rinci uraian alur prosedur ini adalah sebagai berikut :

Langkah I : Penyusunan Neraca Saldo setelah Penyesuaian

Setelah seluruh penjurnalan transaksi dan penyesuaian serta koreksi di posting ke buku besar maka Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD menyusun neraca saldo setelah penyesuaian. Misalkan terdapat neraca saldo setelah penyesuaian pada suatu SKPKD-PPKD yang mencatat transaksi pemerintah daerah sebagai berikut :

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN  
NERACA SALDO SETELAH PENYESUAIAN

Urusan : 1.01 - Urusan Wajib xxx  
Organisasi : 1.20.08 – SKPKD-PPKD

Halaman .....

| Kode rekening |   |   |    |    |  | Neraca Saldo  |               |
|---------------|---|---|----|----|--|---------------|---------------|
|               |   |   |    |    |  | Debit         | Kredit        |
| 1             | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas di Kas Daerah  | 200.000.000   |               |
| 1             | 1 | 3 | 05 | 04 | Piutang DAU  | 1.000.000.000 |               |
| 1             | 2 | 1 | 01 | 02 | Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah                                  | 50.000.000    |               |
| 1             | 2 | 1 | 01 | 02 | Penyertaan Modal kepada BUMD   | 250.000.000   |               |
| 1             | 4 | 1 | 01 | 01 | Dana Cadangan  | 500.000.000   |               |
| 2             | 2 | 1 | 01 | 01 | Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan  |               | 150.000.000   |
| 3             | 1 | 1 | 01 | 01 | Ekuitas  |               | 500.000.000   |
| 3             | 1 | 2 | 01 | 01 | Estimasi Pendapatan  | 1.500.000.000 |               |
| 3             | 1 | 2 | 02 | 01 | Estimasi Penerimaan Pembiayaan   | 500.000.000   |               |
| 3             | 1 | 2 | 03 | 01 | Apropriasi Belanja   |               | 1.000.000.000 |
| 3             | 1 | 2 | 03 | 02 | Apropriasi Transfer  |               | 150.000.000   |
| 3             | 1 | 2 | 04 | 01 | Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan  |               | 300.000.000   |
| 3             | 1 | 2 | 05 | 01 | Estimasi Perubahan SAL   | 50.000.000    |               |
| 4             | 2 | 3 | 01 | 03 | Dana Alokasi Umum- LRA   |               | 500.000.000   |
| 5             | 1 | 7 | 03 | 01 | Belanja/Transfer Bantuan Keuangan ke Desa (ADD-Umum)                       | 150.000.000   |               |
| 6             | 1 | 1 | 01 | 01 | Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya  |               | 400.000.000   |
| 6             | 1 | 4 | 03 | 01 | Penerimaan Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri dari Bank                      |               | 100.000.000   |
| 6             | 2 | 2 | 01 | 01 | Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Pemda pada Bank Jabar Cab Kuningan | 250.000.000   |               |
| 7             | 2 | 1 | 04 | 01 | Dana Alokasi Umum- LO  |               | 1.500.000.000 |
| 8             | 2 | 4 | 01 | 01 | Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa                                    | 150.000.000   |               |
|               |   |   |    |    | Jumlah   | 4.600.000.000 | 4.600.000.000 |

PPK-SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)

(tanda tangan)  
(nama lengkap)

NIP..... NIP.....

Kode rekening/akun yang dicantumkan dalam penyusunan neraca saldo tersebut adalah cukup kode rekening/akun dalam klasifikasi ekonomi hingga rincian obyek, sehingga tidak muncul kode program dan kegiatannya.

Langkah II : Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) SKPKD-PPKD yang mencatat Transaksi Pemda

Dengan menggunakan neraca saldo setelah penyesuaian tersebut diatas maka Tenaga Akuntansi di PPK-SKPD dapat mulai menyusun laporan realisasi anggaran (LRA) SKPD yang menjadi tanggungjawabnya sebagai berikut :

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN  
NERACA SALDO SETELAH PENYESUAIAN

Urusan : 1.01 - Urusan Wajib xxx  
Organisasi : 1.20.08 – SKPKD-PPKD

Halaman .....

| Kode rekening |   |   |    |    | Uraian   | Neraca Saldo  |               |
|---------------|---|---|----|----|--|---------------|---------------|
|               |   |   |    |    |  | Debit         | Kredit        |
| 1             | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas di Kas Daerah  | 200.000.000   |               |
| 1             | 1 | 3 | 05 | 04 | Piutang DAU  | 1.000.000.000 |               |
| 1             | 2 | 1 | 01 | 02 | Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah                                  | 50.000.000    |               |
| 1             | 2 | 1 | 01 | 02 | Penyertaan Modal kepada BUMD   | 250.000.000   |               |
| 1             | 4 | 1 | 01 | 01 | Dana Cadangan  | 500.000.000   |               |
| 2             | 2 | 1 | 01 | 01 | Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan  |               | 150.000.000   |
| 3             | 1 | 1 | 01 | 01 | Ekuitas  |               | 500.000.000   |
| 3             | 1 | 2 | 01 | 01 | Estimasi Pendapatan  | 1.500.000.000 |               |
| 3             | 1 | 2 | 02 | 01 | Estimasi Penerimaan Pembiayaan   | 500.000.000   |               |
| 3             | 1 | 2 | 03 | 01 | Apropriasi Belanja   |               | 1.000.000.000 |
| 3             | 1 | 2 | 03 | 02 | Apropriasi Transfer  |               | 150.000.000   |
| 3             | 1 | 2 | 04 | 01 | Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan  |               | 300.000.000   |
| 3             | 1 | 2 | 05 | 01 | Estimasi Perubahan SAL   | 50.000.000    |               |
| 4             | 2 | 3 | 01 | 03 | Dana Alokasi Umum- LRA   |               | 500.000.000   |
| 5             | 1 | 7 | 03 | 01 | Belanja/Transfer Bantuan Keuangan ke Desa (ADD-Umum)                       | 150.000.000   |               |
| 6             | 1 | 1 | 01 | 01 | Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya  |               | 400.000.000   |
| 6             | 1 | 4 | 03 | 01 | Penerimaan Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri dari Bank                      |               | 100.000.000   |
| 6             | 2 | 2 | 01 | 01 | Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Pemda pada Bank Jabar Cab Kuningan | 250.000.000   |               |
| 7             | 2 | 1 | 04 | 01 | Dana Alokasi Umum- LO  |               | 1.500.000.000 |
| 8             | 2 | 4 | 01 | 01 | Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa                                    | 150.000.000   |               |
|               |   |   |    |    | Jumlah   | 4.600.000.000 | 4.600.000.000 |

PPK-SKPKD

PPKD

(tanda tangan) (tanda tangan)  
(nama lengkap) (nama lengkap)  
NIP..... NIP.....

Berdasarkan Neraca Saldo setelah penyesuaian diatas, gunakan nilai saldo kode akun 4 (pendapatan-LRA), kode 5 (belanja), dan kode 6 (pembiayaan) untuk menyusun Laporan Realisasi Anggaran sebagai berikut :

**PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN**  
**SKPKD-PPKD**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022**

(Dalam Rupiah)

| Nomor Urut | Uraian  | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi   | Lebih (Kurang) |
|------------|---|----------------------------|-------------|----------------|
| 1          | 2   | 3                          | 4           | 5              |
| 4          | Pendapatan  |                            |             |                |
| 4.2        | Dana Perimbangan  |                            |             |                |
| 4.2.1      | Dana Bagi Hasil   |                            |             |                |
| 4.2.1.1    | Dana Bagi Hasil Pajak   |                            |             |                |
| 4.2.1.2    | Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam                     |                            |             |                |
| 4.2.2      | Dana Alokasi Umum   |                            | 500.000.000 |                |
| 4.2.3      | Dana Alokasi Khusus   |                            |             |                |
| 4.3        | Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah                              |                            |             |                |
| 4.3.1      | Pendapatan Hibah  |                            |             |                |
| 4.3.2      | Dana Darurat  |                            |             |                |
| 4.3.3      | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya |                            |             |                |
| 4.3.4      | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus                               |                            |             |                |
| 4.3.5      | Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya     |                            |             |                |
|            | Jumlah Pendapatan   |                            | 500.000.000 |                |
| 5          | Belanja   |                            |             |                |
| 5.1        | Belanja Tidak Langsung  |                            |             |                |
| 5.1.2      | Belanja Bunga   |                            |             |                |
| 5.1.3      | Belanja subsidi   |                            |             |                |
| 5.1.4      | Belanja Hibah   |                            |             |                |
| 5.1.5      | Belanja Bantuan Sosial  |                            |             |                |
| 5.1.6      | Belanja Bagi Hasil  |                            |             |                |
| 5.1.7      | Belanja Bantuan Keuangan  |                            | 150.000.000 |                |
| 5.1.8      | Belanja Tidak Terduga   |                            |             |                |
|            | Jumlah Belanja  |                            | 150.000.000 |                |
|            | SURPLUS/(DEFISIT)   |                            | 350.000.000 |                |
| 6.         | Pembiayaan Daerah   |                            |             |                |
| 6.1        | Penerimaan Pembiayaan Daerah                                      |                            |             |                |
| 6.1.1      | Penggunaan SiLPA  |                            | 400.000.000 |                |
| 6.1.2      | Pencairan Dana Cadangan   |                            |             |                |
| 6.1.3      | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan                   |                            |             |                |
| 6.1.4      | Penerimaan Pinjaman Daerah  |                            | 100.000.000 |                |
| 6.1.5      | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman                             |                            |             |                |
| 6.1.6      | Penerimaan Piutang Daerah   |                            |             |                |
|            | Jumlah Penerimaan   |                            | 500.000.000 |                |
| 6.2        | Pengeluaran Pembiayaan Daerah                                     |                            |             |                |
| 6.2.1      | Pembentukan Dana Cadangan   |                            |             |                |
| 6.2.2      | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah                    |                            | 250.000.000 |                |
| 6.2.3      | Pembayaran Pokok Utang  |                            |             |                |
| 6.2.4      | Pemberian Pinjaman Daerah   |                            |             |                |
|            | Jumlah Pengeluaran  |                            | 250.000.000 |                |
|            | Pembiayaan Neto   |                            | 250.000.000 |                |
|            | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)                            |                            | 600.000.000 |                |

PPK-SKPKD

PPKD

(tanda tangan)

(tanda tangan)

(nama lengkap)  
NIP.....

(nama lengkap)  
NIP.....

**Langkah III : Menutup nilai saldo Laporan Realisasi Anggaran (LRA) SKPD**

Setelah menyusun laporan realisasi anggaran maka Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD harus melakukan jurnal penutup LRA agar dapat menyusun laporan keuangan selanjutnya yaitu laporan operasional (LO). Jurnal penutup ini dilakukan dengan maksud agar rekening/akun yang bersifat sementara (*nominal account*) nilai saldo dibuku besar terkait rekening/akun LRA kembali menjadi nihil pada akhir periode akuntansi. Rekening/akun nominal adalah rekening/akun yang digunakan dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, yaitu Pendapatan-LRA, Belanja, dan Pembiayaan. Untuk melakukan jurnal penutup LRA, kita persiapkan dulu Neraca Saldo Sesudah Penyesuaian yang paling terakhir yaitu :

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN  
NERACA SALDO SETELAH PENYESUAIAN

Urusan : 1.01 - Urusan Wajib xxx  
Organisasi : 1.20.08 – SKPKD-PPKD

Halaman .....

| Kode rekening |   |   |    |    | Uraian   | Neraca Saldo  |               |
|---------------|---|---|----|----|--|---------------|---------------|
|               |   |   |    |    |  | Debit         | Kredit        |
| 1             | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas di Kas Daerah  | 200.000.000   |               |
| 1             | 1 | 3 | 05 | 04 | Piutang DAU  | 1.000.000.000 |               |
| 1             | 2 | 1 | 01 | 02 | Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah                                  | 50.000.000    |               |
| 1             | 2 | 1 | 01 | 02 | Penyertaan Modal kepada BUMD   | 250.000.000   |               |
| 1             | 4 | 1 | 01 | 01 | Dana Cadangan  | 500.000.000   |               |
| 2             | 2 | 1 | 01 | 01 | Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan  |               | 150.000.000   |
| 3             | 1 | 1 | 01 | 01 | Ekuitas  |               | 500.000.000   |
| 3             | 1 | 2 | 01 | 01 | Estimasi Pendapatan  | 1.500.000.000 |               |
| 3             | 1 | 2 | 02 | 01 | Estimasi Penerimaan Pembiayaan   | 500.000.000   |               |
| 3             | 1 | 2 | 03 | 01 | Apropriasi Belanja   |               | 1.000.000.000 |
| 3             | 1 | 2 | 03 | 02 | Apropriasi Transfer  |               | 150.000.000   |
| 3             | 1 | 2 | 04 | 01 | Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan  |               | 300.000.000   |
| 3             | 1 | 2 | 05 | 01 | Estimasi Perubahan SAL   | 50.000.000    |               |
| 4             | 2 | 3 | 01 | 03 | Dana Alokasi Umum- LRA   |               | 500.000.000   |
| 5             | 1 | 7 | 03 | 01 | Belanja/Transfer Bantuan Keuangan ke Desa (ADD-Umum)                       | 150.000.000   |               |
| 6             | 1 | 1 | 01 | 01 | Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya  |               | 400.000.000   |
| 6             | 1 | 4 | 03 | 01 | Penerimaan Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri dari Bank                      |               | 100.000.000   |
| 6             | 2 | 2 | 01 | 01 | Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Pemda pada Bank Jabar Cab Kuningan | 250.000.000   |               |
| 8             | 2 | 1 | 04 | 01 | Dana Alokasi Umum- LO  |               | 1.500.000.000 |
| 9             | 2 | 4 | 01 | 01 | Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa                                    | 150.000.000   |               |
|               |   |   |    |    | Jumlah   | 4.600.000.000 | 4.600.000.000 |

PPK-SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Berdasarkan nilai saldo kode akun 4 (pendapatan-LRA), kode akun 5 (belanja) dan kode akun 6 (pembiayaan) maka dibuatlah jurnal penutup LRA dengan cara mencatat balik akun 4 (pendapatan-LRA) dan akun 6.1 (penerimaan pembiayaan) dari semula di kredit menjadi di debit dan mencatat balik kode akun 5 (belanja) dan akun 6.2 (pengeluaran pembiayaan) dari semula di debit menjadi di kredit. Selain ketiga jenis akun tersebut, ada akun lain yang juga ditutup yaitu akun anggaran seperti estimasi pendapatan, estimasi penerimaan pembiayaan, apropriasi belanja, apropriasi transfer, apropriasi pengeluaran pembiayaan dan estimasi perubahan SAL sebagai berikut :

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU JURNAL PENUTUP LRA (JP LRA)

SKPKD : SKPKD –PPKD Kabupaten Kuningan

Halaman 01

| Tanggal  | Nomor               |               | Kode Rekening |   |   |    |    | Uraian  | Ref. | Debit<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----------|---------------------|---------------|---------------|---|---|----|----|---|------|---------------|----------------|
|          | Bukti<br>Penerimaan | Bukti<br>Lain |               |   |   |    |    |   |      |               |                |
| 1        | 2                   |               | 3             |   |   |    |    | 4   | 5    | 6             | 7              |
| 31/12/15 |                     |               | 3             | 1 | 2 | 03 | 01 | Apropriasi Belanja  |      | 1.000.000.000 |                |
|          |                     |               | 3             | 1 | 2 | 03 | 02 | Apropriasi Transfer   |      | 150.000.000   |                |
|          |                     |               | 3             | 1 | 2 | 04 | 01 | Apropriasi<br>Pengeluaran<br>Pembiayaan   |      | 300.000.000   |                |
|          |                     |               | 4             | 1 | 1 | 15 | 01 | Dana Alokasi<br>Umum - LRA  |      | 500.000.000   |                |
|          |                     |               | 6             | 1 | 1 | 01 | 01 | Penggunaan SiLPA<br>tahun sebelumnya  |      | 400.000.000   |                |
|          |                     |               | 6             | 1 | 1 | 01 | 01 | Penerimaan<br>Pembiayaan<br>Pinjaman Dalam<br>Negeri dari Bank                            |      | 100.000.000   |                |
|          |                     |               | 3             | 1 | 2 | 01 | 01 | Estimasi<br>Pendapatan  |      |               | 1.500.000.000  |
|          |                     |               | 3             | 1 | 2 | 02 | 01 | Estimasi<br>Penerimaan<br>Pembiayaan  |      |               | 500.000.000    |
|          |                     |               | 5             | 1 | 7 | 03 | 01 | Belanja/Transfer<br>Bantuan Keuangan<br>ke Desa (ADD-<br>Umum)                            |      |               | 150.000.000    |
|          |                     |               | 6             | 2 | 2 | 01 | 01 | Pengeluaran<br>Pembiayaan<br>Penyertaan Modal<br>Pemda pada Bank<br>Jabar Cab<br>Kuningan |      |               | 250.000.000    |
|          |                     |               | 3             | 1 | 2 | 05 | 01 | Estimasi Perubahan<br>SAL   |      |               | 50.000.000     |
| Jumlah   |                     |               |               |   |   |    |    |   |      | 2.450.000.000 | 2.450.000.000  |

PPK-SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Setelah dilakukan jurnal penutup LRA tersebut maka terbentuklah  
Neraca Saldo setelah penutup LRA sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN  
NERACA SALDO SETELAH PENYESUAIAN

Urusan : 1.01 - Urusan Wajib xxx  
Organisasi : 1.20.08 – SKPKD-PPKD

Halaman .....

| Kode rekening |   |   |    |    | Uraian                                    | Neraca Saldo  |               |
|---------------|---|---|----|----|---|---------------|---------------|
|               |   |   |    |    |   | Debit         | Kredit        |
| 1             | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas di Kas Daerah                         | 200.000.000   |               |
| 1             | 1 | 3 | 05 | 04 | Piutang DAU                               | 1.000.000.000 |               |
| 1             | 2 | 1 | 01 | 02 | Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah | 50.000.000    |               |
| 1             | 2 | 1 | 01 | 02 | Penyertaan Modal kepada BUMD              | 250.000.000   |               |
| 1             | 4 | 1 | 01 | 01 | Dana Cadangan                             | 500.000.000   |               |
| 2             | 2 | 1 | 01 | 01 | Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan       |               | 150.000.000   |
| 3             | 1 | 1 | 01 | 01 | Ekuitas                                   |               | 500.000.000   |
| 8             | 2 | 1 | 04 | 01 | Dana Alokasi Umum- LO                     |               | 1.500.000.000 |
| 9             | 2 | 4 | 01 | 01 | Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa   | 150.000.000   |               |
|               |   |   |    |    | Jumlah                                    | 2.150.000.000 | 2.150.000.000 |

PPK-SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Pada Neraca Saldo setelah penutup LRA ini sudah tidak tersaji lagi akun-akun pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan dan akun-akun anggaran.

Langkah IV: Penyusunan Laporan Operasional (LO) SKPKD-PPKD yang mencatat Transaksi Pemda

Laporan Operasional (LO) SKPKD-PPKD yang mencatat transaksi pemda ini menyajikan informasi pendapatan-LO dan beban SKPKD-PPKD yang masing-masing diperbandingkan dengan pendapatan-LO dan beban SKPKD-PPKD tahun sebelumnya untuk diketahui kenaikan/penurunannya baik dalam angka maupun prosentase. LO SKPKD-PPKD ini disusun berdasarkan Neraca Saldo setelah Penutup LRA sebagai berikut :

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN  
NERACA SALDO SETELAH PENYESUAIAN

Urusan : 1.01 - Urusan Wajib xxx  
Organisasi : 1.20.08 – SKPKD-PPKD

Halaman .....

| Kode rekening |   |   |    |    | Uraian                                    | Neraca Saldo  |               |
|---------------|---|---|----|----|---|---------------|---------------|
|               |   |   |    |    |   | Debit         | Kredit        |
| 1             | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas di Kas Daerah                         | 200.000.000   |               |
| 1             | 1 | 3 | 05 | 04 | Piutang DAU                               | 1.000.000.000 |               |
| 1             | 2 | 1 | 01 | 02 | Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah | 50.000.000    |               |
| 1             | 2 | 1 | 01 | 02 | Penyertaan Modal kepada BUMD              | 250.000.000   |               |
| 1             | 4 | 1 | 01 | 01 | Dana Cadangan                             | 500.000.000   |               |
| 2             | 2 | 1 | 01 | 01 | Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan       |               | 150.000.000   |
| 3             | 1 | 1 | 01 | 01 | Ekuitas                                   |               | 500.000.000   |
| 7             | 2 | 1 | 04 | 01 | Dana Alokasi Umum- LO                     |               | 1.500.000.000 |
| 8             | 2 | 4 | 01 | 01 | Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa   | 150.000.000   |               |
|               |   |   |    |    | Jumlah                                    | 2.150.000.000 | 2.150.000.000 |

PPK-SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penutup LRA diatas, gunakan nilai saldo kode akun 7 (pendapatan-LO) dan nilai saldo kode akun 8 (beban) untuk menyusun Laporan Operasional SKPKD-PPKD sebagai berikut :

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN  
SKPKD-PPKD  
LAPORAN OPERASIONAL  
Per 31 Desember 20X1 dan 20X0

| URAIAN   | 20X1                 | 20X0 | Kenaikan<br>(Penurunan) | % |
|--|----------------------|------|-------------------------|---|
| 1  | 2                    | 3    | 4                       | 5 |
| <b>PENDAPATAN</b>                                  |                      |      |                         |   |
| <b>PENDAPATAN TRANSFER</b>                         |                      |      |                         |   |
| TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – DANA PERIMBANGAN       |                      |      |                         |   |
| Dana Bagi Hasil Pajak                              |                      |      |                         |   |
| Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam                   |                      |      |                         |   |
| Dana Alokasi Umum                                  | 1.500.000.000        |      |                         |   |
| Dana Alokasi Khusus                                |                      |      |                         |   |
| <b>Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan</b> | <b>1.500.000.000</b> |      |                         |   |
|  |                      |      |                         |   |
| TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA                  |                      |      |                         |   |
| Dana Otonomi Khusus                                |                      |      |                         |   |
| Dana Penyesuaian                                   |                      |      |                         |   |
| <b>Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya</b>          |                      |      |                         |   |
|  |                      |      |                         |   |
| TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI                       |                      |      |                         |   |
| Pendapatan Bagi Hasil Pajak                        |                      |      |                         |   |
| Pendapatan Bagi Hasil Lainnya                      |                      |      |                         |   |

|  |               |  |  |  |
|--|---------------|--|--|--|
| Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi                          |               |  |  |  |
| Jumlah Pendapatan Transfer                                   | 1.500.000.000 |  |  |  |
|  |               |  |  |  |
| LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH                                |               |  |  |  |
| Pendapatan Hibah   |               |  |  |  |
| Pendapatan Lainnya   |               |  |  |  |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah                         |               |  |  |  |
| JUMLAH PENDAPATAN  | 1.500.000.000 |  |  |  |
|  |               |  |  |  |
| BEBAN  |               |  |  |  |
| BEBAN OPERASI  |               |  |  |  |
| Beban Pegawai  |               |  |  |  |
| Beban Barang Jasa  |               |  |  |  |
| Beban Bunga  |               |  |  |  |
| Beban Subsidi  |               |  |  |  |
| Beban Hibah  |               |  |  |  |
| Beban Bantuan Sosial   |               |  |  |  |
| Beban Penyusutan   |               |  |  |  |
| Beban Lain-lain  |               |  |  |  |
| Jumlah Beban Operasi   |               |  |  |  |
|  |               |  |  |  |
| BEBAN TRANSFER   |               |  |  |  |
| Beban Transfer Bagi Hasil Pajak                              |               |  |  |  |
| Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya                 |               |  |  |  |
| Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya |               |  |  |  |
| Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa                      | 150.000.000   |  |  |  |
| Beban Transfer Keuangan Lainnya                              |               |  |  |  |
| Jumlah beban Transfer  |               |  |  |  |
| JUMLAH BEBAN   | 150.000.000   |  |  |  |
| JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI                          | 1.350.000.000 |  |  |  |
|  |               |  |  |  |
| SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL                |               |  |  |  |
| SURPLUS NON OPERASIONAL                                      |               |  |  |  |
| Jumlah Surplus Non Operasional                               |               |  |  |  |
|  |               |  |  |  |
| DEFISIT NON OPERASIONAL                                      |               |  |  |  |
| Jumlah Defisit Non Operasional                               |               |  |  |  |
| JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL         |               |  |  |  |
|  |               |  |  |  |
| SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA                       |               |  |  |  |
|  |               |  |  |  |
| POS LUAR BIASA   |               |  |  |  |
| PENDAPATAN LUAR BIASA  |               |  |  |  |
| Jumlah Pendapatan Luar Biasa                                 |               |  |  |  |
|  |               |  |  |  |
| BEBAN LUAR BIASA   |               |  |  |  |
| Jumlah Beban Luar Biasa                                      |               |  |  |  |
|  |               |  |  |  |
| POS LUAR BIASA   |               |  |  |  |
|  |               |  |  |  |
| SURPLUS/DEFISIT - LO   | 1.350.000.000 |  |  |  |

PPK-SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

**Langkah V : Menutup nilai saldo Laporan Operasional SKPKD-PPKD**

Setelah menyusun laporan operasional SKPKD-PPKD maka Tenaga Akuntansi di SKPKD-PPKD harus melakukan jurnal penutup LO SKPKD-PPKD agar dapat menyusun laporan keuangan selanjutnya yaitu Neraca. Jurnal penutup ini dilakukan dengan maksud agar rekening/akun yang bersifat sementara (*nominal account*) nilai saldo dibuku besar terkait rekening/akun LO kembali menjadi nihil pada akhir periode akuntansi. Rekening/akun nominal adalah rekening/akun yang digunakan dalam penyusunan Laporan Operasional, yaitu Pendapatan-LO dan Beban. Untuk melakukan jurnal penutup LRA, kita persiapkan dulu Neraca Saldo setelah penutup LRA yang paling terakhir yaitu :

**PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN  
NERACA SALDO SETELAH PENUTUP LRA**

Urusan : 1.01 - Urusan Wajib xxx  
Organisasi : 1.20.08 – SKPKD-PPKD

Halaman .....

| Kode rekening |   |   |    |    | Uraian                                    | Neraca Saldo  |               |
|---------------|---|---|----|----|---|---------------|---------------|
|               |   |   |    |    |   | Debit         | Kredit        |
| 1             | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas di Kas Daerah                         | 200.000.000   |               |
| 1             | 1 | 3 | 05 | 04 | Piutang DAU                               | 1.000.000.000 |               |
| 1             | 2 | 1 | 01 | 02 | Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah | 50.000.000    |               |
| 1             | 2 | 1 | 01 | 02 | Penyertaan Modal kepada BUMD              | 250.000.000   |               |
| 1             | 4 | 1 | 01 | 01 | Dana Cadangan                             | 500.000.000   |               |
| 2             | 2 | 1 | 01 | 01 | Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan       |               | 150.000.000   |
| 3             | 1 | 1 | 01 | 01 | Ekuitas                                   |               | 500.000.000   |
| 7             | 2 | 1 | 04 | 01 | Dana Alokasi Umum- LO                     |               | 1.500.000.000 |
| 8             | 2 | 4 | 01 | 01 | Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa   | 150.000.000   |               |
|               |   |   |    |    | Jumlah                                    | 2.150.000.000 | 2.150.000.000 |

PPK-SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Berdasarkan nilai saldo kode akun 7 (pendapatan-LO) dan kode akun 8 (beban) maka dibuatlah jurnal penutup LO dengan cara mencatat balik akun 7 (pendapatan-LO) dari semula di kredit menjadi di debet dan mencatat balik kode akun 8 (beban) dari semula di debet menjadi di kredit. Selisihnya akan membentuk suatu nilai yang dicatat dalam akun surplus/(defisit)-LO. Selain itu dilakukan pula penutupan akun 3.1.8.99.99 (Penerimaan RK PPKD) dan akun 3.2.8.99.99 (Pengeluaran RK PPKD) untuk membentuk akun 3.1.3.01.01 (RK PPKD). Berikut adalah buku jurnal penutup LO yang dimaksud :

KABUPATEN KUNINGAN
BUKU JURNAL PENUTUP LO (JP LO)

SKPKD : SKPKD-PPKD Kabupaten Kuningan

Halaman 01

Table with 8 columns: Tanggal, Nomor (Bukti Penerimaan, Bukti Lain), Kode Rekening, Uraian, Ref., Debit (Rp), Kredit (Rp). Rows include transactions for 31/12/15 and a final 'Jumlah' row.

PPK-SKPKD PPKD

(tanda tangan) (nama lengkap) NIP..... (tanda tangan) (nama lengkap) NIP.....

Setelah dilakukan jurnal penutup LO tersebut maka terbentuklah Neraca Saldo setelah penutup LO sebagai berikut :

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
NERACA SALDO SETELAH PENUTUP LO

Urusan : 1.01 - Urusan Wajib xxx
Organisasi : 1.20.08 – SKPKD-PPKD

Halaman .....

Table with 8 columns: Kode rekening, Uraian, Neraca Saldo (Debit, Kredit). Rows list various accounts like Kas di Kas Daerah, Piutang DAU, Investasi, etc., and a final 'Jumlah' row.

PPK-SKPKD PPKD

(tanda tangan) (nama lengkap) NIP..... (tanda tangan) (nama lengkap) NIP.....

Pada Neraca Saldo setelah penutup LO ini sudah tidak tersaji lagi akun-akun pendapatan-LO dan beban.

**Langkah VI: Penyusunan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) SKPKD-PPKD**

Setelah LO SKPKD-PPKD tersusun, kemudian melakukan jurnal penutup LO, selanjutnya tenaga akuntansi SKPKD menyusun Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) SKPKD-PPKD yang mencatat transaksi pemda sebelum menyusun Neraca SKPD-PPKD yang mencatat transaksi pemda. LPE SKPKD-PPKD ini disusun berdasarkan Neraca Saldo setelah Penutup LO yang telah tersusun sebelumnya sebagai berikut :

**PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN  
NERACA SALDO SETELAH PENUTUP LO**

Urusan : 1.01 - Urusan Wajib xxx  
Organisasi : 1.20.08 – SKPKD-PPKD

Halaman .....

| Kode rekening |   |   |    |    | Uraian                                    | Neraca Saldo         |                      |
|---------------|---|---|----|----|---|----------------------|----------------------|
|               |   |   |    |    |   | Debit                | Kredit               |
|               |   |   |    |    |   |                      |                      |
| 1             | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas di Kas Daerah                         | 200.000.000          |                      |
| 1             | 1 | 3 | 05 | 04 | Piutang DAU                               | 1.000.000.000        |                      |
| 1             | 2 | 1 | 01 | 02 | Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah | 50.000.000           |                      |
| 1             | 2 | 1 | 01 | 02 | Penyertaan Modal kepada BUMD              | 250.000.000          |                      |
| 1             | 4 | 1 | 01 | 01 | Dana Cadangan                             | 500.000.000          |                      |
| 2             | 2 | 1 | 01 | 01 | Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan       |                      | 150.000.000          |
| 3             | 1 | 1 | 01 | 01 | <b>Ekuitas</b>                            |                      | <b>500.000.000</b>   |
| 3             | 1 | 1 | 02 | 01 | <b>Surplus/(Defisit)-LO</b>               |                      | <b>1.350.000.000</b> |
|               |   |   |    |    | <b>Jumlah</b>                             | <b>2.000.000.000</b> | <b>2.000.000.000</b> |

PPK-SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Berdasarkan semua nilai saldo kode akun 3 seperti 3.1.1.01.01 (Ekuitas) dan 3.1.1.02.01 (Surplus/(Deifisit)-LO maka dibuatlah LPE SKPKD-PPKD yang mencatat transaksi Pemda sebagai berikut :

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN  
SKPKD-PPKD  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
Per 31 Desember 20X1 dan 20X0

| URAIAN  | 20X1          | 20X0 |
|---|---------------|------|
| EKUITAS AWAL  | 500.000.000   |      |
| SURPLUS/(DEFISIT)-LO                                      | 1.350.000.000 |      |
| DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR : |               |      |
| KOREKSI NILAI PERSEDIAAN                                  |               |      |
| SELISIH REVALUASI ASET TETAP                              |               |      |
| LAIN-LAIN   |               |      |
| EKUITAS AKHIR   | 1.850.000.000 |      |

PPK-SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Selain LPE SKPKD-PPKD yang mencatat transaksi Pemda, disusun pula LPE SKPKD-PPKD yang mencatat transaksi Kas Daerah oleh Tenaga Akuntansi di Kuasa BUD berdasarkan Neraca Saldo setelah Penyesuaian Kuasa BUD sebagai berikut :

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN  
NERACA SALDO SETELAH PENYESUAIAN

Urusan : 1.01 - Urusan Wajib xxx  
Organisasi : 1.20.08 – SKPKD-PPKD

Halaman .....

| Kode rekening |   |   |    |    |  | Uraian                | Neraca Saldo |             |
|---------------|---|---|----|----|--|-----------------------|--------------|-------------|
|               |   |   |    |    |  |                       | Debit        | Kredit      |
| 1             | 1 | 1 | 01 | 01 |  | Kas di Kas Daerah     | 50.000.000   |             |
| 1             | 1 | 8 | 01 | 01 |  | RK SKPD A             |              |             |
| 1             | 1 | 8 | 01 | 02 |  | RK SKPD B             |              |             |
| 3             | 1 | 1 | 01 | 01 |  | Ekuitas               |              | 611.000.000 |
| 1             | 1 | 8 | 99 | 02 |  | Penerimaan RK SKPD B  | 295.000.000  |             |
| 1             | 2 | 8 | 99 | 01 |  | Pengeluaran RK SKPD A | 266.000.000  |             |
|               |   |   |    |    |  | Jumlah                | 611.000.000  | 611.000.000 |

Kepala Fungsi  
Akuntansi Pemda

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)

(tanda tangan)  
(nama lengkap)

Berdasarkan neraca saldo tersebut dilakukan jurnal penutup LO terlebih dahulu (walaupun sebenarnya Kuasa-BUD ini tidak menyusun LO) sebagai berikut :

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN  
NERACA SALDO SETELAH PENUTUP LO

Urusan : 1.01 - Urusan Wajib xxx  
Organisasi : 1.20.08 – SKPKD-PPKD

Halaman .....

| Kode rekening |   |   |    |    | Uraian                | Neraca Saldo |             |
|---------------|---|---|----|----|-----------------------|--------------|-------------|
|               |   |   |    |    |                       | Debit        | Kredit      |
|               |   |   |    |    |                       |              |             |
| 1             | 1 | 8 | 01 | 01 | RK SKPD A             | 295.000.000  |             |
| 1             | 1 | 8 | 01 | 02 | RK SKPD B             | 266.000.000  |             |
| 1             | 1 | 8 | 99 | 02 | Penerimaan RK SKPD B  |              | 295.000.000 |
| 1             | 2 | 8 | 99 | 01 | Pengeluaran RK SKPD A |              | 266.000.000 |
|               |   |   |    |    | Jumlah                | 561.000.000  | 561.000.000 |

PPK-SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

LPE SKPKD-PPKD yang mencatat transaksi Kas Daerah ini disusun berdasarkan Neraca Saldo setelah Penutup LO yang telah tersusun sebelumnya sebagai berikut :

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN  
NERACA SALDO SETELAH PENYESUAIAN

Urusan : 1.01 - Urusan Wajib xxx  
Organisasi : 1.20.08 – SKPKD-PPKD

Halaman .....

| Kode rekening |   |   |    |    | Uraian            | Neraca Saldo |             |
|---------------|---|---|----|----|-------------------|--------------|-------------|
|               |   |   |    |    |                   | Debit        | Kredit      |
|               |   |   |    |    |                   |              |             |
| 1             | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas di Kas Daerah | 50.000.000   |             |
| 1             | 1 | 8 | 01 | 01 | RK SKPD A         | 295.000.000  |             |
| 1             | 1 | 8 | 01 | 02 | RK SKPD B         | 266.000.000  |             |
| 3             | 1 | 1 | 01 | 01 | Ekuitas           |              | 611.000.000 |
|               |   |   |    |    | Jumlah            | 611.000.000  | 611.000.000 |

Kepala Fungsi  
Akuntansi Pemda

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)

(tanda tangan)  
(nama lengkap)

Berdasarkan semua nilai saldo kode akun 1 seperti 1.1.8.01.01 (RK SKPD A), 1.1.8.01.02 (RK SKPD B), dan 3 seperti 3.1.1.01.01 (Ekuitas) maka dibuatlah LPE SKPKD-PPKD yang mencatat transaksi Kas Daerah sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN  
SKPKD-PPKD  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
Per 31 Desember 20X1 dan 20X0

| URAIAN  | 20X1          | 20X0 |
|---|---------------|------|
| EKUITAS AWAL  | 611.000.000   |      |
| RK SKPD A   | (295.000.000) |      |
| RK SKPD B   | (266.000.000) |      |
| SURPLUS/(DEFISIT)-LO                                      |               |      |
| DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR : |               |      |
| KOREKSI NILAI PERSEDIAAN                                  |               |      |
| SELISIH REVALUASI ASET TETAP                              |               |      |
| LAIN-LAIN   |               |      |
| EKUITAS AKHIR   | 50.000.000    |      |

PPK-SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Langkah VII : Melakukan Penutup Akhir

Setelah menyusun LPE SKPKD maka Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD harus melakukan jurnal penutup akhir agar dapat menyusun laporan keuangan selanjutnya yaitu Neraca. Jurnal penutup ini dilakukan dengan maksud menutup akun 3.1.1.02.01 (Surplus/(Defisit)-LO pada Neraca SKPKD-PPKD yang mencatat transaksi pemerintah daerah. Berikut adalah buku jurnal penutup akhir yang dimaksud :

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU JURNAL PENUTUP AKHIR (JP AKHIR)

SKPKD : SKPKD-PPKD Kabupaten Kuningan

Halaman 01

| Tanggal  | Nomor            |            | Kode Rekening |   |   |    |    | Uraian                 | Ref. | Debit (Rp)    | Kredit (Rp)   |
|----------|------------------|------------|---------------|---|---|----|----|------------------------|------|---------------|---------------|
|          | Bukti Penerimaan | Bukti Lain |               |   |   |    |    |                        |      |               |               |
| 1        | 2                |            | 3             |   |   |    |    | 4                      | 5    | 6             | 7             |
|          |                  |            |               |   |   |    |    |                        |      |               |               |
| 31/12/22 |                  |            | 3             | 1 | 2 | 02 | 01 | Surplus (Defisit) - LO |      | 1.350.000.000 |               |
|          |                  |            | 3             | 1 | 1 | 01 | 01 | Ekuitas                |      |               | 1.350.000.000 |
| Jumlah   |                  |            |               |   |   |    |    |                        |      | 1.350.000.000 | 1.350.000.000 |

PPK-SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Setelah dilakukan jurnal penutup akhir tersebut maka terbentuklah Neraca Saldo akhir sebagai berikut :

**PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN**  
**NERACA SALDO SETELAH PENUTUP LO**

Urusan : 1.01 - Urusan Wajib xxx  
Organisasi : 1.20.08 – SKPKD-PPKD

Halaman .....

| Kode rekening |   |   |    |    | Uraian                                    | Neraca Saldo         |                      |
|---------------|---|---|----|----|---|----------------------|----------------------|
|               |   |   |    |    |   | Debit                | Kredit               |
|               |   |   |    |    |   |                      |                      |
| 1             | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas di Kas Daerah                         | 200.000.000          |                      |
| 1             | 1 | 3 | 05 | 04 | Piutang DAU                               | 1.000.000.000        |                      |
| 1             | 2 | 1 | 01 | 02 | Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah | 50.000.000           |                      |
| 1             | 2 | 1 | 01 | 02 | Penyertaan Modal kepada BUMD              | 250.000.000          |                      |
| 1             | 4 | 1 | 01 | 01 | Dana Cadangan                             | 500.000.000          |                      |
| 2             | 2 | 1 | 01 | 01 | Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan       |                      | 150.000.000          |
| 3             | 1 | 1 | 01 | 01 | <b>Ekuitas</b>                            |                      | <b>1.850.000.000</b> |
|               |   |   |    |    | <b>Jumlah</b>                             | <b>2.000.000.000</b> | <b>2.000.000.000</b> |

PPK-SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Pada Neraca Saldo setelah penutup LO ini sudah tidak tersaji lagi akun-akun 3.1.3.01.01 (RK PPKD).

Fungsi Akuntansi Pemda yang mencatat transaksi kas daerah juga melakukan penutupan akhir untuk menyusun neraca. Setelah menyusun LPE SKPKD maka Tenaga Akuntansi di Fungsi Akuntansi Pemda harus melakukan jurnal penutup akhir agar dapat menyusun laporan keuangan selanjutnya yaitu Neraca. Jurnal penutup ini dilakukan dengan maksud menutup 1.1.8.01.01 (RK SKPD A) dan 1.1.8.01.02 (RK SKPD B) pada Neraca SKPKD-PPKD yang mencatat transaksi kas daerah. Berikut adalah buku jurnal penutup akhir yang dimaksud :

KABUPATEN KUNINGAN
BUKU JURNAL PENUTUP AKHIR (JP AKHIR)

SKPKD : SKPKD Kabupaten Kuningan

Halaman 01

Table with 8 columns: Tanggal, Nomor (Bukti Penerimaan, Bukti Lain), Kode Rekening, Uraian, Ref., Debit (Rp), Kredit (Rp). Rows include dates like 31/12/22 and various account codes with their corresponding descriptions and monetary values.

Kepala Fungsi Akuntansi Pemda (tanda tangan) (nama lengkap) NIP.....
PPKD (tanda tangan) (nama lengkap) NIP.....

Setelah dilakukan jurnal penutup akhir tersebut maka terbentuklah Neraca Saldo akhir sebagai berikut :

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
NERACA SALDO SETELAH PENYESUAIAN

Urusan : 1.01 - Urusan Wajib xxx
Organisasi : 1.20.08 – SKPKD-Kuasa BUD xxx

Halaman .....

Table with 4 columns: Kode rekening, Uraian, Debit, Kredit. Rows include Kas di Kas Daerah, Ekuitas, and a total (Jumlah) row with values 50.000.000 and 50.000.000.

Kepala Fungsi Akuntansi Pemda (tanda tangan) (nama lengkap)
PPKD (tanda tangan) (nama lengkap)

Langkah VIII : Penyusunan Neraca SKPKD-PPKD

Selanjutnya tenaga akuntansi SKPKD-PPKD yang mencatat transaksi pemerintah daerah menyusun Neraca SKPD-PPKD. Neraca ini menyajikan informasi tentang posisi keuangan SKPKD-PPKD mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca SKPKD-PPKD ini disusun berdasarkan Neraca Saldo akhir yang telah tersusun sebelumnya sebagai berikut :

**PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN**  
**SKPKD-PPKD**  
**NERACA**  
**Per 31 Desember 20X1 dan 20X0**

| Uraian                                 | Jumlah               |      |
|--|----------------------|------|
|  | 20X1                 | 20X0 |
| <b>ASET</b>                            |                      |      |
| <b>ASET LANCAR</b>                     |                      |      |
| Kas di Kas Daerah                      | 200.000.000          |      |
| Piutang DAU                            | 1.000.000.000        |      |
| <b>Jumlah Aset Lancar</b>              | <b>1.200.000.000</b> |      |
| <b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>        |                      |      |
| <b>Investasi Nonpermanen</b>           |                      |      |
| <b>Jumlah Investasi Nonpermanen</b>    |                      |      |
| <b>Investasi Permanen</b>              |                      |      |
| Penyertaan Modal Pemerintah Daerah     | 300.000.000          |      |
| <b>Jumlah Investasi Permanen</b>       | <b>300.000.000</b>   |      |
| <b>Jumlah Investasi Jangka Panjang</b> | <b>300.000.000</b>   |      |
| <b>ASET TETAP</b>                      |                      |      |
| <b>Jumlah Aset Tetap</b>               |                      |      |
| <b>DANA CADANGAN</b>                   |                      |      |
| Dana Cadangan                          | 500.000.000          |      |
| <b>Jumlah Dana Cadangan</b>            | <b>500.000.000</b>   |      |
| <b>ASET LAINNYA</b>                    |                      |      |
| <b>Jumlah Aset Lainnya</b>             |                      |      |
| <b>JUMLAH ASET</b>                     | <b>2.000.000.000</b> |      |
| <b>KEWAJIBAN</b>                       |                      |      |
| <b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>         |                      |      |
| <b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>  |                      |      |
| <b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>        |                      |      |
| Utang DalamNegeri – Sektor Perbankan   | 150.000.000          |      |
| <b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang</b> | <b>150.000.000</b>   |      |
| <b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>                | <b>150.000.000</b>   |      |
| <b>EKUITAS</b>                         |                      |      |
| <b>EKUITAS</b>                         |                      |      |
| Ekuitas                                | 1.850.000.000        |      |
| <b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>    | <b>2.000.000.000</b> |      |

PPK-SKPKD

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Tenaga akuntansi SKPKD-PPKD yang mencatat transaksi kas daerah juga menyusun Neraca SKPD-PPKD. Neraca ini menyajikan informasi tentang posisi keuangan SKPKD-PPKD mengenai aset dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca SKPKD-PPKD ini disusun berdasarkan Neraca Saldo akhir yang telah tersusun sebelumnya sebagai berikut :

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN  
SKPKD-PPKD  
NERACA  
Per 31 Desember 20X1 dan 20X0

| Uraian                                 | Jumlah            |      |
|--|-------------------|------|
|  | 20X1              | 20X0 |
|  |                   |      |
| <b>ASET</b>                            |                   |      |
| <b>ASET LANCAR</b>                     |                   |      |
| Kas di Kas Daerah                      | 50.000.000        |      |
| <b>Jumlah Aset Lancar</b>              | <b>50.000.000</b> |      |
|  |                   |      |
| <b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>        |                   |      |
| <b>Investasi Nonpermanen</b>           |                   |      |
| <b>Jumlah Investasi Nonpermanen</b>    |                   |      |
|  |                   |      |
| <b>Investasi Permanen</b>              |                   |      |
| <b>Jumlah Investasi Permanen</b>       |                   |      |
| <b>Jumlah Investasi Jangka Panjang</b> |                   |      |
|  |                   |      |
| <b>ASET TETAP</b>                      |                   |      |
| <b>Jumlah Aset Tetap</b>               |                   |      |
|  |                   |      |
| <b>DANA CADANGAN</b>                   |                   |      |
| <b>Jumlah Dana Cadangan</b>            |                   |      |
|  |                   |      |
| <b>ASET LAINNYA</b>                    |                   |      |
| <b>Jumlah Aset Lainnya</b>             |                   |      |
|  |                   |      |
| <b>JUMLAH ASET</b>                     | <b>50.000.000</b> |      |
|  |                   |      |
| <b>KEWAJIBAN</b>                       |                   |      |
| <b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>         |                   |      |
| <b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>  |                   |      |
|  |                   |      |
| <b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>        |                   |      |
| <b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang</b> |                   |      |
| <b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>                |                   |      |
|  |                   |      |
| <b>EKUITAS</b>                         |                   |      |
| <b>EKUITAS</b>                         |                   |      |
| Ekuitas                                | 50.000.000        |      |
| <b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>    | <b>50.000.000</b> |      |

Kepala Fungsi  
Akuntansi Pemda

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)

(tanda tangan)  
(nama lengkap)

Dalam setiap Laporan Neraca yang disusun harus disajikan nilai neraca untuk 2 (dua) periode anggaran. Misalkan : jika membuat Laporan Neraca untuk tahun 2022 (per 31 Desember 2022) maka dalam Laporan Neraca tersebut juga harus dicantumkan nilai untuk neraca tahun sebelumnya (n-1) yaitu tahun 2021 (per 31 Desember 2021).

**Langkah VII : Menyusun Catatan atas Laporan Keuangan**

Setelah LRA, LO, LPE dan Neraca dapat disusun maka Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD khususnya yang mencatat transaksi pemerintah daerah kemudian menyusun Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang menjelaskan berbagai hal terkait dengan laporan keuangan yang disajikan sehingga laporan keuangan tersebut dapat dimengerti dan dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Informasi yang harus ada dalam CALK adalah sebagai berikut :

**PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
SKPKD-PPKD**

|                  |   |   |
|------------------|---|---|
| <b>PENGANTAR</b> |   |   |
| <b>BAB I</b>     | <b>PENDAHULUAN</b>  |   |
|                  | 1.1   | Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan SKPKD-PPKD                    |
|                  | 1.2   | Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan SKPKD-PPKD                       |
|                  | 1.3   | Sistematika penulisan catatan atas Laporan Keuangan SKPKD-PPKD              |
| <b>BAB II</b>    | <b>IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD-PPKD</b>             |   |
|                  | 2.1   | Ikhtisar pencapaian target kinerja keuangan SKPKD-PPKD                      |
|                  | 2.2   | Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan |
| <b>BAB III</b>   | <b>PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD-PPKD</b>              |   |
|                  | 3.1   | Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPKD-PPKD |
|                  | 3.1.1   | Pendapatan  |
|                  | 3.1.2   | Beban   |
|                  | 3.1.3   | Pembiayaan  |
|                  | 3.1.4   | Belanja   |
|                  | 3.1.5   | Transfer  |
|                  | 3.1.6   | Aset  |
|                  | 3.1.7   | Kewajiban   |
|                  | 3.1.8   | Ekuitas   |
| <b>BAB IV</b>    | <b>PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD-PPKD</b> |   |
| <b>BAB V</b>     | <b>PENUTUP</b>  |   |

Penyusunan CaLK tersebut diatas secara rinci dijelaskan sebagaimana berikut dibawah ini :

**Bab I Pendahuluan**

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPKD-PPKD

Bagian ini dapat diisi dengan maksud dan tujuan sesuai isi dari

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No.01 tentang Penyajian Laporan Keuangan. Pada PSAP tersebut diatur tujuan umum dan tujuan khusus penyajian laporan keuangan. Selain itu SKPKD-PPKD dapat menambahkan sendiri maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan dari sudut pandang akuntabilitas dan transparansi terkait dengan adanya otonomi daerah. Bagian ini dapat disiapkan sendiri oleh PPK-SKPKD beserta stafnya.

#### Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPKD-PPKD

Bagian ini dapat diisi dengan berbagai regulasi yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan SKPKD-PPKD mulai dari Undang-undang sampai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri termasuk juga Buletin Teknis (Bultek) yang dikeluarkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP). Akan lebih baik jika pasal dan ayat yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan SKPKD-PPKD juga disebutkan. Bagian ini dapat disiapkan sendiri oleh PPK-SKPKD beserta stafnya.

#### Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPKD-PPKD

Bagian ini diisi dengan kerangka atau struktur penulisan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya diatas. Bagian ini dapat disiapkan sendiri oleh PPK-SKPKD beserta stafnya.

### **Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPKD-PPKD**

#### Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPKD-PPKD

Bagian ini dapat diisi dengan ikhtisar indikator dan pencapaian kinerja kegiatan operasional yang berdimensi keuangan dalam suatu periode pelaporan. Pencapaian kinerja keuangan yang telah ditetapkan dijelaskan secara obyektif. Keberhasilan pencapaian kinerja dapat diketahui berdasarkan tingkat efisiensi dan efektivitas suatu program dan kegiatan. Efisiensi dapat diukur dengan membandingkan keluaran (*output*) dengan masukan (*input*). Sedangkan Efektivitas diukur dengan

membandingkan hasil (*outcome*) dengan target yang ditetapkan.

Pembahasan mengenai kinerja keuangan harus dihubungkan dengan tujuan dan sasaran dari rencana strategis pemerintah dan indikator sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ikhtisar pembahasan kinerja keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus:

- (a) Menguraikan strategi dan sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan;
- (b) Memberikan gambaran yang jelas atas realisasi dan rencana kinerja keuangan dalam satu entitas pelaporan; dan
- (c) Menguraikan prosedur yang telah disusun dan dijalankan oleh manajemen untuk dapat memberikan keyakinan yang beralasan bahwa informasi kinerja keuangan yang dilaporkan adalah relevan dan andal;

Pembahasan mengenai kinerja keuangan harus:

- (a) Meliputi baik hasil yang positif maupun negatif;
- (b) Menyajikan data historis yang relevan;
- (c) Membandingkan hasil yang dicapai dengan tujuan dan rencana yang telah ditetapkan;
- (d) Menyajikan informasi penjelasan lainnya yang diyakini oleh manajemen akan dibutuhkan oleh pembaca laporan keuangan untuk dapat memahami indikator, hasil, dan perbedaan yang ada dengan tujuan atau rencana.

Untuk lebih meningkatkan kegunaan informasi, penjelasan entitas pelaporan harus juga meliputi penjelasan mengenai apa yang semestinya dilakukan dan rencana untuk meningkatkan kinerja program. Bagian ini dapat disiapkan dengan meminta data ke Badan Perencanaan Daerah atau meminta Laporan Kinerja (LAKIP) SKPKD-PPKD.

Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan



Bagian ini dapat diisi dengan penjelasan atas keterbatasan dan kesulitan yang penting sehubungan dengan pengukuran dan pelaporan kinerja keuangan yang harus diungkapkan sesuai dengan relevansinya atas indikator kinerja yang diuraikan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Keterbatasan yang relevan akan beragam dari satu program ke program lainnya, namun biasanya faktor yang dibahas termasuk, antara lain:

- (a) Kinerja biasanya tidak dapat diungkapkan secara utuh dengan hanya menggunakan satu indikator saja;
- (b) Indikator kinerja tidak dapat memperlihatkan alasan mengapa kinerja berada pada tingkat yang dilaporkan; dan
- (c) Melihat indikator kuantitatif secara eksklusif sering kali menghasilkan konsekuensi yang tidak diinginkan.

Oleh karena itu, indikator kinerja harus dilengkapi dengan informasi penjelasan yang sesuai. Informasi penjelasan ini akan membantu pengguna memahami indikator yang dilaporkan, mendapat gambaran mengenai kinerja keuangan entitas pelaporan, dan mengevaluasi pentingnya faktor yang mendasari yang mungkin mempengaruhi kinerja keuangan yang dilaporkan.

Informasi penjelasan mungkin termasuk, sebagai contoh, informasi mengenai faktor yang substansial yang berada di luar kendali entitas, dan informasi mengenai faktor-faktor yang membuat entitas mempunyai pengaruh penting. Bagian ini dapat disiapkan dengan meminta data ke Badan Perencanaan Daerah atau meminta Laporan Kinerja (LAKIP) SKPKD-PPKD.

### **Bab III Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPKD-PPKD**

#### **Rincian dari penjelasan setiap pos-pos pelaporan keuangan SKPKD-PPKD**

Penjelasan setiap pos-pos dalam laporan keuangan SKPKD-PPKD merupakan bagian yang paling dominan dalam suatu CaLK karena menjelaskan secara rinci aktivitas pemerintah pada setiap pos akun. Pada dasarnya ada 2 (dua) jenis penjelasan pos-pos dalam laporan

keuangan yaitu :

(a) Pos Pendapatan, Beban, Pembiayaan, Belanja dan Transfer

Penjelasan rinci atas pos ini dijelaskan minimal sampai dengan kode rekening jenis. Hal yang disajikan adalah realisasi tahun berjalan dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya dan dibandingkan dengan anggaran murni dan perubahannya. Setiap rupiah yang disajikan pada pos tersebut diberi penjelasan mengapa lebih tinggi atau lebih rendah daripada tahun lalu serta penjelasan mengapa melebihi atau kurang dari anggarannya khususnya anggaran perubahan. Setiap pos juga sebaiknya dijelaskan dengan diagram, misalnya diagram pie yang menjelaskan komposisi prosentasi pos tersebut dibandingkan dengan pos pada klasifikasi rekening yang lebih tinggi (kelompok atau akun).

(b) Pos Aset, Kewajiban, dan Ekuitas

Penjelasan rinci atas pos ini dijelaskan minimal sampai dengan kode rekening jenis. Hal yang disajikan adalah nilai pos tahun berjalan dan dibandingkan dengan nilai pos tahun sebelumnya. Setiap rupiah yang disajikan pada pos tersebut diberi penjelasan mengapa lebih tinggi atau lebih rendah daripada tahun lalu. Setiap pos juga sebaiknya dijelaskan dengan diagram, misalnya diagram pie yang menjelaskan komposisi prosentasi pos tersebut dibandingkan dengan pos pada klasifikasi rekening yang lebih tinggi (kelompok atau akun).

Bagian ini dapat disiapkan sendiri oleh PPK-SKPKD beserta stafnya dengan tambahan informasi dari pihak terkait di SKPKD-PPKD.

#### **Bab IV Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan SKPKD-PPKD**

Suatu entitas pelaporan mengungkapkan hal-hal berikut ini apabila belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, yaitu:

(a) domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi tempat entitas tersebut berada;

- (b) penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya;
- (c) ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya.

Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan kejadian-kejadian penting selama tahun pelaporan, seperti:

- (a) Penggantian manajemen SKPKD-PPKD selama tahun berjalan;
- (b) Kesalahan manajemen SKPKD-PPKD terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen baru;
- (c) Komitmen atau kontinjensi yang tidak dapat disajikan pada Neraca; dan
- (d) Penggabungan atau pemekaran entitas tahun berjalan.
- (e) Kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya adanya pemogokan yang harus ditanggulangi pemerintah.

Bagian ini dapat disiapkan sendiri oleh PPK-SKPKD beserta stafnya.

## **Bab V Penutup**

Bagian ini berisi paragraf penutup.

Laporan keuangan SKPKD-PPKD yang mencatat transaksi pemerintah daerah yang telah disusun oleh Tenaga Akuntansi di PPK-SKPKD kemudian diserahkan kepada PPKD melalui PPK-SKPKD untuk kemudian diserahkan kepada Fungsi Akuntansi Pemda PPKD untuk penyusunan Laporan Keuangan Daerah bersama laporan keuangan SKPKD-PPKD yang mencatat transaksi kas daerah. Dengan tersusunnya Laporan Keuangan ini maka seluruh siklus sistem akuntansi di SKPKD-PPKD telah dijalankan.

## **SISTEM DAN PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH (SKPKD-KUASA BUD)**

Bagian ini menjelaskan Sistem dan Prosedur Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mencatat transaksi di Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut sistem dan prosedur akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan SKPKD-Kuasa BUD.

### **KEBIJAKAN UMUM**

Sistem akuntansi di Pemerintah Kabupaten Kuningan menggunakan konsep konsolidasian sehingga setiap entitas akuntansi harus menjalankan sistem akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangannya masing-masing. Seluruh laporan keuangan kemudian dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan. Namun mekanisme ini tidak berlaku bagi SKPKD-Kuasa BUD di Pemerintah Kabupaten Kuningan karena mempunyai tugas khusus yaitu menyusun Laporan Arus Kas secara mandiri dan menyusun Laporan Realisasi Anggaran Daerah untuk kepentingan rekonsiliasi dengan Laporan Realisasi Anggaran Daerah konsolidasian yang disusun oleh Fungsi Akuntansi Pemerintah Daerah.

SKPKD-Kuasa BUD sebagai entitas akuntansi menyajikan Laporan Keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Daerah;
2. Neraca; dan
3. Laporan Arus Kas.

Penyajian Laporan Keuangan dalam satu tahun anggaran dilakukan minimal dalam 2 kali, yaitu :

1. Semester, yaitu laporan keuangan untuk periode Januari – Juni.
2. Tahunan, yaitu laporan keuangan untuk periode satu tahun (Januari – Desember).

Namun untuk keperluan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik dengan melakukan rekonsiliasi data keuangan daerah maka penyajian laporan keuangan dalam satu tahun anggaran dilakukan secara triwulanan.

### **PIHAK-PIHAK TERKAIT**

Berbagai pihak/fungsi yang terkait dalam sistem dan prosedur laporan keuangan SKPKD-Kuasa BUD beserta tugas-tugasnya adalah :

1. Tenaga Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Daerah

Dalam pelaksanaan prosedur ini, Tenaga Akuntansi Kuasa BUD bekerja mencatat transaksi kas daerah yang memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Membuat laporan keuangan, yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran Daerah, Neraca, dan Laporan Arus Kas; dan
- b. Menyampaikan laporan keuangan SKPKD-Kuasa BUD kepada Kepala Fungsi Akuntansi Pemerintah Daerah untuk rekonsiliasi.

2. Kuasa Bendahara Umum Daerah : Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi BPKAD.

Dalam pelaksanaan prosedur ini, Kepala Fungsi Akuntansi Pemerintah Daerah memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Bertanggungjawab atas sistem akuntansi pelaporan keuangan SKPKD-Kuasa BUD yang dipimpinnya;
- b. Memeriksa dan menandatangani laporan keuangan SKPKD-Kuasa BUD yang disusun oleh Tenaga Akuntansi Kuasa BUD sesuai periodenya; dan
- c. Menyampaikan laporan keuangan SKPKD-Kuasa BUD yang disusunnya kepada PPKD/BUD untuk disetujui.

3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (tidak termasuk Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan):

Dalam pelaksanaan prosedur ini, PPKD memiliki tugas menerima dan memeriksa laporan keuangan SKPKD-Kuasa BUD dari Kuasa BUD.

### **BUKU DAN ATAU FORMULIR YANG DIGUNAKAN**

Buku dan atau formulir yang digunakan dalam pelaksanaan sistem dan prosedur laporan keuangan ini adalah :

1. Neraca Saldo (NS)

Merupakan formulir yang digunakan untuk mencatat nilai saldo setiap rekening/akun per rincian objek yang berasal dari nilai saldo rekening/akun tersebut di buku besar/buku besar pembantu. Di neraca saldo ini dilihat atau diketahui jumlah nilai masing-masing rekening/akun dan jumlah nilai total dari seluruh rekening. Dalam sistem dan prosedur penyusunan laporan keuangan SKPKD-Kuasa BUD ini ada beberapa jenis neraca saldo yaitu : neraca saldo setelah penyesuaian dan neraca saldo setelah penutup LRA.

2. Buku Jurnal Penutup (JPn)

Merupakan buku jurnal yang digunakan untuk melakukan pencatatan akuntansi atas transaksi-transaksi non kas khususnya digunakan untuk menutup akun nominal atau akun sementara yang ada pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dalam sistem dan prosedur penyusunan laporan keuangan SKPKD-Kuasa BUD ini ada satu jenis jurnal penutup yaitu : jurnal penutup LRA yang menjadi sekaligus penutup akhir

## **KERANGKA SISTEM**

Prosedur penyusunan laporan keuangan di SKPKD-Kuasa BUD dimulai saat Tenaga Akuntansi di Kuasa BUD telah menghasilkan neraca saldo setelah penyesuaian sebagaimana yang telah dijelaskan dalam sistem dan prosedur lampiran 4 (sistem dan prosedur akuntansi SKPD-Kuasa BUD).

Setelah itu Tenaga Akuntansi di PPK-Kuasa BUD mulai menyusun laporan keuangan berupa LRA berdasarkan neraca saldo setelah penyesuaian, kemudian menyusun jurnal penutup LRA. Setelah menyusun jurnal penutup LRA, terbentuklah neraca saldo setelah penutup LRA untuk menyusun neraca. Berdasarkan LRA dan Neraca ini maka Kuasa BUD menyusun LAK.

Setelah LRA, Neraca dan LAK disusun maka Tenaga Akuntansi di Kuasa BUD diserahkan kepada Kuasa BUD untuk diperiksa. Setelah itu Kuasa BUD menyerahkan Laporan Keuangan kepada PPKD paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Berdasarkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi maka PPKD menyusun laporan keuangan daerah. Penyusunan laporan keuangan daerah tersebut paling lambat diselesaikan 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sudah termasuk pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan oleh Inspektorat Daerah.

## **ALUR PROSEDUR TEKNIS**

Prosedur teknis penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUD ini dimulai dari penyiapan neraca saldo setelah penyesuaian hingga laporan keuangan disampaikan kepada PPKD. Secara lebih rinci uraian alur prosedur ini adalah sebagai berikut :

### **Langkah I : Penyusunan Neraca Saldo setelah Penyesuaian**

Setelah seluruh penjurnalan transaksi dan penyesuaian serta koreksi di posting ke buku besar maka Tenaga Akuntansi di Kuasa BUD menyusun neraca saldo setelah penyesuaian. Misalkan terdapat neraca saldo setelah penyesuaian pada Kuasa BUD sebagai berikut :

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN  
NERACA SALDO SETELAH PENYESUAIAN

Urusan : 1.20 - Urusan Wajib xxx

Organisasi : 1.20.08 – Kuasa BUD

Halaman .....

| Kode Rekening |   |   |    |    | Uraian   | Neraca               |                      |
|---------------|---|---|----|----|--|----------------------|----------------------|
|               |   |   |    |    |  | Debit                | Kredit               |
| 1             | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas di Kas Daerah                                    | 250.000.000          |                      |
| 3             | 1 | 1 | 01 | 01 | Ekuitas  |                      | 205.000.000          |
| 4             | 1 | 1 | 12 | 01 | Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA |                      | 30.000.000           |
| 4             | 1 | 2 | 02 | 02 | Retribusi Pasar Kios - LRA                           |                      | 20.000.000           |
| 4             | 2 | 2 | 01 | 01 | Dana Alokasi Umum - LRA                              |                      | 500.000.000          |
| 5             | 1 | 1 | 01 | 01 | Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi                    | 550.000.000          |                      |
| 5             | 2 | 2 | 01 | 01 | Belanja alat tulis kantor                            | 25.000.000           |                      |
| 5             | 2 | 3 | 12 | 02 | Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer  | 30.000.000           |                      |
| 5             | 1 | 7 | 03 | 01 | Transfer Bantuan Keuangan ke Desa                    | 150.000.000          |                      |
| 6             | 1 | 1 | 01 | 01 | Penerimaan Pemb. Penggunaan SILPA tahun sebelumnya   |                      | 400.000.000          |
| 6             | 1 | 4 | 03 | 01 | Penerimaan Pemb. Pinjaman Dalam Negeri dari Bank     |                      | 100.000.000          |
| 6             | 2 | 2 | 01 | 01 | Pengeluaran Pemb. Penyertaan Modal pada BUMD         | 250.000.000          |                      |
|               |   |   |    |    |  |                      |                      |
|               |   |   |    |    | <b>TOTAL</b>   | <b>1.255.000.000</b> | <b>1.255.000.000</b> |

Kuasa BUD

PPKD/BUD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Kode rekening/akun yang dicantumkan dalam penyusunan neraca saldo tersebut adalah cukup kode rekening/akun dalam klasifikasi ekonomi hingga rincian obyek, sehingga tidak muncul kode program dan kegiatannya.

Langkah II : Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)  
SKPKD-Kuasa BUD

Dengan menggunakan neraca saldo setelah penyesuaian tersebut diatas maka Tenaga Akuntansi di Kuasa BUD dapat mulai menyusun laporan realisasi anggaran (LRA) daerah sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN  
NERACA SALDO SETELAH PENYESUAIAN

Urusan : 1.20 - Urusan Wajib xxx

Organisasi : 1.20.08 – Kuasa BUD

Halaman .....

| Kode Rekening |   |   |    |    | Uraian   | Neraca        |               |
|---------------|---|---|----|----|--|---------------|---------------|
|               |   |   |    |    |  | Debit         | Kredit        |
| 1             | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas di Kas Daerah                                    | 250.000.000   |               |
| 3             | 1 | 1 | 01 | 01 | Ekuitas  |               | 205.000.000   |
| 4             | 1 | 1 | 12 | 01 | Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA |               | 30.000.000    |
| 4             | 1 | 2 | 02 | 02 | Retribusi Pasar Kios - LRA                           |               | 20.000.000    |
| 4             | 2 | 2 | 01 | 01 | Dana Alokasi Umum - LRA                              |               | 500.000.000   |
| 5             | 1 | 1 | 01 | 01 | Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi                    | 550.000.000   |               |
| 5             | 1 | 7 | 03 | 01 | Belanja Transfer Bantuan Keuangan ke Desa            | 150.000.000   |               |
| 5             | 2 | 2 | 01 | 01 | Belanja alat tulis kantor                            | 25.000.000    |               |
| 5             | 2 | 3 | 12 | 02 | Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer  | 30.000.000    |               |
| 6             | 1 | 1 | 01 | 01 | Penerimaan Pemb. Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya   |               | 400.000.000   |
| 6             | 1 | 4 | 03 | 01 | Penerimaan Pemb. Pinjaman Dalam Negeri dari Bank     |               | 100.000.000   |
| 6             | 2 | 2 | 01 | 01 | Pengeluaran Pemb. Penyertaan Modal pada BUMD         | 250.000.000   |               |
|               |   |   |    |    | TOTAL  | 1.255.000.000 | 1.255.000.000 |

Kuasa BUD

PPKD/BUD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)

NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)

NIP.....

Berdasarkan Neraca Saldo setelah penyesuaian diatas, gunakan nilai saldo kode akun 4 (pendapatan-LRA), kode 5 (belanja), dan kode 6 (pembiayaan) untuk menyusun Laporan Realisasi Anggaran Daerah sebagai berikut :

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAERAH  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20XX

(Dalam Rupiah)

| Nomor Urut | Uraian   | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi   | Lebih (Kurang) |
|------------|--|----------------------------|-------------|----------------|
| 1          | 2  | 3                          | 4           | 5              |
| 1          | Pendapatan   |                            |             |                |
| 1.1        | Pendapatan Asli Daerah                                       |                            |             |                |
| 1.1.1      | Pendapatan pajak daerah                                      |                            | 30.000.000  |                |
| 1.1.2      | Pendapatan retribusi daerah                                  |                            | 20.000.000  |                |
| 1.1.3      | Pendapatan hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan |                            |             |                |
| 1.1.4      | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah                    |                            |             |                |
| 1.2        | Dana Perimbangan   |                            |             |                |
| 1.2.1      | Dana Bagi Hasil  |                            |             |                |
| 1.2.1.1    | Dana Bagi Hasil Pajak  |                            |             |                |
| 1.2.1.2    | Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam                |                            |             |                |
| 1.2.2      | Dana Alokasi Umum  |                            | 500.000.000 |                |
| 1.2.3      | Dana Alokasi Khusus  |                            |             |                |
| 1.3        | Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah                         |                            |             |                |
| 1.3.1      | Pendapatan Hibah   |                            |             |                |

|            |   |  |                      |  |
|------------|---|--|----------------------|--|
| 1.3.2      | Dana Darurat  |  |                      |  |
| 1.3.3      | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya |  |                      |  |
| 1.3.4      | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus                               |  |                      |  |
| 1.3.5      | Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya     |  |                      |  |
|            | <b>Jumlah Pendapatan</b>  |  | <b>550.000.000</b>   |  |
| <b>2</b>   | <b>Belanja</b>  |  |                      |  |
| <b>2.1</b> | <b>Belanja Tidak Langsung</b>                                     |  |                      |  |
| 2.1.1      | Belanja Pegawai   |  | 550.000.000          |  |
| 2.1.2      | Belanja Bunga   |  |                      |  |
| 2.1.3      | Belanja subsidi   |  |                      |  |
| 2.1.4      | Belanja Hibah   |  |                      |  |
| 2.1.5      | Belanja Bantuan Sosial  |  |                      |  |
| 2.1.6      | Belanja Bagi Hasil  |  |                      |  |
| 2.1.7      | Belanja Bantuan Keuangan  |  | 150.000.000          |  |
| 2.1.8      | Belanja Tidak Terduga   |  |                      |  |
| <b>2.2</b> | <b>Belanja Langsung</b>   |  |                      |  |
| 2.2.1      | Belanja Pegawai   |  |                      |  |
| 2.2.2      | Belanja Barang dan Jasa   |  | 25.000.000           |  |
| 2.2.3      | Belanja Modal   |  | 30.000.000           |  |
|            | <b>Jumlah Belanja</b>   |  | <b>755.000.000</b>   |  |
|            | <b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>  |  | <b>(205.000.000)</b> |  |
| <b>3.</b>  | <b>Pembiayaan Daerah</b>  |  |                      |  |
| <b>3.1</b> | <b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>                               |  |                      |  |
| 3.1.1      | Penggunaan SILPA  |  | 400.000.000          |  |
| 3.1.2      | Pencairan Dana Cadangan   |  |                      |  |
| 3.1.3      | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan                   |  |                      |  |
| 3.1.4      | Penerimaan Pinjaman Daerah  |  | 100.000.000          |  |
| 3.1.5      | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman                             |  |                      |  |
| 3.1.6      | Penerimaan Piutang Daerah   |  |                      |  |
|            | <b>Jumlah Penerimaan</b>  |  | <b>500.000.000</b>   |  |
| <b>3.2</b> | <b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>                              |  |                      |  |
| 3.2.1      | Pembentukan Dana Cadangan   |  |                      |  |
| 3.2.2      | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah                    |  | 250.000.000          |  |
| 3.2.3      | Pembayaran Pokok Utang  |  |                      |  |
| 3.2.4      | Pemberian Pinjaman Daerah   |  |                      |  |
|            | <b>Jumlah Pengeluaran</b>   |  | <b>250.000.000</b>   |  |
|            | <b>Pembiayaan Neto</b>  |  | <b>250.000.000</b>   |  |
| <b>3.3</b> | <b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)</b>                     |  | <b>45.000.000</b>    |  |

Kuasa BUD

PPKD/BUD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)

NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)

NIP.....

**Langkah III: Menutup nilai saldo Laporan Realisasi Anggaran (LRA)**  
**Kuasa BUD**

Setelah menyusun laporan realisasi anggaran maka Tenaga Akuntansi di Kuasa BUD harus melakukan jurnal penutup LRA agar dapat menyusun laporan keuangan selanjutnya yaitu Neraca. Jurnal penutup ini dilakukan dengan maksud agar rekening/akun yang bersifat sementara (*nominal account*) nilai saldo dibuku besar terkait rekening/akun LRA kembali menjadi nihil pada akhir periode akuntansi. Rekening/akun nominal adalah rekening/akun yang digunakan dalam

penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, yaitu Pendapatan-LRA, Belanja, dan Pembiayaan. Untuk melakukan jurnal penutup LRA, kita persiapkan dulu Neraca Saldo Sesudah Penyesuaian yang paling terakhir yaitu :

**PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN  
NERACA SALDO SETELAH PENYESUAIAN**

Urusan : 1.20 - Urusan Wajib xxx

Organisasi : 1.20.08 – Kuasa BUD

Halaman .....

| Kode Rekening |   |   |    |    | Uraian   | Neraca        |               |
|---------------|---|---|----|----|--|---------------|---------------|
|               |   |   |    |    |  | Debit         | Kredit        |
| 1             | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas di Kas Daerah                                    | 250.000.000   |               |
| 3             | 1 | 1 | 01 | 01 | Ekuitas  |               | 205.000.000   |
| 4             | 1 | 1 | 12 | 01 | Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA |               | 30.000.000    |
| 4             | 1 | 2 | 02 | 02 | Retribusi Pasar Kios - LRA                           |               | 20.000.000    |
| 4             | 2 | 2 | 01 | 01 | Dana Alokasi Umum - LRA                              |               | 500.000.000   |
| 5             | 1 | 1 | 01 | 01 | Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi                    | 550.000.000   |               |
| 5             | 1 | 7 | 03 | 01 | Belanja Transfer Bantuan Keuangan ke Desa            | 150.000.000   |               |
| 5             | 2 | 2 | 01 | 01 | Belanja alat tulis kantor                            | 25.000.000    |               |
| 5             | 2 | 3 | 12 | 02 | Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer  | 30.000.000    |               |
| 6             | 1 | 1 | 01 | 01 | Penerimaan Pemb. Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya   |               | 400.000.000   |
| 6             | 1 | 4 | 03 | 01 | Penerimaan Pemb. Pinjaman Dalam Negeri dari Bank     |               | 100.000.000   |
| 6             | 2 | 2 | 01 | 01 | Pengeluaran Pemb. Penyertaan Modal pada BUMD         | 250.000.000   |               |
|               |   |   |    |    |  |               |               |
|               |   |   |    |    | TOTAL  | 1.255.000.000 | 1.255.000.000 |

Kuasa BUD

PPKD/BUD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Berdasarkan nilai saldo kode akun 4 (pendapatan-LRA), kode akun 5 (belanja) dan kode akun 6 (pembiayaan) maka dibuatlah jurnal penutup LRA dengan cara mencatat balik akun 4 (pendapatan-LRA) dan akun 6.1 (penerimaan pembiayaan) dari semula di kredit menjadi di debet dan mencatat balik kode akun 5 (belanja) dan akun 6.2 (pengeluaran pembiayaan) dari semula di debet menjadi di kredit sebagai berikut :

KABUPATEN KUNINGAN
BUKU JURNAL PENUTUP LRA (JP LRA)

SKPKD : SKPKD –Kuasa BUD Kabupaten Kuningan

Halaman 01

| Tanggal  | Nomor            |            | Kode Rekening |   |   |    |    | Uraian   | Ref. | Debit (Rp)    | Kredit (Rp)   |
|----------|------------------|------------|---------------|---|---|----|----|--|------|---------------|---------------|
|          | Bukti Penerimaan | Bukti Lain |               |   |   |    |    |  |      |               |               |
| 1        | 2                |            | 3             |   |   |    |    | 4  | 5    | 6             | 7             |
| 31/12/15 |                  |            | 4             | 1 | 1 | 12 | 01 | Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA |      | 30.000.000    |               |
|          |                  |            | 4             | 1 | 2 | 02 | 02 | Retribusi Pasar Kios - LRA                           |      | 20.000.000    |               |
|          |                  |            | 4             | 2 | 2 | 01 | 01 | Dana Alokasi Umum - LRA                              |      | 500.000.000   |               |
|          |                  |            | 6             | 1 | 1 | 01 | 01 | Penerimaan Pemb. Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya   |      | 400.000.000   |               |
|          |                  |            | 6             | 1 | 4 | 03 | 01 | Penerimaan Pemb. Pinjaman Dalam Negeri dari Bank     |      | 100.000.000   |               |
|          |                  |            | 5             | 1 | 1 | 01 | 01 | Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi                    |      |               | 550.000.000   |
|          |                  |            | 5             | 1 | 7 | 03 | 01 | Belanja Transfer Bantuan Keuangan ke Desa            |      |               | 150.000.000   |
|          |                  |            | 5             | 2 | 2 | 01 | 01 | Belanja alat tulis kantor                            |      |               | 25.000.000    |
|          |                  |            | 5             | 2 | 3 | 12 | 02 | Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer  |      |               | 30.000.000    |
|          |                  |            | 6             | 2 | 2 | 01 | 01 | Pengeluaran Pemb. Penyertaan Modal pada BUMD         |      |               | 250.000.000   |
|          |                  |            | 3             | 1 | 1 | 01 | 01 | Ekuitas  |      |               | 45.000.000    |
| Jumlah   |                  |            |               |   |   |    |    |  |      | 1.050.000.000 | 1.050.000.000 |

Kuasa BUD

PPKD/BUD

(tanda tangan)
(nama lengkap)
NIP.....

(tanda tangan)
(nama lengkap)
NIP.....

Setelah dilakukan jurnal penutup LRA tersebut maka terbentuklah Neraca Saldo setelah penutup LRA sebagai berikut :

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
NERACA SALDO SETELAH PENYESUAIAN

Urusan : 1.20 - Urusan Wajib xxx
Organisasi : 1.20.08 – Kuasa BUD

Halaman .....

| Kode Rekening |   |   |    |    | Uraian            | Neraca        |               |
|---------------|---|---|----|----|-------------------|---------------|---------------|
|               |   |   |    |    |                   | Debit         | Kredit        |
| 1             | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas di Kas Daerah | 250.000.000   |               |
| 3             | 1 | 1 | 01 | 01 | Ekuitas           |               | 250.000.000   |
|               |   |   |    |    | TOTAL             | 1.050.000.000 | 1.050.000.000 |

Kuasa BUD

PPKD/BUD

(tanda tangan)
(nama lengkap)
NIP.....

(tanda tangan)
(nama lengkap)
NIP.....

Pada Neraca Saldo setelah penutup LRA ini sudah tidak tersaji lagi akun-akun pendapatan-LRA, belanja, dan pembiayaan.

**Langkah IV: Penyusunan Neraca SKPKD-Kuasa BUD**

Setelah melakukan jurnal penutup LRA, selanjutnya tenaga akuntansi Kuasa BUD menyusun Neraca Kuasa BUD. Neraca Kuasa BUD ini disusun berdasarkan Neraca Saldo setelah Penutup LRA yang telah tersusun sebelumnya sebagai berikut :

**PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN**  
**SKPKD-KUASA BUD**  
**NERACA**  
**Per 31 Desember 20X1 dan 20X0**

| Uraian   | Jumlah             |      |
|--|--------------------|------|
|  | 20X1               | 20X0 |
| <b>ASET</b>                                    |                    |      |
| <b>ASET LANCAR</b>                             |                    |      |
| Kas di Kas Daerah                              | 250.000.000        |      |
| <b>    Jumlah Aset Lancar</b>                  | <b>250.000.000</b> |      |
| <b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>                |                    |      |
| <b>    Investasi Nonpermanen</b>               |                    |      |
| <b>        Jumlah Investasi Nonpermanen</b>    |                    |      |
| <b>    Investasi Permanen</b>                  |                    |      |
| <b>        Jumlah Investasi Permanen</b>       |                    |      |
| <b>        Jumlah Investasi Jangka Panjang</b> |                    |      |
| <b>ASET TETAP</b>                              |                    |      |
| <b>    Jumlah Aset Tetap</b>                   |                    |      |
| <b>DANA CADANGAN</b>                           |                    |      |
| <b>    Jumlah Dana Cadangan</b>                |                    |      |
| <b>ASET LAINNYA</b>                            |                    |      |
| <b>    Jumlah Aset Lainnya</b>                 |                    |      |
| <b>        JUMLAH ASET</b>                     | <b>250.000.000</b> |      |
| <b>KEWAJIBAN</b>                               |                    |      |
| <b>    KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>             |                    |      |
| <b>        Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>  |                    |      |
| <b>    KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>            |                    |      |
| <b>        Jumlah Kewajiban Jangka Panjang</b> |                    |      |
| <b>        JUMLAH KEWAJIBAN</b>                |                    |      |
| <b>EKUITAS</b>                                 |                    |      |
| <b>    EKUITAS</b>                             |                    |      |
| Ekuitas  | 250.000.000        |      |
| <b>        JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>    | <b>250.000.000</b> |      |

Kuasa BUD  
(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

PPKD/BUD  
(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

**Langkah V : Menyusun Laporan Arus Kas (LAK)**

LAK disusun oleh unit pemerintahan yang melaksanakan fungsi perbendaharaan. Penyusunan laporan arus kas ini dilakukan dengan menggunakan metode langsung (*direct method*) terhadap seluruh transaksi yang dilakukan secara kas. Hal ini berarti bahwa laporan arus kas hampir menyerupai laporan realisasi anggaran karena pendapatan dan belanja serta pembiayaan semua dicatat berdasarkan atas asas kas (*cash basis*). Pada dasarnya LAK ini disusun berdasarkan LRA daerah dan Neraca.

Contoh bentuk Laporan Arus Kas, baik untuk laporan semesteran maupun untuk laporan akhir tahun bentuknya sama, adalah sebagai berikut :

**PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0**  
**Metode Langsung**

| Uraian   | Jumlah               |      |
|--|----------------------|------|
|  | 20X1                 | 20X0 |
| 1  | 2                    | 3    |
| <b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>                       |                      |      |
| <b>Arus Kas Masuk</b>  |                      |      |
| Penerimaan Pajak Daerah                                      | 30.000.000           |      |
| Penerimaan Retribusi Daerah                                  | 20.000.000           |      |
| Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan |                      |      |
| Penerimaan Lain-lainPAD yang Sah                             |                      |      |
| Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak                             |                      |      |
| Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam                  |                      |      |
| Penerimaan Dana Alokasi Umum                                 | 500.000.000          |      |
| Penerimaan Dana AlokasiKhusus                                |                      |      |
| Penerimaan Dana Otonomi Khusus                               |                      |      |
| Penerimaan Dana Penyesuaian                                  |                      |      |
| Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak                       |                      |      |
| Penerimaan Bagi Hasil Lainnya                                |                      |      |
| Penerimaan Hibah   |                      |      |
| Penerimaan Dana Darurat                                      |                      |      |
| Penerimaan Lainnya   |                      |      |
| Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa                        |                      |      |
| <b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>                                 | <b>550.000.000</b>   |      |
| <b>Arus Keluar Kas</b>                                       |                      |      |
| Pembayaran Pegawai   | 550.000.000          |      |
| Pembayaran Barang  | 25.000.000           |      |
| Pembayaran Bunga   |                      |      |
| Pembayaran Subsidi   |                      |      |
| Pembayaran Hibah   |                      |      |
| Pembayaran Bantuan Sosial                                    |                      |      |
| Pembayaran Tak Terduga                                       |                      |      |
| Pembayaran Bagi Hasil Pajak                                  |                      |      |
| Pembayaran Bagi Hasil Retribusi                              |                      |      |
| Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya                     |                      |      |
| Pembayaran Bantuan Keuangan                                  | 150.000.000          |      |
| Pembayaran Kejadian Luar Biasa                               |                      |      |
| <b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>                                | <b>725.000.000</b>   |      |
| <b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>                | <b>(175.000.000)</b> |      |

|  |                      |  |
|--|----------------------|--|
|  |                      |  |
| <b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>                             |                      |  |
| <b>Arus Masuk Kas</b>  |                      |  |
| Pencairan Dana Cadangan  |                      |  |
| Penjualan atas Tanah   |                      |  |
| Penjualan atas Peralatan dan Mesin                                   |                      |  |
| Penjualan atas Gedung dan Bangunan                                   |                      |  |
| Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan                           |                      |  |
| Penjualan Aset Tetap   |                      |  |
| Penjualan Aset Lainnya   |                      |  |
| Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan                      |                      |  |
| Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen                          |                      |  |
| <b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>   |                      |  |
|  |                      |  |
| <b>Arus Keluar Kas</b>   |                      |  |
| Pembentukan Dana Cadangan  |                      |  |
| Perolehan Tanah  |                      |  |
| Perolehan Peralatan dan Mesin  | 30.000.000           |  |
| Perolehan Gedung dan Bangunan  |                      |  |
| Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan                                |                      |  |
| Perolehan Aset Tetap Lainnya   |                      |  |
| Perolehan Aset Lainnya   |                      |  |
| Penyertaan Modal Pemerintah Daerah                                   | 250.000.000          |  |
| Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen                         |                      |  |
| <b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>  | <b>280.000.000</b>   |  |
| <b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>                      | <b>(280.000.000)</b> |  |
|  |                      |  |
|  |                      |  |
| <b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>                             |                      |  |
| <b>Arus Masuk Kas</b>  |                      |  |
| Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat                             |                      |  |
| Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Daerah Lainnya                    |                      |  |
| Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank                        | 100.000.000          |  |
| Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bukan Bank                  |                      |  |
| Pinjaman Dalam Negeri – Obligasi                                     |                      |  |
| Pinjaman Dalam Negeri – Lainnya                                      |                      |  |
| Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara                 |                      |  |
| Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah                 |                      |  |
| Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya         |                      |  |
| <b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>   | <b>100.000.000</b>   |  |
|  |                      |  |
| <b>Arus Keluar Kas</b>   |                      |  |
| Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat            |                      |  |
| Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Daerah Lainnya   |                      |  |
| Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank       |                      |  |
| Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bukan Bank |                      |  |
| Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Obligasi                    |                      |  |
| Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lainnya                     |                      |  |
| Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara                          |                      |  |
| Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah                          |                      |  |
| Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya                  |                      |  |
| <b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>  |                      |  |
| <b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</b>                      | <b>100.000.000</b>   |  |
|  |                      |  |
| <b>Arus Kas dari Aktivitas Transitoris</b>                           |                      |  |
| <b>Arus Masuk Kas</b>  |                      |  |
| Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga                                  |                      |  |
| <b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>   |                      |  |
|  |                      |  |
| <b>Arus Keluar Kas</b>   |                      |  |
| Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)                           |                      |  |
| <b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>  |                      |  |
| <b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris</b>                    | <b>(355.000.000)</b> |  |
| <b>Kenaikan/Penurunan Kas</b>  |                      |  |

|   |                    |  |
|---|--------------------|--|
| <b>Saldo Awal Kas di BUD &amp; Kas di Bendahara Pengeluaran</b> | <b>611.000.000</b> |  |
| <b>Saldo Akhir Kas di BUD</b>                                   | <b>256.000.000</b> |  |
| <b>Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran</b>                 |                    |  |
| <b>Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan</b>                  |                    |  |
| <b>Saldo Akhir Kas</b>  | <b>256.000.000</b> |  |

Kuasa BUD

PPKD/BUD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)

NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)

NIP.....



## **SISTEM DAN PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (KONSOLIDASIAN)**

Bagian ini menjelaskan Sistem dan Prosedur Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara Konsolidasian oleh entitas pelaporan.

### **KEBIJAKAN UMUM**

Sistem akuntansi di Pemerintah Kabupaten Kuningan menggunakan konsep konsolidasian sehingga setiap entitas akuntansi harus menjalankan sistem akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangannya masing-masing. Seluruh laporan keuangan kemudian dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai pertanggungjawaban dari entitas pelaporan yang secara teknis dilaksanakan oleh Fungsi Akuntansi Pemerintah Daerah. Laporan Keuangan yang dihasilkan Fungsi Akuntansi Pemerintah Daerah sebagai pelaksana teknis entitas pelaporan adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
3. Neraca;
4. Laporan Operasional (LO);
5. Laporan Arus Kas (LAK);
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
7. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).

Penyajian Laporan Keuangan dalam satu tahun anggaran dilakukan minimal dalam 2 kali, yaitu :

1. Semester, yaitu laporan keuangan untuk periode Januari – Juni.
2. Tahunan, yaitu laporan keuangan untuk periode satu tahun (Januari – Desember).

Namun untuk keperluan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik dengan melakukan rekonsiliasi data keuangan daerah maka penyajian laporan keuangan dalam satu tahun anggaran dilakukan secara triwulanan.

## **PIHAK-PIHAK TERKAIT**

Berbagai pihak/fungsi yang terkait dalam sistem dan prosedur penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah beserta tugas-tugasnya adalah :

### **1. Tenaga Akuntansi di Fungsi Akuntansi Pemerintah Daerah**

Dalam pelaksanaan prosedur ini, Tenaga Akuntansi di Fungsi Akuntansi Pemerintah Daerah bekerja sebagai konsolidator laporan keuangan pemerintah daerah memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Menerima laporan keuangan SKPD dari Pengguna Anggaran/Kepala SKPD;
- b. Menerima laporan keuangan SKPKD-PPKD dari PPKD selaku Pengguna Anggaran;
- c. Menerima laporan keuangan SKPKD-Kuasa BUD dari PPKD selaku BUD; dan
- d. Melakukan konsolidasi laporan keuangan SKPD dan laporan keuangan SKPKD-PPKD menjadi laporan keuangan pemerintah daerah serta melakukan rekonsiliasi dengan laporan keuangan SKPKD-Kuasa BUD; dan
- e. Menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah kepada Kepala Fungsi Akuntansi Pemda untuk diperiksa.

### **2. Kepala Fungsi Akuntansi Pemerintah Daerah : Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi BPKAD.**

Dalam pelaksanaan prosedur ini, Kepala Fungsi Akuntansi Pemerintah Daerah bekerja sebagai konsolidator laporan keuangan pemerintah daerah memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Memeriksa laporan keuangan pemerintah daerah yang disusun oleh Tenaga Akuntansi Fungsi Akuntansi Pemerintah Daerah sesuai periodenya; dan
  - b. Menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah yang disusunnya kepada PPKD.
3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (tidak termasuk Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan):

Dalam pelaksanaan prosedur ini, PPKD memiliki tugas :

- a. Menerima dan memeriksa laporan keuangan pemerintah daerah dari Kepala Fungsi Akuntansi Pemda; dan
  - b. Menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah kepada Kepala Daerah untuk disetujui.

### **BUKU DAN ATAU FORMULIR YANG DIGUNAKAN**

Buku dan atau formulir yang digunakan dalam pelaksanaan sistem dan prosedur laporan keuangan ini adalah :

1. Kertas Kerja Konsolidasi (KKK)  
Merupakan kertas kerja (worksheet) dengan lajur sesuai banyaknya entitas akuntansi (SKPD dan SKPKD-PPKD) sebagai alat untuk menyusun Neraca Saldo Pemerintah Daerah.
2. Buku Jurnal Penyesuaian (Jp)  
Merupakan buku jurnal yang digunakan untuk melakukan pencatatan akuntansi penyesuaian khususnya atas jurnal eliminasi pada saat menyusun Neraca Saldo Pemerintah Daerah pada Kertas Kerja Konsolidasi.
3. Neraca Saldo (NS)  
Merupakan formulir yang digunakan untuk mencatat nilai saldo setiap rekening/akun per rincian objek yang berasal dari nilai saldo rekening/akun tersebut di buku besar/buku besar pembantu. Di neraca saldo ini dilihat atau diketahui jumlah nilai

masing-masing rekening/akun dan jumlah nilai total dari seluruh rekening. Dalam sistem dan prosedur penyusunan laporan keuangan SKPKD-Kuasa BUD ini ada beberapa jenis neraca saldo yaitu : neraca saldo setelah penyesuaian dan neraca saldo setelah penutup LRA.

#### 4. Buku Jurnal Penutup (JPn)

Merupakan buku jurnal yang digunakan untuk menutup akun temporer. Ada beberapa jurnal penutup yang dapat disusun yaitu:

- a. Buku Jurnal Penutup LRA, yang digunakan untuk menutup akun-akun estimasi pendapatan, apropirasi belanja dan transfer, estimasi perubahan SAL, pendapatan-LRA, belanja, dan transfer setelah selesai menyusun LRA;
- b. Buku Jurnal Penutup LO, yang digunakan untuk menutup akun-akun pendapatan-LO dan beban setelah selesai menyusun LO; dan
- c. Buku Jurnal Penutup Akhir, yang digunakan untuk menutup akun surplus/(defisit)-LO untuk menyusun Neraca.

### **KERANGKA SISTEM**

Prosedur penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dimulai setelah Fungsi Akuntansi Pemda menerima seluruh neraca saldo dari entitas akuntansi (SKPD dan SKPKD-PPKD). Neraca saldo dari SKPD dan SKPKD-PPKD akan dikonsolidasikan dengan menggunakan kertas kerja konsolidasi. Agar dapat memperoleh neraca saldo konsolidasian yang disebut neraca saldo daerah, perlu menghilangkan akun-akun resiprokal seperti RK dengan menggunakan jurnal eliminasi.

Berdasarkan neraca saldo daerah yang sudah terbentuk maka Tenaga Akuntansi Fungsi Akuntansi Pemda mulai menyusun laporan keuangan berupa LRA berdasarkan neraca saldo daerah, kemudian menyusun jurnal penutup LRA. Setelah menyusun jurnal penutup LRA, terbentuklah neraca saldo setelah penutup LRA untuk menyusun LO. Berdasarkan neraca saldo setelah penutup LRA, disusun laporan operasional, kemudian menyusun jurnal penutup LO yang selanjutnya

menghasilkan neraca saldo setelah penutup LO. Berdasarkan neraca saldo setelah penutup LO, disusun LPE, kemudian menyusun jurnal penutup akhir, yang selanjutnya menghasilkan neraca saldo akhir. Berdasarkan neraca saldo akhir ini, disusun neraca. Berdasarkan LRA dan Neraca ini maka Kuasa BUD menyusun LP SAL dan LAK.

Setelah LRA, Neraca, LP SAL dan LAK disusun maka Tenaga Akuntansi Fungsi Akuntansi Pemda diserahkan kepada Kepala Fungsi Akuntansi Pemda untuk diperiksa. Setelah itu Kepala Fungsi Akuntansi Pemda menyerahkan Laporan Keuangan kepada PPKD paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Berdasarkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi maka PPKD menyusun laporan keuangan daerah. Penyusunan laporan keuangan daerah tersebut paling lambat diselesaikan 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sudah termasuk pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan oleh Inspektorat Daerah.

## **ALUR PROSEDUR TEKNIS**

Prosedur teknis penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ini dimulai dari penyiapan neraca saldo daerah setelah penyesuaian hingga laporan keuangan disampaikan kepada PPKD. Secara lebih rinci uraian alur prosedur ini adalah sebagai berikut :

### **Langkah I : Penyusunan Neraca Saldo Daerah setelah Penyesuaian**

Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh Fungsi Akuntansi Pemda dimulai dari penyusunan neraca saldo daerah setelah penyesuaian yang disusun dengan menggunakan kertas kerja konsolidasi (KKK). Pada KKK ini dimasukan Neraca Saldo semua entitas akuntansi (SKPD dan SKPKD-PPKD) kecuali SKPKD-Kuasa BUD. Misalkan terdapat KKK sebagai berikut :

**PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN**  
**KERTAS KERJA KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

| Kode Rekening |   |   |    |    |  | Uraian   | SKPD A        |             | SKPD B        |               | PPKD          |               | Eliminasi |        | Neraca |        |
|---------------|---|---|----|----|--|--|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------|--------|--------|
|               |   |   |    |    |  |  | Debit         | Kredit      | Debit         | Kredit        | Debit         | Kredit        | Debit     | Kredit | Debit  | Kredit |
| 1             | 1 | 1 | 01 | 01 |  | Kas di Kas Daerah                                      |               |             |               |               | 250.000.000   |               |           |        |        |        |
| 1             | 1 | 1 | 02 | 01 |  | Kas di Bendahara Penerimaan                            | 0             |             | 0             |               |               |               |           |        |        |        |
| 1             | 1 | 1 | 03 | 01 |  | Kas di Bendahara Pengeluaran                           | 5.000.000     |             | 1.000.000     |               |               |               |           |        |        |        |
| 1             | 1 | 3 | 01 | 15 |  | Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan |               |             | 50.000.000    |               |               |               |           |        |        |        |
| 1             | 1 | 3 | 05 | 03 |  | Piutang DAU  |               |             |               |               | 1.000.000.000 |               |           |        |        |        |
| 1             | 1 | 7 | 01 | 01 |  | Persediaan Alat Tulis Kantor                           | 150.000       |             | 800.000       |               |               |               |           |        |        |        |
| 1             | 1 | 8 | 01 | 01 |  | RK SKPD A  |               |             |               |               | 295.000.000   |               |           |        |        |        |
| 1             | 1 | 8 | 01 | 02 |  | RK SKPD B  |               |             |               |               | 266.000.000   |               |           |        |        |        |
| 1             | 2 | 1 | 01 | 02 |  | Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah              |               |             |               |               | 50.000.000    |               |           |        |        |        |
| 1             | 2 | 2 | 01 | 02 |  | Penyertaan Modal Kepada BUMD                           |               |             |               |               | 250.000.000   |               |           |        |        |        |
| 1             | 3 | 2 | 16 | 02 |  | Personal Komputer                                      | 50.000.000    |             | 75.000.000    |               |               |               |           |        |        |        |
| 1             | 3 | 3 | 01 | 01 |  | Bangunan Gedung Kantor                                 | 1.000.000.000 |             | 5.000.000.000 |               |               |               |           |        |        |        |
| 1             | 3 | 7 | 01 | 16 |  | Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer                |               | 10.000.000  |               | 25.000.000    |               |               |           |        |        |        |
| 1             | 3 | 7 | 02 | 01 |  | Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja      |               | 100.000.000 |               | 500.000.000   |               |               |           |        |        |        |
| 1             | 4 | 1 | 01 | 01 |  | Dana Cadangan  |               |             |               |               | 500.000.000   |               |           |        |        |        |
| 2             | 2 | 1 | 01 | 01 |  | Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan                    |               |             |               |               |               | 150.000.000   |           |        |        |        |
| 3             | 1 | 1 | 01 | 01 |  | Ekuitas  |               | 910.000.000 |               | 4.550.000.000 |               | 1.111.000.000 |           |        |        |        |
| 3             | 1 | 2 | 01 | 01 |  | Estimasi Pendapatan                                    |               |             | 250.000.000   |               | 1.500.000.000 |               |           |        |        |        |
| 3             | 1 | 2 | 02 | 01 |  | Estimasi Penerimaan Pembiayaan                         |               |             |               |               | 500.000.000   |               |           |        |        |        |
| 3             | 1 | 2 | 03 | 01 |  | Apropriasi Belanja                                     |               | 350.000.000 |               | 400.000.000   |               | 1.000.000.000 |           |        |        |        |
| 3             | 1 | 2 | 03 | 02 |  | Apropriasi Transfer                                    |               |             |               |               |               | 150.000.000   |           |        |        |        |
| 3             | 1 | 2 | 04 | 01 |  | Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan                      |               |             |               |               |               | 300.000.000   |           |        |        |        |
| 3             | 1 | 2 | 05 | 01 |  | Estimasi Perubahan SAL                                 | 60.000.000    |             |               | 115.000.000   | 50.000.000    |               |           |        |        |        |
| 3             | 1 | 3 | 01 | 01 |  | RK PPKD  |               | 295.000.000 |               | 266.000.000   |               |               |           |        |        |        |
| 4             | 1 | 1 | 12 | 01 |  | Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA   |               |             |               | 30.000.000    |               |               |           |        |        |        |

|   |   |   |    |    |  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |
|---|---|---|----|----|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|--|
| 4 | 1 | 2 | 02 | 02 | Retribusi Pasar Kios - LRA                           |                      |                      |                      | 20.000.000           |                      |                      |  |  |  |
| 4 | 2 | 2 | 01 | 01 | Dana Alokasi Umum - LRA                              |                      |                      |                      |                      |                      | 500.000.000          |  |  |  |
| 5 | 1 | 1 | 01 | 01 | Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi                    | 250.000.000          |                      | 300.000.000          |                      |                      |                      |  |  |  |
| 5 | 1 | 7 | 03 | 01 | Belanja Transfer Bantuan Keuangan ke Desa            |                      |                      |                      |                      | 150.000.000          |                      |  |  |  |
| 5 | 2 | 2 | 01 | 01 | Belanja alat tulis kantor                            | 10.000.000           |                      | 15.000.000           |                      |                      |                      |  |  |  |
| 5 | 2 | 3 | 12 | 02 | Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer  | 30.000.000           |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |
| 6 | 1 | 1 | 01 | 01 | Penerimaan Pemb. Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya   |                      |                      |                      |                      |                      | 400.000.000          |  |  |  |
| 6 | 1 | 4 | 03 | 01 | Penerimaan Pemb. Pinjaman Dalam Negeri dari Bank     |                      |                      |                      |                      |                      | 100.000.000          |  |  |  |
| 6 | 2 | 2 | 01 | 01 | Pengeluaran Pemb. Penyertaan Modal pada BUMD         |                      |                      |                      |                      | 250.000.000          |                      |  |  |  |
| 7 | 1 | 1 | 15 | 01 | Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - LO |                      |                      |                      | 80.000.000           |                      |                      |  |  |  |
| 7 | 1 | 2 | 06 | 03 | Retribusi Pasar Kios - LO                            |                      |                      |                      | 20.000.000           |                      |                      |  |  |  |
| 7 | 2 | 1 | 03 | 01 | Dana Alokasi Umum - LO                               |                      |                      |                      |                      |                      | 1.500.000.000        |  |  |  |
| 8 | 1 | 1 | 01 | 01 | Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO              | 250.000.000          |                      | 300.000.000          |                      |                      |                      |  |  |  |
| 8 | 1 | 2 | 01 | 01 | Beban Persediaan alat tulis kantor                   | 9.850.000            |                      | 14.200.000           |                      |                      |                      |  |  |  |
| 8 | 2 | 4 | 01 | 01 | Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa              |                      |                      |                      |                      | 150.000.000          |                      |  |  |  |
|   |   |   |    |    |  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |
|   |   |   |    |    | <b>TOTAL</b>   | <b>1.665.000.000</b> | <b>1.665.000.000</b> | <b>6.006.000.000</b> | <b>6.006.000.000</b> | <b>5.211.000.000</b> | <b>5.211.000.000</b> |  |  |  |

Kode rekening/akun yang dicantumkan dalam penyusunan neraca saldo daerah pada KKS tersebut adalah cukup kode rekening/akun dalam klasifikasi ekonomi hingga rincian obyek, sehingga tidak muncul kode program dan kegiatannya.

Berdasarkan KKS tersebut, dilakukan analisa untuk menemukan akun-akun resiprokal yang perlu dieliminasi. Setelah akun-akun tersebut ditemukan, maka dilakukan jurnal eliminasi sebagai berikut :

**KABUPATEN KUNINGAN**  
**BUKU JURNAL PENYESUAIAN (JP)**

**SKPKD** : Fungsi Akuntansi Pemda Kabupaten Kuningan

Halaman 01

| Tanggal  | Nomor                   |               | Kode Rekening |   |   |    |    | Uraian    | Ref. | Debit<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----------|-------------------------|---------------|---------------|---|---|----|----|-----------|------|---------------|----------------|
|          | Bukti<br>Peneri<br>maan | Bukti<br>Lain |               |   |   |    |    |           |      |               |                |
| 1        | 2                       |               | 3             |   |   |    |    | 4         | 5    | 6             | 7              |
| 31/12/22 |                         |               | 3             | 1 | 3 | 01 | 01 | RK PPKD   |      | 561.000.000   |                |
|          |                         |               | 1             | 1 | 8 | 01 | 01 | RK SKPD A |      |               | 295.000.000    |
|          |                         |               | 1             | 1 | 8 | 01 | 02 | RK SKPD B |      |               | 266.000.000    |
|          |                         |               |               |   |   |    |    |           |      |               |                |
| Jumlah   |                         |               |               |   |   |    |    |           |      | 561.000.000   | 561.000.000    |

Kepala Fungsi  
Akuntansi Pemda

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Setelah melakukan jurnal eliminasi, maka pada KKS tersebut dapat diperoleh nilai neraca saldo daerah pada kolom paling kanan. Berikut adalah KKS setelah posting jurnal eliminasi dan pembentukan neraca saldo daerah tersebut :



**PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN**  
**KERTAS KERJA KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

| Kode Rekening |   |   |    |    | Uraian   | SKPD A        |             | SKPD B        |               | PPKD          |               | Eliminasi   |             | Neraca        |               |
|---------------|---|---|----|----|--|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
|               |   |   |    |    |  | Debit         | Kredit      | Debit         | Kredit        | Debit         | Kredit        | Debit       | Kredit      | Debit         | Kredit        |
| 1             | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas di Kas Daerah                                      |               |             |               |               | 250.000.000   |               |             |             | 250.000.000   |               |
| 1             | 1 | 1 | 02 | 01 | Kas di Bendahara Penerimaan                            | 0             |             | 0             |               |               |               |             |             | 0             |               |
| 1             | 1 | 1 | 03 | 01 | Kas di Bendahara Pengeluaran                           | 5.000.000     |             | 1.000.000     |               |               |               |             |             | 6.000.000     |               |
| 1             | 1 | 3 | 01 | 15 | Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan |               |             | 50.000.000    |               |               |               |             |             | 50.000.000    |               |
| 1             | 1 | 3 | 05 | 03 | Piutang DAU  |               |             |               |               | 1.000.000.000 |               |             |             | 1.000.000.000 |               |
| 1             | 1 | 7 | 01 | 01 | Persediaan Alat Tulis Kantor                           | 150.000       |             | 800.000       |               |               |               |             |             | 950.000       |               |
| 1             | 1 | 8 | 01 | 01 | RK SKPD A  |               |             |               |               | 295.000.000   |               |             | 295.000.000 | 0             |               |
| 1             | 1 | 8 | 01 | 02 | RK SKPD B  |               |             |               |               | 266.000.000   |               |             | 266.000.000 | 0             |               |
| 1             | 2 | 1 | 01 | 02 | Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah              |               |             |               |               | 50.000.000    |               |             |             | 50.000.000    |               |
| 1             | 2 | 2 | 01 | 02 | Penyertaan Modal Kepada BUMD                           |               |             |               |               | 250.000.000   |               |             |             | 250.000.000   |               |
| 1             | 3 | 2 | 16 | 02 | Personal Komputer                                      | 50.000.000    |             | 75.000.000    |               |               |               |             |             | 125.000.000   |               |
| 1             | 3 | 3 | 01 | 01 | Bangunan Gedung Kantor                                 | 1.000.000.000 |             | 5.000.000.000 |               |               |               |             |             | 6.000.000.000 |               |
| 1             | 3 | 7 | 01 | 16 | Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer                |               | 10.000.000  |               | 25.000.000    |               |               |             |             |               | 35.000.000    |
| 1             | 3 | 7 | 02 | 01 | Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja      |               | 100.000.000 |               | 500.000.000   |               |               |             |             |               | 600.000.000   |
| 1             | 4 | 1 | 01 | 01 | Dana Cadangan  |               |             |               |               | 500.000.000   |               |             |             | 500.000.000   |               |
| 2             | 2 | 1 | 01 | 01 | Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan                    |               |             |               |               |               | 150.000.000   |             |             |               | 150.000.000   |
| 3             | 1 | 1 | 01 | 01 | Ekuitas  |               | 910.000.000 |               | 4.550.000.000 |               | 1.111.000.000 |             |             |               | 6.571.000.000 |
| 3             | 1 | 2 | 01 | 01 | Estimasi Pendapatan                                    |               |             | 250.000.000   |               | 1.500.000.000 |               |             |             | 1.750.000.000 |               |
| 3             | 1 | 2 | 02 | 01 | Estimasi Penerimaan Pembiayaan                         |               |             |               |               | 500.000.000   |               |             |             | 500.000.000   |               |
| 3             | 1 | 2 | 03 | 01 | Apropriasi Belanja                                     |               | 350.000.000 |               | 400.000.000   |               | 1.000.000.000 |             |             |               | 1.750.000.000 |
| 3             | 1 | 2 | 03 | 02 | Apropriasi Transfer                                    |               |             |               |               |               | 150.000.000   |             |             |               | 150.000.000   |
| 3             | 1 | 2 | 04 | 01 | Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan                      |               |             |               |               |               | 300.000.000   |             |             |               | 300.000.000   |
| 3             | 1 | 2 | 05 | 01 | Estimasi Perubahan SAL                                 | 60.000.000    |             |               | 115.000.000   | 50.000.000    |               |             |             | 5.000.000     |               |
| 3             | 1 | 3 | 01 | 01 | RK PPKD  |               | 295.000.000 |               | 266.000.000   |               |               | 561.000.000 |             |               | 0             |
| 4             | 1 | 1 | 12 | 01 | Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan                       |               |             |               | 30.000.000    |               |               |             |             |               | 30.000.000    |

|   |   |   |    |    |  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                    |                    |                       |                       |
|---|---|---|----|----|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |   |   |    |    | dan Perkotaan - LRA                                  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                    |                    |                       |                       |
| 4 | 1 | 2 | 02 | 02 | Retribusi Pasar Kios - LRA                           |                      |                      |                      | 20.000.000           |                      |                      |                    |                    |                       | 20.000.000            |
| 4 | 2 | 2 | 01 | 01 | Dana Alokasi Umum - LRA                              |                      |                      |                      |                      |                      | 500.000.000          |                    |                    |                       | 500.000.000           |
| 5 | 1 | 1 | 01 | 01 | Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi                    | 250.000.000          |                      | 300.000.000          |                      |                      |                      |                    |                    | 550.000.000           |                       |
| 5 | 1 | 7 | 03 | 01 | Belanja Transfer Bantuan Keuangan ke Desa            |                      |                      |                      |                      | 150.000.000          |                      |                    |                    | 150.000.000           |                       |
| 5 | 2 | 2 | 01 | 01 | Belanja alat tulis kantor                            | 10.000.000           |                      | 15.000.000           |                      |                      |                      |                    |                    | 25.000.000            |                       |
| 5 | 2 | 3 | 12 | 02 | Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer  | 30.000.000           |                      |                      |                      |                      |                      |                    |                    | 30.000.000            |                       |
| 6 | 1 | 1 | 01 | 01 | Penerimaan Pemb. Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya   |                      |                      |                      |                      |                      | 400.000.000          |                    |                    |                       | 400.000.000           |
| 6 | 1 | 4 | 03 | 01 | Penerimaan Pemb. Pinjaman Dalam Negeri dari Bank     |                      |                      |                      |                      |                      | 100.000.000          |                    |                    |                       | 100.000.000           |
| 6 | 2 | 2 | 01 | 01 | Pengeluaran Pemb. Penyertaan Modal pada BUMD         |                      |                      |                      |                      | 250.000.000          |                      |                    |                    | 250.000.000           |                       |
| 7 | 1 | 1 | 15 | 01 | Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - LO |                      |                      |                      | 80.000.000           |                      |                      |                    |                    |                       | 80.000.000            |
| 7 | 1 | 2 | 06 | 03 | Retribusi Pasar Kios - LO                            |                      |                      |                      | 20.000.000           |                      |                      |                    |                    |                       | 20.000.000            |
| 7 | 2 | 1 | 03 | 01 | Dana Alokasi Umum - LO                               |                      |                      |                      |                      |                      | 1.500.000.000        |                    |                    |                       | 1.500.000.000         |
| 8 | 1 | 1 | 01 | 01 | Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO              | 250.000.000          |                      | 300.000.000          |                      |                      |                      |                    |                    | 550.000.000           |                       |
| 8 | 1 | 2 | 01 | 01 | Beban Persediaan alat tulis kantor                   | 9.850.000            |                      | 14.200.000           |                      |                      |                      |                    |                    | 24.050.000            |                       |
| 8 | 2 | 4 | 01 | 01 | Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa              |                      |                      |                      |                      | 150.000.000          |                      |                    |                    | 150.000.000           |                       |
|   |   |   |    |    |  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                    |                    |                       |                       |
|   |   |   |    |    | <b>TOTAL</b>   | <b>1.665.000.000</b> | <b>1.665.000.000</b> | <b>6.006.000.000</b> | <b>6.006.000.000</b> | <b>5.211.000.000</b> | <b>5.211.000.000</b> | <b>561.000.000</b> | <b>561.000.000</b> | <b>12.211.000.000</b> | <b>12.211.000.000</b> |

Langkah II : Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Dengan menggunakan neraca saldo daerah setelah penyesuaian tersebut diatas maka Tenaga Akuntansi Fungsi Akuntansi Pemda dapat mulai menyusun laporan realisasi anggaran (LRA) daerah. Neraca saldo daerah yang harus disiapkan adalah sebagai berikut :

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN  
NERACA SALDO DAERAH SETELAH PENYESUAIAN

| Kode Rekening |   |   |    |    |  | Uraian   | Neraca         |                |
|---------------|---|---|----|----|--|--|----------------|----------------|
|               |   |   |    |    |  |  | Debit          | Kredit         |
| 1             | 1 | 1 | 01 | 01 |  | Kas di Kas Daerah                                      | 250.000.000    |                |
| 1             | 1 | 1 | 02 | 01 |  | Kas di Bendahara Penerimaan                            | 0              |                |
| 1             | 1 | 1 | 03 | 01 |  | Kas di Bendahara Pengeluaran                           | 6.000.000      |                |
| 1             | 1 | 3 | 01 | 15 |  | Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan | 50.000.000     |                |
| 1             | 1 | 3 | 05 | 03 |  | Piutang DAU  | 1.000.000.000  |                |
| 1             | 1 | 7 | 01 | 01 |  | Persediaan Alat Tulis Kantor                           | 950.000        |                |
| 1             | 1 | 8 | 01 | 01 |  | RK SKPD A  | 0              |                |
| 1             | 1 | 8 | 01 | 02 |  | RK SKPD B  | 0              |                |
| 1             | 2 | 1 | 01 | 02 |  | Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah              | 50.000.000     |                |
| 1             | 2 | 2 | 01 | 02 |  | Penyertaan Modal Kepada BUMD                           | 250.000.000    |                |
| 1             | 3 | 2 | 16 | 02 |  | Personal Komputer                                      | 125.000.000    |                |
| 1             | 3 | 3 | 01 | 01 |  | Bangunan Gedung Kantor                                 | 6.000.000.000  |                |
| 1             | 3 | 7 | 01 | 16 |  | Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer                |                | 35.000.000     |
| 1             | 3 | 7 | 02 | 01 |  | Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja      |                | 600.000.000    |
| 1             | 4 | 1 | 01 | 01 |  | Dana Cadangan  | 500.000.000    |                |
| 2             | 2 | 1 | 01 | 01 |  | Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan                    |                | 150.000.000    |
| 3             | 1 | 1 | 01 | 01 |  | Ekuitas  |                | 6.571.000.000  |
| 3             | 1 | 2 | 01 | 01 |  | Estimasi Pendapatan                                    | 1.750.000.000  |                |
| 3             | 1 | 2 | 02 | 01 |  | Estimasi Penerimaan Pembiayaan                         | 500.000.000    |                |
| 3             | 1 | 2 | 03 | 01 |  | Apropriasi Belanja                                     |                | 1.750.000.000  |
| 3             | 1 | 2 | 03 | 02 |  | Apropriasi Transfer                                    |                | 150.000.000    |
| 3             | 1 | 2 | 04 | 01 |  | Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan                      |                | 300.000.000    |
| 3             | 1 | 2 | 05 | 01 |  | Estimasi Perubahan SAL                                 |                | 5.000.000      |
| 3             | 1 | 3 | 01 | 01 |  | RK PPKD  |                | 0              |
| 4             | 1 | 1 | 12 | 01 |  | Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA   |                | 30.000.000     |
| 4             | 1 | 2 | 02 | 02 |  | Retribusi Pasar Kios - LRA                             |                | 20.000.000     |
| 4             | 2 | 2 | 01 | 01 |  | Dana Alokasi Umum - LRA                                |                | 500.000.000    |
| 5             | 1 | 1 | 01 | 01 |  | Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi                      | 550.000.000    |                |
| 5             | 1 | 7 | 03 | 01 |  | Belanja Transfer Bantuan Keuangan ke Desa              | 150.000.000    |                |
| 5             | 2 | 2 | 01 | 01 |  | Belanja alat tulis kantor                              | 25.000.000     |                |
| 5             | 2 | 3 | 12 | 02 |  | Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer    | 30.000.000     |                |
| 6             | 1 | 1 | 01 | 01 |  | Penerimaan Pemb. Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya     |                | 400.000.000    |
| 6             | 1 | 4 | 03 | 01 |  | Penerimaan Pemb. Pinjaman Dalam Negeri dari Bank       |                | 100.000.000    |
| 6             | 2 | 2 | 01 | 01 |  | Pengeluaran Pemb. Penyertaan Modal pada BUMD           | 250.000.000    |                |
| 7             | 1 | 1 | 15 | 01 |  | Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - LO   |                | 80.000.000     |
| 7             | 1 | 2 | 06 | 03 |  | Retribusi Pasar Kios - LO                              |                | 20.000.000     |
| 7             | 2 | 1 | 03 | 01 |  | Dana Alokasi Umum - LO                                 |                | 1.500.000.000  |
| 8             | 1 | 1 | 01 | 01 |  | Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO                | 550.000.000    |                |
| 8             | 1 | 2 | 01 | 01 |  | Beban Persediaan alat tulis kantor                     | 24.050.000     |                |
| 8             | 2 | 4 | 01 | 01 |  | Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa                | 150.000.000    |                |
|               |   |   |    |    |  |  |                |                |
|               |   |   |    |    |  | TOTAL  | 12.211.000.000 | 12.211.000.000 |

Kepala Fungsi  
Akuntansi Pemda

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Berdasarkan nilai saldo kode akun 4 (pendapatan-LRA), kode akun 5 (belanja) dan kode akun 6 (pembiayaan) maka dibuatlah jurnal penutup LRA dengan cara mencatat balik akun 4 (pendapatan-LRA) dan akun 6.1 (penerimaan pembiayaan) dari semula di kredit menjadi di debet dan mencatat balik kode akun 5 (belanja) dan akun 6.2 (pengeluaran pembiayaan) dari semula di debet menjadi di kredit. Selain ketiga jenis akun tersebut, ada akun lain yang juga ditutup yaitu akun anggaran seperti estimasi pendapatan, estimasi penerimaan pembiayaan, apropriasi belanja, apropriasi transfer, apropriasi pengeluaran pembiayaan dan estimasi perubahan SAL sebagai berikut :

**PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAERAH**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20XX**

(Dalam Rupiah)

| Nomor Urut | Uraian  | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi            | Lebih (Kurang) |
|------------|---|----------------------------|----------------------|----------------|
| 1          | 2   | 3                          | 4                    | 5              |
| <b>1</b>   | <b>Pendapatan</b>   |                            |                      |                |
| <b>1.1</b> | <b>Pendapatan Asli Daerah</b>                                     |                            |                      |                |
| 1.1.1      | Pendapatan pajak daerah   |                            | 30.000.000           |                |
| 1.1.2      | Pendapatan retribusi daerah                                       |                            | 20.000.000           |                |
| 1.1.3      | Pendapatan hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan      |                            |                      |                |
| 1.1.4      | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah                         |                            |                      |                |
| <b>1.2</b> | <b>Dana Perimbangan</b>   |                            |                      |                |
| 1.2.1      | Dana Bagi Hasil   |                            |                      |                |
| 1.2.1.1    | Dana Bagi Hasil Pajak   |                            |                      |                |
| 1.2.1.2    | Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam                     |                            |                      |                |
| 1.2.2      | Dana Alokasi Umum   |                            | 500.000.000          |                |
| 1.2.3      | Dana Alokasi Khusus   |                            |                      |                |
| <b>1.3</b> | <b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>                       |                            |                      |                |
| 1.3.1      | Pendapatan Hibah  |                            |                      |                |
| 1.3.2      | Dana Darurat  |                            |                      |                |
| 1.3.3      | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya |                            |                      |                |
| 1.3.4      | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus                               |                            |                      |                |
| 1.3.5      | Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya     |                            |                      |                |
|            | <b>Jumlah Pendapatan</b>  |                            | <b>550.000.000</b>   |                |
| <b>2</b>   | <b>Belanja</b>  |                            |                      |                |
| <b>2.1</b> | <b>Belanja Tidak Langsung</b>                                     |                            |                      |                |
| 2.1.1      | Belanja Pegawai   |                            | 550.000.000          |                |
| 2.1.2      | Belanja Bunga   |                            |                      |                |
| 2.1.3      | Belanja subsidi   |                            |                      |                |
| 2.1.4      | Belanja Hibah   |                            |                      |                |
| 2.1.5      | Belanja Bantuan Sosial  |                            |                      |                |
| 2.1.6      | Belanja Bagi Hasil  |                            |                      |                |
| 2.1.7      | Belanja Bantuan Keuangan  |                            | 150.000.000          |                |
| 2.1.8      | Belanja Tidak Terduga   |                            |                      |                |
| <b>2.2</b> | <b>Belanja Langsung</b>   |                            |                      |                |
| 2.2.1      | Belanja Pegawai   |                            |                      |                |
| 2.2.2      | Belanja Barang dan Jasa   |                            | 25.000.000           |                |
| 2.2.3      | Belanja Modal   |                            | 30.000.000           |                |
|            | <b>Jumlah Belanja</b>   |                            | <b>755.000.000</b>   |                |
|            | <b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>  |                            | <b>(205.000.000)</b> |                |

|       |   |  |             |  |
|-------|---|--|-------------|--|
| 3.    | Pembiayaan Daerah                               |  |             |  |
| 3.1   | Penerimaan Pembiayaan Daerah                    |  |             |  |
| 3.1.1 | Penggunaan SILPA                                |  | 400.000.000 |  |
| 3.1.2 | Pencairan Dana Cadangan                         |  |             |  |
| 3.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan |  |             |  |
| 3.1.4 | Penerimaan Pinjaman Daerah                      |  | 100.000.000 |  |
| 3.1.5 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman           |  |             |  |
| 3.1.6 | Penerimaan Piutang Daerah                       |  |             |  |
|       | Jumlah Penerimaan                               |  | 500.000.000 |  |
| 3.2   | Pengeluaran Pembiayaan Daerah                   |  |             |  |
| 3.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan                       |  |             |  |
| 3.2.2 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah  |  | 250.000.000 |  |
| 3.2.3 | Pembayaran Pokok Utang                          |  |             |  |
| 3.2.4 | Pemberian Pinjaman Daerah                       |  |             |  |
|       | Jumlah Pengeluaran                              |  | 250.000.000 |  |
|       | Pembiayaan Neto                                 |  | 250.000.000 |  |
| 3.3   | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)          |  | 45.000.000  |  |

Kepala Fungsi  
Akuntansi Pemda

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Langkah III : Menutup nilai saldo Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Setelah menyusun laporan realisasi anggaran maka Tenaga Akuntansi Fungsi Akuntansi Pemda harus melakukan jurnal penutup LRA agar dapat menyusun laporan keuangan selanjutnya yaitu LO. Jurnal penutup ini dilakukan dengan maksud agar rekening/akun yang bersifat sementara (*nominal account*) nilai saldo dibuku besar terkait rekening/akun LRA kembali menjadi nihil pada akhir periode akuntansi. Rekening/akun nominal adalah rekening/akun yang digunakan dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, yaitu Pendapatan-LRA, Belanja, dan Pembiayaan. Untuk melakukan jurnal penutup LRA, kita persiapkan dulu Neraca Saldo Sesudah Penyesuaian yang paling terakhir yaitu :

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN  
NERACA SALDO DAERAH SETELAH PENYESUAIAN

| Kode Rekening |   |   |    |    | Uraian   | Neraca        |        |
|---------------|---|---|----|----|--|---------------|--------|
|               |   |   |    |    |  | Debit         | Kredit |
| 1             | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas di Kas Daerah                                      | 250.000.000   |        |
| 1             | 1 | 1 | 02 | 01 | Kas di Bendahara Penerimaan                            | 0             |        |
| 1             | 1 | 1 | 03 | 01 | Kas di Bendahara Pengeluaran                           | 6.000.000     |        |
| 1             | 1 | 3 | 01 | 15 | Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan | 50.000.000    |        |
| 1             | 1 | 3 | 05 | 03 | Piutang DAU  | 1.000.000.000 |        |

| Kode Rekening |   |   |    |    | Uraian   | Neraca                |                       |
|---------------|---|---|----|----|--|-----------------------|-----------------------|
|               |   |   |    |    |  | Debit                 | Kredit                |
| 1             | 1 | 7 | 01 | 01 | Persediaan Alat Tulis Kantor                         | 950.000               |                       |
| 1             | 1 | 8 | 01 | 01 | RK SKPD A  | 0                     |                       |
| 1             | 1 | 8 | 01 | 02 | RK SKPD B  | 0                     |                       |
| 1             | 2 | 1 | 01 | 02 | Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah            | 50.000.000            |                       |
| 1             | 2 | 2 | 01 | 02 | Penyertaan Modal Kepada BUMD                         | 250.000.000           |                       |
| 1             | 3 | 2 | 16 | 02 | Personal Komputer                                    | 125.000.000           |                       |
| 1             | 3 | 3 | 01 | 01 | Bangunan Gedung Kantor                               | 6.000.000.000         |                       |
| 1             | 3 | 7 | 01 | 16 | Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer              |                       | 35.000.000            |
| 1             | 3 | 7 | 02 | 01 | Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja    |                       | 600.000.000           |
| 1             | 4 | 1 | 01 | 01 | Dana Cadangan  | 500.000.000           |                       |
| 2             | 2 | 1 | 01 | 01 | Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan                  |                       | 150.000.000           |
| 3             | 1 | 1 | 01 | 01 | Ekuitas  |                       | 6.571.000.000         |
| 3             | 1 | 2 | 01 | 01 | Estimasi Pendapatan                                  | 1.750.000.000         |                       |
| 3             | 1 | 2 | 02 | 01 | Estimasi Penerimaan Pembiayaan                       | 500.000.000           |                       |
| 3             | 1 | 2 | 03 | 01 | Apropriasi Belanja                                   |                       | 1.750.000.000         |
| 3             | 1 | 2 | 03 | 02 | Apropriasi Transfer                                  |                       | 150.000.000           |
| 3             | 1 | 2 | 04 | 01 | Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan                    |                       | 300.000.000           |
| 3             | 1 | 2 | 05 | 01 | Estimasi Perubahan SAL                               |                       | 5.000.000             |
| 3             | 1 | 3 | 01 | 01 | RK PPKD  |                       | 0                     |
| 4             | 1 | 1 | 12 | 01 | Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA |                       | 30.000.000            |
| 4             | 1 | 2 | 02 | 02 | Retribusi Pasar Kios - LRA                           |                       | 20.000.000            |
| 4             | 2 | 2 | 01 | 01 | Dana Alokasi Umum - LRA                              |                       | 500.000.000           |
| 5             | 1 | 1 | 01 | 01 | Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi                    | 550.000.000           |                       |
| 5             | 1 | 7 | 03 | 01 | Belanja Transfer Bantuan Keuangan ke Desa            | 150.000.000           |                       |
| 5             | 2 | 2 | 01 | 01 | Belanja alat tulis kantor                            | 25.000.000            |                       |
| 5             | 2 | 3 | 12 | 02 | Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer  | 30.000.000            |                       |
| 6             | 1 | 1 | 01 | 01 | Penerimaan Pemb. Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya   |                       | 400.000.000           |
| 6             | 1 | 4 | 03 | 01 | Penerimaan Pemb. Pinjaman Dalam Negeri dari Bank     |                       | 100.000.000           |
| 6             | 2 | 2 | 01 | 01 | Pengeluaran Pemb. Penyertaan Modal pada BUMD         | 250.000.000           |                       |
| 7             | 1 | 1 | 15 | 01 | Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - LO |                       | 80.000.000            |
| 7             | 1 | 2 | 06 | 03 | Retribusi Pasar Kios - LO                            |                       | 20.000.000            |
| 7             | 2 | 1 | 03 | 01 | Dana Alokasi Umum - LO                               |                       | 1.500.000.000         |
| 8             | 1 | 1 | 01 | 01 | Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO              | 550.000.000           |                       |
| 8             | 1 | 2 | 01 | 01 | Beban Persediaan alat tulis kantor                   | 24.050.000            |                       |
| 8             | 2 | 4 | 01 | 01 | Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa              | 150.000.000           |                       |
|               |   |   |    |    |  |                       |                       |
|               |   |   |    |    | <b>TOTAL</b>   | <b>12.211.000.000</b> | <b>12.211.000.000</b> |

Kepala Fungsi  
Akuntansi Pemda

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Berdasarkan nilai saldo kode akun 4 (pendapatan-LRA), kode akun 5 (belanja) dan kode akun 6 (pembiayaan) maka dibuatlah jurnal penutup LRA dengan cara mencatat balik akun 4 (pendapatan-LRA) dan akun 6.1 (penerimaan pembiayaan) dari semula di kredit menjadi di

debit dan mencatat balik kode akun 5 (belanja) dan akun 6.2 (pengeluaran pembiayaan) dari semula di debit menjadi di kredit sebagai berikut :

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU JURNAL PENUTUP LRA (JP LRA)

SKPKD : Fungsi Akuntansi Pemda Kabupaten Kuningan

Halaman 01

| Tanggal  | Nomor                   |               | Kode Rekening |   |   |    |    | Uraian   | Ref. | Debit<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----------|-------------------------|---------------|---------------|---|---|----|----|--|------|---------------|----------------|
|          | Bukti<br>Peneri<br>maan | Bukti<br>Lain |               |   |   |    |    |  |      |               |                |
| 1        | 2                       |               | 3             |   |   |    |    | 4  | 5    | 6             | 7              |
| 31/12/22 |                         |               | 3             | 1 | 2 | 03 | 01 | Apropriasi Belanja   |      | 1.750.000.000 |                |
|          |                         |               | 3             | 1 | 2 | 03 | 02 | Apropriasi Transfer  |      | 150.000.000   |                |
|          |                         |               | 3             | 1 | 2 | 04 | 01 | Apropriasi Pengeluaran<br>Pembiayaan                       |      | 300.000.000   |                |
|          |                         |               | 3             | 1 | 2 | 05 | 01 | Estimasi Perubahan SAL                                     |      | 50.000.000    |                |
|          |                         |               | 4             | 1 | 1 | 12 | 01 | Pajak Bumi dan<br>Bangunan Pedesaan dan<br>Perkotaan - LRA |      | 30.000.000    |                |
|          |                         |               | 4             | 1 | 2 | 02 | 02 | Retribusi Pasar Kios -<br>LRA                              |      | 20.000.000    |                |
|          |                         |               | 4             | 2 | 2 | 01 | 01 | Dana Alokasi Umum -<br>LRA                                 |      | 500.000.000   |                |
|          |                         |               | 6             | 1 | 1 | 01 | 01 | Penerimaan Pemb.<br>Penggunaan SiLPA tahun<br>sebelumnya   |      | 400.000.000   |                |
|          |                         |               | 6             | 1 | 4 | 03 | 01 | Penerimaan Pemb.<br>Pinjaman Dalam Negeri<br>dari Bank     |      | 100.000.000   |                |
|          |                         |               | 3             | 1 | 2 | 01 | 01 | Estimasi Pendapatan  |      |               | 1.750.000.000  |
|          |                         |               | 3             | 1 | 2 | 02 | 01 | Estimasi Penerimaan<br>Pembiayaan                          |      |               | 500.000.000    |
|          |                         |               | 5             | 1 | 1 | 01 | 01 | Gaji Pokok PNS/ Uang<br>Representasi                       |      |               | 550.000.000    |
|          |                         |               | 5             | 1 | 7 | 03 | 01 | Belanja Transfer Bantuan<br>Keuangan ke Desa               |      |               | 150.000.000    |
|          |                         |               | 5             | 2 | 2 | 01 | 01 | Belanja alat tulis kantor                                  |      |               | 25.000.000     |
|          |                         |               | 5             | 2 | 3 | 12 | 02 | Belanja modal Pengadaan<br>Peralatan Personal<br>Komputer  |      |               | 30.000.000     |
|          |                         |               | 6             | 2 | 2 | 01 | 01 | Pengeluaran Pemb.<br>Penyertaan Modal pada<br>BUMD         |      |               | 250.000.000    |
|          |                         |               | 3             | 1 | 1 | 01 | 01 | Ekuitas  |      |               | 45.000.000     |
| Jumlah   |                         |               |               |   |   |    |    |  |      | 3.255.000.000 | 3.255.000.000  |

Kepala Fungsi  
Akuntansi  
Pemda

PPKD

(tanda tangan)  
(nama  
lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Setelah dilakukan jurnal penutup LRA tersebut maka terbentuklah Neraca Saldo setelah penutup LRA sebagai berikut :

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN  
NERACA SALDO DAERAH SETELAH PENUTUP LRA

| Kode Rekening |   |   |    |    | Uraian   | Neraca               |                      |
|---------------|---|---|----|----|--|----------------------|----------------------|
|               |   |   |    |    |  | Debit                | Kredit               |
| 1             | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas di Kas Daerah                                      | 250.000.000          |                      |
| 1             | 1 | 1 | 02 | 01 | Kas di Bendahara Penerimaan                            | 0                    |                      |
| 1             | 1 | 1 | 03 | 01 | Kas di Bendahara Pengeluaran                           | 6.000.000            |                      |
| 1             | 1 | 3 | 01 | 15 | Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan | 50.000.000           |                      |
| 1             | 1 | 3 | 05 | 03 | Piutang DAU  | 1.000.000.000        |                      |
| 1             | 1 | 7 | 01 | 01 | Persediaan Alat Tulis Kantor                           | 950.000              |                      |
| 1             | 1 | 8 | 01 | 01 | RK SKPD A  | 0                    |                      |
| 1             | 1 | 8 | 01 | 02 | RK SKPD B  | 0                    |                      |
| 1             | 2 | 1 | 01 | 02 | Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah              | 50.000.000           |                      |
| 1             | 2 | 2 | 01 | 02 | Penyertaan Modal Kepada BUMD                           | 250.000.000          |                      |
| 1             | 3 | 2 | 16 | 02 | Personal Komputer                                      | 125.000.000          |                      |
| 1             | 3 | 3 | 01 | 01 | Bangunan Gedung Kantor                                 | 6.000.000.000        |                      |
| 1             | 3 | 7 | 01 | 16 | Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer                |                      | 35.000.000           |
| 1             | 3 | 7 | 02 | 01 | Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja      |                      | 600.000.000          |
| 1             | 4 | 1 | 01 | 01 | Dana Cadangan  | 500.000.000          |                      |
| 2             | 2 | 1 | 01 | 01 | Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan                    |                      | 150.000.000          |
| 3             | 1 | 1 | 01 | 01 | Ekuitas  |                      | 6.571.000.000        |
| 7             | 1 | 1 | 15 | 01 | Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - LO   |                      | 80.000.000           |
| 7             | 1 | 2 | 06 | 03 | Retribusi Pasar Kios - LO                              |                      | 20.000.000           |
| 7             | 2 | 1 | 03 | 01 | Dana Alokasi Umum - LO                                 |                      | 1.500.000.000        |
| 8             | 1 | 1 | 01 | 01 | Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO                | 550.000.000          |                      |
| 8             | 1 | 2 | 01 | 01 | Beban Persediaan alat tulis kantor                     | 24.050.000           |                      |
| 8             | 2 | 4 | 01 | 01 | Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa                | 150.000.000          |                      |
|               |   |   |    |    |  |                      |                      |
|               |   |   |    |    | <b>TOTAL</b>   | <b>8.956.000.000</b> | <b>8.956.000.000</b> |

Kepala Fungsi  
Akuntansi Pemda

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Pada Neraca Saldo setelah penutup LRA ini sudah tidak tersaji lagi akun-akun pendapatan-LRA, belanja, dan pembiayaan.

Langkah IV: Penyusunan Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional (LO) ini menyajikan informasi pendapatan-LO dan beban yang masing-masing diperbandingkan dengan pendapatan-LO dan beban tahun sebelumnya untuk diketahui kenaikan/penurunannya baik dalam angka maupun prosentase. LO ini disusun berdasarkan Neraca Saldo setelah Penutup LRA sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN  
NERACA SALDO DAERAH SETELAH PENUTUP LRA

| Kode Rekening |   |   |    |    | Uraian   | Neraca        |               |
|---------------|---|---|----|----|--|---------------|---------------|
|               |   |   |    |    |  | Debit         | Kredit        |
| 1             | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas di Kas Daerah                                      | 250.000.000   |               |
| 1             | 1 | 1 | 02 | 01 | Kas di Bendahara Penerimaan                            | 0             |               |
| 1             | 1 | 1 | 03 | 01 | Kas di Bendahara Pengeluaran                           | 6.000.000     |               |
| 1             | 1 | 3 | 01 | 15 | Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan | 50.000.000    |               |
| 1             | 1 | 3 | 05 | 03 | Piutang DAU  | 1.000.000.000 |               |
| 1             | 1 | 7 | 01 | 01 | Persediaan Alat Tulis Kantor                           | 950.000       |               |
| 1             | 1 | 8 | 01 | 01 | RK SKPD A  | 0             |               |
| 1             | 1 | 8 | 01 | 02 | RK SKPD B  | 0             |               |
| 1             | 2 | 1 | 01 | 02 | Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah              | 50.000.000    |               |
| 1             | 2 | 2 | 01 | 02 | Penyertaan Modal Kepada BUMD                           | 250.000.000   |               |
| 1             | 3 | 2 | 16 | 02 | Personal Komputer                                      | 125.000.000   |               |
| 1             | 3 | 3 | 01 | 01 | Bangunan Gedung Kantor                                 | 6.000.000.000 |               |
| 1             | 3 | 7 | 01 | 16 | Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer                |               | 35.000.000    |
| 1             | 3 | 7 | 02 | 01 | Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja      |               | 600.000.000   |
| 1             | 4 | 1 | 01 | 01 | Dana Cadangan  | 500.000.000   |               |
| 2             | 2 | 1 | 01 | 01 | Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan                    |               | 150.000.000   |
| 3             | 1 | 1 | 01 | 01 | Ekuitas  |               | 6.571.000.000 |
| 7             | 1 | 1 | 15 | 01 | Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - LO   |               | 80.000.000    |
| 7             | 1 | 2 | 06 | 03 | Retribusi Pasar Kios - LO                              |               | 20.000.000    |
| 7             | 2 | 1 | 03 | 01 | Dana Alokasi Umum - LO                                 |               | 1.500.000.000 |
| 8             | 1 | 1 | 01 | 01 | Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO                | 550.000.000   |               |
| 8             | 1 | 2 | 01 | 01 | Beban Persediaan alat tulis kantor                     | 24.050.000    |               |
| 8             | 2 | 4 | 01 | 01 | Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa                | 150.000.000   |               |
|               |   |   |    |    |  |               |               |
|               |   |   |    |    | TOTAL  | 8.956.000.000 | 8.956.000.000 |

Kepala Fungsi  
Akuntansi Pemda

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penutup LRA diatas, gunakan nilai saldo kode akun 7 (pendapatan-LO) dan nilai saldo kode akun 8 (beban) untuk menyusun Laporan Operasional sebagai berikut :

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN  
LAPORAN OPERASIONAL  
Per 31 Desember 20X1 dan 20X0

| URAIAN   | 20X1          | 20X0 | Kenaikan<br>(Penurunan) | % |
|--|---------------|------|-------------------------|---|
| 1  | 2             | 3    | 4                       | 5 |
| PENDAPATAN   |               |      |                         |   |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH                                       |               |      |                         |   |
| Pendapatan Pajak Daerah                                      | 80.000.000    |      |                         |   |
| Pendapatan Retribusi Daerah                                  | 20.000.000    |      |                         |   |
| Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan |               |      |                         |   |
| Lain-lain PAD yang Sah                                       |               |      |                         |   |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah                                | 100.000.000   |      |                         |   |
|  |               |      |                         |   |
| PENDAPATAN TRANSFER  |               |      |                         |   |
| TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN                 |               |      |                         |   |
| Dana Bagi Hasil Pajak  |               |      |                         |   |
| Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam                             |               |      |                         |   |
| Dana Alokasi Umum  | 1.500.000.000 |      |                         |   |
| Dana Alokasi Khusus  |               |      |                         |   |
| Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan                  | 1.500.000.000 |      |                         |   |

| URAIAN   | 20X1          | 20X0 | Kenaikan<br>(Penurunan) | % |
|--|---------------|------|-------------------------|---|
| TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA                            |               |      |                         |   |
| Dana Otonomi Khusus  |               |      |                         |   |
| Dana Penyesuaian   |               |      |                         |   |
| Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya                           |               |      |                         |   |
| TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI                                 |               |      |                         |   |
| Pendapatan Bagi Hasil Pajak                                  |               |      |                         |   |
| Pendapatan Bagi Hasil Lainnya                                |               |      |                         |   |
| Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi                          |               |      |                         |   |
| Jumlah Pendapatan Transfer                                   |               |      |                         |   |
| LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH                                |               |      |                         |   |
| Pendapatan Hibah   |               |      |                         |   |
| Pendapatan Lainnya   |               |      |                         |   |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah                         |               |      |                         |   |
| JUMLAH PENDAPATAN  | 1.600.000.000 |      |                         |   |
| BEBAN  |               |      |                         |   |
| BEBAN OPERASI  |               |      |                         |   |
| Beban Pegawai  | 550.000.000   |      |                         |   |
| Beban Barang Jasa  | 24.050.000    |      |                         |   |
| Beban Bunga  |               |      |                         |   |
| Beban Subsidi  |               |      |                         |   |
| Beban Hibah  |               |      |                         |   |
| Beban Bantuan Sosial   |               |      |                         |   |
| Beban Penyusutan   |               |      |                         |   |
| Beban Lain-lain  |               |      |                         |   |
| Jumlah Beban Operasi   | 574.050.000   |      |                         |   |
| BEBAN TRANSFER   |               |      |                         |   |
| Beban Transfer Bagi Hasil Pajak                              |               |      |                         |   |
| Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya                 |               |      |                         |   |
| Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya |               |      |                         |   |
| Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa                      | 150.000.000   |      |                         |   |
| Beban Transfer Keuangan Lainnya                              |               |      |                         |   |
| Jumlah beban Transfer  | 150.000.000   |      |                         |   |
| JUMLAH BEBAN   | 724.050.000   |      |                         |   |
| JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI                          | 875.950.000   |      |                         |   |
| SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL                |               |      |                         |   |
| SURPLUS NON OPERASIONAL                                      |               |      |                         |   |
| Surplus Penjualan Aset Non Lancar                            |               |      |                         |   |
| Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang                |               |      |                         |   |
| Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya                |               |      |                         |   |
| Jumlah Surplus Non Operasional                               |               |      |                         |   |
| DEFISIT NON OPERASIONAL                                      |               |      |                         |   |
| Defisit Penjualan Aset Non Lancar                            |               |      |                         |   |
| Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang                |               |      |                         |   |
| Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya                |               |      |                         |   |
| Jumlah Defisit Non Operasional                               |               |      |                         |   |
| JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL         |               |      |                         |   |
| SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA                       |               |      |                         |   |
| POS LUAR BIASA   |               |      |                         |   |
| PENDAPATAN LUAR BIASA  |               |      |                         |   |
| Pendapatan Luar Biasa  |               |      |                         |   |
| Jumlah Pendapatan Luar Biasa                                 |               |      |                         |   |
| BEBAN LUAR BIASA   |               |      |                         |   |
| Beban Luar Biasa   |               |      |                         |   |
| Jumlah Beban Luar Biasa                                      |               |      |                         |   |
| POS LUAR BIASA   |               |      |                         |   |
| SURPLUS/DEFISIT - LO   | 875.950.000   |      |                         |   |

Langkah V : Menutup nilai saldo Laporan Operasional

Setelah menyusun LO maka Tenaga Akuntansi Fungsi Akuntansi Pemda harus melakukan jurnal penutup LO agar dapat menyusun laporan keuangan selanjutnya yaitu Neraca. Jurnal penutup ini dilakukan dengan maksud agar rekening/akun yang bersifat sementara (*nominal account*) nilai saldo dibuku besar terkait rekening/akun LO kembali menjadi nihil pada akhir periode akuntansi. Rekening/akun nominal adalah rekening/akun yang digunakan dalam penyusunan Laporan Operasional, yaitu Pendapatan-LO dan Beban. Untuk melakukan jurnal penutup LRA, kita persiapkan dulu Neraca Saldo setelah penutup LRA yang paling terakhir yaitu :

| PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN |   |   |    |    |  | NERACA SALDO DAERAH SETELAH PENUTUP LRA |               |
|-------------------------------|---|---|----|----|--|---|---------------|
| Kode Rekening                 |   |   |    |    |  | Neraca                                  |               |
|                               |   |   |    |    |  | Debit                                   | Kredit        |
| 1                             | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas di Kas Daerah                                      | 250.000.000                             |               |
| 1                             | 1 | 1 | 02 | 01 | Kas di Bendahara Penerimaan                            | 0                                       |               |
| 1                             | 1 | 1 | 03 | 01 | Kas di Bendahara Pengeluaran                           | 6.000.000                               |               |
| 1                             | 1 | 3 | 01 | 15 | Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan | 50.000.000                              |               |
| 1                             | 1 | 3 | 05 | 03 | Piutang DAU  | 1.000.000.000                           |               |
| 1                             | 1 | 7 | 01 | 01 | Persediaan Alat Tulis Kantor                           | 950.000                                 |               |
| 1                             | 1 | 8 | 01 | 01 | RK SKPD A  | 0                                       |               |
| 1                             | 1 | 8 | 01 | 02 | RK SKPD B  | 0                                       |               |
| 1                             | 2 | 1 | 01 | 02 | Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah              | 50.000.000                              |               |
| 1                             | 2 | 2 | 01 | 02 | Penyertaan Modal Kepada BUMD                           | 250.000.000                             |               |
| 1                             | 3 | 2 | 16 | 02 | Personal Komputer                                      | 125.000.000                             |               |
| 1                             | 3 | 3 | 01 | 01 | Bangunan Gedung Kantor                                 | 6.000.000.000                           |               |
| 1                             | 3 | 7 | 01 | 16 | Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer                |   | 35.000.000    |
| 1                             | 3 | 7 | 02 | 01 | Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja      |   | 600.000.000   |
| 1                             | 4 | 1 | 01 | 01 | Dana Cadangan  | 500.000.000                             |               |
| 2                             | 2 | 1 | 01 | 01 | Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan                    |   | 150.000.000   |
| 3                             | 1 | 1 | 01 | 01 | Ekuitas  |   | 6.571.000.000 |
| 7                             | 1 | 1 | 15 | 01 | Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - LO   |   | 80.000.000    |
| 7                             | 1 | 2 | 06 | 03 | Retribusi Pasar Kios - LO                              |   | 20.000.000    |
| 7                             | 2 | 1 | 03 | 01 | Dana Alokasi Umum - LO                                 |   | 1.500.000.000 |
| 8                             | 1 | 1 | 01 | 01 | Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO                | 550.000.000                             |               |
| 8                             | 1 | 2 | 01 | 01 | Beban Persediaan alat tulis kantor                     | 24.050.000                              |               |
| 8                             | 2 | 4 | 01 | 01 | Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa                | 150.000.000                             |               |
|                               |   |   |    |    | TOTAL  | 8.956.000.000                           | 8.956.000.000 |

Kepala Fungsi  
Akuntansi Pemda

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Berdasarkan nilai saldo kode akun 7 (pendapatan-LO) dan kode akun 8 (beban) maka dibuatlah jurnal penutup LRA dengan cara mencatat balik akun 7 (pendapatan-LO) dari semula di kredit menjadi di

debet dan mencatat balik kode akun 8 (beban) dari semula di debet menjadi di kredit. Selisihnya akan membentuk suatu nilai yang dicatat dalam akun surplus/(defisit)-LO. Berikut adalah buku jurnal penutup LO yang dimaksud :

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU JURNAL PENUTUP LO (JP LO)

SKPKD : Fungsi Akuntansi Pemda Kabupaten Kuningan

Halaman 01

| Tanggal  | Nomor               |               | Kode Rekening |   |   |    |    | Uraian   | Ref. | Debit<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----------|---------------------|---------------|---------------|---|---|----|----|--|------|---------------|----------------|
|          | Bukti<br>Penerimaan | Bukti<br>Lain |               |   |   |    |    |  |      |               |                |
| 1        | 2                   |               | 3             |   |   |    |    | 4  | 5    | 6             | 7              |
|          |                     |               |               |   |   |    |    |  |      |               |                |
| 31/12/15 |                     |               | 8             | 1 | 1 | 15 | 01 | Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - LO |      | 80.000.000    |                |
|          |                     |               | 8             | 1 | 2 | 06 | 03 | Retribusi Pasar Kios - LO                            |      | 20.000.000    |                |
|          |                     |               | 8             | 2 | 1 | 04 | 01 | Dana Alokasi Umum-LO                                 |      | 1.500.000.000 |                |
|          |                     |               | 9             | 1 | 1 | 01 | 01 | Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO              |      |               | 550.000.000    |
|          |                     |               | 9             | 1 | 2 | 01 | 01 | Beban Persediaan alat tulis kantor                   |      |               | 24.050.000     |
|          |                     |               | 9             | 2 | 4 | 01 | 01 | Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa              |      |               | 150.000.000    |
|          |                     |               | 3             | 1 | 1 | 02 | 01 | Surplus/(Defisit)-LO                                 |      |               | 875.950.000    |
| Jumlah   |                     |               |               |   |   |    |    |  |      | 1.600.000.000 | 1.600.000.000  |

Fungsi Akuntansi  
Pemda

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Setelah dilakukan jurnal penutup LO tersebut maka terbentuklah Neraca Saldo setelah penutup LO sebagai berikut :

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN  
NERACA SALDO DAERAH SETELAH PENUTUP LO

| Kode Rekening |   |   |    |    | Uraian   | Neraca        |               |
|---------------|---|---|----|----|--|---------------|---------------|
|               |   |   |    |    |  | Debit         | Kredit        |
| 1             | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas di Kas Daerah                                      | 250.000.000   |               |
| 1             | 1 | 1 | 02 | 01 | Kas di Bendahara Penerimaan                            | 0             |               |
| 1             | 1 | 1 | 03 | 01 | Kas di Bendahara Pengeluaran                           | 6.000.000     |               |
| 1             | 1 | 3 | 01 | 15 | Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan | 50.000.000    |               |
| 1             | 1 | 3 | 05 | 03 | Piutang DAU  | 1.000.000.000 |               |
| 1             | 1 | 7 | 01 | 01 | Persediaan Alat Tulis Kantor                           | 950.000       |               |
| 1             | 1 | 8 | 01 | 01 | RK SKPD A  | 0             |               |
| 1             | 1 | 8 | 01 | 02 | RK SKPD B  | 0             |               |
| 1             | 2 | 1 | 01 | 02 | Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah              | 50.000.000    |               |
| 1             | 2 | 2 | 01 | 02 | Penyertaan Modal Kepada BUMD                           | 250.000.000   |               |
| 1             | 3 | 2 | 16 | 02 | Personal Komputer                                      | 125.000.000   |               |
| 1             | 3 | 3 | 01 | 01 | Bangunan Gedung Kantor                                 | 6.000.000.000 |               |
| 1             | 3 | 7 | 01 | 16 | Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer                |               | 35.000.000    |
| 1             | 3 | 7 | 02 | 01 | Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja      |               | 600.000.000   |
| 1             | 4 | 1 | 01 | 01 | Dana Cadangan  | 500.000.000   |               |
| 2             | 2 | 1 | 01 | 01 | Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan                    |               | 150.000.000   |
| 3             | 1 | 1 | 01 | 01 | Ekuitas  |               | 6.571.000.000 |
| 3             | 1 | 1 | 02 | 01 | Surplus/(Defisit)-LO                                   |               | 875.950.000   |
|               |   |   |    |    | TOTAL  | 8.231.950.000 | 8.231.950.000 |

Kepala Fungsi  
Akuntansi Pemda

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Pada Neraca Saldo setelah penutup LO ini sudah tidak tersaji lagi akun-  
akun pendapatan-LO dan beban.

Langkah VI: Penyusunan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Setelah LO tersusun, kemudian melakukan jurnal penutup LO, selanjutnya tenaga akuntansi SKPKD menyusun Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) sebelum menyusun Neraca. LPE ini disusun berdasarkan Neraca Saldo setelah Penutup LO yang telah tersusun sebelumnya sebagai berikut :

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN  
NERACA SALDO DAERAH SETELAH PENUTUP LO

| Kode Rekening |   |   |    |    | Uraian   | Neraca               |                      |
|---------------|---|---|----|----|--|----------------------|----------------------|
|               |   |   |    |    |  | Debit                | Kredit               |
| 1             | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas di Kas Daerah                                      | 250.000.000          |                      |
| 1             | 1 | 1 | 02 | 01 | Kas di Bendahara Penerimaan                            | 0                    |                      |
| 1             | 1 | 1 | 03 | 01 | Kas di Bendahara Pengeluaran                           | 6.000.000            |                      |
| 1             | 1 | 3 | 01 | 15 | Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan | 50.000.000           |                      |
| 1             | 1 | 3 | 05 | 03 | Piutang DAU  | 1.000.000.000        |                      |
| 1             | 1 | 7 | 01 | 01 | Persediaan Alat Tulis Kantor                           | 950.000              |                      |
| 1             | 1 | 8 | 01 | 01 | RK SKPD A  | 0                    |                      |
| 1             | 1 | 8 | 01 | 02 | RK SKPD B  | 0                    |                      |
| 1             | 2 | 1 | 01 | 02 | Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah              | 50.000.000           |                      |
| 1             | 2 | 2 | 01 | 02 | Penyertaan Modal Kepada BUMD                           | 250.000.000          |                      |
| 1             | 3 | 2 | 16 | 02 | Personal Komputer                                      | 125.000.000          |                      |
| 1             | 3 | 3 | 01 | 01 | Bangunan Gedung Kantor                                 | 6.000.000.000        |                      |
| 1             | 3 | 7 | 01 | 16 | Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer                |                      | 35.000.000           |
| 1             | 3 | 7 | 02 | 01 | Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja      |                      | 600.000.000          |
| 1             | 4 | 1 | 01 | 01 | Dana Cadangan  | 500.000.000          |                      |
| 2             | 2 | 1 | 01 | 01 | Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan                    |                      | 150.000.000          |
| 3             | 1 | 1 | 01 | 01 | <b>Ekuitas</b>   |                      | <b>6.571.000.000</b> |
| 3             | 1 | 1 | 02 | 01 | <b>Surplus/(Defisit)-LO</b>                            |                      | <b>875.950.000</b>   |
|               |   |   |    |    | <b>TOTAL</b>   | <b>8.231.950.000</b> | <b>8.231.950.000</b> |

Kepala Fungsi  
Akuntansi Pemda

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Berdasarkan semua nilai saldo kode akun 3 seperti 3.1.1.01.01 (Ekuitas) dan 3.1.1.02.01 (Surplus/(Deifisit)-LO maka dibuatlah LPE SKPKD-PPKD yang mencatat transaksi Pemda sebagai berikut :

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
Per 31 Desember 20X1 dan 20X0

| URAIAN  | 20X1          | 20X0 |
|---|---------------|------|
| EKUITAS AWAL  | 6.571.000.000 |      |
| SURPLUS/(DEFISIT)-LO                                      | 875.950.000   |      |
| DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR : |               |      |
| KOREKSI NILAI PERSEDIAAN                                  |               |      |
| SELISIH REVALUASI ASET TETAP                              |               |      |
| LAIN-LAIN   |               |      |
| EKUITAS AKHIR   | 7.446.950.000 |      |

Kepala Fungsi  
Akuntansi Pemda

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Langkah VII : Melakukan Penutup Akhir

Setelah menyusun LPE maka Tenaga Akuntansi Fungsi AKuntansi Pemda harus melakukan jurnal penutup akhir agar dapat menyusun laporan keuangan selanjutnya yaitu Neraca. Jurnal penutup ini dilakukan dengan maksud menutup akun 3.1.1.02.01 (Surplus/(Defisit)-LO pada Neraca yang mencatat transaksi pemerintah daerah. Berikut adalah buku jurnal penutup akhir yang dimaksud :

KABUPATEN KUNINGAN  
BUKU JURNAL PENUTUP AKHIR (JP AKHIR)

SKPKD : Fungsi Akuntansi Pemda Kabupaten Kuningan

Halaman 01

| Tanggal  | Nomor                   |               | Kode Rekening |   |   |    |    | Uraian                    | Ref. | Debit<br>(Rp) | Kredit<br>(Rp) |
|----------|-------------------------|---------------|---------------|---|---|----|----|---------------------------|------|---------------|----------------|
|          | Bukti<br>Peneri<br>maan | Bukti<br>Lain |               |   |   |    |    |                           |      |               |                |
| 1        | 2                       |               | 3             |   |   |    |    | 4                         | 5    | 6             | 7              |
|          |                         |               |               |   |   |    |    |                           |      |               |                |
| 31/12/15 |                         |               | 3             | 1 | 2 | 02 | 01 | Surplus (Defisit) -<br>LO |      | 875.950.000   |                |
|          |                         |               | 3             | 1 | 1 | 01 | 01 | Ekuitas                   |      |               | 875.950.000    |
|          |                         |               |               |   |   |    |    |                           |      |               |                |
| Jumlah   |                         |               |               |   |   |    |    |                           |      | 875.950.000   | 875.950.000    |

Kepala Fungsi  
Akuntansi Pemda

PPKD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Setelah dilakukan jurnal penutup akhir tersebut maka terbentuklah Neraca Saldo akhir sebagai berikut :

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN  
NERACA SALDO DAERAH SETELAH PENUTUP LO

| Kode Rekening |   |   |    |    | Uraian   | Neraca        |               |
|---------------|---|---|----|----|--|---------------|---------------|
|               |   |   |    |    |  | Debit         | Kredit        |
| 1             | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas di Kas Daerah                                      | 250.000.000   |               |
| 1             | 1 | 1 | 02 | 01 | Kas di Bendahara Penerimaan                            | 0             |               |
| 1             | 1 | 1 | 03 | 01 | Kas di Bendahara Pengeluaran                           | 6.000.000     |               |
| 1             | 1 | 3 | 01 | 15 | Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan | 50.000.000    |               |
| 1             | 1 | 3 | 05 | 03 | Piutang DAU  | 1.000.000.000 |               |
| 1             | 1 | 7 | 01 | 01 | Persediaan Alat Tulis Kantor                           | 950.000       |               |
| 1             | 1 | 8 | 01 | 01 | RK SKPD A  | 0             |               |
| 1             | 1 | 8 | 01 | 02 | RK SKPD B  | 0             |               |
| 1             | 2 | 1 | 01 | 02 | Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah              | 50.000.000    |               |
| 1             | 2 | 2 | 01 | 02 | Penyertaan Modal Kepada BUMD                           | 250.000.000   |               |
| 1             | 3 | 2 | 16 | 02 | Personal Komputer                                      | 125.000.000   |               |
| 1             | 3 | 3 | 01 | 01 | Bangunan Gedung Kantor                                 | 6.000.000.000 |               |
| 1             | 3 | 7 | 01 | 16 | Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer                |               | 35.000.000    |
| 1             | 3 | 7 | 02 | 01 | Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja      |               | 600.000.000   |
| 1             | 4 | 1 | 01 | 01 | Dana Cadangan  | 500.000.000   |               |
| 2             | 2 | 1 | 01 | 01 | Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan                    |               | 150.000.000   |
| 3             | 1 | 1 | 01 | 01 | Ekuitas  |               | 7.446.950.000 |
|               |   |   |    |    | TOTAL  | 8.231.950.000 | 8.231.950.000 |

Langkah VIII : Penyusunan Neraca

Setelah melakukan jurnal penutup LRA, selanjutnya tenaga akuntansi Fungsi Akuntansi Pemda menyusun Neraca. Neraca ini disusun berdasarkan Neraca Saldo setelah Penutup Akhir yang telah tersusun sebelumnya sebagai berikut :

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN  
NERACA  
Per 31 Desember 20X1 dan 20X0

| Uraian  | Jumlah               |      |
|---|----------------------|------|
|   | 20X1                 | 20X0 |
| 1   | 2                    | 3    |
| <b>ASET</b>   |                      |      |
| <b>ASET LANCAR</b>                                      |                      |      |
| Kas di Kas Daerah                                       | 250.000.000          |      |
| Kas di Bendahara Pengeluaran                            |                      |      |
| Kas di Bendahara Penerimaan                             | 6.000.000            |      |
| Investasi Jangka Pendek                                 |                      |      |
| Piutang Pajak   | 50.000.000           |      |
| Piutang Retribusi                                       |                      |      |
| Penyisihan Piutang                                      |                      |      |
| Belanja dibayar dimuka                                  |                      |      |
| Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara         |                      |      |
| Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah         |                      |      |
| Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat          |                      |      |
| Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya |                      |      |
| Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran                |                      |      |
| Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi                       |                      |      |
| Piutang Lainnya   | 1.000.000.000        |      |
| Persediaan  | 950.000              |      |
| <b>Jumlah Aset Lancar</b>                               | <b>1.306.950.000</b> |      |
|   |                      |      |
| <b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>                         |                      |      |
| <b>Investasi Nonpermanen</b>                            |                      |      |
| Pinjaman Jangka Panjang                                 |                      |      |
| Investasi dalam Surat Utang Negara                      |                      |      |
| Investasi dalam Proyek Pembangunan                      |                      |      |
| Investasi Nonpermanen Lainnya                           |                      |      |
| <b>Jumlah Investasi Nonpermanen</b>                     |                      |      |
|   |                      |      |
| <b>Investasi Permanen</b>                               |                      |      |
| Penyertaan Modal Pemerintah Daerah                      | 300.000.000          |      |
| Investasi Permanen Lainnya                              |                      |      |
| <b>Jumlah Investasi Permanen</b>                        | <b>300.000.000</b>   |      |
| <b>Jumlah Investasi Jangka Panjang</b>                  | <b>300.000.000</b>   |      |
|   |                      |      |
| <b>ASET TETAP</b>                                       |                      |      |
| Tanah   |                      |      |
| Peralatan dan Mesin                                     | 125.000.000          |      |
| Gedung dan Bangunan                                     | 6.000.000.000        |      |
| Jalan, Irigasi dan Jaringan                             |                      |      |
| Aset Tetap Lainnya                                      |                      |      |
| Konstruksi dalam Pengerjaan                             |                      |      |
| Akumulasi Penyusutan                                    | (635.000.000)        |      |
| <b>Jumlah Aset Tetap</b>                                | <b>5.490.000.000</b> |      |
|   |                      |      |
| <b>DANA CADANGAN</b>                                    |                      |      |
| Dana Cadangan   | 500.000.000          |      |
| <b>Jumlah Dana Cadangan</b>                             | <b>500.000.000</b>   |      |



|  |                      |  |
|--|----------------------|--|
| <b>ASET LAINNYA</b>                    |                      |  |
| Tagihan Penjualan Angsuran             |                      |  |
| Tuntutan Ganti Rugi                    |                      |  |
| Kemitraan dengan Pihak Ketiga          |                      |  |
| Aset Tak Berwujud                      |                      |  |
| Aset Lain-lain                         |                      |  |
| <b>Jumlah Aset Lainnya</b>             |                      |  |
| <b>JUMLAH ASET</b>                     | <b>7.596.950.000</b> |  |
| <b>KEWAJIBAN</b>                       |                      |  |
| <b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>         |                      |  |
| Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)   |                      |  |
| Utang Bunga                            |                      |  |
| Bagian Lancar Utang Jangka Panjang     |                      |  |
| Pendapatan Diterima Dimuka             |                      |  |
| Utang Belanja                          |                      |  |
| Utang Jangka Pendek Lainnya            |                      |  |
| <b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>  |                      |  |
| <b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>        |                      |  |
| Utang Dalam Negeri – Sektor Perbankan  | 150.000.000          |  |
| Utang Dalam Negeri – Obligasi          |                      |  |
| Premium (Diskonto) Obligasi            |                      |  |
| Utang Jangka Panjang Lainnya           | <b>150.000.000</b>   |  |
| <b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang</b> | <b>150.000.000</b>   |  |
| <b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>                |                      |  |
| <b>EKUITAS</b>                         |                      |  |
| <b>EKUITAS</b>                         |                      |  |
| Ekuitas                                | 7.446.950.000        |  |
| <b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>    | <b>7.596.950.000</b> |  |

**Langkah IX: Menyusun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL)**

Dari Laporan Realisasi Anggaran yang telah dibuat sebelumnya, Tenaga Akuntansi Fungsi Akuntansi Pemda, menyusun Laporan Perubahan SAL (LP SAL). LPS SAL ini merupakan laporan atas SAL akhir yang dibentuk dari akumulasi SiLPA periode berjalan dan tahun-tahun sebelumnya. Berikut ini Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Daerah yang tersusun :

**PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN**  
**LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH**  
**Per 31 Desember 20X1 dan 20X0**

| URAIAN  | 20X1          | 20X0 |
|---|---------------|------|
| 1   | 2             | 3    |
| Saldo Anggaran Lebih Awal                                   | 611.000.000   |      |
| Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan | (400.000.000) |      |
| Subtotal  | 211.000.000   |      |
| Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)         | 45.000.000    |      |
| Subtotal  | 256.000.000   |      |
| Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya                |               |      |
| Lain-lain   |               |      |
| Saldo Anggaran Lebih Akhir                                  | 256.000.000   |      |

**Langkah IX: Menyusun Laporan Arus Kas (LAK)**

LAK disusun oleh unit pemerintahan yang melaksanakan fungsi perbendaharaan. Namun demikian, Fungsi Akuntansi Pemda masih bisa menyusun LAK ini untuk rekonsiliasi dengan LAK yang disusun oleh Fungsi Perbendaharaan. Penyusunan laporan arus kas ini dilakukan dengan menggunakan metode langsung (*direct method*) terhadap seluruh transaksi yang dilakukan secara kas. Hal ini berarti bahwa laporan arus kas hampir menyerupai laporan realisasi anggaran karena pendapatan dan belanja serta pembiayaan semua dicatat berdasarkan atas asas kas (*cash basis*). Pada dasarnya LAK ini disusun berdasarkan LRA daerah dan Neraca.

Contoh bentuk Laporan Arus Kas, baik untuk laporan semesteran maupun untuk laporan akhir tahun bentuknya sama, adalah sebagai berikut :

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0
Metode Langsung

| Uraian   | Jumlah               |      |
|--|----------------------|------|
|  | 20X1                 | 20X0 |
| 1  | 2                    | 3    |
| <b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>                       |                      |      |
| <b>Arus Kas Masuk</b>  |                      |      |
| Penerimaan Pajak Daerah                                      | 30.000.000           |      |
| Penerimaan Retribusi Daerah                                  | 20.000.000           |      |
| Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan |                      |      |
| Penerimaan Lain-lainPAD yang Sah                             |                      |      |
| Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak                             |                      |      |
| Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam                  |                      |      |
| Penerimaan Dana Alokasi Umum                                 | 500.000.000          |      |
| Penerimaan Dana AlokasiKhusus                                |                      |      |
| Penerimaan Dana Otonomi Khusus                               |                      |      |
| Penerimaan Dana Penyesuaian                                  |                      |      |
| Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak                       |                      |      |
| Penerimaan Bagi Hasil Lainnya                                |                      |      |
| Penerimaan Hibah   |                      |      |
| Penerimaan Dana Darurat                                      |                      |      |
| Penerimaan Lainnya   |                      |      |
| Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa                        |                      |      |
| <b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>                                 | <b>550.000.000</b>   |      |
| <b>Arus Keluar Kas</b>                                       |                      |      |
| Pembayaran Pegawai   | 550.000.000          |      |
| Pembayaran Barang  | 25.000.000           |      |
| Pembayaran Bunga   |                      |      |
| Pembayaran Subsidi   |                      |      |
| Pembayaran Hibah   |                      |      |
| Pembayaran Bantuan Sosial                                    |                      |      |
| Pembayaran Tak Terduga                                       |                      |      |
| Pembayaran Bagi Hasil Pajak                                  |                      |      |
| Pembayaran Bagi Hasil Retribusi                              |                      |      |
| Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya                     |                      |      |
| Pembayaran Bantuan Keuangan                                  | 150.000.000          |      |
| Pembayaran Kejadian Luar Biasa                               |                      |      |
| <b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>                                | <b>725.000.000</b>   |      |
| <b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>                | <b>(175.000.000)</b> |      |
| <b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>                     |                      |      |
| <b>Arus Masuk Kas</b>  |                      |      |
| Pencairan Dana Cadangan                                      |                      |      |
| Penjualan atas Tanah   |                      |      |
| Penjualan atas Peralatan dan Mesin                           |                      |      |
| Penjualan atas Gedung dan Bangunan                           |                      |      |
| Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan                   |                      |      |
| Penjualan Aset Tetap   |                      |      |
| Penjualan Aset Lainnya                                       |                      |      |
| Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan              |                      |      |
| Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen                  |                      |      |
| <b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>                                 |                      |      |
| <b>Arus Keluar Kas</b>                                       |                      |      |
| Pembentukan Dana Cadangan                                    |                      |      |
| Perolehan Tanah  |                      |      |
| Perolehan Peralatan dan Mesin                                | 30.000.000           |      |
| Perolehan Gedung dan Bangunan                                |                      |      |
| Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan                        |                      |      |
| Perolehan Aset Tetap Lainnya                                 |                      |      |
| Perolehan Aset Lainnya                                       |                      |      |
| Penyertaan Modal Pemerintah Daerah                           | 250.000.000          |      |
| Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen                 |                      |      |
| <b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>                                | <b>280.000.000</b>   |      |
| <b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>              | <b>(280.000.000)</b> |      |

| Uraian   | Jumlah               |      |
|--|----------------------|------|
|  | 20X1                 | 20X0 |
| <b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>                             |                      |      |
| <b>Arus Masuk Kas</b>  |                      |      |
| Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat                             |                      |      |
| Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Daerah Lainnya                    |                      |      |
| Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank                        | 100.000.000          |      |
| Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bukan Bank                  |                      |      |
| Pinjaman Dalam Negeri – Obligasi                                     |                      |      |
| Pinjaman Dalam Negeri – Lainnya                                      |                      |      |
| Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara                 |                      |      |
| Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah                 |                      |      |
| Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya         |                      |      |
| <b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>   | <b>100.000.000</b>   |      |
| <b>Arus Keluar Kas</b>   |                      |      |
| Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat            |                      |      |
| Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Daerah Lainnya   |                      |      |
| Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank       |                      |      |
| Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bukan Bank |                      |      |
| Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Obligasi                    |                      |      |
| Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lainnya                     |                      |      |
| Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara                          |                      |      |
| Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah                          |                      |      |
| Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya                  |                      |      |
| <b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>  |                      |      |
| <b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</b>                      | <b>100.000.000</b>   |      |
| <b>Arus Kas dari Aktivitas Transitoris</b>                           |                      |      |
| <b>Arus Masuk Kas</b>  |                      |      |
| Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga                                  |                      |      |
| <b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>   |                      |      |
| <b>Arus Keluar Kas</b>   |                      |      |
| Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)                           |                      |      |
| <b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>  |                      |      |
| <b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris</b>                    | <b>(355.000.000)</b> |      |
| <b>Kenaikan/Penurunan Kas</b>  |                      |      |
| <b>Saldo Awal Kas di BUD &amp; Kas di Bendahara Pengeluaran</b>      | <b>611.000.000</b>   |      |
| <b>Saldo Akhir Kas di BUD</b>  | <b>256.000.000</b>   |      |
| <b>Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran</b>                      |                      |      |
| <b>Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan</b>                       |                      |      |
| <b>Saldo Akhir Kas</b>   | <b>256.000.000</b>   |      |

Kuasa BUD

PPKD/BUD

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.....

Langkah X : Menyusun Catatan atas Laporan Keuangan

Setelah LRA, LO, LPE, Neraca, LP SAL, dan LAK dapat disusun maka Tenaga Akuntansi Fungsi Akuntansi kemudian menyusun Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang menjelaskan berbagai hal terkait dengan laporan keuangan yang disajikan sehingga laporan keuangan

tersebut dapat dimengerti dan dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Informasi yang harus ada dalam CALK adalah sebagai berikut :

**PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

|                  |   |  |            |
|------------------|---|--|------------|
| <b>PENGANTAR</b> |   |  |            |
| <b>BAB I</b>     | <b>PENDAHULUAN</b>  |  |            |
|                  | 1.1   | Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah                    |            |
|                  | 1.2   | Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah                       |            |
|                  | 1.3   | Sistematika penulisan catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah              |            |
|                  |   |  |            |
| <b>BAB II</b>    | <b>IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH</b>             |  |            |
|                  | 2.1   | Ikhtisar pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Daerah                      |            |
|                  | 2.2   | Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan        |            |
|                  |   |  |            |
| <b>BAB III</b>   | <b>PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH</b>              |  |            |
|                  | 3.1   | Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan Pemerintah Daerah |            |
|                  |   | 3.1.1  | Pendapatan |
|                  |   | 3.1.2  | Beban      |
|                  |   | 3.1.3  | Pembiayaan |
|                  |   | 3.1.4  | Belanja    |
|                  |   | 3.1.5  | Transfer   |
|                  |   | 3.1.6  | Aset       |
|                  |   | 3.1.7  | Kewajiban  |
|                  |   | 3.1.8  | Ekuitas    |
|                  |   |  |            |
| <b>BAB IV</b>    | <b>PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH</b> |  |            |
|                  |   |  |            |
| <b>BAB V</b>     | <b>PENUTUP</b>  |  |            |

Penyusunan CaLK tersebut diatas secara rinci dijelaskan sebagaimana berikut dibawah ini :

**Bab I Pendahuluan**

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Bagian ini dapat diisi dengan maksud dan tujuan sesuai isi dari Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) no.01 tentang Penyajian Laporan Keuangan. Pada PSAP tersebut diatur tujuan umum dan tujuan khusus penyajian laporan keuangan. Selain itu Pemerintah Daerah dapat menambahkan sendiri maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan dari sudut pandang akuntabilitas dan transparansi terkait dengan adanya otonomi daerah. Bagian ini dapat disiapkan sendiri oleh Fungsi Akuntansi Pemda beserta stafnya.

### Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Bagian ini dapat diisi dengan berbagai regulasi yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah mulai dari Undang-undang sampai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri termasuk juga Buletin Teknis (Bultek) yang dikeluarkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP). Akan lebih baik jika pasal dan ayat yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah juga disebutkan. Bagian ini dapat disiapkan sendiri oleh Fungsi Akuntansi Pemda beserta stafnya.

### Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Bagian ini diisi dengan kerangka atau struktur penulisan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya diatas. Bagian ini dapat disiapkan sendiri oleh Fungsi Akuntansi Pemda beserta stafnya.

## **Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

### Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Bagian ini dapat diisi dengan ikhtisar indikator dan pencapaian kinerja kegiatan operasional yang berdimensi keuangan dalam suatu periode pelaporan. Pencapaian kinerja keuangan yang telah ditetapkan dijelaskan secara obyektif. Keberhasilan pencapaian kinerja dapat diketahui berdasarkan tingkat efisiensi dan efektivitas suatu program dan kegiatan. Efisiensi dapat diukur dengan membandingkan keluaran (*output*) dengan masukan (*input*). Sedangkan Efektivitas diukur dengan membandingkan hasil (*outcome*) dengan target yang ditetapkan.

Pembahasan mengenai kinerja keuangan harus dihubungkan dengan tujuan dan sasaran dari rencana strategis pemerintah dan indikator sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ikhtisar pembahasan kinerja keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

harus:

- (a) Menguraikan strategi dan sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan;
- (b) Memberikan gambaran yang jelas atas realisasi dan rencana kinerja keuangan dalam satu entitas pelaporan; dan
- (c) Menguraikan prosedur yang telah disusun dan dijalankan oleh manajemen untuk dapat memberikan keyakinan yang beralasan bahwa informasi kinerja keuangan yang dilaporkan adalah relevan dan andal;

Pembahasan mengenai kinerja keuangan harus:

- (a) Meliputi baik hasil yang positif maupun negatif;
- (b) Menyajikan data historis yang relevan;
- (c) Membandingkan hasil yang dicapai dengan tujuan dan rencana yang telah ditetapkan;
- (d) Menyajikan informasi penjelasan lainnya yang diyakini oleh manajemen akan dibutuhkan oleh pembaca laporan keuangan untuk dapat memahami indikator, hasil, dan perbedaan yang ada dengan tujuan atau rencana.

Untuk lebih meningkatkan kegunaan informasi, penjelasan entitas pelaporan harus juga meliputi penjelasan mengenai apa yang semestinya dilakukan dan rencana untuk meningkatkan kinerja program. Bagian ini dapat disiapkan dengan meminta data ke Badan Perencanaan Daerah atau meminta Laporan Kinerja (LAKIP) ke setiap SKPD dan SKPKD-PPKD.

#### Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

Bagian ini dapat diisi dengan penjelasan atas keterbatasan dan kesulitan yang penting sehubungan dengan pengukuran dan pelaporan kinerja keuangan yang harus diungkapkan sesuai dengan relevansinya atas indikator kinerja yang diuraikan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Keterbatasan yang relevan akan beragam dari satu program

ke program lainnya, namun biasanya faktor yang dibahas termasuk, antara lain:

- (a) Kinerja biasanya tidak dapat diungkapkan secara utuh dengan hanya menggunakan satu indikator saja;
- (b) Indikator kinerja tidak dapat memperlihatkan alasan mengapa kinerja berada pada tingkat yang dilaporkan; dan
- (c) Melihat indikator kuantitatif secara eksklusif sering kali menghasilkan konsekuensi yang tidak diinginkan.

Oleh karena itu, indikator kinerja harus dilengkapi dengan informasi penjelasan yang sesuai. Informasi penjelasan ini akan membantu pengguna memahami indikator yang dilaporkan, mendapat gambaran mengenai kinerja keuangan entitas pelaporan, dan mengevaluasi pentingnya faktor yang mendasari yang mungkin mempengaruhi kinerja keuangan yang dilaporkan.

Informasi penjelasan mungkin termasuk, sebagai contoh, informasi mengenai faktor yang substansial yang berada di luar kendali entitas, dan informasi mengenai faktor-faktor yang membuat entitas mempunyai pengaruh penting. Bagian ini dapat disiapkan dengan meminta data ke Badan Perencanaan Daerah atau meminta Laporan Kinerja (LAKIP) ke setiap SKPD dan SKPKD-PPKD.

### **Bab III Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

#### **Rincian dari penjelasan setiap pos-pos pelaporan keuangan Pemerintah Daerah**

Penjelasan setiap pos-pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bagian yang paling dominan dalam suatu CaLK karena menjelaskan secara rinci aktivitas pemerintah pada setiap pos akun. Pada dasarnya ada 2 (dua) jenis penjelasan pos-pos dalam laporan keuangan yaitu :

- (a) Pos Pendapatan, Beban, Pembiayaan, Belanja dan Transfer

Penjelasan rinci atas pos ini dijelaskan minimal sampai dengan kode rekening jenis. Hal yang disajikan adalah realisasi tahun berjalan



dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya dan dibandingkan dengan anggaran murni dan perubahannya. Setiap rupiah yang disajikan pada pos tersebut diberi penjelasan mengapa lebih tinggi atau lebih rendah daripada tahun lalu serta penjelasan mengapa melebihi atau kurang dari anggarannya khususnya anggaran perubahan. Setiap pos juga sebaiknya dijelaskan dengan diagram, misalnya diagram pie yang menjelaskan komposisi prosentasi pos tersebut dibandingkan dengan pos pada klasifikasi rekening yang lebih tinggi (kelompok atau akun).

(b) Pos Aset, Kewajiban, dan Ekuitas

Penjelasan rinci atas pos ini dijelaskan minimal sampai dengan kode rekening jenis. Hal yang disajikan adalah nilai pos tahun berjalan dan dibandingkan dengan nilai pos tahun sebelumnya. Setiap rupiah yang disajikan pada pos tersebut diberi penjelasan mengapa lebih tinggi atau lebih rendah daripada tahun lalu. Setiap pos juga sebaiknya dijelaskan dengan diagram, misalnya diagram pie yang menjelaskan komposisi prosentasi pos tersebut dibandingkan dengan pos pada klasifikasi rekening yang lebih tinggi (kelompok atau akun).

Bagian ini dapat disiapkan sendiri oleh Fungsi Akuntansi Pemda beserta stafnya dengan tambahan informasi dari pihak terkait di SKPD dan SKPKD-PPKD.

#### **Bab IV Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan Pemerintah Daerah**

Suatu entitas pelaporan mengungkapkan hal-hal berikut ini apabila belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, yaitu:

- (a) domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi tempat entitas tersebut berada;
- (b) penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya;
- (c) ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya.

Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan kejadian-kejadian penting selama tahun pelaporan, seperti:

- (a) Penggantian manajemen pemerintah daerah selama tahun berjalan;
- (b) Kesalahan manajemen pemerintah daerah terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen baru;
- (c) Komitmen atau kontinjensi yang tidak dapat disajikan pada Neraca; dan
- (d) Penggabungan atau pemekaran entitas tahun berjalan.
- (e) Kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya adanya pemogokan yang harus ditanggulangi pemerintah.

Bagian ini dapat disiapkan sendiri oleh Fungsi Akuntansi Pemda beserta stafnya.

## **Bab V Penutup**

Bagian ini berisi paragraf penutup.